

Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 14 Tahun 2025 Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2025

PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2025



BUPATI PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025 perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Negara (Lembaran Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 2021 Indonesia Tahun Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6736);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

- 13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
- 21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

- 22. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
- 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 204);
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 542);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 85);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Pesisir Barat 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);

- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 32);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 72);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 4);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 84);
- 32. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 501);
- 33. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 515);

34. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 531), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Noor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 546);

Memperhatikan: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Invenatrisasi Kodefikasi Pemutakhiran Klasifikasi, dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Invenatrisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.

- 4. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
- 6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
- 7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 8. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 9. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- 10. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Dasar Pemerintah Daerah.
- 11. Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RAPBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- 12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 13. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 14. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat Perubahan PPAS adalah rancangan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah.
- 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di setujuin oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
- 18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
- 19. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
- 20. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam suatu program.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanya pada tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan;

yang menimbulkan penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

- (2) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dan mernperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUAdan PPAS;
- (3) Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan memperhatikan. visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam perubahan perubahan RKPD Tahun 2025, ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dengan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1), dapat dilaksanakan dengan kriteria:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayananan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalarn tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat meugikat;
- c. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pernerintah maupun masyarakat;

- d. dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan Iatau Renstra Perangkat Daerah;
- e. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pernbangunan daerah; dan
- f. dilakukan jika kegiatan danjatau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelurnnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil program.

Pasal 4

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan dan dasar penyusunan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2025.

Pasal 5

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN I

TAHUN 2025

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN

PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Perubahan RKPD 2025 disusun berpedoman pada:

- a. Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029; dan
- b. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan I Tahun 2025.

BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui pada tanggal 2025

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

Diundangkan di Krui pada tanggal

2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TEDI ZADMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025 NOMOR

Lampiran Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor: Tahun 2025

Tentang : Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun

2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH **TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

BAB I	PEN	DAHULUAN	I – 1
	1.1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I – 3
	1.3	Hubungan Antar Dokumen	I – 6
	1.4	Maksud dan Tujuan	
	1.5	Sistematika Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD	I – 11
BAB II	EVA	LUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025	II - 1
	2.1	Evaluasi RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I	
		Tahun 2025	II – 1
	2.2	Permasalahan Pembangunan Perubahan RKPD	
		Tahun 2025	II - 112
BAB III	KER	ANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III - 1
	3.1	Kerangka Ekonomi Daerah	III – 1
	3.2	Kerangka Keuangan Daerah	III - 18
BAB IV	SAS	ARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV - 1
	4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV – 2
	4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025	IV - 6
	4.3	Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Pesisir Barat	IV - 34
BAB V	REN	ICANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V - 1
	5.1	Program dan Kegiatan Prioritas Daerah	V - 22
	5.2	Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pendanaan	V - 34
BAB VI	PEN	UTUP	VI - 1

Ι

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat	
	Semester I Tahun 2025	II – 3
Gambar 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung	
	Tahun 2024	II – 4
Gambar 2.3	PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	
	Tahun 2024	II – 5
Gambar 2.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota	
	Se Provinsi Lampung Tahun 2024	II – 6
Gambar 2.5	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	
	Tahun 2024	II – 7
Gambar 2.6	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se Provinsi	
	Lampung Tahun 2024	II – 8
Gambar 2.7	Indeks Gini Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	
	Tahun 2023	II – 8
Gambar 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat	
	Tahun 2020-2024	III – 8
Gambar 3.2	PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Pesisir Barat	
	Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	III – 9
Gambar 3.3	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat	
	Tahun 2019-2024	III - 10
Gambar 3.4	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pesisir Barat	
	Tahun 2020-2024	III - 11
Gambar 3.5	Indeks Gini Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2024	III – 12
Gambar 3.6	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pesisir Barat	
	Tahun 2020-2024	III - 13
Gambar 3.7	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat	
	Triwulan I Tahun 2025	III - 21
Gambar 3.8	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan I	
	Tahun 2025	III - 26
Gambar 3.9	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat	
	Triwulan I Tahun 2025	III - 29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran Makro RKPD Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan	
	Triwulan I Tahun 2024	
Tabel 2.2	Pencapaian Indikator Kinerja Utama RKPD Kabupaten Pesisir Barat	
	sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	II - 9
Tabel 2.3	Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pesisir Barat	
	sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	II - 11
Tabel 2.4	Pencapaian SPM Bidang Pendidikan sampai dengan Triwulan I	
	Tahun 2025	II - 22
Tabel 2.5	Pencapaian SPM Bidang Kesehatan sampai dengan Triwulan I	
	Tahun 2025	II - 23
Tabel 2.6	Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	II - 25
Tabel 2.7	Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan	
	Permukiman sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	II - 25
Tabel 2.8	Pencapaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban	
	Umum serta Perlindungan Masyarakat sampai dengan Triwulan I	
	Tahun 2025	II - 26
Tabel 2.9	Pencapaian SPM Bidang Sosial sampai dengan Triwulan I	0
145012.5	Tahun 2025	II - 29
Tabel 2 10	Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada	11 2)
145012.10	Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025	II - 29
Tahel 2 11	Skala Nilai Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah	11 2)
Tabel 2.11	Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	II _ 37
Tabel 2.12	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan	11 – 37
Tabel 2.12	Tahun Berjalan Kabupaten Pesisir Barat	11 40
Tabal 2 12	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat	11 – 40
1 abel 2.13	Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025	II 11 <i>1</i>
Tabal 2.1		11 -114
raber 5.1	PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Pesisir Barat Menurut	111 2
Tabal 2.2	Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)	111 – Z
Tabel 3.2	Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat Pendagarkan Langgan Hasha Tahun 2020, 2024 (dalam %)	111 4
т-b-1 2 2	Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (dalam %)	111 – 4
raber 3.3	PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat	
	Tahun 2020-2024 (milyar rupiah)	III - 6
Tabel 3.4	PDRB ADHK Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat	
m 1 10 f	Tahun 2020-2024 (milyar Rupiah)	
Tabel 3.5	Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Pesisir Barat	
m 1 10 6	Tahun 2020-2024	III – 8
Tabel 3.6	Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	*** 40
	terhadap Total PDRB Tahun 2020-2024 (persen)	III – 12
Tabel 3.7	Sasaran Makro Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat	
	Tahun 2025	III – 18
Tabel 3.8	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat	
	Triwulan I Tahun Anggaran 2025	III – 21
Tabel 3.9	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat	
	APBD TA 2022 – 2024	III – 22
Tabel 3.10	Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan	
	Tahun 2025	III – 22
Tabel 3.11	Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat	
	Perubahan Tahun 2025	
Tabel 3.12	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan I	

	Tahun 2025	III - 26
Tabel 3.13	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat APBD	
m 1 1044	TA 2022-2024	III – 27
Tabel 3.14	Target Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan	111 20
Tabal 2.15	Tahun 2025 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat	111 – 28
Tabel 5.15	Triwulan I Tahun 2025	III – 30
Tabel 3 16	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat APBD	111 50
145015110	TA 2022-2024	III – 30
Tabel 3.17	Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat	
	Perubahan Tahun 2025	III – 30
Tabel 4.1	Matriks Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	
	Menurut Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam	
	Perubahan RKPD Tahun 2025	IV – 2
Tabel 4.2	Keselarasan Program Prioritas Pemerintah Pusat, Provinsi	
m 1 140	Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	IV – 7
Tabel 4.3	Keselarasan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan	
	Prioritas Pembangunan Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025	IV O
Tabel 4.4	Keselarasan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	1V – 9
Tabel 4.4	dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	IV - 9
Tabel 4.5	Keselarasan Target Sasaran Makro Antara Pemerintah Pusat,	1
	Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesisir	
	Barat Perubahan Tahun 2025	IV - 10
Tabel 4.6	Program Prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat	
	Tahun 2025 dalam RPJMD Tahun 2021-2026	IV - 13
Tabel 4.7	Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026	
m 1 140	terhadap Pencapaian Tujuan SDGs Kabupaten Pesisir Barat	IV – 26
Tabel 4.8	Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026	111 22
Tabel 4.9	terhadap Pencapaian SPM Kabupaten Pesisir Barat Arah Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program Pembangunan	10 - 32
1 abel 4.9	RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037	IV - 37
Tabel 5.1	Pagu Indikatif Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	10 37
10001011	Prioritas Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2025	V – 3
Tabel 5.2	Sinkronisasi Program Kabupaten Pesisir Barat dengan Program	
	Prioritas Nasional Perubahan Tahun 2025	V - 24
Tabel 5.3	Sinkronisasi Program Kabupaten Pesisir Barat untuk Pengentasan	
	Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025	V – 27
Tabel 5.4	Sinkronisasi Program Kabupaten Pesisir Barat dengan Program	17 00
T-1-1 5 5	Prioritas Provinsi Lampung Perubahan Tahun 2025	V – 29
Tabel 5.5	Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2025	W_ 21
Tabel 5.6	Prioritas Daerah, Sasaran Daerah dan Urusan Pemerintahan	v – 31
1 4001 5.0	Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2025	V - 44
Tabel 5.7	Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan berdasarkan pada peran, fungsi dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan pada kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang baik secara kualitas maupun kuantitas merupakan salah satu tolok ukur awal dalam penilaian keberhasilan pembangunan daerah. Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25 Tahun 2004) adalah landasan hukum utama bagi pemerintah pusat maupun daerah di bidang perencanaan pembangunan. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan turut melibatkan peran aktif dari masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Permendagri No. 86 Tahun 2017) mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan prioritas pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah merupakan dokumen perencanaan yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan dalam sisa tahun anggaran berjalan. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2025 berikut Pemutakhirannya dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 berikut Perubahannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 dan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029 serta RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 dalam hal untuk mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Dokumen Perubahan RKPD memiliki peran yang sangat strategis bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, terlebih dalam kondisi penyesuaian perubahan kerangka ekonomi dan fiskal daerah dalam sisa pelaksanaan tahun perencanaan dan penganggaran. Dokumen perencanaan ini merupakan penjabaran dari rencana strategis ke dalam rencana operasional. Perubahan RKPD menjamin konsistensi antara

capaian tujuan perencanaan strategis ke dalam rencana operasional yang dapat diimplementasikan ke dalam program/kegiatan/sub kegiatan masing-masing perangkat daerah dilingkup pemerintah daerah. Dokumen perencanaan tahunan ini juga mengarahkan pada proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Perubahan RKPD juga menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPPAS), Rancangan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (Perubahan RKA-Perangkat Daerah), Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan RAPBD) dan Rancangan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah.

Berikutnya Perubahan RKPD menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan pemerintahan daerah (i) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (ii) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (iii) Urusan Pilihan; (iv) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; (v) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; (vi) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (vii) Unsur Kewilayahan (viii) Unsur Pemerintahan Umum serta instrumen untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan, target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan target kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan ini juga dapat menjadi acuan bagi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKJP) serta diharapkan dapat menyediakan informasi bagi pemenuhan penyusunan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) maupun penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP).

Perubahan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan tentunya harus bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika serta perubahan kondisi di daerah, walaupun sebagai dokumen perencanaan tetap harus memiliki kerangka-kerangka yang dapat diukur dan rasional. RKPD dapat diubah dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Permenadagri No. 86 Tahun 2017 seperti hal-hal di bawah ini:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran (SilPA) sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 ini pada dasarnya dilakukan berlandaskan pada:

- 1) Perubahan kerangka keuangan daerah menyebabkan terjadi perubahan dan/atau penyesuaian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2025 ini.
- 2) Perubahan struktur perekenomian daerah menyebabkan terjadinya perubahan target-target pada Renja Perangkat Daerah dikarenakan menyesuaiakan dengan kerangka ekonomi daerah yang mengalami koreksi;
- 3) Untuk memenuhi ketentuan peraturan, yaitu: (i) Peraturan Menteri Keuangan nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dan (ii) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya, maka diperlukan penaatan belanja untuk dapat memenuhi ketentuan pemenuhan belanja yang berasal dari DAU untuk Dukungan Penggajian PPPK Daerah,

Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Bidang Pendidikan, DAU Bidang Kesehatan dan DAU Bidang Pekerjaan Umum;

Perubahan RKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiran maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu/plafon indikatif yang bersumber pada APBD maupun sumber-sumber lain pendapatan yang sah yang ditempuh dengan tetap mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan pada uraian di atas dan dalam kerangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan demi terciptanya tertib dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran baik di tingkat Perangkat Daerah dan juga Pemerintah Daerah, maka Kabupaten Pesisir Barat menyusun dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 sebagai pedoman dalam penyempurnaan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat pada sisa Tahun Anggaran 2025.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
- 21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

- 22. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
- 24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 204);
- 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 542);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 85);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 32);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 72);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 4);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 84);

- 33. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 501);
- 34. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 515);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan pada Pasal 264 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa dokumen RKPD bersama dengan dokumen RPJPD dan RPJMD daerah adalah merupakan dokumen dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya memperhatikan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan APBD. Maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat menjadi landasan dalam penyusunan KUPA dan PPPAS APBD TA 2025 dan pada akhirnya akan menjadi dasar dalam menyusun Perubahan RAPBD TA 2025 ini.

Secara garis besar Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 berpedoman pada sejumlah dokumen perencanaan dari tingkat nasional maupun tingkat daerah, yaitu sebagai berikut:

1.3.1. RPJMN Tahun 2025-2029

RPJM Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 berlampirkan 4 (empat) dokumen, yaitu: (i) Lampiran I yang memuat Narasi RPJMN Tahun 2025-2029; (ii) Lampiran II yang memuat Proyek Prioritas Strategis RPJMN Tahun 2025-2029; (iii) Lampiran III yang memuat Matrik Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029; (iv) Lampiran IV yang memuat Arah Pembangunan Wilayah RPJMN Tahun 2025-2029.

RPJM Nasional tersebut menjadi acuan awal dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pesisir Barat, khususnya dalam menjabarkan program-program sektoral dan program kewilayahan/regional. Sesuai arahan RPJPN 2025-2045, sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2025-2029 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (*SDGs*). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 8 agenda asta cita.

1.3.2. Rancangan Awal RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

Rancangan Awal RPJMD Provinsi Lampung yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung adalah merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh kepala daerah terpilih pada saat kampanye yang secara garis besar menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan di Provinsi Lampung sehingga dapat menjadi pedoman penyusunan RKPD serta perencanaan penganggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Visi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 diarahkan untuk menuju Lampung Maju Indonesia Emas 2045 dengan tujuan. Visi tersebut didukung dengan 3 Misi Pembangunan, yaitu:

- 1) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif
- 2) Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif
- 3) Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas

Secara umum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung diarahkan untuk menyusun perencanaan untuk: (i) mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan inovatif; (ii) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan (iii) Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat dan Berkelanjutan; serta (iv). Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas.

1.3.3. RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045

RPJPD Kabupaten Pesisir Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2045. Pelaksanaan RPJPD 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodesasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan. Visi pembangunan jangka panjang daerah (20 tahun) Kabupaten Pesisir Barat yang dituangkan dalam RPJPD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut "Pesisir Barat Maju Mandiri dan Berkelanjutan". Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan daerah RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

- 1) Transformasi Sosial
- 2) Transformasi Ekonomi
- 3) Transformasi Tata Kelola
- 4) Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
- 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- 6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
- 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
- 8) Kesinambungan Pembangunan

Gambaran keberhasilan yang hendak dicapai tersebut ditempuh melalui 4 (empat) tema besar pada masing-masing tahapan pembangunan sebagaimana berikut:

Tahap I (Periode Tahun 2025-2029)

Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan

Tahap II (Periode Tahun2030-2034)

Percepatan Transformasi Pembangunan

Tahap III (Periode Tahun 2035-2039)

Eksistensi Daerah Skala Nasional

Tahap IV (Periode Tahun 2040-2045)

Perwujudan Visi Pembangunan

1.3.4. Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan dan merupakan penjabaran dari periode kedua RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Barat dan sebagai acuan bagi seluruh *stakeholders* di Kabupaten Pesisir Barat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2025-2029.

RPJMD disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Pesisir Barat, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kabupaten Pesisir Barat dengan setidaknya dapat menjawab empat pertanyaan dasar (1) kemana Kabupaten Pesisir Barat akan diarahkan pengembangannya dan tujuan yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; (2) bagaimana cara mencapai tujuan yang hendak dicapai; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai; (4) mekanisme pengendalian dan evaluasi RPJMD 2025-2029.

Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Pesisir Barat yang Sejahtera, Maju, Madani dan Religius sebagai Destinasi Wisata Terdepan" dapat diformulasikan dengan misi-misi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan Infrastruktur yang Berketahanan Pangan dan Tangguh Bencana serta Berkelanjutan
- 2) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Alam dan Ekonomi Kerakyatan
- 3) Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- 4) Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya
- 5) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1.3.5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037

Dalam proses penyusunan RKPD wajib melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan indikasi program pada RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037. Sinkronisasi perlu dijaga dalam upaya mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang sesuai dengan pola ruang. Sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam proses penggunaan lahan serta dalam upaya menjaga keseimbangan pertumbuhan wilayah sehingga mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah di daerah.

Penataan ruang Kabupaten Pesisir Barat bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Pesisir Barat sebagai destinasi pariwisata berbasis industri pertanian dan kelautan yang memperhatikan aspek kearifan lokal dan kelestarian lingkungan dengan kebijakan penataan ruang, terdiri atas :

- 1) pengembangan pariwisata berbasis wisata alam dan budaya dengan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- 2) pengembangan sistem permukiman yang berhirarki dan terpadu antara sistem perdesaan dan perkotaan dan pengembangan sistem prasarana wilayah;

- 3) pengembangan kawasan minapolitan dengan pengelolaan sumber daya lokal berbasis pengelolaan komoditas unggulan melalui proses industrialisasi modern yang ramah lingkungan;
- 4) pengembangan kawasan pertanian dalam mewujudkan agroindustri yang kompetitif dan terintegrasi antar sektor;
- 5) perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan kawasan lindung sesuai fungsi masing-masing dengan memperhatikan kearifan lokal; dan
- 6) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan negara.

Proses sinkronisasi termasuk dalam mengintegrasikan sasaran dan arah kebijakan dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang memuat rencana:

- 1) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- 2) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- 3) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- 4) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

1.3.6. Rencana Pembangunan Sektoral

RKPD perlu memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya yang menjadi suplemen dan/atau readliness bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, Beberapa dokumen perencanaan sektoral antara lain dokumen (i) Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (RAD SDG's), (ii) Pengaturan dan penetapan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Kementerian/Lembaga dan diterapkan pada Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Barat yang melaksanakan 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, (iii) Stategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Pesisir Barat, (iv) Rencana induk Kelitbangan Kabupaten Pesisir Barat dan (v) dokumen perencanaan sektoral lainnya yang dapat memberikan panduan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

1.3.7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran dari seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat daerah berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam lima tahun demi menunjang visi, misi dan arah kebijakan dari Bupati Pesisir Barat tahun 2025-2029.

Renstra juga menjadi dokumen perencanaan yang memuat target-target kinerja dari masing-masing perangkat daerah yang dirumuskan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang disusun berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan menjawab target-target pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan.

1.3.8. Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan basis data bahan penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 berdasarkan pada pencapain program/kegiatan/sub kegiatan hingga pada triwulan I Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 17 Februari 2025 tentang 900.1.1/640/SJ tentang Penysuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2017.

Berikutnya berdasarkan pada Pasal 353 ayat (1), Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan materi dalam penyusunan Rancangan Perubahan RKPD yang akan disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029 yang digunakan dalam penentuan Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Daerah (IKD) dari masing-masing urusan pemerintahan daerah yang diampu oleh Perangkat Daerah;
- 2) Mengacu pada Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang digunakan dalam proses perumusan program dan kegiatan tahunan yang berisi dengan tolok ukur, indikator kinerja sasaran dan juga pagu anggaran dalam tahun berjalan;
- 3) Mengacu pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu/plafon indikatif dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, sesuai dengan rencana program prioritas dan tema pembangunan pada rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2025;
- 4) Mengacu pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan periode triwulan I Tahun 2025 sebagaimana yang terangkum pada Bab II Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran dari Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025; dan
- 5) Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada sisa tahun berjalan (tahun perencanaan 2024).

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah untuk kurun waktu pelaksanaan sisa tahun 2025.

1.4.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Nota Pengantar Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pesisir Barat TA 2025 dan Perubahan PPAS APBD Kabupaten Pesisir Barat TA 2025 yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Nota Kesepakatan Perubahan PPAS antara DPRD Kabupaten Pesisir Barat dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya program dan kegiatan tersebut akan dijabarkan dalam Perubahan RKA-Perangkat Daerah, Perubahan RAPBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2025 dan DPPA TA 2025;
- 2) Menjadi pedoman/acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- 3) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional Perangkat Daerah dalam sisa waktu pelaksanaan tahun 2025;
- 4) Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan Urusan pemerintahan daerah, yaitu (i) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (ii) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (iii) Urusan Pilihan; (iv) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; (v) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; (vi) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (vii) Unsur Kewilayahan (viii) Unsur Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan daerah (yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya) dalam melalui capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan tahun 2025;
- 5) Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD Tahun 2025, Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025;
- 6) Menyediakan informasi bagi penyusunan dokumen-dokumen, kajian dan/atau laporan terkait perencanaan pembangunan dan penganggaran Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada relevansinya.

1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika yang diatur dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan RKPD, proses penyusunan Perubahan RKPD, kedudukan Perubahan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Pada subbab ini tidak perlu semua peraturanperundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturanperundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan Perubahan RKPD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan Perubahan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi hasil triwulan II Tahun 2025 memberikan gambaran mengenai capaian yang telah diraih oleh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan selama tahun 2025 berdasarkan pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan APBD Tahun 2025.

2.1. Evaluasi RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Mencakup gambaran kinerja dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2025. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dari kinerja pemerintah daerah.

Berikutnya, juga mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan RKPD tahun 2025 yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah.

2.2. Permasalahan Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2025

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan pelaksanaan dari Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Pada sub bab ini juga memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam proses peningkatan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada sisa tahun 2025.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

Mengemukakan kondisi ekonomi daerah dengan merujuk pada pencapaian kinerja daerah sampai dengan Triwulan I tahun perubahan RKPD, termasuk membandingkan dengan kondisi ekonomi nasional, regional. Berikutnya memberikan gambaran mengenai potensi dan juga tantangan ekonomi pada tahun perubahan RKPD.

3.2. Kerangka Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah pada Perubahan RKPD.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada perubahan RKPD tahun (n) berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun (n) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD dan/atau Renstra Perangkat Daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD pada periode pelaksanaan Perubahan RKPD tahun (n).

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun perubahan (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana perubahan (n).

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan triwulan I kedudukan tahun rencana perubahan (RKPD) dalam upaya pencapaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Memuat program prioritas daerah dalam upaya mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Tahun 2025-2029.

5.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pendanaan

Memuat rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan Tahun 2025 untuk mencapai prioritas dan sasaran daerah tahun 2025.

BAB VI PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan Perubahan RKPD diperlukan sinergisitas dan sinkronisasi yang profesional dan proposional di jajaran pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi kinerja pembangunan pada triwulan I Tahun 2025, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pembangunan yang telah ditentukan dalam kurun waktu Triwulan I tahun 2025 sebagai salah satu syarat dalam penyusunan Perubahan RKPD serta sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Banyak hal yang perlu dinilai untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat memberikan hasil dan capaian yang terbaik dalam pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, baik dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Barat serta Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 maupun Rancangan RPJMD dan Rentra Tahun 2025-2029 dan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025.

Pengukuran atau evaluasi secara triwulan atas target-target yang ditetapkan dilakukan untuk melihat tren capaian pada pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan hingga akhir pelaksanaan ditahun anggaran dimaksud. Dengan dasar tersebut, beberapa komponen indikator menjadi alat ukur dalam melakukan evaluasi yang dimaksud. Evaluasi kinerja pembangunan ini dilakukan terhadap indikator sektoral, realisasi keuangan daerah dan indikator kinerja pembangunan selama Triwulan I sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pada akhirnya, proses pengendalian dan evaluasi dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan terhadap dinamika yang dihadapi sehingga mampu memberikan rekomendasi yang efektif dan efisien dengan pendekatan struktural dan sistematis agar target-target yang telah ditetapkan mampu terealisasi. Rekomendasi juga dapat memberikan gambaran terkait dengan perubahan terhadap pencapaian target-target kinerja daerah dan perangkat daerah.

2.1. Evaluasi RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

2.1.1. Evaluasi Kinerja Indikator Pembangunan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Penetapan sasaran indikator makro pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pencapaian target-target pembangunan yang terangkum dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Berikut target sasaran makro yang terangkum dalam RKPD Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Makro RKPD Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Sasaran RKPD 2025	capaian sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,80-4,30	2,61*
2	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rupiah	33.57-34.15	35,62*
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,4	3,04*
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	13,04	12,64*
5	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,25	71.04*
6	Indeks Gini	Angka	0,30-0,29	0,315*
7	Nilai Tukar Pertani	Angka	110,04	124,98*

Sumber: RKPD Tahun 2025 (diolah)

*data tahun 2024

Berdasarkan pada tabel diatas, bahwa data capaian sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum tersedia atau belum dirilis oleh instansi yang berwenang mengeluarkan data capaian, dalam hal ini BPS Provinsi Lampung dan/atau BPS Kabupaten Pesisir Barat, sehingga data-data capaian yang disajikan sebagian besar masih menggunakan data capaian pada tahun 2024 yang lalu. Namun demikian, berdasarkan pada data capaian tersebut dapat memberikan gambaran terhadap gambaran perkembangan dari capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2025 mendatang berdasarkan pada tren series.

Lebih lanjut, analisis yang akan dipergunakan mempergunakan data capaian dari Pemerintah Provinsi Lampung. Sebagaimana disampaikan di awal bahwa data-data untuk Kabupaten Pesisir Barat tidak tersedia. Asumsinya analisis dengan menggunakan data capaian Provinsi Lampung sedikit banyak memberikan gambaran tentang kondisi di daerah.

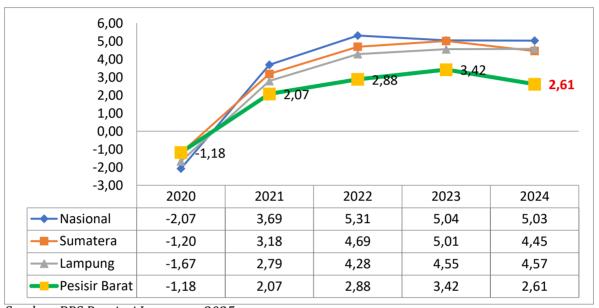
Gambaran mengenai capaian kinerja makro pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana yang ditetapkan pada RKPD Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pertumbuhan Ekonomi

Data capaian triwulan I tahun 2025 belum dipublikasi oleh BPS Provinsi Lampung sehingga masih menggunakan data capaian tahun 2024. Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2024 sebesar 2,61% atau menurun 0,81% dari tahun sebelumnya yang tercatat di angka 3,42%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat masih berada di bawah Provinsi Lampung yang mencatatkan nilai 4.57% dan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat di angka

5,03%. Perkembangan perekonomian Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 terkontraksi di angka -1,18%, kemudian di tahun 2021 mengalami pertumbuhan setelah keluar dari pandemi covid-19 yang tercata tumbuh 2,07%, tahun 2022 kembali tumbuh menjadi 2,88%. Tahun 2023 tumbuh 3,42% namun di tahun 2024 pertumbuhan ekonomi terjadi penurunan sebesar 0,81% dibanding tahun 2023, dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2024 tercatat di angka 2,61%. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat secara regional dan nasional di gambarkan dalam grafik di bawah ini.

Gambar 2.1 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat hingga Semester I Tahun 2025



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Merujuk pada publikasi Bank Indonesia Wilayah Lampung, Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 (q-to-q) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,11 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,65 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 39,78 persen. Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,47 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,66 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,96 persen.

Perekonomian Kabupaten Pesisir Barat dari sisi pengeluaran baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi yang cukup tinggi sekitar 70%. Hal ini berdasarkan data *time series* tahun 2022-2024 konsumsi rumah tangga berdasarkan harga berlaku cenderung meningkat dari 69,54% - 73,66%. Dari sisi lapangan usaha pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat masih ditopang oleh sektor primer, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, di kisaran 40% - 45%. Meskipun kontribusi sektor ini cenderung mengalami penurunan namun terdapat sektor lain mengalami peningkatan kontribusi, yaitu sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobi dan sepeda motor yang secara konstan tumbuh secara *time series* dari tahun 2020-2024 dengan tumbuh sekitar di kisaran 50,25%. Selain sektor tersebut terdapat beberapa sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan namun belum signifikan dari tahun 2020-2024, seperti transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan, Sosial Wajib, real estate, jasa pendidikan, jasa Kesehatan dan kegiatan sosial dan sektor lainnya.

Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat secara regional di Provinsi Lampung tahun 2024 menempati posisi terakhir (ke-15) dari 15 kabupaten/kota, yaitu 2,61% sedangkan Kota Bandar Lampung mencapai pertumbuhan tertinggi di Provinsi Lampung, yaitu 4,97%. Gambaran perbanding pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung digambarkan dalam grafik di bawah ini.

6,00 4,97 4.57 5,00 4,00 3,00 2,61 2,00 1,00 0,00 LAMP KPW KPB KBL ΚM KLB KLU KLT KLS KLTg KTGS KWY KMSJ **KPSW** KTB KTBB UNG R 2023 4,55 4,99 4,55 4,69 4,22 3,51 4,82 4,70 4,70 4,63 4,06 4,49 4,27 4,53 3.42 4.78 2024 4,57 2,61 4,97 4,88 4,36 4,10 4,62 4,62 4,62 4,01 4,65 4,58 3,90 4,58 4,75 4,55

Gambar 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

b) PDRB Perkapita ADHB

Data capaian triwulan I tahun 2025 masih belum dipublikasi oleh BPS Provinsi Lampung sehingga masih menggunakan data capaian tahun 2024. Capaian PDRB Perkapita berdasarkan nilai ADHB untuk Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024 tercatat di angka 35,612 (juta rupiah) atau naik 1,839 (juta rupiah) dari tahun 2023 yang tercatat di angka 33,782 (juta rupiah). Namun secara regional di Provinsi Lampung PDRB Kabupaten Pesisir Barat peringkat 12 dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Kabupaten Tulang Bawang menempati urutan tertinggi PDRB Perkapita disusul urutan kedua Kota Bandar Lampung dengan nilai masing - masing 67,625 (juta rupiah) dan 65,758 (juta rupiah), sedangkan untuk Kabupaten dengan nilai PDRB Perkapita terendah adalah Kabupaten Lampung Barat 31,341 (juta rupiah) dan Kabupaten Tanggamus dengan nilai 31,620 (juta rupiah). Jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional, Kabupaten Pesisir Barat masih berada di bawah PDRB Perkapita Provinsi Lampung sebesar 51,369 (jura rupiah) dan PDRB Perkapita Nasional sebesar 78,600 (juta rupiah).

Salah satu faktor yang mempengaruhi PDRB Perkapita adalah struktur ekonomi, dimana struktur ekonomi Kabupaten Pesisir Barat masih didominasi oleh 5 kategori lapangan usaha, yaitu yaitu Pertanian, kehutanan dan perikanan 42,93%, Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 16,68%, Kontruksi 8,07%, Pertambangan dan Penggalian 5,74% dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5,38%.

140 120 100 67,725 65,758 63,664 58,581 80 52,209 48,263 60 38,655 35,621 35,551 31 ,347 40 20 KPB KLTg KTGS KWY KMSJ KPWR KPSW KTBB KBI ΚM KLB KLU KLT KLS ■ 2024 | 35,62 | 65,76 | 48,26 | 31,35 | 48,21 | 49,27 | 53,89 | 63,66 | 31,62 | 38,66 | 58,58 | 43,31 | 35,55 | 67,73 | 52,21 **2**023 | 33,78 | 61,97 | 45,24 | 28,85 | 44,75 | 46,27 | 50,67 | 59,71 | 29,59 | 35,89 | 54,42 | 40,9 | 33,39 | 63,39 | 48,7

Gambar 2.3 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

c) Tingkat Pengangguran Terbuka

Capaian triwulan I tahun 2025 masih belum dipublikasi oleh BPS Provinsi Lampung sehingga data capaian masih menggunakan data capaian tahun 2024. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024 tercatat di angka 3,04% atau mengalami penurunan 0,43% dari tahun 2023 yang tercatata di angka 3,47%. Merujuk pada TPT Provinsi Lampung, dan Nasional, TPT Kabupaten Pesisir Barat tercatat lebih baik dimana TPT Provinsi Lampung dan Nasional, dimana masing –masing mencapai 4,19% dan 5,32% artinya TPT Kabupaten Pesisir Barat lebih baik dari pada TPT Provinsi Lampung maupun nasional.

Sementara itu, untuk level Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung nilai TPT Kabupaten Pesisir Barat berada pada urutan ke-4 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, dimana TPT terrendah terdapat di Kabupaten Lampung Barat dengan nilai 2,09% dan TPT Tertinggi terdapat di Kota Bandar Lampung dengan nilai TPT tertinggi senilai 7,44%. Gambaran perbandingan TPT Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung digambarkan dalam grafik di bawah ini.

8 7,44 7 5,85 6 4.84 5 4 12 4 3,19 3,27 3,04 2,85 3 2,09 2 1 0 **KPS** KLTg KTGS KWY KMSJ KPSR **KPB KBL** KLB KLU KLT KLS ктв ктвв KM W 2023 3.47 4,23 2,25 5,73 3,09 4,95 4,66 3,89 7,43 3,25 3,35 | 3,07 2,46 4,76 3,46 2024 3,04 7,44 3,71 2,09 5,85 3,02 4,84 3,33 3,19 | 3,27 2,85 4,36 4,39 3,23 4,12

Gambar 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

d) Tingkat Kemiskinan

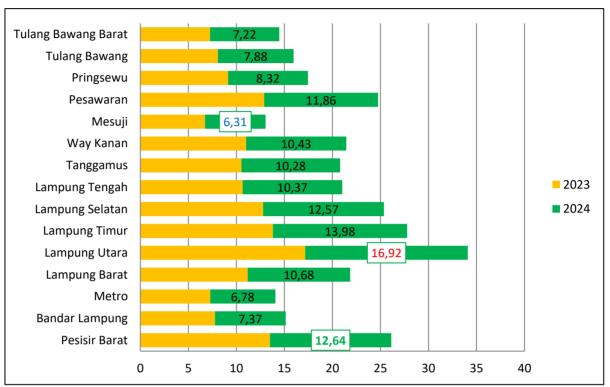
Capaian triwulan I tahun 2025 belum dipublikasi oleh BPS Kabupaten Provinsi Lampung sehingga data masih menggunakan data capaian tahun 2024. Capaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2024 tercatat sebesar 12,64% atau mengalami penurunan dari tahun 2023 yang tercatat sebesar 13,49%, penurunan sebesar 0,85 yang menunjukan kabar positif bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Sebelumnya di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,35 dari tahun tahun 2022 dengan nilai 13,84%. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Barat tahunn 2024 tercatat sebanyak 20,22 (ribu jiwa) dengan kedalaman kemiskinan (P1) tercatat di angka 2,10 dan dan tingkat keparahan kemiskinan (p2) di angka 0,49 dengan garis kemiskinan 566.040 rupiah/perkapita/bulan.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Lampung maupun nasional dimana tingkat kemiskinan masing – masing tercatat sebesar 10,69% dan 9,03%. Secara regional, tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Lampung ada di Kabupaten Lampung Utara dan lampung Timur yang tercatat masing – masing 16,92% dan 13,19% sedangkan tingkat kemiskinan terrendah ada di Kabupaten Mesuji dan Kota Metro yang tercatat masing – masing sebesar 6,31% dan 6,78%. Secara peringkat Kabupaten Pesisir Barat berada diurutan ke-13 dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Lampung.

Masih tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat lebih disebabkan pada belum meratanya sumber-sumber produksi, distribusi dan konsumsi di masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam mengakses pekerjaan yang juga terbatas. Selain itu keterbatasan sarana dan prasarana masyarakat juga merupakan salah satu penyebab masih tingginya angka kemiskinan. Meskipun capaian tahun 2024 ini memberikan gambaran bahwa target telah terpenuhi di tahun 2024 ini, namun

diperlukan usaha-usaha yang lebih nyata dan konkrit untuk menekan tingkat kemisinan di Kabupaten Pesisir Barat.

Gambar 2.5 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung
Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

e) Indeks Pembangunan Manusia

Capaian triwulan I tahun 2025 masih belum dipublikasi oleh BPS Provinsi Lampung sehingga masih menggnakan data capaian tahun 2024. Capaian Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024 berdasarkan UHH SP2020 tercatat di angka 71,04 atau naik 0,64 poin dari tahun 2023 yang tercatat di angka 70,40. Jika dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Lampung dan Nasional, IPM Kabupaten Pesisir Barat masih di bawah capaian IPM Provinsi Lampung dan Nasional yang masing-masing tercatat di angka 73,13 dan 75,02.

Sementara perbandingan IPM kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Pesisir Barat berada diurutan ke-11 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Dimana IPM tertinggi dicapai oleh Kota Bandar Lampung yang tercatat di angka 80,46 dan capaian terendah IPM di Kabupaten Mesuji dengan angka IPM 68,59.

Masih rendahnya nilai IPM Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan masih rendahnya derajat status pendidikan dan kesehatan masyarakat. Kurangnya akses pendidikan dan kesehatan merupakan faktor utamanya. Ketersediaan infrastruktur serta kondisi geografis daerah turut mempengaruhi kesulitan masyarakat dalam mengakses pendidikan dan kesehatan. Terlebih dari sisi kemampuan daya beli masyarakat yang belum bisa bersaing dengan daerah lain. Gambaran perbandingan IPM kabupaten/kota di Provinsi Lampung digambarkan dalam grafik di bawah ini.

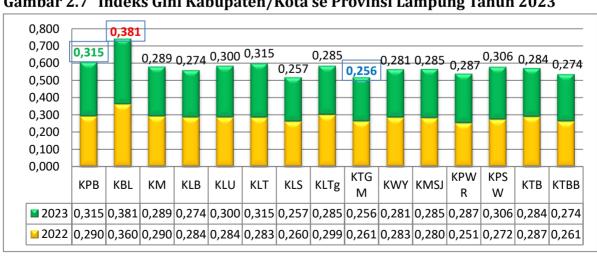
180,00 160.00 140.00 120,00 80,46 8 71,04 68.59 100,00 80,00 60,00 40.00 20,00 0,00 KPB KTBB KBL ΚM KLB KLU KLT KLS KLTg KTGS KWY KMSJ KPWR KPSW KTB 80,46 2024 71.04 80,41 72,41 71,42 73.05 72,15 74,16 70,54 71,71 68,59 70,24 73,84 72.24 70.04 79.85 70.78 71.55 73.39 69.93 70.51 73.11 71.56 69.38 2023 70.40 79.86 71.72 72.44 67.79 69.46

Gambar 2. 6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se Provinsi **Lampung Tahun 2024**

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

f) Indeks Gini

Capaian gini rasio triwulan I tahun 2025 maupun tahun 2024 belum dipubikasi oleh BPS Provinsi Lampung sehingga masih menggunakan data capaian tahun 2023. Rasio gini Kabupaten Pesisir Barat tahun 2023 tercatat sebesar 0,315 atau meningkat 0,015 point dari tahun 2022 yang tercatat sebesar 0.290. Jika dibandingkan dengan Provinsi Lampung dengan nilai capaian 0,324 dan nasional yang berada pada angka 0.388 maka rasio gini Kabupaten Pesisir Barat masih lebih baik. Sementara jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, rasio gini Kabupaten Pesisir Barat berada diperingkat 13 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Kabupaten Tanggamus memiliki rasio gini terendah dia ngka 0,256 dan Kota Bandar Lampung tertinggi di angka 0,381. Ketimpangan pendapatan di daerah lebih disebabkan pada kondisi struktur ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya merata. Jumlah penduduk miskin dan juga jumlah pengangguran turut mempengaruhi capaian ini.



Gambar 2.7 Indeks Gini Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2023

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

2.1.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama RKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi target utama bagi Kepala Daerah selama kurun waktu periode RPJMD yang dibagi menjadi 5 (lima) tahun RKPD. Berikut target Indikator Kinerja Utama yang terangkum dalam RKPD Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama RKPD Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian s.d. TW I 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Misi I Meningkatkan Kuali	itas Sumber Daya Ma	nusia secara Berkead	ilan, Maju d	lan Berday	a Saing
Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Daerah yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,25	71,04*
Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saig Pemuda dan Penduduk Usia Kerja	2. Menurunnya Jumlah Pengangguran Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,41	3,04*
Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	3. Terwujudnya Kesetaraan gender dan Perlindungan Anak yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	95,24	95,18
	Wilayah dengan Men	dengan Konsep Pemb nperhatikan Aspek Mi			ık
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kewilayahan	1. Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Transportasi Daerah	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	45,05	44,68
	2. Tersedianya Pemukiman Penduduk yang Sehat dan Berkualitas	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Daya Air Yang Sehat Dan Aman	Persen	43,50	45,41
	3. Tersedianya Sumber Daya Air untuk Mendukung Kedaulatan Pangan	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	57,50	43,66
	4. Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	74,53	76,45*

	5. Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana	Angka	180.24	188,85
Misi III		-	•		
	onomi Kerakyatan l	Melalui Peningkatan P	roduktivita	s Sektor Po	ertanian
dan Perikanan Meningkatkan	1. Meningkatnya	Pertumbuhan	Persen	3.80-	2,61*
Pembangunan Ekonomi Daerah dengan Fokus pada	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Ekonomi	rersen	4,30	2,01
Potensi Lokal	Daerah	DDDD Dardaraita	T4-	22.57	25 (41*
	2. Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	33,57 – 34,15	35,641*
	3. Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap Perekonomian Masyarakat	Nilai Tukar Petani (NTP)	Angka	110,04	124,98
	4. Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	Angka	0.30	0,315*
	5. Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah	Tingkat Kemiskinan Daerah	Persen	13.04	12,64
Misi IV					
		I <mark>nggulan Daerah yang</mark> Pertumbuhan	Berpijak Pa Persen	ada Kearifa 25.00	
Meningkatkan Pariwisata Daerah yang Berdaya Saing	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Persen	25.00	8,00
Misi V	1	Mancanegara	I	1	
		ng Berkualitas Melalu		a Pemerin	tahan
yang Bersin dan Pro Meningkatkan	1. Terwujudnya	tan Sinergitas Antar I Indeks Kepuasan	Angka	88.00	87,47*
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	Pelayanan Publik yang Berkualitas	Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Aligka	00.00	07,47
	2. Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Nilai SAKIP	Huruf/ Predikat	В	В*
	3. Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas	Opini BPK	Huruf/ Predikat	WTP	WTP*
	4. Meningkatnya Pembangunan di Desa/Pekon	Indeks Desa Membangun	Angka	0.7000	0.6988*

Sumber : Data Diolah, 2025

Berdasarkan pada tabel diatas, beberapa data realisasi capaian sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum tersedia atau belum dirilis oleh instansi yang berwenang mengeluarkan data capaian, dalam hal ini BPS. Sehingga data-data capaian yang disajikan masih menggunakan data capaian pada tahun 2024 yang lalu. Namun demikian, berdasarkan pada data capaian tersebut dapat memberikan gambaran terhadap gambaran perkembangan dari capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2025 mendatang.

Secara umum, sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dari 18 indikator kinerja utama terdapat beberapa sasaran pembangunan daerah telah mencapai target sasaran. Namun demikian, disisi lain beberapa sasaran juga belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Diperlukan komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk dapat menyelesaikan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai rangkaian pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah.

2.1.3. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan pada evaluasi hasil RKPD sampai dengan triwulan I Tahun 2025 juga didapatkan perhitungan terhadap Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang merupakan indikator pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan 40 Urusan Pemerintahan Daerah dan dilaksanakan oleh 39 Perangkat Daerah. Capaian IKD tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Aspek/Fokus/Urusan Pemerintahan Daerah/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
I.I	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,80-4,30	2,61*
2	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	33,57- 34,15	35,62*
3	Indeks Gini	Angka	0,30-0,29	0,315*
4	Nilai Tukar Petani	Angka	110,04	124,98*
I.II	Fokus Kesejahteraan Sosial			
1	Indeks Pembangunan Mansia	Angka	71,25	71,04*
2	Tingkat Kemiskinan Daerah	Persen	13,04	12,64*
3	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,12	8,70*
4	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,08	12.14*
5	Angka Harapan Hidup	Tahun	63,79	73,75*
6	Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	1710	19,8*
7	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	4,80	4,60*
8	Jumlah Titik Kawasan Kumuh	Lokasi	55	61*
9	Indeks Pembangunan Gender	Angka	95,24	0
10	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Predikat	Nindya	0
11	Indeks Desa Membangun	Angka	0,6900	0
I.III	Fokus Seni Budaya dan Olahraga			
1	Persentase Kesenian Budaya yang dilestarikan	Persen	9,00	0
2	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi	Orang	8	0
I.IV	Fokus Reformasi Birokrasi		_	_
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	C	0
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Angka	79,00	0
3	Nilai Sakip	Predikat	В	В
4	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Inovatif
II	ASPEK PELAYANAN UMUM			
II.I	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib			

A	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan de	ngan Pelay	anan Dasa	r
I	Pendidikan			
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	74,00	72,20
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	92.14	99,08
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	70.50	72,17
4	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan dasar	Persen	81,77	80,87
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar	Persen	93,07	89,50
6	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	62,14	50,86
7	Tingkat Partisipasi Anak Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD	Persen	100	80,87
8	Tingkat Partisipasi Anak Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan SMP	Persen	95,66	71,17
9	Angka Putus Sekolah	Persen	0.21	0,074*
10	Angke Melek Huruf (AMH)	Persen	94,84	98,34*
11	Rasio Guru SD terhadap Siswa	Rasio	1:13	1:11*
12	Rasio Guru SMP terhadap Siswa	Rasio	1:13	1:8*
II	Kesehatan	110010	1.15	
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Kasus	9	14*
2	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Kasus	3	5*
3	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	Kasus	200	0
4	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	1:5.773	0
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	100	98,08*
6	Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	100	100*
7	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	Persen	100	92,80*
8	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persen	54,55	0
9	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	Persen	85,71	93,00
10	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kasus	3	5*
11	Angka Kematian Bayi (AKB)	Kasus	9	14*
12	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persen	95,00	89,00*
13	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Persen	30,00	0.50*
14	Insidensi TB per 100.000 penduduk	Persen	18,15	38,08
15	Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	Persen	23,80	31,67
16	Treatment coverage pada pasien TB	Persen	100	98,08
17	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	Persen	100	18,76
18	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Unit	11	100
19	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	Persen	100	66,70*
20	Persentase Sarana Produksi UKOT	Persen	100	47*
21	Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk	Angka	1.37	15,91*
22	Rasio Perawat per 100.000 penduduk	Angka	11.47	128,42*
23	Rasio Bidan per 100.000 penduduk	Angka	12.47	235,64*
III	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u> </u>		,-
1	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	KM	674,08	460,10*
	radio i anjung jalah dengan jalihan i chadak	17171	07 1,00	100,1

2	Rasio Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	75,00	96,37
3	Persenase Drainase dalam Kondisi	Persen	60,00	0
	Baik/Pembuangan Alirasn Air Tidak Tersumbat		,	
4	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	43,50	45,41
5	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses	Persen	43,50	45,41
	Berkelanjutan terhadap Air Minuma yak,		,	,
	Perkotaan dan Perdesaan			
6	Persentase rumah tangga yang menempati	Persen	78,50	96,37
	hunian dengan akses sanitasi (air limbah		-,	,.
	domestik) layak dan aman			
7	Panjang jaringan irigasi primer kewenangan	Km	50.00	42,29
	daerah yang dibangun			, ,
8	Luas jaringan daerah irigasi permukaan	Persen	68.00	63,21
	kewenangan daerah yang direhabilitasi			
9	Panjang Infrastruktur pengendali banjir wilayah	Persen	12,00	7,08
	sungai kewenangan daerah yang dibangun	1 010011	12,00	,,00
10	Rasio Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar (PSU)	Persen	80.00	67,00
10	Perkantoran pemerintahan Daerah dalam Skala	rersen	00.00	07,00
	Mantap			
11	Persentase rumah tangga yang menempati	Persen	43,50	42,29
	hunian dengan akses air minum layak	rersen	10,00	12,29
12	Persentase rumah tangga dengan akses air	Persen	50,00	10,53
12	minum jaringan perpipaan	rersen	50,00	10,00
13	Ketersediaan Dokumen Tata Ruang Wilayah	Dok	1	1
10	(RTRW) melalui Peta Analog dan Peta Digital	Don	-	-
14	Ketersediaan dokumen RDTR Kecamatan	Dok	1	-
IV	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2011		
1	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang	Persen	50.00	96,84
-	didukung dengan Prasarana Sarana Umum	rersen	50.00	70,01
2	Persentase Rumah Susun Sewa Terpelihara	Persen	100	100
3	Persentase warga negara korban bencana	Persen	100	100
3	kabupaten yang memperoleh rumah layak huni	rersen	100	100
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persen	11,33	12,92
5	Persentase warga negara yang terkena relokasi	Persen	100	100
3	akibat program Pemerintah Daerah	1 CI SCII	100	100
	kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi			
	penyediaan rumah yang layak huni			
6	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10	На	0.5	0.0
U	Ha yang ditangani	114	0.5	0.0
7	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi	Persen	43,20	87,50
,	Prasarana Sarana Umum	rersen	13,20	07,50
V	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan			
•	Perlindungan Masyarakat			
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	Persen	100	100
1	(ketertiban, ketentraman, keindahan)	1 61 3611	100	100
2	Persentase gangguan Trantibum yang dapat	Persen	100	100
4	diselesaikan	1 013011	100	100
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate)	Menit	15	30
J	daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	MEIIIL	13	30
	(WMK)			
4	Persentase pelayanan pemadaman dan	Persen	100	80,00
7	penyelamatan kebakaran	1 61 3611	100	00,00
5	Persentase warga negara yang memperoleh	Persen	100	0,00
J	layanan informasi rawan bencana	1 61 2611	100	0,00
6	•	Persen	100	8,00
O	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap	reiseii	100	0,00
	bencana			
	Deficalia	I		İ

7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	Persen	100	30,00
	penyelamatan dan evakuasi korban Bencana			
8	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	80,00
9	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat Penegakan Hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Daerah	Persen	100	0,00
VI	Sosial			
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen	43,99	12,69
2	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen	11,79	7,78
3	Persentase (%) Lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen	100	1,25
4	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti	Persen	100	0
5	Persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100
6	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	Persen	87,51	46,11*
В	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berka	itan dengai	n Pelayana	n Dasar
I	Tenaga Kerja			
1	Persentase Sengketa Pengusaha -Pekerja Pertahun yang Tertangani	Persen	100	100
2	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Komputer	Persen	0,50	0
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga kerjaan)	Persen	67.00	62,00*
4	Pesentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Persen	0,018	0
II	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	1.34	89,00
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	0.047	59,00
2	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Tertangani	Persen	48,21	0,1
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	0.11	55,34*
5	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100	100
6	Cakupan Anak korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100	100
7	Persentase ARG pada Belanja APBD	Persen	0.013	0.052*
8	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan	Persen	100	100
TTT	komprehensif			
1III 1	Pangan Skor Pola Pangan Harapan	Skor (Angka)	85,20	84.70*
2	Ketersediaan Pangan Utama	Ton	28.000	26.833
	<u> </u>			

3	Ketersedian Energi per kapita	(kkal/ kap/ hari)	2.400	2.248
4	Ketersedian Protein per kapita	(gr/kap/ hari)	63	63,40
5	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	60.00	100
IV	Pertanahan			
1	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	57.00	35,87
2	Persentase penerbitan Izin Lokasi	Persen	100	0*
3	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reformasi Agraria	Kepala Keluarga	5.000	0
4	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	На	11,20	1,66*
V	Lingkungan Hidup			
1	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	Angka	87.77	70*
2	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	Angka	58.74	93,12*
3	hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	77,18	78,60*
4	Penurunan EMisi GRK	Persen	11,50	
5	RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi	Dokume n	9	
6	Persentase Ketersediaan Dokumen KLHS terhadap K/R/P	Persen	100	100
7	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	71,43*
8	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	Persen	1	0
9	Persentase cakupan area pelayanan persampahan	Persen	57,43	36
10	Persentase jumlah pengurangan timbulan sampah	Persen	6,00	5,00*
11	Persentase jumlah penanganan timbulan sampah	Persen	21,37	20,48*
12	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	Persen	5.30	5*
VI	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil			
1	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	100	100*
2	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Status	Sudah	Sudah*
3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	100	97,60*
4	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Persen	96.00	99,91
5	Persentase penduduk yang ber-Kartu Keluarga	Persen	90.00	0*
6	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu)	Persen	60.00	87,73
VII				
		Persen	100	100*
		Persen	100	100*
3	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Aktif	BUMDes	97	29
6 VII 1 2	(KK) Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase PKK Aktif Persentase Posyandu Aktif	Persen Persen Persen	60.00 100 100	87, 10

4	Persentase desa yang mendapatkan fasilitasi	Persen	100	100*
5	pengelolaan keuangan dan aset daerah Persentase Desa/Pekon yang muatan RPJMDes-	Persen	100	90*
	nya sesuai dengan RPJMD Kabupaten			
6	Persentase Desa Tertinggal	Persen	33,49	3,45*
7	Persentase Desa Mandiri	Persen	4,31	7,76*
VIII	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2.13	2,43
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	76.77	75,80
3	Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out KB)	Persen	12.00	18,50*
4	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	81.92	75,45*
5	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Angka	60,10	61,42*
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0.95	1,42
7	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	62,50	64,90
8	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	76.40	75,80
9	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	7,00	3,80
10	Persentase masyarakat yang terjangkau program bangga kencana	Persen	70.00	0,00*
11	Angka Kelahiran Remaja umur 15-49 tahun (age spicific fertility rate /ASFR 15-19)	Angka	31	23,30
12	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	22.50	21,20
13	Persentase Bayi Umur Dua Tahun yang Stunting	Persen	18.00	16,10
14	Persentase Keluarga Balita dan Anak yang Ikuti BKB	Persen	31.00	83,66
IX	Perhubungan			
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	Predikat	sangat baik	Baik*
2	Jumlah rekomendasi uji KIR angkutan umum	Jumlah	65	-
3	Persentase prasarana yang memenuhi standar dalam kondisi baik	Persen	90,00	50,00*
4	Persentase Penggunaan Moda Transportasi Umum	Persen	77.00	89,00*
5	Persentase sarana perhubungan dalam kondisi baik	Persen	50.00	65.00*
6	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persen	90.00	0,42*
7	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan Roda 4	Persen	20.00	100*
X	Komunikasi dan Informatika			
1	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	Persen	95.00	90,00*
2	Presentase aplikasi IT dan aplikasi E - government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik	Persen	85.00	81,82*
3	Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	Persen	95.00	90,00*
4	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	Persen	25.00	30,76*
5	Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	Persen	70.00	75*

_				
6	Persentase layanan administrasi pemerintahan	Persen	70.00	77,78*
	(G2G) yang diimplementasikan			
XI	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah			
1	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	Jumlah	350	2.432
XII	Penanaman Modal			
1	Jumlah/nilai investasi PMA dan PMDN	Juta	398.652	277.186
		Rupiah		
		(Rp)		
2	Rasio daya serap tenaga kerja	Orang/	192	21*
		Per		
		Usahaan		
3	Persentase peningkatan investasi di	Persen	21	4,71*
	kabupaten/kota			00004
6	Rasio tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap	Persen	80.00	80,00*
	ketentuan perizinan		100	1001
7	Persentase terpenuhinya regulasi/kebijakan	Persen	100	100*
	penanaman modal dan pelayanan perizinan serta			
	penerapan Online Single Submission (OSS)	_	100	
8	Persentase penerbitan persetujuan bangunan	Persen	100	1
	gedung (PBG)	D	00.00	2
9	Persentase penerbitan surat izin usaha	Persen	80.00	2
4.0	perdagangan minuman berakohol (SIUP MB)		100	400*
10	Rasio jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100*
11	Jumlah data laporan perizinan dan non perizinan	Laporan	5	5*
XIII	Kepemudaan dan Olahraga	D	42	25
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	42	35
3	Persentase wirausaha muda	Persen	1.39	1,62
	Peningkatan pelatih yang Bersertifikasi	Persen	15,46	14,48
4	Atlet Berprestasi	Jumlah	25	32
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	1.39	1,72
6	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi	Persen	45,85	47,25
	kepemudaan dan organisasi sosial			
	kemasyarakatan			
7	Jumlah Wirausahan Muda Mandiri	Jumlah	170	155
8	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	7.10	7,00
XIV	Statistik			
1	Data dan Infirmasi Statistik Daerah yang	Dok	2	1*
	Tersusun dengan Baik			
2	Persentase Perangkat Daerah yang	Persen	100	100*
	menggunakan data statistik dalam menyusun			
	perencanaan pembangunan daerah			
3	Persentase perangkat daerah yang menggunakan	Persen	100	100*
	data statistik dalam melakukan evaluasi			
	pembangunan daerah			
XV	Persandian		400	400*
1	Presentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik	Persen	100	100*
XVI	Kebudayaan			
1	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang	Persen	100	100
XVII	DIrevitalisasi dan Inverisasi			
	Perpustakaan Pagia Panguniung Panguatakaan nan Tahun	Λ αl	0.07	0.042*
1	Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Angka	0.07	0.043*
2	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	2.62	0.157*
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	Jumlah	186	894*
XVIII	Kearsipan			

1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	35.00	0,00*
2	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip	55	262*
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	75.00	85,50*
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	90.00	43,60*
С	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
I	Kelautan dan Perikanan			
1	Produksi perikanan tangkap	Ton	14.708	15.376*
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	19.497	110*
3	Angka konsumsi ikan	Kg/kap/ Th	42,50	39*
4	Cakupan bina kelompok nelayan	Jumlah	310	246*
II	Pariwisata	_	_	
1	Lama kunjungan Wisata	Hari	9	9*
2	Kontribusi PAD sektor pariwisata	Persen	3,18	9,29
3	Rata-rata Belanja Wisatawan Domestik	Rupiah/ Kunjung an	1.400. 000	1.350.000*
5	Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara	Rupiah/ Kunjung an	8.350.00 0	8,300,000*
6	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	501	292
7	Jumlah wisatawan domestic	Orang	614.788	73,622
8	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestic	Persen	23,00	24,85*
9	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	Persen	23.00	21,53*
10	Jumlah akomodasi pariwisata (hotel/losmen)	Jumlah	70	83
III	Pertanian			
1	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Persen	88.00	99.00*
2	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen	88.00	83,70*
3	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton/ Tahun	113.136	59.439
4	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	Ton/ Tahun	36.689	31.491*
5	Jumlah Produksi Hewan Ternak	Ekor/ Tahun	109.255	121.056*
IV	Perdagangan			
1	Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang	Persen	71.00	50
2	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	Persen	11.58	15,92*
V	Perindustrian			
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	42.00	40,00*
2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	4,00	3.95*
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator	Persen	25.00	20.00*

	pembangunan industri dalam yang ditetapkan dalam RPIK			
4	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	Persen	1.96	2,00*
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	75.00	85.00*
VI	Transmigrasi			
1	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Dibina	Lokasi	1	1*
VII	Energi	Бонаот	_	
1	Rasio Elektrifikasi	Persen	85,00	
2	Persentase Desa Teraliri Listrik	Persen	100	98,27*
D	UNSUR PENDUKUNG PEMERINTAH DAERAH			,
I	Sekretariat Daerah			
2	Tingkat Layanan Administrasi Umum	Persen	100	100*
3	Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum	Persen	100	100*
	Daerah yang Berkualitas	rersen	100	100
II	Sekretariat DPRD			
1	Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program- Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	Status	Tersedia	Tersedia
2	Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	Status	Tersedia	Tersedia
3	Tersedianya Rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten	Status	Tersedia	Tersedia
E	UNSUR PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH			
I	Perencanaan			
1	RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Status	Tersedia	Tersedia*
2	RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Status	Tersedia	Tersedia*
3	RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Status	Tersedia	Tersedia*
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	93,33*
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100*
6	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100*
7	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD,	Persen	100	100*
	Renstra)			
8	Renstra) Persentase pencapaian target program pembangunan daerah	Persen	100	97,34*
8 8	Persentase pencapaian target program pembangunan daerah	Persen	100	97,34*
	Persentase pencapaian target program	Persen Persen	100	97,34*
II	Persentase pencapaian target program pembangunan daerah Keuangan Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD			
	Persentase pencapaian target program pembangunan daerah Keuangan Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan Perubahan RAPBD Persentase Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah	Persen	100	100

5	Rasio belanja modal terhadap total belanja Daerah	Persen	31,78	4,10
III	Kepegawaian			
1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	Persen	11,07	14,46*
2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan	Persen	22.64	-
3	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persen	73,38	-
IV	Pendidikan dan pelatihan			
1	Persentase CASN yang Lulus Pelatihan Dasar Formasi Umum	Persen	100	-
V	Penelitian dan Pengembangan			
1	Persentase Implementasi Rencana kelitbangan	Persen	95,00	87,50*
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	80.00	84,00*
3	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	100*
4	Persentase kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	Persen	90.00	90.00*
F	UNSUR PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH			
1	Inspektorat			
1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	100	95,00
2	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan pada objek pemeriksaan	Persen	90,00	80,00
3	Persentase Pendampingan dan Asistensi APIP	Persen	100	90,00
4	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	Persen	100	75
G	UNSUR KEWILAYAHAN PEMERINTAH DAERAH			I
1	Kecamatan			
1	Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Pekon	Persen	100	99,00*
2	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan/Pekon	Persen	85.00	85,00*
3	Presentase Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal	Persen	100	80,00*
H	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			T
1	Kesatuan Bangsa dan Politik			
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	51,00	90,00
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	84.92	82,87
3	Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini	Persen	80.00	100
III	terhadap Kerawanan Konflik Sosial ASPEK DAYA SAING DAERAH			
III,1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah			
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
2	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	17,49	0
3	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Pesen	6,55	0
4	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB	Persen	1,78	1
5	Pertumbuhan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Persen	25	0

6	Persentase Koperasi Aktif	Persen	52,50	73
III.2	Fakus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur			
1	Indeks Kualitas Infrastruktur	Angka	55	0
2	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	42,50	44,68
3	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses	Persen	43,50	45,41
	terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman			
4	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	57,50	41.31
5	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	56,20	56,20
6	Indeks Resiko Bencana	Angka	180,24	188,85*
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	74,53	76,45
III.3	Fokus Iklim Investasi			
1	Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS	Persen	100	100
	yang Tertangani			
2	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	Persen	100	100
	dan Peraturan Kepala Daerah			
III.4	Fokus Sumber Daya Manusia			
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,41	3,04*
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	74,71	72,41*

Sumber: RKPD 2025 dan DIolah, 2025

*Data Tahun 2024

Data capaian triwulan I tahun 2025 masih didominasi oleh data capaian 2024 karena ada bebrpa data yang belum dipublikasi oleh pihak yng berwenang dan penatapan data yang yang diukur pertahun. Pada aspek kesejahteraan masyarakat tercatat sebanyak 21 ndikator, aspek pelayanan umum terdri dari 226 indikator dan aspek daya saing daerah sebanyak 17 indikator. dari 264 indikator kinerj adarah di atas masih belum menunjukan kinerja karena masih di triwulan I tahun 2025 dimana di triwulan tersebut masih dalam proses persiapan kegiatan sehingga belum mampu mendongkark capain indikator kinerja daerah Kabupaten Pesisir Barat. Indikator knerja daerah di atas merupakan indikator yang terdapat pada RPJMD Tahun 2021-2026.

2.1.4. Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara, berikut pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, yaitu: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan (6) Sosial.

Data yang disajikan merupakan data yang dihimpun melalui aplikasi e-SPM milik Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri hingga Triwulan I Tahun 2025. Pelaporan dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah yang mengampu pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Berikut ditampilkan capaian SPM sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

a) SPM Urusan Pendidikan

Capaian pelaksanaan SPM Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan hingga pada triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Pencapaian SPM Bidang Pendidikan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator		Target (%)	s.d. TW I Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		Jumlah Warga Negara	Angka Partisipasi Sekolah 7- 12 Tahun	100	99,53*
		Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun	100	89,34
1	Pendidikan Dasar	n	Angka Literasi SD		58,61
		Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi	Angka Literasi SMP	100	58,61 73,65 53,19
		Siswa Berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Angka Numerasi SD	100	
			Angka Numerasi SMP		67,03
2	Pendidikan Kesetaraan	tahun yang belum menye Pendidikan Dasar atau me	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan		5,51
		Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa Berdasarkan hasil Asesmen Nasional		100	63,12
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah 5- 6 Tahun	100	50,86

Sumber: Dinas P dan K, 2025

Tabel di atas menunjukkan capaian SPM pada urusan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yang secara total mencapai angka 51,26%. Keseluruhan angka capaian dari indikator pendidikan ini tentu saja menjadi catatan penting dalam proses peningkatan kualitas SDM dan pendidikan di daerah yang perlu melakukan akselerasi percepatan pencapaian target-target kinerja hingga selesainya tahun 2025. Permasalahan utama dari capaian SPM Pendidikan ini adalah belum optimalnya pelayanan pendidikan dikarenakan belum meratanya SDM Pendidikan secara proposional termasuk belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta kesadaran masyarakat terhadap pendidikan yang perlu ditingkatkan lagi.

b) SPM Urusan Kesehatan

Capaian pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan hingga pada triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5 Pencapaian SPM Bidang Kesehatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	s.d. TW I Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	20,44
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	15,60
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	16,40
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	21,24
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	0
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	24,37
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	24,37

8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	14,60
9	Pelayanan Kesehatan Penderita <i>Diabetes Melitus</i>	Jumlah warga negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	18,27
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	90,55
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga <i>Tuberculosis</i>	Jumlah warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	28,14
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinveksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia <i>Human</i> <i>Immunodcficiency Virus</i>)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	23,50

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa secara umum capaian masing-masing indikator SPM pada Kesehatan belum mampu mencapai target 25,00% sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Gambaran total capaian SPM baru mencapai 24,79%. Tentunya komitmen untuk peningkatan pelayanan kepada seluruh masyarakat di semua sektor wajib menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan urusan pemerintahan kesehatan. Permasalahan utama dalam proses pencapaian SPM Kesehatan yang belum memenuhi target hingga Triwulan I Tahun 2025 (minimal 25%) adalah masih rendahnya keterbukaan dan kemauan dari masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Hal ini tentunya berbanding lurus dengan masih belum optimalnya proses sosialisasi oleh unit layanan kesehatan di masyarakat dan juga tingginya biaya masyarakat dalam menuju fasilitas kesehatan terdekat.

c) SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian pelaksanaan SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hingga pada triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6 Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)	s.d. TW II Tahun 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari- hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	0
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100	0

Sumber: Dinas PU dan PR, 2025

Untuk pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara umum belum ada *progress* hingga Triwulan I Tahun 2025. Hal ini masih dapat dimaklumi, dikarenakan pencapaian pekerjaan fisik baru akan selesai pada Triwulan IV. Namun demikian, usaha-usaha perbaikan kinerja dan peningkatan pendanaan terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Permasalahan utama dari pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pesisir Barat adalah pendanaan, dimana luasan daerah yang menjadi kewenangan tidak berbanding lurus dengan kemampuan daerah dalam membiayi seluruh pembangunan. Terlebih daerah lebih banyak mengandalkan pendanaan transfer untuk pembangunan infrastruktur.

d) SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian pelaksanaan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman hingga pada triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7 Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	s.d. TW I Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi	100	0

Program Pemerintah	penyediaan rumah	
Daerah Kabupaten/Kota	yang layak huni	

Sumber: Dinas PR dan KP, 2025

Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terus diupayakan oleh Pemerintah Daerah. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, capaian indikator Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota mencapai 100% sedangkan indikator Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masih nihil karena bersifat tentatif dan di tahun 2025 belum ada kebijakan yang berkaitan dengan indikator dimaksud. Sehingga dapat dismpulkan bahwa capaian SMP Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah mencapai target 100% di triwulan I tahun 2025 ini.

e) SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian pelaksanaan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh (i) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta (ii) Badan Penanggulangan Bencana Daerah hingga pada triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8 Pencapaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	s.d. TW I Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	100	0
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	0
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	8
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	30

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	s.d. TW I Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	80

Sumber: Satpol PP - Damkar dan BPBD, 2025

Perlindungan Masyarakat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 baru mencapai target 23,60%. Pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan konsistensi dalam menjaga capaian indikator perlu terus diupayakan oleh Pemerintah Daerah terlebih Kabupaten Pesisir Barat berada pada daerah rawan bencana. Masih relatif minimnya kemampuan pendanaan kembali menjadi masalah utama dari pelaksanaan urusan Trantibumlinmas. Ditambah lagi dengan masih minimnya jumlah sarana dan prasarana kebencanaan dan terbatasnya jumlah SDM bila dibandingkan dengan luasan wilayah yang menjadi kewenangan.

f) SPM Urusan Sosial

Capaian pelaksanaan SPM Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial hingga pada triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9 Pencapaian SPM Bidang Sosial sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target (%)	s.d. TW I Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	2,05
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	8,21
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	0,55

4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100	0
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Data pada pencapaian SPM Urusan Sosial hingga Triwulan I Tahun 2025 mencapai angka 22,16%. Permasalahan utama dari belum optimalnya pelayanan pada urusan sosial adalah pendananaan dan juga luasan daerah administratif yang menjadi kewenangan daerah serta masih minimnya jumlah SDM pelaksana urusan. Hal ini tentu saja wajib menjadi catatan bagi Dinas Sosial sebagai pengampu urusan dimaksud.

2.1.5. Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Hasil evaluasi RKPD sampai dengan Semester Triwulan I pada tahun 2025 ini bertujuan untuk:

- 1) Menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025;
- 2) Memperoleh gambaran capaian target kinerja (*outcome* dan *output*) dari masing-masing Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025, Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029 dan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029;
- 3) Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan I Tahun 2025;
- 4) Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan RKPD pada tahun-tahun berikutnya pada umumnya dan Perubahan RKPD Tahun 2025 pada khususnya.

Laporan evaluasi ini bersumber dari telaahan evaluasi hasil pelaksanaan Renja masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tahun 202 dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu semester anggaran (Januari-Maret Tahun 2025).

Berdasarkan data yang di dapat dari dokumen RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025, diperoleh jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang disajikan pada tabel berikut:

abel 2.10 Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4	14	73
2	Dinas Kesehatan	5	20	111
3	Dinas PUPR	10	19	52
4	Dinas PRKP	5	15	21
5	BPBD	2	10	17
6	Satpolpp Damkar	3	11	20
7	Dinas Sosial	5	11	27
8	Dinas Transnakerin	7	16	22
9	Dinas PPPAKB	9	19	46
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8	11	36
11	Dinas Lingkungan Hidup	6	11	27
12	Dinas Dukcapil	5	11	23
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	4	10	28
14	Dinas Perhubungan	3	13	22
15	Dinas Kominfotiksan	5	12	35
16	Dinas Koperasi, UMK Perdagangan	6	13	26
17	DPMPTSP	5	11	21
18	Dinas Pora	3	13	32
19	Dinas Perikanan	5	11	30
20	Dinas Pariwisata	4	10	23
21	Sekretariat Daerah	5	24	63
22	Sekretariat DPRD	2	15	48
23	Bappelitbangda	4	15	43
24	BPKAD	3	13	43
25	Bapenda	2	7	17
26	BKPSDM	3	9	26
27	Inspektorat	2	11	34
28	Kesbangpol	6	10	15
	Jumlah	131	365	979

 ${\it Sumber: Bappe litbang da\ Kabupaten\ Pesisir\ Barat, 2025}$

Laporan evaluasi ini bersumber dari telaahan evaluasi hasil pelaksanaan Renja masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2025 dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu triwulan perencanaan dan anggaran (Maret 2025).

Evaluasi capaian indikator kinerja RKPD tahun 2025 ditunjukkan dengan capaian indikator pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 yang terbagi atas kelompok urusan pemerintahan daerah yang terbagi kedalam 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029.

Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam evaluasi hasil RKPD sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dengan pemredikatan yang diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- 1) Sangat Tinggi (ST), untuk capaian diatas 91% ($91\% \le 100\%$);
- 2) Tinggi (T), untuk capaian nilai diatas 76% sampai dengan 90% ($76\% \le 90\%$);
- 3) Sedang (S), untuk capaian nilai diatas 66% sampai dengan 75% ($66\% \le 75\%$);
- 4) Rendah (R), untuk capaian nilai diatas 51% sampai dengan 65% (51% ≤ 65%); dan
- 5) Sangat Rendah (SR), untuk capaian nilai sama atau kurang dari 50% (≤ 50%).

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut (dalam hal ini, secara umum asumsi pencapaian kinerja pada Triwulan I adalah 25%):

- Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja;
- 2) Hasil Sedang, Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (cukup);
- 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah, Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Berikut evaluasi hasil RKPD Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, sebagai berikut:

a) Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tahun 2025, dilakukan melalui 2 program; 11 kegiatan; dan 48 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. Capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dengan nilai 10,40% dan realisasi anggaran 28,03%. Dengan demikian capaian kinerja pada urusan ini masih sangat rendah sehingga perlu percepatan pencapaian target kinerja.

Secara umum tidak ditemukan permasalahan yang berarti dalam menyelesaikan target kinerja yang telah ditetapkan, dikarenakan capaian kinerja ratarata akan tinggi di semester II, begitu pula dengan realisasi keuangan telah sesuai angkas yang telah direncanakan. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah (i) Melakukan peningkatan kompetensi SDM dan (ii) Percepatan proses administrasi dan perencanaan dengan tetap mematuhi dan memperhatikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan tahun 2025, dilakukan dengan 4 program; 17 kegiatan; dan 84 sub kegiatan oleh Dinas Kesehatan. Capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan adalah sebesar 8,90% dan realisasi keuangan sebesar 3,10%, dengan demikian capaian kinerja urusan kesehatan dalam kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan output kegiatan ada pada triwulan I sehingga perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya. Adapun rencana tindak lanjutnya adalah percepatan pencapaian kinerja dengan optimal, terutama untuk kegiatan-kegiatan DAK.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2025 dilaksanakan dengan 10 program; 23 kegiatan; dan 49 sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebesar 28,70% dengan realisasi keuangan sebesar 21,40%. Capaian kinerja urusan ini dikategorikan sangat rendah.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2025 dilaksanakan dengan 5 program; 16 kegiatan; dan 33 sub kegiatan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Capaian kinerja pada Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 22,69% dengan realisasi anggaran 14,44%. Capaian kinerja triwulan I pada urusan ini masuk dalam kategori sangat rendah.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat tahun 2025 yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar dilaksanakan melalui 3 program; 10 kegiatan; dan 20 subkegiatan. Adapun capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar adalah sebesar 15,80% dengan realisasi keuangan adalah 20,95%, dengan demikian kinerja urusan ini pada triwulan I tahun 2025 masuk dalam kriteria sangat rendah.

Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat tahun 2025 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui 2 program; 11 kegiatan; dan 35 subkegiatan. Adapun capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah 15,19% dengan realisasi keuangan adalah 7,02%. Dengan demikian capaian kinerja urusan ini masuk dalam kategori sangat rendah.

6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial tahun 2025 dilakukan melalui 4 program; 12 kegiatan; dan 31 subkegiatan. Capaian kinerja pada Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sampai dengan triwulan I adalah 18,12% dengan realisasi keuangan 21,16%. Dengan demikian capaian kinerja urusan ini masuk dalam ketegori sangat rendah.

b) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja tahun 2025 dilaksanakan dengan 4 program; 13 kegiatan; dan 24 sub kegiatan melalui Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja sampai dengan triwulan I adalah 15,22% dengan realisasi keuangan 19,10%. Dengan demikian capaian kinerja urusan ini masuk dalam kategori sangat rendah. Mayoritas output kegiatan selesai di triwulan IV, maka menyebabkan capaian pada triwulan I rendah. Agar menjadi perhatian untuk percepatan pencapaian kinerja.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 5 program; 11 kegiatan; dan 15 sub kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Capaian Kinerja Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan triwulan I adalah 25,00% dengan realisasi keuangan 5,06%. Dengan demikian capaian kinerja urusan ini masuk dalam kategori sangat rendah. Dengan tingkat capaian tersebut, catatan ke depannya adalah percepatan pencapaian, karena output subkegiatan yang berupa laporan maupun dokumen yang akan selesai di triwulan IV.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 4 program; 12 kegiatan; dan 35 sub kegiatan. Capaian Kinerja Urusan Wajib Pangan sampai dengan triwulan I adalah 21,97% dengan realisasi keuangan 17,96%. Dengan demikian capaian kinerja urusan ini masuk dalam ketegori sangat rendah sehingga diperlukan percepatan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 norma dan standar mekanisme ketatalaksanaan kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas izin lokasi, sengketa tanah garapam, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subjek dan obyek restribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*, tanah ulayat, tanah kosong, izin membuka tanah dan penggunaan tanah.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan pada tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui 3 program; 3 kegiatan; dan 4 subkegiatan dengan capaian kinerja triwulan I 29,63% dengan realisasi keuangan 13,41%. Dengan demikian capaian kinerja urusan ini masuk dalam kategori sangat rendah. Faktor pendorong pencapaian kinerja adalah komitmen yang tinggi dari pimpinan dan semua aparatur untuk segera menyelesaikan kegiatan-kegiatan pada Urusan Pertanahan. Diharapkan semangat tersebut terus dijaga demi percepatan pencapaian kinerja. Sedangkan yang menjadi penghambat adalah kondisi fiskal daerah yang berpengaruh pada capaian kinerja dan keuangan.

Keterbatasan kondisi fiksal daerah menyebabkan terhambatnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan penganggaran daerah. Kemungkinan tidak tercapainnya target kinerja urusan pemerintahan daerah merupakan hal yang mungkin terjadi.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 7 program; 14 kegiatan; dan 38 sub kegiatan. Adapun capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh

Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan triwulan I adalah 32,49% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 18,85%. Dengan demikian capaian target urusan ini masuk dalam kategori sangat rendah.

6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 5 program; 13 kegiatan; dan 33 subkegiatan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan triwulan I adalah 15,03% dengan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 17,82%. Dengan demikian capaian kinerja urusan ini masuk kategori sangat rendah.

7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 dilaksanakan dengan 4 program; 10 kegiatan; dan 31 sub kegiatan. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon sampai dengan triwulan I adalah 9,81% dengan realisasi keuangan 7,57%. Pada triwulan I capaian kinerja masuk dalam kategori sangat rendah dan membutuhkan percepatan pencapaian target kinerja.

8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk tahun 2025 dilaksanakan dengan 4 program; 14 kegiatan; dan 53 subkegiatan. Adapun capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan triwulan I adalah 12,88% dengan realisasi keuangan 10,39%. Dengan demikian capaian kinerja urusan ini masuk dalam kategori sangat rendah.

9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan oleh Dinas Perhubungan di tahun 2025 dilaksanakan dengan 2 program; 10 kegiatan; dan 24 subkegiatan. Capaian Kinerja Urusan Wajib Perhubungan sampai dengan triwulan I adalah 24,19% dengan realisasi keuangan 22,17%. Capaian ini masuk dalam kategori sangat rendah.

10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika di tahun 2025 dilaksanakan dengan 3 program; 8 kegiatan; dan 30 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sampai dengan triwulan I adalah 14,47% dengan realisasi keuangan 17,93%. Dikarenakan capaian target masih dibawah 25% maka urusan ini masuk dalam kategori sangat rendah. Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah ketersediaan SDM sesuai dengan bidang atau kegiatan dilaksanakan, manajemen SDM yang efektif, rutinitas evaluasi triwulan/semester dan akhir tahun serta tingginya capain sub kegiatan yang melebihan dari target capaiannya.

11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2025 dilaksanakan melalui 4 program; 10 kegiatan; dan 23 subkegiatan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan triwulan I adalah 6,06% dengan realisasi keuangan 15,19%. Dengan demikian, maka urusan ini masuk dalam kategori sangat rendah. Rencana tindak lanjutnya adalah memaksimalkan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja, dikarenakan sebagian besar target kinerja akan selesai di semester II.

12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal di tahun 2025 dilaksanakan melalui 6 program; 11 kegiatan; dan 25 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Wajib Penanaman Modal yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan triwulan I adalah 13,76% dan realisasi keuangan 11,06%. Capaian kinerja urusan ini masuk dalam kategori sangat rendah. Dibutuhkan percepatan dalam pencapaian target kinerja, karena sebagian besar keluaran kegiatan berupa laporan akan selesai di triwulan II.

Keterbatasan anggaran daerah pada proses penyusunan dokumen anggaran menyebabkan program dimaksud tidak dapat dianggarkan. Hal ini tentunya menyebabkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta target capaian indikator kinerja daerah sedikit banyak terganggu. Kemungkinan tidak tercapainnya target kinerja urusan pemerintahan daerah merupakan hal yang mungkin terjadi.

13) Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga

Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 3 program; 13 kegiatan; dan 32 subkegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga sampai dengan triwulan I adalah 14,43% dengan realisasi keuangan 18,56%. Diharapkan terus meningkatkan pencapaian kinerja dengan melakukan evaluasi setiap kegiatan agar lebih maksimal dalam pencapaian target yang ada, karena urusan ini capaian kinerjanya masuk dalam kategori sangat rendah.

14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik pada tahun 2025 dilaksanakan dengan 1 program; 1 kegiatan; dan 2 sub kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik sampai dengan triwulan I adalah 0% dengan realisasi keuangan 13,01%. Dengan capaian nihil maka urusan ini masuk dalam capaian kinerja yang sangat rendah.

15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Penyelenggaraan Urusan Persandian pada tahun 2025 dilaksanakan dengan 1 program; 2 kegiatan; dan 2 subkegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Adapun capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sampai dengan triwulan I adalah 17,63% dengan realisasi keuangan 8,43%. Dengan demikian capaian kinerja urusan ini masuk dalam kategori sangat rendah. Faktor pendorong capaian kinerja dan realisasi anggaran adalah ketersediaan SDM sesuai dengan bidang atau kegiatan dilaksanakan, manajemen SDM yang efektif, rutinitas evaluasi triwulan/semester dan akhir tahun serta tingginya capain sub kegiatan yang melebihan dari target capaiannya.

16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan tahun 2025 dilaksanakan dengan 2 program; 2 kegiatan; dan 2 sub kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sampai dengan triwulan I masih nihil bagi dari capaian kinerja maupun realisasi anggaran.

17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan tahun 2025 dilaksanakan dengan 1 program; 2 kegiatan; dan 3 subkegiatan. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan oleh Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan I adalah Sangat Rendah dengan nilai 0,00% dengan realisasi 16,46%. Dengan capaian kinerja dengan kategori sangat rendah karena belum adanya capaian kinerja.

18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan tahun 2025 dilaksanakan dengan 1 program; 2 kegiatan; dan 3 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dilaksanakan pada Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan I adalah 16,67% dengan realisasi keuangan 0%. Dengan demikian kinerja urusan ini masuk kriteria sangat rendah. Rencana tindak lanjutnya adalah memaksimalkan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja, dikarenakan sebagian besar target kinerja akan selesai di semester II.

c) Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan

Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2025 dilaksanakan dengan 5 program; 14 kegiatan; dan 36 subkegiatan oleh Dinas Perikanan. Capaian kinerja Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan sampai dengan triwulan I adalah 23,05% dengan realisasi keuangan 18,65%. Dengan demikian kategori capaian kinerja urusan ini adalah sangat rendah.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata tahun 2025 dilaksanakan dengan 4 program; 12 kegiatan; dan 38 subkegiatan. Adapun capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata sampai dengan triwulan I adalah 9,05% dengan realisasi keuangan 7,41%. Dengan demikian capaian kinerja urusan ini masih sangat rendah.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Penyelenggaraan Urusan Pertanian tahun 2025 dilaksanakan dengan 5 program; 10 kegiatan; dan 20 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sampai dengan triwulan I adalah 14,15% dengan realisasi keuangan 17,96%. Capaian yang masih sangat rendah, dikarenakan keluaran kegiatan memang direncanakan dicapai pada semester II. Mengingat hal tersebut diharapkan optimal meningkatkan pencapaian kinerja dengan melakukan evaluasi setiap kegiatan agar lebih maksimal dalam pencapaian target yang ada.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dengan 3 program; 4 kegiatan; dan 7 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan sampai dengan triwulan I adalah nihil baik dari capaian kinerja maupun realisasi keuangan. Diperlukan kerjasama dan komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh aparatur dalam percepatan pencapaian target kinerja.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian tahun 2025 dilaksanakan dengan 2 program; 2 kegiatan; dan 5 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian yang diampu oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian sampai dengan triwulan I adalah nihil baik capain kineja maupun realisasi keuangan. Diperlukan percepatan capaian target di tahun 2025.

6) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi tahun 2025 dilaksanakan dengan 2 program; 2 kegiatan; dan 3 subkegiatan. Adapun capaian kinerja Urusan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian sampai dengan triwulan I adalah nihil baik capaian kinerja maupun realisasi keuangan. Keterbatasan anggaran merupakan alasan utama tidak dilaksanakan program. Kemungkinan tidak tercapainnya target kinerja urusan pemerintahan daerah merupakan hal yang mungkin terjadi.

d) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan Unsur Pendukung Sekretariat Daerah Tahun 2025 dilaksanakan dengan 3 program; 20 kegiatan; dan 74 subkegiatan. Capaian kinerja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan I adalah 10,16% dengan realisasi keuangan 12,44%. Capaian sangat rendah ini dikarenakan banyaknya kegiatan yang didapat outputnya di akhir tahun. Rencana tindak lanjutnya adalah mengoptimalkan pencapaian kinerja sehingga mampu maksimal mencapai target yang telah ditetapkan.

2) Sekretariat DPRD

Penyelenggaraan Unsur Pendukung Sekretariat DPRD Kabupaten tahun 2025 dilaksanakan dengan 2 program; 15 kegiatan; dan 46 subkegiatan. Capaian kinerja Sekretariat DPRD sampai dengan triwulan I 22,18% dengan realisasi keuangan 23,55%. Capaian tersebut telah sesuai dengan perencanaan pada kinerja dan keuangan di triwulan I.

e) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan tahun 2025 dilaksanakan dengan 3 program; 13 kegiatan; dan 49 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan sampai dengan triwulan I adalah 37,94% dengan realisasi keuangan 15,57%, dengan kriteria sangat rendah. Target kegiatan yang berupa dokumen di sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai penopang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, baru akan terealisasi di akhir tahun sehingga membawa dampak yang signifikan terhadap angka capaian kinerja di triwulan satu. Optimalisasi pencapaian target kinerja adalah tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan II.

2) Keuangan

Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan tahun 2025 dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan 2 program; 8 kegiatan; dan 30 subkegiatan dengan capaian kinerja sampai dengan triwulan I 23,67% dengan realisasi 12,53%. Kriteria sangat rendah pada urusan keuangan yang khusus mengelola pendapatan daerah ini. Sedangkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan 3 program; 13 kegiatan; dan 51 subkegiatan dengan Capaian kinerja 8,40% dengan realisasi keuangan 9,13% atau masuk dalam kategori sangat rendah. diperlukan komitmen pimpinan dalam menyelesaikan kegiatan, serta kedisiplinan aparatur yang ada. Akan tetapi keterbatasan SDM yang ada dianggap sebagai penghambat pencapaian kinerja. Dari permasalahan tersebut, disimpulkan rencana tindak lanjutnya adalah penguatan kompetensi aparatur serta selalu melakukan perbaikan terhadap permasalahan yang rutin di evaluasi.

3) Kepegawaian

Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian Tahun 2025 dilaksanakan dengan 2 program; 6 kegiatan; dan 30 subkegiatan. Adapun capaian kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian sampai dengan triwulan I adalah 8,42% dengan realisasi keuangan 13,81% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai penopang Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Manajemen Kepegawaian harus meningkatkan pencapaian kinerja, mengingat target kinerja akan dicapai pada triwulan II.

4) Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan di Tahun 2025 dilaksanakan dengan 1 program, 2 kegiatan dan 2 subkegiatan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Adapun capaian kinerja hingga triwulan I adalah 0% dan realisasi anggaran 32,05% dengan kategori Sangat Rendah. Capaian kinerja yang masih 0% dikarenakan diklat yang belum dilaksanakan karena menunggu jadwal dari Bandiklat Provinsi Lampung.

5) Penelitian dan Pengembangan

Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025 dilaksanakan dengan 1 program; 3 kegiatan; dan 8 subkegiatan. Adapun capaian kinerja Unsur Penunjang Urusan Urusan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sampai dengan triwulan I adalah 0% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 6,05%. Capaian Kinerja sangat rendah dikarenakan output Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan adalah berupa Laporan akhir maupun dokumen Kajian.

f) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Inspektorat

Penyelenggaraan Urusan Pengawasan pada tahun 2025 dilaksanakan dengan 3 program; 11 kegiatan; dan 35 subkegiatan. Adapun capaian kinerja Inspektorat sampai dengan triwulan I adalah 15,63% dengan realisasi keuangan 17,71% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Rendahnya capaian dikarenakan keluaran kegiatan yang baru akan selesai di triwulan IV.

g) Unsur Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 dilaksanakan dengan 5 program; 12 kegiatan; dan 32 subkegiatan. Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan triwulan I adalah 8,12% dengan realisasi keuangan 8,68% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Rencana tindak lanjutnya adalah mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga pencapaian kinerja lebih optimal, karena sesuai perencanaan, target akan tercapai di triwulan IV.

Berikut rekapitulasi hasil evaluasi hasil RKPD Tahun 2025 berdasarkan urusan pemerintahan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2.11 Skala Nilai Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Bidang Urusan	Realisasi	Predikat			
NO	Diudiig Of usaii	Kinerja	Anggaran	Fieurat		
(1)	(2)	(3)	(4)			
1	Pendidikan	10,40	28,03	SR		

2	Kesehatan	8,90	3,10	SR			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28,70	21,40	SR			
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	22,69	14,44	SR			
5	Trantibumlinmas (Polpp)	15,8	20,95	SR			
6	Trantibumlinmas (BPBD)	15,19	7,02	SR			
7	Sosial	18,12	21,16	SR			
8	Tenaga Kerja	15,22	19,10	SR			
9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25,00	5,06	SR			
10	Pangan	21,97	17,96	SR			
11	Pertanahan	29,63	13,41	SR			
12	Lingkungan Hidup	32,49	18,85	SR			
13	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15,03	17,82	SR			
14	Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	9,81	9,81 7,57				
15	Pengendalian Penduduk dan KB	12,88	10,39	SR			
16	Perhubungan	24,19	22,17	SR			
17	Komunikasi dan Informatika	14,47	17,93	SR			
18	Koperasi dan UKM	6,06	15,19	SR			
19	Penanaman Modal	13,76	11,06	SR			
20	Kepemudaan dan Olahraga	14,43	18,56	SR			
21	Statistik	0,00	13,01	SR			
22	Persandian	17,63	8,43	SR			
23	Kebudayaan	0,00	0,00	SR			
24	Perpustakaan	0,00	16,46	SR			
25	Kearsipan	16,67	0,00	SR			
26	Perikanan	23,05	18,65	SR			
27	Pariwisata	9,05	7,41	SR			
28	Pertanian	14,15	17,96	SR			
29	Perdagangan	0,00	0,00	SR			
30	Perindustrian	0,00	0,00	SR			
31	Trasmigrasi	0,00	0,00	SR			

32	Sekretariat Daerah	10,16	12,44	SR
33	Sekretariat DPRD	22,18	23,55	SR
34	Perencanaan	37,94	15,57	SR
35	Keuangan (BPKAD)	8,40	9,13	SR
36	Keuangan (Bapenda)	23,67	12,53	SR
37	Kepegawaian	8,42	13,81	SR
38	Pendidikan dan Pelatihan	0,00	32,05	SR
39	Penelitian dan Pengembangan	0,00	6,05	SR
40	Pengawasan (Inspektorat)	15,63	17,71	SR
41	Kesbangpol	8,12	8,68	SR
	Rata-Rata Capaian	13,90	13,28	SR

Sumber: Hasil Monev Bappelitbangda, 2025

Secara umum, capaian kinerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Bara masih rendah dimana capaian kinerja Perangkat daerah hanya mencapai 13,90% dengan realisasi anggaran di angka 13,28%. Hal ini perlu menjadi peratian bagi Pemerintah Daerah untuk dapat segera meningkatkan capaian kinerjanya. Meskipun tantangan efisiensi Pemerintah Pusat diharapkan tidak menjadi kendala yang berarti dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat melalui percepatan pelaksanaan program -program prioritas.

Selanjutnya untuk penjabaran secara lengkap dalam bentuk matrik evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan dari masing-masing Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2025 hingga triwulan I ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Pesisir Barat

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	2026	n Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		(2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (9= 8/7*100%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024 (10= 6+8)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%) (11=10/5*100%)			Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	к	(5) Rp	к	(6) Rp	к	(7) Rp	К	(8) Rp	(9= 8/ / K	*100%) Rp	К	10= 6+8) Rp	(11=10/	5*100%) Rp	(12)	(13)
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		K	917.896.897.515	K	791.224.770.692	K	209.493.914.209	K	58.729.440.328	K	кр	0	849.954.211.020	#DIV/0!	93%	Dinas P & K	
	1.01 1.01.01	Bidang Urusan Pendidikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95%	917.896.897.515 646.082.291.127	83,5%	791.224.770.692 645.936.891.127	95%	209.493.914.209 154.740.926.709	95%	58.729.440.328 44.310.458.363	100%	28% 29%	1,7854	849.954.211.020 690.247.349.490	188%	93% 107%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	32.877.747	100,0%	25.187.750	100%	12.400.000	0%	-	0%	0%	95%	25.187.750	95%	77%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.01.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.192.007	6 Dokumen	10.200.000	2 Dokumen	7.400.000	Dokumen	-	0%	0%	6 Dokumen	10.200.000	60%	142%	Dinas P & K	1
	1.01.01.2.01.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	10 Dokumen	25.685.740	6 Dokumen	14.987.750	2 Dokumen	5.000.000	Dokumen	-	0%	0%	6 Dokumen	14.987.750	60%	58%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100%	619.542.934.116	100%	359.590.708.695	100%	153.188.328.709	100%	44.040.094.648	100%	29%	2	403.630.803.343	200%	65%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	619.514.679.802	42 Bulan	359.574.208.695	14 Bulan	153.182.828.709	4 Bulan	44.040.094.648	29%	29%	46	403.614.303.343	66%	65%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.02.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Akhir Tahun	5 Dokumen	12.842.870	3 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	2.500.000	Dokumen	-	0%	0%	3	7.500.000	60%	58%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.02.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	10 Dokumen	10.274.296	6 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	2.000.000	Dokumen	-	0%	0%	6	6.000.000	60%	58%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.02.00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	5.137.148	3 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	1.000.000	0	-	0%	0%	3	3.000.000	60%	58%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada	Pendataan Barang Milik Daerah pada	100%	200.000.000	100%	19.138.500	100%	40.000.000	0%	-	0%	0%	100%	19.138.500	100%	10%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.03.000	Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah nada SKPD	Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	19.138.500	1 Dokumen	40.000.000	0	-	0%	0%	1	19.138.500	50%	10%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan	2 Urusan	22.609.336.607	2 Urusan	9.117.624.350	2 Urusan	512.500.000	Urusan	222.000.000	0%	43%	100%	9.339.624.350	50%	41%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.05.00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	60.000.000			60 Paket	60.000.000	Paket	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.05.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dokumen	50.000.000			1 Dokumen	50.000.000	Dokumen	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.05.00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50.000.000			1 Dokumen	50.000.000	Dokumen	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.05.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	5 Tahun	22.449.336.607	3 Tahun	9.117.624.350	1 Tahun	352.500.000	Tahun	222.000.000	0%	63%	3	9.339.624.350	60%	42%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kineria	100%	2.211.322.715	100%	1.597.715.100	100%	533.516.000	0%	17.768.550	0%	3%	100%	1.615.483.650	100%	73%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.06.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	5 Paket	8.424.923	3 Paket	5.280.000	1 Paket	2.000.000	Paket	-	0%	0%	3	5.280.000	60%	63%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.06.00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.500.000	Paket	0	1 Paket	9.500.000	Paket	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.06.00		Tersedianya Jasa Propaganda , Pameran dan Publikasi	5 Kali	436.657.577	3 Kali	256.375.000	3 Kali	85.000.000	Kali	-	0%	0%	3	256.375.000	60%	59%	Dinas P & K	\Box
	1.01.01.2.06.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang catak dan Pengadaan Serta terpenuhinya Kebutuan Alat tulis kantor Rutin	60 Bulan	354.298.821	36 Bulan	286.947.100	12 Bulan	96.016.000	Bulan	-	0%	0%	36	286.947.100	60%	81%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.06.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	60 Bulan	61.645.776	36 Bulan	67.000.000	12 Bulan	30.000.000	Bulan	-	0%	0%	36	67.000.000	60%	109%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.06.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan minum Kantor	55 Bulan	56.508.628	33 Bulan	33.000.000	11 Bulan	11.000.000	Bulan	-	0%	0%	33	33.000.000	60%	58%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.06.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	60 Bulan	1.284.286.991	36 Bulan	949.113.000	12 Bulan	300.000.000	3 Bulan	17.768.550	25%	6%	39	966.881.550	65%	75%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	612.700.000	100%	435.700.000	100%	169.000.000		-	0%	0%	100%	435.700.000	100%	71%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.07.00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	80.000.000	2 Unit	72.000.000					0%	0%	2	72.000.000	100%	90%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		43 Unit	532.700.000	14 Unit	363.700.000	29 Unit	169.000.000	Unit	-	0%	0%	14	363.700.000	33%	68%	Dinas P & K	
		•																	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerj	2026		aian Kinerja RKPD s/d n Lalu (2023)		a dan Anggaran RKPD Ilan yang dievaluasi (2024)		apaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	RKPI	si Anggaran D (%)	RKPD s	nerja dan Anggaran ;/d Tahun 2024	s/d Tahur	garan RPJMD 1 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9= 8/7	*100%)		10= 6+8)	(11=10/		(12)	(13)
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase pemenuhan Layanan	K 100%	Rp 430.914.246	K 100%	Rp 484.358.497	К	Rp 204.542.000	К	Rp 25.595.165	K 0%	Rp 13%	K 1	Rp 509.953.662	100%	Rp 118%	Dinas P & K	\vdash
	1.01.01.2.08.00		Pendukung Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber	60 Bulan	110.962.396	36 Bulan	96.732.497	12 Bulan	42.000.000	3 Bulan	3.595.165	25%	9%	39	100.327.662	65%	90%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.08.00		Daya Air Dan Listrik Tersedianya Sewa Gedung Kantor,	60 Bulan	292.817.434	36 Bulan	371.000.000	12 Bulan	157.000.000	3 Bulan	22.000.000	25%	14%	39	393.000.000	65%	134%	Dinas P & K	\vdash
	1.01.01.2.08.00	Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas Terciptanya Kebersihan Kantor	60 Bulan	27.134.416	36 Bulan	16.626.000	12 Bulan	5.542.000	Bulan	-	0%	0%	36	16.626.000	60%	61%	Dinas P & K	\vdash
	1.01.01.2.09	Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100%	442.205.697	100%	522.848.975	100%	80.640.000	0%	5.000.000	0%	6%	1	527.848.975	100%	119%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.09.00	Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	60 Bulan	436.657.577	36 Bulan	237.806.975	12 Bulan	69.900.000	3 Bulan	5.000.000	25%	7%	39	242.806.975	65%	56%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.09.00	Jabatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	60 Bulan	5.548.120	36 Bulan	285.042.000	12 Bulan	10.740.000	Bulan	-	0%	0%	36	285.042.000	60%	5138%	Dinas P & K	
	1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	100%	271.814.606.387	64,08%	145.287.879.565	100%	54.752.987.500	100%	14.418.981.965	100%	26%	1,6408	159.706.861.530	164%	59%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 12 Tahun	99,66%	158.674.060.308	99,53%	78.708.848.069	99,59%	37.238.499.200	99,53%	9.314.469.880	99,53%	25%	1,9906	88.023.317.949	200%	55%	Dinas P & K	
			SKOR NUMERASI SD SKOR LITERASI SD	58,99 63,61		53,19 58,61		56,09 61,11		53,19 58,61		53,19 58,61		106,38 117,22	-	180% #VALUE!	#DIV/0!	Dinas P & K Dinas P & K	
	1.01.02.2.01.00	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	840.000.000			4 Ruang	840.000.000	Ruang	17.608.485	0%	2%	0	17.608.485	0%	2%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.01.00		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	250.000.000			1 Ruang	250.000.000	Ruang	8.684.085	0%	3%	0	8.684.085	0%	3%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.01.00	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	14 Unit	2.592.000.000			14 Unit	2.592.000.000	Unit	89.379.420	0%	3%	0	89.379.420	0%	3%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.01.00		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	920.000.000			4 Unit	920.000.000	Unit	31.960.785	0%	3%	0	31.960.785	0%	3%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.01.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	360.000.000			3 Ruang	360.000.000	Ruang	12.569.640	0%	3%	0	12.569.640	0%	3%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.01.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehahilitasi Sedang/Berat	3 Unit	600.000.000			3 Unit	600.000.000	Unit	20.845.800	0%	3%	0	20.845.800	0%	3%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.01.00	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2 Paket	220.000.000			2 Paket	220.000.000	Paket	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya perlengkapan Siswa SD	17.963 Siswa	929.585.250		929.585.250					0%		17.963 Siswa	929.585.250	100%		Dinas P & K	
	1.01.02.2.01.00	Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Kegiatan	20 Kali	556.782.452	4 Kali	133.218.000		-			0%	0%	4 Kali	133.218.000	20%	24%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.01.00	Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	***************************************	302.550.700			***************************************	302.550.700	Peserta Didik		0%	0%	***************************************	-	100%	0%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.01.00	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	489 Orang	5.627.744.500			489 Orang	5.627.744.500	489 Orang	425.200.000	100%	8%	489	425.200.000	100%	8%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.01.00	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	190 Orang	17.551.855.000	130 Orang	14.497.484.150	60 Orang	260.000.000	Orang		0%	0%	130	14.497.484.150	68%	83%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.01.00	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	127 Sekolah	96.895.261.687	127 Sekolah	32.847.548.688	127 Sekolah	18.013.522.000	127 Sekolah	8.695.011.000	100%	48%	127 Sekolah	41.542.559.688	100%	43%		
	1.01.02.2.01.00	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30 Orang	87.210.000			30 Orang	87.210.000	Orang		0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.01.00	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	60 Orang	160.000.000			60 Orang	160.000.000	Orang		0%	0%	0		0%	0%	Dinas P & K	
		Koordinasi Perencanaan supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan SD	Terlaksananya Perencanaan supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan SD	8 Kali	450.000.000	2 Kali	159.723.670	1 Kali	125.000.000	Kali		0%	0%	2	159.723.670	25%	35%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.01.00	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	15 Dokumen	150.000.000	5 Dokumen	36.432.200	1 Dokumen	70.000.000	Dokumen		0%	0%	5	36.432.200	33%	24%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.01.00	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	***************************************	75.000.000			#######################################	75.000.000	Komunitas		0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.01.00		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan	1 Kegiatan	87.544.000			1 Kegiatan	87.544.000	Kegiatan		0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	rja RPJMD pada Tahun 2026		n Lalu (2023)		a dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Cap dan Realisa RKPI	si Anggaran) (%)	RKPD s	nerja dan Anggaran /d Tahun 2024	Tingkat Capaia Realisasi Angga s/d Tahun 2	ran RPJMD 024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9= 8/7			10= 6+8)	(11=10/5*	,	(12)	(13)
		` '		K 25 U=i4	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K 84	Rp	K 22.50/	Rp		
3	.01.02.2.01.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab	25 Unit	23.750.598.720	84 Unit	30.104.856.111	3 Unit	380.000.000	Unit	13.210.665	0%	3%	84	30.118.066.776	336%	127%	Dinas P & K	
1	.01.02.2.01.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah	58 Ruang	5.910.000.000			58 Ruang	5.910.000.000	Ruang		0%	0%	0	-	0%	0%		
		Sekolah	Direhabilitasi Sedang/Berat	·														Dinas P & K	
1	.01.02.2.01.00	5 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta yang tersedia	2 Paket	357.928.000			2 Paket	357.928.000	Paket		0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
1	.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 – 15 Tahun	92,39%	97.663.289.249	89,34%	57.645.377.141	90,87%	13.455.762.300	89,34%	3.970.062.855	98%	89,34%	90,87%	61.615.439.996	90,87%	90,87%	Dinas P & K	
			SKOR NUMERASI SMP	70,03		67,03		68,53		67,03		98%	67,03	68,53		68,53	68,53%		
			SKOR LITERASI SMP	75,85		73,65		74,75		73,65		99%	73,65	74,75		74,75	74,75%	Dinas P & K	
1	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dibangun	25 Unit	45.341.727.818	37 Ruang	22.829.560.897	2 Unit	450.000.000	Unit	15.702.060	0%	3%	37	22.845.262.957	148%	50%	Dinas P & K	
1	.01.02.2.02.00	1 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Ruang	1.950.000.000			17 Ruang	1.950.000.000	Ruang	69.493.770	0%	4%	0	69.493.770	0%	4%	Dinas P & K	
1	.01.02.2.02.00	1 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah	1 Ruang	128.100.000			1 Ruang	128.100.000	Ruang	4.624.000	0%	4%	0	4.624.000	0%	4%	Dinas P & K	_
_		Sekolah	Direhabilitasi Sedang/Berat																
	.01.02.2.02.00		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	103.895.300		372.437.000	1 Paket	103.895.300	Paket		0% 0%	0%	6365	372.437.000	0%	0%	Dinas P & K	
	.01.02.2.02.00		Tersedianya perlengkapan Siswa SMP Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah	6.366 Paket	329.337.000 13.048.500.000	6.365 Siswa 422 Siswa	3/2.43/.000 10.288.500.000	***********	1.935.000.000	Peserta Didik		0%	0% 0%	6365 422	372.437.000 10.288.500.000	100% 84%	113% 79%	Jinas P & K	
									2.555.000.000	. coci ta Didik			0%	722					
1	.01.02.2.02.00	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kegiatan	20 Kali	485.169.369	4 Kali	96.840.000					0%	υ%	4	96.840.000	20%	20%	Dinas P & K	
1	.01.02.2.02.00	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang	************	102.403.000			************	102.403.000	Peserta Didik		0%	0%	0	-	0%	0%		
		Siswa	Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik															Dinas P & K	
1	.01.02.2.02.00	4 Pengembangan Karir Pendidik dan	Terlaksananya Pengembangan Karir	120 Orang	420.000.000	80 Orang	231.437.889	20 Orang	100.000.000	Orang	6.035.025	0%	6%	80	237.472.914	67%	57%		
		Tenaga Kependidikan SMP	Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP															Dinas P & K	
1	.01.02.2.02.00	4 Pengelolaan Dana BOS Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama	38 Sekolah	34.432.796.762	38 Sekolah	23.514.311.300	38 Sekolah	8.020.504.000	38 Sekolah	3.870.252.000	100%	48%	38 Sekolah	27.384.563.300	100%	80%	Dinas P & K	
-	01 02 2 02 00	Menengah Pertama 4 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana	yang Mengelola Dana BOS	220 Orang	80.000.000			220 Orang	80.000.000	Orang		0%	0%			0%	0%		
	01.02.2.02.00	BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	220 Orang	80.000.000			220 Orang	80.000.000	Orang		0%	0%	Ü		0%	0%	Dinas P & K	
1	.01.02.2.02.00	4 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi,	30 Orang	80.108.000			30 Orang	80.108.000	Orang		0%	0%	0	-	0%	0%		
		Pendidikan	Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan															Dinas P & K	
1	.01.02.2.02.00	S Koordinasi Perencanaan supervisi dan	Terlaksananya Perencanaan supervisi	4 Dokumen	450.000.000	2 Dokumen	135.682.795	1 Dokumen	200.000.000	Dokumen		0%	0%	2	135.682.795	50%	30%		
		Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan SMP	dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan															Dinas P & K	
٠,	01 02 2 02 00	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan	SMP Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi	4 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	48.739.200					0%	00/	2	48.739.200	50%	32%		
ľ	.01.02.2.02.00	Bidang Pendidikan	kebijakan di bidang Pendidikan yang	4 DOKUITIETI	130.000.000	2 DOKUIIIEII	46.735.200					0%	0%	2	46.735.200	30%	32/0	Dinas P & K	
			dilaksanakan																
1	.01.02.2.02.00	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan	************	61.452.000			***********	61.452.000	Komunitas		0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
+	01 02 2 02 00	Tenaga Kependidikan	Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Jumlah Peserta Bimbingan Teknis.	120 Orang	390.000.000	40 Orang	127.050.000	***********	134.500.000	Komunitas		0%	0%	40	127.868.060	33%	33%		
- [3	.01.02.2.02.00	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	120 Orang	390.000.000	40 Orang	127.868.060	*************	134.500.000	komunitas		υ%	υ%	40	127.868.060	33%	33%		
		Kapasitas Bidang Pendidikan	Peningkatan Kapasitas Bidang														ľ	Dinas P & K	
		-	Pendidikan yang dilaksanakan																
1	.01.02.2.02.00	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	109.800.000			1 Ruang	109.800.000	Ruang	3.956.000	0%	4%	0	3.956.000	0%	4%	Dinas P & K	
1	.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6	56,39%	14.222.309.384	50,66%	8.058.150.055	53,52%	3.764.246.000	50,66%	1.024.709.230	50,66%	50,66%	1,0132	9.082.859.285	50,66%	50,66%	Dinas P & K	
		(PAUD)	Proporsi Jumlah Satuan PAUD	41,44%		28,05%		33,68%	1	28,05%		28,05%	28,05%	0,561	-	28,05%	28,05%	Dinas P & K	
1	.01.02.2.03.00	C Pembangunan Sarana, Prasarana dan	Terakreditasi Minimal B Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas	10 Unit	1.487.617.261	8 Unit	1.697.934.000	1 Unit	60.000.000	Unit	2.160.000	0%	4%	8	1.700.094.000	80%	114%	Dinas P & K	_
		Utilitas PAUD 1 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Sekolah dibangun Tersedianya perlengkapan Peserta Disik	6.600 Paket	161.568.000		161.568.000					0%	0%	6600	161.568.000	100%	100%		
		1 Pengembangan Karir Pendidik dan	PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga	110 Orang	324.437.760	80 Orang	205.317.760	30 Orang	119.120.000	Orang		0%	0%	90	205.317.760	73%	63%	Dinas P & K	
	02.02.2.03.00	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan	110 Orang	324.437.700	oo ording	203.317.700	30 Oralig	113.120.000	Oralig		0%	0%	80	203.317.700	7.5%		Dinas P & K	
			Kompetensi dan Kualifikasi																
1	.01.02.2.03.00	1 Pembinaan Kelembagaan dan Manaiemen PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	25 PAUD	2.095.805.000	PAUD		25 PAUD	50.000.000	PAUD	5.846.100	0%	12%	0	5.846.100	0%	0%	Dinas P & K	
1	.01.02.2.03.00	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	119 PAUD	9.195.372.363	119 PAUD	5.706.529.700	117 PAUD	2.095.805.000	117 PAUD	1.002.902.500	100%	48%	23600,00%	6.709.432.200	198%	73%		
		<u> </u>	7. 0 . 0											,				Dinas P & K	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	ja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d ın Lalu (2023)		ja dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realisa RKP	aian Kinerja si Anggaran D (%)		inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi Ang	nian Kinerja & ggaran RPJMD n 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9= 8/7	*100%)		(10= 6+8)	(11=10/	/5*100%)	(12)	(13)
(-)				К	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp	(12)	(15)
	1.01.02.2.03.001	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	20 Orang	92.644.000			20 Orang	92.644.000	Orang	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.03.002	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	32 Orang	94.865.000			32 Orang	94.865.000	Orang	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.03.002	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	161.912.995	1 Dokumen	30.734.000	Dokumen	-	0%	0%	1	161.912.995	25%	36%	Dinas P & K	
		Sosialisasi dan Advokasi Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4 Kali	320.000.000	3 Kali	124.887.600	1 Dokumen	172.948.000	Dokumen	-	0%	0%	3	124.887.600		39%	Dinas P & K	
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas	172.948.000			5 Komunitas	60.788.000	Komunitas	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.03.003	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang	2 Ruang	60.788.000			2 Ruang	400.000.000	Ruang	13.800.630	0%	3%	0	13.800.630	0%	23%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.03.003	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Bertambah Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	******	400.000.000			******	244.372.000	Peserta Didik	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.03.003	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	244.372.000			30 Orang	192.970.000	Orang	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.03.004	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang tersedia	3 Paket	150.000.000			3 Paket	150.000.000	Paket	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	6%	1.254.947.446	5,51%	875.504.300	5,76%	294.480.000	5,51%	109.740.000	5,51	37%	5,51	985.244.300	5,51	79%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.04.003	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	2 PKBM	1.224.947.446	2 PKBM	875.504.300	2 PKBM		PKBM	109.740.000	0%	41%	2 PKBM	985.244.300	100%	80%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.04.005	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa No	2 Paket	30.000.000,00	Paket	0	2 Paket	30.000.000	Paket	-	0%		0	-	0%	0	Dinas P & K	
_	1.1.02	KESEHATAN		99	D 470 544 000 544	0.0	B 00 500 053 055		Rp 105.678.138.818	_	D 2252 045 275		3.1	_		_		Dinkes	\vdash
	1.1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan	95	Rp 478.611.922.511 Rp 170.847.842.320	96 90	Rp 88.500.862.366 Rp 32.971.544.349	98 90	Rp 31.420.623.600	8 21	Rp 3.263.945.375 Rp 2.621.903.686	8,0 22,9	8.3	21	Rp 3.263.945.375 Rp 2.621.903.686		2	Diffices	\vdash
1		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan (%) Kesehatan	33	170104710421320			30	•			22,5	0,0	1	·		-	Dinkes	
	1.1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kesehatan (%)	95	Rp 189.918.439	90	Rp 70.243.992	90	Rp 112.164.400	29	Rp 30.304.600	31,8	27,0	29	Rp 30.304.600	30	16	Dinkes	
	1.1.02.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Rp 40.311.411	2	Rp 11.623.992	2	Rp 42.025.000	1	Rp 10.040.600	50,0	23,9	1	Rp 10.040.600	20	25	Dinkes	
	1.1.02.01.2.01. 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Rp 10.000.000	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	100,0	100,0					Dinkes	
	1.1.02.01.2.01. 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2	Rp 10.000.000	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	0	Rp -	0,0	0,0					Dinkes	
	1.1.02.01.2.01. 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Rp 25.322.308	1	Rp 17.934.000	1	Rp 14.195.000	1	Rp 9.429.000	100,0	66,4	1	Rp 9.429.000	20	37	Dinkes	
	1.1.02.01.2.01. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2	Rp 28.390.000	1	Rp 19.542.000	1	Rp 14.195.000	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.01.2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Rp 10.000.000	4	Rp 5.000.000	4	Rp 5.000.000	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.01.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	Rp 65.894.720	1	Rp 16.144.000	1	Rp 26.749.400	1	Rp 5.835.000	50,0	21,8	1	Rp 5.835.000		9	Dinkes	
	1.1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Pada Dinas Kesehatan (%)	95	Rp 166.635.424.996	90	Rp 28.030.102.801	90	Rp 30.432.623.600	20	Rp 2.428.086.047	22,2	8,0	20	Rp 2.428.086.047	21	1	Dinkes	1]
	1.1.02.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Rp 166.607.567.926	14	Rp 28.018.206.851	14	Rp 30.420.623.600	4	2.428.086.047	28,6	8,0	4	Rp 2.428.086.047	6	1	Dinkes	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kine	erja RPJI 2026	MD pada Tahun		paian Ki un Lalu				Anggaran RKPD ang dievaluasi 4)			Kinerja dan ng Dievaluasi)	dan Realisa RKP	aian Kinerja ssi Anggaran D (%)	RKPD	s/d Tah	an Anggaran un 2024	Realisasi Ang s/d Tahu	aian Kinerja & ggaran RPJMD n 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)			(6)			(7)			(8)			*100%)		(10= 6+	-,		/5*100%)	(12)	(13)
	1.1.02.01.2.02. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	K 5	Rp	Rp 12.663.687	1 1	Rp	Rp 5.000.000	1 1	Rp	Rp 5.000.000	К 0		Rp 0	K 0,0	Rp 0,0	К	Rp	Rp -	О	Rp 0	Dinkes	
	1.1.02.01.2.02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	10	Rp	10.128.922	2	Rp	3.912.800	2	Rp	4.000.000	0		0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	1.1.02.01.2.02. 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semesteran SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Rp	5.064.461	1	Rp	2.983.150	1	Rp	3.000.000	0		0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	1.1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	95	Rp	577.951.271	95	Rp	140.455.000	0	Rp	-	0	Rp-		#DIV/0!	#DIV/0!	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	1.1.02.01.2.05. 0002 1.1.02.01.2.05.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut yang disediakan	100	Rp		100	Rp	91.875.000	0	Rp	-	0		0	#DIV/0!	#DIV/0! #DIV/0!	0	Rp	-	0	#DIV/0!	Dinkes	<u> </u>
	0009	Pendidikan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	Rp	577.951.271	18	Rp	46.580.000	0	Rp	-	0		U	#DIV/0!	#DIV/0!	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	95	Ļ.	2.057.547.614	90	Rp	611.585.031	90	Rp	450.215.600	26	Rp	85.070.909	28,8	18,9	26	Rp	85.070.909	27	4	Dinkes	
	1.1.02.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Rp	30.613.000	1	Rp	6.122.600	1	Rp	6.122.600	1		3.146.300	50,0	51,4	1	Rp	3.146.300	10	10	Dinkes	
	1.1.02.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Rp	26.013.000	12	Rp	10.399.000	1	Rp	8.671.000	1		4.537.000	50,0	52,3	1	Rp	4.537.000	17	17	Dinkes	
	1.1.02.01.2.06. 0004 1.1.02.01.2.06.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	5	Rp Rp	126.611.536 265.617.500	1	Rp Rp	48.869.335 57.662.500	1	Rp Rp	44.636.760 53.123.500	0		11.309.503 17.611.500	40,0 50,0	25,3 33,2	0	Rp Rp	11.309.503 17.611.500	10	9	Dinkes	<u> </u>
	0005 1.1.02.01.2.06.	Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan	Disediakan Jumlah Paket Bahan/ Material yang	5	Rp	179.700.000	1	Rp	34.500.000	1	Rp	36.300.000	0		0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes Dinkes	\vdash
	0007 1.1.02.01.2.06.	Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	5	Rp	61.588.000	1	Rp	15.388.000	1	Rp	15.400.000	0		1.000.000	0,0	6,5	0	Rp	1.000.000	0	2	Dinkes	
	0008 1.1.02.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Rp	1.367.404.578	12	Rp	438.643.596	2	Rp	285.961.740	0		47.466.606	20,0	16,6	0	Rp	47.466.606	3	3	Dinkes	
	1.1.02.01.2.07		tersedianya jumlah pengadaan mebel penunjang urusan pemerintah Daerah	100	Rp	346.000.000	100	Rp	3.695.730.000	100	Rp	82.000.000	0	Rp	35.500.000	0,0	43,3		Rp	35.500.000		10	Dinkes	
	1.1.02.01.2.07. 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disadiakan	5	Rp	126.000.000	1	Rp	42.000.000	1	Rp	42.000.000	0		10.500.000	0,0	25,0	0	Rp	10.500.000	0	8	Dinkes	
	1.1.02.01.2.07. 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	Rp	220.000.000	1	Rp	25.000.000	2	Rp	40.000.000	0		25.000.000	0,0	62,5	0	Rp	25.000.000	0	11	Dinkes	
	1.1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	95	Rp	484.320.000	90	Rp	146.137.525	90	Rp	108.720.000	27	Rp	18.942.130	30,0	17,4	27	Rp	18.942.130	28	4	Dinkes	
	1.1.02.01.2.08. 0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Rp	12.000.003	1	Rp	50.400.000	1	Rp	12.000.000	0		2.000.000	40,0	16,7	0	Rp	2.000.000	13	17	Dinkes	
	1.1.02.01.2.08. 0002 1.1.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Pembayaran Tagihan (bulan) Jumlah Alat Kebersihan Kantor (bulan)	5	Rp Rp	4.320.000	1	Rp Rp	95.017.525 720.000	1	Rp Rp	96.000.000 720.000	0	-	16.942.130	50,0	0,0	0	Rp Rp	16.942.130	10	0	Dinkes	<u> </u>
	0004 1.1.02.01.2.09	Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang	95	L.	1.092.359.288	87	Rp	277.290.000	90	Rp	234.900.000	24	Rp	24.000.000	27,0	10,2	24	Rp	24.000.000	26	2	Dinkes	
	1.1.02.01.2.09.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas	14	Rp	40.800.000	7	Rp	20.800.000	7	Rp	13.600.000	0		0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	\vdash
	0001	Pemeliharaan, Pajak Perorangan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya																				Dinkes	
	1.1.02.01.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Dipelihara (unit)	35	Rp	907.000.000	7	Rp	162.100.000	7	Rp	181.400.000	1		8.000.000	14,3	4,4	1	Rp	8.000.000	3	1	Dinkes	ĺ
	1.1.02.01.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor (%)	100	Rp	185.359.288	70	Rp	51.500.000	73	Rp	27.000.000	22		8.000.000	30,1	29,6	22	Rp	8.000.000	22	4	Dinkes	
	1.1.02.01.2.09. 0009	Pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	Rp	38.700.000	3	Rp	42.890.000	2	Rp	12.900.000	1		8.000.000	50,0	62,0	1	Rp	8.000.000	11	21	Dinkes	
	1.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terlaksananya Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan (%)	100	Rp 28	82.734.134.676	92	Rp	50.734.572.481	100	Rp	69.734.403.918	8	Rp	634.637.689	8,4	0,9	8	Rp	634.637.689	8	0	Dinkes	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kine	erja RPJMD pada Tahun 2026		un Lalu (20		Target Kiner Tahun berj	alan yang d (2024)			Capaian Kinerja dan KKPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realisa RKP	aian Kinerja si Anggaran D (%)	RKPD	(inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi Ang s/d Tahui	aian Kinerja 8 ggaran RPJMI n 2024 (%)		Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)			(7)			(8)		*100%)		(10= 6+8)		/5*100%)	(12)	(13)
	1.1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	Rp 50.288.662.296	К 84	Rp 10.	Rp .253.604.978	100		Rp 71.019.800	<u>К</u> 0	Rp -	0,0	0,0	0 0	Rp -	0 0	Rp 0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.01. 0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Sarana fasilitas kesehatan yang Di bangun (%)	3	Rp 6.511.373.447	1	Rp 2.	.961.258.389	13	Rp 5.63	33.187.400	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	l
	1.1.02.02.2.01. 0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara	10	Rp 15.023.616.000	8	Rp 2.	.601.095.695	5	Rp 3.75	55.904.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	l
	1.1.02.02.2.01. 0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana fasilitas kesehatan yang dipelihara (%)	1	Rp 8.179.926.700	1	Rp	783.538.330	5	Rp 1.95	0.000.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.01. 0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	2	Rp 1.200.000.000	0	Rp	-	3	Ţ	00.000.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.01. 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan dan alat penunjang yang tersedia sesuai dengan kebutuhan (%)	4	Rp 19.373.746.149	1	Rp 1.	.985.744.790	11	Rp 96	53.000.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.01. 0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	11	Rp 153.003.000	11	Rp	51.244.800	11	Rp 5	51.001.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.01. 0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	11	Rp 38.738.197.809	11	Rp 1.	.466.760.304	11	Rp 6.72	26.651.400	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.01. 0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	2000	Rp 140.000.000	0	Rp	-	1000	Rp 7	70.000.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.01. 0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	3500	Rp 160.000.000	1000	Rp	379.975.670	1200	Rp 8	80.000.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.01. 0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai,Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai,Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	12	Rp 423.828.000	12	Rp	23.987.000	12	Rp 14	11.276.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02		Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	Rp 229.846.066.982	94	Rp 40.	.080.220.451	100	Rp 49.4	04.749.118	0	Rp 624.801.689	0,1	1,3	0	Rp 624.801.689	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3860	Rp 200.000.000	3200	Rp	98.785.500	3021	Rp 13	20.600.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (BOK Puskesmas)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas	12	Rp 874.692.000	12	Rp ·	437.346.000	12	Rp 95	53.964.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah peserta pelatihan penurunan AKI dan AKB dan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) (DAK Non Fisik) (RTK / Kasus)	20	Rp 6.729.853.902	3000	Rp	370.785.685	2780	Rp 8	86.085.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2990	Rp 300.000.000	2000	Rp	38.904.800	2672	Rp 10	00.000.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap, Imunisasi Lanjutan, dan Investigasi KIPI (%)	100	Rp 347.769.201	14000	Rp	48.500.000	10754	Rp 5	60.000.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19820	Rp 165.000.000	17000	Rp	18.017.500	18085	Rp 5	55.000.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (BOK Puskesmas)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah kerja Puskesmas	12	Rp 2.013.000.000	12	Rp ·	479.692.000	12	Rp 67	71.000.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	115900	Rp 182.508.000	101000	Rp	16.884.210	74090	Rp 6	50.836.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15800	Rp 388.856.400	12000	Rp	24.911.600	8552	Rp 12	9.618.800	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20900	Rp 274.296.000	15800	Rp	35.633.500	21270	Rp 9	91.432.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kind	2026	D pada Tahun		oaian Ki un Lalu	inerja RKPD s/d (2023)		rjalan ya (2024	Anggaran RKPD ang dievaluasi 1)		Capaian Kinerja dan RKPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realis RKI	paian Kinerja asi Anggaran PD (%)		s/d Tahu		Realisasi An s/d Tahu	paian Kinerja 8 nggaran RPJMI un 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	К	(5)	Rp	К	(6)	_	К	(7)	Rp	К	(8)	(9= 8/ K	7*100%) Rp	К	(10= 6+8	Rp	(11=10 K	/5*100%) Rp	(12)	(13)
	1.1.02.02.2.02. 0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	980	Rp	129.696.000	890	Rp	Rp 233.371.484	947	Rp	43.232.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp	- кр	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat		165	Rp	161.042.543	236	Rp	43.764.700	275	Rp	47.535.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	1
		Dengan Gangguan Jiwa Berat (BOK	Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat di wilayah kerja	12	Rp	211.904.000	0	Rp	-	12	Rp	105.952.800	0	0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0011	Puskesmas) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tuberkulosis yang Mendapatkan	3000	Rp	300.000.000	1900	Rp	802.554.850	2182	Rp	150.000.000	209	8.792.000	9,6	5,9	209	Rp	8.792.000	7	3	Dinkes	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (BOK Puskesmas)	Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di wilayah	12	Rp	365.310.000	12	Rp	60.530.000	12	Rp	121.770.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	kerja Puskesmas Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3800	Rp	300.000.000	3200	Rp	47.437.300	2630	Rp	100.000.000	250	8.601.200	9,5	8,6	250	Rp	8.601.200	7	3	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4	Rp	20.000.000	0	Rp	-	1	Rp	10.000.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	365	Rp 1	987.110.075	2	Rp	17.669.000	1	Rp	20.000.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Kasus Gizi Buruk,Balita KEP,Bumil KEK,Bumil Anemia Berat Ditemukan Serta Di Tanggulangi (kasus)	75	Rp	664.351.634	2	Rp	107.498.514	1	Rp	153.823.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (BOK Puskesmas)	Jumlah Kasus Gizi Buruk,Balita KEP,Bumil KEK,Bumil Anemia Berat Ditemukan Serta Di Tanggulangi (kasus) di wilayah kerja Puskesmas	12	Rp 6	5.832.005.000	12	Rp	2.042.582.500	12	Rp	2.277.335.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4	Rp	335.788.000	1	Rp	4.246.150	2	Rp	83.947.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di wilayah kerja Puskesmas	12	Rp	263.850.000	0	Rp	-	12	Rp	87.950.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0017	Lingkungan	Jumlah desa dengan rumah yang memiliki Jamban Sendiri (Pekon)	100		565.926.625	1	Rp	322.758.650	2	Rp	173.836.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (BOK Puskesmas)	Jumlah desa dengan rumah yang memiliki Jamban Sendiri (Pekon) di wilayah kerja Puskesmas	12	Rp	406.980.000	12	Rp	135.660.000	12	Rp	122.890.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0018	Kesehatan	Jumlah Media Promosi Kesehatan yang di gunakan (unit media)	4	Rp	820.846.530	1	Rp	315.057.600	4	Rp	366.975.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	3	Rp	75.000.000	1	Rp	19.370.500	1	Rp	25.000.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp	•	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0020		Sampel yang menjadi locus wabah/ KLB (%)	100		270.954.530	1	Rp	137.091.400	3	Rp	152.465.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	1 1 02 02 2 07	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (BOK Puskesmas)	Sampel yang menjadi locus wabah/ KLB di wilayah kerja puskesmas (%)	12	Rp	702.270.000	12	Rp	182.805.000	12	Rp	234.090.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	<u> </u>
	1.1.02.02.2.02. 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	(ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di wilayah kerja	2	Rp	33.348.000	0	Rp	-	33	Rp	16.674.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) BOK Puskesmas		12	Rp	118.314.000	0	Rp		12	Rp	59.157.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp		0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	70	Rp	82.146.000	78200	Rp	13.250.000	70	Rp	27.382.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	jumlah Penderita Penyakit Menular Bersumber Hewan, Penyakit Menular Lainnya dan PTM (%)	100	Rp 1	402.965.481	86	Rp	832.425.722	3	Rp	269.335.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (BOK Puskesmas)	jumlah Penderita Penyakit Menular Bersumber Hewan, Penyakit Menular Lainnya dan PTM (%) di wilayah kerja Puskesmas	12	Rp 3	1.747.480.000	12	Rp	1.511.296.000	12	Rp	1.249.160.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kind	erja RPJMD pada Tahun 2026		un Lalu (2			jalan ya (2024)	Anggaran RKPD ng dievaluasi)		Capaian Kine RKPD yang Di (2024)		Tingkat Cap dan Realisa RKPI	si Anggaran D (%)	RKPD	s/d Tahu		Realisasi Ang s/d Tahu	n 2024 (%)		Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	_		(7)			(8)		(9= 8/7			(10= 6+8	•		5*100%)	(12)	(13)
	1.1.02.02.2.02. 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Peserta PBI, Peserta Monev kegiatan Jaminan Kesehatan Masvarakat	K 60	Rp 108.458.870.432	12	Rp 8	Rp 3.717.913.214	12	Rp 1	Rp 10.000.000.000	З	19	9.285.600	K 25,0	Rp 0,2	З	Rp	Rp 19.285.600	K 5	Rp 0	Dinkes	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN Puskesmas)	di Dinas Kesehatan Tersedianya dana pelayanan kesehatan kapitasi dan Non kapitasi di Puskesmas	100	Rp 7.488.079.462	12	Rp 12	1.690.424.778	12	Rp	17.140.766.320	0		0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	<u> </u>
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (RSUD)	(%) Tersedianya dana pelayanan kesehatan INA - CBGs Rumah Sakit (%)	100	Rp 3.815.238.885	12	Rp 2	.994.185.173	12	Rp	2.464.896.818	0		0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di	Jumlah Orang yang Menerima Layanan	10000	Rp 44.760.000	0	Rp	-	44	Rp	22.380.000	0		0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dilikes	
	0027	Fasyankes dan Sekolah	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah																			Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional Yang Didistribusikan	1	Rp 250.800.000	1	Rp	6.000.000	2	Rp	83.600.000	0		0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah biaya operasional RS (%)	100	Rp 27.525.422.080	85		1.700.199.716	12		4.454.454.380	3		5.393.703	25,0	12,9	3	Rp	575.393.703	3	2	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	jumlah biaya Operasional Puskesmas	11	Rp 38.596.290.908	11	ļ ·	162.269.412	14		2.800.500.000	1	3	3.691.600	7,1	0,1	1	Rp	3.691.600	9	0	Dinkes	<u> </u>
	1.1.02.02.2.02.	Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK Puskesmas)	jumlah biaya Operasional Puskesmas dan manajemen Puskesmas Jumlah lokasi pendistribusian obat	12	Rp 5.446.825.671	12	Rp 1	9.188.900	12	Rp Rp	2.246.384.000 383.659.000	0		0	16,7	1,4	0	Rp Rp	5.422.386	17	0	Dinkes	<u> </u>
	0034 1.1.02.02.2.02.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas	(fasyankes) Jumlah RSUD dan Puskesmas yang akan	30	Rp 6.239.984.829	11	Rp	12.475.000	11	Rp	50.000.000	0	-	0.422.380	0,0	0,0	0	Rp	5.422.380	0	0	Dinkes	<u> </u>
	0035	Kesehatan di Kabupaten/Kota	dilakukan akredtiasi/Reakreditasi (Fasyankes)		·		ľ			ľ				Ū				Ĺ				Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikut Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikut Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3	Rp 58.720.800	1	Rp	19.573.600	1	Rp	25.000.000	0		0	0,0	0,0	0	Rp	•	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah kasus Wabah (dokumen)	5	Rp 211.945.205	1	Rp	23.453.200	1	Rp	25.000.000	0		0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Rp 420.000.000	1	Rp	19.973.250	1	Rp	140.000.000	0		0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12	Rp 150.000.000	12	Rp	38.850.000	70	Rp	50.000.000	0		0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang Dengan HIV (ODHIV) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12	Rp 150.000.000	12	Rp	9.680.000	75	Rp	50.000.000	20	3	3.615.200	26,7	7,2	20	Rp	3.615.200	167	2	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0042	Malaria	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria	500	Rp 150.000.000	235	Rp	36.799.786	75	Rp	50.000.000	0		0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria (BOK Puskesmas)	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria di Wilayah Kerja Puskesmas	12	Rp 36.180.000	0	Rp	-	12	Rp	12.060.000	0		0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	5	Rp 204.015.000	0	Rp	,	2	Rp	68.005.000	0		0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12	Rp 513.939.000	12	·	256.969.500	12	Rp	262.599.000	0		0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	2	Rp 200.000.000	0	Rp	-	1	Rp	100.000.000	0		0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	4	Rp 215.202.400	1	Rp	107.601.200	4	Rp	395.315.000	0		0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (BOK Puskesmas)	Jumlah kegiatan Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	12	Rp 43.740.000	12		847.435.000	12	Rp	21.870.000	0		0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan (BOK Puskesmas)	Pemantauan lansia risti dan pelayanan homecare pada lansia dengan PJP oleh petugas puskesmas	12	Rp 458.430.000	0	Rp	-	12	Rp	229.215.000	0		0	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02. 0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	2	Rp 124.000.000	0	Rp	-	1	Rp	62.000.000	0		1.628.000	30,0	7,5	0	Rp	4.628.000	15	4	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	2	Rp 100.000.000	0	Rp		1	Rp	50.000.000	0		5.321.200	30,0	10,6	0	Rp	5.321.200	15	5	Dinkes	<u> </u>
	1.1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi (%)	100	Rp 2.599.405.398	100	Rp	400.747.052	100	Rp	308.635.000	33	Rp !	9.836.000	33,3	3,2	33	Rp	9.836.000	33	0	Dinkes	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	rja RPJMD į 2026	pada Tahun		oaian Kii un Lalu				Anggaran RKPD ang dievaluasi 1)			Kinerja dan g Dievaluasi	dan Realisa RKP	aian Kinerja isi Anggaran D (%)	RKPD	s/d Tahı		s/d Tahur	garan RPJMD 1 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)			(6)			(7)		ĸ	(8)			/*100%) -		(10= 6+			5*100%)	(12)	(13)
	1.1.02.02.2.03. 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Tersedianya Data Kesehatan Secara Terintegrasi di Tingkat Puskesmas dan Pustu Berdasarkan Aplikasi (dokumen)	К 50		Rp 99.405.398	10	Rp	Rp 327.487.052	<u>к</u> 3	Rp	Rp 308.635.000	1	Rp	Rp 9.836.000	33,3	Rp 3,2	1 1	Rp	9.836.000	2 2	Rp O	Dinkes	
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	Rp 12	20.000.000	0	Rp	-	100	Rp	50.000.000	0	Rp	-	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	1.02.02.2.04.00 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	12	r	20.000.000	0	Rp	-	11	Rp	50.000.000	0	Rp	-	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	1.1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Dava Kesehatan (%)	100	Rp 24.6	24.814.815	96	Rp	4.359.719.000	100	Rp	4.050.534.900	10	Rp	7.404.000	10,1	0,2	10	Rp	7.404.000	10	0	Dinkes	
	1.1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota (%)	100	Rp 2	30.566.071	96	Rp	49.514.100	100	Rp	61.500.900	0	Rp	-	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	1.1.02.03.2.01. 0001	Pengedalian Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan	jumlah Perizinan Tenaga Kesehatan yang diperiksa (Dokumen)	1175	Rp 23	30.566.071	225	Rp	24.584.100	1	Rp	36.500.900	0	Rp		0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	1.1.02.03.2.01. 0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2	Rp 5	50.000.000	1	Rp	24.930.000	1	Rp	25.000.000	0	Rp	-	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	1.1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota (%)	100	Rp 24.3	94.248.744	100	Rp	3.326.176.850	100	Rp	3.422.330.000	18	Rp	4.936.000	17,9	0,1	18	Rp	4.936.000	18	0	Dinkes	
	1.1.02.03.2.02.0	Perencanaan dan Distribusi serta	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan	4	Rp 6.4	99.000.000	2	Rp	40.000.000	12	Rp	3.249.500.000	0	Rp	-	0,0	0,0	0						
	001	Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPNI dan IBI)																				Dinkes	
	1.1.02.03.2.02.0 002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja serta penyedian tenaga kontrak (Dokumen)	5	Rp 24.02	29.704.237	1	Rp	3.167.318.750	100	Rp	30.336.000	20	Rp	2.468.000	20,0	8,1	20	Rp	2.468.000	400	0	Dinkes	
	1.1.02.03.2.02. 0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Tersedianya Dana Hibah Untuk Organisasi PPNI, IBI dan YJI (organisasi)	5	Rp 36	64.544.507	1	Rp	118.858.100	1	Rp	142.494.000	0	Rp	2.468.000	20,0	1,7	0	Rp	2.468.000	4	1	Dinkes	
	1.1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	Rp 30	08.550.470	92	Rp	984.028.050	100	Rp	566.704.000	13	Rp	2.468.000	12,5	33,2	13	Rp	2.468.000	13	1	Dinkes	
	1.1.02.03.2.03. 0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya Petugas Kesehatan Dan Kader Dalam Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), Screening Hypotiroid Kongenital (SHK), dan Sistem Kewaspadaan Pangan Gizi (SKPG) (orang)	15	Rp 30	08.550.470	12	Rp	984.028.050	160	Rp	566.704.000	20	Rp	2.468.000	12,5	0,44%	20	Rp	2.468.000	133	1	Dinkes	
	1.1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Tingkat Pengawasan dan Tindaklanjut	100	Rp 8	88.630.700	100	Rp	48.630.700	100	Rp	137.428.200	0	Rp		0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	1.1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksanany Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (%)	100	Rp :	88.630.700	100	Rp	48.630.700	100	Rp	20.000.000	0	Rp	-	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	1.1.02.04.2.01. 0001	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	4	Rp 8	88.630.700	1	Rp	48.630.700	1	Rp	20.000.000	0	Rp	-	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	
	1.1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	Rp 8	88.522.000	0	Rp	-	100	Rp	44.261.000	0	Rp	-	0,0	0,0	0	Rp	-	0	0	Dinkes	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kine	rja RPJMI 2026	O pada Tahun		aian Kir un Lalu (nerja RKPD s/d (2023)			Anggaran RKPD ing dievaluasi		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realisa	paian Kinerja asi Anggaran D (%)		inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024		ian Kinerja & garan RPJMD n 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)			(6)			(7)			(8)	(9= 8/	7*100%)		(10= 6+8)	(11=10/	5*100%)	(12)	(13)
(-)		' '		K	ļ	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	\- - /	\ > 1
	1.1.02.04.2.03. 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-RT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	2	Rp	88.522.000	0	Rp	-	1	Rp	44.261.000	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100	Rp	74.200.000	0	Rp	-	100	Rp	37.100.000	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.04.2.04. 0001	Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2	Rp	74.200.000	0	Rp		1	Rp	37.100.000	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri RumahTangga	Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri RumahTangga	100	Rp	72.134.400	0	Rp	-	100	Rp	36.067.200	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.04.2.06. 0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	2	Rp	72.134.400	0	Rp	•	1	Rp	36.067.200	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif (%)	100	Rp	316.500.000	100	Rp	386.395.836	100	Rp	335.148.200	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	Rp	235.232.000	100	Rp	33.400.000	100	Rp	58.808.000	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.05.2.01 0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Rapat Koordinasi Bidang Kesmas)	4	Rp	235.232.000	1	Rp	33.400.000	1	Rp	58.808.000	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif (%)	100	Rp	316.500.000	100	Rp	82.336.136	100	Rp	105.500.000	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.05.2.02 0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4	Rp	316.500.000	1	Rp	82.336.136	1	Rp	105.500.000	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.05.2.03	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah/Kota	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah/Kota (%)	100		598.787.800	100	Rp	270.659.700	100	Rp	170.840.200	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.05.2.03. 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		4		345.068.800	1	Rp	43.174.700	1	Rp	86.267.200	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (BOK Puskesmas)	Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di wilayah Kerja Puskesmas	12	Rp	253.719.000	12	Rp	227.485.000	12	Rp	84.573.000	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				
А	01:03:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp 27.	806.086.122	90	Rp 20	6.002.369.153	92,5	Rp	6.217.184.400	81	Rp 1.709.490.241	87,6	27,5		Rp 37.331.376.511		134,26	DPUPR	
	1.03.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp	117.184.869	90	Rp	56.117.390	92,5	Rp	44.000.000	81	Rp 5.000.000	87,6	11,4		Rp 109.597.390		93,53	DPUPR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	ja RPJMD pada Tahı 2026		un Lalı	u (2023)	Tahun berja	alan ya (2024	•		(202	•	dan Realisa RKP	paian Kinerja asi Anggaran D (%)		s/d Ta	dan Anggaran hun 2024	Tingkat Capai Realisasi Ang s/d Tahun	garan RPJMD 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	К	(5) Rp	К	(6)) Rp	К	(7)	Rp	K	(8)) Rp	(9= 8/7 K	7*100%) Rp	K	(10= 6	+8) Rp	(11=10/5 K	S*100%) Rp	(12)	(13)
	1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Rp 61.410.00	3	Rp	55.899.950	2	Rp	13.000.000	2	Rp		100,0	0,0	5	Rp	55.899.950	100	91,03	DPUPR	
	1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	5	Rp 20.000.00) 3	Rp	-	1	Rp	4.000.000	_	Rp	_	-	0.0	3	B Rp	-	60	0.00	DPUPR	
		RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	_					_							-,-		1.7					
	1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perangkat Daerah	5	Rp 20.000.00	3	Rp	-	1	Rp	4.000.000	-	Rp	-	-	0,0	3	Rp		60	0,00	DPUPR	
	1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	5	Rp 25.000.00	3	Rp	-	1	Rp	5.000.000	1	Rp	5.000.000	100,0	100,0	4	Rp	5.000.000	80	20,00	DPUPR	
	1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	5	Rp 25.000.00	3	Rp	-	1	Rp	5.000.000	-	Rp	-	-	0,0	3	Rp Rp	-	60	0,00	DPUPR	
	1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	5	Rp 55.774.86	9 3	Rp	48.697.440	1	Rp	13.000.000	1	Rp	-	100,0	0,0	4	l Rp	48.697.440	80	87,31	DPUPR	
		Kinerja SKPD ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT	Kinerja SKPD Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja	95	D= 46 204 000 00		-	24 005 472 755	03.5	_	2 052 222 402	77	_	740 745 000	70.0	26.2		-			147.03	201122	
	1.03.01.2.02	DAERAH	Perangkat Daerah Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan		Rp 16.304.908.80	-	кр	21.085.172.756	-		2.852.320.400	/3	Rp	748.215.098	78,9	26,2		÷	24.118.286.130			DPUPR	لــــا
	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tunjangan PNS Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	70	Rp 16.237.752.70	3 42	Rp	23.311.471.032	14	Rp	2.838.820.400	3	Rp	742.215.098,0	21,4	26,1	45	S Rp	24.053.686.130	64,2857143	148,13	DPUPR	!
	1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD	5	Rp 30.525.50	3	Rp	26.500.000	1	Rp	6.000.000	1	Rp	6.000.000	100,0	100,0	4	Rp.	32.500.000	80	106,47	DPUPR	!
	1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	Rp 24.420.40	8	Rp	21.400.000	2	Rp	5.000.000	-	Rp	-	-	0,0	8	Rp	21.400.000	80	87,63	DPUPR	
	1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Rp 12.210.20	3	Rp	10.700.000	1	Rp	2.500.000	-	Rp	-	-	0,0	3	B Rp	10.700.000	60	87,63	DPUPR	
	1.03.01.2.03	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp 759.763.23	1 90	Rp	378.503.500	92,5	Rp	10.000.000	0	Rp	3.491.600	-	34,9		Rp	391.276.200		51,50	DPUPR	
	1.03.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada	jumlah dokumen Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang	60	Rp 759.763.23	4 36	Rp	387.784.600	1	Rp	10.000.000	1	Rp	3.491.600	100,0	34,9	37	7 Rp	391.276.200	61,6666667	51,50	DPUPR	
	1.03.01.2.05	SKPD ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Milik Daerah pada SKPD Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp 864.761.16	90	Rp	385.150.000	92,5	Rp	254.500.000	90	Rp		97,3	0,0		Rp	692.650.000		80,10	DPUPR	
	1.03.01.2.05.05	Pengadaan Pakaian Dinas beserta	Jumlah pakaian dinas	186	Rp 364.761.16	93	Rp	253.503.500	103	Rp	54.500.000	-	Rp	-	-	0,0	93	B Rp	253.503.500	50	69,50	DPUPR	
	1.03.01.2.05.09	Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	60	Rp 500.000.00	36	Rp	692.650.000	20	Rp	200.000.000		Rp	-	-	0,0	36	5 Rp	692.650.000	60	138,53	DPUPR	
	1.03.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja	95	Rp 2.441.304.25	1 90	Rp	3.577.680.982	92,5	Rp	1.636.914.000	90	Rp	641.556.543	97,3	39,2		Rp	6.220.837.906		254,82	DPUPR	
	1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Perangkat Daerah Jumlah Alat	60	Rp 49.634.46	3 36	Rp	133.926.000	14	Rp	56.070.000		Rp	-	-	0,0	36	+	133.926.000	60	269,82	DPUPR	
	1.03.01.2.06.02		Jumlah Alat Tulis Kantor	60	Rp 488.844.37	4 36	Rp	475.317.024	46	Rp	126.488.000	13	Rp	34.576.200	28,3	27,3	49	Rp	509.893.224	81,6666667	104,31	DPUPR	
	1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga	60	Rp 145.000.00		Rp	-	10	Rp	72.500.000		Rp	17.000.000	20,0	23,4	2	2 Rp	17.000.000	3,33333333		DPUPR	=
	1.03.01.2.06.04 1.03.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Aktivitas Jumlah Barang Cetakan dan	60 60	Rp 604.510.00 Rp 553.315.41		Rp	241.309.860 742.512.280	1 9	Rp	35.000.000 148.856.000	1 0	Rp	45.673.200	100,0 100,0	0,0 30,7	37 44		241.309.860 788.185.480	61,6666667 73,3333333	39,92 142,45	DPUPR DPUPR	
		Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan	Penggandaan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan	60		-	Rn		-	Rn	600.000.000		٠.,٢			70,3		+				DPUPR	
	1.03.01.2.06.06	Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Perundang-Undangan Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu		Rp 150.000.00		кр	1.473.412.000	12	кр	88.000.000	1	Rp	421.500.000 7.320.000	50,0 25.0	/0,3	37	Rp Rp	1.894.912.000 7.320.000	61,6666667	,	DPUPR	
	1.03.01.2.06.09		Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	Rp 595.000.00		Rn	2.646.730.199	2	Rp	510.000.000		Rp	115.487.143	23,0	22,6	36	i Rn	2.762.217.342	60		DPUPR	
	1.03.01.2.08	Konsultasi SKPD PENYEDIAAN JASA PENUNJANG	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja	95	Rp 2.379.421.00	-	+	1.483.370.880	92,5	Rp	740.500.000	43	Rp	177.095.000	46,5	23,9	-	+	2.278.325.335	-	95,75	DPUPR	
	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Perangkat Daerah Jumlah Pembayaran Tagihan	60	Rp 427.357.00	-	Rp	607.812.455	4	Rp	327.000.000	1	Rp	22.174.000	25,0	6,8	37	7 Rp	629.986.455	61,6666667	147,41	DPUPR	
	1.03.01.2.08.03	Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan	60	Rp 1.582.516.20	36	Rp	816.400.000	3	Rp	143.200.000	2	Rp	114.400.000	66,7	79,9	38	B Rp	930.800.000	63,3333333	58,82	DPUPR	
	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kantor Jumlah Tagihan Jasa Pelayanan Umum	60	Rp 369.547.80	36	Rp	677.017.880	5	Rp	270.300.000	1	Rp	40.521.000	20,0	15,0	37	7 Rp	717.538.880	61,6666667	194,17	DPUPR	
	1.03.01.2.09	Kantor PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kantor Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp 3.534.265.70	90	Rp	2.510.188.963	92,5	Rp	678.950.000	88	Rp	134.132.000	95,1	19,8		Rp	3.520.403.550		99,61	DPUPR	
	1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan	60	Rp 1.813.214.70	36	Rp	1.901.886.321	9	Rp	296.950.000	4	Rp	67.700.000	44,4	22,8	40) Rp	1.969.586.321	66,6666667	108,62	DPUPR	
	1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar	60	Rp 1.660.000.00	36	Rp	1.484.385.229	12	Rp	162.000.000	3		Rp57.222.000	25,0	35,3	39	Rp	1.541.607.229	65	92,87	DPUPR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	rja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d ın Lalu (2023)		ja dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realis	paian Kinerja asi Anggaran D (%)	RKPD s	nerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi Ang s/d Tahur		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	К	(5) Rp	к	(6) Rp	к	(7) Rp	ĸ	(8) Rn	(9= 8/	7*100%) Rp	K	(10= 6+8) Rp	(11=10/	5*100%) Rn	(12)	(13)
	1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	60	Rp 40.000.000	-	Rp -	2	Rp 20.000.000	-	Rp		0,0	-	Rp -	0	- 14	DPUPR	
	1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	60	Rp 400.000.000	-	Rp -	1	Rp 200.000.000	-	Rp 9.210.000	-	4,6	-	Rp 9.210.000	0	2,30	DPUPR	
В	01:03:02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah	50	Rp 45.269.103.738	35	Rp 34.410.397.814	45	Rp 5.462.261.436	30	Rp 2.117.860.00	66,7	38,8		Rp 27.649.262.297		61,08	DPUPR	
	1.03.02.2.01	PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber	50	Rp 22.634.551.869	30	Rp 30.842.403.231	45	Rp 2.749.665.546	30	Rp 1.363.790.612	2 66,7	49,6		Rp 15.678.467.241		69,27	DPUPR	
	1.03.02.2.01.10 093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah Sungai yang di Normalisasi/Restorasi	5	Rp 6.105.100.000	1	Rp 42.740.000	3	Rp 533.625.940	-	Rp 45.419.30	-	8,5	1	Rp 88.159.300	20	1,44	DPUPR	
	1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tehing	Tersedianya Prasarana Pengaman Pantai	45	Rp 10.424.351.869	24	Rp 14.360.095.929	16	Rp 2.216.039.606	8	Rp 1.318.371.312	50,0	59,5	32	Rp 15.678.467.241	71,1111111	150,40	DPUPR	
	1.03.02.2.02	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 100 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah	50	Rp 22.634.551.869	30	Rp 3.567.994.583	45	Rp 2.712.595.890	30	Rp 754.069.394	66,7	27,8		Rp 11.970.795.056		52,89	DPUPR	
	1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Tersedianya Jaringan Irigasi Yang Mantap	20	Rp 13.476.901.869	20	Rp 11.216.725.662	26	Rp 2.712.595.890	7	Rp 754.069.394	26,9	27,8	27	Rp 11.970.795.056	20	88,82	DPUPR	
С	01:03:03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman	45	Rp 11.898.748.636	40,0	Rp 7.715.071.525	43,0	Rp 5.814.390.600	37,5	Rp 175.398.000	87,2	3,0		Rp 6.891.940.960		57,92	DPUPR	
	1.03.03.2.01	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman	45	Rp 11.898.748.636	37,5	Rp 7.715.071.525	43,0	Rp 5.814.390.600	37,5	Rp 175.398.000	87,2	3,0		Rp 6.891.940.960		57,92	DPUPR	
	1.03.03.2.01.00 28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Jaringan Perpipaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Minum	3.850	Rp 10.000.000.000	1.049	Rp 6.716.542.960	300	Rp 5.814.390.600	-	Rp 175.398.000	-	3,0	1.049	Rp 6.891.940.960	27,2467532	68,92	DPUPR	
D	01:03:05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman	80	Rp 10.257.421.636	68,87	Rp 8.592.207.740	75	Rp 4.649.379.000	63,3	Rp 296.725.500	84,4	6,4		Rp 7.649.907.750		74,58	DPUPR	
	1.03.05.2.01	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman	80	Rp 10.257.421.636	63,3	Rp 8.592.207.740	75	Rp 4.649.379.000	63,3	Rp 296.725.500	84,4	6,4		Rp 7.649.907.750		74,58	DPUPR	
	1.03.05.2.01.00 25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik(SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Tersedianya Sistem Pengolahan Air Limbah dan MCK	1.500	Rp 7.850.848.716	611	Rp 7.353.182.250	275	Rp 4.649.379.000	-	Rp 296.725.500	-	6,4	611	Rp 7.649.907.750	40,7333333	97,44	DPUPR	
Е	01:03:06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan	45	Rp 13.686.151.479	30	Rp 4.118.696.050	35	Rp 3.493.844.988	25	Rp 1.210.906.405	71,4	34,7		Rp 8.132.130.906		59,42	DPUPR	
	1.03.06.2.01	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan	45	Rp 13.686.151.479		Rp 4.118.696.050	35	Rp 3.493.844.988	25	Rp 1.210.906.40	5 71,4	34,7		Rp 8.132.130.906		59,42	DPUPR	
	1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Tersedianya Drainase Untuk Mengalirkan Genangan Air	113	Rp 13.686.151.479	51	Rp 6.921.224.501	31	Rp 3.493.844.988	10	Rp 1.210.906.405	32,3	34,7	61	Rp 8.132.130.906	53,9823009	59,42	DPUPR	
F	01:03:08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar (PSU) Perkantoran Pemerintahan Daerah dalam Skala Mantap	90	Rp 513.119.588.315	60	Rp 367.407.490.094	70	Rp 62.220.366.696	55	Rp 841.208.545	78,6	1,4		Rp 183.208.500		0,04	DPUPR	
	1.03.08.2.01	PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	Rasio Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar (PSU) Perkantoran Pemerintahan Daerah dalam Skala Mantap	90	Rp 513.119.588.315	55	Rp 367.407.490.094	70	Rp 62.220.366.696	55	Rp 841.208.545	78,6	1,4		Rp 183.208.500		0,04	DPUPR	
	1.03.08.2.01.00 21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya Bangunan Gedung Pemerintah	90	Rp 513.119.588.316	70	Rp 381.539.285.836	10	Rp 62.070.366.696	7	Rp 808.000.045	70,0	1,3	77	Rp 382.347.285.881	85,555556	74,51	DPUPR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	ja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d ın Lalu (2023)		alan yaı (2024)	anggaran RKPD ng dievaluasi	Realisasi C Anggaran R	KPD yang (2024)		Tingkat Cap dan Realisa RKPI	si Anggaran O (%)	RKPD s	nerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi Ang s/d Tahur		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)			(8)		(9= 8/7		((10= 6+8)		5*100%)	(12)	(13)
(-)	ν=1	(5)		K	Rp	K	Rp	K	1	Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	\- - /	1-21
	1.03.08.2.01.00 23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung	150	Rp 750.000.000	16	Rp 150.000.000	30	Rp	150.000.000	-	Rp	33.208.500		22,1	16	Rp 183.208.500	10,6666667	24,43	DPUPR	
G	01:03:09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Kawasan yang Memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5,5	Rp 19.191.194.876	5,00	Rp 1.721.219.150	5,00	Rp	96.087.000	4,7	Rp	-	94,0	0,0		Rp 2.629.252.750		13,70	DPUPR	
	1.03.09.2.01	PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rasio Kawasan yang Memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5,5	Rp 19.191.194.876	4,70	Rp 1.721.219.150	5,00	Rp	96.087.000	4,70	Rp	-	94,0	0,0		Rp 2.629.252.750		13,70	DPUPR	
	1.03.09.2.01.00 08	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan CagarBudaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem PerkotaanNasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau	15	Rp 16.791.194.876	9	Rp 2.629.252.750	1	Rp	96.087.000	-	Rp			0,0	9	Rp 2.629.252.750	60	15,66	DPUPR	
Н	01:03:10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	43	Rp 67.037.660.955	41.5	Rp 272.326.616.493	42,0	Rp 5	9.173.066.712	41	Rp 10.9	972.770.493	97,6	18,5		Rp 297.780.130.789		444,20	DPUPR	
	1.03.10.2.01	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kemantapan Jalan	43	Rp 67.037.660.955	41	Rp 294.095.942.736	42,0	Rp 5	9.173.066.712	41	Rp 10.9	972.770.493	97,6	18,5		Rp 297.780.130.789		444,20	DPUPR	
	1.03.10.2.01.00 29	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaaraan Jalan dan Jembatan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan	5	Rp 4.273.570.000	34	Rp 6.629.754.704	16	Rp	1.882.591.913	16	Rp 8	870.009.120	100,0	46,2	50	Rp 7.499.763.824	1000	175,49	DPUPR	
	1.03.10.2.01.00 32	Pembangunan Jalan	Tersedianya Ruas Jalan Untuk Transportasi Masyarakat	32	Rp 11.891.280.954	10	Rp 27.998.295.006	1	Rp	3.489.582.295	0	Rp 1.9	900.291.876	-	54,5	10	Rp 29.898.586.882	31,5625	251,43	DPUPR	
	1.03.10.2.01.00	Rekonstruksi Jalan	Tersedianya Ruas Jalan Dalam Kondisi Mantap	50	Rp 12.500.000.000	140	Rp 259.467.893.026	12	Rp 3	8.544.251.962	0	Rp 9	913.887.057	-	2,4	140	Rp 260.381.780.083	280	2083,05	DPUPR	
	1.03.10.2.01.00 34	Pemeliharaan Berkala Jalan	Tersedianya Ruas Jalan Dalam Kondisi Mantap	50	Rp 12.500.000.000	46	Rp 74.527.951.102	5	Rp 1	4.485.379.135	0	Rp 7.2	288.582.440	-	50,3	46	Rp 81.816.533.542	91,4	654,53	DPUPR	
	1.03.10.2.01.00 39	Rehabilitasi Jembatan	Tersedianya Jembatan Untuk transportasi Masyarakat	17	Rp 11.022.300.000	6	Rp 1.439.997.000	2	Rp	43.929.513		Rp	-	-	0,0	6	Rp 1.439.997.000	35,2941176	13,06	DPUPR	
	1.03.10.2.01.00 40	Pembangunan Jembatan	Tersedianya Jembatan Untuk transportasi Masyarakat	19	Rp 11.500.000.000	11	Rp 9.976.919.646	5	Rp	177.331.894	2	Rp	-	40,0	0,0	13	Rp 9.976.919.646	68,4210526	86,76	DPUPR	
	1.03.10.2.01.00 43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya dokumen survey kondisi jalan / Jembatan	10	Rp 2.750.000.000	-	Rp -	2	Rp	550.000.000	0	Rp	-	-	0,0	-	Rp -	0	0,00	DPUPR	
1	01:03:11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	JASA KONSTRUKSI Persentase Jasa Kontruksi yang Handal dan dapat Diandalkan	50	Rp 2.473.753.067	28	Rp 10.367.829.196	35,0	Rp	745.926.000	20	Rp 1	133.728.250	57,1	17,9	20	Rp 1.971.882.880	40	79,71	DPUPR	
	1.03.11.2.01	PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	JASA KONSTRUKSI Persentase Jasa Kontruksi yang Handal dan dapat Diandalkan	50	Rp 1.225.000.000	20	Rp 1.004.161.720	35,0	Rp	300.000.000	20	Rp	-	57,1	0,0	20	Rp 390.956.000	40	31,91	DPUPR	
	1.03.11.2.01.00 16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Tersedianya tenaga kerja yang terlatih	170	Rp 670.000.000	80	Rp 390.956.000	41	Rp	300.000.000	-	Rp	-	-	0,0	80	Rp 390.956.000	47,0588235	58,35	DPUPR	
	1.03.11.2.02	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	JASA KONSTRUKSI Persentase Jasa Kontruksi yang Handal dan dapat Diandalkan	50	Rp 1.225.000.000	20	Rp 1.004.161.720	35,0	Rp	279.926.000	20	Rp	92.979.000	57,1	33,2	20	Rp 730.250.780	40	59,61	DPUPR	
	1.03.11.2.02.00 13	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Basic Price/Satuan Harga	5	Rp 590.000.000	9	Rp 637.271.780	2	Rp	279.926.000	-	Rp	92.979.000	-	33,2	9	Rp 730.250.780	180	123,77	DPUPR	
	1.03.11.2.04	PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI	JASA KONSTRUKSI Persentase Jasa Kontruksi yang Handal dan dapat Diandalkan	50	Rp 668.753.066	20	Rp 7.525.512.846	35,0	Rp	166.000.000	20	Rp	40.749.250	57,1	24,5	20	Rp 1.241.632.100	40	185,66	DPUPR	
	1.03.11.2.04.00 06	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Pekerjaan Fisik Kabupaten	60	Rp 668.753.066	36	Rp 1.200.882.850	12	Rp	166.000.000	3	Rp	40.749.250	25,0	24,5	39	Rp 1.241.632.100	65	185,66	DPUPR	
J	01:03:12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog	50	Rp 1.641.374.395	25	Rp 7.757.804.740	30	Rp	1.688.818.270	20	Rp €	589.407.341	66,7	40,8	20	#REF!	40	#REF!	DPUPR	
	1.03.12.2.01	PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog	50	Rp 410.343.597	20	Rp 254.063.140	30	Rp	1.576.448.820	0	Rp 6	560.114.741	-	41,9	-	Rp 914.177.881	0	222,78	DPUPR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kine	rja RPJMD pada Tahun 2026		n Lalu (2023)		ja dan Anggaran RKPD jalan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KKPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realisa RKP	paian Kinerja asi Anggaran D (%)	RKPD s	inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi An s/d Tahu	aian Kinerja & ggaran RPJMD n 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9= 8/	7*100%)		(10= 6+8)	(11=10,	/5*100%)	(12)	(13)
		 		К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	-	
	1.03.12.2.01.00 03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	1	Rp 500.000.000	-	Rp -	1	Rp 121.594.200	-	Rp 36.761.950	-	30,2	-	Rp 36.761.950	0	7,35	DPUPR	
	1.03.12.2.01.00 11	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	1	Rp 2.000.000.000	-	Rp -	1	Rp 1.438.966.370	-	Rp 623.352.791	-	43,3	-	Rp 623.352.791	. o	31,17	DPUPR	
	1.03.12.2.01.00 13	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	500	Rp 410.343.597	670	Rp 269.510.390	75	Rp 15.888.250	75	Rp -	100,0	0,0	745	Rp 269.510.390	149	65,68	DPUPR	
	1.03.12.2.03	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog	50	Rp 410.343.603	20	Rp 4.915.571.849	30	Rp 36.947.200	20	Rp 19.192.600	66,7	51,9		Rp 4.934.764.449		1202,59	DPUPR	
	1.03.12.2.03.00 04	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Tersusunnya Kajian dan Peta Potensi Wilayah Tata Guna Lahan	5	Rp 410.343.597	9	Rp 4.915.571.849	1	Rp 36.947.200	-	Rp 19.192.600	-	51,9	9	Rp 4.934.764.449	180	1202,59	DPUPR	
	1.03.12.2.04	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog	50	Rp 410.343.597	20	Rp 745.805.091	30	Rp 75.422.250	20	Rp 10.100.000	66,7	13,4	20	Rp 755.905.091		184,21	DPUPR	
	1.03.12.2.04.00 09	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Optimal Kinerja Dalam Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Pesisir Barat	60	Rp 205.171.802	36	Rp 745.805.091	12	Rp 75.422.250	3	Rp 10.100.000	25,0	13,4	39	Rp 755.905.091	. 65	368,43	DPUPR	
-	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUI	MAHAN DAN KAWASAN BEDRAI IVINAAN	<u> </u>	1	1		1	1	l .	 					1	 		
1	1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan	95,00	20.160.733.730,00	90,00	3.734.039.425,00	2,50	2.477.667.700,00	0,62	483.019.914,00	24,68	19,49	90,62	4.217.059.339,00	0,95	0,21	DPRKP	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	95,00	22.500.000,00	90,00	14.042.560,00	2,50	12.400.000,00	0,63	-	25,00	-	90,63	14.042.560,00	0,95	0,62	DPRKP	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,00	5.000.000,00	6,00	9.118.460,00	2,00	7.400.000,00	0,50	-	25,00	-	6,50	9.118.460,00		1,82	DPRKP	
	1.04.01.2.01.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,00	17.500.000,00	12,00	4.924.100,00	4,00	5.000.000,00	1,00	-	25,00	-	13,00	4.924.100,00	0,65	0,28	DPRKP	
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase Pelaporan Keuangan tepat Waktu	95,00	17.152.477.730,00	90,00	2.704.281.591,00	2,50	1.923.827.700,00	0,67	400.376.614,00	26,79	20,81	90,67	3.104.658.205,00	0,95	0,18	DPRKP	
	1.04.01.2.02.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70,00	17.119.977.730,00	42,00	2.692.557.991,00	14,00	1.918.327.700,00	4,00	400.376.614,00	28,57	20,87	46,00	3.092.934.605,00		0,18	DPRKP	
	1.04.01.2.02.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5,00	10.000.000,00	3,00	4.486.500,00	1,00	2.500.000,00	0,25	-	25,00	-	3,25	4.486.500,00		0,45	DPRKP	
	1.04.01.2.02.00	(Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60,00	17.500.000,00	36,00	5.443.100,00	12,00	2.000.000,00	3,00	-	25,00	-	39,00	5.443.100,00	0,65	0,31	DPRKP	
	1.04.01.2.02.00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6,00	5.000.000,00	4,00	1.794.000,00	1,00	1.000.000,00	0,25	-	25,00	-	4,25	1.794.000,00	0,71	0,36	DPRKP	
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik	95,00	100.000.000,00	90,00	20.000.000,00	2,50	20.000.000,00	0,63	-	-	-	90,63	20.000.000,00	0,95	0,20	DPRKP	
	1.04.01.2.05.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60,00	100.000.000,00	12,00	20.000.000,00	4,00	20.000.000,00	1,00	-	-	-	13,00	20.000.000,00	0,22	0,20	DPRKP	
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	95,00	1.402.000.000,00	90,00	717.907.024,00	2,50	312.313.000,00	0,61	31.033.300,00	24,52	9,94	90,61	748.940.324,00	0,95	0,53	DPRKP	
	1.04.01.2.06.00	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60,00	50.000.000,00	12,00	-	-	-	-	-	-	-	12,00	-	0,20	-	DPRKP	
	1.04.01.2.06.00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5,00	125.000.000,00	3,00	49.550.000,00	1,00	25.000.000,00	0,25	- 2 502 05	25,00		3,25	49.550.000,00	0,65	0,40	DPRKP	
	1.04.01.2.06.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	60,00 720,00	250.000.000,00 72.000.000,00	36,00 432,00	103.289.300,00	12,00	47.751.000,00 12.000.000,00	3,00	3.692.000,00 2.000.000,00	25,00 25,00	7,73 16,67	39,00 462,00	106.981.300,00 30.800.000,00		0,43	DPRKP	
	1.04.01.2.00.00	Peraturan Perundang undangan	Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	720,00	, 2.000.000,00	+32,00	20.300.000,00	120,00	12.000.000,00	30,00	2.000.000,00	23,00	10,07	+0∠,00	30.000.000,00	0,04	0,43	DPRKP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	ja RPJMD pada Tahun 2026		n Lalu (2023)	Tahun berja	a dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)	Anggaran Ri	apaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	RKPI	si Anggaran D (%)	RKPD s	nerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi Ang s/d Tahur		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		*100%)		(10= 6+8)		5*100%)	(12)	(13)
	1.04.01.2.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	K 55,00	Rp 55.000.000,00	K 22,00	Rp 11.000.000,00	11,00	Rp 11.000.000,00	K 2,00	Rp -	К -	Rp -	K 24,00	Rp 11.000.000,00	K 0,44	Rp 0,20	DPRKP	
	1.04.01.2.06.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD	60,00	850.000.000,00	36,00	525.267.724,00	12,00	216.562.000,00	3,00	25.341.300,00	25,00	11,70	39,00	550.609.024,00	0,65	0,65	DPRKP	
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pendukung Kinerja	95,00	287.756.000,00	90,00	20.000.000,00	2,50	69.000.000,00	0,63	-	-	-	90,63	20.000.000,00	0,95	0,07	DPRKP	
	1.04.01.2.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	60,00	287.756.000,00	4,00	20.000.000,00	9,00	69.000.000,00	2,25	-	-	-	6,25	20.000.000,00	0,10	0,07	DPRKP	
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	95,00	621.000.000,00	90,00	122.038.000,00	2,50	62.117.000,00	0,58	22.000.000,00	23,21	35,42	90,58	144.038.000,00	0,95	0,23	DPRKP	
	1.04.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dava Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60,00	156.000.000,00	12,00	-	-	-	-	-	-	-	12,00	-	0,20	-	DPRKP	
	1.04.01.2.08.000		Jumlah Unit Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15,00	415.000.000,00	7,00	114.000.000,00	2,00	57.000.000,00	0,25	22.000.000,00	12,50	38,60	7,25	136.000.000,00	0,48	0,33	DPRKP	
	1.04.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60,00	50.000.000,00	24,00	8.038.000,00	12,00	5.117.000,00	3,00	-	-	-	27,00	8.038.000,00	0,45	0,16	DPRKP	
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah yang dalam Kondisi Baik	95,00	575.000.000,00	90,00	135.770.250,00	2,50	78.010.000,00	0,58	29.610.000,00	23,21	37,96	90,58	165.380.250,00	0,95	0,29	DPRKP	
	1.04.01.2.09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10,00	320.000.000,00	6,00	124.700.250,00	2,00	62.500.000,00	0,25	27.400.000,00	12,50	43,84	6,25	152.100.250,00	0,63	0,48	DPRKP	
	1.04.01.2.09.000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	60,00	5.000.000,00	12,00	-	-	-	-	-	-		12,00	-	0,20		DPRKP	
	1.04.01.2.09.001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	80,00	250.000.000,00	28,00	11.070.000,00	12,00	15.510.000,00	3,00	2.210.000,00	25,00	14,25	31,00	13.280.000,00	0,39	0,05	DPRKP	<u> </u>
-			not not be able to	22.22	4 045 007 400 00	22.22	524 202 C20 00	2.57	402 040 000 00		24 522 522 00	25.00		00.47	F 42 027 4 F2 00	2.00	2.22	D D D I I I	
- 2	1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni Cakupan Rumah Layak Huni Bagi Korban	90,00 12.00	1.815.327.122,00 60.140.914,00	88,00 5,00	521.203.620,00 48.790.300,00	0,67	193.910.000,00	0,17	21.633.533,00	25,00	11,16	88,17 5,00	542.837.153,00 48.790.300,00	0,98 0.42	0,30 0.81	DPRKP	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Bencana atau relokasi Program Kb/Kota	,						-			-				0,81	DPRKP	
	1.04.02.2.01.00 04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	12,00	60.140.914,00	5,00	48.790.300,00	-	-	-	-	-	-	5,00	48.790.300,00	0,42	0,81	DPRKP	
\vdash		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah	Cakupan Rumah Lavak Huni Bagi Korban	90.00	877.593.104,00	5,00	64.683.500,00	5,00	43.605.000,00	1,25		25,00		6,25	64.683.500,00	0,07	0,07		
	1.04.02.2.03	Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Bencana atau relokasi Program Kab/Kota	,					•		-	-	-		·		·	DPRKP	<u> </u>
	1.04.02.2.03.00	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Pembangunan Rumah Bagi Korban	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	30,00	438.796.552,00	5,00	64.683.500,00	5,00	43.605.000,00	1,25		25,00	-	6,25	64.683.500,00	0,21	0,15	DPRKP	
$\vdash \vdash$	04	Bencana	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terbangun	60,00	438.796.552,00	-		-	-			-	-	-		<u> </u>	-	DPRKP	
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Cakupan Pengelolaan Rumah Susun	60,00	438.796.552,00	22,00	60.069.400,00	12,00	100.000.000,00	3,00	11.983.933,00	25,00	11,98	25,00	72.053.333,00	0,42	0,16	DPRKP	
	1.04.02.2.05.00 01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	60,00	438.796.552,00	22,00	60.069.400,00	12,00	100.000.000,00	3,00	11.983.933,00	25,00	11,98	25,00	72.053.333,00	0,42	0,16	DPRKP	
\vdash	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan	Cakupan Penerbitan Izin Site Plan	60,00	438.796.552,00	51,00	347.660.420,00	12,00	50.305.000,00	3,00	9.649.600,00	25,00	19,18	54,00	357.310.020,00	0,90	0,81	DPRKP	
	1.04.02.2.06.000	Pengembangan Perumahan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian pembangunan	60,00	438.796.552,00	51,00	347.660.420,00	12,00	50.305.000,00	3,00	9.649.600,00	25,00	19,18	54,00	357.310.020,00	0,90	0,81	DPRKP	
		Pengembangan Perumahan	dan pengembangan perumahan															שאגץ	<u> </u>
$\vdash \vdash$		<u> </u>																	
3	1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	50,00	1.277.073.636,00	42,50	544.790.666,00	3,75	350.000.000,00	0,94	8.979.600,00	25,00	2,57	43,44	553.770.266,00	0,87		DPRKP	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	18,00	851.382.424,00	5,00	452.942.739,00	-	-	-	-	-	-	5,00	452.942.739,00	0,28	0,53	DPRKP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	ja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d n Lalu (2023)	Tahun berja	a dan Anggaran RKPD Ilan yang dievaluasi (2024)	Anggaran Ri	apaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)		si Anggaran D (%)	RKPD s	nerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi An s/d Tahu	aian Kinerja & ggaran RPJMD ın 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9= 8/7	*100%)		10= 6+8)	(11=10	/5*100%)	(12)	(13)
				K	Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp		النسا
	1.04.03.2.02.00 02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	6,00	425.691.212,00	1,00	8.873.000,00	-	•	•	-	-		1,00	8.873.000,00	0,17	0,02	DPRKP	
	1.04.03.2.02.00	Penyusunan Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebujakan Bidang PKP yang tersusun/tereview/ terlegalisasi	6,00	425.691.212,00	3,00	294.955.250,00	-	-	-	-	-	-	3,00	294.955.250,00	0,50	0,69	DPRKP	
	1.04.03.2.02.00 14	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	6,00	425.691.212,00	1,00	149.114.489,00	-	-	-		-	-	1,00	149.114.489,00	0,17	0,35	DPRKP	<u> </u>
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	2,00	425.691.212,00	1,00	91.847.927,00	4,00	350.000.000,00	1,00	8.979.600,00	0,25	0,03	2,00	100.827.527,00	1,00	0,24	DPRKP	
	1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan	2,00	425.691.212,00	1,00	91.847.927,00	4,00	350.000.000,00	1,00	8.979.600,00	0,25	0,03	2,00	100.827.527,00	1,00	0,24	DPRKP	
4	1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Permukiman yang tertata	60,00	425.691.212,00	50,00	334.920.850,00	5,00	381.090.000,00	1,25	10.461.000,00	25,00	2,75	51,25	345.381.850,00	0,85	0,81	DPRKP	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	21,00	425.691.212,00	13,00	334.920.850,00	15,00	381.090.000,00	3,75	10.461.000,00	25,00	2,75	16,75	345.381.850,00	0,80	0,81	DPRKP	
	1.04.04.2.01.00 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Layak Huni Untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha yang diperbaiki	21,00	425.691.212,00	13,00	334.920.850,00	15,00	381.090.000,00	3,75	10.461.000,00	25,00	2,75	16,75	345.381.850,00	0,80	0,81	DPRKP	
5	1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana		60,00	5.984.406.692,00	45,00	1.650.875.362,00	5,00	250.660.000,00	1,25	3.512.000,00	25,00	1,40	46,25	1.654.387.362,00	0,77	0,28	DPRKP	
	1.04.05.2.01	Dan Utilitas Umum (PSU) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Aman yang didukung dengan PSU Persentase Perumahan Yang Sudah	48,00	5.984.406.692,00	13,00	1.650.875.362,00	3,00	250.660.000,00	0,75	3.512.000,00	25,00	1,40	13,75	1.654.387.362,00	0,29	0,28	DPRKP	\vdash
	1.04.05.2.01.00	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk	dilengkapi PSU Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan PSU yang menunjang Fungsi Hunian	17,00	5.034.872.948,00	13,00	1.650.875.362,00	1,00	130.000.000,00	0,25	3.512.000,00	25,00	2,70	13,25	1.654.387.362,00	0,78	0,33	DPRKP	
	1.04.05.2.01.00	Menunjang Fungsi Hunian Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang dilaksanakan Perbaikan	7,00	949.533.744,00	-	-	2,00	120.660.000,00	0,50	-	25,00	-	0,50	-	0,07	-	DPRKP	
	SATPOPP & DAN	JIKAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARKAT		95%	29.502.726.806	100	4.529.171.360	100	5.644.695.300	100	1.182.332.959	100%	21%	458%	5.412.577.743	18%	5 ###########	SATPOLPP & DAMKAR	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	13.784.305.238	100	2.387.856.466	100	2.798.075.800	100	598.402.655	100%	21%	383%	2.291.170.748	17%		SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100	10.000.000	100	1.954.500	100	2.000.000	100		100%	0%	#DIV/0!	1.954.500	20%	1.954.500	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.01 000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	5	10.000.000	0	1.954.500	1	2.000.000	0	-	0%	0%	#DIV/0!	1.954.500	20%	1.954.500	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100	9.589.778.136	100	1.857.310.251	100	2.156.860.800	100	520.818.830	100%	24%	317%	1.651.428.411	17%		SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.02 000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedia gaji dan tunjangan asn	70	9.569.018.936	14	1.853.884.051	14	2.153.960.800	4	520.818.830	29%	24%	317%	1.651.428.411	17%		SATPOLPP & DAMKAR	\sqcup
	1 05 01 2.02 000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	11.500.000	0	2.432.600	1	1.900.000	0	-	0%	0%	#DIV/0!	1.651.428.411	14360%	5 ####################################	SATPOLPP & DAMKAR	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis	SKPD Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis															SATPOLPP &	\sqcup
	1 05 01 2.02 000	Prognosis Realisasi Anggaran Administrasi Kepegawaian Perangkat	Prognosis Realisasi Anggaran Persentase pemenuhan sarana dan	5	9.259.200	0	993.600	1	1.000.000	0	-	0%	0%	#DIV/0!	1.651.428.411	17836%		DAMKAR SATPOLPP &	$\vdash\vdash\vdash$
	1 05 01 2.05 1 05 01 2.05 02	Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	prasarana pendukung kinerja Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	100 5	674.000.000 350.000.000	100	-	100	300.000.000	0	-	0%	0%	#DIV/0! #DIV/0!	80.486.877 80.486.877	23%	80.486.877 80.486.877	DAMKAR SATPOLPP &	\vdash
	1 05 01 2.05 02	berdasarkan Tugas dan Fungsi Pengadaan Pakaian Dinas beserta	Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta	4	324.000.000	1	-	0	550.000.000	0		0%	0%	#DIV/0!	80.486.877	25%	80.486.877	DAMKAR SATPOLPP &	\vdash
\vdash		Atribut Kelengkapannya	Atribut Kelengkapan Persentase pemenuhan sarana dan														<u> </u>	DAMKAR SATPOLPP &	\vdash
	1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	prasarana pendukung kinerja	100	917.856.273	100	160.572.400	100	76.515.000	100	12.663.000	100%	17%	1956%	247.666.460	27%	247.666.460	DAMKAR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kine	rja RPJMD pada Tahun 2026		n Lalu (2023)		a dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		apaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Cap dan Realisa RKPI	si Anggaran) (%)	RKPD s	nerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi Ang s/d Tahur	2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	К	(5) Rp	K	(6)	К	(7)	К	(8)	(9= 8/7 K	*100%) Rp	К ((10= 6+8) Rp	(11=10/ K	5*100%) Rp	(12)	(13)
	1 05 01 2.06 000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	17.000.000	0	Rp 1.986.000	0	Rp -	0	Rp -	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	13.156.900	77%	13.156.900	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	216.035.459	12	13.156.900	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0!	13.156.900	6%	13.156.900	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedia bahan logistik pameran	5	125.000.000	1	22.750.000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25.000.000	20%	25.000.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.06 000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetak ,penggandaan dan alat tulis kantor	60	87.820.814	12	25.874.000	12	26.515.000	3	5.259.000	25%	20%	296%	15.557.000	18%	15.557.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.06 000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55	63.000.000	0	5.500.000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	96.976.280	154%	96.976.280	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.06 000	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja SPPD Luar Daerah dan Dalam Daerah	60	409.000.000	12	91.305.500	12	50.000.000	3	7.404.000	25%	15%	1310%	96.976.280	24%	96.976.280	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100	98.670.829	100	5.000.000	100	-	100	-	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	38.000.000	39%	38.000.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.07 000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	60.670.829	0	5.000.000	0	1	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	38.000.000	63%	38.000.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Alat Musik	60	38.000.000	12	-	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0!	38.000.000	100%	38.000.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100	717.000.000	100	115.604.315	100	117.700.000	100	31.420.825	100%	27%	334%	105.094.000	15%	105.094.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.08 000	Daya Air dan Listrik	tersedia sewa gedung kantor, sewa rumah dinas dan sewa mobil dinas sekretaris	60	58.000.000	12	6.795.315	12	8.700.000	3	2.180.825	25%	25%	4700%	102.500.000	177%	102.500.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.08 000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	630.000.000	12	107.000.000	12	107.000.000	3	29.000.000	25%	27%	4%	1.297.000	0%	1.297.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.08 000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	peralatan kebersihan dan iuran kebersihan kantordan sewa mobil dinas sekretaris	60	29.000.000	12	1.809.000	12	2.000.000	3	240.000	25%	12%	540%	1.297.000	4%	1.297.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100	1.777.000.000	100	247.415.000	100	145.000.000	100	33.500.000	100%	23%	503%	168.495.000	9%	168.495.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.09 000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja pemelihaaraan kendaraan dinas	60	720.000.000	12	-	12	45.000.000	3	18.000.000	25%	40%	912%	164.145.000	23%	164.145.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.09 000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	Belanja pemelihaaraan kendaraan dinas	60	1.045.000.000	12	244.415.000	12	142.000.000	3	33.500.000	25%	24%	490%	164.145.000	16%	164.145.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.09 000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	12.000.000	12	3.000.000	1	3.000.000	0	-	0%	0%	#DIV/0!	4.350.000	36%	4.350.000	SATPOLPP & DAMKAR	
																		SATPOLPP & DAMKAR	
	2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	persentase gangguan tribum yang terselesaikan	100	12.056.732.707	100	1.522.571.200	100	1.286.959.500	100	399.786.600	100%	31%	638%	2.552.205.200	21%	************	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Gangguan	100	11.063.750.899	100	1.439.818.300	100	1.194.675.000	100	353.860.000	100%	30%	673%	2.381.044.400	22%	***********	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 02 2.01 000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	220.000.000	0	172.607.800	0		0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1.180.657.200	537%	************	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 02 2.01 000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	40	68.000.000	8	7.840.000	8	11.280.000	3	5.040.000	38%	45%	258%	13.000.000	19%	13.000.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 02 2.01 0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran)	Terlaksana Piket Pengamanan Kantor /rumah dinas, pengawalan pejabat vvip dan pengamanan trantibum	60	10.407.000.000	12	1.254.370.500	12	1.172.425.000	3	348.820.000	25%	30%	338%	1.180.657.200	11%	************	SATPOLPP & DAMKAR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	rja RPJMD pada Tahun 2026		n Lalu (2023)		a dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Cap dan Realisa RKPI	si Anggaran) (%)	RKPD s	nerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi Ang s/d Tahu	iian Kinerja & garan RPJMD n 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		*100%)		(10= 6+8)		5*100%)	(12)	(13)
	1 05 02 2.01 0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	К 60	Rp 82.400.000	. к	Rp .	. К 12	5.970.000	к	Rp -	К 0%	Rp 0%	#DIV/0!	Rp 1.180.657.200	K 1433%	Rp	SATPOLPP & DAMKAR	
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksana pengamanan Idul fitri dan Natal Tahun Baru	48	234.600.000	8	-	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0!	15.000.000	6%	15.000.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 02 2.01 0017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Tersedia ganti rugi atas dampak penegakan perda dan perkada	5	30.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	0	-	0%	0%	#DIV/0!	4.730.000	16%	4.730.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 02 2.01 0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	8	21.750.899	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	4.730.000	22%	4.730.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	persentase gangguan tribum yang terselesaikan	100	682.600.000	100	75.150.900	100	83.134.500	100	45.926.600	100%	55%	353%	162.037.800	24%	81.018.900	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 02 2.02 001	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	pengawasan dan monitoring atas penegakan perda	6	192.600.000	12	-	12	7.982.600	0	-	0%	0%	#DIV/0!	81.018.900	42%	9.123.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 02 2.02 001	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	pengawasan dan monitoring atas penegakan perda	60	490.000.000	12	75.150.900	12	75.151.900	3	45.926.600	25%	61%	176%	81.018.900	17%	9.123.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 02 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	persentase gangguan tribum yang terselesaikan	100	310.381.808	100	7.602.000	100	9.150.000	100	-	100%	0%	#DIV/0!	9.123.000	3%		SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 02 2.03 000	Danasan kanasan Kanasitan dan Kasisa	terlaksana operasional dan kesekretariatan PPNS	60	310.381.808	12	7.602.000	12	9.150.000	0	-	0%	0%	#DIV/0!	9.123.000	3%	569.201.795	SATPOLPP & DAMKAR	
		TTNS	Reservetariatari i i ivi														569.201.795	SATPOLPP &	
	1 05 04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan pemadam dan penyelamatan kebakaran	100	3.661.688.861	100	618.743.694	100	1.559.660.000	100	184.143.704	100%	12%	309%	569.201.795	16%	569.201.795	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan pemadam dan penyelamatan kebakaran	100	3.661.688.861	12	618.743.694	100	1.559.660.000	100	184.143.704	100%	12%	309%	569.201.795	16%		SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 04 2.01 000	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	terlaksana operasional pemadaman kebakaran	60	3.661.688.861	12	618.743.694	12	1.559.660.000	3	184.143.704	25%	12%	309%	569.201.795	16%		SATPOLPP & DAMKAR	
-		Badan Penanggulanagan Bencana Daeral	<u> </u>													-		-	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	95%	8.740.310.409	79%	2.460.610.306	100%	2.913.251.700	20%	596.254.205	20%	20%	100%	3.056.864.511	105%	35%	BPBD	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penyediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tepat Waktu	15	31.697.123	100%	14.908.390	100%	15.135.000	0%	-	0%	0%	100%	14.908.390	7%	47%	BPBD	
	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	7.500.000	2	7.291.800	2	7.321.000	0	-	0%	0%	2	7.291.800	20%	97%	BPBD	
	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	3.700.000	1	692.320	1	707.500	0	-	0%	0%	1	692.320	20%	19%	BPBD	
	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	5	3.700.000	1	693.320	1	707.500	0	-	0%	0%	1	693.320	20%	19%	BPBD	
	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	3.700.000	1	698.550	1	699.500	0	-	0%	0%	1	698.550	20%	19%	BPBD	
	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	5	3.500.000	1	690.800	1	699.500	0	-	0%	0%	1	690.800	20%	20%	BPBD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kine	rja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d ın Lalu (2023)	Tahun berja	a dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)	Anggaran Ri	Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Cap dan Realisa RKPI	si Anggaran O (%)	RKPD s	nerja dan Anggaran /d Tahun 2024	Tingkat Capai Realisasi Angg s/d Tahun	garan RPJMD 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		*100%)		10= 6+8)	(11=10/5		(12)	(13)
	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	K 10	9.597.123	K 10	4.841.600	K	Rp 5.000.000	к	Rp -	0%	Rp 0%	10	4.841.600	100%	Rp 50%	BPBD	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Peraturan yang Ada	100%	5.592.364.628	80%	1.842.693.763	100%	2.374.122.700	20%	472.008.947	20%	20%	100%	2.314.702.710	100%	41%	BPBD	
	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tuniangan ASN	70	5.578.664.628	14	1.837.313.263	14	2.368.622.700	4	472.008.947	29%	20%	18	2.309.322.210	26%	41%	BPBD	
	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	5.000.000	1	2.428.200	1	2.500.000	0	-	0%	0%	1	2.428.200	20%	49%	BPBD	
	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	80	3.700.000	18	1.976.300	18	2.000.000	0	-	0%	0%	18	1.976.300	23%	53%	BPBD	
	8000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	5.000.000	1	976.000	1	1.000.000	0	-	0%	0%	1	976.000	20%	20%	BPBD	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	50.000.000	98%	19.660.000	100%	25.000.000	0%	-	0%	0%	98%	19.660.000	98%	39%	BPBD	
	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14	50.000.000	3	19.660.000	12	25.000.000	0	-	0%	0%	3	19.660.000	21%	39%	BPBD	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	60	884.000.000	98%	213.648.569	100%	193.799.000	4%	8.333.000	4%	4%	102%	221.981.569	2%	25%	BPBD	
	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	54.000.000	12	12.437.750	1	13.299.000	0	-	47%	0%	12	12.437.750	20%	23%	BPBD	
	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	75.000.000	12	13.353.000	1	12.500.000	0	-	31%	0%	12	13.353.000	20%	18%	BPBD	
	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50	60.000.000	12	12.000.000	10	12.000.000	2	2.000.000	33%	17%	14	14.000.000	28%	23%	BPBD	
	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55	55.000.000	11	11.000.000	11	11.000.000	0	-	0%	0%	11	11.000.000	20%	20%	BPBD	
	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	640.000.000	12	164.857.819	12	145.000.000	2	6.333.000	17%	4%	14	171.190.819	23%	27%	BPBD	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	611.898.658	88%	212.398.700	100%	160.515.000	64%	103.347.170	64%	64%	152%	315.745.870	152%	52%	BPBD	
	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	83.844.000	12	11.884.076	12	18.600.000	3	2.667.170	25%	14%	15	14.551.246	25%	17%	BPBD	
	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	460.000.000	3	132.000.000	3	132.000.000	3	100.500.000	100%	76%	6	232.500.000	10%	51%	BPBD	
	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	68.054.658	12	68.514.624	12	9.915.000	3	180.000	2%	2%	15	68.694.624	25%	101%	BPBD	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	100%	1.570.350.000	88%	157.300.884	100%	144.680.000	9%	12.565.088	9%	9%	97%	169.865.972	97%	11%	BPBD	
	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	272.500.000	1	32.625.884	12	35.850.000	3	5.050.088	45%	14%	4	37.675.972	400%	14%	BPBD	
	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	1.143.600.000	14	111.925.000	14	91.500.000	3	7.060.000	22%	8%	17	118.985.000	121%	10%	BPBD	
	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	154.250.000	4	12.750.000	4	17.330.000	1	455.000	25%	3%	5	13.205.000	8%	9%	BPBD	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan penanggulangan bencana daerah	100%	2.301.001.800	97%	656.283.514	100%	1.050.371.000	5%	51.882.000	5%	5%	102%	708.165.514	102%	31%	BPBD	
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100%	321.948.200	100%	48.911.700	100%	184.611.000	0%	-	0%	0%	100%	48.911.700	0%	15%	BPBD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	ja RPJMD pada Tahun 2026		n Lalu (2023)		a dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realisa RKP	D (%)	RKPD s	nerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	s/d Tahur	garan RPJMD 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	к	(5)		(6)	к	(7)	к	(8)	(9= 8/7 к	*100%)		(10= 6+8)	(11=10/		(12)	(13)
	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIEJ Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di	15	Rp 321.948.200	. к	Rp 48.911.700	2	Rp 184.611.000	0	Rp -	0%	Rp 0%	3	Rp 48.911.700	К 20%	Rp 15%	BPBD	
		Pelayanan Pencegahan dan	Kawasan Tempat Tinggalnya Presentase Pencegahan dan Kacianciagan Terhadan Rencana	100%	922.350.400	96%	274.382.119	100%	510.800.000	8%	40.620.000	8%	8%	104%	315.002.119	104%	34%	BPBD	
	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	25	722.350.400	2	274.382.119	2	310.800.000	0	40.620.000	0%	13%	2	315.002.119	8%	44%	BPBD	
	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kab/Kota	Jumlah paket bahan material	60	200.000.000	0		1	200.000.000	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	BPBD	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	1.056.703.200	92%	332.989.695	100%	260.000.000	4%	11.262.000	4%	4%	97%	344.251.695	97%	33%	BPBD	
	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	15	460.890.000	10	284.718.400	10	250.000.000	3	10.350.000	30%	4%	13	295.068.400	87%	64%	BPBD	
	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	60	595.813.200	10	48.271.295	10	10.000.000	2	912.000	20%	9%	12	49.183.295	20%	8%	BPBD	
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Presentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	627.498.400	0%	203.428.375	100%	94.960.000	12%	11.840.000	12%	12%	12%	215.268.375	12%	34%	BPBD	
	0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah Korhan yang Berhasil Ditemukan	60	627.498.400	1	203.428.375	1	94.960.000	0	11.840.000	0%	12%	1	215.268.375	2%	34%	BPBD	
	1.06	Sosial																	\vdash
	1.06.01	Program Penunjang Urusan	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja	100%	10.366.724.768	100%	2.551.004.186	100%	2.762.693.000	22%	718.805.082	22%	26,02	84%	1.746.851.956	84%	16.05	n: 6 : 1	
	1.06.01	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%	10.366.724.768	100%	2.551.004.186	100%	2.762.693.000	22%	718.805.082	22%	26,02	84%	1.746.851.956	84%	10,85	Dinas Sosial	\sqcup
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	32.000.000	100%	12.400.000	100%	12.400.000	50%	5.125.000	50%	41,33	100%	6.400.000	100%	20,00	Dinas Sosial	
1	1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	10	7.000.000	2	7.400.000	2	7.400.000	1	3.794.000	50%	51,27	100%	1.400.000	10%	20,00	Dinas Sosial	
2	1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10	25.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	1	1.331.000	50%	26,62	100%	5.000.000	10%	20,00	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100%	8.703.221.754	100%	1.882.065.819	100%	2.208.417.800	18%	496.543.001	18%	22,48	79%	1.242.275.690	79%	14,27	Dinas Sosial	
3	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	8.675.721.754	14	1.876.565.819	14	2.202.917.800	3	496.543.001	21%	22,54	79%	1.236.775.690	1%	14,26	Dinas Sosial	<u>L</u> 1
4	1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5	12.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	0	-	0%	-	100%	2.500.000	20%	20,00	Dinas Sosial	
5	1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tersusunnya laporan keuangan semester	5	10.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	0	-	0%	-	100%	2.000.000	20%	20,00	Dinas Sosial	
6	1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	5.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	0	-	0%	-	100%	1.000.000	20%	20,00	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100%	372.001.014	100%	420.421.577	100%	276.705.200	23%	85.136.000	23%	30,77	100%	226.103.761	100%		Dinas Sosial	
7	1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Aktivitas	5	125.000.000	1	24.687.000	1	25.000.000	0	-	0%	-	0%	24.987.600	0%	19,99		$\vdash \vdash \vdash$
8	1.06.01.2.06.05	Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah ATK	60	187.001.014	12	88.374.200	12	68.705.200	3	15.316.000	25%	22,29	100%	38.229.250	2%	20,44	Dinas Sosial	\vdash
9	1.06.01.2.06.06	Peraturan Perundang undangan	Jumlah SKHU Jumlah Layanan Jasa Penyediaaan	60	60.000.000	12	26.400.000	12	12.000.000	3	3.000.000	25%	25,00	100%	12.000.000	2%		Dinas Sosial	\vdash
10	1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Makanan dan Minuman	55	55.000.000	11	10.980.000	11	11.000.000	2	2.000.000	18%	18,18	100%	11.000.000	2%	20,00	Dinas Sosial	$\vdash \vdash$
11	1.06.01.2.06.09	Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor Persentase pemenuhan Layanan	60	845.000.000	12	269.980.377	12	160.000.000	3	64.820.000	25%	40,51	100%	139.886.911	2%	16,55	Dinas Sosial	\vdash
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pendukung	100%	453.000.000	0%	-	100%	30.000.000	0%	-	0%	-	100%	15.000.000	100%		Dinas Sosial	
12	1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	58	453.000.000	0	-	3	30.000.000	0	-	0%	-	100%	15.000.000	2%	3,31	Dinas Sosial	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	rja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d n Lalu (2023)		ja dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)		si Anggaran D (%)	RKPD :	inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi Ang s/d Tahur		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	К	(5) Rp	K	(6)	К	(7)	K	(8) Rp	(9= 8/7 K	*100%) Rp	К	(10= 6+8) Rp	(11=10/	5*100%) Rp	(12)	(13)
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100%	924.225.000	100%	Rp 94.659.790	100%	Rp 110.120.000	25%	75.944.081	25%	68,96	100%	173.481.986	100%		Dinas Sosial	
13	1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dava Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	120.000.000	12	1.939.790	12	2.400.000	3	264.081	25%	11,00	100%	13.780.986	2%	11,48	Dinas Sosial	
14	1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	60	785.000.000	12	92.000.000	12	107.000.000	3	75.500.000	25%	70,56	100%	157.000.000	2%	20,00	Dinas Sosial	
15	1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	19.225.000	12	720.000	12	720.000	3	180.000	25%	25,00	100%	2.701.000	2%	14,05	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100%	806.502.000	100%	141.457.000	100%	125.050.000	17%	56.057.000	17%	44,83	100%	83.590.519	100%	10,36	Dinas Sosial	
16	1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	10	398.792.000	2	63.608.000	2	58.800.000	0	28.577.000	0%	48,60	100%	53.420.519	10%	13,40	Dinas Sosial	
17	1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	20	335.960.000	4	68.499.000	4	56.500.000	2	27.115.000	50%	47,99	100%	22.420.000	5%	6,67	Dinas Sosial	
18	1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	60	71.750.000	12	9.350.000	12	9.750.000	1	365.000	8%	3,74	100%	7.750.000	2%	10,80	Dinas Sosial	
	1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Terdatanya Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	100%	1.553.029.692	100%	91.964.250	100%	40.340.000	17%	6.740.000	17%	16,71	100%	191.212.500	100%	12,31	Dinas Sosial	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas bagi PSKS	100%	1.553.029.692	100%	91.964.250	100%	40.340.000	17%	6.740.000	17%	16,71	100%	191.212.500	100%	12,31	Dinas Sosial	
19	1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	tersedianya operasional TKSK dan PSM	645	1.553.029.692	12	91.964.250	12	40.340.000	2	6.740.000	17%	16,71	100%	191.212.500	0%	12,31	Dinas Sosial	
	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan Pemenuhan SPM bidang Sosial	100%	16.681.151.000	91%	959.838.950	100%	694.659.800	11%	11.616.500	11%	1,67	56%	2.422.045.000	56%	14,52	Dinas Sosial	
	1.06.02.2.04.2.0	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang menerima bantuan	100%	473.315.000	100%	221.799.100	100%	115.000.000	0%	9.013.500	0%	7,84	100%	54.290.000	100%	11,47	Dinas Sosial	
20	1.06.02.2.04.2.0	Penyediaan Permakanan	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan nya diluar panti	130	216.870.000	190	119.650.750	95	61.599.200	0	2.137.500	0%	3,47	100%	20.571.000	1%	9,49	Dinas Sosial	
21	1.06.02.2.04.2.0	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	285	256.445.000	30	62.303.750	10	28.000.800	0	3.336.000	0%	11,91	100%	33.719.000	0%	13,15	Dinas Sosial	
22	1.06.02.2.04.2.0	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah ODGJ yang dilayani dengan Bimbingan Sosial	50	180.000.000	25	39.844.600	25	25.400.000	0	3.540.000	0%	13,94	97%	9.696.000	2%	5,39	Dinas Sosial	
	1.06.02.2.04.2.0	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/Aids dan Nafza di Luar Panti sosial	Persentase PMKS yang tertangani	100%	16.207.836.000	82%	738.039.850	100%	579.659.800	22%	2.603.000	22%	0,45	56%	2.367.755.000	56%	14,61	Dinas Sosial	
23	1.06.02.2.04.2.0	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah pelayanan data	5000	1.520.836.000	1000	113.039.850	1000	69.659.800	246	2.603.000	25%	3,74	100%	102.235.000	0%	6,72	Dinas Sosial	
24	1.06.02.2.04.2.1	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan	tersedianya bantuan sosial	6235	14.687.000.000	609	625.000.000	110	510.000.000	0	-	0%	-	54%	2.265.520.000	0%	15,43	Dinas Sosial	
	1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	cakupan perlindungan dan jaminan perlindungan sosial daerah	100%	2.118.183.115	100%	279.610.150	100%	158.865.400	42%	36.640.200	42%	23,06	97%	188.003.620	97%	8,88	Dinas Sosial	<u> -</u>
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran dan data terpadu penangulangan kemiskinan	100%	2.118.183.115	100%	279.610.150	100%	158.865.400	42%	36.640.200	42%	23,06	97%	188.003.620	97%	8,88	Dinas Sosial	
25	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	5	1.281.805.382	1	214.781.300	10457	105.224.800	4367	24.134.500	42%	22,94	100%	107.895.000	20%	8,42	Dinas Sosial	-
26	1.06.05.2.02.01.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Tersedianya Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	60	836.377.733	12	64.828.850	6	53.640.600	2	12.505.700	33%	23,31	93%	80.108.620	2%	9,58	Dinas Sosial	_{l-}]
	1.06.06	Program Penanganan Bencana	Cakupan pemenuhan pasca Bencana	100%	573.625.420	100%	79.494.800	100%	56.359.400	25%	10.384.300	25%	18,43	100%	41.687.000	100%	7,27	Dinas Sosial	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi	100%	573.625.420	100%	79.494.800	100%	56.359.400	25%	10.384.300	25%	18,43	100%	41.687.000	100%	7,27	Dinas Sosial	-
27	1.06.06.2.02.02	koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Meningkatnya Fungsi Taruna Siaga Bencana	60	573.625.420	12	74.494.800	12	56.359.400	3	10.384.300	25%	18,43	100%	41.687.000	2%	7,27	Dinas Sosial	
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAG	GA KERJA	100%	#REF!	91%	2.682.002.179	95%	2.646.744.500	11%	505.604.021,00	12	19,10	11%	505.604.021	11%	#REF!	Distransnake	
2	07		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	12.551.964.488	91%	2.135.951.801	95%	2.439.044.500	11%	505.604.021	12	20,73	11%	505.604.021	11%	4,03	rprin Distransnake rprin	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kine	rja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d ın Lalu (2023)		a dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realisa RKP	paian Kinerja asi Anggaran D (%)		nerja dan Anggaran s/d Tahun 2024		ian Kinerja & garan RPJMD n 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	К	(5) Rp	К	(6) Rp	К	(7) Rp	К	(8)	(9= 8/7	7*100%) Rp		(10= 6+8) Rp	(11=10/ K	5*100%) Rp	(12)	(13)
2	07	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	50.750.000	100%	12.400.000	100%	12.400.000	0%	3.698.000	0	30	0%	3.698.000	0%		Distransnake rprin	_
2	07	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD	10	20.750.000	2	7.400.000	2	7.400.000	0	3.698.000	0	50	0	3.698.000	0	17,82	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10	30.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	0	-	0	0	0	-	0	0	Distransnake rprin	
2	07	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7.546.754.500	100%	1.549.351.647	100%	1.976.715.500	29%	430.284.221	29	21,77	29%	430.284.221	29%	6	Distransnake rprin	
2	07	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	70	7.492.254.500	14	1.543.851.647	14	1.971.215.500	5	430.284.221	36	21,83	5	430.284.221	7	5,74	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	19.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	0	-	0	0	0	-	-	0	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan semesteran	5	18.500.000	1	2.000.000	1	2.000.000	0	-	0	0	0	-	-	0	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	5	16.500.000	1	1.000.000	1	1.000.000	0	-	0	0	0	-	-	0	Distransnake rprin	-
2	07	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Pera	Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik	100%	130.000.000	0%	321.360.019	100%	20.000.000	0%	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	12	130.000.000	0	-	3	20.000.000	0	-	0	0	0	-	-	0	Distransnake rprin	
2	07	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.277.434.124	100%	321.360.019	100%	233.229.000	22%	23.871.800	22	10,24	22%	23.871.800	22%	12	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instaslasi listrik	60	36.630.181	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	-	0	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya pameran	5	168.000.000	1	25.000.000	0	-	0	-	0	0	0	-	-	0	Distransnake rprin	
2	07	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya alat tulis kantor, penggandaan dan barang cetak	60	154.803.943	12	40.218.860	12	40.229.000	4	10.151.000	33,3	25,23	4	10.151.000	7	6,56	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	50	114.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	2	2.000.000	20	17	2	2.000.000	4	1,75	Distransnake rprin	_
2	07	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman	55	82.000.000	11	11.000.000	11	11.000.000	2	2.000.000	18	18	2	2.000.000	4	2,44	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi	60	722.000.000	12	233.141.159	12	170.000.000	2	9.720.800	16,7	5,72	2	9.720.800	3	1,35	Distransnake rprin	-
2	07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	140.000.000	100%	99.760.000	100%	57.500.000	0%	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rprin	_
2	07	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	20	140.000.000	8	99.760.000	4	57.500.000	0	-	0	0	0	-	-	0	Distransnake rprin	
2	07	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	666.736.194	100%	77.000.000	100%	72.000.000	50%	32.000.000	50	44,44	50%	32.000.000	50%	6	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembiayaan listrik, telpon dan internet	60	112.700.194	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	-	0	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya pembiayaan sewa kantor, sewa rumah dinas dan sewa kendaraan dinas	60	524.000.000	12	67.000.000	12	67.000.000	12	32.000.000	100	48	12	32.000.000	20	6,11	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebersihan kantor	60	30.036.000	12	10.000.000	12	5.000.000	0	-	0	0	0	-	-	0	Distransnake rprin	
2	07	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	471.250.000	100%	76.080.135	100%	67.200.000	7%	15.750.000	7	23,44	7%	15.750.000	7%	4	Distransnake rprin	
2	07	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya pembiayaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pembiayaan pajak kendaraan dinas	10	365.000.000	2	64.830.135	2	61.200.000	1	15.750.000	50	25,74	1	15.750.000	10	4,32	Distransnake rprin	
2	07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60	51.250.000	12	11.250.000	12	6.000.000	0	-	0	0	0	-	-	0	Distransnake rprin	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	ja RPJMD pada Tahun 2026		ın Lalu (2023)		a dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KKPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realisa RKP	paian Kinerja asi Anggaran D (%)	RKPD :	inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Tingkat Capai Realisasi Angg s/d Tahun	garan RPJMD 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	к	(5) Rp	К	(6) Rp	К	(7) Rp	К	(8) Rp	(9= 8/1	7*100%) Rp	К	(10= 6+8) Rp	(11=10/5 K	*100%) Rp	(12)	(13)
2	07	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60	55.000.000	0	-	-		-		0	0	0	- .	-		Distransnake rprin	-
2	07	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	125	1.218.599.860	0%	-	2,41	144.125.000	0	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rorin	
2	07	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Cakupan Pemenuhan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125	1.218.599.860	0	-	25	144.125.000	0	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rprin	-
2	07	Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja/Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	125	1.218.599.860	0	-	25	144.125.000	0	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rprin	-
2	07	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Cakupan Pemenuhan Penempatan Tenaga Kerja dalam Meningkatkan Tingkat Partisipasi Kerja	75,51	1.273.705.033	72,55%	128.343.900	74,71%	63.575.000	0%	-	0	0	0%	-	0%		Distransnake rprin	-
2	07	Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemerataan tenaga kerja	75,51	848.705.033	72,55%	53.103.800	0%	-	0%	-	. 0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rprin	
2	07	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Terpenuhinya Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	75,51	848.705.033	72,55%	53.103.800	0%	-	0%	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rprin	
2	07	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Keria	Cakupan Pemenuhan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	75,51	425.000.000	72,55%	75.240.100	74,71%	63.575.000	0%	-	. 0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rorin	
2	07	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terpenuhinya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online untuk Pencari Kerja	75,51	425.000.000	72,55%	75.240.100	74,71%	63.575.000	0%	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rprin	
2	07	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	80%	802.093.538	0%	-	60%	-	0%	-	0	0	0	-	0%	-	Distransnake rprin	
2	07		Cakupan Pemenuhan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	80%	423.747.266	0%	-	0%	-	0%	-	0	0	0	-	0%	0	Distransnake rprin	
2	07	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terpenuhinya Jumlah persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, struktur, skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	80%	423.747.266		-		-		-	0	0	0	-	0%	0	Distransnake rprin	
2	07	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	80%	378.346.272	0%	-	65%	-	0%	-	0	0	0%	-	0	0	Distransnake rprin	
2	07	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya jumlah angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	80%	189.173.136	0%	-	0%	-	0%	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rprin	
2	07	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terpenuhinya Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	80%	189.173.136	0%	-	65%	-	0%		0	0	0%	-	0	0	Distransnake rprin	
	2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	indeks pembangunan gender	95,71		75	1.044.637.500		1.009.268.000		51.064.700	#DIV/0!	5,06%	74,76	#REF!	0,7811096	#REF!	DP3AKB	
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan yang Melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responship Gender	100	1.202.266.128	33	428.805.000		323.875.000		0	#DIV/0!	0,00%	33	88.805.000	0,33	430,15%	DP3AKB	
	2.08.02.2.01	(PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengetahuan Peserta dalam Penyusunan GAP/GBS (Gender Analysis Pathway/Gender Budget Statement) di Kabupaten Pesisir Barat (Kali)	100	20.645.000	25	88.805.000	25	88.875.000	0	-	0	0,00%	25			430,15%	DP3AKB	
	2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPR	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan kabupaten/Kota	125	20.645.000	25	88.805.000	25	88.875.000	0	0	0	0,00%	25	0	0,2	0,00%	DP3AKB	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	ja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d ın Lalu (2023)		a dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)	Anggaran Ri	apaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capa dan Realisa RKPE	si Anggaran		nerja dan Anggaran /d Tahun 2024	Tingkat Capai Realisasi Angg s/d Tahun	garan RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9= 8/7	*100%)		10= 6+8)	(11=10/5		(12)	(13)
	.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Keterampilan dan Perekonomian 15 Kelompok Usaha Kepala Rumah Tangga Perempuan di Kabupaten Pesisir Barat	100	Rp 1.098.075.000	<u>к</u> 8	Rp	К	Rp 235.000.000	К	Rp	K #DIV/0!	Rp 0,00%	К 8	Rp 340.000.000	К 0,08	Rp 30,96%	DP3AKB	
2	.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan Kabupaten/Kota	15	1.098.075.000	8	340.000.000	2	235.000.000	0	0	0	0,00%	8	112.353.000	0,53333333	16,15%	DP3AKB	
2	.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100	695.818.390		112.353.000		96.181.000		9.623.100	#DIV/0!	10,01%	0	28.352.600	0	20,29%	DP3AKB	
2	.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	100	139.719.063	100	18729500		96.181.000		9.623.100	#DIV/0!	10,01%	100	28.352.600	1	137,33%	DP3AKB	
2	.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang Terlayani dan Mendapatkan Pendampingan	10	20.645.000	7	18.729.500	5	27.161.000	3	9.623.100	60	35,43%	10	103.246.600	1	14,84%	DP3AKB	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Data Serta Layanan Perlindungan Perempuan dan Ank Korban Kekerasan dan TPPO	100	695.818.390	100	93.623.500	104	69.020.000	0	-	0	0,00%	100	52.670.000	1	4,05%	DP3AKB	
	.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	100	1.300.826.171	100	52.670.000		77.880.000		35.384.600	#DIV/0!	45,43%	100	35.384.600	1	#DIV/0!	DP3AKB	
2	.08.04.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	0	0	0		77.880.000		35.384.600	#DIV/0!	45,43%	0	35.384.600	0	3,22%	DP3AKB	
2	.08.04.2.01.03	Pengembangan kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	15	1.098.075.000	0	-	4	77.880.000	2	35.384.600	50	45,43%	2	164.125.600	0,13333333	7,23%	DP3AKB	
2	.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Cakupan Lembaga Penyedia Layanan Terhadap Anak	100	2.268.917.864	33.33	128.741.000		170.000.000		0	#DIV/0!	0,00%	#VALUE!	128.741.000	#VALUE!	27,06%	DP3AKB	
2	.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pengetahuan tentang Pemenuhan Hak Anak Menuju Kabupaten Layak Anak	100	475.765.000	100	128.741.000		170.000.000		-	#DIV/0!	0,00%	100	128.741.000	1	39,09%	DP3AKB	
2	.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	800	329.355.000	150	128.741.000	800	170.000.000	740	128.741.000	92,5	75,73%	890	450.809.500	1,1125	40,80%	DP3AKB	
2	.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Pendampingan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	100	1.104.849.994	49	322.068.500		334.470.000		6.057.000	#DIV/0!	1,81%	49	136.042.000	0,49	61,76%	DP3AKB	
2	.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersampaikannya Informasi tentang Kekerasan Terhadap Anak	100	220.273.845	100	129.985.000		101.491.000		-	#DIV/0!	0,00%	100	129.985.000	1	99,99%	DP3AKB	
2	.08.07.2.01.04	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh avokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program kegiatan pencegahan KTA	100	130.000.000	100	129.985.000	100	101.491.000	0	-	0	0,00%	100	192.083.500	1	51,73%	DP3AKB	
2	.08.07.2.02	Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kasus Anak yang Terlayani	100	371.316.257	100	192.083.500		232.979.000		6.057.000	#DIV/0!	2,60%	100	30.791.000	1	102,64%	DP3AKB	
2	.08.07.2.02.05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	120	Rp30.000.000,00	40	24.734.000	40	30.000.000	0	-	0	0,00%	40	167.349.500	0,33333333	45,07%	DP3AKB	
	.08.07.2.02.06	Kabupaten/Kota Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah Anak yang Menjadi Pemdamping Pengaduan Pada Tingkat Pekon dan Kelurahan	560	371.316.257	40	167.349.500	40	202.979.000	9	6.057.000	22,5	2,98%	49	#REF!	0,0875	#REF!	DP3AKB	
I. 3	.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	37.893.763.478	92,5	15.500.659.883	92,5	6.037.265.700	19,5	1.269.282.252	21%	21%	20	16.769.942.135	4%	44%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	rja RPJMD pada Tahun 2026		ian Kinerja RKPD s/d n Lalu (2023)	Tahun berja	dan Anggaran RKPD lan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan RKPD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Cap dan Realisa RKPI	si Anggaran O (%)		inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Tingkat Capaia Realisasi Angga s/d Tahun 2	ran RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	ļ.,	(6)		(7)		(8)	(9= 8/7	*100%)		(10= 6+8)	(11=10/5		(12)	(13)
1	3.27.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran,	Persentase Dokumen Perencanaan,	K 100	Rp 45.788.250	K 100	Rp 24.900.000	K 100	Rp 13.400.000	K	Rp	K 0%	Rp 0%	K	Rp 24.900.000	K 0%	Rp 54%	Dinas	
1	3.27.01.2.01	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	43.766.230	100	24.500.000	100	13.400.000			0%	0%	v	24.500.000	0%	34%	Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	15.262.750	6	12.900.000	2	8.400.000	C	ס	0%	0%	6	12.900.000	60%	85%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
b.	3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	30.525.500	5	12.000.000	1	5.000.000	C	0	0%	0%	5	12.000.000	50%	39%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	3.27.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (Persen)	100	33.422.204.878	100	13.349.401.796	100	5.217.765.700	19	967.269.783	19%	19%	19	14.316.671.579	4%	43%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	70	33.388.626.828	42	13.332.401.796	14	5.212.265.700	4	4 967.269.783	29%	19%	46	14.299.671.579	66%	43%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
b.	3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	15.262.750	3	7.000.000	1	2.500.000	C	0	0%	0%	3	7.000.000	60%	46%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
C.	3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	10	12.210.200	6	6.500.000	2	2.000.000	C	D	0%	0%	6	6.500.000	60%	53%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
d.	3.27.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	6.105.100	3	3.500.000	1	1.000.000	C	0	0%	0%	3	3.500.000	60%	57%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	3.27.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	100	2.202.720.080	100	1.204.468.240	100	335.450.000	26	6 86.332.200	26%	26%	26	1.290.800.440	5%	59%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	10.989.180	2	3.570.000	1	-	1	-	100%	#DIV/0!	3	3.570.000	60%	32%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
C.	3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	10	244.204.000	4	75.000.000	1	25.000.000	C	0	0%	0%	4	75.000.000	40%	31%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
d.	3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	280.834.600	36	116.388.400	12	31.450.000	3	9.613.000	25%	31%	39	126.001.400	65%	45%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
e.	3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	73.261.200	36	36.000.000	12	12.000.000	3	3 2.300.000	25%	19%	39	38.300.000	65%	52%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
f.	3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	55	67.156.100	33	43.970.000	11	22.000.000	2	4.000.000	18%	18%	35	47.970.000	64%	71%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanjan	
g.	3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di Luar Kantor	60	1.526.275.000	36	929.539.840	12	245.000.000	3	3 70.419.200	25%	29%	39	999.959.040	65%	66%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	3.27.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100	105.000.000	100	14.950.000	100	59.500.000	d	-	0%	0%	0	14.950.000	0%	14%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	105.000.000	1	14.950.000	1	59.500.000	C	-	0%	0%	1	14.950.000	8%	14%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerj	ja RPJMD pada Tahun 2026		ian Kinerja RKPD s/d Lalu (2023)	Tahun berja	a dan Anggaran RKPD Ilan yang dievaluasi (2024)		apaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realisa RKPI	O (%)	RKPD :	inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	s/d Tahur	garan RPJMD 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9= 8/7			(10= 6+8)	(11=10/		(12)	(13)
_	3.27.01.2.08			К 100	Rp 959.912.800	K	Rp 421.954.247	К 100	Rp 228.400.000	K 69	Rp 156.680.269	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	100		100		100		69		69%	69%	69	578.634.516		60%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	3.27.01.2.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	146.522.400	36	142.174.247	12	44.400.000	3	8.220.269	25%	19%	39	150.394.516	65%	103%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
b.	3.27.01.2.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralatan Kantor yang Disediakan Sewa Kantor, Rumah Dinas, Gudang Pertanian dan Kendaraan Operasional dinas	60	788.970.000	24	274.000.000	12	182.000.000	3	147.000.000	25%	81%	27	421.000.000	45%	53%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
C.	3.27.01.2.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	24.420.400	36	5.780.000	12	2.000.000	3	1.460.000	25%	73%	39	7.240.000	65%	30%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
5	3.27.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100	1.158.137.470	100	484.985.600	100	182.750.000	32	59.000.000	32%	32%	32	543.985.600	6%	47%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	3.27.01.2.09.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60	235.046.350	36	121.307.000	12	52.500.000	3	23.500.000	25%	45%	39	144.807.000	65%	62%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
b.	3.27.01.2.09.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	143	923.091.120	86	363.678.600	29	130.250.000	8	35.500.000	28%	27%	94	399.178.600	66%	43%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
В.	2.09	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR (PANGAN)	Nilai Tukar Petani	102,3	2.392.123.899	124,98	831.438.850	99,77	272.000.000	0	10.576.950	0%	4%	0,0	842.015.800	0%	35%		
	2.09.03	PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	140.000	1.029.479.624	83.009	322.535.775	28.000	190.680.000	9.810	2.530.000	35%	1%	9810	325.065.775	1%	32%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
1	2.09.03.2.01	Kegiatan : Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)	85,4	732.983.000	88,34	262.734.550	85,1	158.080.000	0	2.530.000	0%	2%	0	265.264.550	0%	36%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	2.09.03.2.01.0	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	16	150.600.000	1	51.289.400	1	50.000.000	0	2.530.000	0%	5%	1	53.819.400	6%	36%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	2.09.03.2.01.0	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	5		0	-	1	77.875.000	0	-	0%	0%	0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	2.09.03.2.01.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	5	296.496.624	3	96.152.900	1	30.205.000	0	,	0%	0%	3	96.152.900	60%	32%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	2.09.03.2.01.1	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	5	296.496.624	2	72.113.650	1	-	1	-	100%	#DIV/0!	3	72.113.650	60%	24%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	2.09.03.2.01.0	. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Buku Neraca Bahan Makanan	5	296.496.624	2	72.113.650	1	24.050.000	1	24.039.250	100%	100%	3	96.152.900	60%	32%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.09.03.2.02	Kegiatan : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase penguatan cadangan pangan pemerintah (%)	100	296.496.624	87,7	70.833.225	20	11.047.000	20		100%	100%	20	81.865.225		28%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	2.09.03.2.02.0	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Terpelihara Tersedianya Biaya Rekonsiliasi Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	53	296.496.624	34	11.032.000	34	11.047.000	34	11.032.000	100%	100%	68	22.064.000	128%	7%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	ja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d In Lalu (2023)		ja dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan RKPD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Cap dan Realisa RKPI	si Anggaran		nerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Tingkat Capai Realisasi Angg s/d Tahun	garan RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9= 8/7			(10= 6+8)	(11=10/5		(12)	(13)
	2.09.03.2.04	· · ·	Skor Pola Pangan	K 87.00	Rp 296.496.624	K 97.6	Rp 59.801.225	K 07.0	Rp 32.600.000	К	Rp	K 0%	Rp 0%	K	Rp 59.801.225	K 0%	Rp 20%	Dinas	• • •
		Kegiatan: Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Harapan (PPH Konsumsi)	87,90		87,6		87,8	32.600.000	0		0,0		U				Ketahanan Pangan dan Pertanian	
а.	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	8	3.663.060.000	4	719.270.404	2	-	0	-	0%	#DIV/0!	4	719.270.404	50%	20%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
b.	2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah laporan pemantauan konsumsi pangan	5	242.784.000	3	59.801.225	1	32.600.000	0		0%	0%	3	59.801.225	60%	25%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
II.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	5	982.082.275	16,95	374.444.725	6	36.920.000	0	-	0%	0%	0	374.444.725	0%	38%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
1	2.09.04.2.01	Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Cakupan Informasi Dearah Rawan Pangan	100	219.478.345	100	115.011.800	100	36.920.000	0	-	0%	0%	0	115.011.800	0%	52%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Terupdatenya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	5	219.478.345	3	115.011.800	1	36.920.000	0		0%	0%	3	115.011.800	60%	52%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	2.09.04.2.02	Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Daerah Rawan Pangan	4	762.603.930	1	259.432.925	1	-	1	-	100%	#DIV/0!	1	259.432.925	25%	34%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penanganan Kerawanan Pangan	15	762.603.930	4	259.432.925	2	-	2	-	100%	#DIV/0!	6	259.432.925	40%	34%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
III.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	60,00	380.562.000	100	134.458.350	60	44.400.000	12	8.046.950	20%	18%	12	142.505.300	4%	37%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
1	2.09.05.2.01	Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100,00	380.562.000	100	134.458.350	100	44.400.000	19	8.046.950	19%	18%	19	142.505.300	4%	37%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5	232.050.000	2	46.680.000	1	-	0	-	0%	#DIV/0!	2	46.680.000	40%	20%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
C.	2.09.05.2.01.07	Penyediaan Sarana Pengujian Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5	148.512.000	3	57.838.350	1	31.622.000	0	6.748.950	0%	21%	3	64.587.300	60%	43%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	2.09.05.2.01.09	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4	278.460.000	1	29.940.000	1	12.778.000	0	1.298.000	0%	10%	1	31.238.000	25%	11%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTA							·							 		DPRKP	
6	2.10.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTA Program Penyelesaian Sengketa Tanah		60,00	502.795.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPRKP	
	2.10.04.2.01	Garapan Penyelesaian sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	60,00	502.795.600,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPRKP	
	2.10.04.2.01.00	d Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60,00	502.795.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPRKP	
7	2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Cakupan Penyelesaian Kerugian (Ha)	11,50	33.123.112.050,00	11,00	13.059.426.900,00	-		-		-	-	11,00	13.059.426.900,00	0,96	0,39	DPRKP DPRKP	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan lainnya (Ha)	11,00	33.123.112.050,00	8,70	13.059.426.900,00	-	-	-	-	-	-	8,70	13.059.426.900,00	0,79	0,39	DPRKP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kine	rja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d n Lalu (2023)		a dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)	Anggaran Ri	Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Cap dan Realisa RKPI	si Anggaran O (%)	RKPD s	nerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Tingkat Capaia Realisasi Angg s/d Tahun	aran RPJMD 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9= 8/7	*100%)	([10= 6+8]	(11=10/5	*100%)	(12)	(13)
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian	Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti	11	Rp 33.123.112.050,00	K 8,70	Rp 13.059.426.900,00	К -	Rp -	К -	Rp -	К -	Rp -	К 8,70	Rp 13.059.426.900,00	К 0,79	Rp 0,39	DPRKP	
		Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Ha)		·									·					
8	2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Cakupan Pemanfaatan Tanah Kosong	9.50	1.752.548.326,00	2,90	618.973.300,00	2.95	120.000.000,00	0.87	16.094.800,00	29.63	13.41	3.77	635.068.100,00	0,40	0.36	DPRKP DPRKP	\vdash
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	9,50	1.752.548.326,00	2,90	618.973.300,00	2,95	120.000.000,00	0,87	16.094.800,00	29,63	13,41	3,77	635.068.100,00		0,36	DPRKP	
	2.10.08.2.02.01	Rosong Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Sertifikat Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang diiinventarisasi	659,00	1.752.548.326,00	378,00	618.973.300,00	297,00	120.000.000,00	88,00	16.094.800,00	29,63	13,41	466,00	635.068.100,00	0,71	0,36	DPRKP	
	2,11	Lingkungan Hidup																	
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 16.960.069.162	99%	Rp 2.990.686.138	100%	Rp 3.076.962.000	21%	Rp 654.700.147	21%	21,28%	60%	Rp 3.645.386.285	60%	21%	DLH	
	2.11.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	,	98%	•	100%	·	74%	,	74%	74,34%	86%	,	86%	37%	DLH	
	2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan	10 dokumen	Rp 11.339.530	2 dokumen	Rp 4.009.000	2 dokumen	Rp 4.057.500	2	Rp 4.057.500	100%	100,00%	6 dokumen	Rp 8.066.500	60%	71%	DLH	
	2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	Rp 13.275.805		Rp 2.019.350	1 dokumen	Rp 2.072.600	1	Rp 2.072.600	100%	100,00%	1 dokumen	Rp 4.091.950	20%	31%	DLH	
	2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen Perubahan RKA- SKPD	5 dokumen	Rp 2.147.742	1 dokumen	Rp 657.000	0	Rp -	0	Rp -	0%	0,00%	1 dokumen	Rp 657.000	20%	31%	DLH	<u> </u>
	2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD	5 dokumen	Rp 3.200.885	1 dokumen	Rp 619.000	1 dokumen	Rp 626.000	0	Rp -	0%	0,00%	1 dokumen	Rp 619.000	20%	19%	DLH	
	2.11.01.2.01.06		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 laporan	Rp 26.236.766	2 laporan	Rp 4.869.000	2 laporan	Rp 4.999.900	1	Rp 2.609.100	50%	52,18%	6 laporan	Rp 7.478.100	60%	29%	DLH	
	2.11.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100%	Rp 11.236.162.462	99%	Rp 1.668.362.094	100%	Rp 2.151.986.000	20%	Rp 436.126.788	20%	20,27%	60%	Rp 2.104.488.882	60%	18,73%	DLH	
	2.11.01.2.02.01		Tersedianya gaji dan	70 bulan	Rp 11.207.302.020	14 bulan	Rp 1.661.970.594	14 bulan	Rp 2.145.516.000	4	Rp 432.138.188	29%	20,14%	42 bulan	Rp 2.094.108.782	60%	19%	DLH	
	2.11.01.2.02.05	Tunjangan ASN Koordinasi dan	tunjangan ASN Tersedianya laporan keuangan akhir	5 Iaporan	Rp 13.118.383	1 laporan	Rp 2.470.850	1 laporan	Rp 2.470.600	0	Rp -	0%	0,00%	3 laporan	Rp 2.470.850	60%	19%	DLH	
	2.11.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan	tahun Tersedianya laporan keuangan	90 laporan	Rp 10.494.706	18 laporan	Rp 2.925.850	18 Japoran	Rp 2.999.600	3	Rp 2.990.300	17%	99,69%	54 laporam	Rp 5.916.150	60%	56%	DLH	—
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD	semesteran		,	,			,	,	,			.,,,,,	•				
	2.11.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	5 laporan	Rp 5.247.353	1 laporan	Rp 994.800	1 laporan	Rp 999.800	1	Rp 998.800	100%	99,90%	3 laporan	Rp 1.993.600	60%	38%	DLH	ĺ
	2.11.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan sarana dan prsarana pendukung kinerja	100%	Rp 1.363.991.719	99%	Rp 301.138.534	100%	Rp 239.760.000	15%	Rp 37.043.400	15%	15,45%	57%	Rp 338.181.934	57%	25%	DLH	
	2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik untuk	6 kali	Rp 131.183.828	1 kali	Rp 25.000.000	0%	Rp -	0%	Rp -	0%	#DIV/0!	3 kali	Rp 25.000.000	50%	19%	DLH	
	2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya alat tulis kantor dan barang cetakan dan penggandaan	60 bulan	Rp 141.358.445	12 bulan	Rp 70.582.000	12 bulan	Rp 60.995.100	3	Rp 27.576.000	25%	45,21%	36 bulan	Rp 98.158.000	60%	69%	DLH	
	2.11.01.2.06.06	Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedianya informasi media massa	50 SKHU	Rp 62.968.237	10 SKHU	Rp 12.000.000	10 SKHU	Rp 12.000.000	3	Rp 3.000.000	30%	25,00%	30 SKHU	Rp 15.000.000	60%	24%	DLH	
	2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	55 bulan	Rp 57.720.884	11 bulan	Rp 11.000.000	11 bulan	Rp 11.000.000	2	Rp 2.000.000	18%	18,18%	33 bulan	Rp 13.000.000	60%	23%	DLH	
	2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah dan dalam daerah	60 bulan	Rp 970.760.325	12 bulan	Rp 182.556.534	12 bulan	Rp 155.764.900	3	Rp 4.467.400	25%	2,87%	36 bulan	Rp 187.023.934	60%	19%	DLH	
	2.11.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pendukung Kinerja	100%	Rp 1.400.000.000	76%	Rp 202.277.000	100%	Rp 6.446.000	99%	Rp 6.400.000	99%	99,29%	88%	Rp 208.677.000	88%	15%	DLH	
	2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Mesin dan Mesin Lainnya	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	25 unit	Rp 1.400.000.000	5 unit	Rp 202.277.000	5 unit	Rp 6.446.000	5	Rp 6.400.000	100%	99,29%	5 unit	Rp 208.677.000	20%	15%	DLH	
	2.11.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan	100%	Rp 645.996.394	100%	Rp 75.556.000	100%	Rp 65.554.000	46%	Rp 29.983.000	46%	45,74%	73%	Rp 105.539.000	73%	16%	DLH	
	2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan	pendukung Tersedianya sewa gedung kantor, rumah	20 unit	Rp 600.821.931	4 unit	Rp 67.000.000	4 unit	Rp 57.000.000	2	Rp 25.500.000	50%	44,74%	8 unit	Rp 92.500.000	40%	15%	DLH	
	2.11.01.2.08.04	Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayan	dinas dan kendaraan dinas Meniingkatkan Kebersihan	60 bulan	Rp 45.174.463	12 bulan	Rp 8.556.000	12 bulan	Rp 8.554.000	3	Rp 4.483.000	25%	52,41%	26 bulan	Rp 13.039.000	43%	29%	DLH	\vdash
	2.11.01.2.09	Umum Kantor PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kantor Persentase barang miliki daerah yang dalam kondisi baik	100%	Rp 2.947.648.136	99%	Rp 731.179.160	100%	Rp 601.460.000	23%	Rp 136.407.759	23%	22,68%	61%	Rp 867.586.919	61%	29%	DLH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	rja RPJMD pada Tahun 2026		paian Kin un Lalu (Anggaran RKPD rang dievaluasi 4)			an Kinerja dan yang Dievaluasi 24)	Tingkat Cap dan Realisa RKPI	si Anggaran	Realisasi Ki RKPD :	inerja dan s/d Tahun		Tingkat Capa Realisasi Ang s/d Tahun	garan RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)			(7)			(8))	(9= 8/7	*100%)		(10= 6+8)		(11=10/	5*100%)	(12)	(13)
(1)			(4)	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		(13)
	2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	10 unit	Rp 264.466.597	2 unit	Rp	52.414.500	2 unit	Rp	55.450.000	1	Rp	15.587.500	50%	28,11%	6 unit		68.002.000	60%	26%	DLH	
	2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan	65 unit	Rp 1.970.800.881	13 unit	t Rp	510.144.660	13 unit	Rp	387.310.000	4	Rp	82.070.259	31%	21,19%	39 unit	Rp 5	592.214.919	60%	30%	DLH	
	2.11.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya jasa pemeliharaan alat besar	5 unit	Rp 598.219.244	1 unit	Rp	162.700.000	1 unit	Rp	158.700.000	0	Rp	38.750.000	0%	24,42%	3 unit	Rp 2	201.450.000	60%	34%	DLH	
	2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan pealatan dan mesin	60 bulan	Rp 61.687.883	12 bulan	Rp .	5.920.000	12 bulan	Rp	-	0	Rp	-	0%	#DIV/0!	36 bulan	Rp	5.920.000	60%	10%	DLH	
	2.11.01.2.09.09	dan Mesin	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	60 bulan	Rp 52.473.531					Rp	-	0	Rp	-		#DIV/0!	24 bulan		•	40%	0%	DLH	
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	3 dokumen	Rp 2.482.702.500	1 dokumen	Rp	370.416.300	1 dokumen	Rp	445.000.000	7%	Rp	32.372.500	100%	7,27%	2 dokumen	Rp 4	102.788.800	67%	16%	DLH	
	2 11 02 2.02 0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersedianya Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	4 dokumen	Rp 2.482.702.500	1 dokumen	Rp	370.416.300	1 dokumen	Rp	445.000.000	0	Rp	32.372.500	0%	7,27%	2 dokumen	Rp 4	102.788.800	67%	16%	DLH	
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73.54 angka	Rp 1.834.747.681	81,25 angka	Rp	99.147.800	81,25 angka	Rp	25.000.000	2%	Rp	500.000	100%	2,00%	76 angka	Rp	99.647.800	104%	5%	DLH	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	cakupan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	100%	Rp 1.540.161.331	99%	Rp	49.573.900	100%	Rp	25.000.000	0,02	Rp	500.000	2%	2,00%	51%	Rp	50.073.900	51%	3%	DLH	
	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan	jumlah dokumen Hasil Pengukuran IKA, IKD, dan IKTL	15 dokumen	Rp 1.540.161.331	3 dokumen	Rp	49.573.900	3 dokumen	Rp	25.000.000	0	Rp	500.000	0%	2,00%	9 dokumen	Rp	50.073.900	60%	3%	DLH	
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rasio RTH persatuan luas wilayah	100%	Rp 1.171.341.873	99%	Rp	341.446.100	100%	Rp	328.554.000	26%	Rp	86.478.790	26%	26,32%	63%	Rp 4	127.924.890	63%	37%	DLH	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rasio RTH persatuan luas wilayah	100%	Rp 1.171.341.873	99%	Rp	341.446.100	100%	Rp	328.554.000	26%	Rp	86.478.790	26%	26,32%	63%	Rp 4	127.924.890	63%	37%	DLH	
	2 11 04 2.01 0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rasio RTH persatuan luas wilayah	100%	Rp 1.171.341.873	99%	Rp	341.446.100	100%	Rp	328.554.000	26%	Rp	86.478.790	26%	26,32%	63%	Rp 4	127.924.890	63%	37%	DLH	
	2.11.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	Cakupan pengendalian terhadap izin lingkungan, PPLH dan PUU LH	100%	Rp 701.672.538	99%	Rp	69.809.125	100%	Rp	35.000.000	16%	Rp	5.729.750	100%	16,37%	58%	Rp	75.538.875	58%	11%	DLH	
	2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	100%	Rp 521.365.376	99%	Rp	69.809.125	100%	Rp	35.000.000	16%	Rp	5.729.750	16%	16,37%	58%	Rp	75.538.875	58%	14%	DLH	
	2 11 06 2.01 000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	100%	Rp 521.365.376	99%	Rp	69.809.125	100%	Rp	35.000.000	16%	Rp	5.729.750	16%	16,37%	58%	Rp	75.538.875	58%	14%	DLH	
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	60%	Rp 10.782.132.298			1.921.453.750	100%		1.902.400.000	17%	Rp	316.145.400	17%	16,62%		·	237.599.150	93%	21%	DLH	
	2.11.11.2.01	PENGELOLAAN SAMPAH	Persentase jumlah sampah yang tertangani	23%	Rp 7.721.499.000	94%	ļ.	1.921.453.750	100%		1.902.400.000	17%	Ľ	316.145.400	17%	16,62%			237.599.150	241%	29%	DLH	
	2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan sampah	60 bulan	Rp 7.721.499.000	12 bulan	Rp :	1.921.453.750	12 bulan	Rp	1.902.400.000	3	Rp	316.145.400	25%	16,62%	36 bulan	Rp 2.2	237.599.150	60%	29%		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		2	21.991.840.957	155.491		2.945.865.518	57.733		3.425.810.700	549		610.578.259	0,95%	17,82%	156.040	3.5	556.443.777	7802000%	16,17%	Disdukcapil	
ı	2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	1	20.976.177.110	136		2.510.854.671	134		2.946.272.000	43		603.219.759	32,09%	20,47%	179	3.1	114.074.430	17900%	14,85%	Disdukcapil	
1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peranqkat Daerah Tepat Waktu	30	92.101.450	4		12.216.250	4		12.400.000	1		2.520.000	25,00%	20,32%	5		14.736.250	17%	16,00%	Disdukcapil	
1	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	10	73.002.750	2		7.327.750	2		7.400.000	1		2.520.000	50,00%	34,05%	3		9.847.750	30%	13,49%	Disdukcapil	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	rja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d ın Lalu (2023)		a dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		apaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)		si Anggaran D (%)	RKPD s	nerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi Ang s/d Tahur		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		*100%)		(10= 6+8)		5*100%)	(12)	(13)
2	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	K 20	Rp 19.098.700	K 2	Rp 4.888.500	K 2	Rp 5.000.000	. к	Rp -	0,00%	Rp 0,00%	K 2	Rp 4.888.500	10%	25,60%	Disdukcapil	
11	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	1	14.994.521.638	21	1.703.059.379	21	2.231.310.700	15	496.097.554	71,43%	22,23%	36	2.199.156.933	3600%	14,67%	Disdukcapil	
1	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	60	14.950.038.188	15	1.697.653.979	15	2.225.810.700	15	496.097.554	100,00%	22,29%	30	2.193.751.533	50%	14,67%	Disdukcapil	
2	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	20.256.000	1	2.493.250	1	2.500.000	0	-	0,00%	0,00%	1	2.493.250	20%	12,31%	Disdukcapil	
3	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan, laporan triwulan dan laporan semester	20	16.125.800	4	1.915.600	4	2.000.000	0	-	0,00%	0,00%	4	1.915.600	20%	11,88%	Disdukcapil	
4	2	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	10	8.101.650	1	996.550	1	1.000.000	0	-	0,00%	0,00%	1	996.550	10%	12,30%	Disdukcapil	
Ш	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	1	2.459.632.565	58	330.517.965	57	242.415.100	11	13.975.100	19,30%	5,76%	69	344.493.065	6900%	14,01%	Disdukcapil	
1	2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	60	56.329.800	12	3.744.000	12	3.745.000	0	-	0,00%	0,00%	12	3.744.000	20%	6,65%	Disdukcapil	
3	2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak, penggandaan dan kebutuhan ATK	60	437.167.950	12	37.703.950	12	40.670.100	3	3.232.500	25,00%	7,95%	15	40.936.450	25%	9,36%	Disdukcapil	
4	2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan media cetak	60	97.261.200	10	12.000.000	10	12.000.000	2	2.600.000	20,00%	21,67%	12	14.600.000	20%	15,01%	Disdukcapil	
5	2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaaan Makanan dan Minuman	55	88.689.100	11	10.533.000	11	11.000.000	3	1.950.000	27,27%	17,73%	14	12.483.000	25%	14,08%	Disdukcapil	1
6	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	1.578.307.015	12	242.287.015	12	175.000.000	3	6.192.600	25,00%	3,54%	15	248.479.615	25%	15,74%	Disdukcapil	
v	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	1	1.923.226.977	36	174.867.077	36	299.396.200	9	69.705.105	25,00%	23,28%	45	244.572.182	4500%	12,72%	Disdukcapil	
1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	551.586.477	12	78.104.077	12	48.166.200	3	2.525.105	25,00%	5,24%	15	80.629.182	25%	14,62%	Disdukcapil	
2	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan rumah dinas, gedung kantor dan kendaraan dinas	60	1.008.557.900	12	92.000.000	12	247.000.000	3	67.000.000	25,00%	27,13%	15	159.000.000	25%	15,77%	Disdukcapil	
3	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	363.082.600	12	4.763.000	12	4.230.000	3	180.000	25,00%	4,26%	15	4.943.000	25%	1,36%	Disdukcapil	
VI	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	1	1.316.894.480	16	185.394.000	16	160.750.000	7	20.922.000	43,75%	13,02%	23	206.316.000	2300%	15,67%	Disdukcapil	
1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	60	459.844.580	2	63.380.000	2	58.000.000	2	12.000.000	100,00%	20,69%	4	75.380.000	7%	16,39%	Disdukcapil	
2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60	384.034.600	2	59.900.000	2	47.300.000	2	7.650.000	100,00%	16,17%	4	67.550.000	7%	17,59%	Disdukcapil	
3	2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	60	473.015.300	12	62.114.000	12	55.450.000	3	1.272.000	25,00%	2,29%	15	63.386.000	25%	13,40%	Disdukcapil	
Ш	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan	1	910.816.930	105.304	303.676.930	57.500	287.000.000	500	1.500.000	0,87%	0,52%	105.804	305.176.930	10580400%	33,51%	Disdukcapil	ш
1	2	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	358.305.030	50.000	49.505.030	2000	35.000.000	500	1.500.000	25,00%	4,29%	50.500	51.005.030	5050000%	14,24%	Disdukcapil	
1	2	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	4	358.305.030	50.000	49.505.030	2000	35.000.000	500	1.500.000	25,00%	4,29%	50.500	51.005.030	1262500%	14,24%	Disdukcapil	
11	2	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	5.305	414.283.500	5.304	183.043.500	5500	180.000.000	0	-	0,00%	0,00%	5.304	183.043.500	100%	44,18%	Disdukcapil	
1	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk	5.305	414.283.500	5.304	183.043.500	5500	180.000.000	0	-	0,00%	0,00%	5.304	183.043.500	100%	44,18%	Disdukcapil	
Ш	2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terselenggaranya Pendaftaran Penduduk	50.001	138.228.400	50.000	71.128.400	50000	72.000.000	0	-	0,00%	0,00%	50.000	71.128.400	100%	51,46%	Disdukcapil	
1	2	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	100.000	138.228.400	50.000	71.128.400	50000	72.000.000	0	-	0,00%	0,00%	50.000	71.128.400	50%	51,46%	Disdukcapil	
Ш	2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	50.001	130.816.787	50.000	45.549.787	12	64.538.700	3	2.955.000	25,00%	4,58%	50.003	48.504.787	100%	37,08%	Disdukcapil	\Box
1	2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terselenggaranya Pencatatan Sipil	50.001	85.719.787	50.000	45.549.787	12	64.538.700	3	2.955.000	25,00%	4,58%	50.003	48.504.787	100%	56,59%	Disdukcapil	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kine	rja RPJMD pada Tahun 2026		n Lalu (2023)		a dan Anggaran RKF alan yang dievaluasi (2024)		1 RKPD y (202		Tingkat Capa dan Realisas RKPD	i Anggaran (%)	RKPD s	inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	s/d Tahur	garan RPJMD 1 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	,	(9= 8/7			(10= 6+8)	(11=10/		(12)	(13)
1	2	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Pristiwa Kependudukan dan Pencatatan Pristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	50.001	Rp 85.719.787	50.000	Rp 45.549.787	12	Rp 64.538.70	0	3	2.955.000	25,00%	Rp 4,58%	К 50.003	Rp 48.504.787	100%	Rp 56,59%	Disdukcapil	
IV	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	1	135.925.070	1	44.275.070	12	64.000.00	0	3	1.807.500	25,00%	2,82%	4	46.082.570	400%	33,90%	Disdukcapil	
ı	2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Kependudukan	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	100.925.070	1	44.275.070	12	64.000.00	О	3	1.807.500	25,00%	2,82%	4	46.082.570	200%	45,66%	Disdukcapil	
1	2	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	17	100.925.070	1	44.275.070	12	64.000.00	0	3	1.807.500	25,00%	2,82%	4	46.082.570	24%	45,66%	Disdukcapil	
v	2	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Data Kependudukan Skala Kabupaten dalam 1 Tahun	51	87.105.060	50	41.509.060	75	64.000.00	0	0	1.096.000	0,00%	1,71%	50	42.605.060	98%	48,91%	Disdukcapil	
1	2	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Profil Kependudukan	51	87.105.060	50	41.509.060	75	64.000.00	0	0	1.096.000	0,00%	1,71%	50	42.605.060	98%	48,91%	Disdukcapil	
1	2	Penyediaan Data kependudukan	Jumlah Data Kependudukan	125	87.105.060	50	41.509.060	75	64.000.00	0	0	1.096.000	0,00%	1,71%	50	42.605.060	40%	48,91%	Disdukcapil	
لت		Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota						1				-,	-,		1		,,-		1
	IDIICAN DENZO	EDAVAAN MASVADAKAT DAN DEC		l					I				1			I				
\vdash	JKUSAN PEMBE	RDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			ı															
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Rp 14.913.405.801	80%	Rp 1.873.955.580	100	Rp 2.730.041.43	6 2	25 Rp	442.622.769	24,7%	16,21	25,51	2.316.578.349	25,51	16%	DPMP	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	Rp 39.072.640	100%	Rp 12.400.000	100	Rp 12.400.00	0 3	Rp	3.046.400	30,7%	24,57	31,73	15.446.400	31,73	40%	DPMP	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja	10	Rp 8.547.140	1	Rp 7.400.000	2	Rp 7.400.00	0	- Rp	2.491.800	0,0%	33,67	1,00	9.891.800	10,00	116%	DPMP	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	120	Rp 30.525.500	1	Rp 5.000.050	2	Rp 5.000.00	0	- Rp	554.600	0,0%	11,09	1,00	5.554.650	0,83	18%	DPMP	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100	Rp 11.645.604.626	100	Rp 1.331.147.506	100	Rp 2.076.479.20	0 2	23 Rp	315.332.513	23,0%	15,19	122,96	1.646.480.019	122,96	14%	DPMP	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	Rp 11.612.026.576	14	Rp 1.325.647.406	14	Rp 2.067.979.20	0	4 Rp	315.010.513	28,6%	15,23	18,00	1.640.657.919	25,71	14%	DPMP	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5	Rp 15.262.750	1	Rp 2.500.000	1	Rp 5.000.00	0	-		0,0%	-	1,00	2.500.000	20,00	16%	DPMP	
		eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	10	Rp 12.210.200	2	Rp 2.000.100	2	Rp 2.500.00	0	- Rp	322.000	0,0%	12,88	2,00	2.322.100	20,00	19%	DPMP	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Rp 6.105.100	1	Rp 1.000.000	1	Rp 1.000.00	0	-		0,0%	-	1,00	1.000.000	20,00	16%	DPMP	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tersedianya jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan tugas dan fungsi	4	Rp 80.000.000		Rp 18.000.000	100	Rp 20.000.00	0	- Rp	-	0,0%	-	0,00	18.000.000	0,00	23%	DPMP	
		pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	4	Rp 80.000.000		Rp 18.000.000	4	Rp 20.000.00	0	- Rp	-	0,0%	-	0,00	18.000.000	0,00	23%	DPMP	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100	Rp 1.589.141.661	100%	Rp 361.524.524	100	Rp 327.884.43	6	25 Rp	29.178.856	24,7%	8,90	25,72	390.703.380	25,72	25%	DPMP	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	60	Rp 19.878.206	12	Rp 4.034.000	12			- Rp	2.000.000	0,0%	46,15	12,00	6.034.000	20,00	30%		
\vdash		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	5	Rp 152.627.500	1	Rp 25.000.000	1	Rp 25.000.00	0	- Rp	-	0,0%		1,00	25.000.000	20,00	16%	DPMP	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK dan barang cetakan	60	Rp 158.379.725	12	Rp 41.490.550	12	Rp 35.550.70	0	3 Rp	4.500.000	25,0%	12,66	15,00	45.990.550	25,00	29%	DPMP	
Ш		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah SKHU	50	Rp 73.261.200	12	Rp 12.000.000	10	Rp 12.000.00	0	3 Rp	2.000.000	30,0%	16,67	15,00	14.000.000	30,00	19%	DPMP	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaaan Makanan dan Minuman	55	Rp 67.156.100	11	Rp 11.000.000	11	Rp 11.000.00	0	3 Rp	2.000.000	27,3%	18,18	14,00	13.000.000	25,45	19%	DPMP	
		Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	Rp 1.117.838.930	12	Rp 267.999.974	12	Rp 240.000.00	0	3 Rp	18.678.856	25,0%	7,78	15,00	286.678.830	25,00	26%	DPMP	
			Persentase pemenuhan Prasarana dan prasarana pendukung kinerja	100	Rp 304.500.000	100%	Rp 11.500.000	100	Rp 76.980.00	0	- Rp	-	0,0%	-	1,00	11.500.000	1,00	4%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	26	Rp 304.500.000	2	Rp 11.500.000	6	Rp 76.980.00	0	- Rp	-	0,0%	-	2,00	11.500.000	7,69	4%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100	Rp 884.225.240	100%	Rp 69.251.000	100	Rp 135.050.60	0 7	70 Rp	89.365.000	70,3%	66,17	71,30	158.616.000	71,30	18%	DPMP	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	Rp 197.805.240	12	Rp 203.000	12	Rp 1.800.00	0	-		0,0%	-	12,00	203.000	20,00	0%	DPMP	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	15	Rp 641.035.500	12	Rp 59.000.000	12	Rp 122.000.00	0	3 Rp	87.000.000	25,0%	71,31	15,00	146.000.000	100,00	23%	DPMP	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	Rp 45.384.500	12	Rp 10.048.000	12	Rp 11.250.60	0	3 Rp	2.365.000	25,0%	21,02	15,00	12.413.000	25,00	27%	DPMP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kine	rja RPJMD pada Tahun 2026		un Lalu	(2023)	Tahun berja	alan yar (2024)	anggaran RKPD ng dievaluasi	Realisasi C Anggaran Ri	KPD yan (2024)	g Dievaluasi	Tingkat Capa dan Realisas RKPE	si Anggaran (%)	RKPD s	nerja dan Anggaran /d Tahun 2024	Tingkat Capai Realisasi Ang s/d Tahun	garan RPJMD 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	К	(5) Rp	К	(6)		К	(7)	Do.	К	(8)	Do	(9= 8/7 К		к (10= 6+8) Rp	(11=10/	5*100%) Rp	(12)	(13)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100	,	100%	Rp	70.132.500	100	Rp	Rp 81.247.200		Rp	8p 5.700.000	22,1%	Rp 7,02	23,13	75.832.500	23,13		DPMP	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	10	Rp 359.895.645	2	. Rp	59.112.500	2	Rp	70.050.000	-	Rp	5.700.000	0,0%	8,14	2,00	64.812.500	20,00	18%	DPMP	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	60	Rp 90.965.990	12	Rp	11.020.000	1	Rp	11.197.200	-			0,0%	-	12,00	11.020.000	20,00	12%	DPMP	
2	Meningkatnya Pembangunan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Peningkatan status Desa	80%	Rp 6.240.000.000		Rp	353.825.750	69	·	955.024.484		Rp	1.025.000	0,2%	0,11	79,11	354.850.750	9888,42	-	DPMP	
		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa Maju		Rp 6.240.000.000		Rp	353.825.750	100		955.024.484		Rp	1.025.000	0,1%	0,11	100,11	354.850.750	100,11		DPMP	
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Pekon	5	Rp 6.240.000.000	1	. Rp	353.825.750	1	Rp	955.024.484	0	Rp	1.025.000	10,7%	0,11	1,11	354.850.750	22,15	6%	DPMP	
3	Meningkatnya Pembangunan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pekon Tertib Administrasi	100	Rp 10.166.272.680	100%	Rp	1.740.163.649	100	Rp 1	1.499.373.660	28	Rp	30.250.000	28,3%	2,02	29,27	1.770.413.649	29,27	17%	DPMP	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi	Cakupan Pekon Tertib Administrasi	100 60	-	100	1	1.740.163.649	100		1.499.373.660	-	Rp	30.250.000	0,0%	2,02	100,00	1.770.413.649	100,00		DPMP	
		Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi yang Diberikan		Rp 7.048.568.680			1.331.659.434	12		1.127.972.060	-			0,0%	-	12,00	1.331.659.434	20,00		DPMP	
<u> </u>		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pekon	580	Rp 1.029.254.000	116	Rp	190.604.690	116	Rp	93.400.000	25	Rp	15.550.000	21,6%	16,65	141,00	206.154.690	24,31	20%	DPMP	
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah pekon	580	Rp 696.150.000		Rp	113.064.850	116	Rp	160.001.600	25	Rp	14.700.000	21,6%	9,19	25,00	127.764.850	4,31	18%	DPMP	
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa	jumlah BUMDES	137	Rp 1.392.300.000		Rp	104.834.675	27	Rp	70.000.000	-			0,0%	-	0,00	104.834.675	0,00	8%	DPMP	
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa	Jumlah Desa	116	Rp 60.000.000					Rp	48.000.000	-					0,00	-	0,00	0%	DPMP	
4	Meningkatnya Pembangunan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100	Rp 12.379.295.430	100	Rp	2.232.689.192	100	Rp 1	1.551.638.500	7	Rp	35.971.800	6,7%	2,32	106,66	2.268.660.992	106,66	18%	DPMP	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100	Rp 12.379.295.430	100	Rp	2.232.689.192	100	Rp 1	1.551.638.500	7	Rp	35.971.800	6,7%	2,32	106,66	2.268.660.992	106,66	18%	DPMP	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kader Posyandu yang dibina	4500	Rp 6.933.300.000	900	Rp	1.425.347.350	900	Rp :	1.196.638.500				0,0%	-	900,00	1.425.347.350	20,00	21%	DPMP	
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	60	Rp 5.445.995.430	12	. Rp	807.341.842	12	Rp	355.000.000	3	Rp	35.971.800	25,0%	10,13	15,00	843.313.642	25,00	15%	DPMP	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	TERLAKSANANYA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	100		100		7.263.360.573			8.098.622.300			841.310.125	#DIV/0!	10,39%	100	4.342.737.168	1	150,83%	DP3AKB	
	02.14.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100		100		3.501.427.043		,	4.169.081.300			819.354.125	#DIV/0!	19,65%	100	840.478.125	#DIV/01	844,74%	DP3AKB	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		99.496.000			21.124.000			19.262.000			11.633.000	#DIV/0!	60,39%	0	19.033.000	#DIV/0!	101,24%	DP3AKB	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	12	18.800.000	2		7.400.000	2		7.400.000 3.431.000	1		4.771.000	50 100	64,47%	3	8.202.000	0,25	49,94%	DP3AKB	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		·	16.424.000	1		3.431.000	1		3.431.000	1		3.431.000		100,00%	2	3.431.000	0,5	20,89%	DP3AKB	
	2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	16.424.000	0		0	0		-	0		-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	3.431.000	0	20,89%	DP3AKB	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kine	erja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d n Lalu (2023)		rja dan Anggaran RKPD jalan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan RKPD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Cap dan Realisa RKPI	si Anggaran D (%)	RKPD s	nerja dan Anggaran /d Tahun 2024	Tingkat Capai Realisasi Angg s/d Tahun	garan RPJMD 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9= 8/7	*100%)	(10= 6+8)	(11=10/5		(12)	(13)
· ·		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	- К 4	Rp 16.424.000	К .	Rp 3.431.000	<u>к</u> 1	Rp 3.431.000	К	Rp 1 3.431.000	K 100	Rp 100,00%	K 2	Rp 6.862.000	K 0.5	Rp 41,78%		, ,
		·	lumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4		1	3.431.000	0				upu //el	#DIV/0!		3.431.000			DP3AKB	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumian Dokumen Perubahan DPA-SKPD		16.424.000	1		0	-		-	#DIV/0!	·	1		0,25	22,87%	DP3AKB	
	2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	12	15.000.000	2	3.431.000	2	5.000.000		0	0	0,00%	2	2.995.264.293	0,16666667	37,91%	DP3AKB	
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan keuangan Tepat Waktu	100	7.901.554.294	100	2.995.264.293		3.603.198.300		781.400.025	#DIV/0!	21,69%	100	3.771.164.318	1	47,82%	DP3AKB	
	2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tuniangan PNS	84	7.886.501.744	14	2.989.764.293	28	3.597.698.300		4 781.400.025	14,2857143	21,72%	18	783.900.025	0,21428571	9051,70%	DP3AKB	
	2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	6	8.660.250	1	2.500.000	1	2.500.000		0	0	0,00%	1	2.000.000	0,16666667	68,30%	DP3AKB	
	2.14.01.2.02.07		Jumlah Laporan Keuangan	108	2.928.200	18	2.000.000	18	2.000.000		-	0	0,00%	18	1.000.000	0,16666667	28,87%	DP3AKB	
	2.14.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6	3.464.100	1	1.000.000	1	1.000.000		-	0	0,00%	1	395.410.334	0,16666667	57,14%	DP3AKB	
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	100	691.975.401	100	395.410.334	100	290.640.000		0 11.195.100	0	3,85%	100	14.890.100	1	99,86%	DP3AKB	
	2.14.01.2.06.01	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	100	14.910.823	9	3.695.000	9	4.225.000	:	2 1.280.000	22,222222	30,30%	11	26.280.000	0,11	42,66%	DP3AKB	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	6	61.602.500	1	25.000.000	1	25.000.000		0 -	0	0,00%	1	24.472.000	0,16666667		DP3AKB	
	2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK	72	121.699.653	10	24.472.000	2	38.415.000		-	0	0,00%	10	12.000.000	0,13888889	40,58%	DP3AKB	
	2.14.01.2.06.06			60	29.569.200	12	12.000.000	12	12.000.000		2.000.000	16,6666667	16,67%	14	13.000.000	0,23333333	34,12%	DP3AKB	
	2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaaan Makanan dan Minuman	66	38.105.100	11	11.000.000	12	11.000.000		2.000.000	16,6666667	18,18%	13	160.207.500	0,1969697	37,60%	DP3AKB	
	2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	72	426.088.125	6	158.207.500	6	200.000.000		5.915.100	16,6666667	2,96%	7	95.415.100	0,09722222	12,08%	DP3AKB	
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	790.179.360	100	89.500.000		24.500.000		-	#DIV/0!	0,00%	100	89.500.000	1	47,76%	DP3AKB	
	2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	100	187.383.020	3	89.500.000	3	24.500.000	(0 -	0	0,00%	3	84.130.250	0,03	15,68%	DP3AKB	
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	100	536.553.320	100	84.130.250		87.381.000		9.126.000	#DIV/0!	10,44%	100	17.875.250	1	26,98%	DP3AKB	
	2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	72	66.243.020	5	8.749.250	5	12.000.000	:	1.150.000	20	9,58%	6	73.150.000	0,08333333	16,10%	DP3AKB	
	2.14.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	28	454.222.700	3	72.000.000	3	72.000.000		7.000.000	33,3333333	9,72%	4	10.381.000	0,14285714	64,53%	DP3AKB	
	2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	72	16.087.600	12	3.381.000	12	3.381.000	:	976.000	25	28,87%	15	167.510.000	0,20833333	25,80%	DP3AKB	
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang Milik Daerah yang Dalam Kondisi Baik	100	649.226.910	100	166.534.000		144.100.000		6.000.000	#DIV/0!	4,16%	100	169.294.000	1	27,90%	DP3AKB	
	2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Kendaraan	28	606.728.210	15	163.294.000	15	137.100.000	:	5.000.000	6,6666667	3,65%	16	8.240.000	0,57142857	19,39%	DP3AKB	
	2.14.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	72	42.498.700	8	3.240.000	8	7.000.000	:	1 1.000.000	12,5	14,29%	9	245.303.350	0,125	38,82%	DP3AKB	
	02.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Laju pertumbuhan Penduduk	0,92	631.826.399		244.303.350		176.400.000		0	#DIV/0!	0,00%	0	219.326.000	0	#DIV/0!	DP3AKB	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	Tersedianya Indikator Program bangga Kencana Dalam Kebijakan	100	-	100	219.326.000		176.400.000			#DIV/0!	0,00%	100	85.200.000	1	655,38%	DP3AKB	
	2 14 02 2 02 12	Kabupaten/Kota	Pembangunan	11	12 000 000	11	0F 300 000	11	PC 400 000		0 0		0.0007	4.	1 103 350 650		0025 4224		
	2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	11	13.000.000	11	85.200.000	11	86.400.000	'	0	0	0,00%	11	1.192.250.000	1	9935,42%	DP3AKB	
	2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan	Jumlah Dokumen Pengelohan dan Pelaporan Data pengendalian lapangan dan Pelayanan KB	11	12.000.000	11	1.192.250.000	11	90.000.000	-	0	0	0,00%	11	2.259.778.000	1	10,22%	DP3AKB	
	2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Total Fertility Rate	2,10	22.104.832.046	2,15	2.259.778.000		1.624.741.000		21.956.000	#DIV/0!	1,35%	2,15	845.019.350	1,02380952	31,29%	DP3AKB	
1	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Program KKBPK	100	2.700.311.022	86,3	823.063.350		821.265.000		10.956.000	#DIV/0!	1,33%	86,3	325.956.000	0,863	359,06%	DP3AKB	
		Kearifan Budaya Lokal																	

No	Kode	Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintaha Daerah dan Program/ Kegiatan (2) (3)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kine	rja RPJMD pada Tahun 2026		un Lalu (2023)		ja dan Anggaran RKPD jalan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan RKPD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capa dan Realisas RKPD	si Anggaran (%)	RKPD s/	erja dan Anggaran d Tahun 2024	Tingkat Capai Realisasi Angg s/d Tahun	garan RPJMD 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9= 8/7			.0= 6+8)	(11=10/5		(12)	(13)
-	2440220440	Pengelolaan Operasional dan Sarana di	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan	10	Rp 90.780.438	10	Rp 315.000.000	К 10	Rp 474.192.000	К	Rp	K	Rp 0.00%	K 10	Rp 159.384.000	K	Rp 258,73%		Ь—
	2.14.05.2.01.10	Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumian Tapuran Hasii Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai penyuluhan Bangga kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10	90.780.438	10	315.000.000	10	4/4.192.000		0	U	0,00%	10	159.364.000	1	258,/3%	DРЗАКВ	
	2.14.03.2.01.11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalul Rapat Koordinasi Kesamatan (Rakocam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumiah laporan Mekanisme Opeasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya	66	61.602.500	11	159.384.000	11	110.000.000		1 10.956.000	9,09090909	9,96%	12	106.291.800	0,18181818	32,80%	DP3AKB	
	2.14.03.2.01.12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Media Massa, Cetak dan Elektronik serta media Luar Ruang	66	324.064.024	11	95.335.800	11	80.073.000		0	0	0,00%	11	33.300.000	0,16666667	5,89%	DРЗАКВ	
	2.14.03.2.01.13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang KKBPK	3300	565.839.560	11	33.300.000	11	60.000.000		0 0	0	0,00%	11	140.820.950	0,00333333	9,52%	DP3AKB	
	2.14.03.2.01.14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan avokasi program bangga kencana (pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga berencana	12	1.479.460.500	11	140.820.950	4	97.000.000		0	0	0,00%	11	613.245.300	0,91666667	19,67%	DP3AKB	
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang program Keluarga Berencana untuk Pelayanan KB yang Berkualitas serta Pencatatan dan pelapporan From F2KB dari Faskes atau klinik	12	3.118.346.500	12	613.245.300	13	638.876.000		-	0	0,00%	12	5.700.000	1	12,66%	DРЗАКВ	
	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terwujudnya Pendistribusian Alkon Ke Fasilitas Kesehatan	12	45.006.140	12	5.700.000	13	11.700.000		0	0	0,00%	12	506.617.000	1	37,68%	DРЗАКВ	
	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)	11	1.344.430.300	11	506.617.000	11	517.826.000		0	0	0,00%	11	11.300.000	1	0,70%	DP3AKB	
	2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Meningkatnya pengetahuan Masyarakat tentang Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	3300	1.623.313.000	11	11.300.000	3	19.350.000		0	0	0,00%	11	89.628.300	0,00333333	431,67%	DP3AKB	
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Dukungan Operasional KB Bergerak	1720	20.763.060	4	89.628.300	4	90.000.000		0	0	0,00%	4	444.750.000	0,00232558	524,26%	DP3AKB	
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kader dan Kelompok Kerja (POKJA) yang Terbentuk dan Terbina di Kampung KB	100	84.834.000	65,2	444.750.000		164.600.000		11.000.000	#DIV/0!	6,68%	65,2	14.750.000	0,652	#DIV/0!	DP3AKB	
	2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	28	0	1	3.750.000	3	164.600.000		1 11.000.000	33,3333333	6,68%	2	11.000.000	0,07142857	0,87%	DРЗАКВ	
	2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga	64	1.257.852.180				2.128.400.000		0	#DIV/0!	0,00%	0	339.647.680	0	16,55%	DP3AKB	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Forum Generasi Berencana, Kelompok UPPKS dan Kader Poktan PKB dan PPKBD yang Mendapatkan pembinaan tentang Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga serta Tim pendampling Keluarga yang Mendapatkan Bisya Operasional	100	2.052.250.326	80	339.647.680		1.044.000.000		-	#DIV/0!	0,00%	80	0	0,8	0,00%	DРЗАКВ	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kine	rja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d ın Lalu (2023)		rja dan Anggaran RKPD jalan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan RKPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realisa RKP	paian Kinerja asi Anggaran D (%)	RKPD	inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	s/d Tahur	garan RPJMD n 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9= 8/	7*100%)		(10= 6+8)	(11=10/	5*100%)	(12)	(13)
	2.14.04.2.01.18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	11	8p 360.000.000	К	Rp 0	10	Rp 100.000.000	К 0	Rp 0	<u>к</u> 0	Rp 0,00%	<u>K</u> 0	Rp 59.363.500	0	Rp 83,29%	DP3AKB	
	2.14.04.2.01.26	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok UPPKA yang Di Bentuk	66	71.272.000	22	59.363.500	0	-	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	22	918.204.500	0,33333333	99,89%	DP3AKB	
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pekon, kecamatan yang mengikuti lomba kesra, serta kader perempuan yang mendapat pembinaan P3KSS dan GSI	100	919.200.000	100	918.204.500		1.084.400.000			#DIV/0!	0,00%	100	40.000.000	1	100,00%	DP3AKB	
	2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumalah organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program ketahanan dan kesejaterana Keluarga, BKB, BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	100	40.000.000	100	40.000.000	145	165.000.000	0		o	0,00%	100	402.000.000	1	100,00%	DP3AKB	
	2.14.04.2.02.05	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Kader pendamping keluarga yang mendapatkan Operasional	402	402.000.000	402	402.000.000	402	402.000.000	0		O	0,00%	402	476.204.500	1	99,79%	DP3AKB	
	2.14.04.2.02.06	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah tim pendamping keluarga yang mendapatkan Operasional	134	477.200.000	134	476.204.500	134	517.400.000	0		d	0,00%	134	#REF!	1	#REF!	DP3AKB	
	2.14.03.2.04.06	Penyediaan Biaya Oprasional bagi Kelompok Kegiatan Kegiatan Ketahanan dan Kesejatrean Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPKS,PIK-R dan Usah Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah KKetahanan dan Kesejatreraan Keluarga (BKB, BKR, PPK, PPK, PIK-R dan Usah Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			0		118	994.000.000	0		o	0,00%	0	#REF!	#DIV/0!	#REF!	DP3AKB	muncul ditahun 2025 di tahun 2024 tidak ada
	2.15	Bidang Urusan Perhubungan		100	Rp 13.974.052.400	100	Rp 9.980.064.439	100	Rp 4.835.110.700	28	Rp 1.072.102.717	28	22	28	Rp 11.052.167.156	28	79	Dishub	
1	2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Perhubungan	100	Rp 9.459.501.000	100	Rp 4.847.235.902	100	Rp 3.348.415.700	44	Rp 791.454.735	44	24	44	Rp 5.638.690.637	44	60	Dishub	
	2.15.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	Rp 32.000.000	100	Rp 17.526.500	100	Rp 12.400.000	66,6666667	Rp 2.675.000	67	22	67	Rp 20.201.500	67	63	Dishub	
\vdash	2.15.01.2.01.00	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	10	Rp 7.000.000	5	Rp 7.557.350	2	Rp 7.400.000	1	Rp 1.649.000	50	22	20	Rp 9.206.350	200	132	Dishub	
	2.15.01.2.01.00 06	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Rp 25.000.000	5	Rp 9.969.150	1	Rp 5.000.000	1	Rp 1.026.000	100	21	20	Rp 10.995.150	200	44	Dishub	
	2.15.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	Rp 6.781.956.000	100	Rp 3.745.534.748	100	Rp 2.690.610.700	10,3448276	Rp 684.675.265	10	25	10	Rp 4.430.210.013	10	65	Dishub	
	2.15.01.2.02.00 01	Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	65	Rp 6.754.456.000	28	Rp 3.734.545.898	14	Rp 2.685.110.700	3	Rp 684.675.265	21	25	11	Rp 4.419.221.163	16	65	Dishub	
	2.15.01.2.02.00 05	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Rp 12.500.000	4	Rp 4.988.950	1	Rp 2.500.000	0	Rp -	0	0	0	Rp 4.988.950	0	40	Dishub	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kine	erja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s ın Lalu (2023)		rja dan Anggaran RKPD jalan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan RKPD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capa dan Realisas RKPD	i Anggaran		inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi An	aian Kinerja & ggaran RPJMD n 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	I	(7)		(8)	(9= 8/7*			(10= 6+8)		/5*100%)	(12)	(13)
	2.15.01.2.02.00 07	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	Rp 10.000.000	<u>к</u> 5	Rp 3.999.9	0 12	Rp 2.000.000	0	Rp Rp -	0	Rp 0	0	Rp 3.999.900	0	Rp 40	Dishub	
	2.15.01.2.02.00 08	Subkegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Rp 5.000.000	4	Rp 1.999.9	0 2	Rp 1.000.000	0	Rp -	0	0	0	Rp 1.999.950	0	40	Dishub	
	2.15.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	100	Rp 1.500.000.000	8	Rp 44.914.62	5 2	Rp 129.440.000	0	Rp -	0	0	0	Rp 44.914.625	0	3	Dishub	
	2.15.01.2.05.00 09	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai	66	Rp 1.500.000.000	1	Rp 44.914.6	5 2	Rp 129.440.000	0	Rp -	0	0	0	Rp 44.914.625	0	3	Dishub	
	2.15.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	Rp 523.045.000	100	Rp 659.629.1	4 100	Rp 254.625.000	22	Rp 56.530.350	22	22	22	Rp 716.159.504	22	137	Dishub	
	2.15.01.2.06.00 01	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Rp 5.000.000	24	Rp 9.998.2	0 12	Rp 6.026.000	3	Rp 1.853.000	25	31	13	Rp 11.851.250	21	237	Dishub	
	2.15.01.2.06.00 04	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Rp 125.000.000	25	Rp 61.551.0	0 1	Rp 25.000.000	0	Rp -	0	0	0	Rp 61.551.000	0	49	Dishub	
	2.15.01.2.06.00 05	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	Rp 125.045.000	24	Rp 88.733.7	0 12	Rp 48.599.000	3	Rp 5.914.250	25	12	13	Rp 94.648.000	21	76	Dishub	
	2.15.01.2.06.00 06	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50	Rp 60.000.000	25	Rp 41.100.0	0 17	Rp 34.000.000	3	Rp 6.200.000	18	18	12	Rp 47.300.000	24	79	Dishub	
	2.15.01.2.06.00 08	Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55	Rp 55.000.000	15	Rp 15.000.0	0 11	Rp 11.000.000	2	Rp 2.000.000	18	18	13	Rp 17.000.000	24	31	Dishub	
	2.15.01.2.06.00 09	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Rp 153.000.000	24	Rp 443.246.15	4 12	Rp 130.000.000	3	Rp 40.563.100	25	31	13	Rp 483.809.254	21	316	Dishub	
	2.15.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	Rp -	0	Rp	3	Rp 27.000.000	0	Rp -	0	0	0	Rp -	0	0	Dishub	
	2.15.01.2.07.00 06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Rp -	0	Rp	3	Rp 27.000.000	0	Rp -	0	0	0	Rp -	0	0	Dishub	
	2.15.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Perhubungan	100	Rp 400.000.000	100	Rp 213.103.84	0 100	Rp 146.340.000	25	Rp 37.774.120	25	26	25	Rp 250.877.960	25	63	Dishub	
	2.15.01.2.08.00 02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembiayaan listrik, telpon dan internet	60	Rp 90.000.000	24	Rp 45.018.4	0 12	Rp 29.600.000	3	Rp 5.965.120	25	20	13	Rp 50.983.560	21	57	Dishub	
	2.15.01.2.08.00 03	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya pembiayaan sewa kantor, sewa rumah dinas dan sewa kendaraan dinas	5	Rp 285.000.000	15	Rp 138.876.00	0 12	Rp 92.000.000	3	Rp 25.500.000	25	28	20	Rp 164.376.000	400	58	Dishub	
	2.15.01.2.08.00 04	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebersihan kantor	60	Rp 25.000.000	24	Rp 29.209.4	0 12	Rp 24.740.000	3	Rp 6.309.000	25	26	13	Rp 35.518.400	21	142	Dishub	
	2.15.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Perhubungan	100	Rp 222.500.000	100	Rp 166.527.03	5 100	Rp 88.000.000	100	Rp 9.800.000	100	11	100	Rp 176.327.035	100	79	Dishub	
	2.15.01.2.09.00 01	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	Rp -	3	Rp 71.522.9	2 3	Rp 88.000.000	3	Rp 9.800.000	100	11	100	Rp 81.322.972	0	0	Dishub	Pergantia n Subkegia tan
	2.15.01.2.09.00 02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25	Rp 210.000.000	5	Rp 60.265.8	3 0	Rp -	0	Rp -	0	0	0	Rp 60.265.863	0	29	Dishub	Dihapusk an
	2.15.01.2.09.00 09		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Rp 12.500.000	3	Rp 34.738.2	0	Rp -	0	Rp -	0	0	0	Rp 34.738.200	0	278	Dishub	Dihapusk an
2	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100	Rp 3.970.001.400	100	Rp 4.707.697.1	7 100	Rp 1.454.295.000	14	Rp 276.647.982	14	19	14	Rp 4.984.345.169	14	126	Dishub	
	2.15.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100	Rp 3.572.100.000	100	Rp 2.111.397.4	6 100	Rp 950.000.000	0	Rp 203.001.732	0	21	0	Rp 2.314.399.158	0	65	Dishub	
	2.15.02.2.02.00 02	Subkegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Tersedia di Jalan Kabupaten/Kota	100	Rp 3.572.100.000	20	Rp 987.100.22	8 0	Rp -	0	Rp -	0	0	0	Rp 987.100.228	0	28	Dishub	Pergantia n Subkegia tan

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kine	2026	1D pada Tahun		un La	Kinerja RKPD s/d slu (2023)		jalan ya (202	•		(202	,	dan Realisa RKP	D (%)	RKPD	inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi Ang s/d Tahui	ian Kinerja & garan RPJME 1 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)			(6			(7)			(8)		(9= 8/7	*100%)		(10= 6+8)		5*100%)	(12)	(13)
		Subkegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara/Jumlah Pembayaran PJU	0	Rp	Rp -	20	Rp	Rp 1.124.297.198	. К 20	Rp	950.000.000	0	Rp	Rp 203.001.732	0	21	0	Rp 1.327.298.930	к	Rp 0	Dishub	Perganti n Subkegia tan
	2.15.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	200.000.000	0	Rp	-	0	0	0	Rp -	0	0	Dishub	
	2.15.02.2.03.00 11	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	200.000.000	0	Rp	-	0	0	0	Rp -	0	0	Dishub	Ditamba hkan
	2.15.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100	Rp	85.000.000	100	Rp	528.913.146	100	Rp	169.430.000	16,2162162	Rp	40.246.250	16	24	16	Rp 569.159.396	16	670	Dishub	
	2.15.02.2.06.00 04	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	0	Rp	-	0	Rp	-	12	Rp	20.925.000	3	Rp	2.000.000	25	10	0	Rp 2.000.000	0	0	Dishub	Ditamba hkan
	2.15.02.2.06.00 14	Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan sosialisasi pelaksaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	0	Rp	-	0	Rp	-	1	Rp	11.800.000	0	Rp	-	0	0	0	Rp -	0	0	Dishub	Ditamba hkan
	2.15.02.2.06.00 15	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	0	Rp		0	Rp	-	12	Rp	13.000.000	0	Rp		0	0	0	Rp -	0	0	Dishub	Ditamba hkan
	2.15.02.2.06.00 17	Subkegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	15	Rp	85.000.000	24	Rp	528.913.146	12	Rp	123.705.000	3	Rp	38.246.250	25	31	13	Rp 567.159.396	83	667	Dishub	
	2.15.02.2.09	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kebutuhan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	Rp	312.901.400	100	Rp	477.566.965	100	Rp	134.865.000	25	Rp	33.400.000	25	25	25	Rp 510.966.965	25	163	Dishub	
	2.15.02.2.09.00 02	Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten Kota	35	Rp	312.901.400	24	Rp	477.566.965	12	Rp	134.865.000	3	Rp	33.400.000	25	25	13	Rp 510.966.965	36	163	Dishub	
	2.15.02.2.16	Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	Rp		100	Rp	1.589.819.650	0	Rp	-	0	Rp		0	0	0	Rp 1.589.819.650	0	0	Dishub	Dihapusk an
	2.15.02.2.16.00 03	Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	Rp		15	Rp	1.589.819.650	0	Rp	-	0	Rp	-	0	0	0	Rp 1.589.819.650	0	0	Dishub	Dihapusl an
3	2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Cakupan Pemenuhan Pengelolaan Pelayaran	100	Rp	544.550.000	100	Rp	425.131.350	100	Rp	32.400.000	25	Rp	4.000.000	25	12	25	Rp 429.131.350	25	79	Dishub	
	2.15.03.2.06	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	100	Rp	544.550.000	100	Rp	425.131.350	100	Rp	32.400.000	25	Rp	4.000.000	25	12	25	Rp 429.131.350	25	79	Dishub	
	2.15.03.2.06.00 04	Kabupaten/Kota Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Jumiah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaingan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam	25	Rp	544.550.000	24	Rp	425.131.350	12	Rp	32.400.000	3	Rp	4.000.000	25	12	13	Rp 429.131.350	50	79	Dishub	
	2.16	Urusan Pemerintahan Bidang			33	3.126.583.959			6.221.045.717			4.357.840.863		1	781.567.478	14,66%	17,93%		6.388.007.093		19,28	Diskominfot	i
	2.16.01	Komunikasi dan Informatika Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	95,00%		9.708.590.987	100,00%		3.936.234.041	90,00%		2.661.577.013	49,49%		566.024.698	15,82%	21,27%	23,80%	3.611.095.139	18,32%	18,329	Diskominfot	i

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	rja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d n Lalu (2023)		a dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	RKP	si Anggaran D (%)	RKPD s	inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi Ang s/d Tahu	nian Kinerja & ggaran RPJMD n 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	-	*100%)		(10= 6+8)		/5*100%)	(12)	(13)
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	95,00%	Rp 34.233.341	100,00%	Rp 12.400.000	100,00%	12.400.000	25%	2.569.000	K 25,00%	Rp 20,72%	25,00%	14.969.000	K 25,00%	Rp 43,73%	Diskominfoti ksan	
1	2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	10	7.488.543	2	7.400.000	2	7.400.000	1	2.569.000	50,00%	34,72%	3	9.969.000	30,00%	133,12%	Diskominfoti ksan	
2	2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laoran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Japoran)	10	26.744.798	2	5.000.000	2	5.000.000			0,00%	0,00%	2	5.000.000	20,00%	18,70%	Diskominfoti ksan	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat	95,00%	9.117.721.557	100,00%	1.198.842.998	100,00%	1.513.012.500	23,90%	362.312.623	7,14%	23,95%	21,43%	1.561.155.621	21,43%	17,12%	Diskominfoti	
	2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	70	9.088.302.279	14	1.193.342.998	14	1.507.512.500	4	362.312.623	28,57%	24,03%	18	1.555.655.621	25,71%	17,12%	Diskominfoti ksan	
*	2.10.01.2.02.03	Keuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	5	13.372.399	1	2.500.000	1	2.500.000			0,00%	0,00%	1	2.500.000	20,00%	18,70%	Diskominfoti ksan	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	10	10.697.919	2	2.000.000	2	2.000.000			0,00%	0,00%	2	2.000.000	20,00%	18,70%	Diskominfoti ksan	
6		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Iaporan)	5	5.348.960	1	1.000.000	1	1.000.000			0,00%	0,00%	1	1.000.000	20,00%	18,70%	Diskominfoti ksan	
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	95%	9.970.925.012	100,00%	1.543.661.443	100,00%	949.108.513	15,53%	169.246.075	21,09%	17,83%	24,22%	1.748.407.518	23,06%	17,54%	Diskominfoti ksan	
/	2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	877.229.377	2	67.000.000	3	67.000.000	1	35.500.000	33,33%	52,99%	3	102.500.000	30,00%	11,68%	Diskominfoti ksan	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	133.723.990	1	25.000.000	1	25.000.000			0,00%	0,00%	1	25.000.000	20,00%	18,70%	Diskominfoti ksan	
9	2.16.01.2.06.05 2.16.01.2.06.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	60	1.617.133.844	12	321.227.000	4	237.164.600	1	68.948.400	25,00%	29,07%	13	390.175.400	21,67%	24,13%	Diskominfoti ksan	
		Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	60	6.588.634.495	12	693.960.000	12	345.000.000	3	11.330.000	25,00%	3,28%	15	705.290.000	25,00%	10,70%	Diskominfoti ksan	
11	2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	55	58.838.556	11	33.000.000	11	33.000.000	2	6.000.000	18,18%	18,18%	13	39.000.000	23,64%	66,28%	Diskominfoti ksan	
12	2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	60	695.364.750	12	403.474.443	12	241.943.913	3	82.967.675	25,00%	34,29%	15	486.442.118	25,00%	69,95%	Diskominfoti ksan	
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Dan Prasarana Pendukung Kinerja	95%		79%	160.160.000	95%	85.500.000	100%	-	0,00%	0,00%	180%	160.160.000	6,62%	7,34%	Diskominfoti ksan	
13		,	Lainnya yang Disediakan	15	2.182.942.513	27	160.160.000	24	85.500.000			0,00%	0,00%	27	160.160.000	180,00%	7,34%	Diskominfoti ksan	
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	95,00%	26.744.798	100,00%	1.088.779.600	90,00%	5.556.000	96,00%	897.000	25,00%	16,14%	25,00%	2.853.000	25,00%	10,67%	Diskominfoti ksan	
14	2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.086.823.600	0,00%										Diskominfoti ksan	
15	2.16.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Japoran)	60	26.744.798	12	1.956.000	12	5.556.000	3	897.000	25,00%	16,14%	15	2.853.000	25,00%	10,67%	Diskominfoti ksan	
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dalam Kondisi Baik	95,00%	558.966.279	100%	92.550.000	90,00%	96.000.000	87,00%	31.000.000	16,67%	32,29%	23,33%	123.550.000	23,33%	22,10%	Diskominfoti ksan	
		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	60	290.181.059	12	51.500.000	12	52.500.000	3	12.000.000	25,00%	22,86%	15	63.500.000	25,00%	21,88%	Diskominfoti ksan	
17	2.16.01.2.09.02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	60	177.852.907	12	35.050.000	12	37.500.000	3	19.000.000	25,00%	50,67%	15	54.050.000	25,00%	30,39%	Diskominfoti ksan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kine	rja RPJMD pada Tahun 2026		ın Lalu (2023)		a dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KKPD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Cap dan Realisa RKP	si Anggaran D (%)	RKPD	inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi Ang s/d Tahu	nian Kinerja & ggaran RPJMD n 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		*100%)		(10= 6+8)		/5*100%)	(12)	(13)
18	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	K	90.932.313	12	8p 6.000.000	12	Rp 6.000.000	К	Rp	0,00%	0,00%	12	6.000.000	K 20,00%	Rp 6,60%	Diskominfoti ksan	
	2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	(unit) Persentase Peningkatan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik	85,00%	13.417.992.972	100%	2.284.811.676	80,00%	1.446.963.150	90,00%	207.092.780	15,00%	14,31%	21,25%	2.491.904.456	18,57%	18,57%	Diskominfoti ksan	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang Menerima Informasi Publik dari Saluran Resmi Pemerintahan Daerah	85,00%	13.417.992.972	100%	2.284.811.676	80,00%	1.446.963.150	90,00%	207.092.780	15,00%	14,31%	21,25%	2.491.904.456	2956,25%	18,57%	Diskominfoti ksan	
19	2.16.02.2.01.01 4	Relasi Media	Jumlah Aktifitas Relasi Media yang Memenuhi Kriteria (Laporan)	500	7.445.308.907	0	1.670.502.000	100	779.528.150	25	111.974.000	25,00%	14,36%	25	1.782.476.000	5,00%	23,94%	Diskominfoti ksan	
	2.16.02.2.01.01 9	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah Rekomendasi Komunikasi Terhadap Isu Publik yang berkembang dan Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	60	860.150.000	100,00%	170.900.314	1	287.400.000	0,00%	8.200.000	0,00%	2,85%	50,00%	179.100.314	20,00%	20,82%	Diskominfoti ksan	
	7		Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	500	309.867.265	100,00%	15.895.000	12	5.677.000	3	500.000	25,00%	8,81%	200,00%	16.395.000	80,00%	5,29%	Diskominfoti ksan	
22	2.16.02.2.01.02 1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik milik Pemerintah Daerah yang Dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria /juknis (media)	100,00%	3.019.594.232	100%	16.157.191	1	6.800.000			0,00%	0,00%	100,00%	16.157.191	25,00%	0,54%	Diskominfoti ksan	
23	3	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	100,00%	1.783.072.568	114	411.357.171	12	367.558.000	3	86.418.780	25,00%	23,51%	117	497.775.951	11700,00%	27,92%	Diskominfoti ksan	
	2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	85,00%		100%	-	80,00%	249.300.700	0,00%	8.450.000	13,16%	3,39%	21,33%	285.007.498	#DIV/0!	#DIV/0!	Diskominfoti ksan	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penyediaan Informasi Digital di Lingkup Pemerintah Daerah	82,50%	-	0%	-	82,50%	27.195.000	0,00%	-	0,00%	0,00%		-	0,00%		Diskominfoti ksan	
24	2.16.03.2.01.04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah danPengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				-	2	27.195.000			0,00%	0,00%		-			Diskominfoti ksan	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Pemerintah Secara Digital	80,00%	-	100%	-	80,00%	222.105.700	0,00%	8.450.000	13,16%	3,80%	21,33%	285.007.498	#DIV/0!	#DIV/0!	Diskominfoti ksan	
19	2.16.03.2.02.18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan					2	50.364.700			0,00%	0,00%					Diskominfoti ksan	
20	2.16.03.2.02.20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur danpeta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah					2	136.143.000	0	5.950.000	0,00%	4,37%					Diskominfoti ksan	
21	2.16.03.2.02.15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda					2	35.598.000	0	2.500.000	0,00%	7,02%					Diskominfoti ksan	
22	2.16.03.2.02.29	SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan					4	10.459.000	0		0,00%	0,00%					Diskominfoti ksan	
23	2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	5	181.039.750		34.962.850	23	41.147.900	10	18.660.107	43,48%	45,35%					Diskominfoti ksan	
		Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	60	109.135.521	12	263.810.770	12	144.006.500	3	89.795.593	25,00%	62,36%					Diskominfoti ksan	
25	2.16.03.2.02.25	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan /atau Portal Data Nasional	60	109.135.521	12	173.889.647	6	13.735.000			0,00%	0,00%	12	173.889.647	20,00%	159,33%	Diskominfoti ksan	
26	2.16.03.2.02.21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	25	395.000.000	5	78.125.250	2	10.983.000	1	5.130.000	50,00%	46,71%	6	83.255.250	24,00%	21,08%	Diskominfoti ksan	
27	2.16.03.2.02.30	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	5	355.020.000	1	27.862.601	2	784.000.000			0,00%	0,00%	1	27.862.601	20,00%	7,85%	Diskominfoti ksan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	ja RPJMD pada Tahun 2026		n Lalu (2023)		a dan Anggaran RKPD Ilan yang dievaluasi (2024)		apaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realisa RKP	aian Kinerja si Anggaran D (%)	RKPD s	inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi Ang s/d Tahu	nian Kinerja & ggaran RPJMD n 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		/*100%) -		(10= 6+8)		5*100%)	(12)	(13)
		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	Diskop ukm perdagangan	
	2.17 . 01 . 2.06	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95	0	75	5.681.919.887	92,5	2.420.031.400	92,5	320.723.414	100	13,25	75	6.002.643.301	78,9473684	0	Diskop ukm perdagangan	
9		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95	0	75	29.556.300	92,5	12.400.000	92,5	-	100	0,00	75	29.556.300	78,9473684		Diskop ukm perdagangan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	10	0	8	14.557.500	2	7.400.000	0	-	o	0	8	14.557.500	80	0	Diskop ukm perdagangan	
10		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60	0	36	14.998.800	12	5.000.000	0	-	0	0	36	14.998.800	60	0	Diskop ukm perdagangan	
11		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95	0	75	3.994.985.124	92,5	1.933.626.400,00	92,5	320.723.414,00	100	16,59	75	4.315.708.538,00	78,95		Diskop ukm perdagangan	
12		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60	0	36	3.976.992.624	12	1.926.626.400	4	320.723.414	33,3333333	16,65	36	4.297.716.038	60	0	Diskop ukm perdagangan	
13		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	60	0	48	7.500.000	12	2.500.000	0	-	o	0	48	7.500.000	80	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.17.01.2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	0	48	6.499.500	12	2.500.000	0	-	0	0	48	6.499.500	80	0	Diskop ukm perdagangan	
14		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	60	0	24	3.993.000	12	2.000.000	0	-	o	0	24	3.993.000	40	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.17 . 01 . 2.08	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95	0	75	41.752.000	92,5	10.000.000,00	92,5	0,00	100	0	75	41.752.000,00	78,9473684		Diskop ukm perdagangan	
15		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur	60	0	36	41.752.000	12	10.000.000	0	0	0	0	36	41.752.000	60	0	Diskop ukm perdagangan	
16		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95	0	75	890.949.982	92,5	215.005.000,00	92,5	0,00	100	0,00	75	890.949.982,00	78,9473684		Diskop ukm perdagangan	
17		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	60	0	36	6.228.000	12	2.000.000	0	-	o	0	36	6.228.000	60	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.17 . 01 . 2.09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Keikutsertaan pada Krui Fair	4	0	2	75.000.000	1	25.000.000	0	-	0	0	2	75.000.000	50	0	Diskop ukm perdagangan	
18		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan ATK, Barang Cetak dan Penggandaan	60	0	36	119.034.040	12	38.005.000	0	-	0	0,00	36	119.034.040	60	0	Diskop ukm perdagangan	
19		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60	0	36	56.900.000	12	34.000.000	0	-	0	0,00	36	56.900.000	60	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.17 . 03	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianyan Makan dan Minum Kantor	55	0	33	32.747.000	11	11.000.000	0	-	0	0	33	32.747.000	60	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.17 . 03 . 2.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi Ke Dalam dan Luar Daerah	60	0	36	601.040.942	12	105.000.000	0	-	0	0,00	36	601.040.942	60	0	Diskop ukm perdagangan	
20		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	95	0	75	5.800.000	92,5	16.000.000	92,5		100		75	5.800.000	78,9473684	0	Diskop ukm perdagangan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	rja RPJMD pada Tahun 2026		ın Lalu (2023)	Tahun berja	dan Anggaran RKPD lan yang dievaluasi (2024)	Anggaran Ri	apaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realisa RKP	aaian Kinerja asi Anggaran D (%)	RKPD :	inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi Ang s/d Tahu	iian Kinerja & garan RPJMD n 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		/*100%)		(10= 6+8)	(11=10) K	5*100%)	(12)	(13)
	2.17 . 05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	К	Rp 0	K 1	Rp 5.800.000	K 2	Rp 16.000.000	к	Rp -	к	Rp	K 1	Rp 5.800.000		Rp 0	Diskop ukm perdagangan	
	2.17 . 05 . 2.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95	0	75	292.689.386	92,5	71.500.000	92,5		100	0,00	75	292.689.386	78,95	0	Diskop ukm perdagangan	
21		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	60	0	36	54.061.386	12	12.000.000	0	-	o	0,00	36	54.061.386	60	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.17 . 07	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya biaya Sewa Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas	60	0	36	228.500.000	12	57.000.000	0	-	o	0,00	36	228.500.000	60	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.17 . 07 . 2.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya Kebersihan Kantor	60	0	36	10.128.000	12	2.500.000	0	-	o	0,00	36	10.128.000	60	0	Diskop ukm perdagangan	
22		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95	0	75	426.187.095	92,5	161.500.000,00	92,5	0,00	100	0,00	75	426.187.095,00	78,95	0	Diskop ukm perdagangan	
23		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	60	0	36	358.687.095	12	157.000.000	0	-	o	0,00	36	358.687.095	60	0	Diskop ukm perdagangan	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	60	0	36	67.500.000	12	4.500.000	0	-	0	0,00	36	67.500.000	60	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.18	Program Pengawasan dan Pemeriksaan	Persentase Koperasi Aktif	55	0	50	322.982.000	52,5	91.500.000	52,5	•	100	0,00	50	322.982.000	90,91	0	Diskop ukm	
1	2.18.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi Aktif	55	0	50	322.982.000	52,5	91.500.000	52,5	-	100	0,00	50	322.982.000	90,91	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.18.01.2.01	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya Koperasi Aktif	55	0	33	322.982.000	11	91.500.000	0	-	0	0,00	33	322.982.000	60,00	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.18.01.2.01.00 01	Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi Berkompeten	60	0	45	1.098.455.700	55	70.557.000	55	-	100	0,00	45	1.098.455.700	75	0	Diskop ukm perdagangan	
	06	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengurus Koperasi Berkompeten	60		45	1.098.455.700	55	70.557.000	55	-	100	0,00	45	1.098.455.700	75	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.18.01.2.02	Peningkatan Pemahaman dan	Terlaksananya Pelatihan Tentang	20	0	10	1.098.455.700	2	70.557.000	0	-	0	0,00	10	1.098.455.700	50	0	Diskop ukm	
	2.18.01.2.02.00 01	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	2,29	0	0,95	2.307.011.571	2,08	318.910.000	2,08	120.000.000	100	37,63	1,0	2.427.011.571	41,48	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.18.01.2.02.00 05	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	2,29	0	0,95	2.307.011.571	2,08	318.910.000	2,1	120.000.000	100	37,63	1,0	2.427.011.571	41,48	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.18.01.2.02.00 07	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tersedianya Hibah dan Bantuan Sosial	5	0	3	2.307.011.571	1	120.000.000	1	120.000.000	100	100,00	4	2.427.011.571	80	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.18.01.2.02.00 08	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Penyelenggaraan Pekan Festival UMKM	25	0	15	86.032.000	5	198.910.000	0	-	0	0,00	15	86.032.000	60	0	Diskop ukm perdagangan	
		Urusan Pemerintahan Bidang																	\vdash
1	2.18.01	Penanaman Modal Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Dokumen	100%	14.412.914.145	88,34%	2.163.922.263	100%	2.584.560.400	17,43%	450.360.638	17,43%	17%	105,77%	2.614.282.901	105,77%	18%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan	100%	66.327.101	98,81%	12.252.450	100%	12.400.000	0,00%	-	0,00%	0%	98,81%	12.252.450	98,81%	18%	DPMPTSP	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	10	39.582.302	2	7.317.500	2	7.400.000	0		0,00%	0%	2	7.317.500	20,00%	18%	DPMPTSP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	rja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d ın Lalu (2023)		a dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	RKP	si Anggaran D (%)	RKPD :	inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	s/d Tahur	garan RPJMD n 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		*100%)		(10= 6+8)		5*100%)	(12)	(13)
	2.18.01.2.01.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10	Rp 26.744.799	2 2	Rp 4.934.950	2 2	8p 5.000.000	О О	Rp -	0,00%	Rp 0%	2 2	Rp 4.934.950	K 20,00%	Rp 18%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.02	Kinerja SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketertiban admistrasi Keuangan	100%	10.068.414.084	84,17%	1.483.573.126	100%	2.090.060.400	16,64%	347.777.238	16,64%	17%	100,81%	1.831.350.364	100,81%	18%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.02.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	10.037.368.720	14	1.478.105.626	14	2.084.560.400	3	347.777.238	21%	17%	17	1.825.882.864	24,29%	18%	DPMPTSP	i
	2.18.01.2.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5	13.372.400	1	2.487.800	1	2.500.000	0	-	0,00%	0%	1	2.487.800	20,00%	19%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan	90	12.324.004	18	1.988.700	18	2.000.000	0	-	0,00%	0%	18	1.988.700	20,00%	16%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.02.00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	5.348.961	5	991.000	1	1.000.000	0	-	0,00%	0%	5	991.000	100,00%	19%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terciptanya peningkatan SDM yang Berdaya saing	100%	125.000.000	99,00%	99.000.000	100%	15.000.000	0,00%	-	0,00%	0%	99,00%	99.000.000	99,00%	79%	DPMPTSP	1
	2.18.01.2.05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	10	125.000.000	10	99.000.000	5	15.000.000	0	-	0,00%	0%	10	99.000.000	100,00%	79%	DPMPTSP	1
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perangkat daerah	100%	3.008.490.247	99,69%	419.776.437	100%	319.400.000	17,40%	55.583.400	17%	17%	117,09%	475.359.837	117,09%	16%		
	2.18.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	133.723.991	1	24.700.000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	24.700.000	20,00%	18%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	344.708.354	12	30.325.500	12	26.400.000	0	-	0%	0%	12	30.325.500	20,00%	9%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU yang Disediakan	50	64.187.516	10	12.000.000	10	12.000.000	0	-	0,00%	0%	10	12.000.000	20,00%	19%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55	58.838.557	11	11.000.000	11	11.000.000	0	-	0%	0%	11	11.000.000	20,00%	19%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	2.407.031.828	12	341.750.937	12	270.000.000	3	55.583.400	25,00%	21%	15	397.334.337	25,00%	17%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	100%	53.489.597	89,90%	17.800.000	100%	-	0,00%	-	0,00%	0%	89,90%	17.800.000	89,90%	33%		
	2.18.01.2.07.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan	5	53.489.597	2	17.800.000	0	-	0	-	0,00%	0%	2	17.800.000	40,00%	33%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Pendukung	100%	588.658.357	99%	57.250.000	100%	72.000.000	56%	40.500.000	56%	56%	155,25%	97.750.000	155,25%	17%		
	2.18.01.2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	572.338.680	2	57.000.000	2	72.000.000	1	40.500.000	50,00%	56%	3	97.500.000	20,00%	17%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	16.319.677	2	250.000	0	-	0	-	0%	0%	2	250.000	3,33%	2%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100%	342.065.969	98,00%	74.270.250	100%	75.700.000	9%	6.500.000	8,59%	9%	106,59%	80.770.250	106,59%	24%		
	2.18.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60	330.833.153	24	72.425.000	12	73.100.000	3	6.500.000	25,00%	9%	27	78.925.000	45,00%	24%	DPMPTSP	
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	11.232.816	4	1.845.250	4	2.600.000	0	-	0,00%	0%	4	1.845.250	20,00%	16%	DPMPTSP	
	2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA	30%	3.814.576.076	98,00%	1.471.976.300	100%	1.499.742.000	0%	-	0,00%	0%	98,00%	1.471.976.300	323,97%	39%		\blacksquare
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Presentase Nilai Investasi	50%	3.814.576.076	98,00%	1.471.976.300	100%	125.485.000	0%	-	0,00%	0%	98,00%	1.471.976.300	196,00%	39%		
	2.18.03.2.01.00 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	10	3.814.576.076	2	1.471.976.300	2	125.485.000	0	-	0,00%	0%	2	1.471.976.300	20,00%	39%	DPMPTSP	
	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN	85%	1.045.534.510	98,00%	1.031.073.575	100%	175.000.000	15%	27.096.000	15,48%	15%	113,48%	1.058.169.575	133,59%	101%		
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Izin yang Diterbitkan	6.105	1.045.534.510	98,00%	1.031.073.575	100%	175.000.000	15%	27.096.000	15,48%	15%	113,48%	1.058.169.575	0,02%	101%		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	ja RPJMD pada Tahun 2026		n Lalu (2023)	Tahun berja	a dan Anggaran RKPD Ilan yang dievaluasi (2024)	Anggaran Ri	Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capa dan Realisa RKPD	si Anggaran D (%)	RKPD :	inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	s/d Tahur	garan RPJMD n 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9= 8/7			(10= 6+8)	(11=10/		(12)	(13)
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasi Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	3000	Rp 655.240.457	К 4486	Rp 961.555.550	600	130.000.000	- К 476	23.926.000	79,33%	Rp 18%	K 4962	985.481.550	165,40%	Rp 150%	DPMPTSP	
	2.18.04.2.01.00 07	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50	390.294.053	5	69.518.025	10	45.000.000	2	3.170.000	0,2	7%	7	72.688.025	14,00%	19%	DPMPTSP	
	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rasio Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Ketentuan Perizinan	80%	3.529.074.244	84,68%	435.157.500	100%	74.515.000	9,77%	7.281.000	9,77%	10%	94,45%	442.438.500	118,06%	13%		
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan	15	3.529.074.244	84,68%	435.157.500	100%	74.515.000	9,77%	7.281.000	9,77%	10%	94,45%	442.438.500	6,30%	13%	DPMPTSP	
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	60	925.357.921	6	65.021.950	0	-	0	-	0,00%	0%	6	65.021.950	10,00%	7%	DPMPTSP	
	2.18.05.2.01.00 05	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	945	1.637.560.006	400	248.536.000	0		0	-	0,00%	0%	400	248.536.000	42,33%	15%	DPMPTSP	
	2.18.05.2.01.00 06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	60	966.156.317	40	121.599.550	12	74.515.000	7	7.281.000	58,33%	10%	47	128.880.550	78,33%	13%	DPMPTSP	
	2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data Laporan Perizinan dan Non Perizinan	5	1.604.711.994	94,93%	118.659.500	100%	125.000.000	13,02%	16.272.000	13,02%	13%	107,95%	134.931.500	21,59%	8%		
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	5	1.604.711.994	94,93%	118.659.500	100%	125.000.000	13,02%	16.272.000	13,02%	13%	107,95%	134.931.500	21,59%	8%		
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Pata dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5	1.604.711.994	5	118.659.500	1	125.000.000	0	16.272.000	0,00%	13%	5	134.931.500	100,00%	8%	DPMPTSP	
	Urusan Pemmer	rintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga	L																
		Program Penunjang Urusan Pemerintah I	Cakupan pemenuhan kebutuhan																
1			penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	21.402.978.270	100%	4.443.728.018	90%	4.913.555.311	90%	912.174.078	19%	19%		5.355.902.096		25%	Dispora	
		Perencanaan, Penganggaran dan evaluas		95%	32.000.000	100%	6.400.000,00	100%	6.400.000,00	100%	-	0%	0%		6.400.000			Dispora	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pera Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi		19	7.000.000 25.000.000	4	1.400.000,00 5.000.000,00	4	1.400.000 5.000.000	0	-	0% 0%	0%		1.400.000 5.000.000		20%	Dispora Dispora	
H		Administrasi Keuangan Perangkat	Solution mar die D	24	23.000.000	*	5.500.000,00	4	5.000.000			070	3/6		5.000.000		20/0		
	2.13.2.13.01.01.			85%	9.168.301.000	100%		90%	1.983.707.761,00	60%		67%	20%		1.881.813.258			Dispora	
6	2.13.2.13.01.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunj	65	9.082.580.000	8	1.469.692.468,00	13	1.960.783.761	3	389.397.490,00	23%	20%		1.859.089.958		20%	Dispora	
7	2.13.2.13.01.01.	Penyediaan administrasi pelaksanaan Itugas asn	Jumlah alat tulis kantor	72	57.221.000	12	17.223.300,00	13	17.424.000	0	_	0%	0%		17.223.300		30%	Dispora	
8		Koordinasi dan penyusunan laporan keua	Jumlah laporan SKPD	5	12.500.000	1	2.500.000,00	1	2.500.000		-	0%	0%		2.500.000		20%	Dispora	
9	2.13.2.13.01.01.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keua		12	10.000.000	2	2.000.000,00	2	2.000.000		-	0%	0%		2.000.000		20%	Dispora	
10	2 12 2 12 01 01	Penyusunan Peloporan dan Analisis Progr	Jumlah laporan analis prognosis realisasi	-	6.000.000		1.000.000,00	4	1.000.000			0%	00/		1.000.000		17%	Dienora	
10		Administrasi Kepegawaian Perangkat Da		100%	50.000.000	0%		100%	50.000.000	100%	-	100%	0%		1.000.000			Dispora Dispora	
		- o-	Persentase Jumlah aparatur SDM yang mengikuti			0,0		23070		230%		25070	0,0				0,0		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdas	Diklat/Bimtek/Kursus/Pelatihan	5	50.000.000		49.830.000,00	1	50.000.000	0	-	0%	0%		49.830.000		100%	Dispora	
		Administrasi umum Perangkat Daerah	Lumbe harman listella	90%	1.059.924.000 25.020.000	100%	472.151.650,00	80%	472.698.600	80%	110.504.700,00	100%	23%		582.656.350 5.004.000		20%	Dispora	
14	2.13.2.13.01.01. 2.13.2.13.01.01	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah komponen listrik Jumlah aktifitas	10	25.020.000 75.000.000	1	5.004.000,00 25.000.000,00	1	5.004.000 25.000.000	0		0% 0%	0% 0%		5.004.000		20%	Dispora Dispora	
13		i cirjeawan banan logistik kantol	Junium untilitas	10	73.000.000	1	23.000.000,00	1	23.000.000	U		070	0/0		1			D.Spora	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	ja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d n Lalu (2023)	Tahun berja	a dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)	Anggaran Ri	Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Cap dan Realisa RKPI			inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi Ar	paian Kinerja & nggaran RPJMD un 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(2)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9= 8/7	*100%)	((10= 6+8)	(11=10	0/5*100%)		(12)
(1)	(2)	(3)	(4)	К	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	(12)	(13)
16	2.13.2.13.01.01	. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan I	Jumlah peralatan kantor	72	61.000.000	-	60.550.000,00	8	61.000.000	0	-	0%	0%		60.550.000		99%	Dispora	
		. Penyediaan Barang cetakan dan Penggani		72	72.255.000	12	32.393.800,00	12	32.418.800	3	5.920.000,00	25%	18%		38.313.800		53%	Dispora	
17	2.13.2.13.01.01	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan		60	60.000.000	12	12.000.000,00	12	12.000.000	0	-	0%	0%		12.000.000		20%	Dispora	
			Jumlah layanan jasa penyediaan makan																
		. Fasilitas kunjungan tamu	dan minum	120	55.000.000	12	24.000.000,00	12	24.000.000	3	8.000.000,00	25%	33%		32.000.000		58%	Dispora	
		. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan ko		72	783.904.000	12	345.597.650,00	12	345.694.600	3	102.504.700,00	25%	30%		448.102.350		57%	Dispora	
		. Penyediaan jasa penunjang urusan peme		100%	591.740.000	100%	72.748.000,00	90%	76.748.000	60%	29.000.000,00	38%	38%		101.748.000		17%	Dispora	igspace
22	2.13.2.13.01.01	. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya	Jumlah pembayaran tagihan	72	78.000.000	12	-	14	4.000.000	0	-	0%	0%		-		0%	Dispora	igspace
23	2.13.2.13.01.01	Penyediaan jasa peralatan dan perlengka	Jumlah bangunan dan kendaraan dinas	72	485.000.000	12	67.000.000	12	67.000.000	3	29.000.000	25%	43%		96.000.000		20%	Dispora	+
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		72	28.740.000	12	5.748.000	12	5.748.000	0		0%	0%		5.748.000			Dispora	+
		. Pemeliharaan barang milik daerah penun		95%	432.610.000	100%		90%	112.100.000	60%		26%	26%		135.750.000			Dispora	+
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pem		72	273.500.000	12	59.250.000	12	61.600.000	3	27.000.000	25%	44%		86.250.000			Dispora	+
		. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pem		72		-		12	3.500.000	0		0%	0%		-			Dispora	igspace
	2.13.2.13.01.01	, and a second s		72	93.360.000	12	27.000.000	12	27.000.000	3	2.500.000	25%	9%		29.500.000		32%		+
		Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantol		72	25.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	0	-	0%	0%		10.000.000		40%	Dispora	+
31	2.13.2.13.01.01	. Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan pr	Jumlah sarana dan prasarana kantor	72	30.000.000		10.000.000	12	10.000.000	0		0%	0%		10.000.000		33%	Dispora	+
			Cakupan pemenuhan pengembangan																
			kapasitas daya saing kepemudaan (
33		Program Pengembangan Kapasitas Daya		60%	4.224.500.000		649.902.950,00	50%	651.396.950	50%	130.565.000,00				780.467.950		-	Dispora	+
35	2.13.2.13.01.01	. Penyadaraan, pemberdayaan dan penger	mbangan pemuda dan kepemudaan terha	60%	4.224.500.000	100%		50%	296.396.950	50%		0%	35%		-			Dispora	Kendala
36	2.13.2.13.01.01	. Koordinasi,sikronisasi dan penyelenggara.	Jumlah pemuda pelopor	15	316.900.000	12	166.997.150	14	167.498.550	6	58.100.000	43%	35%		225.097.150		71%	Dispora	karena kualitas pendidik an dan pengetah uan masih rendah Kendalan kurangny a dukunga n dari lingkunga n dan pemerint ah setempat dalam meningk
37	2.13.2.13.01.01	. Koordinasi,sinkronisasi dan penyelenggan	Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	12	282.600.000	12	127.905.800	20	128.898.400	5	20.000.000	25%	16%		147.905.800		52%	Dispora	kegiatan kewiraus ahaan
38	2.13.2.13.01.01	. Peningkatan Kepemimpinan , kepolopora		28	3.625.000.000	8	-			16	-	#DIV/0!	#DIV/0!		-		0%	Dispora	Tidak ada faktor pengham bat
			Jumlah pemuda kader yang dikirim ke																
		. Koordinasi,sinkronisasi dan penyelenggan		20	350.000.000	0	174.533.350	20	174.809.450	8	52.465.000	40%	30%		226.998.350			Dispora	
40	2.13.2.13.01.01	. Pemberdayaan dan pengembangan orgar	nisasi kepemudaan tingkat daerah kab / k	60%	1.242.700.000	100%		50%	355.000.000	50%		100%	0%					Dispora	
41	2.13.2.13.01.01	Peningkatan kapasitas pemuda dan organ		30	1.242.700.000	12	355.000.000	16	355.000.000	0	-	0%	0%		355.000.000		29%	Dispora	
44		Program Pengembangan Kapasitas Daya Pembinaan dan pengembangan olahraga		60% 60 %	4.601.203.270 745.000.000	100%	1.408.776.300,00	45% 100%	1.560.504.000 90.000.000	45% 100%	223.206.888,00	100%	0%		1.631.983.188			Dispora Dispora	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	rja RPJMD pada Tahun 2026		n Lalu (2023)	Target Kinerj Tahun berji	a dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KKPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realisa RKP	paian Kinerja asi Anggaran D (%)	RKPD s	inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi Ang s/d Tahu	aian Kinerja & ggaran RPJMD n 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		7*100%)		(10= 6+8)		/5*100%)	(12)	(13)
	<u> </u>			К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp		Faktor pengham bat minimny a jumlah sarana
48	2.13.2.13.01.01.	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	60	745.000.000	12	89.310.000	20	90.000.000	20	80.172.800	100%	89%		169.482.800		23%	Dispora	dan prasaran a olahraga di setiap kecamata n
51	2.13.2.13.01.01.	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tin	gkat daerah kab / kota	40%	822.856.900	100%		100%	105.000.000	100%		100%	0%		-			Dispora	
52	2132130101	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga mul	Persentase penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan olahraga skala kabupaten yang di fasilitasi pemerintah daarah	10	822.856.900	4	104.913.250	10	105.000.000	2	16.110.000	20%	15%		121.023.250		15%	Dispora	Faktor pengham bat di sebabkan tidak semua cabor olahraga dapat mengikut i perlomba an event kejuaraa n olahraga yang di selenggar akan oleh pemda
54	2.13.2.13.01.01.	Pembinaan dan Pengembangan olahraga	prestasi tingkat daerah provinsi	80%	776.429.770	100%	104.515.250	100%	352.000.000	100%		100%			121.023.230		13/0	Dispora	penida
			Persentase olahragawan andalan yang di																Faktor Pengham bat kurangny a pengharg aan terhadap atlit yg berpresta
		Pembinaan dan pengembangan atlet ber		60%	776.429.770 1.805.000.000	12	351.831.050	14 100%	352.000.000 845.000.000	5 100%	115.000.000	36% 0%	33%		466.831.050		60%	Dispora	si
58	2.13.2.13.01.01.	Pembinaan dan pengembangan organisa Pengembangan organisasi keolahragaan Pembinaan dan Pengembangan olahraga	Jumlah organisasi keolahragaan yang difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi keolahragaan	20	1.805.000.000	100% 12 100%	695.000.000	100% 15 100%	845.000.000	0	-	0% 0%	0%		695.000.000		39%	Dispora Dispora Dispora	
				30%						130%									
61	z.13.2.13.01.01.	Penyelenggaraan, pengembangan dan pe	jumian perlombaan olahraga massal	6	451.916.600	12	167.722.000	12	168.504.000] 3	11.924.088	25%	7%	1	179.646.088	1	40%	Dispora	1
	2.20.02	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik (dokumen)	10	308.234.965	1	39.787.704	1	41.045.000		5.341.500	0,00%	13,01%	0,2	45.129.204	2,00%	14,64%	Diskominfoti ksan	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Data Statistik Sektoral ((dokumen)	10	308.234.965	1	39.787.704	1	41.045.000		5.341.500	0,00%	13,01%	0,2	45.129.204	2,00%	14,64%	Diskominfoti ksan	
28	2.20.02.2.01.11	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari pembina sata statistik	5	308.234.965	1	39.787.704	1	41.045.000	0	5.341.500	0,00%	13,01%	1	45.129.204	20,00%	14,64%	Diskominfoti ksan	
							<u>-</u>								<u>-</u>				
		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian																	
	2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik (persen)	100,00%	743.418.036	100,00%	172.156.114	100,00%	108.168.000		10.540.500	17,63%	9,74%	67,63%	182.696.614	67,63%	24,58%	Diskominfoti ksan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kine	rja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d ın Lalu (2023)		a dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realisa RKP	paian Kinerja asi Anggaran D (%)		inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	s/d Tahun	garan RPJMD 1 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		7*100%)		(10= 6+8)	(11=10/		(12)	(13)
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah	Persentase Layanan Keamanan Informasi Daerah	100,00%	Rp 347.500.000	100,00%	Rp 69.868.742	100,00%	Rp 38.460.000	К	Rp 1.500.000	K 10,26%	Rp 3,90%	110,26%	71.368.742	110,26%	Rp 20,54%	Diskominfoti ksan	
29	2.21.02.2.01.04	Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	(persen) Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	39	347.500.000	39	69.868.742	39	38.460.000	4	1.500.000	10,26%	3,90%	43	71.368.742	110,26%	20,54%	Diskominfoti ksan	
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100,00%	395.918.036	100,00%	102.287.372	100,00%	69.708.000		9.040.500	25,00%	12,97%	25,00%	111.327.872	25,00%	28,12%	Diskominfoti ksan	
30	2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	60	395.918.036	12	102.287.372	12	69.708.000	3	9.040.500	25,00%	12,97%	15	111.327.872	25,00%	28,12%	Diskominfoti ksan	
-	2.22	Bidang Urusan Kebudayaan PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase penduduk usia 10 tahun	30%	583.374.437	25%	344.690.835	27%	600.000.000	25%		25%	0%	25	344.690.835	8333%	59%		-
		KEBUDAYAAN	keatas yang terlibat pertunjukan seni										***					Disdik	
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten kota	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	81%	583.374.437	79,59%	344.690.835	80,00%	600.000.000	79,59%	-	79,59%	0%	1,5918	344.690.835	79,59%	59%	Disdik	
		C Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	50 Kali	483.374.437	4 Kali	344.690.835	4 Kali	500.000.000	Kali	-	0%	0%	4	344.690.835	8%	71%	Disdik	
	2.22.02.2.02.00	C Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	###########	100.000.000	*************		************	100.000.000	***********	-	0%	0%	16	-	100%	0%	Disdik	
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Direvitalisasi dan Invetarisasi	20,00%	483.374.437	4,55%	117.692.590	9,09%	100.000.000	4,55%	-	4,55%	0%	4,55%	117.692.590	22,73%	24%	Disdik	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten /Kota	Jumlah Objek Budaya Terdaftar	5 Objek	483.374.437	1,0 Objek	117.692.590	1 Objek	100.000.000	Objek	-	0%	0%	1	117.692.590	20%	24%	Disdik	
	2.22.05.2.01.00	C Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	5 Objek	483.374.437	1,0 Objek	117.692.590	1 Obyek	100.000.000	Obyek	-	0%	0%	1	117.692.590	20%	24%	Disdik	
96	4	URUSAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PEMBINAAN	Jumlah Perpustakaan Daerah yang	4000/	240 452 554	4000/	0.555.000.00	4000/	445 000 000		22 057 000 00		450/	4000/	22 522 222	#P#//61	400/	Sekretariat	
96	04:01:02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan Daerah yang dikelola (Lokasi)	100%	340.152.661	100%	9.666.000,00	100%	145.000.000	0%	23.867.000,00	0%	15%	100%	33.533.000	#DIV/0!	10%	Daerah	
96 97	04:01:02 4.01.02.2.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	dikelola (Lokasi)	100%	340.152.661 340.152.661	100%	9.666.000,00 4.872.000,00	100%	145.000.000 40.000.000	0%	23.867.000,00 12.029.000,00	0%	15% 30%	100%	33.533.000 16.901.000	#DIV/0!	10%		
96 97 98		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota Pembinaan Perpustakaan pada Satuan	dikelola (Lokasi) Terlaksanannya Pembinaan						1									Daerah Sekretariat Daerah	
96 97 98	4.01.02.2.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	dikelola (Lokasi) Terlaksanannya Pembinaan Perpustakaan pada Statuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar						1									Daerah Sekretariat	
96 97 98	4.01.02.2.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Harga Nasional Perpustakaan	dikelola (Lokasi) Terlaksanannya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Harga Nasional Perpustakaan Terlaksananya Pengelolaan dan		340.152.661	100%	4.872.000,00	100%	40.000.000	0%	12.029.000,00	0%	30%	100%	16.901.000	20%	5%	Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat	
96 97 98 99	4.01.02.2.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Harga Nasional Perpustakaan	dikelola (Lokasi) Terlaksanannya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Harga Nasional Perpustakaan Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahn Pustaka		340.152.661 81.090.380	100% 1 kegiatan 1 kegiatan	4.872.000,00 0,00 4.872.000,00	1,00	40.000.000 18.000.000 22.000.000	0 kegiatan 0 kegiatan	12.029.000,00 5.986.000,00 6.043.000,00	0%	30% 33%	100% 2 kegiatan 2 kegiatan	16.901.000 5.986.000 10.915.000	20%	5% 7%	Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat	
96 97 98 99 100	4.01.02.2.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Harga Nasional Perpustakaan Pengelolaan dan Pengembangan Bahn Pustaka Pembudayaan Gemar Membaca	dikelola (Lokasi) Terlaksanannya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Harga Nasional Perpustakaan Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahn Pustaka		340.152.661 81.090.380 259.062.281	100% 1 kegiatan 1 kegiatan 100%	4.872.000,00 0,00 4.872.000,00 4.794.000,00	1,00 1,00 1,00	40.000.000 18.000.000 22.000.000	0% 0 kegiatan 0 kegiatan	12.029.000,00 5.986.000,00 6.043.000,00 11.838.000,00	0% 0% 0%	30% 33% 27% 0%	100% 2 kegiatan 2 kegiatan 100%	16.901.000 5.986.000 10.915.000 16.632.000	20% 20% 20% 20%	5% 7% 4% 100%	Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Harga Nasional Perpustakaan	dikelola (Lokasi) Terlaksanannya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Harga Nasional Perusukaan Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahn Pustaka Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca		340.152.661 81.090.380	100% 1 kegiatan 1 kegiatan	4.872.000,00 0,00 4.872.000,00	1,00	40.000.000 18.000.000 22.000.000	0 kegiatan 0 kegiatan	12.029.000,00 5.986.000,00 6.043.000,00	0%	30% 33% 27%	100% 2 kegiatan 2 kegiatan	16.901.000 5.986.000 10.915.000	20%	5% 7% 4%	Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/kota sesuai dengan Standar Harga Nasional Perpustakaan Pengelolaan dan Pengembangan Bahn Pustaka Pembudayaan Gemar Membaca Pengembangan dan Literasi Berbasis Inklusi Sosisal	dikelola (Lokasi) Terlaksanannya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Harga Nasioani Perpustakaan Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahn Pustaka Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca terlaksananya Pengembangan dan		340.152.661 81.090.380 259.062.281	100% 1 kegiatan 1 kegiatan 100%	4.872.000,00 0,00 4.872.000,00 4.794.000,00	1,00 1,00 1,00	40.000.000 18.000.000 22.000.000	0% 0 kegiatan 0 kegiatan	12.029.000,00 5.986.000,00 6.043.000,00 11.838.000,00	0% 0% 0%	30% 33% 27% 0%	100% 2 kegiatan 2 kegiatan 100%	16.901.000 5.986.000 10.915.000 16.632.000	20% 20% 20% 20%	5% 7% 4% 100%	Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat	
	4.01.02.2.01.04 '4.01.02.1.09 '4.01.24.2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PERPUSTAKAAN Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Harga Nasional Perpustakaan Pengelolaan dan Pengembangan Bahn Pustaka Pembudayaan Gemar Membaca Pengembangan dan Literasi Berbasis Inklusi Sosisal URUSAN KEARSIPAN PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	dikelola (Lokasi) Terlaksanannya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Harga Nasional Perpustakaan Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahn Pustaka Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Literasi Berbasis Inklusi Sosisal Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (Persen)		340.152.661 81.090.380 259.062.281	100% 1 kegiatan 1 kegiatan 100%	4.872.000,00 0,00 4.872.000,00 4.794.000,00	1,00 1,00 1,00	40.000.000 18.000.000 22.000.000	0% 0 kegiatan 0 kegiatan	12.029.000,00 5.986.000,00 6.043.000,00 11.838.000,00	0% 0% 0% 0% 0%	30% 33% 27% 0% 11%	100% 2 kegiatan 2 kegiatan 100%	16.901.000 5.986.000 10.915.000 16.632.000 3.431.700	20% 20% 20% 20% 40%	5% 7% 4% 100% 19%	Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.01.04 '4.01.02.2.01.04	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Harga Nasional Perpustakaan Pengelolaan dan Pengembangan Bahn Pustaka Pembudayaan Gemar Membaca Pengembangan dan Literasi Berbasis inklusi Sosisal URUSAN KEARSIPAN PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	dikelola (Lokasi) Terlaksanannya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Harga Nasional Perpustakaan Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahn Pustaka Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca terlaksananya Pembudayaan dan Literasi Berbasis Inklusi Sosisal Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (Persen) Terlaksananya Pengelolaan Arsip	2 2 5 5 2	340.152.661 81.090.380 259.062.281 87.732.700	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100%	4.872.000,00 0,00 4.872.000,00 4.794.000,00	1,00% 1,000 1,000 1,000	40.000.000 18.000.000 22.000.000 105.000.000	0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0%	12.029.000,00 5.986.000,00 6.043.000,00 11.838.000,00	0% 0% 0% 0%	30% 33% 27% 0% 11%	100% 2 kegiatan 2 kegiatan 100% 2 kegiatan	16.901.000 5.986.000 10.915.000 16.632.000	20% 20% 20% 20% 40%	5% 7% 4% 100% 19%	Daerah Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.01.04 '4.01.02.1.09 '4.01.24.2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/kota sesuai dengan Standar Harga Nasional Perpustakaan Pengelolaan dan Pengembangan Bahn Pustaka Pembudayaan Gemar Membaca Pengembangan dan Literasi Berbasis Inklusi Sosisal URUSAN KERSIPAN PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	dikelola (Lokasi) Terlaksanannya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Harga Nasional Perpustakaan Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahn Pustaka Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Literasi Berbasis Inklusi Sosisal Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (Persen)	2 2 5 100%	340.152.661 81.090.380 259.062.281 87.732.700 69.344.013	100% 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan	4.872.000,00 0,00 4.872.000,00 4.794.000,00 3.431.700,00	1,00% 1,000 1,000 1,000	40.000.000 18.000.000 22.000.000 105.000.000 48.938.000	0% 0 kegiatan 0 kegiatan 0% 0 kegiatan	12.029.000,00 5.986.000,00 6.043.000,00 11.838.000,00 0,00	0% 0% 0% 0% 0%	30% 33% 27% 0% 11%	100% 2 kegiatan 2 kegiatan 100% 2 kegiatan 50%	16.901.000 5.986.000 10.915.000 16.632.000 3.431.700	20% 20% 20% 20% 40%	5% 7% 4% 100% 19%	Daerah Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.02 '4.01.02.2.01.04 '4.01.02.1.09 4.01.24.2 4.01.24.2.24	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/kota sesuai dengan Standar Harga Nasional Perpustakaan Pengelolaan dan Pengembangan Bahn Pustaka Pembudayaan Gemar Membaca Pengembangan dan Literasi Berbasis Inklusi Sosisal URUSAN KEARSIPAN PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip	dikelola (Lokasi) Terlaksanannya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Harga Nasioan Perpustakaan Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahn Pustaka Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca terlaksananya Pengembangan dan Literasi Berbasis Inklusi Sosisal Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (Persen) Terlaksananya Pengelolaan Arsip	2 2 5 5 2 100%	340.152.661 81.090.380 259.062.281 87.732.700 69.344.013 46.229.342	100% 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 100% 1 kegiatan	4.872.000,00 0,00 4.872.000,00 4.794.000,00 3.431.700,00	1,00% 1,000 1,000 1,000 1,000 100%	40.000.000 18.000.000 22.000.000 105.000.000 48.938.000 33.856.000	0% 0 kegiatan 0 kegiatan 0% 13%	12.029.000,00 5.986.000,00 6.043.000,00 11.838.000,00 0,00	0% 0% 0% 0% 0% 13%	30% 33% 27% 0% 11% 0%	100% 2 kegiatan 2 kegiatan 100% 2 kegiatan 50%	16.901.000 5.986.000 10.915.000 16.632.000 16.632.000 3.431.700	20% 20% 20% 20% 40% 40%	5% 7% 4% 100% 19% 5% 7%	Daerah Sekretariat	
	4.01.02.2.01.04 '4.01.02.2.01.04 '4.01.02.1.09 4.01.24.2 4.01.24.2.24 4.01.24.2.24	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/kota sesuai dengan Standar Harga Nasional Perpustakaan Pengelolaan dan Pengembangan Bahn Pustaka Pembudayaan Gemar Membaca Pengembangan dan Literasi Berbasis Inklusi Sosisal URUSAN KEARSIPAN PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Pengeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat	dikelola (Lokasi) Terlaksanannya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Harga Nasional Perpustakaan Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahn Pustaka Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca terlaksanannya Pengembangan dan Literasi Berbasis Inklusi Sosisal Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (Persen) Terlaksananya Pengelolaan Arsip Terlaksananya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Terlaksananya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	100% 2 2 5 2 100% 100%	340.152.661 81.090.380 259.062.281 87.732.700 69.344.013 46.229.342 23.114.671	100% 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 100% 1 kegiatan	4.872.000,00 0,00 4.872.000,00 4.794.000,00 3.431.700,00 3.431.700,00	1,00% 1,000 1,000 1,000 1,000 100%	40.000.000 18.000.000 22.000.000 105.000.000 48.938.000 33.856.000 8.387.000	0% 0 kegiatan 0 kegiatan 0% 0 kegiatan 13% 13%	12.029.000,00 5.986.000,00 6.043.000,00 11.838.000,00 0,00 0,00	0% 0% 0% 0% 0% 13% 13%	30% 33% 27% 0% 11% 0% 0%	100% 2 kegiatan 100% 2 kegiatan 100% 2 kegiatan 100% 2 kegiatan 100%	16.901.000 5.986.000 10.915.000 16.632.000 16.632.000 3.431.700 3.431.700	20% 20% 20% 20% 40% 40% 40%	5% 7% 4% 100% 19% 5% 7%	Daerah Sekretariat Sekretariat Sekretariat Daerah Sekretariat Sekretariat Sekretariat	
	4.01.02.2.02 '4.01.02.2.01.04 '4.01.02.1.09 4.01.24.2 4.01.24.2.24.01 4.01.24.2.24.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/kota sesuai dengan Standar Harga Nasional Perpustakaan Pengelolaan dan Pengembangan Bahn Pustaka Pembudayaan Gemar Membaca Pengembangan dan Literasi Berbasis Inklusi Sosisal URUSAN KEARSIPAN PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Peneliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota	dikelola (Lokasi) Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Harga Nasional Perpustakaan Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahn Pustaka Terlaksananya Pengembangan dan Literasi Berbasis Inklusi Sosisal Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (Persen) Terlaksananya Pengelolaan Arsip Terlaksananya Pengelolaan Arsip Terlaksananya Pengelolaan Arsip Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota	100% 2 5 100% 100% 24	340.152.661 81.090.380 259.062.281 87.732.700 69.344.013 46.229.342 23.114.671 23.114.671	100% 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 100% 12,00	4.872.000,00 0,00 4.872.000,00 4.794.000,00 3.431.700,00 3.431.700,00 0,00	1,00% 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 12,000	40.000.000 18.000.000 22.000.000 105.000.000 48.938.000 33.856.000 8.387.000 10.387.000	0% 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 13% 13% 0,000	12.029.000,00 5.986.000,00 6.043.000,00 11.838.000,00 0,00 0,00 0,00	0% 0% 0% 0% 0% 13% 13% 0% 25%	30% 33% 27% 0% 11% 0% 0% 0%	100% 2 kegiatan 100% 2 kegiatan 100% 2 kegiatan 100% 2 kegiatan 100%	16.901.000 5.986.000 10.915.000 16.632.000 16.632.000 3.431.700 3.431.700	20% 20% 20% 20% 40% 40% 40%	5% 7% 4% 100% 19% 5% 7%	Daerah Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.02 '4.01.02.2.01.04 '4.01.02.1.09 4.01.24.2 4.01.24.2.24.01 4.01.24.2.24.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/kota sesuai dengan Standar Harga Nasional Perpustakaan Pengelolaan dan Pengembangan Bahn Pustaka Pembudayaan Gemar Membaca Pengembangan dan Literasi Berbasis Inklusi Sosisal URUSAN KEARSIPAN PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/kota Pengelolan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah	dikelola (Lokasi) Terlaksanannya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Harga Nasional Perpustakaan Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahn Pustaka Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca terlaksanannya Pengembangan dan Literasi Berbasis inklusi Sosisal Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (Persen) Terlaksananya Pengelolaan Arsip Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota	100% 2 2 5 100% 100% 24 24	340.152.661 81.090.380 259.062.281 87.732.700 69.344.013 46.229.342 23.114.671 23.114.671	100% 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 100% 12,00 12,00	4.872.000,00 0,00 4.872.000,00 4.794.000,00 3.431.700,00 3.431.700,00 0,00	1,00% 1,000 1,000 1,000 1000% 12,000 12,000 12,000	40.000.000 18.000.000 22.000.000 105.000.000 48.938.000 33.856.000 8.387.000 10.387.000	0% 0 kegiatan 0 kegiatan 13% 13% 0,000 3,000	12.029.000,00 5.986.000,00 6.043.000,00 11.838.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0% 0% 0% 0% 0% 13% 13% 0% 25%	30% 33% 27% 0% 11% 0% 0% 0%	100% 2 kegiatan 2 kegiatan 100% 2 kegiatan 50% 24,00	16.901.000 5.986.000 10.915.000 16.632.000 3.431.700 3.431.700 0	20% 20% 20% 40% 40% 40%	5% 7% 4% 100% 19% 5% 7% 0%	Daerah Sekretariat	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kine	erja RPJMD pada Tahu 2026			Cinerja RKPD s/d u (2023)			n Anggaran RKPD yang dievaluasi 24)			n Kinerja dan ang Dievaluasi 4)	dan Realis	paian Kinerja asi Anggaran PD (%)			dan Anggaran nun 2024	Tingkat Capa Realisasi Ang s/d Tahur	garan RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	К	(5) Rp		(6)	Rp	V	(7)	r) Rp	V	(8)	Rp	(9= 8/	7*100%) Rp		(10= 6+	-8) Rp	(11=10/	5*100%) Rp	(12)	(13)
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	93%	Rp 7.475.22	100%	Rp	6.464.000	100%	Rp	12.400.000	100%	Rp	12.400.000	100%	100%	200%	Rp	18.864.000	215%	252%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renja	2	Rp 1.727.87	3 2	Rp	1.414.000	2	Rp	7.400.000	2	Rp	7.400.000	100%	100%	4	Rp	8.814.000	200%	510%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya RKA SKPD	2	Rp 5.747.34	2	Rp	5.050.000	2	Rp	5.000.000	2	Rp	5.000.000	100%	100%	4	Rp	10.050.000	200%	175%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 2.524.381.33	100%	Rp	531.830.104	100%	Rp	2.265.937.100	100%	Rp	465.960.718	100%	21%	2	Rp	997.790.822	200%	40%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	14	Rp 2.512.903.33	14	Rp	527.305.104	14	Rp	2.257.659.600	4	Rp	463.183.218	29%	21%	18	Rp	990.488.322	129%	39%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	1	Rp 3.085.44	1	Rp	2.525.000	1	Rp	2.777.500	1	Rp	2.777.500	100%	100%	2	Rp	5.302.500	200%	172%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	2	Rp 4.072.85	5 2	Rp	-	1	Rp	2.500.000	0	Rp	-	0%	0%	2	Rp	-	100%	0%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2	Rp 2.468.39	2	Rp	2.000.000	2	Rp	2.000.000	0	Rp	-	0%	0%	2	Rp	2.000.000	100%	81%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2	Rp 1.851.29	2	Rp	-	2	Rp	1.000.000	0	Rp	-	0%	0%	2	Rp	-	100%	0%	Dinas Perikanan	1
	3.25.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	93%	Rp 9.063.95	100%	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp		0%	-	1	Rp	-	108%	0%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersusunnya Laporan Retribusi Daerah Dinas Perikana	4	Rp 9.063.95	4	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0%	-	4	Rp	-	100%	0%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	2	Rp 64.587.08	100%	Rp	-	100%	Rp	50.000.000	0	Rp	-	0%	0%	1	Rp	-	50%	0%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah SMD Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	2	Rp 64.587.08	. 3	Rp	-	2	Rp	50.000.000	0	Rp	-	0%	0%	3	Rp	-	150%	0%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Kantor	95%	Rp 454.728.16	100%	Rp	127.140.800	100%	Rp	306.687.500	100%	Rp	41.635.200	100%	14%	2	Rp	168.776.000	211%	37%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan	12	Rp 4.912.11	. 12	Rp	4.019.800	12	Rp	4.407.000	3	Rp	4.407.000	25%	100%	15	Rp	8.426.800	125%	172%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Pembiayaan Advetorial dan Pameran	12	Rp 30.854.97	12	Rp	25.000.000	12	Rp	21.000.000	3	Rp	-	25%	0%	15	Rp	25.000.000	125%	81%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Biaya Fotocopy	12	Rp 39.434.62	12	Rp	13.536.000	12	Rp	20.559.600	3	Rp	3.360.000	25%	16%	15	Rp	16.896.000	125%	43%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Rp 13.597.28	1	Rp	6.000.000	1	Rp	12.000.000	0	Rp	2.000.000	0%	17%	1	Rp	8.000.000	8%	59%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum Kunjungan Tamu	11	Rp 12.464.17	11	Rp	5.000.000	11	Rp	11.000.000	2	Rp	2.000.000	18%	18%	13	Rp	7.000.000	118%	56%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya Pembiyaan Rapat dan Konsultasi Luar Daerah	12	Rp 353.465.00	12	Rp	73.585.000	12	Rp	237.720.900	3	Rp	29.868.200	25%	13%	15	Rp	103.453.200	125%	29%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pemenuhan Sarana dan Prasarana SDM	95%	Rp 115.551.47	! 100%	Rp	45.410.000	0%	Rp	-	0%	Rp	-	0%	0%	1	Rp	45.410.000	105%	39%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Perlengkapan Kantor	3	Rp 46.457.37	3	Rp	5.410.000	0	Rp	-	0	Rp	-	0%	0%	3	Rp	5.410.000	100%	12%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Perlengkapan Kantor	3	Rp 69.094.09	3	Rp	40.000.000	0	Rp	-	0	Rp	-	0%	0%	3	Rp	40.000.000	100%	58%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	Rp 80.731.89	90%	Rp	45.175.290	100%	Rp	98.555.000	100%	Rp	28.108.045	100%	29%	1,9	Rp	73.283.335	200%	91%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembayaran Rekening Listrik dan Telepon	12	Rp 16.996.60	12	Rp	7.187.290	12	Rp	21.600.000	3	Rp	2.741.045	25%	13%	15	Rp	9.928.335	125%	58%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Pembiayaan Sewa Rumah Dinas	12	Rp 57.564.30	12	Rp	36.000.000	12	Rp	57.000.000	3	Rp	22.000.000	25%	39%	15	Rp	58.000.000	125%	101%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Pembiyaan Kebersihan Kantor	12	Rp 6.170.99	12	Rp	1.988.000	12	Rp	19.955.000	3	Rp	3.367.000	25%	17%	15	Rp	5.355.000	125%	87%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	Rp 466.562.67	100%	Rp	73.725.000	90%	Rp	168.080.000	100%	Rp	19.715.000	111%	12%	2	Rp	93.440.000	211%	20%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Rp 23.795.24	12	Rp	12.000.000	12	Rp	21.400.000	3	Rp	3.000.000	25%	14%	15	Rp	15.000.000	125%	63%	Dinas Perikanan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kine	2026	MD pada Tahun		ın Lalu	inerja RKPD s/d (2023)		alan ya (2024)	anggaran RKPD ng dievaluasi		(2024)	Kinerja dan ng Dievaluasi	dan Realis RKF	paian Kinerja asi Anggaran PD (%)	RKPD	s/d Tal	dan Anggaran hun 2024	s/d Tahur	garan RPJMD 1 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	K	(5)	Rp	К	(6)	Rp	K	(7)	Rp	K	(8)	D	(9= 8/ K	7*100%) Rp	К	(10= 6	i+8) Rp	(11=10/ K	5*100%) Rp	(12)	(13)
	3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	12	Rp	343.962.041	12	Rp	37.450.000	12	Rp	97.350.000	3	Rp	Rp 11.205.000	25%	12%	15	Rp	48.655.000	125%	14%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Rp	33.727.287	12	Rp	15.000.000	12	Rp	20.000.000	3	Rp	-	25%	0%	15	Rp	15.000.000	125%	44%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan Kantor	12	Rp	65.078.110	12	Rp	9.275.000	12	Rp	29.330.000	3	Rp	5.510.000	25%	19%	15	Rp	14.785.000	125%	23%	Dinas Perikanan	
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	15002	Rp	681.771.344	13559	Rp	528.612.160	14136	Rp	75.000.000	13559	Rp	-	96%	0%	27118	Rp	528.612.160	181%	78%	Dinas Perikanan	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap di Danau Sungai Waduk atau Genangan Air Lainnya (Ton)	15002	Rp	466.885.612	13559	Rp	449.067.400	14708	Rp	75.000.000	13559	Rp	-	92%	0%	27118	Rp	449.067.400	181%	96%	Dinas Perikanan	
	3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Terpenuhinya Data Penangkapan Ikan	11	Rp	41.432.120	-	Rp	-	-	Rp	-	-	Rp	-	-	-	-	Rp	-	-	0%	Dinas Perikanan	<u> </u>
	3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha	Terpenuhinya Prasarana Usaha Penangkapan Ikan Terpenuhinya Sarana Usaha	10	Rp	209.757.947	25	Rp	253.487.400	9	Rp	75.000.000	0	Rp	-	0%	0%	25	Rp	253.487.400	250%	121%	Dinas Perikanan Dinas	<u> </u>
17	3.25.03.2.01.03	Perikanan Tangkap Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam	Penangkapan Ikan Meningkatnya Kemampuan Nelayan	16	Rp	215.695.545	28	Rp	195.580.000	0	Rp	-	0	Rp	-	0%	0%	28	Rp	195.580.000	175%	91%	Perikanan Dinas	
	3.25.03.2.02	Daerah Kabupaten/Kota	kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	360	Rp	214.885.732	0,95	Rp	79.544.760	0	Rp	-	212	Rp	-	0%	0%	212,95	Rp	79.544.760	59%	37%	Perikanan Dinas	<u> </u>
	3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Pembentukan dan Pembinaan	-	Rp	-	-	Rp	•	-	Rp	-	-	Rp	-	-	-	-	Rp	-	-	-	Perikanan Dinas	
	3.25.03.2.02.02	Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kelompok	360	Rp	214.885.732	212	Rp	79.544.760	0	Rp	-	0	Rp	-	0%	0%	212	Rp	79.544.760	59%	37%	Perikanan	<u> </u>
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Meningkatnya Kemampuan	228,059	Rp	659.317.768	0,32	Rp	347.096.200	215	Rp	131.000.000	214	Rp	27.244.000	100%	21%	214,32	Rp	374.340.200	94%	57%	Dinas Perikanan Dinas	<u> </u>
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya	Pembudidaya Ikan Meningkatnya Kemampuan	70	Rp	186.461.944	0	Rp	21.402.000	215	Rp	81.000.000	214	Rp	2.580.000	100%	3%	214	Rp	23.982.000	306%	13%	Perikanan Dinas	
	3.25.04.2.02.01	Ikan Kecil Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan	Pembudidaya Ikan (Orang) Terfasilitasinya Kegiatan Pembentukan	70	Rp	65.162.938	20	Rp	13.583.000	55	Rp	81.000.000	0	Rp	2.580.000	0%	3%	20	Rp	16.163.000	29%	25%	Perikanan Dinas	<u> </u>
	3.25.04.2.02.02	Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok Perikanan (Kelompok)	12	Rp	121.299.006	2	Rp	7.819.000	5	Rp	-	0	Rp	-	0%	0%	2	Rp	7.819.000	17%	6%	Perikanan	<u> </u>
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya Sarana Prasarana Perikanan	100%	Rp	472.855.824	71%	Rp	325.694.200	15	Rp	50.000.000	26	Rp	24.664.000	173%	49%	26,71	Rp	350.358.200	2671%	74%	Dinas Perikanan	<u> </u>
	3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan	14	Rp	472.855.824	26	Rp	325.694.200	15	Rp	50.000.000	7	Rp	24.664.000	47%	49%	33	Rp	350.358.200	236%	74%	Dinas Perikanan	
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batas Biologis yang Aman (Angka)	0,033	Rp	178.899.154	0,032	Rp	44.528.000	0,032	Rp	75.000.000	0,032	Rp	12.972.800	100%	17%	0,064	Rp	57.500.800	194%	32%	Dinas Perikanan	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Terawasinya Sumberdaya Perikanan (Dokumen)	1	Rp	178.899.154	1	Rp	44.528.000	1	Rp	75.000.000	1	Rp	12.972.800	100%	17%	2	Rp	57.500.800	200%	32%	Dinas Perikanan	
	3.25.05.2.01.04	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Terawasinya Sumberdaya Perikanan (Dokumen)	1	Rp	89.449.577	26			1	Rp	13.850.000	0	Rp	-	0%	0%	26	Rp	-	2600%	0%	Dinas Perikanan	
	3.25.05.2.01.07	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Terawasinya Sumberdaya Perikanan (Dokumen)	1	Rp	89.449.577	1	Rp	44.528.000	1	Rp	61.150.000	0	Rp	12.972.800	0%	-	1	Rp	57.500.800	100%	64%	Dinas Perikanan	
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	43,35	Rp	523.514.709	39,47	Rp	358.100.900	40,85	Rp	75.000.000	0	Rp		0%	0%	39,47	Rp	358.100.900	91%	68%	Dinas Perikanan	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Peningkatan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Unit Usaha)	100%	Rp	115.798.935	100%	Rp	34.877.500	100%	Rp	-	100%	Rp		100%	0%	2	Rp	34.877.500	200%	30%	Dinas Perikanan	
	3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terselenggaranya Kegiatan Gelar Produk dan Pemasaran Hasil Perikanan (Jenis)	1	Rp	115.798.935	3	Rp	34.877.500	3	Rp	-	0	Rp	-	0%	0%	3	Rp	34.877.500	300%	30%	Dinas Perikanan	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedia Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	43%	Rp	407.715.774	0	Rp	323.223.400	40,85	Rp	75.000.000	0	Rp	-	0%	0%	0	Rp	323.223.400	0%	79%	Dinas Perikanan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kine	rja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d ın Lalu (2023)		ja dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realis	paian Kinerja asi Anggaran PD (%)		nerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi Ang	nian Kinerja & ggaran RPJMD n 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	К	(5)	К	(6)	К	(7)	К	(8) Rp	(9= 8/	7*100%) Rp		(10= 6+8)	(11=10/	/5*100%)	(12)	(13)
	3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Tingkat Konsumsi Ikan (AKI)	43,35	Rp 183.352.196	40,85	Rp 323.223.400	40,85	Rp -	0	Rp -	0%	0%	40,85	Rp 323.223.400	94%	Rp 176%	Dinas Perikanan	
	3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pemasaran Hasil Perikanan	93	Rp 224.363.578		Rp -	-	Rp 75.000.000	0	Rp -	-	-	0	Rp -	0%	0%	Dinas Perikanan	
	03.26	PARIWISATA																	
	03.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	92.5%	19.667.084.576,00	90	3.659.450.751,00	92,5	3.391.105.600,00	9,25	505.964.717,00	10,00	14,92	9,25	505.964.717,00	#VALUE!	2,57	DINAS PARIWISATA	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	125.352.535,00	100	18.468.000,00	100	18.468.000,00	0,00	-	0	-	0,00	-	0	0,00	DINAS PARIWISATA	
	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	10	56.765.460,00	2	7.400.000,00	2	7.400.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	.
	2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah DokumenPerubahan DPA-SKPD	5	43.587.075,00	1	6.068.000,00	1	6.068.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10			5.000.000,00	2	5.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PersentasePelaporan Keuangan Tepat Waktu	100%	11.554.712.975,00	100	1.962.346.465,00	100	2.413.013.600,00	7	430.503.995,00	6,52	17,84	6,52	430.503.995,00	652,17	3,73	DINAS PARIWISATA	\neg
	2.02.01	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	84	11.356.939.465,00	14	1.946.963.465,00	14	2.397.105.600,00	3	430.503.995,00	21,43	17,96	3,00	430.503.995,00	3,57	3,79	DINAS PARIWISATA	
	2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	165.220.510,00	12	10.330.000,00	12	10.408.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
	2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	15.000.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
	2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	90	12.000.000,00	18	2.000.000,00	18	2.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
	2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	5.553.000,00	1	553.000,00	1	1.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Berkinerja	100%	274.580.000,00	0	115.080.000,00	100	50.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00		0,00	-	DINAS PARIWISATA	1
	2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Menikuti Peningkatan Kapasitas		274.580.000,00	0	115.080.000,00	5	50.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	-	DINAS PARIWISATA	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana	100%	2.476.571.207.00	100	602.215.162.00	100	384.254.000,00	12.5	19.328.400,00	12,50	5,03	12.50	19.328.400,00	1250	0.78	DINAS	
	2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	dan Prasarana Pendukung Kinerja Jumlah Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	5	18.618.000,00	1	4.041.000,00	1	2.500.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	PARIWISATA DINAS PARIWISATA	
	2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK)	60	580.435.695,00	12	227.406.650,00	12	149.254.000,00	3	12.000.000,00	25,00	8,04	3,00	12.000.000,00	5,00	2,07	DINAS PARIWISATA	
	2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	60	65.800.000,00	12	5.800.000,00	12	12.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
	2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	55	117.650.000,00	11	15.900.000,00	11	5.500.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di Luar Kantor	60	1.694.067.512,00	12	349.067.512,00	12	215.000.000,00	3	7.328.400,00	25,00	3,41	3,00	7.328.400,00	5,00	0,43	DINAS PARIWISATA	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	100	371.279.535,00	100	7.930.000,00	100	5.680.000,00	0,00	-	0,00	-	100,00	-	100	-	DINAS PARIWISATA	
	2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap	18	371.279.535,00	7	7.930.000,00	5	5.680.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ersentase Pemenuhan Layanan Pendukui	100	4.068.551.525,00	100	918.624.325,00	100	284.250.000,00	22,222222	40.453.462,00	22,22	14,23	22,22	40.453.462,00	22,222222	0,99	DINAS PARIWISATA	
	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	803.896.325,00	12	52.096.325,00	12	141.000.000,00	3	8.453.462,00	25,00	6,00	3,00	8.453.462,00	5,00	1,05	DINAS PARIWISATA	
	2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan	60	542.000.000,00	12	67.000.000,00	12	67.000.000,00	5	32.000.000,00	41,67	47,76	5,00	32.000.000,00	8,33	5,90	DINAS PARIWISATA	
	2.08.04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	2.722.655.200,00	12	799.528.000,00	12	76.250.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam Kondisi Baik	100%	1.070.616.799,00	100	149.866.799,00	100	235.440.000,00	23,53	15.678.860,00	23,53	6,66	23,53	15.678.860,00	2352,94118	1,46	DINAS PARIWISATA	
	2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan	26	586.601.799,00	4	77.101.799,00	5	135.220.000,00	1	15.678.860,00	20,00	11,60	1,00	15.678.860,00	3,85	2,67	DINAS PARIWISATA	
	2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya						50.220.000,00	0	-		-	0,00	-			DINAS PARIWISATA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	rja RPJMD pada Tahun 2026		n Lalu (2023)		a dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Cap dan Realisa RKPI	si Anggaran (%)	RKPD s	nerja dan Anggaran /d Tahun 2024	Tingkat Capai Realisasi Ang s/d Tahun	garan RPJMD 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	К	(5) Rp	К	(6) Rp	К	(7) Rp	К	(8) Rp	(9= 8/7 K	*100%) Rp	к (10= 6+8) Rp	(11=10/5 K	5*100%) Rp	(12)	(13)
	2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	60	484.015.000,00	12	72.765.000,00	12	50.000.000,00	3	-	25,00	-	3,00	-	5,00	-	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI WISATA	PAD Sektor Wisata (Milyar)	3,38%	1.995.685.050,00	2,58	85.233.050,00	2,78	600.000.000,00	2,78	74.100.000,00	100,00	12,35	2,78	74.100.000,00	8224,85	3,71	DINAS PARIWISATA	
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		15	1.995.685.050,00	3	85.233.050,00	3	600.000.000,00	3	74.100.000,00	100	12,35	3,00	74.100.000,00	20,00	3,71	DINAS PARIWISATA	
	2.03.0004	Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Terpelihara	60	1.995.685.050,00	12	85.233.050,00	12	600.000.000,00	3	74.100.000,00	25,00	12,35	3,00	74.100.000,00	5,00	3,71	DINAS PARIWISATA	
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kunjungan Wisata (Orang)	780748 Orang	3.439.315.000,00	119631	39.315.000,00	130000	146.000.000,00	147925	-	113,79	-	147925,00	-	123,65	-	DINAS PARIWISATA	
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	eningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawa	50	3.439.315.000,00	100	39.315.000,00	100	146.000.000,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
	2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	ımlah Kerja Sama dan kemitraan Pariwisat	14	2.575.000.000,00	0	125.000.000,00	1	100.000.000,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
	2.01.06	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Tersiarnya Publikasi Pariwisata Pesisir Barat	150	3.439.315.000,00	0	39.315.000,00	1	46.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan Fasilitasi Pengembangan SDM Pariwisata	50%	1.877.239.500,00	0	497.239.500,00	20	160.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Desa Wisata		1.877.239.500,00	0	497.239.500,00	1	160.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
	2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Tersediannya Pelatihan peningkatan Mutu Produk	4	987.317.000,00	0	149.317.000,00	1	75.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
	2.01.09	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Tersediannya Pelatihan SDM Pariwisata yang Berdaya Saing	8	1.877.239.500,00	0	497.239.500,00	1	85.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
		itah Bidang Pertanian																	
C.	orusan remem		Nilai Tukar Petani	102,3	10.501.847.500	124,98	4.007.101.870	99,77	1.344.593.000	0	74.723.000	0%	6%	0	4.081.824.870	0%	39%	Dinas Ketahanan Pangan dan	
l.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Nilai Tukar Petani	102,3	3.663.480.000	124,98	1.366.057.700	99,77	328.137.000	0	19.493.000	0%	6%	0	1.385.550.700	0%	38%	Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan	
1	3.27.02.2.01	Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	0,3	1.526.695.000	0,25	486.197.200	0,3	248.137.000	0	14.893.000	0%	6%	0	501.090.200	0%	33%	Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Laporan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	5	610.930.000	3	241.105.200	1	209.913.000	0	8.323.000	0%	4%	3	249.428.200	60%	41%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
b. 3	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Laporan KP3 dan Pendampingan Sarana Pendukung Pertanian	10	915.765.000	6	245.092.000	2	38.224.000	1	6.570.000	50%	17%	7	251.662.000	70%	27%	Dinas Ketahanan Pangan dan	
	3.27.02.2.02	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Pertanian	0,5	2.136.785.000	0,57	879.860.500	0,5		0,029	4.600.000	6%	6%	0	884.460.500	1%	41%	Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a. 3	3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit komoditi perkebunan	81.000	2.747.295.000	23700	630.155.350	21700	432.500.000	21700	431.822.850	100%	100%	45400	1.061.978.200	56%	39%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanjan	
с.	3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Luasan Pengembangan Hortikultura	450	2.136.785.000	136	879.860.500	53	80.000.000	3	4.600.000	6%	6%	139	884.460.500	31%	41%	Dinas Ketahanan Pangan dan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	ja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d n Lalu (2023)		a dan Anggaran RKPD Ilan yang dievaluasi (2024)	Anggaran Ri	apaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capa dan Realisas RKPD	i Anggaran (%)	RKPD s	nerja dan Anggaran /d Tahun 2024	Tingkat Capaia Realisasi Angga s/d Tahun 2	aran RPJMD 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9= 8/7*			10= 6+8)	(11=10/5*		(12)	(13)
	3.27.02.2.06	Kegiatan : Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan Populasi Ternak	К 3,00	Rp 2.339.938.000	К 3	Rp 403.867.300	К 3	Rp 405.160.000	К 3	Rp 403.867.300	100%	Rp 100%	К 3	Rp 807.734.600	20%	Rp 35%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih /Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	Jumlah Bibit Ternak	5.250	1.851.530.000	1655	403.867.300	1655	405.160.000	1655	403.867.300	100%	100%	3310	807.734.600	63%	44%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Sektor Pertanian	151.322	811.655.000	256.359	410.461.500	148.340	356.616.000	0	•	0%	0%	0	410.461.500	0%	51%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.03.2.01	Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan data, informasi dan kajian lingkup pertanian	100	811.655.000	100	410.461.500	100	356.616.000	0	,	0%	0%	0	410.461.500	0%	51%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	5	361.665.000	2	392.953.500	2	330.000.000	0		0%	0%	2	392.953.500	40%	109%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian PanganBerkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota		5	361.665.000	2	17.508.000	1	26.616.000	0		0%	0%	2	17.508.000	40%	5%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	3.27.03.2.01.03	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang Dikelola	2	150.000.000	1	8.754.000	1	8.779.000	1	8.754.000	100%	100%	2	17.508.000	100%	12%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang terbangun dan berkondisi baik	85	13.718.500.000	100	298.987.500	82	306.000.000	100	298.987.500	122%	98%	100	597.975.000	24%	4%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani y ang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	14	3.090.500.000	2	298.987.500	2	306.000.000	2	298.987.500	100%	98%	4	597.975.000	29%	19%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		90	947.630.000	84,5	552.681.170	86	80.000.000	22	20.340.000	26%	25%	22	573.021.170	24%	60%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
1	3.27.04.2.01	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terproteksinya ternak dan HPR dari penyakit hewan menular	90	755.900.000	84,5	405.726.170	86	48.775.000	0	•	0%	0%	0	405.726.170	0%	54%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	3.27.04.2.01.08	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	5	755.900.000	3	405.726.170	1	48.775.000	O		0%	0%	3	405.726.170	60%	54%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Terproteksinya ternak dan HPR dari penyakit hewan menular	15.000	755.900.000	7000	349.392.220	3000	98.947.000	3000	95.414.200	100%	96%	10000	444.806.420	67%	59%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
	3.27.04.2.04	Kegiatan : Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	100	191.730.000	99	146.955.000	100	31.225.000	65	20.340.000	65%	65%	65	167.295.000	32%	87%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Sampel daging dan Produk Hewan	1.500	191.730.000	1.160	146.955.000	450	31.225.000	293	20.340.000	65%	65%	1453	167.295.000	97%	87%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
IV.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	90	1.409.905.000	99	277.729.000	86	75.000.000	5	5.370.000	6%	7%	5	283.099.000	6%	20%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

Ne	0	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerj	ja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d n Lalu (2023)	Tahun berja	dan Anggaran RKPD lan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realisa RKP	aian Kinerja si Anggaran D (%)		nerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Tingkat Capa Realisasi Ang s/d Tahun	garan RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		*100%)		(10= 6+8)	(11=10/	•	(12)	(13)
Ė			* *		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K 7%	Rp 70/	K	Rp 283.099.000	K 70/	Rp		<u> </u>
			Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penurunan persentase gangguan OPT/ Kegagalan panen pada komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	10	1.409.905.000	10	277.729.000	10	75.000.000	0,7	5.370.000	7.7	7%	1		7%	20%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a	. 3.27	7.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Gerakan Pengendalian OPT komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	75	1.409.905.000	20	277.729.000	6	75.000.000	1	5.370.000	17%	7%	21	283.099.000	28%	20%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
V	. 3.27	7.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	995	3.669.177.500	975	1.400.172.500	975	504.840.000	56	29.520.000	6%	6%	56	1.429.692.500	6%	39%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
1	3.27	7.072.01	Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kualitas SDM Penyuluh dan Kelembagaan Pertanian yang ditingkatkan	90	3.669.177.500	80	1.400.172.500	80	504.840.000	5	29.520.000	6%	6%	5	1.429.692.500	6%	39%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a	. 3.27	7.072.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Penyuluhan Pertanian yang Ditingkatkan Kualitas SDM	11	2.136.785.000	11	997.777.500	11	181.680.000	1	13.710.000	9%	8%	11	1.011.487.500	100%	47%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
b	3.27	7.072.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditangkap Kapasitasnya	11	1.068.392.500	11	276.513.000	11	219.160.000	1	15.810.000	9%	7%	11	292.323.000	100%	27%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
b	. 3.27	7.072.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	11	464.000.000	11	125.882.000	11	104.000.000	0		0%	0%	11	125.882.000	100%	27%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
-	+		URUSAN PILIHAN BIDANG PERDAGANGA	IN .																$\overline{}$
-	_			I	,															
	3.30	0 . 03 . 2.01	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	11,59	0	12,86	1.665.263.221	11,58	94.518.000,00	11,58	0,00	100	0,00	12,9	1.665.263.221,00	110,96		Diskop ukm perdagangan	
	24		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	11,59	0	12,86	1.665.263.221	11,58	94.518.000,00	11,58	0,00	100	0,00	12,9	1.665.263.221,00	110,96	0	Diskop ukm perdagangan	
	25		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana Perdagangan	5	0	3	802.802.915	2	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	3	802.802.915	60	0	Diskop ukm perdagangan	
	3.30	0.04	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya kegiatan pelayanan pasar	60	0	36	862.460.306	12	64.518.000	0	0,00	0	0,00	36	862.460.306	60		Diskop ukm perdagangan	
	3.30	0 . 04 . 2.01	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan harga Barang Kebutuhan Pokok	70	0	60	757.236.700	60	76.110.000,00	60	0,00	100	0,00	60	757.236.700,00	85,7142857	0	Diskop ukm perdagangan	
:	26		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan harga Barang Kebutuhan Pokok	70	0	60	67.219.500	60	46.110.000,00	60	0,00	100	0,00	60	67.219.500,00	85,7142857	0	Diskop ukm perdagangan	
	3.30	0 . 04 . 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Terlaksananya Monitoring dan Sosialisas Distribusi BBM dan BBG	i 60	0	36	67.219.500	12	46.110.000	0	-	o	0,00	36	67.219.500	60		Diskop ukm perdagangan	
:	27		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan harga Barang Kebutuhan Pokok	70	0	30	690.017.200	40	30.000.000	40	-	100	0,00	30	690.017.200	42,86	0	Diskop ukm perdagangan	
	3.30	0.05	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring Evaluasi	260	0	156	690.017.200	52	30.000.000	0	-	0	0,00	156	690.017.200	60		Diskop ukm perdagangan	
3		31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIN	IDUSTRIAN	 															
3		31	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Pemenuhan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	45%	2.941.421.772	43%	231.986.472	40%	119.200.000	0%	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rprin	-
3		31	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	45%	2.941.421.772	43%	231.986.472	40%	119.200.000	0%	-	0	0	0%		0%	0	Distransnake rprin	_

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	rja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d ın Lalu (2023)		a dan Anggaran RKPD Ilan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realisa	paian Kinerja nsi Anggaran D (%)		nerja dan Anggaran /d Tahun 2024		nian Kinerja & garan RPJMD n 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	К	(5)	К	(6)		(7)	К	(8)	(9= 8/7 K	/*100%)	K (10= 6+8)	(11=10/ K	5*100%) D-	(12)	(13)
3	31	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terpenuhinya Bina Kelompok Pengrajin	45%	980.473.924	43%	92.593.600	40%	Rp -	0%	Rp -	0	Rp 0	0%	Rp -	0%	Rp 0	Distransnake rprin	
3	31	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasana Industri	Terpenuhinya Jumlah dan Spesifikasi Gedung Sentra IKM yang Terpelihara	45%	980.473.924	43%	139.392.872	40%	119.200.000	0%	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rprin	_
3	31	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terpenuhinya Bina Kelompok Pengrajin	45%	980.473.924	0%	-	0%	-	0%	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rprin	
3	31	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Pengelolaan kontribusi industri sektor industri pengolahan terhadap PDRB	4%	978.396.132	4%	56.047.700	4%	88.500.000	0%	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rprin	
3	31	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis	6	978.396.132	1	56.047.700	1	88.500.000	0	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake	-
3	31	Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Terpenuhinya Website yang Dikelola Dengan Baik	6	978.396.132	1	56.047.700	1	88.500.000	0	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rprin	-
3	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN	Cakupan Pemenuhan Pembangunan															Distransnake	
3	32	TRANSMIGRASI	Kawasan Transmigrasi	44,00%	503.420.314	41,95%	129.672.306	44,00%	120.000.000	0%	-	0	0	0%	-	0%	0%	rprin	
3	32	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	44,00%	503.420.314	41,95%	129.672.306	44,00%	120.000.000	0%	-	0	0	0%	-	0%	0%	Distransnake rprin	
3	31	Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi	Terpenuhinya Pemberdayaan Masyarakat Eks Transmigran	44,00%	503.420.314	41,95	129.672.306	44,00%	120.000.000	0%	-	0	0	0%	-	0%	0%	Distransnake rprin	
3	32	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		1	999.955.000	0	129.672.306	1	133.125.000	0	-	0	0	0%		0%	0%	Distransnake rprin	
3	32	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Dimlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1	999.955.000	0	129.672.306	1	133.125.000	0	-	0	0	0%	-	0%	0%	Distransnake rprin	
3	31	Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Cakupan Pengembangan Daerah Transmigran	1	999.955.000	0	-	1	133.125.000	0	-	0	0	0%	-	0%	0%	Distransnake rprin	
	04:01	Sekretariat Daerah																	
1		Program Penunjang Urusan	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan															SEKRETARIAT	
	04:01	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100%	267.604.023.033	#VALUE!	5.855.152.253	100%	105.462.198.050	14%	13.807.306.582	14%	13%	137%	13.807.306.582	34%	8%	DAERAH	
2	04.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	138.577.500	100%	3.202.500	100%	6.224.500	0%	0	0%	0%	0%	3.202.500	20%	2%	SEKRETARIAT DAERAH	
3	04.01.01.2.01.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perncanaan Perangkat Daerah	2	27.715.500	1 Dokumen	3.202.500,00	1,00	1.006.000,00	0 Dokumen	0,00	0%	0%	2 Dokumen	3.202.500	20%	12%	SEKRETARIAT DAERAH	
4	04.01.01.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	27.715.500	1 Dokumen	0,00	1,00	1.061.000,00	0 Dokumen	0,00	0%	0%	2 Dokumen	0	20%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
5	04.01.01.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2	27.715.500	1 Dokumen	0,00	1,00	1.067.000,00	0 Dokumen	0,00	0%	0%	2 Dokumen	0	20%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
6	04.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	27.715.500	1 Dokumen	0,00	1,00	1.014.000,00	0 Dokumen	0,00	0%	0%	2 Dokumen	0	20%	0%	SEKRETARIAT	
7	04.01.01.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	Terlaksananya Koordinasi dan	2	27.715.500	1 Dokumen	0,00	1,00	1.047.000,00	0 Dokumen	0,00	0%	0%	2 Dokumen	0	20%	0%	DAERAH SEKRETARIAT	
	04.01.01.2.01.0	DPA-SKPD Evaluasi Kinera Perangkat Daerah	Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Terlaksananya Evaluasi kinerja perangkat	2	1.132.450	0 Dokumen	0,00	1,00	1.029.500,00		0,00	0%	0%	0 Dokumen	0	0%	0%	DAERAH SEKRETARIAT	
8	04.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	daerah Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan, Monev dan Pembuatan	100%	126.190.336.159	100%	3.841.338.553,00	100%	88.429.691.250	25%	11.129.927.043,00	25%	13%	100%	14.971.265.596	12%	12%	DAERAH SEKRETARIAT DAERAH	
9	04.01.01.2.02.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan Terlaksananya Penyediaan Gaji Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	24	126.185.740.603	12,00	3.841.338.553,00	12,00	88.429.691.250,00	3,00	11.129.927.043,00	25%	13%	24,00	14.971.265.596	12%	12%	SEKRETARIAT DAERAH	
10	04.01.01.2.02.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	1.531.852	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	24,00	0	0%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
11	04.01.01.2.02.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	SKPD	12	1.531.852	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	24,00	0	0%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
12	04.01.01.2.02.0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognisis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognisis Realisasi Anggaran	12	1.531.852	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	24,00	0	0%	0%		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		a RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d n Lalu (2023)	Tahun berja	a dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)	Anggaran Ri	Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realisa RKP	paian Kinerja asi Anggaran D (%)	RKPD	inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	s/d Tahur	garan RPJMD 1 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	К	(5)	К	(6)	К	(7)	К	(8)	(9= 8/7 K	7*100%) Rp	V	(10= 6+8) Rp	(11=10/ K	5*100%) Rp	(12)	(13)
13	04.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat	100%	Rp 3.014.815.500	100%	Rp 0,00	100%	100.000.000	25%	Rp 0,00	25%	0%	0%	0	0%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
14	04.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Belanja Premi Asuransi untuk Kendaraan Dinas	24	3.014.815.500	12,00	0,00	12,00	100.000.000,00	3,00	0,00	25%	0%	24,00	0	0%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
16	04.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100%	2.039.264.661	100%	0,00	100%	108.000.000	0%	108.000.000,00	0%	100%	30%	108.000.000	30%	30%	SEKRETARIAT DAERAH	
17	04.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Pengadaan Pakaian Dinas Berserta	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas	12	-	12,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0%	#DIV/0!	24,00	0	200%	200%	SEKRETARIAT DAERAH	
	04.01.01.2.05.02	Atribut Kelengkapannya	Berserta Atribut Kelengkapannya	20	1.930.622.661	210 Stel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	#DIV/0!	310 Stel	0	20%	20%	SEKRETARIAT DAERAH	
19	04.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24	108.642.000	12,00	0,00	12,00	108.000.000,00	12,00	108.000.000,00	0%	100%	24,00	108.000.000	20%	20%	SEKRETARIAT DAERAH	
20	04.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	5.806.463.871	100%	679.171.394,00	100%	920.165.000	17%	193.591.162,00	17%	21%	23%	872.762.556	23%	16%	SEKRETARIAT DAERAH	
21	04.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	24	80.514.586	12,00	21.010.500,00	12,00	26.150.000,00	3,00	7.845.000,00	25%	30%	24,00	28.855.500	25%	36%	SEKRETARIAT DAERAH	
22	04.01.01.2.06.02	Penyediaan Bahan Logistik	Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik	12	135.802.500	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	24,00	0	50%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	<u> </u>
23	04.01.01.2.06.05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24	188.846.792	12,00	22.051.900,00	12,00	71.430.000,00	3,00	26.451.550,00	25%	37%	24,00	48.503.450	50%	26%	SEKRETARIAT DAERAH	ļ
24	04.01.01.2.06.09	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	24	458.088.993	12,00	6.092.100,00	12,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	24,00	6.092.100	50%	1%	SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT	ļ
25	04.01.01.2.06.09	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu Pemda Terlaksananya Rapat Koordinasi dan	24	2.770.371.000	12,00	401.370.000,00	12,00	490.585.000,00	3,00	84.393.000,00	25%	17%	24,00	485.763.000	50%	18%	DAERAH SEKRETARIAT	
27	04.01.01.2.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah	Konsultasi SKPD Terlaksananya Pengadaan Barang Milik	24	2.172.840.000	12,00	228.646.894,00	12,00	300.000.000,00	3,00	74.901.612,00	25%	25%	24,00	303.548.506	50%	14%	DAERAH	
27	04.01.01.2.07.01	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Daerah	100	523.958.637	100%	0,00	100%	7.000.000	8%	0,00	8%	0%	25%	0	25%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
28	04.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas	12	21.000.000	12,00	0,00	12,00	7.000.000	0,00	0,00	25%	0%	24,00	0	0%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
30	04.01.01.2.07.02	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	12	523.958.637	12,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0%	0%	24,00	0	25%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	ļ
31	04.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	12	0	12,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0%	0%	24,00	0	25%	0	SEKRETARIAT DAERAH	
32	04.01.01.2.07.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	24	95.137.756.105	12 Bulan	413.270.745,00	12 Bulan	12.184.395.500	25%	1.924.669.192,00	25%	16%	12,00	2.337.939.937	25%	10%	SEKRETARIAT DAERAH	
33	04.01.01.2.07.06	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24	3.618.821.725	12,00	304.780.745,00	12,00	1.410.000.000,00	3,00	403.009.192,00	25%	29%	24,00	707.789.937	25%	20%	SEKRETARIAT DAERAH	
34	04.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Volume Penyediaan Rumah Dinas, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas	24	3.324.445.200	12,00	61.800.000,00	12,00	780.000.000,00	3,00	204.200.000,00	25%	26%	24,00	266.000.000	25%	8%	SEKRETARIAT DAERAH	
35	04.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Administrasi Keuangan Terlaksana dengan Baik	24	88.194.489.180	12,00	46.690.000,00	12,00	9.994.395.500,00	3,00	1.317.460.000,00	25%	13%	24,00	1.364.150.000	25%	2%	SEKRETARIAT DAERAH	
36	04.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	11.161.335.870	100%	228.931.275,00	100%	1.273.400.000	25%	189.630.800,00	25%	15%	25%	418.562.075	25%	7%	SEKRETARIAT DAERAH	
37	04.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorang Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorang Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	24	6.094.816.200	12,00	116.656.005,00	12,00	666.800.000,00	3,00	92.359.800,00	25%	14%	24,00	209.015.805	25%	3%	SEKRETARIAT DAERAH	
38	04.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemiliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemiliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24	4.182.173.790	12,00	72.770.270,00	12,00	404.600.000,00	3,00	71.970.000,00	25%	18%	24,00	144.740.270	25%	3%	SEKRETARIAT DAERAH	
39	04.01.01.2.09.06	Pemeliharan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharan Peralatan Dan Mesin Lainnya	24	851.753.280	12,00	38.085.000,00	12,00	102.000.000,00	3,00	22.500.000,00	25%	22%	24,00	60.585.000	25%	7%	SEKRETARIAT DAERAH	<u> </u>
40	04.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24	32.592.600	12,00	1.420.000,00	12,00	100.000.000,00	3,00	2.801.000,00	25%	3%	24,00	4.221.000	25%	13%		
41	04.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	100%	3.132.808.473	100%	119.269.245,00	100%	897.226.800	13%	97.221.720,00	13%	11%	27%	216.490.965	27%	7%	SEKRETARIAT DAERAH	
42	04.01.01.2.11.01	Penyedian Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Penyedian Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	24	933.800.261	12,00	35.851.476,00	12,00	347.226.800,00	3,00	47.221.720,00	25%	14%	24,00	83.073.196	20%	9%	SEKRETARIAT DAERAH	
43	04.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksannya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	152.627.500	12,00	8.417.769,00	12,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	24,00	8.417.769	20%	6%	SEKRETARIAT DAERAH]

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	2	026		iian Kinerja RKPD s/d n Lalu (2023)	Tahun berjal	dan Anggaran RKPD an yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realisa RKP	paian Kinerja asi Anggaran D (%)	RKPD s	nerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi Ang s/d Tahur		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	к	(5) Rp	к	(6)	к	(7) Rp	к	(8) Ro	(9= 8/7	7*100%)	к ((10= 6+8)	(11=10/		(12)	(13)
44	04.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	46	кр 416.750.712	28 stel	Rp 0,00	28,00	200.000.000,00	0,00	0,00		0%	24,00	Rp 0	20%	Rp 0%	SEKRETARIAT DAERAH	
45	04.01.01.2.11.03	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	24	1.629.630.000	12,00	75.000.000,00	12,00	300.000.000,00	3,00	50.000.000,00	25%	17%	24,00	125.000.000	20%	8%	SEKRETARIAT DAERAH	
46	04.01.01.2.11.02	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi dalam Proses Fasilitasi Kerumah Tangga Sekretariat Daerah	100	8.190.206.400	100%	180.928.190,00	100%	1.064.064.000	25%	38.452.000,00	25%	4%	20%	219.380.190	20%	3%	SEKRETARIAT DAERAH	
47	04.01.01.2.11.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	24	3.788.573.600	12,00	89.704.950,00	12,00	586.280.000,00	3,00	14.260.000,00	25%	2%	24,00	103.964.950	20%	3%	SEKRETARIAT DAERAH	
48	04.01.01.2.11.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga wakil Kepala Daerah	24	2.783.635.100	12,00	68.364.950,00	12,00	432.280.000,00	3,00	12.760.000,00	25%	3%	24,00	81.124.950	20%	3%	SEKRETARIAT DAERAH	
49	04.01.01.2.12	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	24	1.617.997.700	12,00	22.858.290,00	12,00	45.504.000,00	3,00	11.432.000,00	25%	25%	24,00	34.290.290	20%	2%	SEKRETARIAT DAERAH	
50	04.01.01.2.12.0	Penataan Organisasi	Terlaksananya Penataan Organisasi	100%	3.462.708.437	100%	18.759.452,00	100%	124.788.000,00	5%	17.791.000,00	5%	14%	100%	36.550.452	100%	1%	SEKRETARIAT DAERAH	.
51	04.01.01.2.12.02	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jahatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	1.025.483.733	50 Buku	9.403.452,00	1,00	54.930.000,00	0 Dokumen	10.727.000,00	0%	20%	100 Buku	20.130.452	20%	2%	SEKRETARIAT DAERAH	
52	04.01.01.2.12.03	Fasilitasi Pelayan Publik dan Tata	Terlaksananya Fasilitasi Pelayan Publik	2	1.720.717.570	50 buku	8.122.000,00	1,00	24.929.000,00	0 Laporan	3.988.000,00	0%	16%	100 buku	12.110.000	20%	1%	SEKRETARIAT	
53	04.01.01.2.13	Laksana Peningakatan Kinerja dan Reformasi	dan Tata Laksana Terlaksananya Peningakatan Kinerja dan	2	303.449.164	55 buku	1.234.000,00	1,00	24.929.000,00	0 Dokumen	3.076.000,00	0%	12%	105 buku	4.310.000	18%	1%	DAERAH SEKRETARIAT	
54	04.01.01.2.13.01	Birokrasi Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata	Reformasi Birokrasi Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik	2	304.415.970	1 buku	0,00	1,00	10.000.000,00		0,00	0%	0%	2 buku	0	20%	0%	DAERAH SEKRETARIAT DAERAH	
55	04.01.01.2.13.02	Laksana Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintaha Daerah	dan Tata Laksana Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja	2	108.642.000	12,00	0,00	1,00	10.000.000,00	0,00	0,00	25%	0%	24,00	0	20%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
56	24.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi	Pemerintaha Daerah Terlaksananya Pelaksanaan Protokol	4000/	0.005.704.400	4000/		4000/	247 242 222		400 000 555 00	00/	210/	4000/	470 204 554	1000/	FOV	SEKRETARIAT	
57	04.01.01.2.14	Pimpinan Fasilitasi Keprotokolan	dan Komunikasi Pimpinan Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	100%	8.805.791.420	100%	370.280.899,00	100%	347.243.000	0%	108.023.665,00	0%	31%	100%	478.304.564	100%	5%	DAERAH SEKRETARIAT	
	04.01.01.2.14.01	·		24	3.928.276.348	1 kegiatan	135.746.516,00	12,00	171.189.000,00	3,00	15.187.790,00	0%	9%	2 kegiatan	150.934.306	20%	4%	DAERAH	
58	04.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	24	3.074.057.872	1 kegiatan	209.019.383,00	12,00	165.354.000,00	3,00	92.835.875,00	0%	56%	2 kegiatan	301.855.258	20%	10%	SEKRETARIAT DAERAH	
59	04.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	24	1.803.457.200	1 kegiatan	25.515.000,00	12,00	10.700.000,00	0,00	0,00	0%	0%	2 kegiatan	25.515.000	20%	1%	SEKRETARIAT DAERAH	ı İ
60		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Persen)	100%	41.401.178.118	100%	140.711.658,00	100%	6.850.944.000	1%	146.865.285,00	1%	6%	100%	287.576.943	18%	2%	SEKRETARIAT DAERAH	
61	04.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	100%	4.361.017.533	100%	55.283.450,00	100%	1.230.278.000	1%	71.278.485,00	1%	6%	100%	126.561.935	15%	2%	SEKRETARIAT DAERAH	
62	04.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Administrasi	2	2.810.533.230	26 Kegiatan	38.606.000,00	26,00	915.000.000,00	1 Kegiatan	68.480.085,00	4%	7%	52 Kegiatan	107.086.085	4%	4%	SEKRETARIAT	
63	04.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pemerintahan Terlaksananya Pengelolaan Administrasi	8	711.876.705	4 Laporan	11.193.600,00	4,00	219.259.000,00	0 Laporan	1.688.400,00	0%	1%	9 Laporan	12.882.000	20%	2%	DAERAH SEKRETARIAT	
64	04.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kewilayahan Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan	40	838.607.598	20 buku	5.483.850.00	20.00	96.019.000,00	0 buku	1.110.000.00	0%	1%	40 buku	6.593.850	20%	1%	DAERAH SEKRETARIAT	-
65	04.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan	Otonomi Daerah Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan	100%	32.600.730.547	100%	25.000.000,00	100%	4.938.468.000	0%	0,00	0%	0%	100%	25.000.000	18%	0%	DAERAH SEKRETARIAT	
66	04.01.02.2.02	Rakyat Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan	100%	8.512.109.390	4 kegiatan	0,00	4,00	979.068.000,00	0 kegiatan	0,00	0%	0%	8 kegiatan	0	20%	0%	DAERAH SEKRETARIAT DAERAH	\dashv
67	04.01.02.2.02.02	Spirituai Pelaksaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan	Bina Mental Spiritual Terlaksananya Pelaksaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait	64	23.735.993.127	32 Kegiatan	25.000.000,00	32,00	3.959.400.000,00	0 Kegiatan	0,00	0%	0%	55 Kegiatan	25.000.000	14%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
68	04.01.02.2.02.03	Sosial Pelaksaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan	Kesejahteraan Sosial Terlaksananya Pelaksaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait	1	352.628.030	1 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0 kegiatan	0,00	0%	0%	2 kegiatan	0	20%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
69	04.01.02.2.03	Masyarakat Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kesejahteraan Masyarakat Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi hukum	100%	3.879.815.096	100%	54.427.658,00	100%	598.701.000	0%	71.799.600,00	0%	12%	100%	126.227.258	20%	3%	SEKRETARIAT DAERAH	\dashv
70	04.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	пикит Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	6	2.470.828.165	3 laporan	23.862.861,00	3,00	335.701.000,00	0 laporan	2.636.000,00	0%	1%	10 laporan	26.498.861	20%	1%	SEKRETARIAT DAERAH	
71	04.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	2	949.194.433	150 peserta	28.116.297,00	1,00	243.000.000,00	0 peserta	69.163.600,00	0%	28%	300 peserta	97.279.897	20%	10%	SEKRETARIAT DAERAH	
72	04.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan	2	459.792.498	2 dokumen	2.448.500,00	2,00	20.000.000,00	0 dokumen	0,00	0%	0%	4 dokumen	2.448.500	20%	1%	SEKRETARIAT DAERAH	
73	04.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Informasi Hukum Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	559.614.942	100%	6.000.550,00	100%	83.497.000	0%	3.787.200,00	0%	5%	100%	9.787.750	20%	2%	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		a RPJMD pada Tahun 2026		n Lalu (2023)	Tahun berja	a dan Anggaran RKPD Ilan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Cap dan Realisa RKPI	si Anggaran) (%)	RKPD s	inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi Ang s/d Tahu	aian Kinerja & ggaran RPJMD n 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	к	(5) Rp	к	(6) Rp	к	(7) Rp	K	(8) Rp	(9= 8/7 K	*100%) Rp		(10= 6+8) Rp	(11=10/	/5*100%) Rp	(12)	(13)
74		Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	2	559.614.942	1 kegiatan	6.000.550,00	1,00	83.497.000,00	0 kegiatan	3.787.200,00	0%	5%	2 kegiatan	9.787.750	20%	2%	SEKRETARIAT DAFRAH	
75	04:01	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Penyelengaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	100%	19.500.780.772	100%	132.183.856,00	100%	489.075.500	6%	82.911.500,00	6%	17%	75%	215.095.356	0%	1%	SEKRETARIAT DAERAH	
76	04.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	100%	6.070.612.933	100%	6.977.500,00	100%	58.050.000	0%	1.994.000,00	0%	3%	100%	8.971.500	#REF!	0%	SEKRETARIAT DAFRAH	
78	04.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2	5.237.569.979	1 kegiatan	6.977.500,00	1,00	47.750.000,00	0 kegiatan	1.994.000,00	0%	4%	2 kegiatan	8.971.500	40%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	·
79	04.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Operasional Tim Monitoring dan Evaluasi KUR	2	833.042.954	1 kegiatan	0,00	1,00	10.300.000,00	0 kegiatan	0,00	0%	0%	2 kegiatan	0	40%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
80	04.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	100%	8.211.236.235	100%	78.303.600,00	100%	236.792.500	0%	34.883.500,00	0%	15%	100%	113.187.100	40%	1%	SEKRETARIAT DAERAH	
81	04.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	2	3.918.831.014	3 dokumen	17.418.000,00	1,00	22.358.500,00	0 dokumen	8.391.000,00	0%	38%	6 dokumen	25.809.000	40%	1%	SEKRETARIAT DAFRAH	1
82	04.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6	2.769.632.234	3 dokumen	25.783.000,00	3,00	151.981.500,00	0 dokumen	25.292.500,00	0%	17%	6 dokumen	51.075.500	40%	2%	SEKRETARIAT DAFRAH	
83	04.01.03.2.02.03	Pengelolan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksaan Pembangunan	8	1.522.772.987	4 dokumen	35.102.600,00	4,00	62.452.500,00	0 dokumen	1.200.000,00	0%	2%	8 dokumen	36.302.600	40%	2%	SEKRETARIAT	
84	04.01.03.2.03			100%	4.190.624.569	100%	36.703.000.00	100%	167.819.000	90/	46.034.000,00	0%	27%	0%	82.737.000	0%	2%	DAERAH SEKRETARIAT	
85	04.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Barang dan Jasa Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan	400	960.029.762	200 Paket	11.003.000,00	200,00	54.469.000,00	0 Paket	8.876.000,00	0%	16%	0% 500 Paket	19.879.000	38%	2%	DAERAH SEKRETARIAT	
86	04.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara	Barang dan Jasa Terlaksananya Pengelolaan Layanan	400	2.344.597.569	200 Paket	25.700.000.00	200,00	66.400.000.00	100 Paket	37.158.000,00	0%	56%	500 Paket	62.858.000	38%	3%	DAERAH SEKRETARIAT	
87	04.01.03.2.03.03	Elektronik Pembinaan dan Advokasi Pengadaan	Pengadaan Secara Elektronik Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi	20	885.997.238	10 peserta	0,00	10.00	46.950.000.00	0 peserta	0,00	0%	0%	60 peserta	0	38%	0%	DAERAH SEKRETARIAT	
88	04.01.03.2.04	Barang dan Jasa Pemantauan Kebijakan Sumber Daya	Pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya Pemantauan Kebijakan	100%	1.028.307.035	100%	10.199.756,00	100%	26.414.000	25%	0,00	25%	0%	100%	10.199.756	13%	1%	DAERAH SEKRETARIAT	
89		Alam Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi	Sumber Daya Alam Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi										00/				201	DAERAH SEKRETARIAT	
	04.01.03.2.04.01	Kebijakan Energi dan Air	dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	24	590.055.560	12,00	9.791.756,00	12,00	10.724.000,00	0,00	0,00	25%	0%	24,00	9.791.756	40%	2%	DAERAH	ļ
90	4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,Kelauatan dan Perikanan	TerlaksananyanKoordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,Kelauatan dan Perikanan	24	226.676.180	12,00	0,00	12,00	5.390.000	0,00	0,00	25%	0%	24,00	0	40%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
91	4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	24	211.575.295	12,00	408.000,00	12,00	10.300.000	0,00	0,00	25%	0%	24,00	408.000	40%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.02	Sekretariat DPRD																	<u> </u>
		Program Penunjang Urusan	Cakupan pemenuhan penunjang kinerja															SEKRETARIAT	
1	4.02.01		perangkat daerah	90	91.353.318.455	18	19.708.488.811	100	18.270.663.691	17	4.118.552.994	17	23	17	4.118.552.994	19	5	DPRD	
	4.02.01.2.01	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu.	100	62.000.000	20	12.400.000	100	12.400.000	50	5.722.000	50	46	20	5.722.000	20	9	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	37.000.000	2	7.400.000	2	7.400.000	1	3.399.000	50	46	1	3.399.000	10	9	SEKRETARIAT DPRD	ļ
	4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	10	25.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	1	2.323.000	50	46	1	2.323.000	10	9	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daeral	Persentase pelaporan keuangan tepat waktu	100	10.575.142.500	20	1.816.334.324	100	2.115.028.500	22	497.571.945	22	24	22	497.571.945	22	5	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan PNS	70	10.547.642.500	14	1.810.834.324	14	2.109.528.500	3	496.589.445	21	24	3	496.589.445	4	5	SEKRETARIAT DPRD	ļ
	4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	5	12.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	10	10.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	1	982.500	50	49	1	982.500	10	10	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	5	5.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Da	Persentase aparatur yang berkinerja baik	100	1.605.000.000	10	139.500.000	100	321.000.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	300	300.000.000	0	-	20	20.000.000	0	-							SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	30	1.505.000.000	3	139.500.000	6	301.000.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100	11.040.392.000	18	2.245.394.200	100	2.208.078.400	19	348.523.250	19	16	19	348.523.250	19	3	SEKRETARIAT DPRD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kine	erja RPJMD pada Tahun 2026		n Lalu (2023)		ja dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KKPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realisa RKP	paian Kinerja asi Anggaran D (%)	RKPD s	inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi Ang s/d Tahur	ian Kinerja & garan RPJME 1 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	к	(5) Rp	ĸ	(6) Rp	V	(7) Rp		(8)	(9= 8/7	7*100%) Rp	K	(10= 6+8) Rp	(11=10/	5*100%) Rp	(12)	(13)
	4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen intalasi Listrik /Penerangan bangunan kantor	Tercapainya Kondisi Listrik yang baik di Kantor	30	162.945.000	6	32.598.132	6	32.589.000	1	1.953.000	17	6	1	1.953.000	3	- кр 1	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	30	175.360.000	6	21.443.000	6	35.072.000	0		0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistrik kantor	Jumlah Aktivitas	30	227.500.000	6	45.626.000	6	45.500.000	1	900.000	17	2	1	900.000	3	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan pengada	Jumlah ATK	60	1.429.837.000	6	288.025.050	6	285.967.400	1	42.580.250	17	15	1	42.580.250	2	3	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang - Undangan	Meningkatnya Informasi melalui bahan bacaan dan Perundang-undangan	30	4.250.000.000	6	999.700.000	6	850.000.000	2	243.000.000	33	29	2	243.000.000	7	6	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan jasa penyediaan makanan dan minuman	55	2.544.750.000	11	348.536.000	11	508.950.000	3	45.600.000	27	9	3	45.600.000	5	2	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.09	Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi di luar kantor	30	2.250.000.000	6	509.466.018	6	450.000.000	1	14.490.000	17	3	1	14.490.000	3	1	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase pemenuhan prasarana dan prasarana pendukung kinerja	100	1.758.400.000	18	159.640.000	100	351.680.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	30	852.550.000	5	113.240.000	6	170.510.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantoi	30	905.850.000	6	46.400.000	6	181.170.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan pendukung	100	6.381.450.000	20	813.331.439	100	1.276.290.000	17	61.040.551	17	5	17	61.040.551	17	1	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan	30	2.259.000.000	6	308.388.639	6	451.800.000	1	33.223.551	17	7	1	33.223.551	3	1	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	30	495.000.000	6	99.000.000	6	99.000.000	1	22.000.000	17	22	1	22.000.000	3	4	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.04	Peyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	3.627.450.000	5	405.942.800	12	725.490.000	1	5.817.000	8	1	1	5.817.000	2	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dalam kondisi baik	100	5.094.215.265	15	587.382.438	100	1.018.843.053	23	33.700.000	23	3	23	33.700.000	23	1	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.01	Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	35	1.082.000.000	6	186.909.130	7	216.400.000	6	28.200.000	86	13	6	28.200.000	17	3	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor	60	2.920.215.265	8	250.163.308	12	584.043.053	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor	60	1.092.000.000	9	150.310.000	12	218.400.000	1	5.500.000	8	3	1	5.500.000	2	1	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Di	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100	53.342.260.190	20	13.359.646.410	100	10.668.452.038	2	3.132.170.248	2	29	2	3.132.170.248	2	6	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	70	50.301.333.440	14	12.699.889.410	14	10.060.266.688	3	3.132.170.248	21	31	3	3.132.170.248	4	6	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DP	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	750	1.500.000.000	150	377.550.000	150	300.000.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD	125	1.540.926.750	25	282.207.000	25	308.185.350	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	100	1.494.458.500	20	574.860.000	100	298.891.700	53	39.825.000	53	13	53	39.825.000	53	3	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/kab/kota	300	332.104.000	60	39.815.000	60	66.420.800	60	-	100	0	60	-	20	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	300	1.162.354.500	60	535.045.000	60	232.470.900	3	39.825.000	5	17	3	39.825.000	1	3	SEKRETARIAT DPRD	
2	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tersusun dan Terintegrasinya Program- program kerja DPRD untuk Melaksanakan fungsi Pengawasan, fungsi Pembentukan perda, dan Fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (Persen)	100	38.561.023.075	13	15.883.169.202	100	7.815.834.615	14	2.024.018.300	14	26	14	2.024.018.300	14	5	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan pembentukan perda dan peraturan DPRD yang sesuai regulasi	100	2.800.500.000	5	228.604.100	100	560.100.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	1	Peraturan DPKD	peraturan DPKD yang sesuai regulasi		1				1		1				l			UPKU	i .

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kine	rja RPJMD pada Tahun 2026		paian Kinerja RKPD s/d un Lalu (2023)		ja dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KKPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realisa RKP	paian Kinerja asi Anggaran D (%)	RKPD s	inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi Ang s/d Tahu	nian Kinerja & ggaran RPJMD n 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	-	/*100%)		(10= 6+8)		5*100%)	(12)	(13)
	4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Tersusunya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima	. К 20	Rp 81.677.250	0	Rp -	- К 4	Rp 16.335.450	0	Rp -	К	Rp	К	Rp	К	Rp	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.02	Pembahansan Rancangan Perda	(RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD). Tersusunya dan terintergrasinya program program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana	20	2.800.500.000	1	228.604.100	4	560.100.000	0		0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Tahunan (RKPD). Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	100	2.159.865.000	20	431.391.000	100	431.973.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Tersusunya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	30	314.490.000	6	62.811.000	6	62.898.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	30	314.490.000	6	62.811.000	6	62.898.000	0		0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Tersusunya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	30	456.430.000	6	91.171.000	6	91.286.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Tersusunya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	30	456.430.000	6	91.178.000	6	91.286.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Tersusunya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPIM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	45	618.025.000	9	123.420.000	9	123.605.000	0	-	0	0	0	-	0	Ō	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersusun dan terintegrasinya program- program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana lima tahunan (RPM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	100	518.150.000	4	20.676.000	100	103.630.000	60	61.529.000	60	59	60	61.529.000	60	12	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.01	Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	50	103.630.000	10	20.676.000	10	20.726.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.02	Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	50	103.630.000	0	-	10	20.726.000	10	20.524.000	100	99	10	20.524.000	20	20	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.03	Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	50	103.630.000	0	-	10	20.726.000	10	20.524.000	100	99	10	20.524.000	20	20	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.04	Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	50	103.630.000	0	-	10	20.726.000	10	20.481.000	100	99	10	20.481.000	20	20	SEKRETARIAT DPRD	

		Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinei	rja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d ın Lalu (2023)		ja dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)		asi Anggaran D (%)		inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024		nian Kinerja & ggaran RPJMD n 2024 (%)	Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		7*100%)		(10= 6+8)		(5*100%)	(12)	(13)
	` '	1-7		K	Rp	K	Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp	` ′	,
	4.02.02.2.03.05	Pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	50	103.630.000	0	-	10	20.726.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase layanan peningkatan kapasitas DPRD	100	7.601.350.000	13	2.716.059.003	100	1.520.270.000	6	106.794.000	6	7	6	106.794.000	6	1	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Tersusunya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPIM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	25	5.250.000.000	5	2.442.082.753	5	1.050.000.000	1	106.794.000	20	10	1	106.794.000	4	2	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersusunya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	30	975.000.000	0	-	6	195.000.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersusunya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPIM) manjun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	30	1.376.350.000	6	273.976.250	6	275.270.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Cakupan pokir yang terealisasi	100	4.585.763.750	18	976.139.500	100	917.152.750	3	26.035.000	3	3	3	26.035.000	3	1	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Tersusunya dan terintergrasinya program=program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	180	1.150.000.000	32	278.177.500	36	230.000.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD	Tersusunya dan terintergrasinya program=program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	5	135.763.750			1	27.152.750	1	26.035.000	100		1		20		SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Tersusunya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RRPD).	15	3.300.000.000	3	697.962.000	3	660.000.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terintergrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD.	100	21.413.544.325	20	11.510.299.599	100	4.282.708.865	18	1.829.660.300	18	43	18	1.829.660.300	18	9	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tu	Tersusunya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi	140	21.113.544.325	28	11.451.139.599	28	4.222.708.865	4	1.819.660.300	14	43	4	1.819.660.300	3	9	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musya	Tersusunya dan terintergrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi	60	300.000.000	12	59.160.000	12	60.000.000	3	10.000.000	25	17	3	10.000.000	5	3	SEKRETARIAT DPRD	
	1	 							1									Daniel lake	
	05.01	Perencanaan	I	100%	50.575.576.691	i	l	l	5.852.139.800	i	910.923.688	1	l	ı	ı	l	l	Bappelitbang	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kine	rja RPJMD pada Tahun 2026		ın Lalu (2023)		a dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realisa RKP		RKPD :	inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	s/d Tahur	garan RPJMD 1 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	К	(5) Rp	К	(6) Rp	К	(7) Rp	К	(8) Rp	(9= 8/7 K	*100%) Rp	К	(10= 6+8) Rp	(11=10/ K	5*100%) Rp	(12)	(13)
1	05.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	90%	18.959.936.687	90	7.389.928.474	90	3.920.420.800	#DIV/0!	707.337.678	#DIV/0!	18,04	#DIV/0!	707.337.678	#DIV/0!	3,7	Bappelitbang da	
	05.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan penganggran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100	183.013.000	100	57.386.600	100	24.900.000	50,00	18.120.000	50,00	72,77	50,00	18.120.000	50	9,90	Bappelitbang da	
	05.01.01.2.01.0 L	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renja	10	31.310.000	4	8.050.600	2	7.400.000	1	5.500.000	50,00	74,32	1	5.500.000	10	17,57	Bappelitbang da	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD	5	19.156.000	2	8.212.000	1	2.500.000	0,5	1.680.000	50,00	67,20	0,5	1.680.000	10	8,77	Bappelitbang da	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	5	18.524.000	2	8.212.000	1	2.500.000	0,5	1.680.000	50,00	67,20	0,5	1.680.000	10	9,07	Bappelitbang da Bappelitbang	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	jumlah dokumen DPA-SKPD	5	24.976.000	2	8.212.000	2	2.500.000	1	1.680.000	50,00	67,20	1	1.680.000	20	6,73	da Bappelitbang	
		DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunaan Laporan	jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	5	24.800.000	2	8.212.000	1	2.500.000	0,5	1.680.000	50,00	67,20	0,5	1.680.000	10	6,77	da	
	5.01.01.2.01.06	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	40.122.000	4	8.304.000	1	5.000.000	0,5	4.100.000	50,00	82,00	0,5	4.100.000	5	10,22	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan LAKIP SKPD	5	24.125.000	2	8.184.000	1	2.500.000	0,5	1.800.000	50,00	72,00	0,5	1.800.000	10	7,46	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	13.718.695.570	100	4.347.553.156	100	3.048.639.800	60,29	551.320.478	60,29	18,08	60,2941176	551.320.478	60,2941176	4,02	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.02.01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	13.626.433.570	28	4.319.479.956	14	3.043.139.800	4	547.030.478	28,57	17,98	4	547.030.478	5,71428571	4,01	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan SKPD	5	27.580.000	2	8.260.400	1	2.500.000	0	1.900.000	0,00	76,00	0	1.900.000	0	6,89	Bappelitbang da	
	5.01 .01.2.05.09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keungan Bulanan /Triuwan /Semester SKPD	90	37.412.000	36	11.668.400	18	2.000.000	16	1.830.000	88,89	91,50	16	1.830.000	17,7777778	4,89	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	5	27.270.000	2	8.144.400	1	1.000.000	0,5	560.000	50,00	56,00	0,5	560.000	10	2,05	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik	100%	285.000.000	100	158.846.500	100	50.000.000	100	50.000.000	100,00	100,00	100	50.000.000	100	17,54	Bappelitbang da	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Seragam Olahraga	50	125.000.000	0	-	0	0	0	0	0,00	0,00	0		0		Bappelitbang da	
	5.01 .01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	30	200.000.000	22	158.846.500	19	50.000.000	19	50.000.000	100,00	100,00	19	50.000.000	63,3333333	25,00	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	100%	2.544.473.117	200	1.217.369.175	100	576.671.000	25,00	74.897.200	25,00	12,99	25	74.897.200	25	2,94	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktfitas	5	159.661.457	2	49.982.000	1	25.000.000	1	25.000.000	100,00	100,00	1	25.000.000	20	15,66	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK	60	752.490.057	24	243.592.000	12	108.671.000	3	3.000.000	25,00	2,76	3	3.000.000	5	0,40	Bappelitbang da	
	5.01 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	60	428.484.421	24	180.000.000	12	132.000.000	3	9.000.000	25,00	6,82	3	9.000.000	5	2,10	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makan dan Minum	55	56.111.055	22	22.000.000	11	11.000.000	2	2.000.000	18,18	18,18	2	2.000.000	3,64	3,56	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi Diluar Kantor	60	1.147.726.127	24	721.795.175	12	300.000.000	3	35.897.200	25,00	11,97	3	35.897.200	5	3,13	Bappelitbang da	
	5.01 . 01 . 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Prasarana Pendukung kinerja	100%	34.000.000	200	830.518.000	100	75.000.000	100	0	100,00	0,00	100	-	10000	0,00	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap	30	34.000.000	18	830.518.000	6	75.000.000	0	0	0,00	0,00	0	-	0	0,00	Bappelitbang da	
	5.01 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesentase Pemenuhan Layanan Pendukung	100%	1.424.995.000	200	475.000.000	100	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00	Bappelitbang da	
	5.01 .01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan Dan Kendaraan Dinas	34	1.250.000.000	8	475.000.000	0		0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0,00	0,00	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Barang Milik Daerah Yang Dalam Kondisi Baik	100%	769.760.000	200	303.255.043	100	145.210.000	4,76	13.000.000	4,76	8,95	4,76190476	13.000.000	4,76190476	1,69	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	25	709.110.000	10	292.235.043	5	133.850.000	1	13.000.000	20,00	9,71	1	13.000.000	4	1,83	Bappelitbang da	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	20	60.650.000	6	11.020.000	16	11.360.000	0	0	0,00	0,00	0	-	0	0,00	Bappelitbang da	
	5.01 . 02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan Konsistensi Dokumen Perencanaan terhadap Dokumen Penganggaran	100%	15.939.179.519	200	2.488.188.812	100	1.239.361.000	100	124.754.810	100,00	10,07	100	124.754.810	100	0,78	Bappelitbang da	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	rja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d n Lalu (2023)		a dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realisa RKP	paian Kinerja asi Anggaran D (%)		nerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi Ang s/d Tahur		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		7*100%)		(10= 6+8)	(11=10/	5*100%)	(12)	(13)
	5.01 . 02 . 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	K 100%	Rp 8.736.127.618	К 200	Rp 1.582.433.500	100	Rp 982.659.000	K 21,43	Rp 119.754.810	K 21,43	Rp 12,19	K 21,4285714	Rp 119.754.810	K 21,4285714	Rp 1,37	Bappelitbang	
	5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen LKPJ Bupati Pertahun	5	1.058.427.934	6	294.353.600	1	41.664.000	0,5	15.950.000	50,00	38,28	0,5	15.950.000	10	1,51	Bappelitbang da	
	5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Terlaksanany Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah	5	1.481.760.339	6	143.093.600	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0	0,00	Bappelitbang da	
	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Musrenbang RKPD Yang Dilaksanakan	5	1.643.589.723	2	407.542.300	2	287.997.000	0,5	57.493.010	25,00	19,96	0,5	57.493.010	10	3,50	Bappelitbang da	
	5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya LAKIP Kabupaten Pertahun	5	1.022.312.818	6	184.082.200	1	66.647.000	0,5	20.319.200	50,00	30,49	0,5	20.319.200	10	1,99	Bappelitbang da	
	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedia nya Dokumen Perencanaan ; RKPD Yang Telah Ditetapkan Oleh PerKada	10	2.082.250.649	12	553.361.800	3	586.351.000	0	25.992.600	0,00	4,43	0	25.992.600	0	1,25	Bappelitbang da	
	5.01 . 02 . 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Data Dan informasi Pembangunan Daerah	100%	2.716.647.087	200	374.637.850	100	89.158.000	0	0	0,00	0,00	0	-	0	0,00	Bappelitbang da	
	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunaan Daerah	Tersedia nya Sistem Data Dan Statistik Yang terintrergrasi	5	1.101.851.769	6	221.517.800	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0	0,00	Bappelitbang da	
	5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik dalam Manyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	5	785.820.840	6	153.120.050	39	89.158.000	0	0	0,00	0,00	0	-	0	0,00	Bappelitbang da	
	5.01 . 02 . 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsisitensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100%	2.821.433.199	200	531.117.462	100	167.544.000	0	5.000.000	0,00	2,98	0	5.000.000	0	0,18	Bappelitbang da	
	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Usulan DAK	5	852.954.632	4	210.044.131	1	56.697.000	0	2.000.000	0,00	3,53	0	2.000.000	0	0,23	Bappelitbang da	
	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan DAK Fisik dan Evaluasi RKPD, Evaluasi RENSTRA, Evaluasi RPJMD	10	1.968.478.567	13	321.073.331	2	110.847.000	0	3.000.000	0,00	2,71	0	3.000.000	0	0,15	Bappelitbang da	
	5.01 . 03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Konsistensi Keselarasan Program Prioritas Daerah Terhadap Program Prioritas Pusat	95%	15.676.460.485	190	2.479.028.476	85	692.358.000	85	78.831.200	100,00	11,39	85	78.831.200	8947,36842	0,50	Bappelitbang da	
	5.01 . 03 . 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata Rata capaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	70%	8862167840	140	1.310.622.976	70	351.060.000	14	32.516.200	20,00	9,26	14	32.516.200	20	0,37	Bappelitbang da	
	5.01 .03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen RAD SDGS	5	858.792.804	5	208.613.100	1	84.642.000	0	10.425.200	0,00	12,32	0	10.425.200	0	1,21	Bappelitbang da	
	5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Koordinasi Lintas Sektoral PDT Dan Transmigrasi	60	856.065.700	72	205.006.004	0		0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0	0,00	Bappelitbang da	
	5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksana Penaggulangan Kemiskinan Daerah(LP2KD)	5	941.759.035	6	246.347.950	1	90.885.000	0	6.294.000	0,00	6,93	0	6.294.000	0	0,67	Bappelitbang da	
	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen RAN HAM	5	718894403	6	189.902.800	0		0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0	0,00	Bappelitbang da	
	5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Pelaksana RAD-PG	5	731.610.046	6	219.509.000	1	78.355.000	0	6.859.800	0,00	8,75	0	6.859.800	0	0,94	Bappelitbang da	
	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Koordinasi Lintas Sektoral Pemerintahan dan Sosial Budaya	60	811.082.701	72	241.244.122	12	97.178.000	3	8.937.200	25,00	9,20	3	8.937.200	5	1,10	Bappelitbang da	
	5.01 . 03 . 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata Rata Capaian Kinerja Bidang Perekonomian SDA (Sumber daya Alam)	70%	1.438.901.548	140	429.614.400	70	69.175.000	0,00	5.534.000	0,00	8,00	0	5.534.000	0	0,38	Bappelitbang da	
	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Updating Potensi Ekonomi Daerah	5	719.882.879	6	214.765.400	1	69.175.000	0	5.534.000	0,00	8,00	0	5.534.000	0	0,77	Bappelitbang da	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kine	rja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d ın Lalu (2023)	Tahun berja	a dan Anggaran RKPD Ilan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realisa	paian Kinerja nsi Anggaran D (%)		nerja dan Anggaran s/d Tahun 2024		ian Kinerja & garan RPJMD 1 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9= 8/7	/*100%)		(10= 6+8)		5*100%)	(12)	(13)
	5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Keoordinasi Lintas Sektoral Keriasama Dunia Usaha dan Lembaga	K	719.018.669	<u>к</u> 0	Rp -	к	Rp 0	к	Rp 0	#DIV/0!	#DIV/0!	К	Rp -	κ 0	0,00	Bappelitbang	
	5.01.03.2.03	Daerah Bidang SDA Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata Rata Capaian Kinerja Bidang Insfatruktur Dan Kewilayahan	70%	5.375.391.097	140	738.791.100	70	272.123.000	17,5	40.781.000	25,00	14,99	17,5	40.781.000	25	0,76	Bappelitbang	
	5.01 .03.2.03.0	Asistensi Penyusunan Dokumen 2 Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Koordinasi Lintas Sektoral Program air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	60	1.027.066.230	72	262.917.800	12	101.624.000	3	15.072.600	25,00	14,83	3	15.072.600	5	1,47	Bappelitbang da	
	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Koordinasi Bidang Pembangunan Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah	60	877.630.047	72	259.392.900	12	101.421.000	3	19.519.600	25,00	19,25	3	19.519.600	5	2,22	Bappelitbang da	
	5.01.03.2.03.0	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4	400.000.000	0	-	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-	0	0,00	Bappelitbang da	
	5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Keoordinasi Bidang Kewilayahan	60	761.455.947	72	216.480.400	12	69.078.000	3	6.188.800	25,00	8,96	3	6.188.800	5	0,81	Bappelitbang da	
-	Badan Pengelo	a Keuangan dan Aset Daerah		1												1		1	\vdash
	5.02	URUSAN FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN		100	109.383.162.245	293	175.776.562.263	100	176.787.713.563	3	6.123.229.164	3	3	296	181.899.791.427	59	2	BPKAD	
А	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	90	20.962.141.305	186	12.419.967.732	440	18.014.956.337	11	2.268.384.701	3	13	197	14.688.352.433	219	70	BPKAD	
- 1	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kineria Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kineria	100	67.000.000	13	14.988.950	21	15.500.000			-	-	13	14.988.950	13	22	BPKAD	
1	5.02.01.2.01.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Renia	5	10.000.000	1	1.934.650	1	2,000,000	_	0	_		1	1.934.650	20	19	BPKAD	
Ė	5.02.01.2.01.0	Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	8	8.000.000	0	1.934.650	2	2.000.000	-	0	-	-	-	1.934.650	-	24	BPKAD	
	5.02.01.2.01.03	RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8	8.000.000	0	1.934.650	2	2.000.000	-	0	-	-	-	1.934.650	-	24	BPKAD	
	5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	8	8.000.000	0	1.934.650	2	2.000.000	-	0	-	-	-	1.934.650	-	24	BPKAD	
	5.02.01.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8	8.000.000	0	1.934.650	2	2.000.000	1	0	-	-	1	1.934.650	-	24	BPKAD	
2	5.02.01.2.01.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	60	25.000.000	12	3.381.050	12	3.500.000	-	0	-	-	12	3.381.050	20	14	BPKAD	
	5.02.01.2.01.0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	4	8.000.000	0	1.934.650	1	2.000.000	-	0		-	-	1.934.650	-	24	BPKAD	<u> </u>
II	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100	10.407.848.167	18	10.407.848.167	100	16.559.588.337	3	2.096.238.701	3	13	21	12.504.086.868	21	120	BPKAD	
3	5.02.01.2.02.03	Penyadisan Gaji dan	waktu Jumlah Layanan Pembayaran Gaji,Tunjangan PNS, Juran Jaminan Kesehatan ASN, Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dan Juran Tapera ASN Kabupaten Pesisir Barat	70	10.403.348.517	14	10.403.348.517	14	16.554.588.337	3	2.096.238.701	21	13	17	12.499.587.218	24	120	BPKAD	
4	5.02.01.2.02.09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5	1.932.100	1	1.932.100	1	2.000.000	-	-	-		1	1.932.100	20	100	BPKAD	
5	5.02.01.2.02.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	10	1.961.000	2	1.961.000	2	2.000.000	-	-	-	-	2	1.961.000	20	100	BPKAD	
6	5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	606.550	1	606.550	1	1.000.000	-	-	-	-	1	606.550	20	100	BPKAD	
Ш	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yg berkinerja baik	100	1.200.000.000	23	399.280.000	100	100.000.000	-	-	-	-	23	399.280.000	23	33	BPKAD	
7	5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	126	1.200.000.000	23	399.280.000	25	100.000.000	-	-	-	-	23	399.280.000	18	33	BPKAD	
IV	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan	100	6.138.000.000	48	1.026.668.215	100	808.330.000	4	69.973.000	4	9	52	1.096.641.215	52	18	BPKAD	1
9	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	prasarana pendukung kinerja Jumlah Aktivitas	5	220.000.000	1	24.700.000	1	25.000.000	-	-	-	-	1	24.700.000	20	11	BPKAD	-
10	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah ATK, Barang Cetakan dan	60	2.500.000.000	12	494.393.200	12	326.796.000	3	27.449.000	25	8	15	521.842.200	25	21	BPKAD	
		Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan	Penggandaan			42	** 000		68.000.000									DD//**	\vdash
11	5.02.01.2.06.0	Peraturan Perundang- undangan	Jumlah SKHU	50	668.000.000	12	41.800.000	12	68.000.000		-	-	-	12	41.800.000	24	6	BPKAD	ı

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	rja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d n Lalu (2023)	Tahun berja	a dan Anggaran RKPD Ilan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realisa	aian Kinerja Isi Anggaran D (%)		nerja dan Anggaran s/d Tahun 2024		nian Kinerja & ggaran RPJMD n 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9= 8/7	*100%)		[10= 6+8]	(11=10/	5*100%)	(12)	(13)
12	5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaaan Makanan dan Minuman	К 55	Rp 1.250.000.000	11	Rp 166.150.000	K 11	Rp 188.534.000	K 1	Rp 42.524.000	К 9	Rp 23	K 12	Rp 208.674.000	K 22	Rp 17	BPKAD	
13	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	1.500.000.000	12	299.625.015	12	200.000.000	-			_	12	299.625.015	20	20	BPKAD	
v	5.02.01.2.07	Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan peralatan dan mesin	100	240.000.000	6	171.693.121	100	121.200.000	-	-	-	-	6	171.693.121	6	72	BPKAD	
	5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	240.000.000	6	171.693.121	8	121.200.000	-	-	-	-	6	171.693.121	55	72	BPKAD	
VI	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100	2.074.380.000	65	264.756.550	100	236.230.000	3	76.208.000	3	32	68	340.964.550	68	16	BPKAD	
15	5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	30	1.915.000.000	5	198.000.000	7	228.000.000	-	72.000.000	-	32	5	270.000.000	17	14	BPKAD	
16	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	159.380.000	60	66.756.550	12	8.230.000	3	4.208.000	25	51	63	70.964.550	105	45	BPKAD	
VI	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100	1.074.913.138	19	134.732.729	19	174.108.000	1	25.965.000	5	15	20	160.697.729	20	15	BPKAD	
17	5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	35	696.233.138	7	121.243.729	7	156.258.000	1	25.965.000	14	17	8	147.208.729	23	21	BPKAD	
19	5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	60	378.680.000	12	13.489.000	12	17.850.000	-	-	-	-	12	13.489.000	20	4	BPKAD	
В	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan tata kelola keuangan daerah sesuai aturan (Persen)	100	77.405.387.090	103	160.812.566.809	100	157.435.781.226	17	3.684.567.463	17	2	120	164.497.134.272	120	213	BPKAD	i
ı	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Dokumen penganggaran daerah tepat waktu	100	21.788.585.780	24	2.507.646.132	100	2.028.305.000	17	348.564.600	17	17	41	2.856.210.732	41	13	BPKAD	
20	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	10	2.456.983.671	2	287.800.689	2	214.640.000	-	58.175.000	-	27	2	345.975.689	20	14	BPKAD	
21	5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	10	2.532.922.000	2	300.690.800	2	214.640.000	-	-	-	-	2	300.690.800	20	12	BPKAD	
22	5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD Kabupaten Pesisir Barat	5	552.150.300	1	42.321.100	1	43.110.000	-	-	-	-	1	42.321.100	20	8	BPKAD	
23	5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD Kabupaten Pesisir Barat	5	552.150.300	1	42.835.500	1	43.110.000	-	-	-	-	1	42.835.500	20	8	BPKAD	
24	5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD Kabupaten Pesisir Barat	5	1.084.959.009	1	42.959.400	1	43.195.000	1	39.355.000	100	91	2	82.314.400	40	8	BPKAD	
25	5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPPA SKPD Kabupaten Pesisir Barat	5	1.116.925.000	1	42.372.300	1	43.195.000	-	-	-	-	1	42.372.300	20	4	BPKAD	
26	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan	Jumlah dokumen APBD Kabupaten Pesisir Barat	10	5.250.090.000	2	687.627.400	2	591.430.000	1	239.705.000	50	41	3	927.332.400	30	18	BPKAD	
27	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Barat	10	5.250.840.000	2	721.285.300	2	591.480.000		-	-		2	721.285.300	20	14	BPKAD	
28	5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen Regulasi Bidang Anggaran	10	2.991.565.500	12	339.753.643	2	243.505.000	-	11.329.600	-	5	12	351.083.243	120	12	BPKAD	
Ш	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan tata kelola keuangan daerah sesuai aturan (Persen)	100%	5.844.110.600	60	1.831.819.965	100	1.389.771.750	14	199.771.474	14	14	74	2.031.591.439	7.437	35	BPKAD	
29	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi Kasda, Rekap Dokumen SP2D dan Daftar Gaji Pemerintah Daerah	180	1.749.125.000	36	656.932.596	36	467.023.000	3	113.132.724	8	24	39	770.065.320	22	44	BPKAD	
	5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Angkaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	8	290.110.000	0	126.261.550	2	72.527.500	-	9.278.750	-	13	-	135.540.300	-	47	BPKAD	
30	5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Laporan Sinkronisasi Pendapatan Daerah	60	1.829.545.600	12	311.547.689	12	367.685.000	3	37.590.000	25	10	15	349.137.689	25	19	BPKAD	
31	5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Laporan Konsinyering dan Rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan	60	1.975.330.000	12	351.837.500	12	393.325.000	3	34.200.000	25	9	15	386.037.500	25	20	BPKAD	
	5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	280	356.845.000	0	385.240.630	70	89.211.250	-	5.570.000	-	6	-	390.810.630	-	110	BPKAD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	rja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d n Lalu (2023)		a dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realisa RKP	aian Kinerja si Anggaran D (%)	RKPD s	nerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi Ang s/d Tahu		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		'*100%)		(10= 6+8)		5*100%)	(12)	(13)
III	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan tata kelola keuangan daerah sesuai aturan (Persen)	100	Rp 4.684.237.600	К 6	Rp 695.823.737	100	Rp 348.024.000	К 8	Rp 26.240.630	К 8	Rp 8	K 14	722.064.367	K 14	Rp 15	BPKAD	
32	5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi APBD Per Semester	10	362.455.000	2	189.768.064	2	125.635.000	-	26.240.630	-	21	2	216.008.694	20	60	BPKAD	
33	5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	5	2.990.422.000	1	319.315.710	1	119.933.000	-	-	-		1	319.315.710	20	11	BPKAD	
34	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	10	1.180.175.000	2	186.739.963	2	102.456.000	2	-	100	-	4	186.739.963	40	16	BPKAD	
35	5.02.02.2.03.09	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah LaporanKoordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4	151.185.600	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	25	-	BPKAD	
IV	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pemenuhan penunjang pengelolaan keuangan daerah	100	45.088.453.110	13	155.603.149.925	100	153.533.705.476	2	3.109.990.759	2	2	15	158.713.140.684	15	352	BPKAD	
38	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Belanja Tak Terduga	60	33.500.000.000	12	355.000.000	12	9.000.000.000	-	-	-	-	12	355.000.000	20	1	BPKAD	
39	5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terkelolanya Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Pesisir Barat	5	11.588.453.110	1	155.248.149.925	1	144.533.705.476	-	3.109.990.759	-	2	1	158.358.140.684	20	1.367	BPKAD	
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Cakupan penggunaan SIPD dalam keuangan daerah	100	543.900.000	0	174.127.050	100	135.975.000	-	-	-	-		174.127.050	-	32	BPKAD	
	5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	280	543.900.000	0	174.127.050	78	135.975.000	-	-	-	-	-	174.127.050	-	32	BPKAD	
С	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan tata kelola barang milik daerah	100	11.015.633.850	4	2.544.027.722	100	1.336.976.000		170.277.000		13	4	2.714.304.722	4	25	BPKAD	
-	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	sesuai aturan (Persen) Cakupan pencatatan aset daerah	100	11.015.633.850	4	2.544.027.722	100	1.336.976.000	-	170.277.000	-	13	4	2.714.304.722	4	25	BPKAD	
40	5.02.03.2.01.01		Jumlah Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021	5	3.171.618.800	1	220.773.587	1	193.581.000	-	8.195.000	-	4	1	228.968.587	20	7	BPKAD	
41	5.02.03.2.01.05	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur BMD Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat	5	320.087.200	1	733.604.651	1	351.033.800	-	54.716.000	-	-	1	788.320.651	20	246	BPKAD	
42	5.02.03.2.01.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen LBMD Pemerintah Daerah dan LBMD SKPD	10	4.068.690.000	2	219.599.922	2	166.258.000	-	13.330.000	-	8	2	232.929.922	20	6	BPKAD	
	5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	2.854.733.850	1	950.825.050	1	475.977.200	-	61.450.000	-	13	1	1.012.275.050	20	35	BPKAD	
	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4	600.504.000	0	419224512	1	150.126.000	-	32.586.000	-	22	-	451.810.512	-	75	BPKAD	
	5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	4.445.448.000	1	629.940.000	1	953.877.000	1	950.825.050	100	100	2	1.580.765.050	40	36	BPKAD	
	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4	1.810.104.000	0	355679738	1	452.526.000	1	419.224.512	100	93	1	774.904.250	25	43	BPKAD	
<u> </u>	Badan Pendapat	tan Daerah														-			
1	occan r enuapai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	19.956.686.371	88	13.027.341.515	90	4.447.407.100	23,26	557.071.145	26%	13%	23,26	13.584.412.660	26	68%	BAPENDA	
2		Perencanaan, penganggaran, dan	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	90%	74.777.320	90	38.701.260	90	12.400.000	45,00	5.020.800	50%	40%	45	43.722.060	50	58%	BAPENDA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kine	rja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d n Lalu (2023)		a dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)		si Anggaran D (%)	RKPD s	nerja dan Anggaran //d Tahun 2024	Realisasi Ang s/d Tahu	nian Kinerja & ggaran RPJMD n 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9= 8/7	*100%)		10= 6+8)	(11=10/	/5*100%)	(12)	(13)
3		Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	10	Rp 38.516.600	. К 2	22.806.570	К 2	7.400.000	1	Rp 3.324.000	K 50%	Rp 45%	K 1	Rp 26.130.570	K	Rp 68%	BAPENDA	
<u> </u>		Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan	saman Bokumen Kenstra dan Kenja	10		-		-		-				_					
4		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10	36.260.720	2	15.894.690	2	5.000.000	1	1.696.800	50%	34%	1	17.591.490	0	49%	BAPENDA	
5		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	13.029.251.080	90	4.931.360.216	90	2.272.907.100	20,00	359.246.095	22%	16%	20,00	5.290.606.311	22	41%	BAPENDA	
6		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	60	12.947.010.280	14	4.912.963.906	14	2.267.407.100	4	359.246.095	29%	16%	4	5.272.210.001	0	41%	BAPENDA	
7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	13.141.000	1	7.756.400	1	2.500.000	0	0	0%	0%	-	7.756.400	-	59%	BAPENDA	
8		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	10	12.181.000	2	6.872.400	2	2.000.000	0	0	0%	0%	-	6.872.400	-	56%	BAPENDA	
9		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	56.918.800	1	3.767.510	1	1.000.000	0	0	0%	0%	-	3.767.510	-	7%	BAPENDA	
10		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	90%	495.000.000	90	125.000.000	90	100.000.000	0,00	-	0%	0%	-	125.000.000	-	25%	BAPENDA	
11		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	60	495.000.000	15	317.000.000	10	100.000.000	0	0	0%	0%	-	-	-	0%	BAPENDA	
12		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan	90%	2.104.918.200	90	1.404.032.916	90	393.192.200	20,20	60.382.500	22%	15%	20,20	60.382.500	22	3%	BAPENDA	
13		Penyediaan Komponen Instalasi	Pendapatan Daerah	60	38.100.000	12	7.620.000	0		0	0	0%	0%				0%	BAPENDA	
\vdash		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik								0	0%				<u> </u>			
14		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan Propaganda/Pameran	5	181.000.000	3	72.900.000	1	25.000.000	0	0	0%	0%	-	-	-	0%	BAPENDA	
15		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK	60	411.818.200	12	310.095.140	12	85.088.200	3	34.275.300	25%	40%	3	34.275.300	0	8%	BAPENDA	
16		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	60	100.000.000	10	34.980.000	12	12.000.000	3	2.000.000	25%	17%	3	2.000.000	0	2%	BAPENDA	
17		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaaan Makanan dan Minuman	55	164.000.000	11	64.448.000	12	21.104.000	2	3.800.000	17%	18%	2	3.800.000	0	2%	BAPENDA	
18		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	1.210.000.000	12	913.989.776	12	250.000.000	3	20.307.200	25%	8%	3	20.307.200	0	2%	BAPENDA	
19		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	40	1.237.431.539	26	396.790.000	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-		-	0%	BAPENDA	
20		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap	40	1.237.431.539	26	396.790.000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		•	-	0%	BAPENDA	
21		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	90%	1.611.420.000	84	656.406.682	90	182.540.000	22,50	50.100.000	25%	27%	22,50	50.100.000	25	3%	BAPENDA	
22		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	214.820.000	10	24.040.682	0	-	0	0	0%	0%	-	-	-	0%	BAPENDA	
23		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	30	1.342.500.000	6	617.500.000	12	180.000.000	3	49.000.000	25%	27%	3	49.000.000	0	4%	BAPENDA	
24		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	54.100.000	12	14.866.000	12	2.540.000	3	1.100.000	25%	43%	3	1.100.000	0	2%	BAPENDA	
25		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	90%	1.403.888.232	83	485.138.780	90	139.650.000	47,65	16.500.000	53%	12%	47,65	16.500.000	53	1%	BAPENDA	
26		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	15	854.660.782	3	340.993.290	7	124.650.000	4	16.500.000	57%	13%	4	16.500.000	0	2%	BAPENDA	
27		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lanangan	Jumlah Peralatan Kantor	60	10.727.450	12	2.145.490	0	-	0	0	0%	0%	-	-	-	0%	BAPENDA	
28		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	60	351.000.000	10	10.500.000	0	-	0	0	#DIV/0!	0%	-	-	-	0%	BAPENDA	
29		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60	150.000.000	12	15.000.000	0	-	0	0	0%	0%	-	-	-	0%	BAPENDA	
30		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	60	37.500.000	12	116.500.000	10	15.000.000	5	0	50%	0%	5	15.000.000	0	40%	BAPENDA	
31		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah (Persen)	90%	7.285.650.960	83	4.989.911.661	90	1.346.717.800	7,50	65.821.750	8%	5%	7,50	65.821.750	8	1%	BAPENDA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerj	a RPJMD pada Tahun 2026		n Lalu (2023)		a dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	RKP	si Anggaran D (%)	RKPD :	inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi Ang s/d Tahu	aian Kinerja & ggaran RPJMD In 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	<u> </u>	(5)		(6)		(7)		(8)	(9= 8/7			(10= 6+8)		/5*100%)	(12)	(13)
32		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Anggaran Pendapatan TA selanjutnya, Terlaksananya Penyusunan Angaran Perubahan Pendapatan Tahun Angaran Berjalan	К 90%	7.285.650.960	K 83	Rp 4.989.911.661	- к 90	Rp 1.346.717.800	7,50	Rp 65.821.750	К 8%	Rp	7,50	Rp 65.821.750	К 8	Rp 1%	BAPENDA	
33		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan Asli Daerah	10	907.882.440	1	30.651.600	0	-	0	-	0%	0%	-	-	-	0%	BAPENDA	
34		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	0%	-	0	400.283.156	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-		-	0%	BAPENDA	
34		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0%	-	0	498.282.422	1	97.454.000	0	0	0%	0%	-	-	-	0%	BAPENDA	
35		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Dokumen	5	894.590.000	1	913.830.696	1	108.430.000	0	17.302.250	0%	16%	-	17.302.250	-	2%	BAPENDA	\sqcup
36		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Cakupan Pengelolaan Pajak Daerah	55	4.443.108.000	9	1.699.914.196	9	188.000.000	0	0	0%	0%	-	-	-	0%	BAPENDA	
37		Penagihan Pajak Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi	Jumlah Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan	60	1.027.658.960	12	506.694.750 572.386.391	12	158.455.900 142.462.500	0	18.464.000 19.977.000	8% 0%	12%	-	18.464.000 19.977.000		2% 14%	BAPENDA BAPENDA	
39		Daerah Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	60	780.204.000	12	367.868.450	12	651.915.400	2	10.078.500	17%	2%	2	10.078.500	0	1%	BAPENDA	\vdash
+		Daciali	L			ı		ı	I .	1		1				1	1	-	$\vdash \vdash \vdash$
1		Kepegawaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah	95,00	12.730.162.338	90,00	16.492.055.124	90,00	2.448.897.000	16,19	432.926.390	16,19	17,68	16,19	432.926.390	16,19	3,40		
	5.03 . 01 . 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95,00	47.000.000	90,00	81.776.200	90,00	14.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5.03 . 01 . 2.01 .	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	22.000.000	40	36.877.600	2	7.400.000	-	-	-	-		-	-	-	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.01 .	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	8	7.000.000	-	1.500.000	2	1.500.000	-	-	-	,	-	-	-	-	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.01 .	Koordinasi dan penyususnan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	8	7.000.000	-	499.950	2	500.000	-	-	-		-	-	-	-	BKPSDM	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	25.000.000	32	44.898.600	4	5.000.000	-	-	-	1	1	-	-	-	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	95,00	9.176.561.900	90,00	12.188.262.718	90,00	2.096.608.000	14,81	398.435.809	14,81	19,00	14,81	398.435.809	14,81	4,34		
	5.03 . 01 . 2.02 .	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	9.137.416.400	98	12.134.224.418	14	2.091.108.000	4	398.435.809	28,57	19,05	4	398.435.809	5,71	4,36	BKPSDM	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	16.423.000	8	22.438.500	1	2.500.000	-	-	-	-	-	-	_	-	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.02 .	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	13.602.500	16	17.958.100	12	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.02 .	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10	9.120.000	10	13.641.700	1	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95,00	1.974.977.370	90,00	2.719.993.027	90,00	160.469.000	21,74	18.707.700	21,74	11,66	21,74	18.707.700	21,74	0,95		
	5.03 . 01 . 2.06 .	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	125.000.000	6	150.247.000	1	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.06 .	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	293.560.070	85	406.379.100	12	40.469.000	3	8.731.700	25,00	21,58	3	8.731.700	5,00	2,97	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.06 .	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	79.261.200	94	105.600.000	10	12.000.000	2	3.000.000	20,00	25,00	2	3.000.000	3,33	3,78	BKPSDM	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	ja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d n Lalu (2023)		a dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Cap dan Realisa RKPI	si Anggaran D (%)		inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024		ian Kinerja & garan RPJMD 1 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9= 8/7			(10= 6+8)		5*100%)	(12)	(13)
	5.03 . 01 . 2.06 .	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kuniungan	К	Rp	K	Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp	K	Rp		
			Tamu	55	67.156.100	89	94.400.000	11	11.000.000	2	2.000.000	18,18	18,18	2	2.000.000	3,64	2,98	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.06 .	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	1.410.000.000	96	1.963.366.927	12	72.000.000	3	4.976.000	25,00	6,91	3	4.976.000	5,00	0,35	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa	95,00	1.080.602.700	90,00	1.145.500.000	90,00	132.000.000	25,00	15.000.000	25,00	11,36	25,00	15.000.000	25,00	1,39		
	5.03 . 01 . 2.08 .	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	1.080.602.700	85	1.145.500.000	12	132.000.000	3	15.000.000	25,00	11,36	3	15.000.000	5,00	1,39	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	95,00	451.020.368	90,00	356.523.179	90,00	45.420.000	-	782.881	-	1,72	-	782.881	-	0,17		
	5.03 . 01 . 2.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	336.391.010	8	322.735.179	1	36.900.000	-	782.881	-	2,12	-	782.881	-	0,23	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.09 .	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	114.629.358	2	33.788.000	12	8.520.000	-	-	-		-	-	-	-		
2	5.03 . 02	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan	13.376	12.595.706.700	18.821	7.416.622.974	1.019	1.177.025.000	687	67.910.400	67,42	5,77	687	67.910.400	5,14	0,54	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Managemen Kepegawaian Daerah Tercapainya Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	7.511	7.957.872.600	9.319	4.227.948.466	9	583.818.600	-	39.379.000	-	6,75	-	39.379.000	-	0,49	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.01 . 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	6.681	6.176.707.800	8.034	2.903.345.467	2	431.835.700	-	26.569.000	-	6,15	-	26.569.000	-	0,43		
	5.03 . 02 . 2.01 . 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	260	296.986.000	412	332.764.092	2	23.823.900	-	2.918.500	-	12,25	,	2.918.500	-	0,98		
	5.03 . 02 . 2.01 .	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	60	363.392.000	49	205.374.531	1	42.211.000	-	2.531.000	-	6,00	-	2.531.000	-	0,70	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.01 .	Pengelolaan Sistem Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	10	431.774.000	21	539.497.949	2	71.759.000	-	5.241.000	-	7,30	-	5.241.000	-	1,21	BKPSDM	
	10 5.03 . 02 . 2.01 .	Kepegawaian Pengelolaan Data Kepegawaian	Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data	500	689.012.800	803	246.966.427	2	14.189.000	_	2.119.500	_	14,94	_	2.119.500	_	0,31	BKPSDM	
	11 5.03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Kepegawaian Tercapainya Mutasi dan Promosi ASN	30	2.266.740.000	30	830.223.040	3	424.814.000	_	7.881.400	_	1,86	-	7.881.400			BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.02 . 01		Jumlah Dokumen Hasii Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar	30	2.266.740.000	30	830.223.040	3	424.814.000	-	7.881.400	-	1,86	-	7.881.400	-	0,35	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tercapainya Penilaian dan Evaluasi	5.835	2.371.094.100	9.472	2.358.451.468	1.007	168.392.400	687	20.650.000	68,22	12,26	687	20.650.000	11,77	0,87		
	5.03 . 02 . 2.04 . 03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	60	499.393.000	55	550.975.598	2	40.785.000	-	2.262.000	-	5,55	-	2.262.000	-	0,45	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.04 .	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5.750	1.446.611.000	9.378	1.612.611.365	1000	95.825.400	687	13.695.000	68,70	14,29	687	13.695.000	11,95	0,95	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.04 . 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	25	425.090.100	39	194.864.505	5	31.782.000	-	4.693.000	-	14,77	-	4.693.000	-	1,10		
	5.04	Pendidikan dan Pelatihan																BKPSDM	
3	5.04. 02		Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan Sumber Daya Manusia	797	10.005.573.686	57	553.402.162	2	208.982.000	-	66.981.000	-	32,05	-	66.981.000	-	0,67	BKPSDM	
	5.04. 02. 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial	Tercapainya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial	797	10.005.573.686	57	553.402.162	2	208.982.000	-	66.981.000	-	32,05	-	66.981.000	-	0,67	BKPSDM	
	5.04. 02. 2.02. 07	dan Fungsional Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	dan Fungsional Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	797	10.005.573.686	57	553.402.162	2	208.982.000	-	66.981.000	-	32,05	-	66.981.000	-	0,67		
	5,05	Penelitian dan Pengembangan																	
	5.05 . 02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Kebijakan inovasi Yang Ditetapkan Di Daerah	90	9.619.513.713	90	#REF!	90	#REF!	90%	#REF!	100,0%	#REF!	40,2	3.810.984.215	44,6666667	39,62	Bappelitbang da	
	5.05 . 02 . 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Peyelenggaran Pemerintah Dan Pengkajian Peraturan	80	4.717.513.713	80	2.569.217.534	80	346.000.000	0	36.365.600	100,00	96,76	80	2.423.382.900	100	51,37	Bappelitbang da	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kine	rja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d n Lalu (2023)		a dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realisa RKP	paian Kinerja nsi Anggaran D (%)	RKPD s	nerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi Ang s/d Tahur		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9= 8/7	/*100%)		10= 6+8)	(11=10/	5*100%)	(12)	(13)
,	5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	K	Rp 839.513.713	. К 2	Rp 338.002.134	1	Rp 90.613.000	0	Rp 10.468.800	0,00	11,55	0	Rp 10.468.800	к	Rp 1,25	Bappelitbang da	(,
	5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	5	480.000.000	1	239.884.500	1	84.814.000	0	10.208.000	0,00	12,04	0	10.208.000	0	2,13	Bappelitbang da	
	5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	6	2.874.000.000	4	1.857.766.700	1	84.682.000	0	10.894.800	0,00	12,87	0	10.894.800	0	0,38	Bappelitbang da	
	5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	4	524.000.000	1	133.564.200	1	85.891.000	0	4.794.000	0,00	5,58	0	4.794.000	0	0,91	Bappelitbang da	
	5.05 . 02 . 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang	Persentase Perangakat Daerah Yang di	100%	2.488.000.000	100,4	426.954.065	100	329.000.000	0	4.448.000	0,00	1,35	0	4.448.000	0	0,18	Bappelitbang	
	5.05.02.2.02.01	Sosial dan Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Fasilitasi Dalam Penerapan SIDa Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	4	863.000.000	2	426.954.065	1	329.000.000	0	4.448.000	0,00	1,35	0	4.448.000	0	0,52	Bappelitbang da	
	C 01	Didage Harres Insustria	T	100	1	63.500/	16 042 612 750	100		14%	#REF!	14%	#DEE!	#3/ALLIE!	#DEE!	#V/ALLIE!	#DEE!		
-	6.01	Bidang Urusan Inspektorat		100	-	62,50%	16.943.612.750	100	-	14%	#KEF!	14%	#REF!	#VALUE!	#REF!	#VALUE!	#REF!		\dashv
	6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,5	31.369.633.625	63%	11.881.676.448	100	5.980.999.800	10%	1.202.033.083	10%	20%	#VALUE!	13.083.709.531	#VALUE!	42%		
	6.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Dokumen Perencanaan,Penganggaran. Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	37.510.956	60%	25.381.000	100	6.716.000	0	-	0	0%	225%	25.381.000	225%	68%		
	6.01.01.2.01	Sub Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perenncanaan Perangkat Daerah	2	9.305.956	3	10.389.000	1	1.716.000	0	-	0%	0%	3	10.389.000	150%	112%	Inspektorat	
	6.01.01.2.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	28.205.000	3	14.992.000	1	5.000.000	0	-	0%	0%	3	14.992.000	300%	53%	Inspektorat	
	6.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	23.724.213.549	60%	8.681.643.579	100	4.778.667.300	7%	1.038.104.535	7%	22%	61%	9.719.748.114	61%	41%		
	6.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji da Tunjangan ASN	70	23.693.560.355	42	8.665.446.129	14	4.773.167.300	4	1.038.104.535	29%	22%	46	9.703.550.664	66%	41%	Inspektorat	
	6.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	14.102.500	3	7.485.200	1	2.500.000	0	-	0%	0%	3	7.485.200	60%	53%	Inspektorat	
	6.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	10	10.909.694	6	5.863.250	2	2.000.000	0	-	0%	0%	6	5.863.250	60%	54%	Inspektorat	
	6.01.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	5.641.000	3	2.849.000	1	1.000.000	0	-	0%	0%	3	2.849.000	60%	51%	Inspektorat	
	6.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	968.200.000	43%	177.136.938	100	100.000.000	0%	-	0	0%	#VALUE!	177.136.938	#VALUE!	18%		
	6.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60	968.200.000	36	148.624.000	12	100.000.000	0	-	0%	0%	36	148.624.000	60%	15%	Inspektorat	
	6.01.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	148.512.000	1	28.512.938	0	-		-	0%	0%	#VALUE!	28.512.938	#VALUE!	19%	Inspektorat	
	6.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	100%	2.450.206.661	60%	1.279.702.947	100	476.446.500	24%	46.796.548	24%	10%	65%	1.326.499.495	65%	54%		
	6.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik	60	31.583.959	36	10.306.000	12	5.599.000	3	1.059.000	25%	19%	39	11.365.000	65%	36%	Inspektorat	
	6.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan Administrasi Perkantoran	60	618.218.009	36	342.481.300	12	122.347.500	3	26.528.500	25%	22%	39	369.009.800	65%	60%	Inspektorat	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	rja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d ın Lalu (2023)		a dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realisa RKP	paian Kinerja asi Anggaran D (%)	RKPD s	nerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi Ang s/d Tahui	nian Kinerja & ggaran RPJMD n 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		/*100%) -		10= 6+8)		5*100%)	(12)	(13)
	6.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Langganan 10 Buah Surat Kabar	К 60	Rp 67.692.000	K 36	Rp 36.000.000	12	12.000.000	3	3.000.000	. К 25%	Rp 25%	K 39	Rp 39.000.000	65%	Rp 58%	Inspektorat	
	6.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Minum tamu	55	124.102.000	33	66.000.000	11	22.000.000	2	2.000.000	18%	9%	35	68.000.000	64%	55%	Inspektorat	
	6.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah	60	1.608.610.693	36	824.915.647	12	314.500.000	3	14.209.048	25%	5%	39	839.124.695	65%	52%	Inspektorat	
	6.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	741.450.167	81%	405.301.500	100	190.830.000	0%	-	0%	0%	81%	405.301.500	81%	55%		
	6.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Tersedianya barang penunjang urusan perkantoran	18	147.600.000	6	24.800.000	0	5.430.000	0	-	0%	0%	6	24.800.000	33%	17%	Inspektorat	
	6.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Sarana Komputer/laptop/notebook, printer dan proyektor	90	565.000.167	98	351.651.500	44	185.400.000	0	-	0%	0%	98	351.651.500	109%	62%	Inspektorat	
	6.01.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharannya Secara Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	12	28.850.000	12	28.850.000	0	-	0	-	0%	0%	12	28.850.000	100%	100%	Inspektorat	
	6.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.708.629.142	68%	896.026.100	100	285.040.000	25%	102.698.000	25%	36%	71%	998.724.100	71%	58%		
	6.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Belanja Jasa Telpon/internet, Sumber Daya Air dan Listrik	12	16.800.000	10	14.768.100	0	-	0	-	0%	0%	10	14.768.100	83%	88%	Inspektorat	
	6.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kantor/ Rumah Dinas dan Tersedianya Kendaraan Dinas Oprasional	60	1.644.095.000	36	806.500.000	12	255.000.000	3	97.500.000	25%	38%	39	904.000.000	65%	55%	Inspektorat	
	6.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	60	47.734.142	36	74.758.000	12	30.040.000	3	5.198.000	25%	17%	39	79.956.000	65%	168%	Inspektorat	
	6.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.739.423.150	68%	416.484.384	100	143.300.000	17%	14.434.000	17%	10%	70%	430.918.384	70%	25%		
	6.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpelihara Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan terbayarnya pajak kendaraan	60	224.511.800	36	133.165.000	12	39.800.000	0	-	0%	0%	36	133.165.000	60%	59%	Inspektorat	
	6.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan dan terbayarnya kendaraan dinas milik daerah di inspektorat	60	1.422.428.500	36	248.319.384	12	96.400.000	3	3.434.000	25%	4%	39	251.753.384	65%	18%	Inspektorat	
	6.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya secara rutin peralatan dan mesin	48	87.482.850	24	30.000.000	12	7.100.000	3	11.000.000	25%	155%	27	41.000.000	56%	47%	Inspektorat	
	6.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharannya Secara Rutin/ Berkala Gedung Kantor	12	5.000.000	12	5.000.000	0	-	0	-	0%	0%	12	5.000.000	100%	100%	Inspektorat	
	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Konsistensi Perencanaan, Pengelolaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran terhadap Kepatuhan Peratura Perundangundangan	100	8.720.033.728	50%	3.574.239.977	100	1.274.112.000	20%	143.598.800	20%	11%	53%	3.717.838.777	53%	43%		
	6.01.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	100	6.892.284.283	52%	2.670.922.227	100	870.162.000	21%	100.377.700	21%	12%	56%	2.771.299.927	56%	40%		
	6.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	tersusunnya laporan hasil pengawasan kinerja (internal berkala 70 LHP dan Evaluasi LPPD 1 Laporan hasil)	355	723.121.934	167	420.485.850	31	170.000.000	3	12.655.700	10%	7%	170	433.141.550	48%	60%	Inspektorat	
	6.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	tersusunnya laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Kas opname 60 LHP dan Monev dana BOS 30 LHP)	420	720.898.895	260	444.458.300	118	145.960.000	45	54.885.400	38%	38%	305	499.343.700	73%	69%	Inspektorat	
	6.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	tersusunnya laporan hasil reviu laporan kinerja	20	312.360.559	8	168.192.600	3	53.960.000	1	2.710.000	33%	5%	9	170.902.600	45%	55%	Inspektorat	
	6.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	tersusunnya laporan hasil reviu keuangan (Reviu LKPD 1 Laporan dan reviu penyerapan PBJ 4 laporan)	40	469.584.253	18	267.907.400	12	84.100.000	5	-	42%	0%	23	267.907.400	58%	57%	Inspektorat	
	6.01.02.2.01.05	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	tersusunannya laporan hasil pengawasan dana desa/pekon	580	852.874.927	272	441.998.949	42	139.932.000	0	-	0%	0%	272	441.998.949	47%	52%	Inspektorat	
	6.01.02.2.01.06	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	terjalinnya kerjasama pengawasan dengan pihak APH dalam rangka pencegahan dan pembrantasan praktik pungutan liar	60	2.337.785.011	36	264.479.850	12	69.710.000	0	-	0%	0%	36	264.479.850	60%	11%	Inspektorat	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kiner	ja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d ın Lalu (2023)		ja dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realisa RKP	paian Kinerja asi Anggaran D (%)	RKPD s	nerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	s/d Tahui	garan RPJMD n 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		/*100%) -		(10= 6+8)	_ ` '	5*100%)	(12)	(13)
	6.01.02.2.01.07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut	к	Rp 1.475.658.704	K 36	Rp 663.399.278	12	Rp 206.500.000	3	30.126.600	K 25%	15%	39	Rp 693.525.878	65%	47%	Inspektorat	
	6.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100	1.827.749.445	48%	903.317.750	100	403.950.000	19%	43.221.100	19%	11%	50%	946.538.850	50%	52%		
	6.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	terlaksananya penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	60	402.282.995	36	313.596.050	4	148.800.000	1	8.600.000	25%	6%	37	322.196.050	62%	80%	Inspektorat	
	6.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	tersusunnya laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu (penanganan kasus pengaduan masyarakat)	135	1.425.466.450	49	589.721.700	25	255.150.000	3	34.621.100	12%	14%	52	624.342.800	39%	44%	Inspektorat	
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Konsistensi Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terhadap Kepatuhan Peraturan perundang-undangan	100	2.578.851.896	75%	1.487.696.325	100	#REF!	13%	#REF!	13%	#REF!	78%	#REF!	78%	#REF!		
	6.01.03.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasann yang Disusun	100	293.707.580	58%	181.986.929	100	123.737.000	0%	4.932.200	0%	4%	60%	186.919.129	60%	64%		
	6.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	60	293.707.580	24	109.063.657	12	74.580.000	3	4.932.200	25%	0%	27	113.995.857	45%	39%	Inspektorat	
	6.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan	48	162.435.000	36	72.923.272	12	49.157.000	0	-	0%	0%	36	72.923.272	75%	45%	Inspektorat	
	6.01.03.2.02	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Asistensi	100	2.285.144.316	93%	1.305.709.396	100	#REF!	25%	#REF!	25%	#REF!	97%	#REF!	97%	#REF!		
	6.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	60	1.643.972.516	36	787.124.696	12	190.480.000	3	6.000.000	25%	3%	39	793.124.696	65%	48%	Inspektorat	
	6.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi,Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	terlaksananya kegiatan pendampingan, asistensi, dan verifikasi, serta penilaian reformasi birokrasi	12	331.000.000	24	157.459.900	12	41.257.000	0	-	0%	0%	24	157.459.900	200%	48%	Inspektorat	
	6.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		60	310.171.800	36	413.944.800	12	121.024.000	3	14.950.000	25%	12%	39	428.894.800	65%	138%	Inspektorat	
	6.01.03.2.02.04	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	terlaksananya Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	48	216.224.190	24	72.390.400	12	41.557.500	3	5.500.000	25%	13%	27	77.890.400	56%	36%	Inspektorat	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							5.504.306.760		477.876.531								
1	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95%	14.023.279.669	64%	5.615.835.979	90%	2.622.120.100	12%	477.876.531	14%	18%	47%	6.002.616.510	49%	43%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	95%	23.936.042	60%	17.222.900	90%	12.400.000	0%	0	0%	0%	50%	17.222.900	53%	72%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	10	12.274.042	6	10.149.950	2	7.400.000	0		0%	0%	6	10.149.950	60%	83%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10	11.662.000	6	7.072.950	2	5.000.000	0		0%	0%	6	7.072.950	60%	61%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	95%	7.868.833.516	60%	3.191.011.875	90%	1.727.120.100	22%	347.876.585	25%	20%	49%	3.538.888.460	51%	45%	BANKESBAN GPOL	
<u> </u>	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	7.839.733.516	42	3.181.266.225	14	1.722.120.100	4	347.876.585	29%	20%	46	3.529.142.810	66%	45%	BANKESBAN GPOL BANKESBAN	
	8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5	12.800.000	3	3.872.600	1	2.000.000	0		0%	0%	3	3.872.600	60%	30%	GPOL	
	8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	10	10.300.000	6	3.865.450	2	2.000.000	0		0%	0%	6	3.865.450	60%	38%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	6.000.000	3	2.007.600	1	1.000.000	0		0%	0%	3	2.007.600	60%	33%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	95%	2.005.673.663	62%	744.022.710	90%	344.920.000	8%	52.038.595	9%	15%	47%	796.061.305	50%	40%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	60	58.792.000	36	6.489.000	12	5.295.000	0		0%	0%	36	6.489.000	60%	11%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	5	283.560.000	3	80.950.000	1	72.700.000	0		0%	0%	3	80.950.000	60%	29%	BANKESBAN GPOL	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kine	erja RPJMD pada Tahun 2026		paian Kinerja RKPD s/d un Lalu (2023)		a dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realisa RKP	aian Kinerja si Anggaran D (%)		inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi Ang	iian Kinerja & garan RPJMD n 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9= 8/7	*100%)		(10= 6+8)		5*100%)	(12)	(13)
	8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK	K 60	Rp 436.297.100	36	Rp 102.378.980	12	Rp 40.925.000	1 1	Rp 3.942.050	8%	Rp 10%	К 37	Rp 106.321.030	K 62%	Rp 24%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	60	120.000.000	36	72.000.000	12	44.000.000	0		0%	0%	36	72.000.000	60%	60%	BANKESBAN GPOI	
	8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaaan Makanan dan Minuman	55	275.000.000	33	66.000.000	11	22.000.000	0		0%	0%	33	66.000.000	60%	24%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	832.024.563	36	416.204.730	12	160.000.000	3	48.096.545	25%	30%	39	464.301.275	65%	56%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	95%	99.500.000	83%	91.096.000	90%	0	0%	0	0%	0%	33%	91.096.000	35%	92%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	18	99.500.000	15	91.096.000	0	0	0	0	0%	0%	15	91.096.000	83%	92%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	95%	3.106.413.543	60%	1.293.883.919	90%	440.180.000	17%	57.961.351	19%	13%	51%	1.351.845.270	53%	44%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	1.718.376.000	36	640.267.919	12	208.800.000	3	3.961.351	25%	2%	39	644.229.270	65%	37%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	30	1.310.540.000	18	645.000.000	6	224.000.000	2	54.000.000	33%	24%	20	699.000.000	67%	53%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	77.497.543	36	8.616.000	12	7.380.000	0		0%	0%	36	8.616.000	60%	11%	BANKESBAN GPOL	L
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	95%	1.018.422.905	60%	278.598.575	90%	97.500.000	27%	20.000.000	30%	21%	49%	298.598.575	52%	29%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	15	498.459.750	9	213.748.575	3	78.500.000	1	18.000.000	33%	23%	10	231.748.575	67%	46%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	60	519.963.155	36	64.850.000	12	19.000.000	3	2.000.000	25%	11%	39	66.850.000	65%	13%	BANKESBAN GPOL	
2	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER BANGSAAN	Persentase pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	53%	1.900.009.468	50%	858.237.256	46%	800.000.000	0	0	0%	0%	42%	858.237.256	79%	45%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelaksanaan pemantapan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	53%	1.900.009.468	50%	858.237.256	46%	800.000.000	0%	0	0%	0%	42%	858.237.256	79%	45%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah rakor	12	500.009.468	6	858.237.256	2	100.000.000	0		0%	0%	6	858.237.256	50%	172%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.02.2.02.08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	72	1.400.000.000	0	0	36	700.000.000	0		0%	0%	0	0	0%	0%	BANKESBAN GPOL	1
3	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Pesisir Barat	84,92%	34.700.771.342	52%	1.534.670.930	84,92%	482.186.660	0%	0	0%	0%	35%	1.534.670.930	42%	4%	BANKESBAN GPOL	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelebabagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	84,92%	34.700.771.342	52%	1.534.670.930	84,92%	482.186.660	0%	0	0%	0%	35%	1.534.670.930	42%	4%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Penilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	jumlah Partai politik yang mendapat kursi di pemilihan legislatif tahun 2019	45	33.534.227.768	27	1.017.094.562	9	382.186.660	0		0%	0%	27	1.017.094.562	60%	3%	BANKESBAN GPOL	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kine	rja RPJMD pada Tahun 2026		aian Kinerja RKPD s/d ın Lalu (2023)		ja dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KPD yang Dievaluasi (2024)	dan Realisa	paian Kinerja nsi Anggaran D (%)		inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Realisasi Ang	nian Kinerja & ggaran RPJMD n 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		/*100%) -		(10= 6+8)		5*100%)	(12)	(13)
	8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah fasilitasi kegiatan	- К 7	Rp 442.404.549	3	Rp 401.876.650	<u>к</u> 2	Rp 100.000.000	0	Rp	0%	Rp 0%	3	Rp 401.876.650	43%	91%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah laporan	10	724.139.025	2	115.699.718	0	0	0	0	0%	0%	2	115.699.718	20%	16%	BANKESBAN GPOL	
4	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	persentase organisasi masyarakat yang aktif di Kabupaten Pesisir Barat	77,5%	6.562.559.479	37%	32.293.083.502	75%	1.250.000.000	0%	o	0%	0%	27%	32.293.083.502	35%	492%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	77,5%	6.562.559.479	37%	32.293.083.502	75%	1.250.000.000	0%	0	0%	0%	27%	32.293.083.502	35%	492%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah organisasi masyarakat yang mendapatkan hibah tahun 2022	105	6.165.970.743	38	32.220.000.000	5	1.150.000.000	0		0%	0%	38	32.220.000.000	36%	523%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah rakor	10	396.588.736	4	73.083.502	2	100.000.000	0	0	0%	0%	4	73.083.502	40%	18%	BANKESBAN GPOL	
5	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	74,86%	365.066.280	27%	118.990.000	74,2%	100.000.000	0%	o	0%	0%	20%	159.286.200	27%	44%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pemantapan pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	74,86%	365.066.280	27%	118.990.000	74,2%	100.000.000	0%	0	0%	0%	20%	159.286.200	27%	44%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah kegiatan	5	365.066.280	3	118.990.000	2	100.000.000	0		0%	0%	3	118.990.000	60%	33%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah rakor	10	365.066.280	1	40.296.200	0	О	0	0	0%	0%	1	40.296.200	10%	11%	BANKESBAN GPOL	
6	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Kabupaten Pesisir Barat	74,86%	946.432.754	52%	360.711.049	74,2%	250.000.000	0%	0	0%	0%	40%	454.047.299	53%	48%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		74,86%	946.432.754	52%	360.711.049	74,2%	250.000.000	0%	0	0%	0%	40%	454.047.299	53%	48%	BANKESBAN GPOL	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kine	2026		ın Lalu (2023)		ja dan Anggaran RKPD alan yang dievaluasi (2024)		Capaian Kinerja dan KKPD yang Dievaluasi (2024)		si Anggaran D (%)	RKPD	inerja dan Anggaran s/d Tahun 2024	Tingkat Capa Realisasi Ang s/d Tahur	garan RPJMD 1 2024 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		'*100%) -		(10= 6+8)	(11=10/		(12)	(13)
	8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kegiatan	5	Rp 298.109.862	3	Rp 93.336.250	2	Rp 100.000.000	0	Rp	0%	Rp 0%	3	Rp 93.336.250	К 60%	31%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tengag Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Doerah	jumlah rakor	10	527.441.400	6	272.331.449	2	150.000.000	0	-	0%	0%	6	272.331.449	60%	52%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah laporan	10	418.991.354	4	88.379.600	0	0	0	0	0%	0%	4	88.379.600	40%	21%	BANKESBAN GPOL	

2.2. Permasalahan Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah melaksanakan pembangunan pada hampir seluruh aspek kehidupan bermasyarakat sesuai dengan kewenangan daerah dengan target dan capaian yang secara umum mengarah kepada perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. Walaupun secara umum Kabupaten Pesisir Barat masih perlu melakukan akselerasi perbaikan kinerja pada seluruh sektor pembanguanan. Identifikasi berbagai permasalahan merupakan isu pokok permasalahan dan tantangan pembangunan daerah yang selanjutnya ditetapkan sebagai prioritas dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025 dengan tetap mensinkronkan rencana pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 11 Februari 2025 nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025. Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

- 1) Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
- 2) rogram Makan Bergizi Gratis (MBG);
- 3) Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
- 4) Pengendalian Inflasi di daerah;
- 5) Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
- 6) Dukungan swasembada pangan; dan
- 7) Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dengan demikian makan permasalahan pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2025 diperlukan harmonisasi agar permsalahan dan isu pembangunan nasional selarasa dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Pesisir Barat. Dimana permasalahan dan isu pembangunan nasional dengan Kabupaten Pesisir Barat tidak jauh berbeda sehingga Kabupaten Pesisir Barat dapat terintegrasi dan memberikan dukungan terhadap pembangunan nasional.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan RKPD Tahun 2025 meliputi :

- 1) Sektor Kesehatan, dimana angka harapan hidup Kabupaten Pesisir Barat tercatat di angka 73,93 tahun atau peringkat ke-14 dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Akses Terbatas ke Layanan Kesehatan seperti Fasilitas kesehatan yang kurang memadai: Kabupaten Pesisir Barat mungkin memiliki jumlah rumah sakit, puskesmas, atau tenaga medis yang terbatas dibandingkan kabupaten lain. Kemudian Jarak tempuh yang jauh: Beberapa wilayah di Pesisir Barat bersifat terpencil, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan layanan kesehatan cepat.
- 2) Sektor Pendidikan, dimana harapan lama sekolah Kabupaten Pesisir Barat tercatat di angka 12,16 tahun atau peringkat 14 dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Akses ke Fasilitas Pendidikan yang Terbatas yang meliputi Sekolah dan tenaga pendidik berkualitas yang tidak merata, banyak sekolah (terutama di daerah pesisir/pedalaman) kekurangan ruang kelas, guru, atau fasilitas dasar seperti perpustakaan/lab. Kemudian transportasi Sulit: Wilayah geografis Pesisir Barat yang terdiri dari pantai, pegunungan, dan desa terisolasi menyulitkan anak-anak untuk bersekolah secara rutin. Selain itu persepsi tentang pentingnya pendidikan beberapa komunitas, terutama di daerah nelayan atau

- petani tradisional, pendidikan formal dianggap kurang penting dibandingkan bekerja membantu keluarga.
- 3) Sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat mengalami penurunan cukup signifikan dimana tahun 2023 tercata di angka 3.42% turun 23,68% menjadi 2,61% di tahun 2024. Bahkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat tercatat paling rendah dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan sektor unggulan sebesar 29,86 milyar rupiah dari 1.404,17 di tahun 2023 menjadi 1.374,78 milyar rupiah, selain itu sektor industry pengolah juga mengalami penurunan 7,47 miyar rupiah dari 128,09 milyar rupiah di tahun 2023 menjadi 120,62 milyar rupiah di tahun 2024. Sementara sektor unggulan pariwisata belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat. Peningkatan sektor penyediaan akomodasi dan makan minun menberikan tambahan kontribusi 4,61 milyar rupiah dari tahun 2023 yang tercatat di angka 70,96 milyar rupiah menjadi 75,57 milyar rupiah. Hal ini menjadi catatan Pemerintah Daeah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tahun 2025 dengan peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, pengembangan pariwisata, dukungan terhadap pelaku UMKM dan infrastruktur daerah khususnya infrastruktur dasar untuk mendorong peningkatan investasi. Iklim investasi akan mendorong investor untuk menempatkan inyestasinya di Kabupaten Pesisir Barat, hal ini diharapkan mampu mewujudkan invstasi yang efektif dan efisien dalam mendorng pertumbuhan ekonomi daerah.
- 4) Pelayanan publik, Kementerian PANRB mempulikasikan bahwa indeks pelayanan public Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024 tercatat di angka 2,92 dengan predikat cukup, predikat ini menunjukan bahwa Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, unit belum memperhatikan pengembangan kapasitas SDM, sarana prasarana belum memadai, media SIPP, konsultasi dan pengaduan serta inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan. Hal ini menjadi catatan bagi Pemerintah Daerah untuk mendorong pelayanan public berkualitas dan berintegritas dengan digitalisasi pelayanan public, pengeambangan SDM dan peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan public.
- 5) Tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat menurut BPS tahun 2024 tercatat di angka 12,64% atau peringkat ke-13 dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Ketergantungan pada sektor primer seperti pertanian dan perikanan menciptakan lapangan pekerjaan informal yang tidak bersifat keberlanjutan, rendahnya lapangan kerja formal mepengaruhi pendapatan Masyarakat, selian itu rendahnya kualitas infrastruktur sehingga aksesbilitas dan konektivitas terhadap akses pasar yang menghambat distribusi barang khusunya di darah yang terisolir.

2.2.1. Permasalahan Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan pada pengendalian dan evaluasi hasil RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 yang telah dipaparkan di atas serta penelaahan atas laporan evaluasi Renja oleh perangkat daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, menghasilkan beberapa catatan sebagai berikut:

1) Penyesuaian dokumen Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 -2029 dengan RPJMD Tahun 2021-2026 terhadap RKPD Tahun 2025 dengan dokumen APBD/DPA Perangkat Daerah TA 2025, ditemukan beberapa perubahan prioritas pembangunan mengalami penyesuaian capaian target kinerja, kemudian

- kebijakan efisiensi Pemerintah Pusat mengakibatkan program yang telah direncanakan akan dilaksanakan di Tahun 2025 dikarenakan menyesuaikan pada kemampuan keuangan daerah atau penyesuaian prioritas perangkat daerah;
- 2) Adanya keterlambatan dan/atau kesalahan pada proses penyampaian laporan pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 oleh beberapa perangkat daerah sehingga mempengaruhi ketepatan waktu dalam penyampaian laporan evaluasi RKPD sampai dengan Triulan I Tahun 2025;
- 3) Pada sebagian Perangkat Daerah sering terjadi penggantian aparatur yang mengerjakan laporan evaluasi dan monev Renja, sehingga mempengaruhi ketepatan, validitas data serta pemahaman terhadap proses bisnis penyusunan laporan;
- 4) Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang pengelolaan perencanaan dan pengendaliaan serta penyusunan anggaran pada tataran daerah dan perangkat daerah;

2.2.2. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat yang dihadapi daerah sampai dengan Triwulan I pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Permasalahan				
(1)	(2)	(3)				
I	Urusan Wajib Pelayanan	n Dasar				
1	Pendidikan	Belum meratanya kualitas pelayanan pendidikan; Masih rendahnya kualitas tenaga pendidikan; Kondisi Sarana dan Prasarana yang belum optimal; Pencapaian SPM di bidang pendidikan belum optimal; Kesadaran Masyarakat belum memadai				
2	Kesehatan	Belum Optimalnya kualitas pelayanan kesehatan; Rasio tenaga Kesehatan per penduduk masih belum ideal; Belum Terpenuhinya 9 Jenis Profesi Tenaga Kesehatan; Belum meratanya distribusi tenaga Kesehatan; Pencapaian SPM di bidang kesehatan belum optimal; Kesadaran Masyarakat terhadap kesehatan belum memadai				

3	Pekerjaan Umum dan	Jumlah jalan dalam kondisi baik yang belum memadai;
	Penataan Ruang	Pembangunan jaringan jalan, jembatan dan drainase belum dilakukan secara integratif;
		Jumlah jaringan irigasi dalam kondisi baik yang belum memadai;
		Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang belum ideal dibandingkan dengan jumlah pegawai;
		Jumlah sarana dan prasarana fasilitas umum yang belum memadai;
		Belum optimalnya pengendalian penataan ruang daerah;
		Pencapaian SPM di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang belum optimal;
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Masih rendahnya jumlah jaringan air minum dari sumber air ke rumah tangga dan hunian;
		Masih rendahnya jaringan limbah rumah tangga dan hunian;
		Masih rendahnya jaringan sanitasi rumah tangga dan hunian;
		Jumlah jaringan jalan lingkungan dalam kondisi baik yang belum memadai;
		Pencapaian SPM di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman belum optimal;
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan	Masih rendahnya budaya dan kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan peraturan daerah;
	Masyarakat	Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah yang rawan bencana: tsunami, gempa, banjir, angin kencang, tanah longsor;
		Masih minimnya sarana dan prasarana mitigasi dan pasca bencana;
6	Sosial	Angka kemiskinan daerah yang tinggi dibandingkan dengan Provinsi Lampung;
		Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tinggi;
		Masih rendahnya pemberdayaan masyarakat termajinalkan;
		Masih rendahnya fasilitas umum yang ramah untuk kaum difabel;
		Pencapaian SPM di bidang sosial belum optimal;
II	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Dasar yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan

	1	Ţ
1	Tenaga Kerja	Kurangnya lapangan kerja yang ada di daerah disebabkan kurangnya kebijakan yang mendukung investasi; Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan skill khusus untuk menciptakan masyarakat wirausaha yang mandiri;
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Masih kurangnya pemberdayaan perempuan dalam keluarga hingga pembangunan; Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat; Masih adanya kasus kekerasaan terhadap anak dalam rumah tangga dan masyarakat;
3	Pangan	Belum banyaknya diversifikasi produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat; Belum optimalnya ketersediaan pangan di lingkungan keluarga; Masih terjadi kenaikan harga bahan pokok pada hari- hari tertentu disebabkan oleh inflasi daerah
4	Pertanahan	Masih terjadi kasus-kasus konfilik pertanahan atau sengketa kepemilikan lahan daerah dengan taman nasional hutan bukit barisan selatan; Masih rendahnya jumlah aset tanah milik pemerintah daerah untuk pembangunan.
5	Lingkungan Hidup	Belum optimalnya pengendalian/ pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan; Belum optimalnya penanganan sampah dan limbah masyarakat;
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum optimalnya kualitas pelayanan pencatatan sipil; Belum optimalnya kuantitas pelayanan pencatatatan sipil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan desa dan daerah; Belum optimalnya kualitasnya aparatur pekon;
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum optimalnya persiapan daerah dalam menghadapi bonus demografi daerah; Belum optimalnya penyuluhan terkait Keluarga Berencana di masyarakat;
9	Perhubungan	Minimnya jumlah sarana dan prasarana perhubungan daerah; Belum tersusunnya moda transportasi di daerah dengan baik;

II - 116

10	Komunikasi dan Informatika	Masih minimnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika daerah;					
		Masih rendahnya kualitas dan kuantitas manajemen informatika;					
		Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan jumlah BTS;					
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Masih rendahnya minat dan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai penggerak ekonomi lokal;					
		Belum optimalnya pembinaan terhadap koperasi, usaha kecil dan menengah;					
		Masih sulitnya usaha kecil menengah dalam mengakses bantuan modal dari pihak perbankan;					
		Masih relatif minimnya pengembangan dan pelatihan softskill dan hardskill pelaku koperasi, usaha kecil dan menengah;					
12	Penanaman Modal	Kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pesisir Barat;					
		Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan					
13	Kepemudaan dan Olah Raga	Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan;					
		Belum optimalnya pembinaan terhadap atlet daerah;					
		Keterbatasan jumlah sarana prasarana olahraga;					
14	Statistik	Masih sulitnya melakukan penghitungan data statistik di daerah oleh Perangkat Daerah;					
		Masih terbatasnya ketersediaan data sectoral					
15	Persandian	Belum optimalnya kegiatan persandian daerah;					
		Belum adanya sarana dan prasarana persandian;					
		Belum adanya SDM yang menguasai;					
16	Kebudayaan	Masih belum ditetapkannya cagar budaya daerah;					
		Masih belum optimalnya pengembangan budaya daerah sebagai salah satu atraksi wisata daerah;					
17	Perpustakaan	Masih belum adanya Perpustakaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat;					
		Masih belum adanya manajemen pengembangan dan pengelolaan perpustakaan;					
		Belum ada pustakawan daerah;					
		Masih sedikitnya jumlah koleksi judul buku;					
		Masih rendahnya minat baca masyarakat;					
	·						

II - 117

18	Kearsipan	Masih belum adanya Gedung Arsip Daerah Kabupaten Pesisir Barat;				
		Masih belum adanya manajemen pengembangan dan pengelolaan kearsipan;				
		Belum ada arsiparis daerah;				
III	Urusan Pilihan					
1	Kelautan dan Perikanan	Masih rendahnya produktivitas perikanan tangkap;				
		Masih rendahnya produktivitas perikanan budidaya;				
		Jumlah sarana dan prasarana penangkapan dan budidaya perikanan yang sedikit;				
		Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses produksi;				
2	Pariwisata	Masih belum memadai sarana dan prasarana serta akomodasi di lokasi wisata;				
		Masih terbatasnya lokasi tujuan wisata di daerah;				
		Masih belum adanya industri pendukung pariwisata;				
3	Pertanian	Masih rendahnya produktivitas pertanian;				
		Masih rendahnya produktivitas perkebunan;				
		Masih rendahnya produktivitas peternakan;				
		Masih adanya alih fungsi lahan pertanian;				
		Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses produksi;				
4	Perdagangan	Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana pasarpasar tradisional;				
		Masih belum optimalnya pengawasan pasar;				
5	Perindustrian	Masih rendahnya minat dan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan industri kecil dan menengah sebagai penggerak ekonomi lokal;				
		Belum optimalnya pembinaan terhadap industri daerah				
		Masih sulitnya industri kecil menengah dalam mengakses bantuan modal dari pihak perbankan;				
		Masih relatif minimnya pengembangan dan pelatihan softskill dan hardskill pelaku industri kecil;				
6	Transmigrasi	Masih relatif belum berkembangan secara signifikan kehidupan masyarakat transmigran;				
		Masih belum optimalnya pembinaan masyarakat transmigran dalam pengembangan produk pertanian				
		dan perkebunan dan peternakan;				
IV	Unsur Pendukung Urusa	n Pemerintahan				

1	Sekretariat Daerah	Belum Optimalnya proses pelayanan terhadap kepala daerah;			
		Belum optimalnya proses pengkoordinasian antar perangkat daerah			
2	Sekretariat DPRD	Belum optimalnya proses pelayanan kepada DPRD			
V	Unsur Penunjang Urusan	Pemerintahan			
1	Perencanaan	Masih belum optimalnya proses perencanaan daerah; Masih lemahnya pengendalian dan koordinasi dengan Perangkat Daerah; Masih belum optimalnya sinergitas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pengendalian;			
2	Keuangan	Masih belum optimalnya pembinaan dan pengendalian dalam proses penataan usahaan keuangan daerah; Masih belum optimalnya pendataan aset daerah; Masih rendahnya nilai pajak daerah terhadap Pendapatan Daerah; Masih rendahnya nilai retribusi daerah terhadap Pendapatan Daerah;			
3	Kepegawaian	Belum optimalnya pembinaan dan pendataan pegawai; Belum optimalnya merit sistem dalam proses jenjang karir jabatan;			
4	Pendidikan dan Pelatihan	Belum optimalnya sistem pendidikan dan pelatihan bagi PNS di daerah; Masih minimnya jumlah PNS yang mendapatkan kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;			
5	Penelitian dan Pengembangan	Masih minimnya jumlah kajian penelitian dan pengembangan daerah sebagai materi teknis perencanaan daerah; Belum optimalnya hasil kajian penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah;			
VI	Unsur Pengawasan Urusa	an Pemerintahan			
1	Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Masih belum optimalnya proses pembinaan terhadap pegawai daerah; Masih belum optimalnya proses reviu dan pengendalian terhadap dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan; Masih belum optimalnya pelaksanaan manajemen pengawasan;			
VII	Unsur Kewilayahan				

1	Kecamatan	Masih belum meratanya sarana dan prasana di tingkat kecamatan; Masih belum adanya sistem pelayanan bagi masyarakat yang terintegrasi			
VIII	Unsur Pemerintahan Umum				
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	Masih belum optimalnya pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat;			
		Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum;			

2.2.3. Rekomendasi

Sebagai langkah perbaikan kinerja pada periode mendatang, khususnya pada proses penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD dan/atau Renja Perangkat Daerah diperlukan rekomendasi perbaikan berdasarkan pada capaian kinerja serta permasalahan-permasalah yang telah disajikan sebelumnya, antara lain:

- 1) Perlunya menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, hingga nantinya pada dokumen penganggaran daerah dan perangkat daerah terjalin sinergitas;
- 2) Perlunya dilakukan perubahan target sasaran indikator makro daerah yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2025 untuk dilakukan penyesuaian pada Perubahan RKPD Tahun 2025, hal ini berdasarkan pada realisasi capaian sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 (dalam hal ini data yang tersedia sampai dengan tahun 2024 yang dinilai memberikan gambaran capaian hingga akhir tahun 2025) dengan tetap memperhatikan kondisi daerah;
- 3) Dalam penetapan target kinerja yang akan dicapai pada setiap program, kegiatan, sub kegiatan pada Renja perangkat daerah agar memperhatikan satuan *output* pada dokumen perencanaan tahunan maupun lima tahunan dan juga Renja Perangkat Daerah maupun Renstra Perangkat Daerah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah berikut turunannya dan/atau pembaharuannya. Termasuk penentuan *output* yang terukur dan saling terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lainnya;
- 4) Asumsi dan proyeksi pendapatan daerah baik berupa transfer pusat, pendapatan asli daerah dan sumber pendapatan lainnya yang mempengaruhi perhitungan penerimaan daerah pada periode mendatang sebaiknya dapat diukur secermat mungkin dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian, penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dapat lebih akurat, efektif dan efisien;
- 5) Penyusunan, penataan dan/atau penambahan belanja program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah untuk percepatan pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan;
- 6) Sebagai salah satu bagian dalam siklus manajemen perencanaan dan penganggaran, tahap pengendalian evaluasi menjadi hal yang penting untuk diperhatikan agar terwujud satu kesatuan manajemen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program-program pembangunan yang efektif dan efisien dengan tujuan akhir terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi makro daerah Kabupaten Pesisir Barat dan kebijakan Keuangan Daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kabupaten Pesisir Barat serta pengaruh perekonomian regional (Provinsi Lampung) dan nasional. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektorsektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikannya secara efektif dan efisien dengan pendekatan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Pendekatan perencanaan anggaran berbasis kinerja yang ingin dicapai oleh Kabupaten Pesisir Barat ini disusun dalam suatu kondisi perekonomian daerah yang masih berkembang sehingga perencanaan pembangunan yang terencana, tersusun dan akuntabel.

3.1 Kerangka Ekonomi Daerah

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di suatu daerah merupakan salah satu indikator dalam menilai pencapaian kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan hal ini adalah sebagai fasilitator dan juga regulator dalam memberikan kemudahan dan kepastian bagi pelaku ekonomi untuk dapat mengembangkan kegiatan ekonominya. Secara substansial pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya terencana dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan kemampuan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan dalam mengelola sumber daya ekonomi secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan seluas-luasnya kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah yang terencana diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien, partisipatif, terbuka dan akuntabel dalam rangka reformasi birokrasi.

3.1.1 Perkembangan Kinerja Ekonomi Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

3.1.1.1 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan alat kontrol dan evaluasi dalam penilaian hasil pembangunan yang pada akhirnya akan menentukan dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah tersebut. PDRB nominal (harga berlaku) dan PDRB riil (harga konstan), masing-masing mempunyai peran masing-masing. Seperti halnya dalam PDB (Produk Domestik Bruto), PDRB mempunyai tiga pendekatan dalam menghitungnya yaitu pendekatan produksi atau lebih dikenal dengan PDRB Sektoral atau PDRB menurut Lapangan Usaha, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

Menurut data BPS di tahun 2024 PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat tercatat di angka 6.138,24 (milyar rupiah) atau naik 403,68 (milyar rupiah) dari tahun 2023 PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat tercatatdi angka 5.734,56 (dalam milyar rupiah) kemudian naik 389,19 (milyar rupiah) dari tahun 2022 yang tercatat 5.345,37 (milyar rupiah). PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan *time series* digambarkan sebagai berikut, tahun 2022 PDRB ADHB naik 453,33 (milyar

rupiah), tahun 2021 PDRB ADHB tercatat 4.892,04 (milyar rupiah) atau mengalami kenaikan 214,50 (milyar rupiah), tahun 2020 PDRB ADHB tercatat 4.677,54 atau turun 9,85 (milyar rupiah) dari tahun 2019 yang tercatat sebesar 4.687,39 (milyar rupiah). Selanjutnya pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK) tahun 2020 berada pada angka 3.069,60 atau turun 36,5 (dalam milyar rupiah) dari tahun 2019 yang tercatat di angka 3.106,10 (dalam milyar rupiah). Tahun 2021 tercatat di angka 3.132,70 (dalam milyar rupiah) atau naik 63,10 (dalam milyar rupiah), tahun 2022 sebesar 3.221,10 (dalam milyar rupiah) atau naik 88,4 (dalam milyar rupiah), tahun 2023 tercatat sebesar 3.331,4 atau naik sebesar 110,30 (dalam milyar rupiah) dan tahun 2024 tercatat di angka 3.418,39 (milyar rupiah)

Pada tahun 2025 ini PDRB ADHB diproyeksi dapat meningkat menjadi 6.352,74 s.d 6.503,42 (miliyar rupiah). Sementara itu untuk PDRB ADHK diproyeksikan pada tahun 2025 ini dapat tetap meningkat menjadi 3.481,49 s.d 3.5035,59 (milyar rupiah). Proyeksi ini berkaca dari perhitungan selama kurun waktu 2020-2024 dimana perkembangan PDRB ADHB yang masih mampu berkembang 4,59% - 7,04% pertahunnya semnetara PDRB ADHB diproyeksi akan tumbuh 2,67% - 3,48%. Optimalisasi sektor unggulan daerah menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan yang positif dengan didukung perbaikan perekonomian global, nasional dan regional.

Tabel 3.1 PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Pesisir Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)

PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ADHB	4.677,54	4.892,04	5.345,37	5.734,56	6.138,24
ADHK	3.069,60	3.132,70	3.221,10	3.331.40	3.418,39

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2025

Data untuk PDRB ADHB untuk Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 belum tersedia, sehingga perkembangan daerah menggunakan data dari Pemerintah Provinsi Lampung, yang mana Ekonomi Provinsi Lampung berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 mencapai 121.701,75 (milyar rupiah) dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 69,560,58 (milyar rupiah). Dimana kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tumbu1,2% dan sektor industry pengolahan tumbuh 1,61%.

3.1.1.2 Struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha

PDRB harga berlaku suatu daerah digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber-sumber ekonomi dalam suatu wilayah daerah tersebut. Dalam konteks PDRB yang sangat familiar (menurut lapangan usaha), sumber-sumber ekonomi/sektor-sektor/lapangan usaha tersebut terdiri dari 17 (tujuh belas) kategori. Besar kecilnya PDRB dalam 17 (tujuh belas) kategori tersebut di atas sangat mungkin dipengaruhi oleh kondisi geografis, ketersediaan SDA, Infrastruktur, SDM yang memadai dan lain sebagainya. 17 kategori tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan

Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estate; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan (17) Jasa Lainnya.

Walaupun kondisi laju pertumbuhan berfluktuasi, namun dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir tidak ada kecenderungan pergeseran peran masing-masing sector sebagai penyumbang pertumbuhan PDRB. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi penyumbang terbesar PDRB, dengan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tetap menjadi primadona sebagai penyumbang PDRB. Persentase kontribusi sektor-sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 selama 5 (lima) tahun terakhir cukup seimbang artinya dari nilai kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB.

Dari 9 (sembilan) sektor yang ada dalam komponen perhitungan PDRB, sektor Primer, kelompok Sektor Sekunder dan kelompok Sektor Tersier. Kelompok Sektor Primer terdiri dari 3 (tiga) sektor yaitu: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan (3) Konstruksi; kelompok sektor sekunder terdiri dari 5 (lima) sektor, yaitu: (1) Pertambangan dan Penggalian, (2) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (3) Industri Pengolahan, (4) Jasa Pendidikan dan (5) Real Estate. Sementara untuk sektor tersier terdiri dari 9 (sembilan) kelompok, yaitu: (1) Informasi dan Komunikasi, (2) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (4) Jasa Keuangan dan Asuransi, (5) Transportasi dan Pergudangan, (6) Jasa lainnya, (7) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (8) Pengadaan Listrik dan Gas dan (9) Jasa Perusahaan.

Pada tahun 2020 sektor yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PDRB ADHB tetap pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 49,13% dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,58%. Kembali pada tahun 2021 sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 48,72% dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,95%. Tahun 2022, PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat disumbang sebesar 46,29% dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 14,71%. Tahun 2023 kontribusi sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan menurun menjadi 43,67%, peningkatan kontribusi terjadi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Refarasi Mbdil dan Sepeda Motor sebesar 15,97% dan Sektor Kontruksi sebesar 8,37%. Terakhir tahun 2024 sektor pertanian kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 42,95%, kemudian sektor perdagangan besar dan kecil:reparasi kendaraan mobil dan sepeda motor berkontribusi 16,68% dan sektor kontruksi 8,07%.

Berdasarkan PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha yang dipublikasi oleh BPS, Selama 5 (lima) tahun sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB, hal ini menunjukan bahwa adanya peningkatan kontribusi di sektor lain. sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di tahun 2020 berkontribusi sebesar 12,58% atau meningkat 32,59% di tahun 2024 menjadi menjadi 16,68%. Penurunan sektor pertanian kehutanan dan perikanan menunjukan adanya perubahn tren orientasi lpangan usaha dari agraris ke perdagangan,hal ini menujukan bahwa sektor pariwisata sebagai sektor unggul secara perlahan menggeser sektor agraris. Untuk

mendukung perkembangan PDRB Kabupaten Pesisir Barat, Pemerintah Daerah diharapkan melakukan intervensi dengan kebijakan yang mendukung peningkatan investasi untuk membuka lapangan kerja.

Tabel 3.2 Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (dalam %)

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	49,13	48,72	46,29	43,67	42,95
2	Pertambangan dan Penggalian	5,76	5,24	5,23	5,61	5,74
3	Industri Pengolahan	3,99	3,96	3,74	3,60	3,25
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6	Konstruksi	6,85	7,56	8,07	8,37	8,07
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,58	12,95	14,71	15,97	16,68
8	Transportasi dan Pergudangan	0,97	0,98	1,26	1,54	1,61
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,96	1,82	1,98	2,16	2,19
10	Informasi dan Komunikasi	2,30	2,39	2,29	2,31	2,34
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,39	1,44	1,38	1,34	1,33
12	Real Estate	3,62	3,60	3,62	3,71	3,76
13	Jasa Perusahaan	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,24	5,15	5,17	5,30	5,38
15	Jasa Pendidikan	3,80	3,80	3,73	3,61	3,67
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,19	1,21	1,16	1,18	1,20
17	Jasa lainnya	1,01	0,96	1,15	1,45	1,61
	PDRB ADHB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2025

Data untuk PDRB berdasarkan lapangan usaha untuk Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 tidak tersedia, sehingga perkembangan daerah menggunakan data triwulan I Tahun 2025 dari Pemerintah

Provinsi Lampung. Perekonomian Provinsi Lampung triwulan I-2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp121.701,75 (milyar rupiah) dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp69.560,58 (miyiar rupiah), dengan demikian triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,47 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,66 persen. Triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 (q-to-q) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,11 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,65 persen.

3.1.1.3 Struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Pengeluaran

PDRB menurut Pengeluaran digunakan sebagai indikator untuk menilai kondisi ekonomi suatu daerah melihat dari sisi pengeluaran dan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh berbagasi sektor perekonomian suatu daerah yang terdiri dari 7 (tujuh) komponen, sebagai berikut: (1) Konsumsi Rumah Tangga; (2) Konsumsi LNPRT; (3) Konsumsi Pemerintah; (4) PMTB; (5) Perubahan Inventori; (6) Ekspor; (7) Impor.

Berdasarkan pada data PDRB ADHB menurut Pengeluaran yang berfungsi untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan baik antar wilayah dan luar negeri. BPS mencatat bahwa PDRB Kabupaten Pesisir Barat Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) menurut pengeluaran di tahun 2021 tercatat 4.892,04 (milyar rupiah) atau naik 214,50 (milyar rupiah) dari tahun 2020, dan di tahun 2022 tercatat mengalami kenaikan kembali sebesar 453,33 (milyar rupiah) dari 4.892,04 (milyar rupiah) ke 5.345,37, terakhir di tahun 2023 kembali mengalami kenaikan 389,19 (milyar rupiah) menjadi 5.734,56 (milyar rupiah). Terakhir tahun 2024 tercatat di angka 6.138,24 (milyar rupiah).

Sementara itu untuk data PDRB Kabupaten Pesisir Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK) menurut Pengeluaran pada tahun 2020 adalah sebesar 3.069,60 (milyar rupiah), di tahun 2021 mengalami kenaikan 63,10 (milyar rupiah) menjadi 3.132,70 kemudian di tahun 2022 kembali mengalami kenaikan sebesar 88,50 (milyar rupiah) menjadi 3.221,12, dan di tahun 2023 mengalami kenaikan kembali seebesar 110,23 (milyar rupiah) menjadi 3.331,35 (milyar rupiah). Terakhir tahun 2024 PDRB ADHK menurut pengeluaran tercatat di angka 3.418,39 (milyar rupiah) atau naik 87,04 (milyar rupiah).

Di tahun 2024, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terbesar, yaitu 73,66% (ADHB) dan 74,16% (ADHK), kemudian PMBT dengan kontribusi 21,72% (ADHB) dan 22,24% (ADHK). Sementara untuk komponen lain dengan kontribusi terrendah, yaitu net eksport barang jasa yang tercatat minus -0,01% (ADHB) dan -2,13% (ADHK), kemudian perubahan inventori tercatat minus -0,11% (ADHB) dan -0,16% (ADHK).

Berikutnya disampaikan PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 3.3 PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2024 (milyar rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.279,17	3.368,27	3.717,25	4.090,89	4.521,54
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	87,02	90,20	96,19	110,37	125,67
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintahan	146,50	149.45	147,23	152,01	165,39
4	РМТВ	1.017,88	1.110,62	1.205,95	1.284,16	1.333,25
5	Perubahan Inventori	11,08	7,17	7,46	3,46	-6,74
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	135,88	166,34	171,36	93,67	-0,87
	Total PDRB	4.692,20	4.919,53	5.345,44	5.734,56	6.138,24

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2025

Lebih lanjut, disajikan PDRB ADHK Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 3.4 PDRB ADHK Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2024 (milyar Rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.195,72	2.206,39	2.310,06	2.432,56	2.569,43
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	51,90	52,63	53,55	59,30	66,43
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	96,10	96,69	93,89	94,95	100,61
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	670,11	702,02	732,58	752,69	760,16

5	Perubahan Inventori	14,61	4,29	4,40	2,49	-5,45
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	41,17	70,68	26,64	-10,64	-72,79
	PDRB	3.069,60	3.132,70	3.223,12	3.331,35	3.418,39

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2025

Data untuk PDRB berdasarkan pengeluaran untuk Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 belum tersedia, sehingga perkembangan daerah menggunakan data Triwulan I Tahun 2025 dari Pemerintah Provinsi Lampung, dimana dari sisi pengeluaran, jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, yaitu triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,47% komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,96% sedangkan triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 (q-to-q) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,11% dimana komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 39,78%.

3.1.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024 tercatat di angka 2,61% atau turun cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat di angka 3,42%. Merunut tiga tahun sebelumnya mengalami kenaikan dimana tahun 2022 tercatat di angka 2,82%, tahun 2021 di angka 2,06% dan di tahun 2020 di angka -1,18%.

Pada sisi lapangan usaha, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan cukup dominan meskipun secara konsisten mengalami penurunan dari tahun 2020-2024, hal ini terjadi karena adanya sektor lain yang mengalami peningkatan kontribusi, yaitu sektor perdagangan besar kecil: reparasi kendaraan mobil dan sepeda motor yng secara konsisten mengalami peningkatan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Pesisir Barat, kemudian sektor penyediaan akomodasi dan makan minum secara konsisten mengalami perningkatan kontribusi namun tidak cukup signifikan. Hal ini menunjukan bahwa terjadi perubahan kegiatan ekonomi masyarakat dari sektor pertanian dan perikanan ke sektor UMKM, dimana sektor ini berkaitan erat dengan sektor unggulan Kabupaten Pesisir Barat, yaitu sektor pariwisata. Sedangkan menurut pengeluaran, perekonomian Kabupaten Pesisir Barat didonimasi oleh konsumsi rumah tangga dan Penambahan Modal Bruto Tetap (PMBT), sementara untuk ekpor dan perubahan inventori mengalami kontraksi d tahun 2024 ini.

Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat triwulan I tahun 2025 belum dipublikasi, sehinga masih mengacu pada pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I 2025. Perekonomian Provinsi Lampung triwulan I-2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 121.701,75 (milyar rupiah) dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 69.560,58 (miyiar rupiah), dengan demikian triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,47 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,66 persen sedangkan dari sisi pengeluaran komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,96%. Triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 (q-to-q) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,11 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan

terdalam adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,65 persen sedangkan dari sisi pengeluaran komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 39,78%.

Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat di tahun 2024 sebesar 2,61% tersebut masih berada jauh di bawah Provinsi Lampung yang mencatatkan nilai 4.57% dan nasional 5,03% atau selisih masing – masing sebesar 1,96 dan 2,42.

6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 -1,00 -2,00 -3,00 2020 2021 2022 2023 2024 Nasional -2,07 5,05 5,03 3,69 5,31 -1,67 2,79 4,28 4,55 4,57 Lampung 2,82 3,42 Pesisir Barat -1,182,07 2,61

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

3.1.1.5 Pendapatan Per Kapita

PDRB Perkapita tahun 2020 tercatat di angka 28,799 (juta rupiah). Tahun 2021 terjadi peningkatan 3,19% menjadi 29,718 (juta rupiah), tahun 2022 terjadi kembali peningkatan sebesar 7,58% menjadi 31,971 (juta rupiah) dan di tahun 2023 PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Barat sebesar 33,782 (juta rupiah) atau naik 5,66% . terakhir di tahun 2024 PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Barat tercatat naik 5,44% menjadi 35,621(juta rupiah).

PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020-2024 menunjukan perkambangan yang cukup baik, dimana peningkatan terjadi secara konsisten naik dikisaran 5,47%. Namun jika dibandingkan dengan PDRB Perkpaita Provinsi Lampung masih cukup tertinggal jauh, dimana PDRB Provinsi Lampung tahun 2024 tercatat di angka 51,369 (jura rupiah), jika dibandingkan dengan 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung PDRB Kabupaten Pesisir Barat masih di atas PDRB Kabupaten Lampung Barat (31,347 jura rupiah), Kabupaten Tanggamus (31,620 jura rupiah) dan Kabupaten Pringsewu (35,551 juta rupiah). PDRB Perkpaita tertinggi di Provinsi Lampung adalah Tulang Bawang (67,675 juta rupiah) dan Kota Bandar Lampung (65,758 jura rupiah).

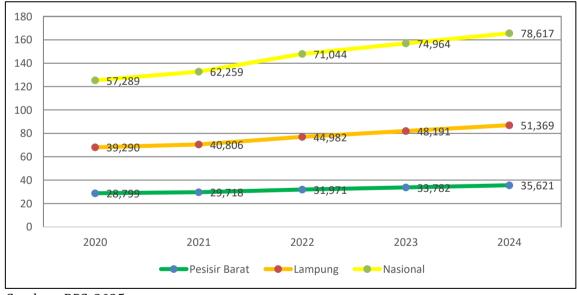
Tabel 3.5 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB Perkapita
(1)	(2)
2020	28.799
2021	29,718
2022	31,971
2023	33,782
2024	35,621

Sumber: BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2025

PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Barat diharapkan dapat terus meningkat, dengan proyeksi kenaikan sekitar 5,47% atau berkisar antara 36.757 (juta rupiah) sampai dengan 37,569 (juta rupiah). Tentunya kenaikan PDRB Perkapita perlu didorong dengan pertumbuhan PDRB melalui optimalisasi lapangan usaha unggulan daerah dan peningkatan pengeluaran masyarakat serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Gambar 3.2 PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2024 (juta rupiah)



Sumber: BPS, 2025

3.1.1.7 Inflasi Daerah

Perubahan harga barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga merupakan hal yang tidak dapat dielakkan dalam sebuah perekonomian. Perubahan harga tersebut dapat berupa kenaikan dan juga penurunan. Rata-rata tertimbang perubahan harga tersebut pada kurun waktu tertentu dalam suatu wilayah itulah yang kita kenal dengan inflasi. Laju inflasi akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laju inflasi ekonomi nasional dan inflasi regional, sehingga perlu adanya kebijakan khusus untuk menjaga stabilitas harga.

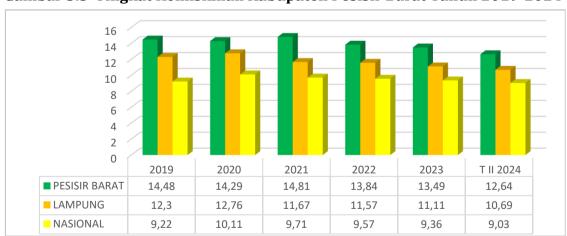
Data inflasi Kabupaten Pesisir Barat masih menggunakan data inflasi Provinsi Lampung, dimana inflasi Provinsi Lampung secara *timeseries* tercatat di angka 2,00% (2020), 2,19% (2021), 5,51% (2022), 3,47% (2023) dan 1,57% (2024). Terakhir per Maret 2025 tercatat di angka 1,96%. Sementara berdasarkan pada Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung Tahun 2020 tercatat di angka 106,36, tahun 2021 di angka 108,69, tahun 2022 di angka 114,68, tahun 2023 di angka 118,65, tahun 2024 di angka 108,43. Per Maret 2025 IHK Provinsi Lampung tercatat di angka 110,35. Laju pertumbuhan indeks harga konsumen menurut pengeluaran disumbang oleh sektor konsumsi rumah tangga, yaitu konsumsi makan, minum dan tembakau sebesar 6,41%, kemudian yang terendah adalah konsumsi untuk transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya sebesar 0,37%.

3.1.2. Perkembangan Kinerja Sosial Ekonomi Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan diimbangi dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik antar penduduk dan antar wil ayah. Beberapa indikator dalam peningkatan kinerja sosial ekonomi daerah Kabupaten Pesisir Barat antara lain adalah Persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3.1.2.1 Tingkat Kemiskinan

Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Barat diharapkan terus menurun, hal ini sejalan dengan peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan juga meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan pada data tahun-tahun sebelumnya, Data tingkat kemiskinan pada tahun 2020 berada pada angka 14,29% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 22.241 jiwa. Pada tahun 2021, angka kemiskinan daerah Kabupaten Pesisir Barat sebesar 14.81% atau sebanyak 23.230 jiwa penduduk miskin daerah. kemudian di tahun 2022 tingkat kemiskinan sebesar 13,84% penduduk miskin di daerah atau sebanyak 21.500 orang. Capaian tahun 2023 tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat sebesar 13,49% atau sebanyak 21,450 penduduk sementara di tahun 2024 tingkat kemiskinan turun menjadi 12,64%.



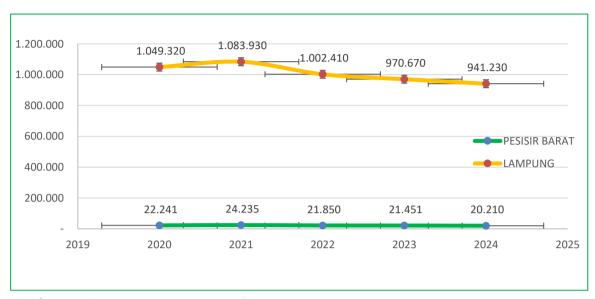
Gambar 3.3 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2024

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Data untuk Tingkat Kemiskinan dan jumlah penduduk miskin untuk Kabupaten Pesisir Barat sampai Tahun 2024 sebanyak 20.210 jiwa atau menurun 1.240 jiwa dari tahun 2023 yang mencapai 21.450. penurunan jumlah penduduk miskin secara regional di Provinsi Lampung juga mengalami penuruan dari 970,670 jiwa menjadi 941.230 jiwa atau turun sebanyak 29.440 jiwa dengan demikian

kontribusi penurunan jumlah penduduk miskin Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung mencapai 4,21%.

Gambar 3.4 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

3.1.2.2 Indeks Gini

Rasio Gini adalah salah satu indikator yang digunakan untuk melihat ketimpangan pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Perkembangan indeks gini (gini ratio) di Kabupaten Pesisir Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ini terus mengalami perbaikan. Hal ini erat kaitannya dengan perkembangan PDRB Perkapita penduduk dan juga persebaran jumlah tenaga kerja. Kabupaten Pesisir Barat yang juga terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. 2020 berada pada angka 0,28. Pada tahun 2021 mengalami koreksi dan berada pada angka 0,32. Tahun 2022 ada perbaikan kinerja daerah, sehingga indeks gini turun menjadi 0,29. Sementara untuk tahun 2023 rasio gini berada pada angka 0,31 atau mengalami kenaikan ketimpangan sebesar 0,02 point. Tahun 2024 belum ada publikasi dari BPS sehingga masih menggunakan data tahun 2023.

Gini rasio Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2023 tercatat sebesar 0.31. Nilai tersebut masih lebih baik bila dibandingkan dengan capaian kinerja provinsi dan nasional dengan nilai Provinsi Lampung dengan nilai capaian 0.32 dan nasional yang berada pada angka 0.38.

Nasional —Lampung Pesisir Barat 0,31 0,32 0,31 0,28 0,29 0,32 0,32 0,32 0,31 0,31 0,39 0,38 0,38 0,38 0,38 2020 2021 2022 2023 2024*

Gambar 3.5 Indeks Gini Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2024

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025

3.1.2.3 Distribusi dan Ketimpangan Ekonomi Daerah

Struktur ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat selain dapat dilihat dari nilai pertumbuhan ekonomi, nilai PDRB dan PDRB Perkapita juga perlu dilihat dari sisi sumbangan kontribusi PDRB daerah terhadap pembentukan total PDRB Provinsi Lampung. Pada tahun 2024, secara struktur PDRB Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah dengan kontributor terendah di Provinsi Lampung atau berada pada urutan 15 dengan kontribusi sebesar 1,26%. Kontribusi daerah walaupun stagnan pada tahun 2020-2024 dengan nilai 1,25-1,27% dan masih terus terendah.

Berikut adalah data kontribusi PDRB ADHB 15 Kabupaten/Kota terhadap total PDRB Provinsi Lampung:

Tabel 3.6 Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung terhadap Total PDRB Tahun 2020-2024 (persen)

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Lampung Barat	1,99	1,99	1,99	2,00	2,03
2	Tanggamus	4,31	4,34	4,35	4,34	4,34
3	Lampung Selatan	12,36	12,33	12,37	12,35	12,36
4	Lampung Timur	11,35	11,65	11,94	11,71	11,65
5	Lampung Tengah	19,82	19,74	19,81	19,95	19,90
6	Lampung Utara	6,63	6,60	6,50	6,48	6,52
7	Way Kanan	3,90	3,89	3,88	3,87	3,94
8	Tulang Bawang	6,44	6,42	6,24	6,24	6,25
9	Pesawaran	4,52	4,47	4,47	4,48	4,44

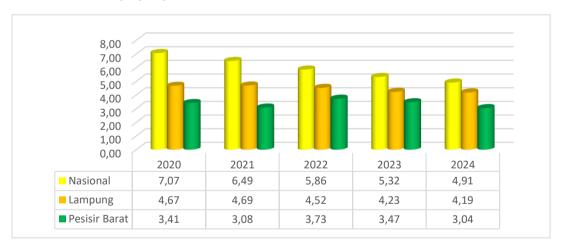
10	Pringsewu	3,11	3,10	3,08	3,10	3,09
11	Mesuji	2,90	2,89	2,87	2,87	2,90
12	Tulang Bawang Barat	3,19	3,18	3,18	3,19	3,20
13	Pesisir Barat	1,30	1,30	1,28	1,27	1,26
14	Bandar Lampung	16,42	16,34	16,31	16,41	16,37
15	Metro	1,75	1,75	1,74	1,74	1,74
	Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

3.1.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pesisir Barat mengalami kinerja perbaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. tahun 2020 tercatat di angka 3.41%. Tahun 2021 mengalami perbaikan menjadi 3,08%. Sementara tahun 2022 terkoreksi cukup signifikan yaitu sebesar 3.73%. capain kinerja indikator TPT di tahun 2023 mengalami perbaikan dengan angka 3,47% atau meningkat sebesar 0,26 point. Dan di tahun 2024 angka TPT Kabupaen Pesisir Barat sebesar 3,04%. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang Kabupaten Pesisir Barat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan banyak lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakatnya sehingga jumlah pengangguran terbuka dapat terus ditekan dan diminimalisir.

Gambar 3.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

3.1.3 Kerangka Ekonomi Daerah sampai dengan akhir Tahun 2023

3.1.3.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Nasional

Gubernur Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 berada di kisaran 4,8%-5,6%, dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS antara Rp 15.300 sampai Rp 15.700 dan inflasi nasional diperkirakan antara 1,5%-3,5%. Lima risiko utama yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan inflasi di Indonesia termasuk

pertumbuhan ekonomi global yang melambat, harga komoditas yang bergejolak, suku bunga acuan Amerika Serikat yang tinggi, dolar AS yang kuat, serta inflasi global yang turun sangat lambat. Dalam menghadapi risiko-risiko ini, kondisi geopolitik global juga dianggap penting karena memiliki dampak terhadap arus modal asing dan stabilitas ekonomi Indonesia, sementara Bank Indonesia memperkirakan suku bunga acuan Amerika Serikat akan turun pada akhir tahun 2024 dan semester pertama tahun 2025.

3.1.3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Regional

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung memprakirakan ekonomi Lampung 2025 tumbuh dalam kisaran 4,6 – 5,3%. Pertumbuhan tersebut didukung oleh prospek permintaan domestik yang lebih baik,utamanya berlanjutnya pertumbuhan positif konsumsi rumah tangga, sejalan dengan kenaikan UMP sebesar 6,5% dan terjaganya optimisme konsumen. Mengawali 2025, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Provinsi Lampung pada Januari 2025 tercatat sebesar 140, tertinggi dibandingkan IKK periode Januari selama 5 tahun terakhir. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga memprakirakan kinerja investasi swasta pada 2025 kembali bergulir seiring memudarnya ketidakpastian dunia usaha pasca puncak penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Dari sisi eksternal , kinerja ekspor Lampung diprakirakan tetap kuat, tetapi terdapat beberapa risiko perlambatan yang perlu diwaspadai . Merujuk outlook perekonomian dunia yang dirilis IMF pada Januari 2025, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, Tiongkok dan India yang merupakan 3 (tiga) tujuan utama ekspor Lampung diproyeksikan belum optimal di tahun 2025.

Prospek peningkatan pertumbuhan ekonomi Lampung akan turut tercermin dari kinerjalapangan usaha (LU) utama. Perbaikan kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan diprakirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Lampung pada 2025, hal ini akan turut didukung oleh kebijakan yang ditempuh guna memperkuat ketahanan pangan nasional. Di samping pengaruh positif normalisasi dampak El Nino, implementasi program intensifikasi pertanian melalui optimalisasi lahan, penggunaan benih unggul dan dukungan akses terhadap pupuk bersubsidi berpotensi mendongkrak produksi tanaman pangan Lampung di 2025.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hampir 25% dari PDRB Lampung 2024 disumbang oleh produksi LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sehingga pertumbuhan positif pada LU ini akan mampu memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Lampung. Sementara itu, kinerja LU utama lainnya, yakni LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, serta LU Transportasi dan Pergudangan diprakirakan akan melanjutkan pertumbuhan positif sejalan dengan prospek permintaan domestik yang lebih baik. Sementara itu, Bank Indonesia memprakirakan prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada 2025 turut didukung oleh inflasi yang terjaga dalam sasaran target 2,5±1%.

3.1.3.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat masih di dominasi oleh sektor agraris, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Namun kontribusi sektor ini memiliki tren menurun pada periode 2020-2024 sehingga memunculkan sektor lain yang secara konsisten mengalami kenaikan,yaitu sektor perdagangan besar dan kecil; reparasi kendaraan mobil dan sepeda motor dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan sektor unggulan sebagai penopang ekomnomi daerah di masa depan.

Sektor pertanian dan perikanan diarahkan sebagai penopang ketahanan pangan daerah sementara sektor pariwisata dapat menjadi penopang ekonomi daerah yang berkelanjutan. Namun terdapat beberapa tantangan Pemerintah Daerah dalam perannya sebagai pemangku kebijakan, yaitu:

- 1) Keterbatasan fiskal daerah, dimana ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer sedikit banyak mempengaruhi percepatan pembangunan daerah, hal ini dikarenakan belum optimalnya Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
- 2) Infrastruktur dasar masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, aksesibilitas dan konektvitas berkelanjutan perlu dipertimbangkan, akses air minum, air limbah, persampahan dan jalan sebaiknya diprioritaskan untuk ditigkatkan karena berkaitan langsung terhadap perekonoian daerah dan juga pengembangan sumber daya manusia.
- 3) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dari sisi ekonomi dan sosial, bagaimana pemerintah daerah mampu memberikan stimulan bagi masyarakat, baik dari sisi bantuan uang, sembako, dan atau modal usaha UMKM. Penciptaan lapangan pekerjaan di sektor riil (baik untuk pekerjaan penggunaan dana desa) juga diharapkan mampu menjadi solusi bagi usaha mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan tanpa melupakan dukungan dari sektor-sektor lainnya, yang bertumpu pada peran ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang sungguhsungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan menyikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan dan penyederhanaan birokrasi untuk proses investasi dan perizinannya melalui reformasi regulasi;
- 6) Menyediakan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi;
- 7) Meningkatkan partisipasi swasta dan seluruh stakeholder melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas;
- 8) Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus PKL (pedagang kaki lima) secara memadai bagi pelaku

- ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Pesisir Barat, disamping menciptakan lapangan kerja;
- 9) Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (seed capital) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (a group lending approach) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kabupaten Pesisir Barat;
- 10) Memfasilitasi pengembangan koperasi diberbagai bidang dan lokasi usaha di Kabupaten Pesisir Barat sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama; dan
- 11) Membangun promosi bersama (joint marketing) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.

Tantangan yang diproyeksikan tersebut di atas seyogyanya adalah hal yang hampir sama dirasakan oleh daerah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, melihat kondisi di lapangan berdasarkan pada kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang saat ini masih dalam fokus penguatan kelembagaan maka tantangan-tantangan tersebut akan terasa lebih berat. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tidak lagi bersifat teknis dari dalam daerah, namun lebih kepada kondisi eksternal.

Prospek dan perkembangan kondisi perekonomian makro Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2025 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun 2020-2024 walaupun dengan beberapa catatan. Sejalan dengan kecenderungan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan sebagai peranan dari sektor tersier seperti sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, sektor jasa-jasa, serta sektor pertanian berpengaruh signifikan dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam konteks makro regional, dengan memperhatikan latar belakang kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian nasional dan regional Lampung, diestimasikan perekonomian daerah Pesisir Barat masih mampu berkembang dan bertumbuh secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun mungkin akan melambat dibandingkan tahun sebelumnya akibat lesunya pertumbuhan ekonomi secara global yang berimbas pada berbagai negara belahan dunia termasuk kawasan Asia. Kondisi ini memerlukan sikap hati-hati dan sedikit konservatif utamanya dalam mengatasi eksesnya pada sektor riil dan imbasnya pada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan (keluarga miskin dan kelompok marjinal).

Tahun 2025, dimana jumlah penduduk miskin dan kondisi kemiskinan daerah masih harus dikelola dengan proposional dan profesional dalam kaitannya menjadikan masyarakat marjinal sebagai subjek pembangunan dengan pemberdayaan. Tujuan jangka panjangnya adalah dengan menurunnya angka kemiskinan juga akan menurunkan beban pemerintah daerah dalam penganggaran hibah dan bantuan sosial. Sehingga pendanaan dapat dialihkan pada sektor lainny Agar proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2025 tidak jauh berbeda bahkan meningkat pada tahun 2024, maka perlu ditunjang dengan nilai investasi yang tinggi serta peningkatan angka PDRB dari sektor-sektor. Kondisi ekonomi global, selain berpengaruh terhadap ekonomi nasional dan regional juga akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Pesisir

Barat. Diperlukan strategi regulasi dengan ditunjang dengan nilai investasi yang tinggi serta peningkatan angka PDRB dari sektor-sektor unggulan.

Prospek perekonomian Kabupaten Pesisir Barat pada Tahun 2025 dipengaruhi antara lain:

- 1) Letak Kabupaten Pesisir Barat yang cukup strategis yang berada di perbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu memberikan peluang sebagai daerah penghubung sehingga bisa meningkatkan perekonomian dalam sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa lainnya;
- 2) Mulai menurunnya produktivitas pertanian dibarengi dengan kenaikan pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor pertambangan dan penggalian serta administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib;
- 3) Mulai berkembangnya jumlah sektor industri, khususnya industri skala kecil dan menengah (IKM) dan industri kreatif yang langsung bersentuhan dengan masyarakat diharapkan dapat menjadi pendorong dalam menopang perekonomian Kabupaten Pesisir Barat dimasa yang akan datang;
- 4) Sebagai daerah penunjang, peranan sektor tersier seperti sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Jasa Keuangan dan Asuransidan Jasa Lainnya diharapakan dapat terus berkembang dan memberikan bpengaruh signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Pesisir Barat;
- 5) h.Target ekonomi makro Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - Target Pertumbuhan Ekonomi sebesar 2,65%-3,00%;
 - Target Tingkat Kemiskinan sebesar 12,50%-12,00%:
 - Target Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,03% 3,00%;
 - Target PDRB Perkapita sebesar 36,757 (juta rupiah) 37,569 (juta rupiah);
 - Target IPM sebesar 71,25;
 - Target Rasio Gini sebesar 0,314-0,295;
 - Target Nilai Tukar Petani sebesar 125,00;

3.1.4 Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2025

Berdasarkan pada perkembangan ekonomi daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya, serta dengan melihat pada tantangan dan prospek perekonomian daerah Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan akhir tahun 2025 serta dengan memperhatikan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menetapkan ulang targettarget sasaran makro pembangunan daerah untuk Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.7 Sasaran Makro Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Sasaran RKPD 2025	capaian sampai dengan Triwulan II	Sasaran Perubahan RKPD 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.80- 4,30	2,61%*	2,65-3,00
2	Tingkat Kemiskinan Daerah	Persen	13,04	12,64%	12,50 - 12,00
3	TPT	Persen	2.41	3,04%*	3,03 – 3.00%
4	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rupiah	33,570-34,150	35,261*	36,757 – 37.569
5	IPM	Poin	71,25	71,04*	71,25
6	Rasio Gini	Poin	0,305 - 0,295	0,315*	0,314 - 0,295
7	NTP	Poin	110,,04	124,98	125,00

Sumber : Data Diolah, 2025

3.2 Kerangka Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dari daerah yaitu (i) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (ii) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (iii) Urusan Pilihan; (iv) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; (v) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; (vi) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan; (vii) Unsur Kewilayahan; dan (viii) Unsur Pemerintahan Umum, kebijakan pengelolan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan daerah sebagai instrumen penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah bersanding dengan perencanaan, penatausahaan serta pengendaliannya.

Dalam RKP Tahun 2025 Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat tahun 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kebijakan berfokus pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pemerataan antardaerah.

Instrumen fiskal akan diarahkan untuk menyediakan ruang memadai bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan cara optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja negara lspending serta perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (innouatiue rtnancirlgl yang dikelola secata prudent dan kredibel

Guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan anggaran keuangan untuk sisa pelaksanaan tahun 2025 di Kabupaten Pesisir Barat diarahkan untuk:

- 1) Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (fiscal sustainability), dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, disamping memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- 2) Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;
- 3) Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara antara lain: (a) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit anggaran yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah; dan (b) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien serta akuntabel;
- 4) Memenuhi ketentuan *mandatory spending* sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
- 5) Mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2025.

Selanjutnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Permenadagri No. 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD dapat dilaksanakan dengan kondisi seperti hal-hal di bawah ini:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran (SilPA) sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perkembangan kondisi fiskal daerah yang tidak sesuai dari rencana awal pada tahun 2025 untuk penyusunan RKPD Tahun 2025 serta dinamika pembangunan yang menyebabkan terjadi perubahan terhadap kerangka keuangan daerah, termasuk penggunaan dana SilPA Tahun Anggaran 2024 (dalam hal ini terdapat defisit SilPA antara target yang ditetapkan pada APBD TA 2025 dengan data realisasi audit BPK RI terhadap APBD TA 2024). Perubahan kerangka keuangan daerah menyebabkan terjadi perubahan program, kegiatan, sub kegiatan pada tahun 2025 ini. Berdasarkan pada kondisi tersebut, kebijakan keuangan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 terdiri dari kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun 2025

Memperhatikan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan/Dana Transfer), serta pendapatan lain-lain. Sampai saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya dengan kebijakan yang tetap memperhatikan

kemampuan masyarakat secara umum, sekaligus menjaga stabilitas dan kesinambungan fiskal daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki, antara lain:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi (i) Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana dan pemeliharaan rutin bagi peningkatan pelayanan; (ii) Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah, baik melalui sosialisasi serta iklan layanan menggunakan media komunikasi publik dan media sosial; (iii) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah; (iv) Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah; (v) Meningkatkan sinergitas antar instansi yang berwenang dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah; (vi) Melakukan perbaharuan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (vii) Peningkatan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan PAD;
- Pendapatan Transfer yang meliputi (i) Memperbaharui berbagai variabel serta kebutuhan penghitungan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat; (ii) Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah; (iii) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam rangka persiapan usulan DAK; (iv) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Lampung untuk dana bagi hasil dari pemerintah provinsi; (v) Peningkatan tata kelola keuangan daerah serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan keuangan daerah;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang meliputi lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan, dikoordinasikan oleh daerah sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Adapun proyeksi kemampuan keuangan Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025, yaitu pada komponen Pendapatan Pajak Daerah dan Lain-Lian Pendapatan yang Sah
- 2) Pendapatan Transfer Pusat mengalami penurunan akibat kebijakan efisiensi Pemerintah Pusat
- 3) Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami peningkatan

Lain-lain Pendapatan Pendapatan Transfer PAD Total 0 5 10 15 20 25 30 PAD Pendapatan Transfer Total Lain-lain Pendapatan Realisasi Pendapatan 17,29 18,88 17.08 25,11

Gambar 3.7 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan I Tahun 2025

Sumber: BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2025

Hingga triwulan I Tahun Anggaran 2025 ini, Pendapatan Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 903.304.806.001 namun baru terealisasi Rp. 156.172.742.764. Beberapa Pos Pendapatan Daerah yang pencapaiannya masih sangat minim dan perlu dilakukan monitoring seperti PAD yang terealisasi sebesar 18,88% dengan capaian Rp. 7.144.555.703 dari target Rp. 37.846.769.641. kemudian pendapatan transfer hanya terrealisasi 17,08% dengan capaian Rp. 145.239.513.429 dari target Rp. 850.367.922.215 dan terakhir lain-lain pendapatan yang sah sudah terrealiasi sebesar 25,11% atau mencapai Rp. 3.788.673.632 dari target Rp. 15.090.114.145.

Berikut adalah uraian singkat realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025:

Tabel 3.8 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Pagu Anggaran TA 2025 (Rp.)	Realisasi Triwulan I TA 2025 (Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	PENDAPATAN	903.304.806.001	156.172.742.764.	17,29
	DAERAH			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	37.846.769.641	7.144.555.703	18,88
4.2	Pendapatan Transfer	. 850.367.922.215	145.239.513.429	17,08
4.3	Lain-lain Pendapatan	15.090.114.145	3.788.673.632	25,11
	Daerah yang sah			

Sumber: Bapenda - BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2025

Lebih lanjut, disajikan capaian realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat pada APBD TA 2020 - 2024 sebagai pembanding, sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat APBD TA 2022 – 2024

Unaian	Realisasi			
Uraian	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Daerah	29.045.920.662,99	36.026.850.720,77	21.433.153.424,91	
Pendapatan Transfer	740.715.628.670,00	732.671.743.170,00	760.213.161.279,00	

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0	16.305.429.876,00
JUMLAH PENDAPATAN	769.761.549.332,99	768.698.593.890,77	797.951.744.579,91

Sumber: Bapenda-BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2025

Dari berbagai pertimbangan serta melihat gambaran atas realisasi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah seperti yang telah diuraikan diatas serta analisis dan perkiraan dari sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan arah kebijakan keuangan daerah, maka proyeksi Pendapatan Daerah di Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10 Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2025

N.	II		Pagu Ang	garan (Rp.)	
No	Uraian	RKPD 2025	APBD TA 2025	P RKPD 2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)
4.	PENDAPATAN DAERAH	893.995.878.350	903.304.806.001	934.434.976.093	31.130.70.092
4.1	Pendapatan Asli Daerah	68.984.822.129	37.846.769.641	62.378.871.733	2.746.014.500
4.1.1	Pajak daerah	16.564.633.874	22.000.977.292	23.000.977.292	1.000.000.000
4.1.2	Retribusi Daerah	2.492.044.084	3.567.670.380	3.567.670.380	-
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	2.929.479.534	2.429.479.534	2.429.479.534	-
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	46.998.664.637	9.848.642.435	33.380.744.527	23.532.102.092
4.2	Pendapatan Transfer	809.920.942.076	850.367.922.215	856.965.990.215	6.598.068.000
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	691.370.634.000	741.238.956.000	674.837.024.000	- 66.401.932.000
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	118.550.308.076	109.128.966.215	182.128.966.215	73.000.000.000
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	15.090.114.145	15.090.114.145	15.090.114.145	-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	15.090.114.145	15.090.114.145	15.090.114.145	-

Sumber: Bappelitbangda & BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2025

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan Tahun 2024

Belanja daerah merupakan komponen pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Belanja daerah pada hakekatnya diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, pelayanan terhadap pembangunan infrastruktur, pelayanan terhadap ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta perlindungan sosial.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait operasional perkantoran pada tahun yang bersangkutan. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah melalui belanja belanja barang dan jasa dalam kaitanya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, belanja modal, dan belanja transfer kepada pemerintah desa.

Arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Pesisir Barat selama kurun waktu RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 dan dengan mempertimbangkan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, akan diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
- Prioritas. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur, energi dan pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat dan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih;
- 3) *Tolok Ukur dan Target Kinerja*. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas dan Fungsi setiap Perangkat Daerah;
- 4) *Optimalisasi Belanja Daerah,* Belanja Daerah khususnya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja operasi dan belanja modal

- disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta; dan
- 5) Transparan dan Akuntabel. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Berikutnya, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Berikut adalah kebijakan Belanja Daerah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat:

- a. Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD sampai dengan triwulan I tahun 2025 yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- b. Belanja daerah dilakukan penyesuaian setelah ditetapkannya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- c. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum layak serta mengembangkan sistem iaminan penanggulangan kemiskinan serta pelaksanaan ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah terutama yang berkaitan dengan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan. Belanja dalam rangka pemenuhan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan, unsur kewilayahan untuk kecamatan dan unsur pemerintahan umum;
- d. Belanja daerah diarahkan untuk pencapaian Visi, Misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan tetap memperhatian capaian kinerja dan kerangka pendanaan serta dalam upaya mendukung pelaksanaan prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung;
- e. Pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Pesisir Barat diarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (input) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus

- terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat:
- f. Belanja pegawai digunakan untuk gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan turun dengan asumsi penyesuaian pada perhitungan ulang hingga Semester I;
- g. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran atau pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dari masing-masing perangkat daerah, pada Perubahan RKPD Tahun 2025 diproyeksikan turun dalam upaya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah;
- h. Belanja bantuan sosial digunakan untuk dalam rangka meningkatkan stimulus kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat marjinal dan diberikan melalui pendataan yang terukur, selektif tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi, pada perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan tetap
- i. Belanja hibah dilakukan secara selektif, sesuai kebutuhan, pemenuhan peraturan perundang-undangan, memenuhi unsur urgensi serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, pada perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan naik;
- j. Belanja modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur daerah untuk penunjang ekonomi masyarakat dan pengadaan sarana dan prarasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dan pelayanan publik, pada perubahan RKPD Tahun 2025 mengalami penurunan untuk mendukung kebijakan efisiensi Pemerintah Pusat;
- k. Belanja tidak terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksaan kegiatan kerja yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh dari Pemerintah Daerah serta sifatnya tidak biasa dan/atau tanggap darurat, pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan naik;
- Belanja Transfer merupakan bantuan keuangan dan bagi hasil kepada pemerintahan desa yang bersifat umum. Belanja transfer dianggarkan sesuai dengan perhitungan dari peraturan perundang-undangan dan diarahkan pada pencapaian prioritas daerah di desa, pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan turun menyesuaikan dengan kewajiban daerah terhadap Pemerintahan Desa;
- m. Hasil realisasi capaian Belanja Daerah sampai dengan Triwulan I TA 2025 belum mampu terealisasi secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari Total Belanja Daerah yang baru mampu teralisasi 11,99%. Angka capaian ini didapatkan dari perhitungan Belanja Operasi yang terealisasi pada angka 15,91%, Belanja Modal sebesar 7,75%, Belanja Tidak Terduga masih pada 0,00% dan Belanja Transfer mencapai 2,15%. Namun demikian, optimisme untuk pencapaian target-target Belanja pada Triwulan I Tahun 2025 akan dapat terwujud dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas belanja yang terukur.

Belanja Belanja Tidak Belanja Total Transfer

Modal Terduga Transfer

Capaian 15,91 7,75 0 2,15 11,99

Gambar 3.8 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan I Tahun 2025

Sumber: BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2025

Total Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat pada APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp904.304.806.001 dan baru terserap sebesar Rp.108.387.586.727 atau 11,99%. Secara umum realisasi belanja daerah masih sangat minim. Sebagaimana anggaran belanja operasi sebesar Rp.577.380.576.532 baru terrealisasi sebesar Rp.91.872.195.480 atau 15,91%, kemudian anggaran modal sebesar Rp.172.977.724.002 baru terrealisasi belania Rp.13.405.400.488 atau 7,75%. Belanja tidak terduga dengan anggaran sebesar Rp.9.000.000.000 di triwulan I 2025 belum ada realisasi dan terakhir anggaran beania transfer sebesar Rp.144.946.505.476 baru terrealisasi sebesar Rp.3.109.990.759 atau 2.15%.

Capaian serapan belanja yang masih rendah menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi Pemeintah Pusat sehingga ada beberapa pos belanja yang dilakukan *refocusing* agar terhadap belanja Pemerintah Daerah agar keberlanjutan pembangunan tetap berjalan untuk mewujudkan kesejahetraan bagi masyarakat.

Adapun gambaran singkat realisasi Belanja Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan I Tahun 2025

No	Uraian	Pagu Anggaran TA 2025 (Rp.)	Realisasi Triwulan I TA 2025 (Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	BELANJA DAERAH	904.304.806.001	108.387.586.727	11,99
5.1	Belanja Operasi	577.380.576.532	91.872.195.480	15,91
5.1.1	Belanja Pegawai	364.935.068.984	74.127.282.386	20,31
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	204.531.920.879	17.402.913.094	8,51

Belanja Bunga	0	0	0,00
Belanja Subsidi	0	0	0,00
Belanja Hibah	5.389.186.660	342.000.000	6,35
Belanja Bansos	2.524.400.000	0	0,00
Belanja Modal	172.977.724.002	13.405.400.488	7,75
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.799.581.850	47.351.847	0,48
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85.054.149.096	606.680.045	0,71
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	73.739.266.258	12.751.368.596	17,29
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.804.726.798	0	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	580.000.000	0	0,00
Belanja Tidak Terduga	9.000.000.000	0	0,00
Belanja Tidak Terduga	9.000.000.000	0	0,00
Belanja Transfer	144.946.505.476	3.109.990.759	2,15
Belanja Bagi Hasil	2.652.939.000	0	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	142.293.566.476	3.109.990.759	2,19
	Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bansos Belanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Belanja Tansfer Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan	Belanja Subsidi 0 Belanja Hibah 5.389.186.660 Belanja Bansos 2.524.400.000 Belanja Modal 172.977.724.002 Belanja Modal Tanah 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.799.581.850 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 85.054.149.096 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 73.739.266.258 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.804.726.798 Belanja Modal Aset Lainnya 580.000.000 Belanja Tidak Terduga 9.000.000.000 Belanja Tidak Terduga 9.000.000.000 Belanja Transfer 144.946.505.476 Belanja Bagi Hasil 2.652.939.000	Belanja Subsidi 0 0 Belanja Hibah 5.389.186.660 342.000.000 Belanja Bansos 2.524.400.000 0 Belanja Modal 172.977.724.002 13.405.400.488 Belanja Modal Tanah 0 0 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.799.581.850 47.351.847 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 85.054.149.096 606.680.045 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 73.739.266.258 12.751.368.596 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.804.726.798 0 Belanja Modal Aset Lainnya 580.000.000 0 Belanja Tidak Terduga 9.000.000.000 0 Belanja Tidak Terduga 9.000.000.000 0 Belanja Transfer 144.946.505.476 3.109.990.759 Belanja Bagi Hasil 2.652.939.000 0

Sumber: BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2025

Capaian belanja daerah pada Triwulan I TA 2025 yang cenderung kecil diasumsikan akan naik pada akhir tahun anggaran. Hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi Belanja Daerah pada APBD TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.13 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat APBD TA 2022-2024

Uraian	Realisasi				
Ul alali	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)		
BELANJA					
Belanja Operasi	421.755.335.654,00	471.972.151.479,00	552.991.447.421,63		
Belanja Modal	217.250.297.659,00	155.905.944.404,00	90.746.267.770,14		
Belanja Tidak Terduga	8.171.030,94	364.550.000,00	355.000.000,00		

Belanja Transfer	129.616.312.652,00	140.713.439.454,00	155.660.949.925,00
JUMLAH BELANJA	768.630.116.995,94	768.956.085.337,00	799.753.665.116,77

Sumber : BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2025

Selanjutnya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yaitu (i) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (ii) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelaeyanan Dasar; (iii) Urusan Pilihan; (iv) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; (v) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; (vi) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (vii) Unsur Kewilayahan (viii) Unsur Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan daerah (yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya) dijabarkan dalam bentuk Program dan Indikasi Kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selama kurun waktu sisa tahun 2025. Gambaran Proyeksi Belanja Daerah di Kabupaten Pesisir Barat untuk Perubahan RKPD Tahun 2025 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Target Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)					
NO	Uraian	RKPD 2025	APBD TA 2025	P RKPD 2025	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)		
5	BELANJA DAERAH	896.573.116.916	904.304.806.001	935.875.176.832	39.302.059.916		
5.1	Belanja Operasi	654.199.317.289	576.650.776.523	670.018.127.312	34.389.045.264		
5.1.1	Belanja Pegawai	394.767.573.341	364.932.268.984	460.185.833.646	-2.375.154.100		
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	245.518.106.818	203.836.920.879	201.613.707.006	-1.788.438.508		
5.1.5	Belanja Hibah	9.913.637.130	5.357.186.660	5.694.186.660	337.000.000		
5.1.6	Belanja Bansos	4.000.000.000	2.524.400.000	2.524.400.000	0		
5.2	Belanja Modal	85.725.000.000	173.707.524.002	135.684.288.074	38.023.235.928		
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.000.000.000	-		0		
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.550.000.000	9.799.581.850	10.848.109.212	1.048.527.362		
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.000.000.000	85.783.949.096	54.962.323.806	-30.821.625.290		
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan Irigasi	28.500.000.000	73.739.266.258	65.489.128.258	-8.250.138.000		
5.2.5	Aset Tetap Lainnya	3.675.000.000	3.804.726.798	3.804.726.798	0		
5.2.6	Aset Lainnya	0.00	580.000.000	580.000.000	0		

5.3	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	0
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	0
5.4	Belanja Transfer	150.648.799.627	144.946.505.476	144.946.505.476	0
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.771.636.000	2.652.939.000	2.652.939.000	0
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	147.877.163.627	142.293.566.476	142.293.566.476	0

Sumber : Bappelitbangda, BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2025

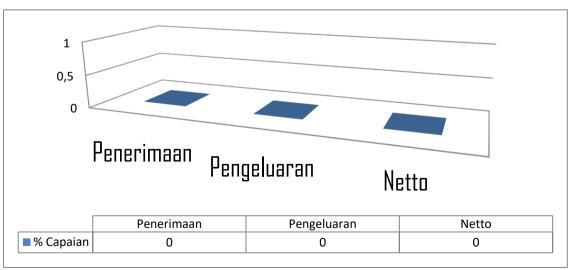
3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan Tahun 2025

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara APBD. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ini pada dasarnya bersifat pasif, yaitu:

- a. Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan RKPD Tahun 2024 diarahkan untuk menyeimbangkan antara kemampuan pendapatan daerah dengan belanja daerah;
- b. Hasil realisasi capaian Pembiayaan Daerah sampai dengan Triwulan I TA 2025 masih nihil atau 0,00% karena belum Penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Gambar 3.9 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan I Tahun 2025



Sumber: BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2024

Total pembiayaan daerah masih belum terrealisasi dimana target yang ditetapkan pada angka Rp. 1.440.200.739. penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp. 1.000.000.000. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah berupa penyertaan modal dengan target nihil.

Tabel 3.15 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan I Tahun 2025

No	Uraian	Pagu Anggaran TA 2025 (Rp.)	Realisasi Triwulan I TA 2025(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	1.000.000.000	0	0,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	1.000.000.000	0	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2025

Sebagai pembanding capaian kinerja, disajikan capaian realisasi pembiayaan daerah pada TA 2022-2024 sebagai berikut:

Tabel 3.16 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat APBD TA 2022-2024

Urajan	Realisasi					
Oraian	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)			
PEMBIAYAAN						
Penerimaan Pembiayaan	8.868.180.385,74	7.499.612.722,44	5.742.121.276,21			
Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	1.500.000.000,00	2.500.000.000,00			
Pembiayaan Netto	6.368.180.385,74	5.999.612.722,44	3.242.121.276,21			
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	7.199.612.722,44	5.742.121.276,21	1.440.200.739,35			

Sumber: BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2025

Gambaran Proyeksi Pembiayaan Daerah di Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan RKPD Tahun 2025 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17 Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2025

		Pagu Anggaran (Rp.)					
No	Uraian RKPD 2025		APBD TA 2025	P RKPD 2025	Selisih		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)		
6	PEMBIAYAAN DAERAH	2.577.238.566	1.000.000.000	1.440.200.739	440.200.739,00		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	5.077.238.566	1.000.000.000	1.440.200.739	440.200.739,00		
6.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	5.077.238.566	1.000.000.000	1.440.200.739	440.200.739,00		
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0,00		
6.1.3	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0	0,00		
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0,00		

6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000	0	0	0,00
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000	0,00	0	0,00
6.2.2	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0,00
6.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0,00
6.2.4	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2025

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atau target atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas dan/atau gabungan beberapa program prioritas. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan Perangkat Daerah (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah maupun perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Sedangkan prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2025 telah dituangkan dalam dokumen RKPD tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam dokumen tersebut telah menyajikan strategi-strategi yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang menyebutkan adanya efisiensi belanja termasuk terhadap Transfer ke Daerah dalam APBN Tahun 2025, serta menginstruksikan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk membatasi atau mengurangi belanja tertentu dan menyesuaikan belanja APBD Tahun 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah, maka penyesuaian tersebut akan diakomodasi dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Dalam Perubahan RKPD tahun 2025 perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan tetap mengacu dan memperhatikan:

- 1) Sasaran, arah kebijakan dan program Ranwal RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029;
- 2) Hasil evaluasi kinerja RKPD sampai dengan triwulan I tahun 2025
- 3) Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025;

- 4) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan
- 5) Kondisi internal dan eksternal daerah

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 merupakan penjabaran dari pelaksanaan tahun keempat RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026. Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati terpilih yang tertuang dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029.

Selanjutnya dalam rangka menjaga konsistensi, sinergi dan menjamin keselerasan sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri di atas, maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2025 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Matriks Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Menurut Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Perubahan RKPD Tahun 2025

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target RKPD 2025	Target Perubahan RKPD 2025				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				
Terwujudnya Kal	Terwujudnya Kabupaten Pesisir Barat yang Sejahtera, Maju, Madani dan Religius sebagai Destinasi										
Wisata Terdepan				T	T						
Mengembangkan Infrastruktur yang	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur		Indeks Ketahana n Daerah	Angka	0,36	-	0,66				
Berketahanan Pangan dan Tangguh Bencana serta Berkelanjutan	Dasar yang Berketahanan Pangan dan Tangguh Bencana serta Berkelanjutan	Meningkatkan Layanan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Kualitas Layanan Infrastruk tur	Angka	63	60	60				
		Meningkatkan Konektivitas Wilayah	Rasio Konektvit as	Angka	0,36	90*	0,43				
		Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahana n Pangan	Angka	75,77	75,77	80				
		Meningkatkan Mitgasi Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	Angka	188,85	180,24	187,95				
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkunga n Hidup	Angka	76,45	74,53	76,45				
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Alam dan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan		Pertumbu han Ekonomi	Persen	2,61	3,80- 4,30	2,65-3,00				

Ekonomi Kerakyatan	Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Optimalisasi Potensi Sumber Daya Daerah	PDRB Sektor Pertanian, Kehutana n dan Perikanan	Milyar Rupiah	1.374,78	-	1.370,75- 1.412,50
			PDRB Sektor Penyediaa n Akomodas i dan Makan Minum	Milyar Rupiah	75,57	1,78*	76,50- 80,25
			PDRB Sektor Perdagang an Besar Kecil; Reparasi Kendaraa n Modal dan Sepeda Motor	Milyar Rupiah	572,68	11,58*	575,50- 615,25
		Pengentasan Kemiskinan dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Peningkatan Investasi yang	Tingkat Kemiskina n	Persen	12,64	13,04	12,50- 12,00
			Tingkat Pengangg uran Terbuka	Angka	3,04	2,41	3,03
		Efektif dan Efisien	Increment al Capital Output Rasio (ICOR)	Angka	8,130	-	8,131
Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang		Indeks Pembangu nan Manusia	Angka	71,04	71,25	71,54
Berdaya Saing	Berdaya Saing	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,75	63,79	74
		Meningkatkan Intelektualitas dan Karakter Anak Usia Sekolah	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,16	12,08	12,26
		Meningkatkan Kualitas Keluarga, Kesetaraan	Indeks Kualitas Keluarga	Angka	0,10	-	0,10
		Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangu	Angka	95,18	95,24	95,35

			nan Gender				
			Indeks Perlindun gan Anak	Angka	60,9	-	60,9
		Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangu nan Pemuda	Angka	53,17	-	53,25
Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan	Mewujudkan Kehidupan Masayarakat yang		Indeks Kerukuna n Umat Beragama	Angka	74,07- 74,13	74,14- 74,50	76,07- 76,96
Berbudaya	Harmonis, Berbudaya dan Inklusif	Meningkatkan Kemandirian Pekon	Indeks Pekon	Angka	7,76	4,31	7,76
		Mewujudkan Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangu nan Kebudaya an	Angka	57,82	-	58,66
		Meningkatkan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Persentas e Penegaka n Hukum Peraturan Daerah	Persen	100	100	100
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	65,53	C*	65,75
Publik	Publik Yang Inlusif Berbasis Digital		Indeks Sistem Akuntabili tas Kinerja Pemerinta han	Angka	60,02	В*	60,25
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dengan Digitalisasi	Indeks Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik	Angka	2,94	-	2,95
			Maturitas Penyeleng garaan Sistem Pengendal ian Intern Pmerintah	Angka	2,55	-	2,55
		Meningkatkan Integritas dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,66	-	3,75

 $Sumber: Rancangan\ RPJMD\ Kabupaten\ Pesisir\ Barat\ Tahun\ 2025-2029,\ 2025$

Sebagai kesinambungan perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, maka memasuki periode tahun keempat RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tetang RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 dan tahap pertama RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045, perencanaan yang harus dilalui pada tahap ini adalah tahapan perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan dan/atau mempertahankan capaian-capaian dari kinerja yang telah dicapai.

Perubahan RKPD Tahun 2025 mensinergikan pencapaian target dari pelaksanaan tahun keempat dari RPJMD Tahun 2021-2026, pencapaian target dari Racangan RPJMD Tahun 2025-2029, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung. Tema dan prioritas pada Tahun Anggaran 2025 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025. Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2025 adalah "Pemantapan Ekonomi Masyarakat dan Meningkatnya Kualitas SDM Serta Meningkatkan Kualitas Infrastruktur" ditetapkan untuk mewujudkan pencapaian Visi Kabupaten Pesisir Barat "Terwujudnya Pesisir Barat yang Sejahtera, Maju, Madani dan Religius sebagai Destinasi Wisata Terdepan". Berikutnya diperlukan penegasan terhadap upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan serta akan mendasari gerak langkah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat selama satu tahun kedepan yaitu pada tahun 2025.

Untuk menunjang pelaksanaan Tema Pembangunan tersebut, ditetapkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat untuk tahun 2025 dalam pelaksanaan roda pemerintahan daerah dan perencanaan pembangunan untuk peningkatan penjaminan terlaksananya pelayanan pembangunan daerah, sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan layanan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini yang terjangkau dan bermutu bagi penduduk;
 - b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang terjangkau dan berkualitas;
 - c. Peningkatan pembinaan dan akses layanan keluarga berencana;
 - d. Penurunan diskriminasi dan peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga;
 - e. Pemberdayaan dan pengembangan kompetensi pemuda dan organisasi kepemudaan;
 - f. Peningkatan kompetensi dan keterampilan kerja, serta pelayanan penempatan kerja bagi penduduk usia kerja;
- 2. Pembangunan Infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dengan arah kebijakan:
 - a. Penyelenggaraan infrastruktur jaringan jalan;
 - b. Mengembangkan moda transportasi yang aman, murah dan terjangkau dan berkualitas;
 - c. Pembangunan failitas layanan permukiman dan perumahan yang layak dan berkualitas dengan memperhatikan penataan ruang;
 - d. Pengembangan jaringan irigasi daerah dari hulu hingga hilir;
 - e. Perencanaan, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan, pencemaran dan kerusakan kualitas udara, air dan lahan;

- f. Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penyelamatan bencana yang efektif, efisien dan tepat guna termasuk pemadam kebakaran;
- 3. Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan produktivitas industri cepat tumbuh;
 - b. Peningkatan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas pendukung perdaganngan barang dan jasa;
 - c. Peningkatan dan pengembangan iklim investasi yang kondusif, stabil dan berdaya saing;
 - d. Optimalisas pengelolaan pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - e. Peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan penyuluh dan petani;
 - f. Optimalisasi pengelolaan Perikanan tangkap dan budidaya;
 - g. Optimalisasi penyediaan, penyaluran dan pengendalian pangan di Masyarakat sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - h. Peningkatan kapasitas, kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM;
 - i. Penguatan dan perluasan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial serta penanggulangan kemiskinan;
 - j. Peningkatan pengelolaan pariwisata yang terintegrasi dengan pengelolaan kebudayaan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat;
- 4. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas, dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah dengan berpedoman pada penggunaan data dan teknologi informasi;
 - c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan manajemen ASN yang profesional proposional;
 - d. Peningkatan dukungan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan perangkat daerah serta peningkatan layanan kepada kepala daerah dan anggota DPRD;
 - e. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum:
 - f. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pimpinan dan pemerintan daerah;
 - g. Membangun tata kelola keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- 5. Harmonisasi kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik;
 - c. Peningkatan pembangunan desa dan masyarakatnya termasuk pada kawasan transmigrasi;

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2025 secara umum masih dalam upaya pemantapan ekonomi masyarakat, kaitanya

dengan usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pembangunan infrastruktur dan aksesbilitas daerah untuk peningkatan perekonomian daerah. Prioritas pembangunan pada tahun 2025 diarahkan pada upaya memantapkan ekonomi masyarakat dilakukan dengan revitalisasi sektor pertanian dan perikanan serta pemantapan daya saing sektor pariwisata unggulan Daerah yang berpijak pada kearifan lokal. Peningkatan kualitas SDM diarahkan untuk menyediakan manusia yang berkualitas sebagai faktor produksi untuk pembangunan daerah terutama sektor pertanian dan pariwisata serta ekonomi kreatif. Pada tahun 2025 ini juga kembali fokus pembangunan untuk penyelesaian beberapa proyek strategis daerah dalam menunjang pelayanan umum kepada masyarakat.

Melaksanakan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dibawah ini ditampilkan tabel keselerasan prioritas pembangunan daerah P-RKPD Tahun 2025 dengan prioritas pembangunan nasional.

Tabel 4.2. Keselarasan Program Prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

No	F	Prioritas Nasinal	Prioritas Provisi	Prioritas Kabupaten
	Asta Cita	PHTC	Lampung	Pesisir Barat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).			
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	1) Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian dengan Lumbung Pangan Desa, Daerah dan Nasional		
3	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.	1) Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Menjamin Penyediaan Rumah Murah Bersanitasi Baik untuk yang Membutuhkan, Terutama Generasi MIlenial, Generasi Z dan Masayarakat Berpengahsilan Rendah (MBR)	Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan

4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, da	2)	Memberikan Makanan Bergizi Sehat di Sekolah dan Pesantren serta Bantuan Gizi untuk Balita dan Ibu Hamil Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Menuntaskan Kasus TBC dan Membangun Rumah Sakit Lengkap Berkualitasd di Kabupaten Membangun Sekolah-Sekolah Unggulan Terintegrasi di Setiap Kabupaten dan Memperbaiki Sekolah- Sekolah yang Perlu di Renovasi	Peningkatan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.				
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1)	Melanjutkan dan Menambah Program Kartu-Kartu Kesejahteraan Sosial serta Kartu Usaha untuk Menghilangkan Kemiskinan Absolut	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.	2)	Menaikan Gaji ASN (Terutama Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan dan Penyuluh), TNI/POLRI dan Pejabat Negara Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan Meningkatkan Rasio Pnerimaan Negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur			Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Harmonisasi kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat

Sumber : Data Diolah, 2025

Masih dalam rangka keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dalam melaksanakan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dibawah ini ditampilkan tabel keselarasan prioritas pembangunan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Tabel 4.3. Keselarasan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan Prioritas Pembangunan Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Visi/ Misi	Prioritas Pembangunan			
(1)	(2)	(3)			
Visi	Terwujudnya Pesisir Barat yang Sejahtera, Maju, Madani dan Religius sebagai Destinasi Wisata Terdepan				
1	Mengembangkan Infrastruktur yang Berketahanan Pangan dan Tangguh Bencana serta Berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			
2	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Alam dan Ekonomi Kerakyatan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			
3	Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			
4	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya	Harmonisasi kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			
5	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			

Sumber: Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, 2025

Dalam upaya memastikan sinergitas perencanaan jangka menengah, prioritas pembangunan tersebut telah selaras dengan visi dan misi Gubernur Provinsi Lampung terpilih yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 4.4. Keselarasan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih.

No	Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih		
(1)	(2)	(3)		
Visi	Terwujudnya Pesisir Barat yang Sejahtera, Maju, Madani dan Religius sebagai Destinasi Wisata Terdepan	Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045		
1	Mengembangkan Infrastruktur yang Berketahanan Pangan dan Tangguh Bencana serta Berkelanjutan	Mendorong Pertumbuhan ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif		

2	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Alam dan Ekonomi Kerakyatan	
3	Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif
4	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan dan
5	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efekif dan Berintegritas

Sumber: Rancangan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, 2025

Tema dan prioritas pembangunan tahun 2025 tersebut juga menetapkan target sasaran makro pembangunan. Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berusaha untuk bersinergi dalam mencapai target kinerja dimaksud dalam upaya pelaksanaan sistem pembangunan nasional yang terintegrasi dari pusat hingga daerah. Target kinerja ini dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 4.5 Keselarasan Target Sasaran Makro Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2025

No	Indikator	Pemerintah Pusat	Provinsi Lampung	Kabupaten Pesisir Barat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,6	4,9 – 5,3	2,65 – 3,50
2	Inflasi (%)	-	1,5 – 3,5	-
3	PDRB Perkapita (juta rupiah)	21,8	52,6 – 54,6	36,757-38,630
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 - 5,0	3,8 - 3,5	2,81 - 3,03
5	Tingkat Kemiskinan (%)	7,8 – 8,0	9,5 – 10	12,00-12,50
6	Indeks Modal Manusia (Nilai), Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	0,56	72,97	71,54
7	Indeks Gini (Nilai)	0,379 - 0,382	0,282 - 0,293	0,30 - 0,29
8	Nilai Tukar Petani (Nilai)	105 - 108	109 - 110	125
9	Nilai Tukar Nelayan (Nilai)	107 - 110	-	103,7
10	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)/Ton CO2E	38,6	13	105.990,05

Sumber : Data Diolah, 2025

Sebagai tindak lanjut dan implementasi Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029 Visi dan Misi Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dan sinergitas dengan Visi dan Misi Nasional Tahun 2025-2029, maka Arah Kebijakan Umum pembangunan selama kurun waktu 2025-2029 akan dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yakni:

a. Pendekatan Pengembangan Wilayah

Pendekatan pembangunan melalui Pengembangan Wilayah merupakan cara pendekatan pembangunan yang sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, pendekatan kewilayahan merupakan metode pendekatan yang memungkinkan terjadinya sinergi dan kompatibilitas antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Pengembangan Wilayah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Pengembangan Ekonomi Wilayah, Tata Ruang, Kawasan, dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Perekonomian wilayah dikembangkan berdasarkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu kepada agribisnis dan pertanian secara umum. Dengan demikian sektor pertanian akan direvitalisasi sehingga mampu kembali berkembang sebagai titik tumpu perekonomian rakyat. Pertanian yang telah mengalami revitalisasi dikembangkan pada kawasan tertentu sesuai dengan tata ruang dan kawasan tersebut dikembangkan menjadi lahan pertanian abadi. Revitalisasi Pertanian tersebut akan memungkinkan pengembangan dan transformasi dari agribisnis menjadi agroindustri. Pengembangan agroindustri diharapkan mampu mempertahankan ketahanan pangan, menyerap tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan industri bioenergi serta pada akhirnya membantu meningkatkan sektor-sektor penunjang lainnya.

Pengembangan pertanian secara simultan dilakukan dengan tetap menjaga lingkungan hidup, serta telah mengantisipasi adanya perubahan iklim dan pemanasan global dengan tindakan adaptasi dan mitigasi yang baik. Dengan demikian, apa yang dilakukan akan memungkinkan terjadinya keseimbangan dinamis antara pemenuhi kebutuhan pangan dan terciptanya ketahanan pangan dengan pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan air.

Lingkungan hidup yang terpelihara, mulai dari pantai, sampai ke gunung, teluk, dan kepulauan dioptimalkan sebagai objek wisata. Kegiatan pelestarian alam, baik berupa proses pelestarian maupun hasilnya, juga dapat dikembangkan sebagai objek wisata baru. Dengan demikian pariwisata diharapkan dapat tumbuh sebagai sumber pendapatan baru yang melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga menjadi implementasi konkret dari konsep ekonomi kerakyatan.

2) Pengembangan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Sosial

Infrastruktur berskala tinggi yang akan dikembangkan selain bersifat visioner dan monumental, juga bersifat fungsional dan mampu berperan sebagai lokomotif pengembangan perekonomian daerah secara keseluruhan. Infrastruktur tersebut antara lain: pengembangan Bandara Krui (Bandara M Taufik Kemas);

Sifat visioner dan monumental diperlukan sebagai daya tarik investasi, sehingga infrastruktur yang dikembangkan juga dapat tumbuh sebagai kawasan wisata baru. Sementara sifat dasar fungsional dari infrastruktur tetap dikembangkan sebagai *core* utama, sehingga kombinasi dari berbagai karakter ini diharapkan mampu mengundang investor. Dengan adanya investor, maka infrastruktur dapat tumbuh dan berkembang sebagai lokomotif yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Selain infrastruktur berskala tinggi juga dikembangkan infrastruktur mikro yang mampu membuka secara luas daerah yang masih terisolir. Infrastuktur mikro meliputi antara lain: jalan tembus; listrik perdesaan; air bersih perdesaan; energi matahari; dan jaringan komunikasi.

3) Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pengembangan Budaya

Pembangunan daerah direncanakan dan akan dilaksanakan oleh seluruh sumberdaya manusia (SDM) yang berada di Provinsi Lampung. Dengan demikian,

pengembangan SDM menjadi fokus penting pembangunan dalam periode RPJMD 2025-2029. Pengembangan SDM terkait dengan kemampuan, keahlian, dan kapasitas SDM setempat, sehingga penyiapan SDM dilakukan sejak dini melalui berbagai proses pendidikan baik, baik dalam ilmu umum maupun keagamaan, kemudian diikuti dengan berbagai pelatihan peningkatan keahlian. Kondisi ini menuntut adanya penyiapan berbagai sarana, prasara, tenaga kependidikan, serta kepelatihan yang baik. Pada beberapa daerah tertentu akan dikembangkan fasilitas pendidikan dasar dan sistem pendidikan yang berskala internasional.

Penyiapan SDM didukung dengan penyiapan gizi berkualitas dan pelayanan kesehatan yang baik. Penyiapan gizi akan terkait dengan pengediaan bahan makanan lengkap (secara nutrisi) dan berkualitas, namun terjangkau. Sedangkan pelayanan kesehatan akan berkaitan dengan penyediaan kemudahan layanan kesehatan, serta tersedianya tenaga kesehatan dan obat-obatan yang mencukupi. Pelayanan kesehatan tidak saja bersifat kuratif, namun lebih penting yang bersifat preventif.

Pengembangan SDM Lampung dilakukan dengan tidak melepaskan aspek budaya lokal. Pengembangan budaya dilakukan dengan menggali, memperkuat, dan akhirnya mengembangkan lebih lanjut budaya lokal dalam segala bentuk manifestasinya, baik berupa tata nilai, sistem hidup, arsitektur, gerak tari, maupun pertanian, dan cara bercocok tanam. Dengan demikian, proses penyiapan SDM akan menghasilkan generasi yang unggul tanpa kehilangan jati diri.

Pada sisi lain, pengembangan budaya lokal beserta kreasinya akan mampu mendukung pengembangan pariwisata budaya. Dengan demikian pengembangan budaya lokal pada akhirnya mampu berkembang sebagai sumber pendapatan baru, sebagai pendukung ekonomi kerakyatan yang sedang dibangun dan dikembangkan.

b. Pendekatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pendekatan pembangunan melalui Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan cara pendekatan pembangunan yang menempatkan daerah sebagai perencanan, pelaksana, pengawas dan yang mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan tersebut. Pendekatan pengelolaan keuangan daerah merupakan metode pendekatan yang memungkinkan terjadinya sinergi dan kompatibilitas antara kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Optimalisasi dan Efisiensi Keuangan Daerah

Arah kebijakan umum berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang pertama adalah melalui optimalisasi semua potensi sumber keuangan daerah dan digunakan secara efisien untuk biaya pembangunan. Optimalisasi keuangan daerah diikuti dengan tertib administrasi melalui penggunaan sistem informasi, sehingga memungkinkan terjadinya transparansi dan akuntabilitas anggaran.

2) Pengembangan Sumber Pendapatan Baru

Arah kebijakan umum berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang kedua adalah melalui pengembangan sumber pendapatan baru secara kreatif dan inovatif, seperti pengembangan BUMD; pengembangan wisata alam berbasis pulau terpencil, wisata kuliner, serta wisata konservasi, dll. Dengan demikian pengembangan sumber pendapatan baru tersebut selaras dan sinergis dengan pengembangan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Prioritas-prioritas serta metode pendekatan diatas diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan

yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang *pro-growth, pro-job, pro-poor,* dan *pro-environment*. Masih berkaitan dengan prioritas tersebut di atas, pada Kabupaten Pesisir Barat prioritas-prioritas pembangunan untuk tahun 2025 tersebut dibebankan kepada Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Barat dengan langkah-langkah kebijakan disusun dalam urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia, Baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas, diprioritaskan pada pelaksanaan Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Tenaga Kerja, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Pemuda dan Olahraga, Urusan Perpustakaan, Urusan Kearsipan, Urusan Transmigrasi;
- b. Pembangunan Ekonomi Daerah, difokuskan pada pelaksanaan Urusan Pangan, Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Penanaman Modal, Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Pariwisata, Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Perindustrian;
- c. Pembangunan Infrastruktur dan Aksesbilitas Daerah, difokuskan pada pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Pertanahan, Urusan Perhubungan;
- d. Harmonisasi kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat, difokuskan pada pelaksanaan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Urusan Sosial, Urusan Kebudayaan, Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- e. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, difokuskan pada pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, Urusan Persandian, Unsur Sekretariat Daerah, Unsur Sekretariat DPRD, Unsur Perencanaan, Unsur Keuangan, Unsur Kepegawaian, Unsur Pendidikan dan Pelatihan, Unsur Penelitian dan Pengembangan, Unsur Inspektorat Daerah, Unsur Kecamatan.

4.2.1. Program Prioritas Daerah

Pelaksanaan program prioritas daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat diarahkan untuk tahun perencanaan 2025. selanjutnya akan dijelaskan gambaran prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 disandingkan dengan program dari perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan pada pembagian pelaksanaan Urusan Wajib (Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar), Urusan Pilihan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan, Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan, serta Unsur Pemeriintahan Umum sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 Program Prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 dalam RPJMD Tahun 2021-2026

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas RPJMD 2021-2026	Indikator	Target	Perangkat Daerah Pelaksana	Prioritas RKPD Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Misi I	Meningkatkan				
	Kualitas Sumber				
	Daya Manusia				
	Secara				

	Berkeadilan, Maju				
Tuj 1	Dan Berdaya Saing Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	71,54		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Sas 1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Daerah Yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	71,54		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
	Program Pengelolaan Pendidikan	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan (Persen)	100	Dinas P dan K	
	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Daerah yang dikelola (Lokasi)	1	Sekretariat Daerah	
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (Persen)	35	Sekretariat Daerah	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan (Persen)	100	Dinas Kesehatan	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan (Persen)	100	Dinas Kesehatan	
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Tingkat Pengawasan dan Tindak Lanjut terhadap Perizinan Usaha (Persen)	100	Dinas Kesehatan	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif (Persen)	100	Dinas Kesehatan	
	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	0.95	Dinas PP PA dan KB	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Total Fertility Rate (Angka)	2.13	Dinas PP PA dan KB	
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (Angka)	62.50	Dinas PP PA dan KB	
Tuj 2	Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Pemuda Dan Penduduk Usia Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	3,03		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Sas 2	Menurunnya Jumlah Pengangguran Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	3,03		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

	T		1	1	T
	Program	Cakupan Pemenuhan	60.00	Dinas Pora	
	Pengembangan	Pengembangan			
	Kapasitas Daya	Kapasitas Daya Saing			
	Saing Kepemudaan	Kepemudaan (Persen)			
	Program	Cakupan Pemenuhan	60.00	Dinas Pora	
	Pengembangan	Pengembangan			
	Kapasitas Daya	kapasitas Daya Saing			
	Saing Keolahragaan	Keolahragaan			
		(Persen)			
		(rersell)			
	Program Pelatihan	Tingkat Pengangguran	2.41	Dinas Trans	
	Kerja Dan	Terbuka (Persen)	2.71	Naker dan	
	Produktivitas	Terbuka (Tersen)		Perindustrian	
				Permuusuran	
	Tenaga Kerja	m: l · D · · · ·	7471	ъ. п	
	Program	Tingkat Partisipasi	74.71	Dinas Trans	
	Penempatan Tenaga	Angkatan Kerja		Naker dan	
	Kerja	(Persen)		Perindustrian	
	Program Hubungan	Cakupan Penyelesaian	75.00	Dinas Trans	
	Industrial	Perselisihan		Naker dan	
		Hubungan Industrial		Perindustrian	
		(Persen)	<u> </u>		
Tuj 3	Meningkatkan	Indeks	95.24		Meningkatkan
•	Kesetaraan	Pembangunan			Kualitas Sumber
	Gender Dan	Gender (Angka)			Daya Manusia
	Perlindungan	(g)			- 1.5 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
	Anak				
Sas 3	Terwujudnya	Indeks	95.24		Meningkatkan
bus 5	Kesetaraan	Pembangunan	70.21		Kualitas Sumber
	Gender Dan	Gender (Angka)			Daya Manusia
	Perlindungan	denuel (Angka)			Daya Manusia
	Anak Yang				
	Berkualitas				
		Daniel Daniel Lat	100	D: DD DA	
	Program	Persentase Perangkat	100	Dinas PP PA	
	Pengarusutamaan	Daerah yang		dan KB	
	Gender Dan	Melaksanakan			
	Pemberdayaan	Perencanaan			
	Perempuan	Pembangunan yang			
		Responsif Gender			
		(Persen)			
	Program	Cakupaan Perempuan	100	Dinas PP PA	
	Perlindungan	Korban Kekerasan		dan KB	
	Perempuan	yang Mendapatkan			
	•	Penanganan			
		Pengaduan (Persen)			
	Program	Cakupan Perempuan	40.00	Dinas PP PA	
	Peningkatan	sebagai Tenaga	10.00	dan KB	
	Kualitas Keluarga	Profesional (Persen)		dull ISD	
		Cakupan Lembaga	33.33	Dinas PP PA	
	Program Pemenuhan Hak		33.33		
		Penyedia Layanan		dan KB	
	Anak (PHA)	Terhadap Anak			
	<u> </u>	(Persen)	400	D	
			100		
				dan KB	
	Khusus Anak				
		_			
		(Persen)			
Misi II	Mengembangkan				
	Infrastruktur				
	Wilayah Dengan				
	Konsep				
	Inklusif Untuk				
	Konektivitas Antar				1
Misi II	Infrastruktur Wilayah Dengan Konsep Pembangunan Inklusif Untuk	Cakupan Pendampingan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus	100	Dinas PP PA dan KB	

		1			
	Wilayah Dengan				
	Memperhatikan				
	Aspek Mitigasi				
	Bencana Dan				
	Berwawasan				
	Lingkungan				
Tuj 1	Meningkatkan	Indeks Kualitas	60.00		Pembangunan
	Pembangunan	Infrastruktur			Infrastruktur
	Infrastruktur	(Angka)			Daerah yang
	Daerah Dan				Berkelanjutan
	Kewilayahan				
Sas 1	Tersedianya	Tingkat Kemantapan	45,00		Pembangunan
	Prasarana, Sarana,	Jalan (Persen)			Infrastruktur
	Dan Utilitas				Daerah yang
	Transportasi				Berkelanjutan
	Daerah				
	Program	Tingkat Kemantapan	42.50	Dinas Pu dan	
	Penyelenggaraan	Jalan (Persen)		PR	
	Jalan				
	Program	Persentase Jalan Desa	35.00	Dinas PU dan	
	Pengembangan	Strategis dengan		PR	
	Permukiman	kondisi baik (Persen)			
	Program	Persentase Pelayanan	72.50	Dinas	
	Penyelenggaraan	Angkutan Darat		Perhubungan	
	Lalu Lintas Dan	(Persen)			
	Angkutan Jalan				
	(LLAJ)				
	Program	Persentase Cakupan	60.00	Dinas	
	Pengelolaan	Wilayah yang	00.00	Perhubungan	
	Pelayaran	terlayani Angkutan		1 cmabangan	
	1 cray ar arr	Laut (Persen)			
Sas 2	Tersedianya	Persentase	46,26		Pembangunan
	Pemukiman	Penduduk vang	-		Infrastruktur
	Pemukiman Penduduk Yang	Penduduk yang Memiliki Akses			Infrastruktur Daerah yang
	Pemukiman Penduduk Yang Sehat Dan	Memiliki Akses			Daerah yang
	Penduduk Yang	Memiliki Akses terhadap Sumber			
	Penduduk Yang Sehat Dan	Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat			Daerah yang
	Penduduk Yang Sehat Dan Berkualitas	Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen)		Dinas PU dan	Daerah yang
	Penduduk Yang Sehat Dan Berkualitas	Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Penduduk	43.50	Dinas PU dan	Daerah yang
	Penduduk Yang Sehat Dan Berkualitas Program Pengelolaan Dan	Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Penduduk yang Memiliki Akses		Dinas PU dan PR	Daerah yang
	Penduduk Yang Sehat Dan Berkualitas Program Pengelolaan Dan Pengembangan	Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber			Daerah yang
	Penduduk Yang Sehat Dan Berkualitas Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan	Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat			Daerah yang
	Penduduk Yang Sehat Dan Berkualitas Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen)	43.50	PR	Daerah yang
	Penduduk Yang Sehat Dan Berkualitas Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program	Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Rumah		PR Dinas PU dan	Daerah yang
	Penduduk Yang Sehat Dan Berkualitas Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan	Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Rumah Tangga yang	43.50	PR	Daerah yang
	Penduduk Yang Sehat Dan Berkualitas Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan	Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian	43.50	PR Dinas PU dan	Daerah yang
	Penduduk Yang Sehat Dan Berkualitas Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan	Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi	43.50	PR Dinas PU dan	Daerah yang
	Penduduk Yang Sehat Dan Berkualitas Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan	Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah	43.50	PR Dinas PU dan	Daerah yang
	Penduduk Yang Sehat Dan Berkualitas Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan	Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan	43.50	PR Dinas PU dan	Daerah yang
	Penduduk Yang Sehat Dan Berkualitas Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (Persen)	43.50 78.50	PR Dinas PU dan PR	Daerah yang
	Penduduk Yang Sehat Dan Berkualitas Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program	Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (Persen) Persentase Pelayanan	43.50	PR Dinas PU dan PR Dinas PU dam	Daerah yang
	Penduduk Yang Sehat Dan Berkualitas Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengendan Dan	Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (Persen) Persentase Pelayanan Sanitasi Sub Sektor	43.50 78.50	PR Dinas PU dan PR	Daerah yang
	Penduduk Yang Sehat Dan Berkualitas Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan	Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (Persen) Persentase Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan	43.50 78.50	PR Dinas PU dan PR Dinas PU dam	Daerah yang
	Penduduk Yang Sehat Dan Berkualitas Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (Persen) Persentase Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan (Persen)	43.50 78.50 40.00	PR Dinas PU dan PR Dinas PU dam PR	Daerah yang
	Penduduk Yang Sehat Dan Berkualitas Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Dan Pengembangan Pengenbangan	Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (Persen) Persentase Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan (Persen) Rasio Rumah Layak	43.50 78.50	PR Dinas PU dan PR Dinas PU dam PR Dinas PR dan	Daerah yang
	Penduduk Yang Sehat Dan Berkualitas Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Program Pengembangan	Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (Persen) Persentase Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan (Persen)	43.50 78.50 40.00	PR Dinas PU dan PR Dinas PU dam PR	Daerah yang
	Penduduk Yang Sehat Dan Berkualitas Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Program Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan	Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (Persen) Persentase Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan (Persen) Rasio Rumah Layak Huni (Persen)	43.50 78.50 40.00	PR Dinas PU dan PR Dinas PU dam PR Dinas PR dan KP	Daerah yang
	Penduduk Yang Sehat Dan Berkualitas Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Program Pengembangan Pengembangan Program Pengembangan Program Pengembangan Program Pengembangan Program Pengembangan Program Pengembangan	Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (Persen) Persentase Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan (Persen) Rasio Rumah Layak Huni (Persen)	43.50 78.50 40.00	PR Dinas PU dan PR Dinas PU dam PR Dinas PR dan KP Dinas PR dan	Daerah yang
	Penduduk Yang Sehat Dan Berkualitas Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Program Pengembangan Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman	Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (Persen) Persentase Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan (Persen) Rasio Rumah Layak Huni (Persen)	43.50 78.50 40.00 88.67 46.25	PR Dinas PU dan PR Dinas PU dam PR Dinas PR dan KP Dinas PR dan KP	Daerah yang
	Penduduk Yang Sehat Dan Berkualitas Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program	Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (Persen) Persentase Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan (Persen) Rasio Rumah Layak Huni (Persen) Rasio Permukiman Layak Huni (Persen) Persentase	43.50 78.50 40.00	Dinas PU dan PR Dinas PU dam PR Dinas PR dan KP Dinas PR dan KP Dinas PR dan	Daerah yang
	Penduduk Yang Sehat Dan Berkualitas Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Perumahan Dan	Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (Persen) Persentase Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan (Persen) Rasio Rumah Layak Huni (Persen) Rasio Permukiman Layak Huni (Persen) Persentase Permukiman yang	43.50 78.50 40.00 88.67 46.25	PR Dinas PU dan PR Dinas PU dam PR Dinas PR dan KP Dinas PR dan KP	Daerah yang
	Penduduk Yang Sehat Dan Berkualitas Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Perumahan Dan Kawasan	Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (Persen) Persentase Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan (Persen) Rasio Rumah Layak Huni (Persen) Rasio Permukiman Layak Huni (Persen) Persentase	43.50 78.50 40.00 88.67 46.25	Dinas PU dan PR Dinas PU dam PR Dinas PR dan KP Dinas PR dan KP Dinas PR dan	Daerah yang
	Penduduk Yang Sehat Dan Berkualitas Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Perumahan Dan	Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen) Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (Persen) Persentase Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan (Persen) Rasio Rumah Layak Huni (Persen) Rasio Permukiman Layak Huni (Persen) Persentase Permukiman yang	43.50 78.50 40.00 88.67 46.25	Dinas PU dan PR Dinas PU dam PR Dinas PR dan KP Dinas PR dan KP Dinas PR dan	Daerah yang

Sas 3	Tersedianya Sumber Daya Air Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan	Rasio Jaringan Irigasi (Persen)	41,78		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah (Persen)	45.00	Dinas PU dan PR	
Sas 4	Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Ramah Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	74,53		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana Sarana Umum (Persen)	50.00	Dinas PR dan KP	
	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar (PSU) Perkantoran Pemerintahan Daerah dalam Skala Mantap (Persen)	80.00	Dinas PU dan PR	
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rasio Kawasan yang Memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Persen)	5.30	Dinas PU dan PR	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Jasa Kontruksi yang Handal dan dapat Diandalkan (Persen)	42.50	Dinas PU dan PR	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog (Persen)	35.00	Dinas PU dan PR	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan Dokumen Perencanaan Lingkungan hidup (Persen)	100	Dinas LH	
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	74.53	Dinas LH	
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan (Persen)	57.43	Dinas LH	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah (Persen)	5.30	Dinas LH	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin	Cakupan Pengendalian terhadap Izin Lingkungan, Izin	100	Dinas LH	

	Perlindungan Dan	Perlindungan dan			
	Pengelolaan	Pengengelolaan			
	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup			
	(PPLH)	(PPLH) dan Izin			
		Ketentuan Peraturan			
		Perundang-undangan			
		yang Berbasis			
		Lingkungan Hidup			
		(PUU LH) (Persen)			
	Program Pengakuan	Persentase Penetapan	40.00	Dinas LH	
	Keberadaan	Hak Masyarakat			
	Masyarakat Hukum	Hukum Adat (Persen)			
	Adat (Mha),				
	Kearifan Lokal Dan				
	Hak Mha Yang				
	Terkait Dengan Pplh				
	Program	Jumlah Kepala	5.000	Dinas PR dan	
	Penyelesaian	Keluarga Penerima		KP	
	Sengketa Tanah	Akses Reformasi			
	Garapan	Agraria (Kepala			
	darapan				
	_	Keluarga)		D	
	Program	Rasio Luas Tanah	11.20	Dinas PR dan	
	Penyelesaian Ganti	yang Disediakan bagi		KP	
	Kerugian Dan	Pembangunan untuk			
	Santunan Tanah	Kepentingan Umum			
	Untuk				
		dan Kepentingan			
	Pembangunan	Lainnya (Ha)			
	Program	Cakupan Pemanfaatan	2.95	Dinas PR dan	
	Pengelolaan Tanah	Tanah Kosong		KP	
	Kosong	(Persen)			
Sas 5	Tersedianya	Indeks Resiko	187.95		Pembangunan
345 3	Prasarana, Sarana,		107.93		Infrastruktur
	i Prasarana Sarana				Infractriikfiir
Ī		Bencana (Angka)			
	Dan Utilitas	Dencana (Angka)			Daerah yang
		Dentana (Angka)			
	Dan Utilitas Pencegahan Dan	bentana (Angka)			Daerah yang
	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan	Dentana (Angka)			Daerah yang
	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah	, , ,	100	Cotnol DD don	Daerah yang
	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program	Peresentase	100	Satpol PP dan	Daerah yang
	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program Pencegahan,	Peresentase Pelayanan Pemadam	100	Satpol PP dan Damkar	Daerah yang
	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program	Peresentase	100		Daerah yang
	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan,	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan	100		Daerah yang
	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	Peresentase Pelayanan Pemadam	100		Daerah yang
	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan	100		Daerah yang
	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan	100		Daerah yang
	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (Persen)		Damkar	Daerah yang
	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (Persen) Persentase Gangguan	100	Damkar Satpol PP dan	Daerah yang
	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Program Peningkatan	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (Persen) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat		Damkar	Daerah yang
	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (Persen) Persentase Gangguan		Damkar Satpol PP dan	Daerah yang
	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Peningkatan Ketenteraman Dan	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (Persen) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat		Damkar Satpol PP dan	Daerah yang
	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (Persen) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan (Persen)	100	Damkar Satpol PP dan Damkar	Daerah yang
	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (Persen) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan (Persen) Cakupan		Damkar Satpol PP dan	Daerah yang
	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Penanggulangan	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (Persen) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan (Persen) Cakupan Penanggulangan	100	Damkar Satpol PP dan Damkar	Daerah yang
	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (Persen) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan (Persen) Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah	100	Damkar Satpol PP dan Damkar	Daerah yang
	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Penanggulangan	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (Persen) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan (Persen) Cakupan Penanggulangan	100	Damkar Satpol PP dan Damkar	Daerah yang
Misi III	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Penanggulangan	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (Persen) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan (Persen) Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah	100	Damkar Satpol PP dan Damkar	Daerah yang
Misi III	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Penanggulangan Bencana	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (Persen) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan (Persen) Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah	100	Damkar Satpol PP dan Damkar	Daerah yang
Misi III	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Penanggulangan Bencana Mengembangkan Ekonomi	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (Persen) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan (Persen) Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah	100	Damkar Satpol PP dan Damkar	Daerah yang
Misi III	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Penanggulangan Bencana Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (Persen) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan (Persen) Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah	100	Damkar Satpol PP dan Damkar	Daerah yang
Misi III	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Penanggulangan Bencana Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (Persen) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan (Persen) Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah	100	Damkar Satpol PP dan Damkar	Daerah yang
Misi III	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Penanggulangan Bencana Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (Persen) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan (Persen) Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah	100	Damkar Satpol PP dan Damkar	Daerah yang
Misi III	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Penanggulangan Bencana Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (Persen) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan (Persen) Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah	100	Damkar Satpol PP dan Damkar	Daerah yang
Misi III	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Penanggulangan Bencana Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (Persen) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan (Persen) Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah	100	Damkar Satpol PP dan Damkar	Daerah yang
Misi III	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Penanggulangan Bencana Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (Persen) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan (Persen) Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah	100	Damkar Satpol PP dan Damkar	Daerah yang
	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Penanggulangan Bencana Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian Dan Perikanan	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (Persen) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan (Persen) Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah (Persen)	100	Damkar Satpol PP dan Damkar	Daerah yang Berkelanjutan
Misi III	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Penanggulangan Bencana Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian Dan Perikanan Meningkatkan	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (Persen) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan (Persen) Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah (Persen)	100	Damkar Satpol PP dan Damkar	Daerah yang Berkelanjutan Peningkatan
	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Penanggulangan Bencana Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian Dan Perikanan Meningkatkan Pembangunan	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (Persen) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan (Persen) Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah (Persen)	100 100 2,65 s/d	Damkar Satpol PP dan Damkar	Peningkatan Kualitas Ekonomi
	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Penanggulangan Bencana Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian Dan Perikanan Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (Persen) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan (Persen) Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah (Persen)	100	Damkar Satpol PP dan Damkar	Daerah yang Berkelanjutan Peningkatan
	Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Penanggulangan Bencana Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian Dan Perikanan Meningkatkan Pembangunan	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (Persen) Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan (Persen) Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah (Persen)	100 100 2,65 s/d	Damkar Satpol PP dan Damkar	Peningkatan Kualitas Ekonomi

Sas 1	Meningkatnya Laju	Pertumbuhan	2,65		Peningkatan
	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Ekonomi (persen)	s/d 3,00		Kualitas Ekonomi Masyarakat
	Program	Kontribusi sektor	11.58	Dinas	Masyarakat
	Peningkatan Sarana	Perdagangan Besar	11.50	Koperasi,	
	Distribusi	dan Eceran terhadap		UKM dan	
	Perdagangan	PDRB (Persen)		Perdagangan	
	Program Stabilisasi	Persentase Stabilitas	60.00%	Dinas	
	Harga Barang	dan Jumlah		Koperasi,	
	Kebutuhan Pokok	Ketersediaan harga		UKM dan	
	Dan Barang Penting	Barang Kebutuhan		Perdagangan	
	Duoguan	Pokok (Persen)	42 104	Dinas	
	Program	Net Ekspor Barang	43.184	Dinas	
	Pengembangan Ekspor	dan Jasa		Koperasi, UKM dan	
	Бизрог			Perdagangan	
	Program	Jumlah Investor	750	Dinas PM dan	
	Pengembangan	Berskala Nasional baik	750	PTSP	
	Iklim Penanaman	Penanaman Modal			
	Modal	Dalam Negeri (PMDN)			
		maupun Penanaman			
		Modal Asing (PMA)			
		(Perusahaan/			
		Perorangan)			
	Program	Rasio Tingkat	80.00	Dinas PM dan	
	Pengendalian	Kepatuhan Pelaku		PTSP	
	Pelaksanaan	Usaha terhadap			
	Penanaman Modal	Ketentuan Perizinan			
	Program Promosi	(Persen) Pertumbuhan Nilai	6.55	Dinas PM dan	
	Penanaman Modal	Investasi PMA	0.55	PTSP	
	i chanaman inodai	(Persen)		1 101	
	Program Pelayanan	Pertumbuhan Nilai	17.49	Dinas PM dan	
	Penanaman Modal	Investasi PMDN		PTSP	
		(Persen)			
	Program	Jumlah Data Laporan	5	Dinas PM dan	
	Pengelolaan Data	Perizinan dan Non		PTSP	
	Dan Sistem	Perizinan (Laporan)			
	Informasi Penanaman Modal				
Sas 2	Meningkatnya	PDRB Perkapita	36,757-		Pembangunan
	Pendapatan	(juta)	37,569		Ekonomi Daerah
	Perkapita Masyarakat				
	Program	Cakupan Bina	42.00	Dinas Trans	
	Perencanaan Dan	Kelompok Pengrajin		Naker dan	
	Pembangunan	(Persen)		Perindustrian	
	Industri	**		D	
	Program	Kontribusi sektor	4.00	Dinas Trans	
	Pengelolaan Sistem Informasi Industri	Industri Pengolahan		Naker dan Perindustrian	
	Nasional	terhadap PDRB (Persen)		reimuustrian	
Sas 3	Meningkatnya	Nilai Tukar Petani	125		Peningkatan
	Kontribusi	(Angka)			Kualitas Ekonomi
	Pertanian	6.7			Masyarakat
	Terhadap				
	Perekonomian				
	Masyarakat				
	Program	Nilai Tukar Petani	101.04	Dinas KP dan	
	Penyediaan Dan	(Angka)		Pertanian	
	Pengembangan				
	Sarana Pertanian	İ	Ī	1	1

	Program Penyediaan Dan	Produksi Sektor Pertanian (Ton)	149.94 4	Dinas KP dan Pertanian	
	Pengembangan Prasarana Pertanian	7 07 04111411 (7 0 1.5)	_		
	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani (Poktan)	985	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Persen)	88.00	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) (Persen)	88.00	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	28,000	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Peresentase Daerah Rentan Rawan Pangan (Persen)	5.00	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan (Persen)	60.00	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	14.708	Dinas Perikanan	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	19.497	Dinas Perikanan	
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batas Biologis yang Aman (Angka)	0.033	Dinas Perikanan	
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (Angka)	104	Dinas Perikanan	
Sas 4	Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini (Angka)	0.30 - 0.29		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persen)	52.50	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi Berkompeten (Persen)	55.00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	

	T 5	77 . 11 . 1773.6773.6	0.40	- D.	
	Program	Kontribusi UMKM	2.18	Dinas	
	Pemberdayaan Usaha Menengah,	terhadap PDRB		Koperasi, UKM dan	
	Usaha Kecil, Dan	(Persen)		Perdagangan	
	Usaha Mikro			1 Cruagangan	
	(UMKM)				
Sas 5	Menurunnya	Tingkat Kemiskinan	12,50-		Peningkatan
	Jumlah Penduduk Miskin Daerah	Daerah (Persen)	12,00		Kualitas Ekonomi Masyarakat
	Program	Terdatanya Potensi	100	Dinas Sosial	
	Pemberdayaan Sosial	Sumber Kesejahteraan Sosial (Persen)			
	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan Pemenuhan SPM bidang Sosial (Persen)	100	Dinas Sosial	
	Program	Cakupan	100	Dinas Sosial	
	Perlindungan Dan	Perlindungan dan			
	Jaminan Sosial	Jaminan Perlindungan Sosial Daerah (Persen)			
	Program	Cakupan Pemenuhan	100	Dinas Sosial	
	Penanganan	pasca Bencana			
	Bencana	(Persen)			
Misi IV	Mengembangkan Destinasi				
	Pariwisata				
	Unggulan Daerah				
	Yang Berpijak				
	Pada Kearifan Lokal				
Tuj 1	Meningkatkan	Kontribusi Sektor	1.78		Peningkatan
, -	Pariwisata Daerah	Penyediaan			Kualitas Ekonomi
	Yang Berdaya	Akomodasi dan			Masyarakat
	Saing	Makan Minum			
		terhadap PDRB			
0 4	76 1 7 .	(Persen)	22.00		D 1 1 .
Sas 1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan	Pertumbuhan	23.00		Peningkatan Kualitas Ekonomi
	, ,	Wisatawan			Masyarakat
	Wicotowon	Nucantara dan			
	Wisatawan	Nusantara dan			- iusyurukut
	Wisatawan	Mancanegara			Masyaranac
		Mancanegara (persen)	3.18	Dinas	- Francisco - Fran
	Wisatawan Program Peningkatan Daya	Mancanegara (persen) Kontribusi PAD Sektor	3.18	Dinas Pariwisata	rausy at a tale
	Program	Mancanegara (persen)	3.18		rausy at a fact
	Program Peningkatan Daya	Mancanegara (persen) Kontribusi PAD Sektor	3.18		- Francisco de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran	Mancanegara (persen) Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (Persen) Kunjungan Wisatawan	615.18	Pariwisata Dinas	rausy ar anac
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata	Mancanegara (persen) Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (Persen) Kunjungan Wisatawan (Orang)		Pariwisata	rausy ar anac
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran	Mancanegara (persen) Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (Persen) Kunjungan Wisatawan	615.18 9	Pariwisata Dinas Pariwisata	- Ausyaranae
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya	Mancanegara (persen) Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (Persen) Kunjungan Wisatawan (Orang) Cakupan Fasilitasi Pengembangan Sunber Daya Manusia	615.18 9	Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas	- Ausyaranac
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan	Mancanegara (persen) Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (Persen) Kunjungan Wisatawan (Orang) Cakupan Fasilitasi Pengembangan	615.18 9	Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Mancanegara (persen) Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (Persen) Kunjungan Wisatawan (Orang) Cakupan Fasilitasi Pengembangan Sunber Daya Manusia Pariwisata (Persen)	615.18 9 40.00	Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Pelestarian	Mancanegara (persen) Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (Persen) Kunjungan Wisatawan (Orang) Cakupan Fasilitasi Pengembangan Sunber Daya Manusia Pariwisata (Persen) Persentase Cagar	615.18 9	Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Pelestarian Dan Pengelolaan	Mancanegara (persen) Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (Persen) Kunjungan Wisatawan (Orang) Cakupan Fasilitasi Pengembangan Sunber Daya Manusia Pariwisata (Persen) Persentase Cagar Budaya dan Warisan	615.18 9 40.00	Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Pelestarian	Mancanegara (persen) Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (Persen) Kunjungan Wisatawan (Orang) Cakupan Fasilitasi Pengembangan Sunber Daya Manusia Pariwisata (Persen) Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang	615.18 9 40.00	Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Pelestarian Dan Pengelolaan	Mancanegara (persen) Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (Persen) Kunjungan Wisatawan (Orang) Cakupan Fasilitasi Pengembangan Sunber Daya Manusia Pariwisata (Persen) Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Direvitalisasi dan	615.18 9 40.00	Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Mancanegara (persen) Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (Persen) Kunjungan Wisatawan (Orang) Cakupan Fasilitasi Pengembangan Sunber Daya Manusia Pariwisata (Persen) Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Direvitalisasi dan Invetarisasi (Persen)	615.18 9 40.00	Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Program	Mancanegara (persen) Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (Persen) Kunjungan Wisatawan (Orang) Cakupan Fasilitasi Pengembangan Sunber Daya Manusia Pariwisata (Persen) Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Direvitalisasi dan	615.18 9 40.00	Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Mancanegara (persen) Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (Persen) Kunjungan Wisatawan (Orang) Cakupan Fasilitasi Pengembangan Sunber Daya Manusia Pariwisata (Persen) Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Direvitalisasi dan Invetarisasi (Persen) Persentase Penduduk	615.18 9 40.00	Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengembangan	Mancanegara (persen) Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (Persen) Kunjungan Wisatawan (Orang) Cakupan Fasilitasi Pengembangan Sunber Daya Manusia Pariwisata (Persen) Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Direvitalisasi dan Invetarisasi (Persen) Persentase Penduduk Usia 10 tahun keatas yang Terlibat Pertunjukan Seni	615.18 9 40.00	Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengembangan Kebudayaan	Mancanegara (persen) Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (Persen) Kunjungan Wisatawan (Orang) Cakupan Fasilitasi Pengembangan Sunber Daya Manusia Pariwisata (Persen) Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Direvitalisasi dan Invetarisasi (Persen) Persentase Penduduk Usia 10 tahun keatas yang Terlibat	615.18 9 40.00	Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata	
Misi V	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengembangan	Mancanegara (persen) Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (Persen) Kunjungan Wisatawan (Orang) Cakupan Fasilitasi Pengembangan Sunber Daya Manusia Pariwisata (Persen) Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Direvitalisasi dan Invetarisasi (Persen) Persentase Penduduk Usia 10 tahun keatas yang Terlibat Pertunjukan Seni	615.18 9 40.00	Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata	

	T	ı			I
	Yang Berkualitas				
	Melalui Tata Kelola				
	Pemerintahan				
	Yang Bersih Dan				
	Produktif Serta				
	Penguatan				
	Sinergitas Antar				
	Lembaga				
Tuj 1	Meningkatkan	Indeks Reformasi	C		Reformasi
	Penyelenggaraan	Birokrasi (Angka)			Birokrasi dan
	Pemerintahan				Pelayanan Publik
	Daerah Yang				Berkualitas
Sas 1	Berkualitas Terwujudnya	Indeks kepuasan	80.00		Reformasi
5a5 1	Pelayanan Publik	masyarakat	00.00		Birokrasi dan
	Yang Berkualitas	terhadap pelayanan			Pelayanan Publik
	Tang berkuantas	publik (Angka)			Berkualitas
	Program	Cakupan Penerbitan	100	Dinas Capil	201114411443
	Pendaftaran	Kartu Identitas	-	F	
	Penduduk	(Persen)			
	Program Pencatatan	Cakupan Penerbitan	100	Dinas Capil	
	Sipil	Akta Pencatatan Sipil			
		(Persen)			
	Program	Cakupan Pemanfaatan	100	Dinas Capil	
	Pengelolaan	Data Kependudukan			
	Informasi	(Persen)			
	Administrasi Kependudukan				
	Program	Persentase Data	100	Dinas Capil	
	Pengelolaan Profil	Kependudukan Skala	100	Dinas capii	
	Kependudukan	Kabupaten dalam 1			
	P	Tahun (Persen)			
	Program Informasi	Persentase	85.00	Dinas	
	Dan Komunikasi	Peningkatan		Kominfo	
	Publik	Desiminasi Informasi		Statistik dan	
		dan Komunikasi		Persandian	
	Dwg gwg A1:1	Publik (Persen)	02.50	Din a -	
	Program Aplikasi Informatika	Persentase	82.50	Dinas Kominfo	
	IIIIOI IIIdUKa	Peningkatan Layanan Informasi dan		Statistik dan	
		Pelayanan Publik		Persandian	
		Berbasis Teknologi		1 Ci Januani	
		Informasi dan			
		komunikasi (TIK)			
		(Persen)			
· <u> </u>	Program	Cakupan	100	Kecamatan	
	Penyelenggaraan	Penyelenggaraan		Bangkunat;	
	Pemerintahan Dan	Pemerintahan dan		Krui Selatan;	
	Pelayanan Publik	Pelayanan Publik		Lemong;	
		(Persen)		Ngambur;	
				Ngaras; Pulau	
				Pisang; Pesisir	
				Selatan;	
				Pesisir Utara	
	Program	Cakupan	100	Kecamatan	
	Pemberdayaan	Pemberdayaan		Pesisir	
	Masyarakat Desa	Masyarakat Kelurahan		Tengah	
	Dan Kelurahan	(Persen)			
Sas 2	Terwujudnya	Nilai SAKIP	CC		Reformasi
	Kinerja Instansi	(Huruf/Predikat)			Birokrasi dan
	Pemerintah				Pelayanan Publik
				l	Berkualitas;

Daerah Yang Berkualitas				Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat;
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	92.50	Seluruh Perangkat Daerah	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik (Dokumen)	2	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian	
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara baik (Persen)	100	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian	
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan Konsistensi Dokumen Perencanaan terhadap Dokumen Penganggaran (Persen)	100	Bappelitbang da	
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Konsistensi Keselarasan Program Prioritas Daerah terhadap Program Prioritas Pusat (Persen)	95.00	Bappelitbang da	
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi daerah (Angka)	Sangat Inovatif	Bappelitbang da	
Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (Persen)	75.38	BKPSDM	
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pejabat ASN telah yang mengikuti pelatihan kepemimpinan (Persen)	22.64	BKPSDM	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Konsistensi Perencanan, Pengelolaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang- undangan (Persen)	100	Inspektorat	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Cakupan Konsistensi Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terhadap Kepatuhan Peraturan perundang-undangan (Persen)	100	Inspektorat	
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan dan	90.00	Sekretariat Daerah	

	<u> </u>			T	
		Kesejahteraan Rakyat			
		(Persen)			
	D	Calarra	00.00	C-1	
	Program	Cakupan	90.00	Sekretariat	
	Perekonomian Dan	penyelenggaraan		Daerah	
	Pembangunan	Kebijakan Perekonomian dan			
		Pembangunan			
	D D I	(Persen)	100	C 1	
	Program Dukungan	Tersusun dan	100	Sekretariat	
	Pelaksanaan Tugas	Terintegrasinya		DPRD	
	Dan Fungsi Dprd	Program-program			
		kerja DPRD untuk			
		Melaksanakan fungsi			
		Pengawasan, fungsi			
		Pembentukan perda,			
		dan Fungsi anggaran dalam Dokumen			
		Rencana lima			
		Tahunan (RPJM)			
		maupun Dokumen Rencana Tahunan			
	Program Penguatan	(RKPD) (Persen) Tingkat Partisipasi	51.00	Badan	+
	Ideologi Pancasila	Masyarakat dalam	31.00	Kesbangpol	
	Dan Karakter	Pengembangan		Resballgpol	
	Kebangsaan	Wawasan Kebangsaan			
	Rebailgsaali	(Persen)			
	Program	Tingkat Partisipasi	84.92	Badan	
	Peningkatan Peran	Masyarakat dalam	04.72	Kesbangpol	
	Partai Politik Dan	Pemilu (Persen)		Resbangpor	
	Lembaga	r china (r crach)			
	Pendidikan Melalui				
	Pendidikan Politik				
	Dan Pengembangan				
	Etika Serta Budaya				
	Politik				
	Program	Persentase Organisasi	75.00	Badan	
	Pemberdayaan Dan	Masyarakat yang Aktif		Kesbangpol	
	Pengawasan	(Persen)		OF 1	
	Organisasi				
	Kemasyarakatan				
	Program Pembinaan	Persentase Pembinaan	67.50	Badan	
	Dan Pengembangan	dan Pengembangan		Kesbangpol	
	Ketahanan	Ketahanan Ekonomi,			
	Ekonomi, Sosial,	Sosial dan Budaya			
	Dan Budaya	(Persen)			
	Program	Persentase Koordinasi	75.00	Badan	
	Peningkatan	dan Peran Lembaga		Kesbangpol	
	Kewaspadaan	dan Elemen			
	Nasional Dan	Masyarakat dalam			
	Peningkatan	Pencegahan			
	Kualitas Dan	terjadinya Konflik			
	Fasilitasi	Sosial (Persen)			
	Penanganan Konflik				
	Sosial				
Sas 3	Terwujudnya Tata	Opini BPK	WTP		Pelaksanaan Asas-
	Kelola Keuangan	(Huruf/Predikat)			asas Umum
	Dan Aset Daerah				Pemerintahan
	Yang Berkualitas				yang Baik
	Program	Cakupan Tata Kelola	100	BPKAD	
	Pengelolaan	Keuangan Daerah			
1	Keuangan Daerah				

	1	1	1	1
	(Persen)			
Program	Cakupan Tata Kelola	100	BPKAD	
Pengelolaan Barang	Barang Milik Daerah			
Milik Daerah	sesuai Aturan			
	(Persen)			
Program	Rasio PAD Terhadap	4.62	Bapenda	
•	` ,	0.6900		Pembangunan
		0.0500		SDM, baik dari Sisi
· ·	Membangun (Angka)			Kualitas dan
Desa				Kuantitas
Drogram Donataan	Jumlah Doca	65	Dinas DMD	Kuantitas
•	,	0.5	Dillas I WII	
		110	Dinas DMD	
•	_	110	Dillas PMP	
	Administrasi (Pekon)			
		440	D. D. D.	
		110	Dinas PMP	
_	_			
1	_			
Masyarakat Hukum				
Adat	Adat (Pekon)			
Program	Nilai Rata-rata Indeks	42.53	Dinas Trans	
Pembangunan	Perkembangan 100		Naker dan	
Kawasan	Kawasan		Perindustrian	
Transmigrasi	Transmigrasi Prioritas			
	Kementerian yang			
	direvitalisasi (Angka)			
Program	Jumlah Kawasan	1	Dinas Trans	
Pengembangan	Transmigrasi yang		Naker dan	
Kawasan			Perindustrian	
Transmigrasi				
	Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pembangunan Desa Program Penataan Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Program Pengembangan Kawasan Kawasan	Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Pembangunan Desa Program Program Pembangunan Desa Program Pemerintahan Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Program Pembangunan Rawasan Program Pembangunan Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Program P	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Pembangunan Desa Program Program Pengenbangunan Desa Program Program Pendapatan Daerah Program Pendapatan Daerah Program Pemerintahan Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Program Program Pembangunan Pembangunan Pembangan Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Program	Program Pengelolaan Barang Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Sesuai Aturan (Persen) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (Persen) Pendapatan Daerah (Persen) Pendapatan Daerah (Persen) Pendapatan Daerah (Persen) Indeks Desa Membangun (Angka) Pembangunan Desa Berkembang (Pekon) Program Cakupan Pekon Tertib Administrasi Pemerintahan Desa Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat (Pekon) Program Program Pendendayaan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (Pekon) Program Perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Transmigrasi Program Program Perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Transmigrasi Program Prog

Sumber: RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

4.2.2. Dukungan terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), menggantikan program sebelumnya *Millennium Development Goals* (MDGs) yang selesai pada akhir tahun 2015. SDGs tersebut akan otomatis berlaku bagi negaranegara maju dan berkembang untuk 15 tahun ke depan di mulai pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2030. Pembangunan Berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Adapun elemen dari pembangunan berkelanjutan yaitu bidang sosial ekonomi dan lingkungan hidup. Agenda SDGs disusun berdasarkan capaian MDGs, dengan target dan sasaran yang diperluas. SDGs jauh lebih komprehensif dan transformatif dibandingkan dengan MDGs. Komprehensif karena melibatkan negara maju dan berkembang dengan tujuan yang lebih luas, mencakup tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menetapkan mekanisme untuk mengimplementasikan 17 tujuannya tersebut, yaitu melalui perangkat implementasi (*means of implementations*). Kemudian, transformatif karena tidak meninggalkan siapapun di belakang. Mereka yang miskin, rentan, ataupun difabel didorong untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan, dan menikmati manfaat sebesar-besarnya dari SDGs. Indonesia siap dan berkomitmen penuh untuk melaksanakan SDGs karena sejalan dengan visi

pembangunan Indonesia dan sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) 2025-2045. Indonesia memiliki 119 target yang sesuai dengan 169 target SDGs.

Kabupaten Pesisir Barat juga berkomitmen untuk mewujudkan pelaksanaan seluruh sektor 17 Tujuan TPB, yaitu: (1) Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan; (2) Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, Serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan; (3) Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia; (4) Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua; (5) Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan; (6) Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih Serta Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua; (7) Energi bersih dan terjangkau untuk semua; (8) Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan , Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh Serta Pekerjaan Yang Layak; (9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi; (10) Mengurangi Kesenjangan dalam Negara dan Antar Negara; (11) Membangunan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan; (12) Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan; (13) Penanganan Perubahan Iklim dan Dampaknya; (14) Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim; (15) Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat; (16) Perdamaian, Kelembagaan dan Keadilan yang Kokoh; (17) Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan serta memastikan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Berikutnya, dalam upaya pencapaian TPB/SDGs Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada kewenangan daerah disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.7. Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 terhadap Pencapaian Tujuan SDGs Kabupaten Pesisir Barat

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD		Sasaran RPJMD	TPB/SDGs
(1)	(2)		(3)	(4)
Misi I Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Daerah yang Berkualitas	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan bagi Semua Penduduk dalam segala Usia Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar sepanjang Hayat bagi Semua

	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pemuda dan Penduduk Usia Kerja	2	Menurunnya Jumlah Pengangguran Daerah	Tujuan 8 Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan EKonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak
	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	3	Terwujudnya Kesetaraan gender dan Perlindungan Anak yang Berkualitas	Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan
Misi II Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kewilayahan	1	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Transportasi Daerah	Tujuan 9 Mempromosikan Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi
		2	Tersedianya Pemukiman Penduduk yang Sehat dan Berkualitas	Tujuan 11 Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
		3	Tersedianya Sumber Daya Air untuk Mendukung Kedaulatan Pangan	Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua
		4	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang	Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau untuk Semua

	1		Ramah	
			Ramah Lingkungan	Tujuan 14 Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan
		5	5 Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah	Ekosistem Darat Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim dan Dampaknya
				Tujuan 14 Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim
Misi III Mengembangk an Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan Fokus pada Potensi Lokal	1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Tujuan 8 Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan EKonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak Tujuan 9 Mempromosikan Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi
		2	Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	Tujuan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
		3	Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap Perekonomian Masyarakat	Tujuan 2 Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi serta Mempromosikan

				Pertanian Berkelanjutan
		4	Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan dalam Negara dan Antar Negara
		5	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah	Tujuan 1 Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan
Misi IV Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang Berpijak Pada Kearifan Lokal	Meningkatkan Pariwisata Daerah yang Berdaya Saing	1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Tujuan 8 Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan EKonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak
Misi V Menyelenggarak an Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga	Meningkatkan Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Tujuan 17 Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan
		2	Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Tujuan 17 Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan
		3	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan	Tujuan 17

	Aset Daerah yang Berkualitas	Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan
4	Meningkatnya Pembangunan di Desa/ Pekon	Tujuan 16 Perdamaian, Kelembagaan dan Keadilan yang Kokoh

Sumber: RPIMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 (diolah)

Upaya untuk pencapaian SDGs di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung dan juga Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung termasuk Kabupaten Pesisir Barat hendakya dimulai dari area-area prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya bidang pendidikan dan kesehatan. Bahwa aspek pendidikan dan kesehatan, terutama pendidikan usia dini, menengah dan tinggi merupakan hal yang harus diprioritaskan dalam pencapaian target SDGs. Oleh karena itu, agenda pembangunan sebaiknya difokuskan pada penyediaan layanan pendidikan minimal di tingkat menengah dan penguasaan IPTEK. Sementara itu, target utama pembangunan SDM dibidang kesehatan adalah tersedianya akses universal terhadap jaminan kesehatan, terutama bagi kalangan perempuan dan anak-anak. Aspek pencegahan dan hidup sehat menjadi lebih utama dibandingkan dengan aspek kuratif. Penting untuk segera mewujudkan akses universal jaminan kesehatan yang berkelanjutan, termasuk dari sisi kualitas pelayanan dan pembiayaannya.
- b. Tersedianya infrastruktur dasar secara penuh, terutama air bersih dan sanitasi yang baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Pemerintah daerah dituntut agar dapat berinovasi dalam penyediaan infrastruktur dasar tersebut mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia.
- c. Penguatan konektivitas antar wilayah melalui tersedianya infrastrukturinfrastruktur yang dapat memperkuat konektivitas antar wilayah termasuk ke
 dalam prioritas pembangunan. Kehadiran infrastruktur multi-moda yang
 menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, seperti jalan darat, kereta api,
 pesawat terbang dan kapal laut merupakan salah satu komponen penting untuk
 peningkatan PDRB di masing-masing daerah. Sekaligus hal ini dapat menjadi
 jalan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.
- d. Penghidupan yang layak melalui ketersediaan lapangan kerja yang layak. Penciptaan lapangan kerja yang layak dapat didorong dengan menggali potensi-potensi ekonomi yang baru dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- e. Penggunaan institusi dan tata kelola (good governance) yang baik akan menjamin tercapainya berbagai target dalam SDGs dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Hal ini dikarenakan, kehadiran peran pemerintah dibutuhkan di seluruh pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik secara tidak langsung juga akan menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat pada pemerintah dan akhirnya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Adapun karakteristrik dari tata kelola pemerintahan yang baik dan perlu mendapatkan jaminan untuk dilaksanakan oleh instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. Kerangka hukum yang adil dan merata;
- c. Pelayanan public yang responsif;
- d. Menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan semua program dan kegiatan pelayanan publik.
- b. Berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
- c. Kesempatan yang sama untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan;
- d. Sumber Dava Publik dikelola secara efektif dan efisien.

4.2.3. Dukungan terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah hak seluruh individu. Pemerintah wajib menjamin pemenuhannya. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan hal tersebut, bahkan menjadikan SPM sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas anggaran daerah. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikatorindikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditambah pula dengan peraturan terkait masing-masing kementerian. Peraturan kementerian teknis SPM di atas menjadi rujukan pemerintah daerah dalam menyusun program/kegiatan/sub kegiatan pelaksanaan SPM di daerahnya masing-masing. maka pemerintah daerah melalui prangkat daerah harus menerapkan SPM secara efektif dan efisien.

Penerapan SPM sendiri merupakan pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemanuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Dalam konteks pelaksanaan tahap penerapan SPM ini, pemerintah daerah harus memastikan akses pelayanan dasar bagi seluruh warga negara, di samping juga harus memperhatikan penyediaan jenis dan mutu pelayanan dasar secara minimal agar warga negaranya dapat hidup secara layak.

Dalam konteks penerapan SPM, pemerintah daerah sebagai pelaksana pemenuhan SPM harus melakukan serangkaian tahapan, mulai dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Integrasi pelayanan dasar dalam dokumen perencaan dan penganggaran menjadi bagian integral dari pelaksanaan tahap penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar. SPM menjadi dasar dari pelaksanaan dan pencapaian target pemenuhan layanan dasar di daerah.

Saat ini SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Serta Sosial dengan berbagai indikatornya. Untuk itu, dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib pemerintahan daerah, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM, khususnya pada perangkat daerah terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional.

Mengingat SPM sudah diterapkan secara efektif mulai pada tahun 2019 maka perangkat daerah wajib:

- a. Melakukan pengintegrasian SPM kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam dokumen RKPD dan Renja, sebagai acuan dalam penyusunan RKA untuk penyusunan RAPBD;
- b. Menyampaikan pelaporan capaian SPM setiap akhir tahun anggaran yang bersinergi dengan materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD);
- c. Diharapkan kedepannya SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran.
- d. Untuk itu diharapkan seluruh perangkat daerah untuk bersama sama melakukan satu kesatuan gerak langkah untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah untuk peningkatan kinerja organisasi dan melaksanakan tugas pokok serta fungsi sebagaimana telah diamanahkan kepada masingmasing perangkat daerah.

Berikutnya, dalam upaya pencapaian SPM Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada kewenangan daerah disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.8. Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 terhadap Pencapaian SPM Kabupaten Pesisir Barat

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD		Sasaran RPJMD		Jenis SPM
(1)	(2)		(3)	(4)		
Misi I Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pembanguna n Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Su Ma Da	erwujudnya amber Daya anusia aerah yang erkualitas	Pendidikan Anak Usia Dini (usia 5-6 Tahun); Pendidikan Dasar (Usia 7-15 Tahun); Pendidikan Kesetaraan (usia 7-18 Tahun);		
				Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;		

				Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; Pelayanan Kesehatan Balita; Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar; Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif; Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut; Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
				Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus; Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Juwa Berat; Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV);
Misi II Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pembanguna n Infrastruktur Daerah dan Kewilayahan	2	Tersedianya Pemukiman Penduduk yang Sehat dan Berkualitas	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota; Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
		3	Tersedianya Sumber Daya Air untuk Mendukung	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari;

			Kedaulatan Pangan	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik;
		5	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum; Pelayanan Informasi Rawan Bencana; Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana; Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Misi III Mengembangk an Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	Meningkatkan Pembanguna n Ekonomi Daerah dengan Fokus pada Potensi Lokal	5	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar; Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar; Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar; Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial, Khususnya Gelandangan dan Pengemis; Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana;

Sumber: RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 (diolah)

4.3. Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Pesisir Barat

Selain pendekatan yang bersifat sektoral, rencana pembangunan daerah pada tahun 20219 ini juga menggunakan pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan tersebut dilakukan guna mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya.

Dalam Penataan Ruang dikenal kawasan strategis, yaitu suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting bagi perkembangan wilayah dalam aspek ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan, teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. Arah kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Lampung tahun 2021, selain mengaju pada RPJPD Kabupaten

Pesisir Barat Tahun 2005–2025, juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017-2037.

Kawasan strategis nasional dan provinsi yang berada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam RTRW meliputi:

- a. Kawasan Strategis Nasional ditinjau dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, Kawasan perbatasan negara ini terdapat di Pulau Batu Kecil, atau dalam bahasa lokal disebut sebagai Pulau Betuah, berada di Kecamatan Bangkunat yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Pulau Betuah ini merupakan salah satu pulau terluar di Wilayah Barat Indonesia.
- b. Kawasan Strategis Provinsi, meliputi
 - Kawasan Agro Minapolitan, lokasi agrominapolitan yang dimaksud berada di Kecamatan Ngambur, Ngaras dan Bangkunat.
 - Taman Nasional Bukit Barisan Selatan/TNBBS. Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan aset nasional (Kawasan Lindung Nasional) yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan dilestarikan. Sebagian besar sungai-sungai yang mengalir di Provinsi Lampung berhulu di TNBBS dan hutan yang masih termasuk kategori primer juga hanya terdapat di TNBBS.
- c. Kawasan Strategis Kabupaten meliputi:
 - 1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi :
 - Kawasan Ekowisata Pulau Pisang di Kecamatan Pulau Pisang;
 - Kawasan Labuhan Jukung di Kecamatan Pesisir Tengah;
 - Kawasan Tanjung Setia di Kecamatan Pesisir Selatan; dan
 - 2) Kawasan perkotaan krui di Kecamatan Pesisir Tengah.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan adalah Kawasan Hutan Tanam Rakyat (HTR) tersebar di wilayah kabupaten.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kewilayahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, menempuh kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Pesisir Barat, terdiri atas:
 - 1) pengembangan pariwisata berbasis wisata alam dan budaya dengan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan.
 - meningkatkan sinergitas pariwisata dengan sektor potensial dengan konsep agrowisata, minawisata dan ekowisata;
 - mengembangkan daya tarik wisata potensial dengan meningkatkan aspek pemasaran pariwisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara;
 - mengembangkan kapasitas masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan pariwisata yang bertumpu pada pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat; dan

- membangun dan meningkatkan infrastruktur pendukung bagi kawasan wisata potensial.
- 2) pengembangan sistem permukiman yang berhirarki dan terpadu antara sistem perdesaan dan perkotaan dan pengembangan sistem prasarana wilayah.
 - mengembangkan pusat pelayanan yang seimbang dan berjenjang antar wilayah dengan mengutamakan pada kawasan prioritas sesuai dengan potensi wilayah;
 - membangun dan meningkatkan sistem prasarana wilayah yang meliputi prasarana utama dan prasarana lainnya secara terpadu untuk medorong pertumbuhan wilayah; dan
 - Meningkatkan instrumen tata ruang yang mempertimbangkan daya dukung wilayah.
- 3) pengembangan kawasan minapolitan dengan pengelolaan sumber daya lokal berbasis pengelolaan komoditas unggulan melalui proses industrialisasi modern yang ramah lingkungan.
 - mengembangkan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah;
 - memanfaatkan potensi lahan non produktif secara lebih bijaksana bagi industri perikanan dan kelautan;
 - mengembangkan dan memanfaatkan teknologi modern dalam pengelolaan industri perikanan dan kelautan dalam rangka peningkatan produktivitas dan memiliki nilai ekonomi tinggi;
 - menguatkan pemasaran hasil perikanan dan kelautan melalui peningkatan sumber daya; dan
 - meningkatkan instrumen ruang untuk pengendalian lingkungan bagi industri perikanan dan kelautan.
- 4) pengembangan kawasan pertanian dalam mewujudkan agroindustri yang kompetitif dan terintegrasi antar sektor.
 - mengoptimalkan kapasitas produksi sektor pertanian melalui peningkatan komoditas unggulan; dan
 - mengembangkan infrastruktur pertanian dalam rangka kemandirian dan katahanan pangan.
- 5) perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing dengan memperhatikan kearifan lokal.
 - mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana;
 - meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya dengan upaya reboisasi dan penghijauan dengan penerapan teknologi modern;
 - mengoptimalkan kearifan lokal daerah dalam upaya untuk pelestarian lingkungan;
 - melakukan pencegahan penurunan kualitas lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup melalui pengembangan instrumen perizinan, insentif dan disinsentif dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang; dan

- mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pemanfaatan sumber daya alam bagi konservasi kawasan.
- 6) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan negara.
 - mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsim khusus pertahanan dan keamanan;
 - mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
 - mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan.

b. Arah Pemanfaatan Ruang

Sementara itu, berdasarkan pada Perda No 8 Tahun 2017, arahan pemanfatan ruang untuk perencanaan Tahun 2023 diarahkan untuk pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.9. Arah Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program Pembangunan RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037

	Arah Peman	faatan Ruang		Tahu	n Pelaks	sanaan		
No	Indikasi	Kegiatan	Lokasi	Tal	Tahap I		Program	Perangkat Daerah
	Program			2021	2022	II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Pengembanga	n Struktur Ruar	ng					
A1	Pemantapan R Pelayanan	Rencana Pusat-F	usat					
A1 .1	Peningkatan fungsi PKL Krui	Pembanguna n, Pengembang an dan Pemeliharaan Kantor Pemerintah Kabupaten	Pesisir Tengah				Penataan Bangunan Gedung	Dinas PU dan PR
		Pembanguna n dan Peningkatan Pusat Perdagangan Barang dan Jasa	Pesisir Tengah				Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperindag

	Arah Peman	faatan Ruang		Tahu	n Pelaks	sanaan		
No	Indikasi	Wi-A	Lokasi	Tał	nap I	Tahap	Program	Perangkat Daerah
	Program	Kegiatan		2021	2022	II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Pengembang an Kawasan pariwisata	Pesisir Barat				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pembanguna n Rumah Sakit Umum Daerah	Pesisir Tengah				Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Pengembang an Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Pesisir Tengah				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pengembang an SPAM Perpipaan dan Berbasis Masyarakat	Pesisir Tengah				Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PU dan PR
		Pengembang an Kawasan Permukiman	Pesisir Tengah				Pengembanga n Permukiman; Kawasan Permukiman	Dinas PU dan PR; Dinas PR dan KP
A1 .2	Peningkatan Fungsi PKLp Kota Jawa	Pengembang an Pusat Perdagangan dan Jasa	Bangku nat				Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperindag
		Pengembang an Kawasan Pariwisata	Bangku nat				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata

	Arah Peman	faatan Ruang		Tahu	n Pelaks	sanaan		
No	Indikasi	Wasiatan	Lokasi	Tal	nap I	Tahap	Program	Perangkat Daerah
	Program	Kegiatan		2021	2022	II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Pengembang an Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Bangku nat				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembang an Infrastruktur dan Komoditas Pertanian	Bangku nat				Penyediaan dan Pengembanga n Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembanga n Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembang an Kawasan Industri	Bangku nat				Perencanaan dan Pembanguna n Industri	Dinas Koperindag
A1 .3	Peningkatan Fungsi PKLp Biha	Penyusunan Rencana Detail/Rinci Kawasan Perkotaan Biha	Pesisir Selatan				Penyelenggar aan Penataan Ruang	Dinas PU dan PR
		Pengembang an Pusat Perdagangan dan Jasa	Pesisir Selatan				Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperindag

	Arah Peman	faatan Ruang		Tahu	n Pelak	sanaan		
No	Indikasi	Vagiatan	Lokasi	Tal	nap I	Tahap	Program	Perangkat Daerah
	Program	Kegiatan		2021	2022	II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Pengembang an kawasan pariwisata	Pesisir Selatan				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembang an Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Pesisir Selatan				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembang an Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Pesisir Selatan				Penyediaan dan Pengembanga n Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembanga n Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembang an Kawasan Industri	Pesisir Selatan				Perencanaan dan Pembanguna n Industri	Dinas Koperindag
		Pengembang an Jaringan Irigasi Teknis	Pesisir Selatan				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan PR
A1 .4	Peningkatan Fungsi PKLp Lemong	Penyusunan Rencana Detail/Rinci Kawasan Perkotaan Lemong	Lemong				Penyelenggar aan Penataan Ruang	Dinas PU dan PR
		Pengembang an Pusat	Lemong				Peningkatan Sarana	Dinas Koperindag

	Arah Peman	faatan Ruang		Tahu	n Pelak	sanaan		
No	Indikasi		Lokasi	Tal	nap I	Tahap	Program	Perangkat Daerah
	Program	Kegiatan		2021	2022	II .		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Perdagangan dan Jasa					Distribusi Perdagangan	
		Pengembang an kawasan pariwisata	Lemong				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembang an Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Lemong				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembang an Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Lemong				Penyediaan dan Pengembanga n Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembanga n Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
A1 .5	Peningkatan Fungsi PPK Negeri Ratu	Pengembang an kawasan pariwisata	Ngambu r				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
	Ngambur	Pengembang an Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Ngambu r				Penyediaan dan Pengembanga n Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembanga	Dinas Pertanian

	Arah Peman	faatan Ruang		Tahu	n Pelaks	sanaan		
No	Indikasi	Vogiatan	Lokasi	Tal	nap I	Tahap	Program	Perangkat Daerah
	Program	Kegiatan		2021	2022	II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							n Prasarana Pertanian	
A1 .6	Peningkatan Fungsi PPK Way Napal	Pengembang an kawasan pariwisata	Krui Selatan				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembang an Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Krui Selatan				Penyediaan dan Pengembanga n Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembanga n Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembang an Pusat Pelayanan Kesehatan	Krui Selatan				Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
A1 .7	Peningkatan Fungsi PPK Gunung Kemala	Pengembang an kawasan pariwisata	Way Krui				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembang an	Way Krui				Penyediaan dan Pengembanga	Dinas Pertanian

	Arah Peman	faatan Ruang		Tahu	n Pelak	sanaan		
No	Indikasi	Vagiatan	Lokasi	Tal	nap I	Tahap	Program	Perangkat Daerah
	Program	Kegiatan		2021	2022	II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Infrastruktur dan Komoditas pertanian					n Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembanga n Prasarana Pertanian	
A1 .8	Peningkatan Fungsi PPK Kebuayan	Pengembang an kawasan pariwisata	Karya Pengga wa				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembang an Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Karya Pengga wa				Penyediaan dan Pengembanga n Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembanga n Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
A1 .9	Peningkatan Fungsi PPL Parda Suka	Pengembang an kawasan Pariwisata	Ngaras				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembang an Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Ngaras				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembang an Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Ngaras				Penyediaan dan Pengembanga n Sarana Pertanian; Penyediaan dan	Dinas Pertanian

	Arah Peman	faatan Ruang		Tahu	n Pelaks	sanaan		
No	Indikasi	Wasiatan	Lokasi	Tal	ıap I	Tahap	Program	Perangkat Daerah
	Program	Kegiatan		2021	2022	II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Pengembanga n Prasarana Pertanian	
A1 .10	Peningkatan Fungsi PPL Kuripan	Pengembang an kawasan pariwisata	Pesisir Utara				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembang an Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Pesisir Utara				Penyediaan dan Pengembanga n Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembanga n Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
A1 .11	Peningkatan Fungsi PPL Pasar Pulau Pisang	Pengembang an Kawasan Pariwisata	Pulau Pisang				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembang an Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Pulau Pisang				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pengembang an Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Pulau Pisang				Penyediaan dan Pengembanga n Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembanga	Dinas Pertanian

	Arah Peman	faatan Ruang		Tahu	n Pelak	sanaan		
No	Indikasi	Wasiatan	Lokasi	Tal	nap I	Tahap	Program	Perangkat Daerah
	Program	Kegiatan		2021	2022	II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							n Prasarana Pertanian	
		Pengembang an Kawasan Industri Kecil	Pulau Pisang				Perencanaan dan Pembanguna n Industri	Dinas Koperindag
A2	Sistem Prasar	ana Utama						
A2 .1	Pengembang an Sistem Prasarana Transportasi Darat	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Sistem Jaringan Jalan Kolektor Primer	Pesisir Barat				Penyelenggar aan Jalan	Dinas PU dan PR
		Pembanguna n dan Peningkatan Jalan Kabupaten	Pesisir Barat				Penyelenggar aan Jalan	Dinas PU dan PR
		Pembanguna n dan Peningkatan Jalan Lingkungan	Pesisir Barat				Penyelenggar aan Jalan	Dinas PU dan PR
		Rehabilitasi Jaringan Jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan	Pesisir Barat				Penyelenggar aan Jalan	Dinas PU dan PR
		Pembanguna n, Peningkatan dan Pemeliharaan	Bangku nat, Lemong				Penyelenggar aan Lalu Lintas dan	Dinas Perhubung an

	Arah Peman	faatan Ruang		Tahu	n Pelak:	sanaan		
No	Indikasi	T7	Lokasi	Tal	nap I	Tahap	Program	Perangkat Daerah
	Program	Kegiatan		2021	2022	II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Terminal Tipe C					Angkutan Jalan (LLAJ)	
		Pengembang an Sarana dan Prasarana Terminal	Pesisir Barat				Penyelenggar aan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubung an
		Pengembang an Jaringan Pelayanan Lalu Lintas	Pesisir Barat				Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubung an
A2 .2	Pengembang an Sistem Prasarana Transportasi Laut	Pembanguna n dan Pengembang an Pelabuhan Laut Pengumpan Lokal	Pesisir Barat				Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubung an
		Pembanguna n dan pengembang an Pelabuhan Khusus Perikanan	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pembanguna n, Pengembang an dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan	Pesisir Barat				Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubung an
A3	Sistem Prasarana lainnya		ı				1	ı
A3 .1	Pengembang an Sistem	Pembanguna n Sistem Jaringan	Pesisir Barat				Pengelolaan Informasi dan	Dinas Kominfo

	Arah Peman	faatan Ruang		Tahu	n Pelaks	sanaan		
No	Indikasi	Vagiatan	Lokasi	Tal	nap I	Tahap	Program	Perangkat Daerah
	Program	Kegiatan		2021	2022	II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Jaringan Telekomunik asi	Telekomunik asi (Komunikasi, Data dan Informasi)					Komunikasi Publik	
		Pembanguna n jaringan Hotspot di Kawasan Wisata	Pesisir Barat				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo
		Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Kegiatan Pemerintaha n dan Dunia Usaha	Pesisir Barat				Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo
A3 .2	Pengembang an Sistem Prasarana Sumber Daya Air	Peningkatan dan Pemeliharaan Sumberdaya Air Berskala Regional Guna Menjaga Kelestarian Lingkungan Dilakukan pada Seluruh Sungai yang Berhulu di TNBBS	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan PR
		Berhulu di					Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Penyediaan dan Pengembanga	Dinas PU dan PR; Dinas Pertanian

	Arah Peman	faatan Ruang		Tahu	n Pelak	sanaan		
No	Indikasi	**	Lokasi	Tal	nap I	Tahap	Program	Perangkat Daerah
	Program	Kegiatan		2021	2022	II .		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							n Prasarana Pertanian	
		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang Tersebar di Seluruh Kecamatan di Pesisir Barat	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Penyediaan dan Pengembanga n Prasarana Pertanian	Dinas PU dan PR; Dinas Pertanian
		Pembanguna n Prasarana Pengendalian Banjir di Seluruh Wilayah	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan PR
		Pembanguna n dan Rehabilitasi System Drainase Primer, Sekunder dan Tersier	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan PR
		Pengamanan Abrasi Pantai	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan PR
A3 .3	Pengembanga Pengelolaan Li	n Sarana dan Pr ingkungan	asarana					

	Arah Peman	faatan Ruang		Tahu	n Pelaks	sanaan		
No	Indikasi	Vagiatan	Lokasi	Tal	nap I	Tahap	Program	Perangkat Daerah
	Program	Kegiatan		2021	2022	II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A3 .3. 1	Pengembang an Sistem Jaringan Air Minum	Pembanguna n Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Berbasis Masyarakat	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PU dan PR
		Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PU dan PR
		Pembanguna n dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Air Minum	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PU dan PR
A3 .3. 2	Pengembang an Sistem Jaringan Persampahan	Pembanguna n Dan Peningkatan TPA	Ngaras, Krui Selatan dan Pesisir Utara				Pengembanga n Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Dinas PU dan PR
		Pembanguna n TPST					Pengembanga n Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Dinas PU dan PR
	Pembanguun an TPS		Pesisir Barat				Pengembanga n Sistem dan	Dinas PU dan PR

	Arah Peman	faatan Ruang		Tahu	n Pelaks	sanaan		
No	Indikasi	Kegiatan	Lokasi	Tal	nap I	Tahap	Program	Perangkat Daerah
	Program	Kegiatan		2021	2022	II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Pengelolaan Persampahan	
		Pengembang an Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Pesisir Tengah				Pengembanga n Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Dinas PU dan PR
A3 .3. 3	Pengembang an Sistem Jaringan Air Limbah	Pembanguna n Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Air Limbah di Pusat Pelayanan Kesehatan	Pesisir Barat				Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Pembanguna n IPLT	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Air Limbah	Dinas PU dan PR
		Pembanguna n sarana dan prasarana air limbah di pedesaan	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Air Limbah	Dinas PU dan PR

	Arah Peman	faatan Ruang		Tahu	n Pelaks	sanaan		
No	Indikasi		Lokasi	Tal	nap I	Tahap	Program	Perangkat Daerah
	Program	Kegiatan		2021	2022	II .		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Pengembang an Sarana dan Prasarana pengelolaan Air Limbah	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Air Limbah	Dinas PU dan PR
В	Pengembanga	n Pola Ruang						
B1	Pengembanga	n Kawasan Bud	idaya					
B1 .1	Pengelolaan Kawasan Peruntukan Pertanian	Pengembang an Lahan Padi Sawah Beririgasi Teknis pada Areal-areal Potensial	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembanga n Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembang an Lahan Pertanian Pangan Berkelanjuta n (LP2B)	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembanga n Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Peningkatan Produktivitas Budidaya Tanaman Pangan dan Holtikultura	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembanga n Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembanga n Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembang an Budidaya Perkebunan	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembanga n Sarana Pertanian;	Dinas Pertanian

	Arah Peman	faatan Ruang		Tahu	n Pelak	sanaan		
No	Indikasi	Vogjatan	Lokasi	Tal	nap I	Tahap	Program	Perangkat Daerah
	Program	Kegiatan		2021	2022	II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Penyediaan dan Pengembanga n Prasarana Pertanian	
		Pengembang an Budidaya Peternakan					Penyediaan dan Pengembanga n Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembanga n Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Peningkatan Produktivitas Produksi Perkebunan melalui Intensifikasi Lahan dan Peningkatan Keterampilan Petani Kebun	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembanga n Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembanga n Prasarana Pertanian; Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembang an Kawasan Pertanian	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembanga	Dinas Pertanian

	Arah Peman	faatan Ruang		Tahu	n Pelaks	sanaan		
No	Indikasi	T7	Lokasi	Tał	nap I	Tahap	Program	Perangkat Daerah
	Program	Kegiatan		2021	2022	II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		melalui Pendekatan Agropolitan pada Kawasan- kawasan Potensial					n Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembanga n Prasarana Pertanian	
B1 .2	Pengembang an Kawasan Peruntukan Perikanan	Pengembang an Perikanan Tangkap	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pengembang an Pelabuhan Perikanan	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pengembang an Sarana dan Prasaranan Perikanan Nelyanan	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Optimalisasi TPI	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pengembang an Sentra Budidaya Perikanan Laut (udang, kerapu, dan rumput laut)	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembang an Sentra Budidaya Perikanan Air Tawar	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan

	Arah Peman	faatan Ruang		Tahu	n Pelak	sanaan		
No	Indikasi	**	Lokasi	Tal	nap I	Tahap	Program	Perangkat Daerah
	Program	Kegiatan		2021	2022	II .		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Pengembang an Kegiatan Minapolitan	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembang an Industri Pengolahan Perikanan	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
B1 .3	Pengembang an Kawasan Peruntukan Industri	Pembanguna n Kawasan Industri	Pesisir Selatan, Bangku nat				Perencanaan dan Pembanguna n Industri	Dinas Koperindag
		Pengendalian Lingkungan pada Kawasan Industri	Pesisir Barat				Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH
		Pengembang an Sarana dan Prasarana di Kawasan Industri	Pesisir Selatan, Bangku nat				Perencanaan dan Pembanguna n Industri	Dinas Koperindag
		Pengembang an Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Pesisir Barat				Perencanaan dan Pembanguna n Industri	Dinas Koperindag
B1 .4	Pengembang an Kawasan	Pengembang an Kawasan	Pesisir Barat				Peningkatan Daya Tarik	Dinas Pariwisata

	Arah Peman	faatan Ruang		Tahu	n Pelak:	sanaan		
No	Indikasi	TZ	Lokasi	Tał	nap I	Tahap	Program	Perangkat Daerah
	Program	Kegiatan		2021	2022	II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Peruntukan Pariwisata	Pariwisata Berkelanjuta n					Destinasi Pariwisata	
		Pembanguna n dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Pesisir Barat				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Pariwisata					Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembang an Promosi Destinasi Pariwisata Berkelanjuta n					Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
B1 .5	Pengembang an Kawasan Peruntukan Permukiman	Pengembang Pengembang an Kawasan an Kawasan Peruntukan Permukiman					Pengembanga n Permukiman; Kawasan Permukiman	Dinas PU dan PR; Dinas PR dan KP
	Pengembang an Kawasan Permukiman Pedesaan		Pesisir Barat				Kawasan Permukiman	Dinas PR dan KP
		Pembanguna n dan Peningkatan Sarana dan Prasaran Permukiman	Pesisir Barat				Pengembanga n Permukiman; Kawasan Permukiman	Dinas PU dan PR; Dinas PR dan KP

	Arah Peman	faatan Ruang		Tahu	n Pelaks	sanaan		
No	Indikasi	Wasiatan	Lokasi	Tal	nap I	Tahap	Program	Perangkat Daerah
	Program	Kegiatan		2021	2022	II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Pengembang an Perumahan Rakyat	Pesisir Barat				Pengembanga n Perumahan	Dinas PR dan KP
		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Permukiman	Pesisir Barat				Pengembanga n Permukiman; Kawasan Permukiman	Dinas PU dan PR; Dinas PR dan KP
		Pembanguna n dan Peningkatan Penyehatan Lingkungan Permukiman					Pengembanga n Permukiman; Kawasan Permukiman	Dinas PU dan PR; Dinas PR dan KP
		Pengembang an Prasarana dan Sarana Kawasan Cepat Tumbuh Perkotaan	Pesisir Barat				Penataan Bangunan dan Lingkungann ya	Dinas PU dan PR
С	Pengembanga	n Kawasan Stra	tegis					
C1	Pengembang an Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi	Pengembang an Kawasan Strategis dari Gudut Kepentingan					Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Kepentingan					Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata

	Arah Peman	faatan Ruang		Tahu	n Pelaks	sanaan		
No	Indikasi	Vaciatan	Lokasi	Tal	nap I	Tahap	Program	Perangkat Daerah
	Program	Kegiatan		2021	2022	II		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (6)		(7)	(8)	(9)
		Pengembang an Kawasan Perkotaan	Pesisir Tengah				Penataan Bangunan dan Lingkungann ya	Dinas PU dan PR

Sumber: RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. PESISIR BARAT TAHUN 2025

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN						AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKA [*]
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Portombel Dealers (1997)	1014451	CIMPER	PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN			DAERAH PENANGGU
	KEGIATAN		OPD	TAHUN 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	JAWAB
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 17	18	19	20	21
	DINAS PENDIDIKAN DAN KE	BUDAYAAN						260.793.020.033,00	210.161.914.209,00	216.478.993.814,00	-44.314.026.219,00						2.171.258.665.161,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							260.393.020.033,00	209.461.914.209,00	215.778.993.814,00	-44.614.026.219,00						2.170.488.665.161,00	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							260.393.020.033,00	209.461.914.209,00	215.778.993.814,00	-44.614.026.219,00						2.170.488.665.161,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG	Cakupan Pemenuhan				92,50	92,50	194.235.631.651,00	154.708.926.709,00	152.305.456.884,00	1.918.027.043.510,00						2.112.262.675.161,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				Persen	Persen											
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00			- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		13.640.000,00	DINAS PENDIDI DAN KEBUDAYA
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perend	anaan Perangkat Daerah										l						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.140.000,00	DINAS PENDIDII DAN KEBUDAYA
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan L	l aporan Capaian Kinerja dan Ikh	⊥ tisar Realisasi K	L Kinerja SKPD				l .			<u> </u>			I				
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	DINAS PENDIDIR DAN KEBUDAYA
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	190.882.861.651,00	153.188.328.709,00	150.950.374.609,00	-39.932.487.042,00			- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.099.684.528.161,00	DINAS PENDIDII DAN KEBUDAYA
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjanga	an ASN			T													
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1697 Orang /bulan	1613 Orang /bulan	190.877.361.651,00	153.182.828.709,00	150.944.874.609,00	-39.932.487.042,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.099.678.478.161,00	DINAS PENDIDII DAN KEBUDAYA
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan L	aporan Keuangan Akhir Tahun S	SKPD			1	l l									l		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	DINAS PENDIDIR DAN KEBUDAYA
1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan L	aporan Keuangan Bulanan/ Triw	vulanan/ Semes	teran SKPD		1										-		
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	DINAS PENDIDI DAN KEBUDAYA
1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan A	nalisis Prognosis Realisasi Ango	garan															
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.100.000,00	DINAS PENDIDII DAN KEBUDAYA
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah di Perangkat Daerah Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku				100 %	100 %	40.000.000,00	40.000.000,00	36.000.000,00	-4.000.000,00			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		44.000.000,00	DINAS PENDIDII DAN KEBUDAYA
1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik [Daerah pada SKPD																
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	36.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			44.000.000,00	DINAS PENDIDIK DAN KEBUDAYA
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan				2 Urusan	2 Urusan	2.013.822.000,00	480.500.000,00	467.500.000,00	-1.546.322.000,00			- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		11.176.000.000,00	DINAS PENDIDIR DAN KEBUDAYA
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas be	serta Atribut Kelengkapannya																
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	60 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			66.000.000,00	DINAS PENDIDII DAN KEBUDAYA
1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan A			T		1.5:	 						DAMA S					D11116 T=1
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			55.000.000,00	DINAS PENDIDIR DAN KEBUDAYA
1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Pen					15:	15:					N-F 5 17	DANA ALGUE					DIMAG 5
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			55.000.000,00	DINAS PENDIDIK DAN KEBUDAYA

) KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE REALISASI CAPAIAN PERIODE	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA					CAPAIAN KINERJA DAN K	KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	RENSTRA TAHUN 202	ODD TALLIAL	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PAGU INDIKATIF (Rp) APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
2	3	4	5 6	7	SEBELUM	SESUDAH	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Ped	awai Berdasarkan Tugas dan Fu		1	8	9	10	11	12	13	14	15	10	17	10	19	20	21
1.01.01.2.00.0000		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			70 Orang	4 Orang	1.853.822.000,00	320.500.000,00	367.500.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKA DAN KEBUDAYAAI
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja			100 %	100 %	533.516.000,00	533.516.000,00	392.400.275,00	-141.115.725,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		586.868.000,00	DINAS PENDIDIKA DAN KEBUDAYAAI
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instala Listrik/Penerangan Bangunan								I			<u> </u>					<u> </u>	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	DINAS PENDIDIKA DAN KEBUDAYAAI
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Pe	T .	1		ı							T			1		1	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.450.000,00	DINAS PENDIDIKA DAN KEBUDAYAAI
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Ka	antor																
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			93.500.000,00	DINAS PENDIDIKA DAN KEBUDAYAAI
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan d	dan Penggandaan					•			,								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	96.016.000,00	96.016.000,00	96.016.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			105.618.000,00	DINAS PENDIDIKA DAN KEBUDAYAAI
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan da	I an Peraturan Perundang-undang	lan				L			I				I	1			
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			25 Dokumen	25 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			33.000.000,00	DINAS PENDIDIKA DAN KEBUDAYAAI
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dissilanar									- Coma Nov Book			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
1.01.01.2.00.0000	r asıntası Kurjuriyan Tanıu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			11 Laporan	11 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.100.000,00	DINAS PENDIDIKA DAN KEBUDAYAAI
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Kooro	 dinasi dan Konsultasi SKPD																
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	158.884.275,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			330.000.000,00	DINAS PENDIDIKA DAN KEBUDAYAAI
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	100 %	467.300.000,00	169.000.000,00	169.000.000,00	-298.300.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		426.030.000,00	DINAS PENDIDIKA DAN KEBUDAYAAI
1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas	Operasional atau Lapangan													1			
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			2 Unit	2 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKA DAN KEBUDAYAAI
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Me	I	T T							Г								
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			29 Unit	53 Unit	387.300.000,00	169.000.000,00	169.000.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			426.030.000,00	DINAS PENDIDIKA DAN KEBUDAYAAI
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung			100 %	100 %	204.542.000,00	204.542.000,00	204.542.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		242.300.000,00	DINAS PENDIDIKA DAN KEBUDAYAAI
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	l Sumber Daya Air dan Listrik	<u> </u>													1		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			46.200.000,00	DINAS PENDIDIKA DAN KEBUDAYAAI
1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan da	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	157.000.000,00	157.000.000,00	157.000.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			190.000.000,00	DINAS PENDIDIKA DAN KEBUDAYAAI

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET REALIS	ASI PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN KE	RANGKA PENDANAAN							N MAJU RENCANA AHUN 2026	PERANGKAT
NO KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENJA O	OPD TARGET RENJA	TARG	GET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PR	RIORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	REGIATAN	ļ	OPD TAHON 2	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1 2	3	Jumlah Laporan Penyediaan	5 6	7	1 Laporan	1 Laporan	5.542.000,00	5.542.000,00	5.542.000,00	13	14 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	16	17 Reformasi Birokrasi	18	19	6.100.000,00	21 DINAS PENDIDIK
		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Γ Εαρυιαπ	Гароган	3.342.000,00	3.342.000,00	3.342.000,00	0,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			6.100.000,00	DAN KEBUDAYA
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik	Persentase Barang Milik			100 %	100 %	81.190.000,00	80.640.000,00	73.240.000,00	-7.950.000,00			_	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi	Aparatur		89.309.000,00	DINAS PENDIDIK
1.01.01.2.09	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah yang dalam kondisi baik			100 %	100 %	81.190.000,00	80.040.000,00	73.240.000,00	-7.950.000,00			-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		69.309.000,00	DAN KEBUDAYA
1.01.01.2.09.0	001 Penyediaan Jasa Pemelihar	 aan, Biaya Pemeliharaan, dan Pa	 ajak Kendaraan Perorangan	Dinas atau Kendaraan	Dinas Jabatan									. asiin Somaaiias				
		Jumlah Kendaraan			2 Unit	3 Unit	54.500.000,00	69.900.000,00	62.500.000,00	8.000.000,00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			59.950.000,00	DINAS PENDIDIK
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya									Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				DAN KEBUDAYA
1.01.01.2.09.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi S	arana dan Prasarana Gedung Ka	antor atau Bangunan Lainnya	a	<u> </u>											1		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7		12 Unit	15 Unit	26.690.000,00	10.740.000,00	10.740.000,00	-15.950.000,00	Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi			29.359.000,00	DINAS PENDIDI DAN KEBUDAYA
											Semua Kel/Desa			dan Pelayanan Publik Berkualitas				
. 1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan			100 Perser	n 100 Persen	66.157.388.382,00	54.752.987.500,00	63.473.536.930,00	-7.931.398.382,00							58.225.990.000,00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka partispasi kasar SD			93.07 %	93.07 %	42.838.665.633,00	37.238.499.200,00	44.273.798.630,00	1.435.132.997,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber	Peserta Didik, Pendidik, Tenaga		36.309.300.000,00	DINAS PENDIDIR DAN KEBUDAYA
														Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber	Pendidik, dan Masyarakat			
														Daya Manusia				
1.01.02.2.01.0	Pembangunan Ruang Guru/	Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala				4 Ruang	0,00	840.000.000,00	840.000.000,00	840.000.000,00	Kah Pasisir	DALLYANG		Meningkatkan			1.000.000.000,00	DINAS PENDID
		Sekolah/TU yang Telah Dibangun				4 Ruang	0,00	040.000.000,00	340.000.000,00	040.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN		Kualitas Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	DAN KEBUDAY
											Semua Kel/Desa	YA BIDANG PENDIDIKAN		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.01.02.2.01.0	005 Pembangunan Perpustakaa	 n Sekolah												Daya Manusia				
		Jumlah Perpustakaan			-	1 Ruang	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00		DAU YANG	-	Meningkatkan			250.000.000,00	DINAS PENDIC
		Sekolah yang Telah Dibangun									Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG		Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber				DAN KEBUDAY
												PENDIDIKAN		Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.01.02.2.01.0	Pembangunan Sarana, Pras	1																
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			-	15 Unit	0,00	2.592.000.000,00	2.592.000.000,00	2.592.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.600.000.000,00	DINAS PENDID DAN KEBUDAY
		, olan Disangan									Semua Kel/Desa	YA BIDANG PENDIDIKAN		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.01.02.2.01.0	007 Pembangunan Rumah Dina	 s Kepala Sekolah/Guru/Penjaga \$	 Sekolah											Daya Manusia				
		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga	7		1 Unit	4 Unit	250.000.000,00	920.000.000,00	920.000.000,00	670.000.000,00	Kab. Pesisir	DAU YANG DITENTUKAN P	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			950.000.000,00	DINAS PENDID
		Sekolan, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun									Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ENGGUNAANN YA BIDANG		Daya Manusia Meningkatkan				DAN KEBUDAY
												PENDIDIKAN		Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.01.02.2.01.0	Rehabilitasi Sedang/Berat P	1	T						I I			T						
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			-	3 Ruang	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	Barat, Semua	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			400.000.000,00	DINAS PENDID DAN KEBUDAY
		Direriabilitasi Sedarig/Berat									Semua Kel/Desa	YA BIDANG PENDIDIKAN		Meningkatkan Kualitas Sumber				
4.04.00.0.04.0	MO Debabilitasi Cadan y/Darat D	Disco Karala Oslalah (Our	w/Denie ve Celelele											Daya Manusia				
1.01.02.2.01.0	113 Renabilitasi Sedang/Berat R	umah Dinas Kepala Sekolah/Gur Jumlah Rumah Dinas Kepala			2 Unit	3 Unit	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0.00	Kab. Pesisir	DAU YANG	-	Meningkatkan			660.000.000,00	DINAS PENDID
		Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah			2 5		00010001000,00	000.000,00		5,55	Barat, Semua Kecamatan,	DITENTUKAN P ENGGUNAANN		Kualitas Sumber Daya Manusia			000.000,000	DAN KEBUDAY
		DiRehabilitasi Sedang/Berat									Semua Kel/Desa	YA BIDANG PENDIDIKAN		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.01.02.2.01.0	Pengadaan Mebel Sekolah																	
		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia			1 Paket	2 Paket	140.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	DAU YANG DITENTUKAN P	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			250.000.000,00	DINAS PENDIC
		Torocala									Kecamatan, Semua Kel/Desa	ENGGUNAANN YA BIDANG		Daya Manusia Meningkatkan				B/WWW.EBOB/W
												PENDIDIKAN		Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.01.02.2.01.0	Pembinaan Minat, Bakat da	n Kreativitas Siswa																
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang			20 Peserta Didik	Peserta	100.000.000,00	302.550.700,00	302.550.700,00	202.550.700,00	Barat, Semua	DAU YANG DITENTUKAN P	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			250.000.000,00	DINAS PENDIC DAN KEBUDAY
		Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				Didik					Kecamatan, Semua Kel/Desa	ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber				
1.01.02.2.01.0	26 Penvediaan Pendidik dan Te	enaga Kependidikan bagi Satuan	Pendidikan Sekolah Dasar											Daya Manusia				
		Jumlah Pendidik dan Tenaga	1		10 Orang	489 Orang	100.000.000,00	5.627.744.500,00	5.865.698.600,00	5.765.698.600,00		DAU YANG	-	Meningkatkan			550.000.000,00	DINAS PENDID
		Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan									Barat, Semua Kecamatan,	DITENTUKAN P ENGGUNAANN		Kualitas Sumber Daya Manusia				DAN KEBUDAY
		Sekolah Dasar									Semua Kel/Desa	YA BIDANG PENDIDIKAN		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
	Pengembangan Karir Pendi	l dik dan Tenaga Kependidikan pad	da Satuan Pendidikan Sekol	lah Dasar							1							
1.01.02.2.01.0		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang	7		60 Orang	60 Orang	8.160.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	-7.900.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			165.000.000,00	DINAS PENDID DAN KEBUDAY
1.01.02.2.01.0		1 Ropoliaiainair varia							i l			L DALLY (ÀNO - /		Daya Manusia	Î			
1.01.02.2.01.0		Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,	,								Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P		Meningkatkan				
1.01.02.2.01.0		Mendapatkan Fasilitasi										DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET REALISASI						CAPAIAN KINERJA DAN KE	ERANGKA PENDANAAN				KEI OMBOK		N MAJU RENCANA AHUN 2026	PERANGKAT
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENJA OPD	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGE	T 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	PRIC	DRITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	NEOIATAN		OPD TAHUN 2023		EBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Dertamban/Berkurang (10-12)	OOMBEN DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	TAGO INDINATII (RP)	VAWAS
2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	12	13 14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				128 Satuan Pendidikan	18.053.070.000,00	18.013.522.000,00	18.013.522.000,00	-39.548.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua	DAU YANG DITENTUKAN P	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			19.858.300.000,00	DINAS PENDIDI DAN KEBUDAYA
										Kecamatan, Semua Kel/Desa	ENGGUNAANN YA BIDANG		Daya Manusia Meningkatkan				
											PENDIDIKAN DAK NON		Kualitas Sumber Daya Manusia				
											FISIK-BOS REGULER						
1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teki	nologi, Informasi dan Komunikasi	i (TIK) untuk Pendidikan	1			<u>'</u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
		Jumlah Orang yang		3.	2 Orang	30 Orang	100.000.000,00	87.210.000,00	87.210.000,00	-12.790.000,00 Kab. Pesisir	DAU YANG DITENTUKAN P	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			100.000.000,00	DINAS PENDIDIK DAN KEBUDAYA
		Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi								Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ENGGUNAANN		Daya Manusia Meningkatkan				DAN KEBUDAYA
		(TIK) untuk Pendidikan								Sellida Nel/Desa	PENDIDIKAN		Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplika	si Bidang Pendidikan											Daya Manasia				
1.01.02.2.01.0007	T oldinarr original rypina	Jumlah peserta pelatihan		6	O Orang	60 Orang	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir	DALLYANG		Meningkatkan			176.000.000,00	DINAS PENDIDIR
		penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang			o crang	oo o.ag		. 55.555.555,55	100.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			., 0.000.000,00	DAN KEBUDAYA
		dilaksanakan								Semua Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber				
													Daya Manusia				
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Su	pervisi dan Evaluasi Layanan di I	Bidang Pendidikan										T	Γ			
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan,		4	Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua	DAU YANG DITENTUKAN P	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			138.000.000,00	DINAS PENDIDII DAN KEBUDAYA
		Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang								Kecamatan, Semua Kel/Desa			Daya Manusia Meningkatkan				
		Pendidikan									PENDIDIKAN		Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Keb	jakan Bidang Pendidikan		1		I							•		<u>.</u>		
		Jumlah kegiatan sosialisasi		2	Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir	DAU YANG	-	Meningkatkan			77.000.000,00	DINAS PENDIDII
		dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang								Barat, Semua Kecamatan,	DITENTUKAN P ENGGUNAANN		Kualitas Sumber Daya Manusia				DAN KEBUDAYA
		dilaksanakan								Semua Kel/Desa	YA BIDANG PENDIDIKAN		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.01.02.2.01.0041	Facilitasi Komunitas Polaias P	 endidik dan Tenaga Kependidika											Daya Mariusia				
1.01.02.2.01.0041	rasilitasi Komunitas Belajai F	Jumlah Komunitas Belajar				22	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00 Kab. Pesisir	DAU YANG	_	Meningkatkan			55.000.000,00	D DINAS PENDIDIK
		Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				Komunitas	0,00	73.000.000,00	73.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan,	DITENTUKAN P ENGGUNAANN		Kualitas Sumber Daya Manusia			33.000.000,00	DAN KEBUDAYA
		T Gridian yang terlasimasi								Semua Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber				
											. 2.13.3.10		Daya Manusia				
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendamp	ngan bagi satuan pendidikan un T	tuk pencegahan perundungan,	kekerasan, dan intolerar	si												
		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan		3 K	6 egiatan	1 Kegiatan	120.000.000,00	87.544.000,00	87.544.000,00	-32.456.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua	DAU YANG DITENTUKAN P	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			510.000.000,00	DINAS PENDIDIR DAN KEBUDAYA
		pendidikan untuk pencegahan perundungan,								Kecamatan, Semua Kel/Desa	ENGGUNAANN YA BIDANG		Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber				
		kekerasan, dan intoleransi									PENDIDIKAN		Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas B	aru				l				'							
		Jumlah Ruang Kelas Baru		5	Ruang	5 Ruang	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00 Kab. Pesisir	DAU YANG	-	Meningkatkan			1.320.000.000,00	DINAS PENDIDIK
		yang Bertambah								Barat, Semua Kecamatan,	DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG		Kualitas Sumber Daya Manusia				DAN KEBUDAYA
										Semua Kel/Desa	PENDIDIKAN		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sa	 rana, Prasarana dan Utilitas Sek	olah										Daya Mariusia				
11011021210110010	Tronasinasi Saariigi Sarat Sa	Jumlah Sarana, Prasarana		2	1 Unit	34 Unit	11.455.095.633,00	380.000.000,00	7.177.345.330,00	-4.277.750.303,00 Kab. Pesisir	DAU YANG	_	Peningkatan Kualitas			500.000.000,00	D DINAS PENDIDIK
		dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi						000.000,00		Barat, Semua Kecamatan,	DITENTUKAN P ENGGUNAANN		Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas			000.000.000,000	DAN KEBUDAYA
		Sedang/Berat								Semua Kel/Desa			Ekonomi Masyarakat				
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ru	ı ang Kelas Sekolah					I						<u> </u>				
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah		11	9 Ruang	58 Ruang	1.755.500.000,00	5.910.000.000,00	5.910.000.000,00	4.154.500.000,00 Kab. Pesisir	DAU YANG	-	Meningkatkan			6.000.000.000,00	DINAS PENDIDIK
		yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat								Barat, Semua Kecamatan,	DITENTUKAN P ENGGUNAANN		Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan				DAN KEBUDAYA
										Semua Kel/Desa	YA BIDANG PENDIDIKAN		Kualitas Sumber				
4.04.00.0.4.007	Donardo-u Al-i D 100 -	oroga Basarta Bi dii											Daya Manusia				
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan F	eraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan	<u> </u>	<u> </u>	1 Polist	2 Policet	4E0 000 000 00	057 000 000 00	057.000.000.00	00.070.000.00 1/41. 5. 11	DALLVANO		Moninglestics			E00.000.000.55	DINIAG DENGIO
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		1	1 Paket	2 Paket	450.000.000,00	357.928.000,00	357.928.000,00	-92.072.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS PENDIDIK DAN KEBUDAYA
		Toroguia								Semua Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber				
											LEINDINAIN		Daya Manusia				
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka partispasi kasar SMP		9.	2.14 %	92.14 %	16.751.462.749,00	13.455.762.300,00	14.846.762.300,00	-1.904.700.449,00		-	Meningkatkan Kualitas Sumber	Peserta Didik, Pendidik, Tenaga		14.369.690.000,00	DINAS PENDIDIK DAN KEBUDAYA
	Consider Worldingari Fortama												Daya Manusia Meningkatkan	Pendidik, dan Masyarakat			BANTALBOBATA
													Kualitas Sumber Daya Manusia	,			
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasa	l rana dan Utilitas Sekolah								I			,				
		Jumlah Sarana, Prasarana		2	5 Unit	2 Unit	4.042.362.749,00	450.000.000,00	450.000.000,00	-3.592.362.749,00 Kab. Pesisir	DAU YANG	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			4.400.000.000,00	DINAS PENDIDIR
		dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun								Barat, Semua Kecamatan,	DITENTUKAN P ENGGUNAANN		Daya Manusia				DAN KEBUDAYA
										Semua Kel/Desa	YA BIDANG PENDIDIKAN		Meningkatkan Kualitas Sumber				
4.04.02.2.	Deleta in the second	Notes C. C. C.											Daya Manusia				
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ru	1			1	00.5		,					I was a second		1	2	
		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi		-		29 Ruang	0,00	1.950.000.000,00	3.341.000.000,00	3.341.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua	DAU YANG DITENTUKAN P	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			2.100.000.000,00	DINAS PENDIDI DAN KEBUDAYA
		Sedang/Berat								Kecamatan, Semua Kel/Desa	ENGGUNAANN YA BIDANG		Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber				
											PENDIDIKAN		Kualitas Sumber Daya Manusia				
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pe	pustakaan Sekolah	· '			I	1						•	•			
1.01.02.2.02.0017	1	Jumlah Perpustakaan		1	Ruang	1 Ruang	128.100.000,00	128.100.000,00	128.100.000,00	0,00 Kab. Pesisir	DAU YANG	-	Meningkatkan			140.910.000,00	
1.01.02.2.02.0017		Coledata Total	1	Į.	· ·	1				Barat, Semua	DITENTUKAN P		Kualitas Sumber	Ì	1		DAN KEBUDAYA
1.01.02.2.02.0017		Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat								Kecamatan,	ENGGUNAANN		Daya Manusia				
1.01.02.2.02.0017		Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat									ENGGUNAANN		Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN KI	ERANGKA PENDANAAN				TAH	MAJU RENCANA IUN 2026	PERANGKAT
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD	TARGET RENJA	TARG	GET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Destant at Destanan (40.40)	CUMPED DAMA	PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN		DAGU INDUKATIF (D.s.)	PENANGGUNG
	KEGIATAN		OPD	TAHUN 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL DAE	RAH	TARGET P	PAGU INDIKATIF (Rp)	JAWAB
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 14	15	16 1	7 18	19	20	21
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				-	2 Paket	0,00	103.895.300,00	103.895.300,00	103.895.300,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desi	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	- Meningkati Kualitas Su Daya Mani Meningkati Kualitas Su Daya Mani	ımber usia kan ımber		120.000.000,00	DINAS PENDIDIK DAN KEBUDAYAA
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Pe	eserta Didik Sekolah Menengah	Pertama	1	T	<u> </u>				T							
		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				50 Peserta Didik	66 Peserta Didik	3.000.000.000,00	1.935.000.000,00	1.935.000.000,00	-1.065.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desi	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN A YA BIDANG PENDIDIKAN	- Meningkati Kualitas St Daya Mant Meningkati Kualitas St Daya Mant	umber usia kan umber		3.300.000.000,00	DINAS PENDIDIK DAN KEBUDAYAA
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan			1		T				T			I				
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				30 Peserta Didik	30 Peserta Didik	100.000.000,00	102.403.000,00	102.403.000,00	2.403.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desi	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	- Meningkati Kualitas Su Daya Manu Meningkati Kualitas Su Daya Manu	umber usia kan umber		110.000.000,00	DINAS PENDIDIK DAN KEBUDAYA
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Ter	naga Kependidikan bagi Satuan	Pendidikan Sek	olah Menengah I	Pertama	T											
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desi	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN A YA BIDANG PENDIDIKAN	- Meningkati Kualitas Su Daya Manu Meningkati Kualitas Su Daya Manu	umber usia kan umber		250.000.000,00	DINAS PENDIDIK DAN KEBUDAYAA
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidi	k dan Tenaga Kependidikan pad	1	idikan Sekolah M	lenengah Pertama	1						T	1	1			
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				40 Orang	20 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desi	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN AYA BIDANG PENDIDIKAN	- Meningkati Kualitas Su Daya Manu Meningkati Kualitas Su Daya Manu	usia kan umber		110.000.000,00	DINAS PENDIDIK DAN KEBUDAYAA
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Seko	lah Menengah Pertama						,									
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	8.031.200.000,00	8.020.504.000,00	8.020.504.000,00	-10.696.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desi	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS a REGULER	- Meningkati Kualitas Su Daya Manu Meningkati Kualitas Su Daya Manu	umber usia kan umber		110.000.000,00	DINAS PENDIDIK. DAN KEBUDAYAA
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Penge	elolaan Dana BOS Sekolah Men	engah Pertama														
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				32 Orang	220 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desi	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN A YA BIDANG PENDIDIKAN	- Meningkati Kualitas Su Daya Manu Meningkati Kualitas Su Daya Manu	usia kan umber		1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIK DAN KEBUDAYA
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teki	nologi, Informasi dan Komunikas	si (TIK) untuk Pe	endidikan													
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				40 Orang	30 Orang	100.000.000,00	80.108.000,00	80.108.000,00	-19.892.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	- Meningkatl Kualitas St Daya Mant Meningkatl Kualitas St Daya Mant	usia kan umber		1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIK DAN KEBUDAYAA
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Su	pervisi dan Evaluasi Layanan di	Bidang Pendidi	kan													
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				4 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desi	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN A YA BIDANG PENDIDIKAN	- Meningkati Kualitas Su Daya Manu Meningkati Kualitas Su Daya Manu	usia kan umber		220.000.000,00	DINAS PENDIDIK DAN KEBUDAYA
1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar P	endidik dan Tenaga Kependidik	an			T											
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	37 Komunitas	80.000.000,00	61.452.000,00	61.452.000,00	-18.548.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desi	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN A YA BIDANG PENDIDIKAN	- Meningkati Kualitas Su Daya Manu Meningkati Kualitas Su Daya Manu	umber usia kan umber		88.000.000,00	DINAS PENDIDIK DAN KEBUDAYAA
1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan,	dan/atau Magang/PKL untuk Pe	eningkatan Kapa	asitas Bidang Per	ndidikan		1-2-5										
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				32 Orang	22 Orang	130.000.000,00	134.500.000,00	134.500.000,00	4.500.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desi	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN A YA BIDANG PENDIDIKAN	- Meningkati Kualitas Su Daya Manu Meningkati Kualitas Su Daya Manu	usia kan umber		550.000.000,00	DINAS PENDIDIK DAN KEBUDAYAA
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ru	ang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	109.800.000,00	109.800.000,00	109.800.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desi	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	- Meningkati Kualitas Su Daya Manu Meningkati Kualitas Su Daya Manu	umber usia kan umber		120.780.000,00	DINAS PENDIDIK DAN KEBUDAYAA
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan F	L Peraga Peserta Didik			I	1					I		,,	I			
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				11 Paket	11 Paket	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desi	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN AYA BIDANG PENDIDIKAN	- Meningkati Kualitas Su Daya Manu Meningkati Kualitas Su Daya Manu	umber usia kan umber		500.000.000,00	DINAS PENDIDIK DAN KEBUDAYAA
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka partispasi kasar PAUD				74 %	74 %	6.201.700.000,00	3.764.246.000,00	4.058.496.000,00	-2.143.204.000,00		- Meningkati Kualitas Su Daya Manu Meningkati Kualitas Su Daya Manu	umber Pendidik, Tenaga pendidik, dan kan Masyarakat umber		7.171.000.000,00	DINAS PENDIDIK DAN KEBUDAYAA
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasa	rana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	ח			-	3 Unit	0,00	60.000.000,00	354.250.000,00	354.250.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desi	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN AYA BIDANG PENDIDIKAN	- Meningkati Kualitas Su Daya Manu Meningkati Kualitas Su	ımber ısia		100.000.000,00	DINAS PENDIDIK DAN KEBUDAYAA

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN KE	RANGKA PENDANAAN				I/FI AMPAI/		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT
NO KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12) LOKA	SI SUMBER DA		RIORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	RESIATAN		OPD	TATION 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Dertainbal/Derkulalig (10-12)	SONIBLIN DA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	TAGO INDINATII (Np)	VAVAD
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00 Kab. Pesisi Barat, Sem Kecamatan Semua Kel	ua DITENTUKA ENGGUNAA	NN	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKA DAN KEBUDAYAA
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidil	dan Tenaga Kependidikan pada Jumlah Pendidik dan Tenaga	a Satuan Pendi	idikan PAUD		30 Orang	30 Orang	125.000.000,00	119.120.000,00	119.120.000,00	-5.880.000,00 Kab. Pesisi	DAU YANG		Meningkatkan			135.000.000,00	DINAS PENDIDIKA
		Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	30 Orang	123.000.000,00	113.120.000,00	113.120.000,00	Barat, Sem Kecamatan Semua Kel	ua DITENTUKA ENGGUNAA	NN	Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DAN KEBUDAYAA
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dar																	
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00 Kab. Pesisi Barat, Sem Kecamatan Semua Kel	ua DITENTUKA ENGGUNAA	NN	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKA DAN KEBUDAYAA
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUI)												Daya Manusia				
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				118 Satuan Pendidikan	118 Satuan Pendidikan	2.216.700.000,00	2.095.805.000,00	2.095.805.000,00	-120.895.000,00 Kab. Pesisi Barat, Sem Kecamatan Semua Kel	ua DITENTUKA ENGGUNAA	NN	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKA DAN KEBUDAYAA
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Penge	 lolaan Dana BOP PAUD										TAGE						
		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	92.644.000,00	92.644.000,00	-7.356.000,00 Kab. Pesisi Barat, Sem Kecamatan Semua Kel	ua DITENTUKA ENGGUNAA	NN	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKA DAN KEBUDAYAA
1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Tekr	ologi, Informasi dan Komunikasi	(TIK) untuk Pe	endidikan														
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				32 Orang	32 Orang	1.000.000.000,00	94.865.000,00	94.865.000,00	-905.135.000,00 Kab. Pesisi Barat, Sem Kecamatan Semua Kel	ua DITENTUKA ENGGUNAA	NN	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKA DAN KEBUDAYAA
1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital	l untuk pendidikan								I	I							
		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				40 Konten Digital	40 Konten Digital	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00 Kab. Pesisi Barat, Sem Kecamatan Semua Kel	ua DITENTUKA ENGGUNAA	NN	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIK. DAN KEBUDAYAA
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Sup	l pervisi dan Evaluasi Layanan di E	l Bidang Pendidil	kan						I	I							
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				36 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00	30.734.000,00	30.734.000,00	-149.266.000,00 Kab. Pesisi Barat, Sem Kecamatan Semua Kel	ua DITENTUKA ENGGUNAA	NN	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			190.000.000,00	DINAS PENDIDIKA DAN KEBUDAYAA
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebi	akan Bidang Pendidikan																
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	172.948.000,00	172.948.000,00	-127.052.000,00 Kab. Pesisi Barat, Sem Kecamatan Semua Kel	ua DITENTUKA ENGGUNAA	NN	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			320.000.000,00	DINAS PENDIDIKA DAN KEBUDAYAA
1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar P	endidik dan Tenaga Kependidika	an	<u> </u>	1	10	F	120.000.000,00	60.788.000,00	60.788.000,00	-59.212.000,00 Kab. Pesisi	DALLYANG		Maningkatkan			450,000,000,00	DINAS PENDIDIKA
		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				10	Komunitas	120.000.000,00	60.788.000,00	60.788.000,00	-59.212.000,00 Rab. Pesisi Barat, Sem Kecamatan Semua Kel	ua DITENTUKA ENGGUNAA	NN	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DAN KEBUDAYAA
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas B	aru Jumlah Ruang Kelas Baru				 -	2 Ruang	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00 Kab. Pesisi	DALLYANG		Meningkatkan			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKA
		yang Bertambah					_ Induity	0,00		10010001000,00	Barat, Sem Kecamatan Semua Kel	ua DITENTUKA ENGGUNAA	NN	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			100:000:000,00	DAN KEBUDAYAA
1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan I	Kreativitas Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang		1		20 December	400	510.000.000,00	244.372.000,00	244 272 000 00	-265.628.000,00 Kab. Pesisi	. DALLYANG		Maningladlan			FC4 000 000 00	DINAS PENDIDIKA
		Jumian Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				36 Peserta didik	480 Peserta didik	510.000.000,00	244.372.000,00	244.372.000,00	-265.628.000,00 Rab. Pesisi Barat, Sem Kecamatan Semua Kel	ua DITENTUKA ENGGUNAA		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			561.000.000,00	DAN KEBUDAYAA
1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan,	dan/atau Magang/PKL untuk Per	ningkatan Kapa	asitas Bidang Pe	endidikan	1					1	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·	· 			
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				60 Orang	30 Orang	200.000.000,00	192.970.000,00	192.970.000,00	-7.030.000,00 Kab. Pesisi Barat, Sem Kecamatan Semua Kel	ua DITENTUKA ENGGUNAA	NN	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKA DAN KEBUDAYAA
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sal	ana, Prasarana dan Utilitas PAU Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00 Kab. Pesisi Barat, Sem Kecamatan Semua Kel	ua DITENTUKA ENGGUNAA	NN	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			210.000.000,00	DINAS PENDIDIKA DAN KEBUDAYAA
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan P	<u> </u>	Γ			1		I				I			1			
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00 Kab. Pesisi Barat, Sem Kecamatan Semua Kel	Ja DITENTUKA	NN	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKA DAN KEBUDAYAA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA					VALAIAN NINEKJA DAN I	KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGK DAERAI
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN KEGIATAN	RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	OPD TAHUN 2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PAGU INDIKATIF (Rp) APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGI JAWAB
2	3	4	5	6	7	SEBELUIVI 8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Warga negara dalam pendidikan kesetaraan				325 Orang	325 Orang	365.560.000,00	294.480.000,00	294.480.000,00	-71.080.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Pendidik, dan Masyarakat		376.000.000,00	DINAS PENI DAN KEBUD
1.01.02.2.04.0017	refigeiolaan Dana BOF Seki	Jumlah Sekolah				4 Satuan	4 Satuan	290.560.000,00	264.480.000,00	264.480.000,00	-26.080.000,00		DANA ALOKASI	-	Meningkatkan			300.000.000,00	DINAS PEN
		Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				Pendidikan	Pendidikan					Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN		Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				DAN KEBUI
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan	Peraga Peserta Didik Nonformal Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	75.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-45.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			76.000.000,00	DINAS PEN DAN KEBU
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							400.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	300.000.000,00							770.000.000,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							400.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	300.000.000,00	1						770.000.000,00)
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penduduk usia 10 Tahun keatas yang Terlibat Pertunjukan Seni				25,00 Persen	25,00 Persen	300.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	360.000.000,00)						660.000.000,00)
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang menonton secara langsung pertunjukan seni				65 %	65 %	300.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	300.000.000,00			-	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Masyarakat		660.000.000,00	DINAS PEI DAN KEBU
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembanga	n, Pemanfaatan Objek Pemajuan Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	n Tradisi Budaya			2 Objek	2 Objek	250.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			550.000.000,00	DINAS PE DAN KEBU
2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Ma	anusia, Lembaga, dan Pranata T	radisional																
		Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			110.000.000,00	DINAS PEI DAN KEBU
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi				30,00 Persen	30,00 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00							110.000.000,00	
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Terdaftar				2 Objek	2 Objek	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00)		-	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS PE DAN KEBI
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														Masyarakat				
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				2 Objek	2 Objek	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			110.000.000,00	DINAS PE DAN KEBI
	DINAS KESEHATAN							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00				,			111.178.638.818,00)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan				95 %	95 %	37.487.292.160,00	31.420.623.600,00	31.350.822.254,00	-5.701.668.560,00)						31.785.623.600,00)
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Persentase				92,5 % 95 %	92,5 % 95 %	112.164.400,00	112.164.400,00	112.164.400,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			112.164.400,00	DINAS KE
.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perer																		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	12.466.800,00	42.025.000,00	42.025.000,00	29.558.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			42.025.000,00	DINAS KE
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan	Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19.610.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-14.610.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			5.000.000,00	DINAS KE

W00-	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN P	ERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024		ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)	DKDD DEDUBALIAN COOR	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA —		IORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG
2	3	4	5	6	7	SEBELUM	SESUDAH	10 RKPD 2025	APBD 2025 11	RKPD PERUBAHAN 2025	13	14	15	NASIONAL 16	DAERAH 17	18	19	20	21
2	3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0	,	1 Dokumen	1 Dokumen	19.610.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-14.610.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	10	19	5.000.000,00	
1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan	DPA-SKPD	.1		1		1					_L	I I						
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19.610.000,00	14.195.000,00	14.195.000,00	-5.415.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			14.195.000,00	DINAS KESEHA
1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan		T	1	1	T	1 1					T				T	T	T	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19.610.000,00	14.195.000,00	14.195.000,00	-5.415.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			14.195.000,00	D DINAS KESEHA
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikh	itisar Realisasi I	Kinerja SKPD		Τ.,		5 000 000 00		5 000 000 00		Tu. 5					T	T =	DINA 0 1/505111
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	D DINAS KESEHA
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat		1			Ι	T., T					T.,	T a.v.a. T		1-,,		<u> </u>	T	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	16.257.600,00	26.749.400,00	26.749.400,00	10.491.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	•	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			26.749.400,00	D DINAS KESEHA
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				95 %	95 %	35.926.413.900,00	30.432.623.600,00	30.432.623.600,00	-5.493.790.300,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		30.432.623.600,00	DINAS KESEHA
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjar		<u> </u>									T	T		1	<u> </u>	<u> </u>	T	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				417 Orang/ bulan	417 Orang/ bulan	35.914.413.900,00	30.420.623.600,00	30.420.623.600,00	-5.493.790.300,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			30.420.623.600,00	DINAS KESEHA
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD															1	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	D DINAS KESEHA
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Bulanan/ Triv	wulanan/ Semes	steran SKPD								T				T	T	T	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	,			2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.000.000,00	D DINAS KESEH
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan	Analisis Prognosis Realisasi Ang	garan														1		
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.000.000,00	D DINAS KESEH
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				95 %	95 %	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		75.000.000,00	D DINAS KESEH
1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, d	an Pengendalian Barang Milik Da	erah pada SKP	D															
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.000.000,00	D DINAS KESEH
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusuna	n Laporan Barang Milik Daerah pa																	
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	D DINAS KESEH
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				95 %	95 %	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		85.000.000,00	DINAS KESEH
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas t	l peserta Atribut Kelengkapannya			1							1							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			35.000.000,00	DINAS KESEH
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pe	egawai Berdasarkan Tugas dan F	ungsi	1		25 0	25 Oran =	E0 000 000 00	2.22	0.00	E0 000 000 00	Kah Basisis	DANA ALOKACI		Poformosi Direline -			E0 000 000 00) DINAS KEGE
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	•	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.000.000,00	D DINAS KESEHA

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)	_	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA —	PR	IORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUN JAWAB
			OPD		2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		2010101		NASIONAL	DAERAH		1,	(1,00	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				95 %	95 %	584.253.860,00	450.215.600,00	380.414.254,00	-203.839.606,00		-		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur		550.215.600,00	DINAS KESEHA
.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Insta	alasi													Publik Berkualitas				
	Listrik/Penerangan Banguna																		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				1 Paket	1 Paket	6.122.600,00	6.122.600,00	6.122.600,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			6.122.600,00	DINAS KESEHA
		Bangunan Kantor yang Disediakan										Kecamatan, Semua Kel/Desa			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan P			1		1	1	T I		Ι		T	1		1		T	T	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.671.000,00	8.671.000,00	8.671.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.671.000,00	DINAS KESEHA
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik I	 Kantor																	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44.636.760,00	44.636.760,00	44.636.760,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			44.636.760,00	DINAS KESEHA
		rand yang Decalaran										Kecamatan, Semua Kel/Desa			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakar	dan Penggandaan	1																
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	53.123.500,00	53.123.500,00	53.123.500,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			53.123.500,00	DINAS KESEH
		yang Disediakan										Kecamatan, Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan d	dan Peraturan Perundang-undang	gan			T	T					T	T		1_,				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			100.000.000,00	DINAS KESEH
		Perundang-Undangan yang Disediakan										Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.300.000,00	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			36.300.000,00	DINAS KESEH
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														Publik Berkualitas				
1.02.01.2.00.0000	T domasi ranjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi				1 Laporan	1 Laporan	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI -		Reformasi Birokrasi			15.400.000,00	DINAS KESEHA
		Kunjungan Tamu										Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koo	L ordinasi dan Konsultasi SKPD																	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	320.000.000,00	285.961.740,00	216.160.394,00	-103.839.606,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			285.961.740,00	DINAS KESEH
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				95 %	95 %	202.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	-120.000.000,00		-		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		187.000.000,00	DINAS KESEHA
		Pemerintan Daeran													Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dina	s Operasional atau Lapangan																	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			42.000.000,00	DINAS KESEH
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			50.000.000,00	DINAS KESEH
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan M	esin Lainnya													Publik Berkualitas				
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang				10 Unit	10 Unit	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			55.000.000,00	DINAS KESEH
		Disediakan										Kecamatan, Semua Kel/Desa	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Pras	sarana Pendukung Gedung Kanto	or atau Bangun	an Lainnya		0.11=4	0.11=21	FF 000 000 00	40,000,000	10.000.000.00	4E 000 000 0	Kah Bestel	DANA ALOKAS:		Poto-mani Diret			40.000.000.00	DINIAGUEGE
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	55.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			40.000.000,00	DINAS KESEH
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95 %	95 %	147.360.000,00	108.720.000,00	108.720.000,00	-38.640.000,00		-		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi	Aparatur		108.720.000,00	DINAS KESEH

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN I	KERANGKA PENDANAAN				VEI 0110011		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT
NO KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA	TARG	GET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	PRI	ORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	REGIATAN		OPD	1AHUN 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertamban/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)	JAWAB
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	50.400.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-38.400.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunika:	Si, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan				1 Laporan	1 Laporan	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI		Reformasi Birokrasi			96,000,000,00	DINAS KESEHATAN
		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				Т Сароган	Г Сароган	98.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			96.000.000,00	DINAS RESERATAN
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	960.000,00	720.000,00	720.000,00	-240.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			720.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95 %	95 %	355.100.000,00	234.900.000,00	234.900.000,00	-120.200.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		234.900.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemelihan	aan, Biaya Pemeliharaan, dan Pa	ijak Kendaraan F	Perorangan Dinas	atau Kendaraan I	Dinas Jabatan				1		T			ı	1		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	4 Unit	20.800.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	-7.200.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			13.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemelihan	aan, Biaya Pemeliharaan, Pajak d	dan Perizinan Ke	endaraan Dinas Op	perasional atau La	1				I		T				1	I	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	5 Unit	249.900.000,00	181.400.000,00	181.400.000,00	-68.500.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			181.400.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan	<u>, </u>	T				0511.11	54 500 000 00		27.000.000	24.500.000 14.4.5.44					1	27.000.000.00	DINIA CHESTIA TAN
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				73 Unit	25 Unit	51.500.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-24.500.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			27.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi G	edung Kantor dan Bangunan Lair	nnya															
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	32.900.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	-20.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.900.000,00	DINAS KESEHATAN
2. 1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan				100 %	100 %	67.184.826.478,00	69.734.403.918,00	70.642.931.280,00	10.914.577.440,00						78.099.403.918,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	24.277.004.639,00	19.971.019.800,00	19.971.019.800,00	-4.305.984.839,00		-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur		28.288.089.400,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas	Tenaga Kesehatan				_												
		Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				2 Unit	0 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																	
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	13 Unit	2.000.000.000,00	5.633.187.400,00	5.633.187.400,00	3.633.187.400,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.789.187.400,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Ke		<u> </u>					Т		T						T	_	
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	0 Unit	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemelihara	T	T	1				т-		T				<u> </u>				
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	0 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemelihara		T				Ţ <u></u> ,				,					1		DIMAGNET
4 00 00 0 01 00 1	Debabassas to the second	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	5 Unit	2.000.000.000,00	3.755.904.000,00	3.755.904.000,00	1.755.904.000,00 Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.955.904.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0010	kenadilitasi dan Pemelihara	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Unit	5 Unit	2.000.000.000,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	-50.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemelihara	l an Rumah Dinas Tenaga Kesehai	tan	1			1			1	ı	1	·	1	ı	ı	ı	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA					CAFAIAN NINEKJA DAN	KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGI DAERA
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	ODD TALLIAL	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA -		RIORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGG JAWAE
				_	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				2 Unit	3 Unit	1.500.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	-900.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			600.000.000,00	DINAS KES
		dan Femelinaraan													Daya Manusia				
.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Al	lat Penunjang Medik Fasilitas P	elayanan Keseh	hatan	T	1	T				T		T T				T	1	
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				2 Unit	15 Unit	2.000.000.000,00	963.000.000,00	963.000.000,00	-1.037.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			757.000.000,00	DINAS KES
															Daya Manusia				
.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaar	1				44.11-9	0.11-7	440,000,000,00	0.00	0.00	-110.000.000,00	V Kali Partata	DAMA ALOKAGI		Manifestation		<u> </u>	440,000,000,00	DINA O KE
		Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional				11 Unit	0 Unit	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	•	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	DINAS KE
.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berk	Maintainance Center ala Alat Kesehatan/Alat Penunja	ang Medik Fasili	itas Palayanan Ka	esehatan														
.02.02.2.01.0020	rememaraan kuun dan berka	Jumlah Alat Kesehatan/Alat	ang Medik Fasili	itas Pelayanan Ke	eseriatari	11 Unit	11 Unit	110.000.000,00	51.001.000,00	51.001.000,00	-58.999.000,00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan			51.001.000,00	DINAS KES
		Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					, , , , , ,					Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														Daya Manusia				
.02.02.2.01.0022	T engembangan Kuman Gakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai				1 Unit	0 Unit	5.000.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan			3.255.000.000,00	DINAS KE
		standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau													Kualitas Sumber Daya Manusia				
		dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit																	
02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habi	is Pakai, Bahan Medis Habis Pa	_ akai,, Vaksin, Ma	 akanan dan Minu	 ıman di Fasilitas Kes	 sehatan													
		Jumlah Obat, Bahan Habis				1 Paket	10 Paket	2.407.004.639,00	6.726.651.400,00	6.726.651.400,00	4.319.646.761,00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan			6.678.721.000,00	DINAS KE
		Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan										Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesel	.l hatan Dasar Melalui Pendekata	n Keluarga					I.								I		1	
		Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi	h			1000 Keluarga	1000 Keluarga	50.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			70.000.000,00	DINAS KE
		Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				, riciaal ga	. 15:55.5					Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK		Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan F	Pelayanan Kesehatan di DTPK	(Pelayanan Kes	sehatan Bergerak,	x, Gugus Pulau, Pela	iyanan Keseha	itan Berbasis Te	elemedicine)											
		Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang				1000 Layanan	1000 Layanan	50.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			80.000.000,00	DINAS KE
.02.02.2.01.0026	Distribusi Alet Kasabatan Oh	Dilakukan Pengembangan pat, Bahan Habis Pakai, Bahan	Madia Habia Bal	lkai Vakain Maka	anan dan Minuman I	ko Facilitas Ka	achatan												
.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Reseriatari, Ob	Jumlah distribusi Alat	IVIEUIS HADIS FAI	ikai, vaksiii, iviaka		11 Paket	11 Paket	50.000.000,00	141.276.000,00	141.276.000,00	91.276.000,00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan			141.276.000,00	DINAS KE
		Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan										Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	h			100 %	100 %	42.306.923.839,00	49.404.749.118,00	50.313.276.480,00	8.006.352.641,00				Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber	Aparatur dan Masyarakat		49.452.679.518,00	DINAS KE
02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesel	 hatan Ibu Hamil													Daya Manusia				
02.02.2.02.	To ago ordani ordania i rocco.	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3281 Orang	3456 Orang	100.000.000,00	120.600.000,00	120.600.000,00	20.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			120.600.000,00	DINAS KE
02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesel	 hatan Ibu Bersalin													Daya Manusia				
	J	Jumlah Ibu Bersalin yang				3132 Orang	3448 Orang	100.000.000,00	86.085.000,00	86.085.000,00	-13.915.000,00		DANA ALOKASI	-	Meningkatkan			86.085.000,00	DINAS KE
		Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar										Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesel	L hatan Bayi Baru Lahir					1								· ·		1		
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2983 Orang	3311 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KE
.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesel	 hatan Balita									1				Daya Manusia				
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				144444 Orang	15894 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan			50.000.000,00	DINAS KE

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	AVUIIV	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN KE	ERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK		N MAJU RENCANA AHUN 2026	PERANGKA DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENSTRA R	RENJA OPD TAHUN 2023	OFD TARRON	TARG	SET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGU JAWAB
			OPD '		2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL DAERAH				
2	3	Jumlah Anak Usia	5	6	7	17479	19818	10	55.000.000,00	55.000.000,00	13 14 -45.000.000,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	- Meningkatkan	18	19	55.000.000,00	DINAS KESEH
		Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				Orang	Orang	100.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	UMUM (DAU)	Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			33.000.000,00	DINAS RESEI
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan pada Usia Produktif				_											
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	;			115820 Orang	17750 Orang	100.000.000,00	60.836.000,00	60.836.000,00	-39.164.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.836.000,00	DINAS KESE
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan pada Usia Lanjut			1												
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	i			15743 Orang	17750 Orang	100.000.000,00	129.618.800,00	129.618.800,00	29.618.800,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			129.618.800,00	DINAS KESE
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kese																
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	i			20834 Orang	21270 Orang	100.000.000,00	91.432.000,00	91.432.000,00	-8.568.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			91.432.000,00	DINAS KESE
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Penderita Diabetes Melitu				T	1										
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	i			927 Orang	947 Orang	100.000.000,00	43.232.000,00	43.232.000,00	-56.768.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			43.232.000,00	DINAS KESE
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Orang dengan Gangguan	Jiwa Berat														
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				271 Orang	275 Orang	100.000.000,00	47.535.000,00	47.535.000,00	-52.465.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			47.535.000,00	DINAS KESE
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Orang Terduga Tuberkulo															
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2500 Orang	2182 Orang	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			197.930.400,00	DINAS KESI
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kese	I hatan Orang dengan Risiko Terii	nfeksi HIV														
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3300 Orang	2630 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESE
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan bagi Penduduk pada Kond Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	disi Kejadian Luar B	Biasa (KLB)		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESE
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan bagi Penduduk Terdampa	k Krisis Kesehatan	Akibat Benca	ana dan/atau Berpot							T					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS KESE
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kese																
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	153.823.000,00	153.823.000,00	53.823.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			153.823.000,00	DINAS KESE
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kese					1.5.		To 200 200 20		22.247.222.22	20.07.20.00						BN404505
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	83.947.000,00	83.947.000,00	33.947.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			83.947.000,00	DINAS KESE
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kese						1,						T.				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	173.836.000,00	173.836.000,00	73.836.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			173.836.000,00	DINAS KESE
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Prom	osi Kesehatan			1			I									
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	366.975.000,00	366.975.000,00	266.975.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			366.975.000,00	DINAS KESE
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Tradisional, Akupuntur, As	suhan Mandiri, dan	Tradisional L	 _ainnya	4.50	4.50	25.22.				DAMA W. GWY				05.00	DINAG
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEH

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR PERIODE CAPAIAN	SI PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN KE	RANGKA PENDANAAN					- KELOMPOK		N MAJU RENCANA AHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD CAPAIAN RENJA OP TAHUN 202	OPD TAHUN	TARGE			PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12) LO	OKASI SU	MBER DANA -		RIORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
2	2	4	5 6	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			15	NASIONAL 16	DAERAH 17	40			
2	3	Jumlah Dokumen Hasil	5 6	7	1 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	11 152.465.000,00	152.465.000,00	13 102.465.000,00 Kab. Pe	14 esisir DA	NA ALOKASI	16	17 Meningkatkan	18	19	20 152.465.000,00	DINAS KESEHAT
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	132.403.000,00	132.403.000,00	Barat, S Kecama	Semua UM atan,	IUM (DAU)		Kualitas Sumber Daya Manusia			132.403.000,00	DINAS RESERVA
										Semua	Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber				
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Orang dengan Masalah K	esehatan Jiwa (ODMK)											Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0021	rengelolaan relayahan Rese	Jumlah Orang dengan	eseriatari siwa (Obivik)		141746	141746	50.000.000,00	16.674.000,00	16.674.000,00	-33.326.000,00 Kab. Pe	esisir DA	NA ALOKASI	-	Meningkatkan			16.674.000,00	DINAS KESEHAT
		Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan				Orang	33.333.333,33			Barat, S Kecama	Semua UM atan,	IUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
		Pelayanan Kesehatan								Semua	Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber				
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Jiwa dan NAP7A												Daya Manusia				
	· ongolouan r olayanan r olay	Jumlah Penyalahguna			141746	141746	50.000.000,00	27.382.000,00	27.382.000,00	-22.618.000,00 Kab. Pe	esisir DA	NA ALOKASI	-	Meningkatkan			27.382.000,00	DINAS KESEHAT
		NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			Orang	Orang				Barat, S Kecama	atan,	IUM (DAU)		Kualitas Sumber Daya Manusia				
										Semua	Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyal	 kit Menular dan Tidak Menular												Daya manasia				
+	,	Jumlah Dokumen Hasil			3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	269.335.000,00	269.335.000,00	169.335.000,00 Kab. Pe		NA ALOKASI	-	Meningkatkan			269.335.000,00	DINAS KESEHA
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak								Barat, S Kecama	atan,	IUM (DAU)		Kualitas Sumber Daya Manusia				
		Menular								Semua	Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Keseha	 atan Masyarakat																
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan			1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	1.000.000.000,00 Kab. Pe	esisir INS	SENTIF SKAL UNTUK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			10.000.000.000,00	DINAS KESEHA
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								Barat, S Kecama	atan, PE	NGHARGAA		Daya Manusia				
										Semua	TAI	(INERJA HUN RJALAN		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
											l DA	U YANG TENTUKAN P		Daya Wanasia				
											EN	GGUNAANN BIDANG						
											PE	SEHATAN NDAPATAN GI HASIL						
											PA	JAK ROKOK						
1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan	NAPZA di Fasyankes dan Seko	lah												T			
		Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi			5000 Orang	5000 Orang	50.000.000,00	22.380.000,00	22.380.000,00	-27.620.000,00 Kab. Pe Barat, S	Semua UM	NA ALOKASI IUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			22.380.000,00	DINAS KESEHA
		Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan								Kecama Semua	atan, Kel/Desa			Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber				
		Sekolah												Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman	Spesimen Penyakit Potensial K	LB ke Laboratorium Rujukan/N	Nasional	, ,										1			
		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar			1 Paket	2 Paket	50.000.000,00	83.600.000,00	83.600.000,00	33.600.000,00 Kab. Pe Barat, S	Semua UM	NA ALOKASI IUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			83.600.000,00	DINAS KESEHA
		Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan								Kecama Semua	atan, Kel/Desa			Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber				
		Diaistribusikan												Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Pusko	T													I			
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan			1 Dokumen	7 Dokumen	165.000.000,00	2.800.500.000,00	2.800.500.000,00	2.635.500.000,00 Kab. Pe Barat, S	Semua UM	NA ALOKASI IUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			2.800.500.000,00	DINAS KESEHA
		Puskesmas								Kecama Semua	atan, Kel/Desa			Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber				
														Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasili	<u>, </u>	T T												T			
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan			1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	383.659.000,00	383.659.000,00	333.659.000,00 Kab. Pe Barat, S	Semua UM	NA ALOKASI IUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			383.659.000,00	DINAS KESEHA
		Fasilitas Kesehatan Lainnya								Kecama Semua	atan, Kel/Desa			Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber				
														Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasili	tas Kesehatan di Kabupaten/Kot	a T															
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			11 Unit	11 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00 Kab. Pe Barat, S	Semua UM	NA ALOKASI IUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			50.000.000,00	DINAS KESEHA
		Kabupater//Kota								Kecama Semua	Kel/Desa			Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber				
														Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tid	ak Diharapkan (Kejadian Ikutan I	Pasca Imunisasi dan Pemberia	ian Obat Massal)	1,.						1					1		D
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian			1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00 Kab. Pe Barat, S Kecama	Semua UM	NA ALOKASI IUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHA
		Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								Semua	Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber				
		,												Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan D	·	<u> </u>		1.5.					I		NA ALGORIT						B 1112
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00 Kab. Pe Barat, S Kecama	Semua UM	NA ALOKASI IUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHA
		uan nespun wapan									atan, Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber				
														Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan	Sistem Penanganan Gawat Dar	urat Terpadu (SPGDT)		1,	411.0		,			anto I.	NIA ALGORITA						Division -
		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi			1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	90.000.000,00 Kab. Pe Barat, S	Semua UM	NA ALOKASI IUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			140.000.000,00	DINAS KESEHA
		Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan								Kecama Semua	atan, Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber				
		Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)												Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesel	natan orang dengan Tuberkulosis	s												1			
		Jumlah orang dengan			2500 Orang	2500 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00 Kab. Pe		NA ALOKASI	-	Meningkatkan Kualitan Sumbar			50.000.000,00	DINAS KESEHA
		Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar								Barat, S Kecama Semua		IUM (DAU)		Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan				
	i .	noochalan sesual Slandal								Semua	, Non Desa			Kualitas Sumber				

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA		FT 0007		DAGU NEW TOTAL	CAPAIAN KINERJA DAN P	ERANGKA PENDANAAN			PD1071717	KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
RODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB	RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	ODD TALLIAL	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PAGU INDIKATIF (Rp) APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL DAERAH	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUN JAWAB
2	3	4	5	6	7	SEBELUM	SESUDAH	10 RKPD 2025	11	12	13	14	15	16 DAERAH	18	19	20	21
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3300 Orang	3300 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kese	hatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				2500 Orang	2500 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				2 Tatanan	1 Tatanan	50.000.000,00	68.005.000,00	68.005.000,00	18.005.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			68.005.000,00	DINAS KESEH
1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi	Penerapan SPM Bidang Keseha Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	tan Kabupater	n/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEH
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehata	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	395.315.000,00	395.315.000,00	295.315.000,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			395.315.000,00	DINAS KESEH
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunis	asi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				144444 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			62.000.000,00	DINAS KESEH
1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kese	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEH
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				100 %	100 %	550.898.000,00	308.635.000,00	308.635.000,00	-242.263.000,00			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber	Aparatur dan Masyarakat		308.635.000,00	DINAS KESEH
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informas	i Kesehatan												Daya Manusia				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				4 Dokumen	3 Dokumen	418.601.000,00	308.635.000,00	308.635.000,00	-109.966.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			308.635.000,00	DINAS KESEH
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur dan Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KESEH
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanar	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				11 Unit	11 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEH
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA					100 %	100 %	170.000.000,00	4.050.534.900,00	4.190.534.900,00	651.034.900,00			,			821.034.900,00	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Kesehatan Jumlah Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	50.000.000,00	61.500.900,00	61.500.900,00	11.500.900,00			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur dan Masyarakat		61.500.900,00	DINAS KESEH
1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Prak	tik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	36.500.900,00	36.500.900,00	11.500.900,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			36.500.900,00	DINAS KESEH
1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasar	Tenaga Kesehatan serta Tindal	k Lanjut Perizin	nan Praktik Tenag	ga Kesehatan													
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	,			1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				DINAS KESEI
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		noton		100 %	100 %	95.000.000,00	3.422.330.000,00	3.562.330.000,00	3.467.330.000,00			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur dan Masyarakat		192.830.000,00	DINAS KESEH
1.02.03.2.02.0001	rerencanaan dan Distribusi s	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	wanusia Keseh	ıatarı		2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	3.249.500.000,00	3.389.500.000,00	3.349.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS KESEH

IO KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE	CAPAIAN _	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA		FT 605		D. O	CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN				ueniz-s	KELOMPOK		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
.052	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	OPD TAHUN 2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PAGU INDIKATIF (Rp) APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL PR	DAERAH	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sum	per Daya Manusia Kesehatan Se	esuai Standar			100 Orang	100 Orang	30.000.000,00	30.336.000,00	30.336.000,00	336.000,00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI		Meningkatkan			20.225.000.00	DINAS KESEHA
		Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di				100 Orang	100 Orang	30.000.000,00	30.336.000,00	30.336.000,00		Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)	-	Kualitas Sumber Daya Manusia			30.336.000,00	DINAS RESERA
		Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)										Semua Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasar	Sumber Daya Manusia Kesehat	ıtan																
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan	1			1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	142.494.000,00	142.494.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			142.494.000,00	DINAS KESEHA
		Sumber Daya Manusia Kesehatan										Kecamatan, Semua Kel/Desa			Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber				
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan	Jumlah Persentasenya				100 %	100 %	25.000.000,00	566.704.000,00	566.704.000,00	541.704.000,00				Daya Manusia Meningkatkan	Aparatur dan		FGC 704 000 00	DINAS KESEHAT
1.02.03.2.03	Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi				100 /6	100 %	23.000.000,00	300.704.000,00	300.704.000,00	341.704.000,00				Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		300.704.000,00	DINAS RESERIA
	Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Pe	I ningkatan Kompetensi Teknis Su	umber Daya Man	ıusia Kesehatan Tir	ingkat Daerah Kal	bupaten/Kota													
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat				50 Orang	50 Orang	25.000.000,00	566.704.000,00	566.704.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			566.704.000,00	DINAS KESEHAT
		Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya										Kecamatan, Semua Kel/Desa			Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber				
4.00.04	PROGRAM SEDIAAN	, ,				400.0/	400.0/	470 000 000 00	427 420 200 0	427 420 200 00	20 574 000 00				Daya Manusia			427 420 200 20	
. 1.02.04	FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN	Tingkat Pengawasan dan Tindak Lanjut Terhadap Perizinan Usaha				100 %	100 %	170.000.000,00	137.428.200,00	137.428.200,00	-32.571.800,00							137.428.200,00	
1.02.04.2.01	MAKANAN MINUMAN Pemberian Izin Apotek, Toko	Jumlah Persentase				100 %	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan	Aparatur dan		20,000,000,00	DINAS KESEHAT
	Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan									,,,,,				Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat			
	Obat Tradisional (UMOT)	dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)													Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawas	⊥ an serta Tindak Lanjut Pengawa	asan Perizinan Ap	potek, Toko Obat, 7	Toko Alat Keseha	atan, dan Optika	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	oat Tradisional (UMOT)										1	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			20.000.000,00	DINAS KESEHAT
		Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat,	,									Kecamatan, Semua Kel/Desa			Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber				
		Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)													Daya Manusia				
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat	Jumlah Persentase				100 %	100 %	50.000.000,00	44.261.000,00	44.261.000,00	-5.739.000,00			-	Meningkatkan	Aparatur dan		44.261.000,00	DINAS KESEHATA
	Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor													Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan	Masyarakat			
	untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang	P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan													Kualitas Sumber Daya Manusia				
	Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawas	I an serta Tindak Lanjut Pengawa	asan Sertifikat Pro	oduksi Pangan Indi	ustri Rumah Tang	gga dan Nomor	l P-IRT sebagai Izi	n Produksi, untuk Produk Ma	l akanan Minuman Tertentu yanç	I Dapat Diproduksi oleh Industri I	I Rumah Tangga								
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	44.261.000,00	44.261.000,00	E	Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			44.261.000,00	DINAS KESEHAT
		Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri	•									Kecamatan, Semua Kel/Desa			Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber				
		Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan													Daya Manusia				
		Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh																	
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik	Industri Rumah Tangga Jumlah Persentase				100 %	100 %	50.000.000,00	37.100.000,00	37.100.000,00	-12.900.000,00				Meningkatkan	Aparatur dan		37 100 000 00	DINAS KESEHATA
1.02.04.2.04	Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak				100 70	100 70	30.000.000,00	37.100.000,00	37.100.000,00	12.300.000,00				Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		37.100.000,00	DIVAG REGERATA
	antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat													Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
		Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan																	
		Depot Air Minum (DAM)																	
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawas	an serta Tindak Lanjut Pengawa Jumlah Dokumen Hasil	asan Penerbitan S	Sertifikat Laik Higier	ene Sanitasi Temp	pat Pengelolaar 1 Dokumen		antara lain Jasa Boga, Ruma 50.000.000,00	ah Makan/Restoran dan Depot 37.100.000,00		-12.900.000,00 H	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI		Meningkatkan			37 100 000 00	DINAS KESEHATA
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak						00.000.000,00	3	31113333,33	E	Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		Kualitas Sumber Daya Manusia			3111331333,33	
		Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat										Semua Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
		Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan)																
		Depot Air Minum (DAM)																	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi	Jumlah Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan				100 %	100 %	50.000.000,00	36.067.200,00	36.067.200,00	-13.932.800,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur dan Masyarakat		36.067.200,00	DINAS KESEHATA
	dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah	Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah													Meningkatkan Kualitas Sumber				
	Tangga	Tangga													Daya Manusia				
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pa	da Produk Makanan-Minuman In Jumlah Produk dan Sarana	ndustri Rumah Ta	ngga yang Bereda	ar dan Pengawasa	an serta Tindak 11 Unit	Lanjut Pengawas	50.000.000,00	36.067.200,00	36.067.200,00	-13.932.800,00 H	Kah Pasisir	DANA ALOKASI	_	Meningkatkan			36 067 200 00	DINAS KESEHATA
		Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga				J. J. J.		55.555.550,00	33.307.200,00	33.307.200,00	E	Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		Kualitas Sumber Daya Manusia			33.007.200,00	S. KEGETIATI
		Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut										Semua Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
5 4.02.05	PROGRAM	Pengawasan				100 %	100 %	455.430.000,00	225 440 000 00	335.148.200,00	-120.281.800,00							335.148.200,00	
5. 1.02.05	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Yang				100 %	100 %	455.430.000,00	335.148.200,00	335.148.200,00	-120.281.800,00							აახ.148.200,00	
	KESEHATAN	Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif																	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan	Jumlah Persentase Pelaksanaan Sehat dalam				100 %	100 %	50.000.000,00	58.808.000,00	58.808.000,00	8.808.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber	Aparatur dan Masyarakat		58.808.000,00	DINAS KESEHATA
	Peran serta Masyarakat dan	rangka Promotif Preventif				1									Daya Manusia Meningkatkan				
	Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota] [Kualitas Sumber				

W05-	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	EKANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		I MAJU RENCANA HUN 2026	PERANGK DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN		ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA -		IORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGU JAWAB
	_		OPD		2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
2	3	Jumlah Dokumen Promosi	5	6	7	8 1 Dokumen	9 1 Dokumen	50.000.000,00	58.808.000,00	12 58.808.000,00	8.808.000,00	14	DANA ALOKASI -	16	17 Maningkatkan	18	19	58 808 000 00	DINAS KESE
		Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	58.808.000,00	58.808.000,00	8.808.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			58.808.000,00	DINAS KESI
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam	Jumlah Persentase				100 %	100 %	100.000.000,00	105.500.000,00	105.500.000,00	5.500.000,00				Daya Manusia Meningkatkan	Aparatur dan		105.500.000,00	DINAS KESI
1.02.05.2.02	rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	100.000.000,00	105.500.000,00	105.500.000,00	5.500.000,00				Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		105.500.000,00	DINAS RES
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Ke	⊥ esehatan dan Gerakan Hidup Be	ersih dan Sehat							ll		1							
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	105.500.000,00	105.500.000,00	5.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber			105.500.000,00	DINAS KES
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat										Kecamatan, Semua Kel/Desa			Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat				100 %	100 %	305.430.000,00	170.840.200,00	170.840.200,00	-134.589.800,00				Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber	Aparatur dan Masyarakat		170.840.200,00	DINAS KE
.02.05.2.03.0001	Rimbingan Teknis dan Super	Daerah Kabupaten/Kota visi Pengembangan dan Pelaks	anaan Unava Ke	esehatan Bersum	ber Dava Masvarak	at (UKBM)									Daya Manusia				
1.02.00.2.00.0001	Simbiligan Textile dan Gaper	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyaraka		Sociation Bersuit	Julya Masyarak	1 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	86.267.200,00	86.267.200,00	36.267.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan			86.267.200,00	DINAS KES
		(UKBM)													Kualitas Sumber Daya Manusia				
	PUSKESMAS LEMONG							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan				100 %	100 %	67.184.826.478,00	69.734.403.918,00	70.642.931.280,00	10.914.577.440,00							78.099.403.918,00	
1.02.02.2.02	MASYARAKAT Penyediaan Layanan	Jumlah Persentase				100 %	100 %	42.306.923.839,00	49.404.749.118,00	50.313.276.480,00	8.006.352.641,00				Meningkatkan	Masyarakat		49.452.679.518,00	DINAS KE
.02.02.2.02	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan	h			100 76	100 /0	42.300.923.033,00	43.404.743.110,00	30.313.270.400,00	0.000.332.041,00				Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	wasyaranat		45.452.075.510,00	DIVACIAL
.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kese	T				T	T					1					T T		
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				230 Orang	230 Orang	50.844.000,00	103.384.000,00	103.384.000,00	52.540.000,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			103.384.000,00	DINAS KE
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kese	l hatan Ibu Bersalin																	
		Jumlah Ibu Bersalin yang				1200 Orang	1200 Orang	5.035.000,00	0,00	0,00	-5.035.000,00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber			0,00	DINAS KE
		Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar										Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	омом (рао)		Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan pada Usia Pendidikan Da	asar							1									
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2800 Orang	2800 Orang	30.850.000,00	49.490.000,00	49.490.000,00	18.640.000,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			49.490.000,00	DINAS KE
00 00 0 00 0040	December 20 Delever on Manager	hatan Orana da aran Orana	Live Beest												Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Orang dengan Gangguar Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesua Standar				-	48 Orang	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			3.240.000,00	DINAS KE
	Pengelolaan Pelayanan Kasa	hatan Orang Terduga Tuberkul	osis									<u> </u>			Daya Manusia				
02 02 2 02 0011	T engelolaan T elayanan Nese	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang				329 Orang	329 Orang	2.690.000,00	6.630.000,00	6.630.000,00	3.940.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan			6.630.000,00	DINAS KE
.02.02.2.02.0011		Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar													Kualitas Sumber Daya Manusia				
		Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar													<u> </u>				
	Pengelolaan Pelayanan Kese	Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar hatan Orang dengan Risiko Ter	rinfeksi HIV									1							
	Pengelolaan Pelayanan Kese	Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	rinfeksi HIV			120 Orang	120 Orang	2.320.000,00	0,00	0,00	-2.320.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KE
.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kese	Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar hatan Orang dengan Risiko Ter Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	rinfeksi HIV			120 Orang	120 Orang	2.320.000,00	0,00	0,00	-2.320.000,00	Barat, Lemong,			Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan			0,00	DINAS KE
1.02.02.2.02.0012		Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Chatan Orang dengan Risiko Tel Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Chatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil	rinfeksi HIV			120 Orang 1 Dokumen		2.320.000,00	0,00	223.050.000,00	-2.320.000,00 -22.495.000,00	Barat, Lemong, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir	DANA ALOKASI		Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			223.050.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kese	Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar hatan Orang dengan Risiko Tel Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar hatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	rinfeksi HIV									Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0011 1.02.02.2.02.0012 1.02.02.2.02.0015		Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar hatan Orang dengan Risiko Tel Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar hatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	rinfeksi HIV									Barat, Lemong, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI		Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber				

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR REPLIONE CAPAIAN	CAFAIAIN				CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCAI TAHUN 2026	NA PERANGKA DAERAH
NO KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENJA OPD	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	SASARAN	TARGET PAGU INDIKAT	PENANGGUI
			OPD TAHUN 2023	2024 S	EBELUM SESUDA	AH RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL DAERAH			()
1 2	3	4	5 6	7	8 9	10	11	12	13	14	15	16 17	18	19 20	21
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Dokumen 2 Dokume	en 10.450.000,00	10.730.000,00	10.730.000,00	Bai	ab. Pesisir arat, Lemong, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		10.730	0.000,00 DINAS KESEH/
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kese	ehatan													
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1	Dokumen 3 Dokume	en 20.951.000,00	21.040.000,00	21.040.000,00	89.000,00 Kal Bai Sei	ab. Pesisir I arat, Lemong, I emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		21.040	.000,00 DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kese	ehatan Orang dengan Masalah K	Kesehatan Jiwa (ODMK)		400.0		0.000.000	0 000 000 00	2 222 222 22 14 1		DAKAION		<u> </u>		
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		-	430 Oran	o,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00 Kat Bai Sei	arat, Lemong, I emua Kel/Desa I	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		9.000	.000,00 DINAS KESEH/
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penya	ıkit Menular dan Tidak Menular													
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		3	Dokumen 5 Dokume	en 182.400.000,00	141.000.000,00	141.000.000,00	Bai	ab. Pesisir I arat, Lemong, I emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		141.000	0.000,00 DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Keseh	atan Masyarakat													
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		2	Dokumen 3 Dokume	en 1.678.000.000,00	1.828.920.800,00	1.828.920.800,00	150.920.800,00 Kat Bar Ser	ab. Pesisir arat, Lemong, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		1.828.920	0.800,00 DINAS KESEH/
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Pusk	tesmas			<u>'</u>										
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		3	Dokumen 7 Dokume	en 222.800.000,00	228.690.000,00	228.690.000,00	5.890.000,00 Kal Bai Sei	ab. Pesisir arat, Lemong, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		228.690	0.000,00 DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tid	dak Diharapkan (Kejadian Ikutan	Pasca Imunisasi dan Pemberiar	n Obat Massal)											
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		1	Laporan 1 Laporar	n 2.870.000,00	0,00	0,00	-2.870.000,00 Kat Bar Ser	ab. Pesisir arat, Lemong, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00 DINAS KESEH/
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kese	hatan orang dengan Tuberkulosi	is												
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		62	2 Orang 62 Orang	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00 Kal Bai Sei	ab. Pesisir arat, Lemong, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00 DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kese	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		12	? Orang 12 Orang	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00 Kal Bai Sei	ab. Pesisir arat, Lemong, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00 DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kese	hatan Malaria													
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		-	1340 Ora	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00 Kal Bar Ser	arat, Lemong, I emua Kel/Desa I	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		800	.000,00 DINAS KESEH/
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kese	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1	Dokumen 1 Dokume	en 18.190.000,00	22.486.000,00	22.486.000,00	4.296.000,00 Kal Bai Sei	ab. Pesisir I arat, Lemong, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		22.486	0.000,00 DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehata			1	1					T					
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		2	Dokumen 2 Dokume	en 111.030.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	-108.910.000,00 Kal Bar Ser	ab. Pesisir I arat, Lemong, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		2.120	.000,00 DINAS KESEH/
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kela	<u> </u>		<u> </u>						al Barrie	DAKAS	1	<u> </u>	<u> </u>	2000 00 5000
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		-	1 Dokume	en 0,00	66.220.000,00	66.220.000,00	66.220.000,00 Kal Bar Ser	arat, Lemong, I emua Kel/Desa I	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		66.220	0.000,00 DINAS KESEH/
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		10	100 %	550.898.000,00	308.635.000,00	308.635.000,00	-242.263.000,00			- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	308.635	.000,00 DINAS KESEH/
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		1	Dokumen 1 Dokume	en 6.660.000,00	0,00	0,00	-6.660.000,00 Kal Bai Sei	ab. Pesisir I arat, Lemong, I emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00 DINAS KESEHA
2. 1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif		10	100 %	455.430.000,00	335.148.200,00	335.148.200,00	-120.281.800,00					335.148	.200,00

) KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA		·			CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
D KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	ODD TALLIA		ET 2025	T	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA —		IORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
0	2	4	5		7	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	40	44	45	NASIONAL 16	DAERAH 17	40	40	20	24
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Pengembangan dan		6	,	100 %	100 %	10 305.430.000,00	11 170.840.200,00	12 170.840.200,00	-134.589.800,00	14	-	16	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	18 Masyarakat	19	20 170.840.200,00	21 DINAS KESEHAT
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Super	visi Pengembangan dan Pelaksa Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		esehatan Bersum	nber Daya Masyarak	at (UKBM) 1 Dokumen	2 Dokumen	12.090.000,00	5.530.000,00	5.530.000,00	-6.560.000,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.530.000,00	DINAS KESEHAT
	PUSKESMAS PUGUNG TAN	IPAK						105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan				100 %	100 %	67.184.826.478,00	69.734.403.918,00	70.642.931.280,00	10.914.577.440,00							78.099.403.918,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1			100 %	100 %	42.306.923.839,00	49.404.749.118,00	50.313.276.480,00	8.006.352.641,00		-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		49.452.679.518,00	DINAS KESEHATA
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kese		1	T	T	1	Т Т					T				T	1		
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				156 Orang	156 Orang	53.800.000,00	116.064.000,00	116.064.000,00	62.264.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			116.064.000,00	DINAS KESEHATA
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kese			<u> </u>	<u> </u>	110.0	1400	2 222 222 22			2 227 222 22	1415							BINAN KENEUAT
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				148 Orang	148 Orang	2.925.000,00	0,00	0,00	-2.925.000,00	Rab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATA
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan pada Usia Pendidikan Da T	sar			1	T T												
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				320 Orang	320 Orang	39.105.000,00	35.320.000,00	35.320.000,00	-3.785.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			35.320.000,00	DINAS KESEHATA
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Orang dengan Gangguan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	68 Orang	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			21.600.000,00	DINAS KESEHATA
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Orang Terduga Tuberkuld																	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				38 Orang	38 Orang	4.730.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	11.770.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			16.500.000,00	DINAS KESEHAT
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kese		infeksi HIV			40.0	10.0	4 222 222 22	0.00	0.00	4 000 000 00	Kah Basisis	DANA ALOKAGI		Maninglastica			0.00	DINIAG IZEGELIAT
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				18 Orang	18 Orang	1.320.000,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	Barat, Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATA
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kese	·				T	1					T			1				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	6 Dokumen	204.150.000,00	176.426.000,00	176.426.000,00	-27.724.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			176.426.000,00	DINAS KESEHATA
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kese						4 Dalinin	T	0.040.00= ==	0.040.00	0000000	Kat David	DAK MON		Maninglette			0.040.000.00	DIMAGUEGE
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	8.610.000,00	8.610.000,00	8.610.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.610.000,00	DINAS KESEHATA
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kese																		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	2 Dokumen	3.410.000,00	9.350.000,00	9.350.000,00	5.940.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.350.000,00	DINAS KESEHATA
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kese	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		(05)110		1 Dokumen	3 Dokumen	10.500.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	-6.980.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.520.000,00	DINAS KESEHATA
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Orang dengan Masalah K Jumlah Orang dengan	Cesehatan Jiwa	(ODMK)		T_	1100 Orang	0,00	8.520.000,00	8.520.000,00	8 520 000 00	Kab. Pesisir	DAK NON -		Meningkatkan			8 520 000 00	DINAS KESEHATA
		Jumian Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					. 100 Orang	0,00	6.520.000,00	6.320.000,00	0.52U.UUU,UU	Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0.520.000,00	DINAS RESERVATA

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR CAPAIAN	CAFAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN		,		KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT — DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	3 OPD TARION		ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12) LOKA	SUMBER DANA		RITAS	SASARAN	TARGET PAGU INDIKATIF (Rp	PENANGGUNG
			OPB	2024	SEBELUM		RKPD 2025		RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH			,
2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	12	13 14	15	16	17	18	19 20	21
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyak	T											T			
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan			3 Dokumen	5 Dokumen	129.170.000,00	118.350.000,00	118.350.000,00	-10.820.000,00 Kab. Pesisi Barat, Pesi	sir UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber		118.350.000,0	00 DINAS KESEHATA
		Penyakit Menular dan Tidak Menular								Utara, Sem Kel/Desa	ua		Daya Manusia Meningkatkan			
													Kualitas Sumber Daya Manusia			
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Keseha	an Masyarakat				1	,			,	-					
		Jumlah Dokumen Hasil			2 Dokumen	3 Dokumen	715.000.000,00	730.571.800,00	730.571.800,00	15.571.800,00 Kab. Pesisi	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan Kualitas Sumber		730.571.800,0	00 DINAS KESEHATA
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								Barat, Pesi Utara, Sem			Daya Manusia			
										Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber			
4 00 00 0 00 000	On and inval Balance and Buston												Daya Manusia			
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puske	Jumlah Dokumen			0.00	7.0-1	184.005.000,00	190.844.000,00	190.844.000,00	6.839.000,00 Kab. Pesisi	DANA ALOKASI		Mariantana		400.044.000.0	00 DINAS KESEHAT
		Operasional Pelayanan Puskesmas			3 Dokumen	7 Dokumen	184.005.000,00	190.844.000,00	190.844.000,00	6.839.000,00 Kab. Pesisi Barat, Pesi Utara, Sem	sir UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		190.644.000,0	DINAS RESERAT
		ruskesillas								Kel/Desa	ua		Meningkatkan Kualitas Sumber			
													Daya Manusia			
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tida	k Diharapkan (Kejadian Ikutan F	Pasca Imunisasi dan Pemberiar	n Obat Massal)				·			·	•				
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian			1 Laporan	1 Laporan	2.720.000,00	0,00	0,00	-2.720.000,00 Kab. Pesisi		-	Meningkatkan Kualitas Sumber		0,0	00 DINAS KESEHAT
		Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan								Barat, Pesi Utara, Sem			Daya Manusia			
		Pemberian Obat Massal)								Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber			
4 02 02 2 02 0040	Dengalalaan nalayanan kasah	atan orang dengan Tuberkulosis											Daya Manusia			
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesen				240 0	240 0	4 400 000 00	0.00	0.00	4 400 000 00 Keb Besis	DANA ALOKASI		Maninglastica			00 DINAS KESEHAT
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang			240 Orang	240 Orang	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00 Kab. Pesisi Barat, Pesi	sir UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber		0,0	DINAS KESEHAT
		mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar								Utara, Sem Kel/Desa	ua		Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			
													Daya Manusia			
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan keseh	atan orang dengan HIV (ODHIV))				<u> </u>	-				1	1			
		Jumlah orang dengan HIV			8 Orang	8 Orang	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00 Kab. Pesisi	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan		0,0	00 DINAS KESEHAT
		(ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai								Barat, Pesi Utara, Sem	sir UMUM (DAU) ua		Kualitas Sumber Daya Manusia			
		standar								Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber			
													Daya Manusia			
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan keseh		T 1			T					T		T			
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan			-	1200 Orang	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00 Kab. Pesisi Barat, Pesi	sir FISIK-DANA	-	Meningkatkan Kualitas Sumber		1.320.000,0	00 DINAS KESEHAT
		kesehatan malaria								Utara, Sem Kel/Desa	BOK-BOK PUSKESMAS		Daya Manusia Meningkatkan			
													Kualitas Sumber Daya Manusia			
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesel	natan Reproduksi						L					1			
		Jumlah dokumen hasil			1 Dokumen	1 Dokumen	21.240.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	-13.320.000,00 Kab. Pesisi	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan		7.920.000,0	00 DINAS KESEHATA
		pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi								Barat, Pesi Utara, Sem	sir UMUM (DAU) ua		Kualitas Sumber Daya Manusia			
										Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber			
													Daya Manusia			
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan	Г	T										1			
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya			2 Dokumen	1 Dokumen	71.680.000,00	990.000,00	990.000,00	-70.690.000,00 Kab. Pesisi Barat, Pesi	sir UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber		990.000,0	00 DINAS KESEHATA
		kesehatan ibu dan anak								Utara, Sem Kel/Desa	ua		Daya Manusia Meningkatkan			
													Kualitas Sumber Daya Manusia			
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelan	ı jutusiaan						L	L				I			
		Jumlah dokumen hasil			-	1 Dokumen	0,00	23.040.000,00	23.040.000,00	23.040.000,00 Kab. Pesisi	DAK NON	-	Meningkatkan		23.040.000,0	00 DINAS KESEHATA
		pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan								Barat, Pesi Utara, Sem	ua BOK-BOK		Kualitas Sumber Daya Manusia			
										Kel/Desa	PUSKESMAS		Meningkatkan Kualitas Sumber			
													Daya Manusia			
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara	Jumlah Persentase Penyelenggaraan Sistem			100 %	100 %	550.898.000,00	308.635.000,00	308.635.000,00	-242.263.000,00		-	Meningkatkan Kualitas Sumber	Masyarakat	308.635.000,0	00 DINAS KESEHATA
	Terintegrasi	Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi											Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			
													Kualitas Sumber Daya Manusia			
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi	Kesehatan						L	I				1			
		Jumlah Dokumen Hasil			1 Dokumen	1 Dokumen	6.660.000,00	0,00	0,00	-6.660.000,00 Kab. Pesisi	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan		0,0	0 DINAS KESEHATA
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								Barat, Pesi Utara, Sem	sir UMUM (DAU)		Kualitas Sumber Daya Manusia			
										Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber			
													Daya Manusia			
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Puskesmas/Fasilitas			100 %	100 %	455.430.000,00	335.148.200,00	335.148.200,00	-120.281.800,00					335.148.200,0	00
	MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Yang Melaksanakan Kegiatan														
		Promotif dan Preventif														
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Jumlah Persentase Pengembangan dan			100 %	100 %	305.430.000,00	170.840.200,00	170.840.200,00	-134.589.800,00		-	Meningkatkan Kualitas Sumber	Masyarakat	170.840.200,0	00 DINAS KESEHATA
	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya											Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			
	Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											Kualitas Sumber Daya Manusia			
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Superv	l isi Pengembangan dan Pelaksar	ı l naan Upaya Kesehatan Bersum	nber Daya Masyarakat	(UKBM)	1				[1	ı	1		1	
	5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Jumlah Dokumen Hasil	. ,	1		2 Dokumen	32.040.000,00	10.296.000,00	10.296.000,00	-21.744.000,00 Kab. Pesisi	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan		10.296 000 0	00 DINAS KESEHAT
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan								Barat, Pesi Utara, Sem	sir UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		15.255.656,6	
		Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber			
		,											Daya Manusia			
	PUSKESMAS PULAU PISAN	G					105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00					111.178.638.818,0	00
							405 407 540 000 00									0
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN						105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00					111.178.638.818,0	,0
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00					111.178.638.818,0	

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN I	KERANGKA PENDANAAN							AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET BENILA	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PR	IORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUN JAWAB
	REGIATAN		OPD	1 AHUN 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertamban/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)	JAWAB
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan	5	6	7	100 %	9 100 %	67.184.826.478,00	69.734.403.918,00	70.642.931.280,00	13 10.914.577.440,00	14	15	16	17	18	19	78.099.403.918,00	21
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota)			100 %	100 %	42.306.923.839,00	49.404.749.118,00	50.313.276.480,00	8.006.352.641,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		49.452.679.518,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kese	 hatan Ibu Hamil													Baya Manasa				
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				62 Orang	62 Orang	7.680.000,00	15.928.000,00	15.928.000,00	8.248.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.928.000,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				82 Orang	82 Orang	3.655.000,00	0,00	0,00	-3.655.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			0,00	DINAS KESEH
															Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan pada Usia Pendidikan Das Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	sar			116 Orang	116 Orang	16.560.000,00	15.980.000,00	15.980.000,00	-580.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.980.000,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Orang dengan Gangguan	Jiwa Berat																
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	28 Orang	0,00	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.520.000,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Orang Terduga Tuberkulo	osis			00.0	T a a D		7.000.000.00	7.000.000.00		T., 5					1	7 000 000 00	500000000000000000000000000000000000000
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	6.600.000,00	7.260.000,00	7.260.000,00	660.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.260.000,00	DINAS KESEH
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Orang dengan Risiko Terii	infeksi HIV			10.0	10.0	4 000 000 00	0.00	0.00	4 000 000 00	Kah. Baatah	DANA ALOKAGI		Mariantan		1	1 000	DINIA O IVEOEI
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	4.080.000,00	0,00	0,00	-4.080.000,00	Rab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEH
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kese	<u> </u>	<u> </u>		T	T	T T										T	Γ	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	6 Dokumen	133.315.000,00	121.407.000,00	121.407.000,00	-11.908.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			121.407.000,00	DINAS KESEH
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kese	,	1			<u> </u>	T T					T.,,	T		1				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	5.780.000,00	5.780.000,00	5.780.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.780.000,00	DINAS KESEH
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kese	T				T	T T										T	I	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	2 Dokumen	7.010.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-1.010.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.000.000,00	DINAS KESEH
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kese	T	1			T	T T					T	T						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	3 Dokumen	19.960.000,00	13.260.000,00	13.260.000,00	-6.700.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			13.260.000,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Orang dengan Masalah Ko Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	esehatan Jiwa ((ODMK)		-	820 Orang	0,00	5.720.000,00	5.720.000,00	5.720.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.720.000,00	DINAS KESEH
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyal	kit Menular dan Tidak Menular																	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3 Dokumen	5 Dokumen	52.880.000,00	74.160.000,00	74.160.000,00	21.280.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			74.160.000,00	DINAS KESEH/
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Keseha	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	260.000.000,00	250.900.000,00	250.900.000,00	-9.100.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			250.900.000,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Pusk	esmas		1	1		<u>ı </u>								,	I	<u> </u>		
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	6 Dokumen	115.650.000,00	150.590.000,00	150.590.000,00	34.940.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			150.590.000,00	DINAS KESEHA

		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR REPRIODE CAPAIAN	CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN I	ERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
NO	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARG SEBELUM	ET 2025 SESUDAH	RKPD 2025	PAGU INDIKATIF (Rp) APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL DAER	SASARAN	TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 17		19 20	21
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tida	ı ak Diharapkan (Kejadian Ikutan F	Pasca Imunisasi dan Pemberiar	n Obat Massal)												
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan	1 Laporan	7.920.000,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatk Kualitas Sur Daya Manu Meningkatk Kualitas Sur Daya Manu	mber sia an mber	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan keseh	l atan orang dengan Tuberkulosis	s													
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			23 Orang	23 Orang	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatk Kualitas Sur Daya Manu Meningkatk Kualitas Sur Daya Manu	mber sia an mber	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan keseh	ıatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			-	680 Orang	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	- Meningkatk Kualitas Su Daya Manu Meningkatk Kualitas Su Daya Manu	mber sia an mber	660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Reproduksi												<u> </u>		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen	1 Dokumen	45.240.000,00	55.315.000,00	55.315.000,00		Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatk Kualitas Su Daya Manu Meningkatk Kualitas Su Daya Manu	mber sia an mber	55.315.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatar	i Ibu dan Anak												<u> </u>		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			2 Dokumen	2 Dokumen	35.500.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00		Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatk Kualitas Sui Daya Manu Meningkatk Kualitas Sui Daya Manu	sia an mber	1.620.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelar	jutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			-	1 Dokumen	0,00	7.920.000,00	7.920.000,00		Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	- Meningkatk Kualitas Sur Daya Manu Meningkatk Kualitas Sur Daya Manu	sia an mber	7.920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			100 %	100 %	550.898.000,00	308.635.000,00	308.635.000,00	-242.263.000,00			- Meningkatk Kualitas Sur Daya Manu Meningkatk Kualitas Sur Daya Manu	sia an mber	308.635.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi	Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 Dokumen	1 Dokumen	6.660.000,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatk Kualitas Su Daya Manu Meningkatk Kualitas Su Daya Manu	sia an mber	0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif			100 %	100 %	455.430.000,00	335.148.200,00	335.148.200,00	-120.281.800,00					335.148.200,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100 %	100 %	305.430.000,00	170.840.200,00	170.840.200,00	-134.589.800,00			- Meningkatk Kualitas Sur Daya Manu Meningkatk Kualitas Sur Daya Manu	sia an mber	170.840.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Superv	isi Pengembangan dan Pelaksa	naan Upaya Kesehatan Bersun	mber Daya Masyarak	kat (UKBM)											
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 Dokumen	2 Dokumen	27.040.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00		Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatk Kualitas Sur Daya Manu Meningkatk Kualitas Sur Daya Manu	sia an mber	4.840.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KARYA PENG	GAWA					105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00					111.178.638.818,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00					111.178.638.818,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00					111.178.638.818,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan			100 %	100 %	67.184.826.478,00	69.734.403.918,00	70.642.931.280,00	10.914.577.440,00					78.099.403.918,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100 %	100 %	42.306.923.839,00	49.404.749.118,00	50.313.276.480,00	8.006.352.641,00			- Meningkatk Kualitas Sur Daya Manu Meningkatk Kualitas Sur Daya Manu	mber sia an mber	49.452.679.518,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Ibu Hamil		1									I			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			200 Orang	200 Orang	33.600.000,00	62.880.000,00	62.880.000,00		Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatk Kualitas Su Daya Manu Meningkatk Kualitas Su Daya Manu	mber sia an mber	62.880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kese	1							T	т			T	T		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			180 Orang	180 Orang	5.820.000,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatk Kualitas Sui Daya Manu Meningkatk Kualitas Sui Daya Manu	sia an mber	0,00	DINAS KESEHATAN

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		N MAJU RENCANA AHUN 2026	PERANGKA DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGE	T 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PR	IORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUN
			OPD		2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan				420 Orang	420 Orang	34.730.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	Ba	ab. Pesisir arat, Karya enggawa,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			102.000.000,00	DINAS KESEHA
		Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar									Se	emua Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber				
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Orang dengan Gangguan	Jiwa Berat												Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0010	Tongololaan Tolayanan Noos	Jumlah Orang yang				-	180 Orang	0,00	7.260.000,00	7.260.000,00	7.260.000,00 Ka	ab. Pesisir	DAK NON	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			7.260.000,00	DINAS KESEHA
		Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan									Pe	arat, Karya enggawa,	FISIK-DANA BOK-BOK		Daya Manusia				
		Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar									Se	emua Kel/Desa	PUSKESMAS		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kese	 hatan Orang Terduga Tuberkulo	osis												Daya Manada				
		Jumlah Orang Terduga				48 Orang	48 Orang	8.950.000,00	9.240.000,00	9.240.000,00	290.000,00 Ka	ab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan			9.240.000,00	DINAS KESEH
		Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar									Pe	arat, Karya enggawa, emua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan				
		Goodal Staridal										omaa Now Bood			Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kese	I hatan Orang dengan Risiko Teri	rinfeksi HIV																
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang				21 Orang	21 Orang	23.680.000,00	0,00	0,00	-23.680.000,00 Ka	ab. Pesisir arat, Karya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			0,00	DINAS KESEH
		Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar									Pe	enggawa, emua Kel/Desa	(=1.5)		Daya Manusia Meningkatkan				
															Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Gizi Masyarakat																	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan				1 Dokumen	5 Dokumen	206.550.000,00	198.550.000,00	198.550.000,00		ab. Pesisir arat, Karya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			198.550.000,00	DINAS KESEH
		Kesehatan Gizi Masyarakat									Pé Sé	enggawa, emua Kel/Desa			Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber				
															Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kese			Т						1									
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan				-	1 Dokumen	0,00	3.740.000,00	3.740.000,00		arat, Karya	DAK NON FISIK-DANA	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			3.740.000,00	DINAS KESEH
		Kesehatan Kerja dan Olahraga									Se	enggawa, emua Kel/Desa	BOK-BOK PUSKESMAS		Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber				
															Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kese														T				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	2 Dokumen	16.560.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	-10.620.000,00 Ka	ab. Pesisir arat, Karya enggawa,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.940.000,00	DINAS KESEI
		Neseriatari Lingkungan									Se	emua Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber				
															Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kese	hatan Jumlah Dokumen Hasil				1 Dokumen	3 Dokumen	20.176.000,00	10.120.000,00	10.120.000,00	-10.056.000,00 Ka	ah Pasisir	DANA ALOKASI		Meningkatkan			10 120 000 00	D DINAS KESEH
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan				i Dokumen	3 Dokumen	20.176.000,00	10.120.000,00	10.120.000,00	Ba	arat, Karya enggawa,	UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.120.000,00	DINAS RESER
											Se	emua Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber				
1.02.02.2.02.0021	Pangalalaan Palayanan Kasa	hatan Orang dengan Masalah K	(asabatan liwa (O	DDMK)											Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kese	T	Resenatan Jiwa (O			_	1800 Orang	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00 Ka	ab. Pesisir	DAK NON	_	Meningkatkan			2,200,000,00	D DINAS KESEH
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan					l soo craing	3,53			Ba Pe	arat, Karya enggawa,	FISIK-DANA BOK-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
		Pelayanan Kesehatan									Se	emua Kel/Desa	PUSKESMAS		Meningkatkan Kualitas Sumber				
1.02.02.2.02.0025	Pelavanan Kesehatan Penya	kit Menular dan Tidak Menular													Daya Manusia				
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Jumlah Dokumen Hasil				1 Dokumen	5 Dokumen	107.475.000,00	122.670.000,00	122.670.000,00	15.195.000,00 Ka	ab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			122.670.000,00	DINAS KESEH
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak									Pe	enggawa,	UMUM (DAU)		Daya Manusia				
		Menular									56	emua Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Keseha	ltan Masyarakat																	
		Jumlah Dokumen Hasil				2 Dokumen	3 Dokumen	1.161.779.290,00	1.193.180.090,00	1.193.180.090,00	31.400.800,00 Ka		DANA ALOKASI	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			1.193.180.090,00	DINAS KESEH
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									Pe	arat, Karya enggawa, emua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Daya Manusia Meningkatkan				
												5///da // 5// 5/5/			Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Pusk	esmas		<u> </u>			<u> </u>						I			I			
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan				3 Dokumen	7 Dokumen	183.352.000,00	187.744.000,00	187.744.000,00	4.392.000,00 Ka	ab. Pesisir arat, Karya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			187.744.000,00	DINAS KESEH
		Puskesmas									Pe	enggawa, emua Kel/Desa	OWOW (BAO)		Daya Manusia				
															Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tid	ak Diharapkan (Kejadian Ikutan	Pasca Imunisasi o	dan Pemberian C	Obat Massal)	J					1				1				
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian				1 Laporan	1 Laporan	2.640.000,00	0,00	0,00	-2.640.000,00 Ka	ab. Pesisir arat, Karya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			0,00	DINAS KESEH
		Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan									Pe	enggawa, emua Kel/Desa			Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber				
		Pemberian Obat Massal)													Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesel	natan orang dengan Tuberkulosi	is																
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang				42 Orang	42 Orang	5.760.000,00	0,00	0,00	-5.760.000,00 Ka	arat, Karya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			0,00	DINAS KESE
		mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar									Pe	enggawa, emua Kel/Desa			Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber				
															Kualitas Sumber Daya Manusia				
	Pengelolaan pelayanan kesel	natan orang dengan HIV (ODHI)																	
1.02.02.2.02.0041		1		1		18 Orang	18 Orang	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00 Ka	ab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			0,00	DINAS KESEH
1.02.02.2.02.0041		(ODHIV) yang mendapatkan				To Orang					Ba		UMUM (DAU)		Rualitas Sulfibel				
1.02.02.2.02.0041		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				ro orang					Pe	arat, Karya enggawa, emua Kel/Desa	OMOM (DAO)		Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber				

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET REALISAS AKHIR CAPAIAN						CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
NO KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENSTRA RENJA OP	OPD TAHUN	TARGET 202	25		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORIT	ras	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			OPD TAHON 202		SEBELUM SES	SUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		.,	()	
1 2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			- 2100	0 Orang	0,00	550.000,00	550.000,00		Barat, Karya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	K C N K	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			550.000,00	DINAS KESEHATA
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Reproduksi			<u>'</u>		1	1	,				,		-			
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen 1 Do	okumen	26.640.000,00	15.360.000,00	15.360.000,00	·	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	K C N K	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.360.000,00	DINAS KESEHATA
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehata	n Ibu dan Anak									ı							
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 Dokumen 1 Do	okumen	77.280.000,00	440.000,00	440.000,00		Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	K C N K	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			440.000,00	DINAS KESEHATA
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelai	njutusiaan																
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			- 1 Do	okumen	0,00	7.920.000,00	7.920.000,00		Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	K C N K	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.920.000,00	DINAS KESEHATA
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			100 % 100 %	%	550.898.000,00	308.635.000,00	308.635.000,00	-242.263.000,00			C N K	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		308.635.000,00	DINAS KESEHATA
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informas	l i Kesehatan	1								<u>. </u>							
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 Dokumen 1 Do	okumen	6.660.000,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	C N K	Meningkatkan (ualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan (ualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATA
2. 1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif			100 % 100	%	455.430.000,00	335.148.200,00	335.148.200,00	-120.281.800,00							335.148.200,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100 % 100	%	305.430.000,00	170.840.200,00	170.840.200,00	-134.589.800,00			K C N K	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		170.840.200,00	DINAS KESEHATA
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Super	<u>'</u> visi Pengembangan dan Pelaksa	l naan Upaya Kesehatan Bersu	 umber Daya Masyarakat ((UKBM)									,				
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1 Dokumen 2 Do	okumen	5.760.000,00	8.396.000,00	8.396.000,00		Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	K C N K	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.396.000,00	DINAS KESEHATA
	PUKESMAS KRUI						105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00			<u> </u>				111.178.638.818,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								406 6E6 964 924 00	1.189.316.196,00	4							
							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.109.310.190,00	1						111.178.638.818,00	
1. 1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan				lefined lefined	67.184.826.478,00	105.678.138.818,00 69.734.403.918,00	70.642.931.280,00	10.914.577.440,00							78.099.403.918,00	
1.02.02	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Jumlah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		'		lefined		·	·				K C N K	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat			DINAS KESEHATA
	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Jumlah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		'	undefined unde	lefined	67.184.826.478,00	69.734.403.918,00	70.642.931.280,00	10.914.577.440,00			K C N K	Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber	Masyarakat		78.099.403.918,00	DINAS KESEHATA
1.02.02.2.02	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			undefined undefined	lefined	67.184.826.478,00	69.734.403.918,00	70.642.931.280,00	10.914.577.440,00 8.006.352.641,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- N	Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber	Masyarakat		78.099.403.918,00 49.452.679.518,00	DINAS KESEHATA
1.02.02.2.02	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota hatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			undefined undefined	%	67.184.826.478,00 42.306.923.839,00	69.734.403.918,00 49.404.749.118,00	70.642.931.280,00 50.313.276.480,00	10.914.577.440,00 8.006.352.641,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- N	Cualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Cualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Cualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Cualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Cualitas Sumber	Masyarakat		78.099.403.918,00 49.452.679.518,00	
1.02.02.2.02	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kese	Jumlah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota hatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			undefined undefined	% rang	67.184.826.478,00 42.306.923.839,00	69.734.403.918,00 49.404.749.118,00	70.642.931.280,00 50.313.276.480,00	10.914.577.440,00 8.006.352.641,00 12.600.000,00 -7.365.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- N K C C N K K C C N K K C C N K K C C N K K C C N K K C C N K K C C N K K C C N K K C C N K K K C C N K K K K	Cualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Cualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Cualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Cualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Cualitas Sumber	Masyarakat		78.099.403.918,00 49.452.679.518,00 67.200.000,00	DINAS KESEHATA
1.02.02.2.02	UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kese	Jumlah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota hatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar chatan Ibu Bersalin	ar		100 % 100 1 Orang 1 Orang	% rang	67.184.826.478,00 42.306.923.839,00 54.600.000,00	69.734.403.918,00 49.404.749.118,00 67.200.000,00	70.642.931.280,00 50.313.276.480,00 67.200.000,00	10.914.577.440,00 8.006.352.641,00 12.600.000,00 -7.365.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua	DANA ALOKASI	- N K C C N K K C C N K K C C N K K C C N K K C C N K K C C N K K C C N K K C C N K K C C N K K K C C N K K K K	Aleningkatkan Aleningkatkan	Masyarakat		78.099.403.918,00 49.452.679.518,00 67.200.000,00	
1.02.02.2.02001	Pengelolaan Pelayanan Kese Pengelolaan Pelayanan Kese Pengelolaan Pelayanan Kese	Jumlah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota hatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			100 % 100 1 Orang 1 Orang	rang Orang	67.184.826.478,00 42.306.923.839,00 54.600.000,00	69.734.403.918,00 49.404.749.118,00 67.200.000,00	70.642.931.280,00 50.313.276.480,00 67.200.000,00	10.914.577.440,00 8.006.352.641,00 12.600.000,00 -7.365.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	-	Aleningkatkan Aleningkatkan	Masyarakat		78.099.403.918,00 49.452.679.518,00 67.200.000,00	DINAS KESEHATA

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN						N MAJU RENCANA AHUN 2026	PERANGKAT
NO KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET 2025 SEBELUM SESUDAH	RKPD 2025	PAGU INDIKATIF (Rp) APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL DAERAH	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1 2	3	4	5 6	7	8 9	10	11	12	13	14	15	16 17	18	19	20	21
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			230 Orang 230 Orang	4.850.000,00	11.790.000,00	11.790.000,00		Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.790.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kese	ehatan Orang dengan Risiko Teri Jumlah Orang Terduga	infeksi HIV		28 Orang 28 Orang	2.720.000,00	0,00	0,00	-2.720.000,00	Kah Bosisir	DANA ALOKASI	- Meningkatkan			0.00	DINAS KESEHATAN
		Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			20 Orang 20 Orang	2.720.000,00	0,00	0,00		Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS RESERVAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kese	·			4 Delauman C Delauman	240 950 000 00	304.500.000,00	204 500 000 00	E4 CE0 000 00	Koh Doninir	DANA ALOKASI	Maninglastan			204 500 000 00	DINAS KESEHATAN
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen 6 Dokumen	249.850.000,00	304.500.000,00	304.500.000,00		Rab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			304.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kese	1			1 1	T			1		T					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			- 1 Dokumen	0,00	8.960.000,00	8.960.000,00		Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.960.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kese								1		T = T					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen 2 Dokumen	11.880.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00	ŕ	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.880.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kese										T					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen 3 Dokumen	43.560.000,00	62.220.000,00	62.220.000,00		Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			62.220.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kese	ehatan Orang dengan Masalah K	(esehatan Jiwa (ODMK)													
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			- 1480 Orang	0,00	3.840.000,00	3.840.000,00		Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.840.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penya	ıkit Menular dan Tidak Menular														
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen 5 Dokumen	137.500.000,00	102.800.000,00	102.800.000,00		Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			102.800.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Keseh				T T						T T					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			2 Dokumen 3 Dokumen	1.901.363.750,00	2.265.805.200,00	2.265.805.200,00		Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.265.805.200,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Pusk	T			T T						T	T				
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasil	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen 7 Dokumen	222.400.000,00	243.270.000,00	243.270.000,00		Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			243.270.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Pasii	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 Dokumen 1 Dokumen	15.465.000,00	0,00	0,00	-15.465.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		r dominas recornatari Edirirya								Kel/Desa		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tid	dak Diharapkan (Kejadian Ikutan I	Pasca Imunisasi dan Pemberia		, ,											
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan 1 Laporan	1.760.000,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kese	Jumlah orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	is		65 Orang 65 Orang	6.600.000,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kese	 hatan orang dengan HIV (ODHIV	<u> </u>							<u> </u>	1	_ aya manada				
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			12 Orang 12 Orang	7.200.000,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kese	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan			1 Dokumen 1 Dokumen	25.880.000,00	4.380.000,00	4.380.000,00	-21.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber			4.380.000,00	DINAS KESEHATAN
		kesehatan reproduksi								Tengah, Semua Kel/Desa	S. S. (DAO)	Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehata	ın Ibu dan Anak	<u> </u>								1	7	I			1

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET REAL	ILIOAOI /	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN							AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT
O KODE	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENJ	JA OPD TAR	RGET RENJA OPD TAHUN	TARGE	T 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Doutoushah /Doubuwana (40,40)	LOKASI	CUMPED DAMA	PRIORITAS		ELOMPOK SASARAN	TARGET	DACILINDIKATIE (D)	DAERAH PENANGGUN
	KEGIATAN		OPD	UN 2023	2024	EBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL DA	AERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	JAWAB
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1	Dokumen	1 Dokumen	79.110.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	-76.870.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningk Kualitas Daya Ma Meningk Kualitas Daya Ma	Sumber anusia katkan Sumber			2.240.000,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.004	Pengelolaan Pelayanan Kela	T						T		ı		T	<u> </u>	T			T	I	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			-		1 Dokumen	0,00	11.520.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	- Meningk Kualitas Daya Ma Meningk Kualitas Daya Ma	Sumber anusia katkan Sumber			11.520.000,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			1	00 %	100 %	550.898.000,00	308.635.000,00	308.635.000,00	-242.263.000,00			- Meningk Kualitas Daya Ma Meningk Kualitas Daya Ma	Sumber anusia katkan Sumber	ırakat		308.635.000,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.03.000	Pengelolaan Sistem Informas	si Kesehatan																	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1	Dokumen	1 Dokumen	65.697.000,00	0,00	0,00	-65.697.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningk Kualitas Daya Ma Meningk Kualitas Daya Ma	Sumber anusia katkan Sumber			0,00	DINAS KESEHA
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif			1	00 %	100 %	455.430.000,00	335.148.200,00	335.148.200,00	-120.281.800,00							335.148.200,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1	00 %	100 %	305.430.000,00	170.840.200,00	170.840.200,00	-134.589.800,00			Daya Ma Meningk	katkan Sumber	arakat		170.840.200,00	DINAS KESEHA
1.02.05.2.03.000	Bimbingan Teknis dan Super	visi Pengembangan dan Pelaksal	anaan Upaya Kesehatan	n Bersumber Da	Daya Masyarakat (l	JKBM)													
		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			1	Dokumen	1 Dokumen	12.110.000,00	10.470.000,00	10.470.000,00	-1.640.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Daya Ma Meningk	Sumber anusia katkan Sumber			10.470.000,00	DINAS KESEH
	PUSKESMAS BIHA							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
. 1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan			1	00 %	100 %	67.184.826.478,00	69.734.403.918,00	70.642.931.280,00	10.914.577.440,00							78.099.403.918,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1	00 %	100 %	42.306.923.839,00	49.404.749.118,00	50.313.276.480,00	8.006.352.641,00			Dava Ma	katkan Sumber	ırakat		49.452.679.518,00	DINAS KESEH
1.02.02.2.02.000	Pengelolaan Pelayanan Kese	ehatan Ibu Hamil								I		1							
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2	80 Orang	280 Orang	55.200.000,00	126.500.000,00	126.500.000,00	71.300.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Daya Ma	Sumber anusia katkan Sumber			126.500.000,00	DINAS KESEH
1.02.02.2.02.000	Pengelolaan Pelayanan Kese											1					1		
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2	18 Orang	218 Orang	8.200.000,00	0,00	0,00	-8.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningk Kualitas Daya Ma Meningk Kualitas Daya Ma	Sumber anusia katkan Sumber			0,00	DINAS KESEH
1.02.02.2.02.000	Pengelolaan Pelayanan Kese	ehatan pada Usia Pendidikan Das	sar																
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			8	90 Orang	890 Orang	56.540.000,00	55.680.000,00	55.680.000,00	-860.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningk Kualitas Daya Ma Meningk Kualitas Daya Ma	Sumber anusia katkan Sumber			55.680.000,00	DINAS KESEH
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kese	Jumlah Orang dengan Gangguan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			-		380 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	- Meningk Kualitas Daya Ma Meningk Kualitas Daya Ma	Sumber anusia katkan Sumber			12.000.000,00	DINAS KESEH
1.02.02.2.02.001	Pengelolaan Pelayanan Kese	 ehatan Orang Terduga Tuberkulo	psis											Daya We				<u> </u>	
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			8	9 Orang	89 Orang	4.500.000,00	10.760.000,00	10.760.000,00	6.260.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningk Kualitas Daya Ma Meningk Kualitas Daya Ma	s Sumber anusia katkan s Sumber			10.760.000,00	DINAS KESEH
1.02.02.2.02.001	Pengelolaan Pelayanan Kese	ehatan Orang dengan Risiko Terii Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	infeksi HIV		3	2 Orang	32 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningk Kualitas Daya M Meningk Kualitas Daya Ma	Sumber anusia katkan Sumber			0,00	DINAS KESEH

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR PERIODE REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN					VEL CHECK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT
O KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENJA OPD	OPD TAHUN	TARGET	Т 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	OKASI	SUMBER DANA -	PRIORI	TAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	REGIATAN		OPD TAHON 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	bertamban/berkurang (10-12)	UKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGO INDIKATIF (Kp)	JAWAB
2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen	1 Dokumen	239.940.000,00	219.850.000,00	219.850.000,00	-20.090.000,00 Kab. F Barat, Selata Kel/De	Pesisir an, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	F [N	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			219.850.000,00	DINAS KESEHATA
													[Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Keseh						0.00	44 500 000 00	44 500 000 00	44 500 000 00 44 4 5	<u>, T</u>	DAYMON	1.				14.500.000.00	DINA O KEOFILA T
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			-	1 Dokumen	0,00	11.520.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00 Kab. F Barat, Selata Kel/De	Pesisir an, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	P C N P	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.520.000,00	DINAS KESEHAT
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Keseh	atan Lingkungan							L	I	I							
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	2 Dokumen	14.410.000,00	19.470.000,00	19.470.000,00	5.060.000,00 Kab. F Barat, Selata Kel/De	Pesisir an, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	P	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			19.470.000,00	DINAS KESEHAT
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Keseh	atan																
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	1 Dokumen	23.600.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	1.900.000,00 Semua Kota/k Semua Kecan Semua	Kab, a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	P C N P	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.500.000,00	DINAS KESEHAT
1.02.02.2.02.0021		atan Orang dengan Masalah Ke														_		
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			-	1580 Orang	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Barat,	an, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	[N F	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.400.000,00	DINAS KESEHATA
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyaki		T		1												T	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			3 Dokumen	5 Dokumen	125.100.000,00	118.940.000,00	118.940.000,00	-6.160.000,00 Kab. F Barat, Selata Kel/De	Pesisir an, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	[N F	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			118.940.000,00	DINAS KESEHAT.
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehat	•			0.00	0.001	4 740 744 000 00	4 0 40 0 50 700 00	4 0 40 050 700 00	400 044 700 00 164 5	5	DAMA ALOKAGI	Ι,	Marchaellan		1	1 0 40 050 700 00	DINA O IZEOELIA
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			2 Dokumen	3 Dokumen	1.749.744.000,00	1.948.358.700,00	1.948.358.700,00	198.614.700,00 Kab. F Barat, Selata Kel/De	Pesisir an, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	[N F	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.948.358.700,00	DINAS KESEHAT
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puske		T		1												Τ	
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			2 Dokumen	7 Dokumen	220.736.000,00	225.644.000,00	225.644.000,00	4.908.000,00 Kab. F Barat, Selata Kel/De	Pesisir an, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	[N F	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			225.644.000,00	DINAS KESEHAT/
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tida	k Diharapkan (Kejadian Ikutan F Jumlah Laporan Hasil	Pasca Imunisasi dan Pemberiai	n Obat Massal)	1 Laporan	1 Laporan	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00 Kab. F	Pesisir	DANA ALOKASI	<u> </u>	Meningkatkan			0.00	DINAS KESEHAT
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			, Lapora.			3,33	0,00	Barat,	Pesisir an, Semua	UMUM (DAU)	[N F	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan keseh	atan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan	s 		32 Orang	32 Orang	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00 Kab. F	Pocicir	DANA ALOKASI		Maningkatkan			0.00	DINAS KESEHAT
		Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			32 Orang	32 Orang	1.300.000,00	0,00	0,00	Barat,	Pesisir an, Semua	UMUM (DAU)	[N F	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS RESERVA
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan keseh	atan orang dengan HIV (ODHIV Jumlah orang dengan HIV	') 		18 Orang	18 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00 Kab. F	Docinir	DANA ALOKASI	Ι,	Maningkatkan		T	0.00	DINAS KESEHAT
		(ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			To Orang	To Clarity	2.400.000,00	0,00	0,00	Barat,	Pesisir an, Semua	UMUM (DAU)	[N F	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS RESERVA
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan keseh	atan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			-	1380 Orang	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00 Kab. F Barat, Selata Kel/De	Pesisir an, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	P C N P	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.800.000,00	DINAS KESEHAT
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Keseh	atan Reproduksi	<u> </u>												1	1	<u> </u>	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen	1 Dokumen	12.660.000,00	18.960.000,00	18.960.000,00	6.300.000,00 Kab. F Barat, Selata Kel/De	Pesisir an, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	P C N P	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			18.960.000,00	DINAS KESEHAT
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan	Ibu dan Anak												Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0040	i ongeroraan upaya kesenatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 Dokumen	1 Dokumen	96.260.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	-92.680.000,00 Kab. F Barat, Selata Kel/De	Pesisir an, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	[N F	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.580.000,00	DINAS KESEHAT
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelan	utusiaan							I									
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			-	1 Dokumen	0,00	23.540.000,00	23.540.000,00	23.540.000,00 Kab. F Barat, Selata Kel/De	Pesisir an, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	P C N P	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			23.540.000,00	DINAS KESEHAT.

		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN				VE	LOMPOK		N MAJU RENCANA AHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
NO	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	SEBELUM	GET 2025	RKPD 2025	PAGU INDIKATIF (Rp) APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL D		ASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				100 %	100 %	550.898.000,00	308.635.000,00	308.635.000,00	-242.263.000,00			Daya M Meningl	s Sumber Manusia gkatkan s Sumber	rakat		308.635.000,00	DINAS KESEHATA
1	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumer	n 1 Dokumen	6.660.000,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Daya M Meningl	s Sumber Manusia Jkatkan s Sumber			0,00	DINAS KESEHATA
2. 1	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif				100 %	100 %	455.430.000,00	335.148.200,00	335.148.200,00	-120.281.800,00			Daya M	ianusia			335.148.200,00	
1	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	305.430.000,00	170.840.200,00	170.840.200,00	-134.589.800,00			Daya M Meningl	s Sumber Manusia gkatkan s Sumber	rakat		170.840.200,00	DINAS KESEHATA
1	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Superv	risi Pengembangan dan Pelaksa	anaan Upaya Ke	sehatan Bersum	nber Daya Masyarak	kat (UKBM)													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumer	n 1 Dokumen	43.315.000,00	7.276.000,00	7.276.000,00		Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Daya M Meningl	s Sumber Manusia Jkatkan s Sumber			7.276.000,00	DINAS KESEHATA
		PUSKESMAS NGAMBUR							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
1	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
1. 1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan				100 %	100 %	67.184.826.478,00	69.734.403.918,00	70.642.931.280,00	10.914.577.440,00							78.099.403.918,00	
1	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7			100 %	100 %	42.306.923.839,00	49.404.749.118,00	50.313.276.480,00	8.006.352.641,00			Daya M Mening	s Sumber Manusia Jkatkan s Sumber	rakat		49.452.679.518,00	DINAS KESEHATA
1	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kese	l hatan Ibu Hamil									l								
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				260 Orang	260 Orang	22.140.000,00	98.928.000,00	98.928.000,00		Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Daya M Meningi	s Sumber Manusia gkatkan s Sumber			98.928.000,00	DINAS KESEHATA
1	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kese									ı							T		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				180 Orang	180 Orang	40.320.000,00	0,00	0,00	-40.320.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Daya M Meningl	s Sumber Manusia Jkatkan s Sumber			0,00	DINAS KESEHATA
1	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan pada Usia Pendidikan Da	sar																
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				328 Orang	328 Orang	68.490.000,00	60.060.000,00	60.060.000,00	-8.430.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Daya M Meningl	s Sumber Manusia gkatkan s Sumber			60.060.000,00	DINAS KESEHATA
1	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Orang dengan Gangguan	Jiwa Berat	T	<u> </u>	1	240 0	0.00	0.000.000.00	0 000 000 00	8.882.000,00	Kab Basisis	DAK NON	Marriant	deather			0.000.000.00	DINAS KESEHATA
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					340 Orang	0,00	8.882.000,00	8.882.000,00	·	Barat, Ngambur,	FISIK-DANA	Daya M Mening	s Sumber Manusia gkatkan s Sumber			8.882.000,00	DINAS RESERATA
1	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Orang Terduga Tuberkulo Jumlah Orang Terduga	osis			162 Orang	162 Orang	5.760.000,00	9.180.000,00	9.180.000,00	3.420.000,00	Kah Pasisir	DANA ALOKASI	- Meningl	ıkatkan			9 180 000 00	DINAS KESEHATA
			Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				102 Orang	102 Grang	3.700.000,00	9.180.000,00	9.160.000,00		Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	Kualitas Daya M Mening	s Sumber Manusia gkatkan s Sumber			9.180.000,00	DINAS RESEITATA
1	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Orang dengan Risiko Teri Jumlah Orang Terduga	infeksi HIV			60 Orang	60 Orang	14.400.000,00	0,00	0,00	-14.400.000,00	Kah Pasisir	DANA ALOKASI	- Meningl	ıkatkan			0.00	DINAS KESEHATA
			Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				60 Orang	60 Orang	14.400.000,00	0,00	0,00		Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	Kualitas Daya M Mening	s Sumber Manusia gkatkan s Sumber			0,00	DINAS RESERATA
1	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Gizi Masyarakat						,		,	-								
	100 55 5 5		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumer	n 6 Dokumen	236.525.000,00	224.850.000,00	224.850.000,00	-11.675.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Daya M Meningl	s Sumber Manusia Jkatkan s Sumber			224.850.000,00	DINAS KESEHATA
1	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kese					_	1 Dokumen	0.00	E 200 000 00	E 200 000 00	E 200 000 00	Kah Basisi-	DAK NON	_ A4-min	rkatkan			E 000 000 00	DINAS KECELIATA
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Daya M Meningl	s Sumber Manusia Jkatkan s Sumber			5.280.000,00	DINAS KESEHATA

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN				- KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
NO KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		- Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	PRI	ORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			OPD		2024	SEBELUM SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	, , ,		NASIONAL	DAERAH			, , ,	
1 2	3	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5	6	7	8 9 1 Dokumen 2 Dokumen	10 15.940.000,00	11 10.710.000,00	12 10.710.000,00	-5.230.000,00 Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	18	19	10.710.000,00	21 DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen 3 Dokumen	20.895.000,00	11.280.000,00	11.280.000,00	-9.615.000,00 Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.280.000,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kes	ehatan Orang dengan Masalah Kes Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	sehatan Jiwa (C	DDMK)		- 2130 Orang	0,00	9.912.000,00	9.912.000,00	9.912.000,00 Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa		-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.912.000,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penya	kit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3 Dokumen 4 Dokumen	133.430.000,00	133.960.000,00	133.960.000,00	530.000,00 Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			133.960.000,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Keseh	atan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen 3 Dokumen	1.598.400.000,00	1.902.793.800,00	1.902.793.800,00	304.393.800,00 Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			1.902.793.800,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Pusi												Daya Manusia	<u> </u>			
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen 7 Dokumen	209.000.000,00	213.458.000,00	213.458.000,00	4.458.000,00 Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			213.458.000,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Ti	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	asca Imunisasi	dan Pemberian C	Obat Massal)	1 Laporan 1 Laporan	5.760.000,00	0,00	0,00	-5.760.000,00 Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			0,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kese	hatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				56 Orang 56 Orang	3.960.000,00	0,00	0,00	-3.960.000,00 Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kese	hatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				22 Orang 22 Orang	1.920.000,00	0,00	0,00	-1.920.000,00 Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEH
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kes	L ehatan Reproduksi					L									1	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen 1 Dokumen	27.040.000,00	32.238.000,00	32.238.000,00	5.198.000,00 Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			32.238.000,00	DINAS KESEH
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehata	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen 1 Dokumen	42.300.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	-40.410.000,00 Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.890.000,00	DINAS KESEH
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kela	njutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				- 1 Dokumen	0,00	11.880.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00 Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.880.000,00	DINAS KESEH
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				100 % 100 %	550.898.000,00	308.635.000,00	308.635.000,00	-242.263.000,00		-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		308.635.000,00	DINAS KESEH
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informa	si Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen 1 Dokumen	6.660.000,00	0,00	0,00	-6.660.000,00 Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			0,00	DINAS KESEH
2. 1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif				100 % 100 %	455.430.000,00	335.148.200,00	335.148.200,00	-120.281.800,00			Daya Manusia			335.148.200,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 % 100 %	305.430.000,00	170.840.200,00	170.840.200,00	-134.589.800,00		-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		170.840.200,00	DINAS KESEHA

		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
0	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024		ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		IORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			,			2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			45	NASIONAL	DAERAH	10	40		24
	2	3	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	5	6	7	1 Dokumen	2 Dokumen	10 14.940.000,00	6.982.000,00	6.982.000,00	-7.958.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	18	19	6.982.000,00	21 DINAS KESEHAT
		PUSKESMAS NGARAS							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan				100 %	100 %	67.184.826.478,00	69.734.403.918,00	70.642.931.280,00	10.914.577.440,00							78.099.403.918,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	42.306.923.839,00	49.404.749.118,00	50.313.276.480,00	8.006.352.641,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		49.452.679.518,00	DINAS KESEHAT
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesel	l natan Ibu Hamil																1	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				280 Orang	280 Orang	45.300.000,00	64.400.000,00	64.400.000,00	19.100.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			64.400.000,00	DINAS KESEHAT
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesel																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				189 Orang	189 Orang	6.075.000,00	0,00	0,00	-6.075.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHAT
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesel	hatan pada Usia Pendidikan Das	sar	1		T						T.,	T		T.,			T	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				380 Orang	380 Orang	34.260.000,00	69.560.000,00	69.560.000,00	35.300.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			69.560.000,00	DINAS KESEHAT
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesel	natan Orang dengan Gangguan	Jiwa Berat				_					T	T		1			1	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	290 Orang	0,00	15.840.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.840.000,00	DINAS KESEHAT
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesel	hatan Orang Terduga Tuberkulo Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				129 Orang	129 Orang	9.020.000,00	16.970.000,00	16.970.000,00	7.950.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			16.970.000,00	DINAS KESEHAT
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesel	 hatan Orang dengan Risiko Teri	nfeksi HIV												2 4,4 114.145.4			1	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				80 Orang	80 Orang	1.360.000,00	0,00	0,00	-1.360.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHAT
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesel	1				4.5.1	0.00	000 040 000 00	040 040 000 00	242.042.000.00	40,400,000,00	LK-L B1-1-	DANA ALOVAGI		Mariadata			040 040 000 00	DINIA O KEOFILIA T
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				i Dokumen	6 Dokumen	233.040.000,00	213.640.000,00	213.640.000,00	-19.400.000,00	Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			213.640.000,00	DINAS KESEHAT
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesel	hatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil					4 D-1	0,00	12.480.000,00	12.480.000,00	12.480.000,00	Keh Brand	DAK NON		Mantender			40.400.000	DINAS KESEHAT
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	12.480.000,00	12.480.000,00	12.480.000,00	Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	FISIK-DANA	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.480.000,00	DINAS KESEHAT
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesel	hatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil				1 Dokumen	2 Dokumen	11.880.000,00	13.410.000,00	13.410.000,00	1 530 000 00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan			13 410 000 00	DINAS KESEHAT
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				, Solumen	_ Donumen	11.000.000,00	13.710.000,00	15.410.000,00	1.330.000,00	Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			13.410.000,00	SI WO NEGETIA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	3 Dokumen	15.730.000,00	14.760.000,00	14.760.000,00	-970.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			14.760.000,00	DINAS KESEHA
_	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesel	hatan Orang dengan Masalah K Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	esehatan Jiwa	(ODMK)			2200 Orang	0,00	5.325.000,00	5.325.000,00	5.325.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.325.000,00	DINAS KESEHAT
_	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyak	1											DAMA CLEAN						DIVIS :
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	5 Dokumen	137.605.000,00	112.040.000,00	112.040.000,00	-25.565.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			112.040.000,00	DINAS KESEHATA

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET REA	ALISASI (RAKIRAAN CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA DAN KE	RANGKA PENDANAAN				KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCAN TAHUN 2026	A PERANGKA DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	REN		PUTARON	RGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	PRIORIT	TAS	SASARAN	TARGET PAGU INDIKATII	PENANGGUI
			ОРД		2024 SEBEL	UM SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	3(NASIONAL	DAERAH			
2	3	4	5	6	7 8	9	10	11	12	13 14	15	16	17	18	19 20	21
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Keseha	, T				lan. I	4 000 000 000 00	4 225 222 222 22	4 005 000 000 00	5 000 000 00 K L B		Ι Ι.		1	4 005 000	200 00 BNA9 (/E9EL)
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			2 Doku	nen 3 Dokumen	1.000.000.000,00	1.005.628.200,00	1.005.628.200,00	5.628.200,00 Kab. Pesisir Barat, Ngaras Semua Kel/De	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	K	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		1.005.628.	200,00 DINAS KESEH
		Kesenatan Masyarakat								Semua Kel/De	Sa		Jaya Manusia Jeningkatkan Kualitas Sumber			
													Daya Manusia			
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Pusk	esmas														
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan			1 Doku	nen 7 Dokumen	199.790.000,00	207.036.000,00	207.036.000,00	7.246.000,00 Kab. Pesisir Barat, Ngaras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- N	Meningkatkan Kualitas Sumber		207.036.	000,00 DINAS KESEH
		Puskesmas								Semua Kel/Do			Daya Manusia Meningkatkan			
												K	Kualitas Sumber Daya Manusia			
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tid	_l ak Diharapkan (Kejadian Ikutan		emberian Obat I	: Massal)		I			I						
		Jumlah Laporan Hasil			1 Lapoi	an 1 Laporan	1.320.000,00	0,00	0,00	-1.320.000,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	- N	/leningkatkan			0,00 DINAS KESEH
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian								Barat, Ngaras Semua Kel/De	uMUM (DAU) sa		Kualitas Sumber Daya Manusia			
		Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)										K	Meningkatkan Kualitas Sumber			
4 00 00 0 00 00 40													Daya Manusia			
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesel	natan orang dengan Tuberkulos	s 		00.0	20 0	6.600.000,00	0.00	0.00	-6.600.000,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKAGI	Ι Ι,	Analantan			0.00 PINAO KEOE
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan			38 Orai	g 38 Orang	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00 Kab. Pesisir Barat, Ngaras Semua Kel/De	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	K	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00 DINAS KESE
		kesehatan sesuai standar								Semua Reijiba	54		Meningkatkan Kualitas Sumber			
													Daya Manusia			
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesel	natan orang dengan HIV (ODHI)	/)													
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan			12 Orai	g 12 Orang	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00 Kab. Pesisir Barat, Ngaras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- N	Meningkatkan Kualitas Sumber			0,00 DINAS KESE
		(ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar								Semua Kel/De	sa		Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			
													Kualitas Sumber Daya Manusia			
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesel	I natan Malaria								I						
		Jumlah orang yang			-	1680 Orang	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00 Kab. Pesisir	DAK NON	- N	Meningkatkan		1.530.	000,00 DINAS KESE
		mendapatkan pelayanan kesehatan malaria								Barat, Ngaras Semua Kel/De	FISIK-DANA BOK-BOK		Kualitas Sumber Daya Manusia			
											PUSKESMAS		/leningkatkan (ualitas Sumber			
													Daya Manusia			
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kese	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1 Date	4 5 1	20,400,000,00	00.040.000.00	00.040.000.00	OD OOD OO Walk Provide	DANA ALOKAGI	Ι Ι.	Analantan		00.040	222 22 PNA 2 KEOF
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan			1 Doku	nen 1 Dokumen	23.130.000,00	23.040.000,00	23.040.000,00	-90.000,00 Kab. Pesisir Barat, Ngaras Semua Kel/De	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	K	Meningkatkan Kualitas Sumber		23.040.	000,00 DINAS KESE
		kesehatan reproduksi								Semua Rei/Di	Sa	N	Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			
													Daya Manusia			
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehata	n Ibu dan Anak														
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya			1 Doku	nen 1 Dokumen	82.560.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	-78.480.000,00 Kab. Pesisir Barat, Ngaras	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- N	/leningkatkan Kualitas Sumber		4.080.	000,00 DINAS KESEH
		kesehatan ibu dan anak								Semua Kel/De	sa		Daya Manusia Meningkatkan			
												K	Kualitas Sumber Daya Manusia			
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelar	 njutusiaan														
		Jumlah dokumen hasil			-	1 Dokumen	0,00	23.175.000,00	23.175.000,00	23.175.000,00 Kab. Pesisir	DAK NON	- N	/leningkatkan		23.175.	000,00 DINAS KESER
		pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan								Barat, Ngaras Semua Kel/De	sa BOK-BOK		Kualitas Sumber Daya Manusia			
											PUSKESMAS	K	deningkatkan Kualitas Sumber			
1.02.02.2.03	Para allara a cara a Ciata a	Jumlah Persentase			100 %	100 %	550.898.000,00	308.635.000,00	308.635.000,00	040,000,000,00			Daya Manusia	Manualist	200.005	000,00 DINAS KESEH
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara			100 %	100 %	550.696.000,00	308.635.000,00	308.635.000,00	-242.263.000,00			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	300.635.	000,00 DINAS RESER
	rennegrasi	Terintegrasi											Meningkatkan Kualitas Sumber			
													Daya Manusia			
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informas	i Kesehatan	,											_		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem			1 Doku	nen 1 Dokumen	6.660.000,00	0,00	0,00	-6.660.000,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- N	lleningkatkan Kualitas Sumber			0,00 DINAS KESEH
		Informasi Kesehatan								Barat, Ngaras Semua Kel/Do	sa		Daya Manusia			
													Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			
1.02.05	PROGRAM	Persentase			100 %	100 %	455.430.000,00	335.148.200,00	335.148.200,00	-120.281.800,00			,		335.148.	200,00
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG	Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Yang					,	·	,	,						
	KESEHATAN	Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif														
	Pengembangan dan	Jumlah Persentase			100 %	100 %	305.430.000,00	170.840.200,00	170.840.200,00	-134.589.800,00		- N	Meningkatkan Kualitas Sumber	Masyarakat	170.840.	200,00 DINAS KESEH
1.02.05.2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya										1 10	Dava Manusia			
1.02.05.2.03	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya												Meningkatkan Kualitas Sumber			
1.02.05.2.03	Pelaksanaan Upaya	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat											Daya Manusia			
	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										Ι Ι.		1		
1.02.05.2.03	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota visi Pengembangan dan Pelaksa	anaan Upaya Kesehata	ın Bersumber Da						7 400 000 00 L Kah Dagiair	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- 	/leningkatkan (ualitas Sumber		10.011.	000,00 DINAS KESE
	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota visi Pengembangan dan Pelaksa Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan	anaan Upaya Kesehata	in Bersumber Da		nen 2 Dokumen	17.420.000,00	10.011.000,00	10.011.000,00	-7.409.000,00 Kab. Pesisir Barat, Ngaras	UMUM (DAU)	l _	Qualitas Sumber			
	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota visi Pengembangan dan Pelaksa Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyaraka		in Bersumber Da			17.420.000,00	10.011.000,00	10.011.000,00	Barat, Ngaras Semua Kel/De	sa		Daya Manusia Meningkatkan			
	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota visi Pengembangan dan Pelaksa Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan		in Bersumber Da			17.420.000,00	10.011.000,00	10.011.000,00	Barat, Ngaras	sa		Daya Manusia			
	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota visi Pengembangan dan Pelaksa Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		in Bersumber Da			17.420.000,00 105.467.548.638,00	10.011.000,00	10.011.000,00	Barat, Ngaras	sa OMOM (DAO)		Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber		111.178.638.	818,00
	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis dan Supen PUSKESMAS BANGKUNAT URUSAN PEMERINTAHAN	Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota visi Pengembangan dan Pelaksa Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		n Bersumber Da						Barat, Ngaras Semua Kel/De	sa OMOM (DAO)		Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber		111.178.638. 111.178.638.	
	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis dan Supen PUSKESMAS BANGKUNAT URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota visi Pengembangan dan Pelaksa Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		an Bersumber Da			105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00	sa UMUM (DAU)		Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			
1.02.05.2.03.0001	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis dan Supera PUSKESMAS BANGKUNAT URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota visi Pengembangan dan Pelaksa Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		an Bersumber Da			105.467.548.638,00 105.467.548.638,00	105.678.138.818,00 105.678.138.818,00	106.656.864.834,00 106.656.864.834,00	1.189.316.196,00 1.189.316.196,00	sa UMUM (DAU)		Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber		111.178.638.	818,00
	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis dan Supen PUSKESMAS BANGKUNAT URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota visi Pengembangan dan Pelaksa Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		an Bersumber Da			105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00	sa UMUM (DAU)		Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			818,00
1.02.05.2.03.0001	Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis dan Super PUSKESMAS BANGKUNAT URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN	Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota visi Pengembangan dan Pelaksa Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		an Bersumber Da			105.467.548.638,00 105.467.548.638,00	105.678.138.818,00 105.678.138.818,00	106.656.864.834,00 106.656.864.834,00	1.189.316.196,00 1.189.316.196,00	sa UMUM (DAU)		Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber		111.178.638.	818,00

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET R	REALISASI CAPAIAN .	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN KE	RANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
O KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PENSTRA RI	ENJA OPD AHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGE			PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		RIORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			OPD		2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1.02.02.2.02	3 Penyediaan Layanan	Jumlah Persentase	5	6	7	100 %	9	10 42.306.923.839,00	49.404.749.118,00	50.313.276.480,00	8.006.352.641,00	14	15	16	17 Meningkatkan	18 Masyarakat	19	49.452.679.518,00	DINAS KESEHAT
1.02.02.2.02	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	42.500.925.659,00	49.404.749.110,00	50.313.276.460,00	6.006.352.641,00			-	Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		49.452.679.516,00	DINAS RESERVI
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesel	I natan Ibu Hamil																	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				385 Orang	385 Orang	41.750.000,00	135.960.000,00	135.960.000,00	В	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Bemua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			135.960.000,00	DINAS KESEHAT
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesel	natan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				280 Orang	280 Orang	8.300.000,00	0,00	0,00	В	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHA ^T
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesel	natan pada Usia Pendidikan Das Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	sar			828 Orang	828 Orang	57.775.000,00	73.780.000,00	73.780.000,00	В	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			73.780.000,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesel	 natan Orang dengan Gangguan	Jiwa Berat												Daya Manasia				
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	390 Orang	0,00	9.250.000,00	9.250.000,00	В	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Bemua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.250.000,00	DINAS KESEHAT
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesel	natan Orang Terduga Tuberkulo	osis																
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				165 Orang	165 Orang	2.520.000,00	9.340.000,00	9.340.000,00	В	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Bemua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.340.000,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesel	natan Orang dengan Risiko Terii	nfeksi HIV										T =		T				
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				80 Orang	80 Orang	6.780.000,00	0,00	0,00	B	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Bemua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEH
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesel	natan Gizi Masyarakat																	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	6 Dokumen	237.276.000,00	255.140.000,00	255.140.000,00	B	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Bemua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			255.140.000,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesel	T					4.5.1	0.00	0.000.000.00	0.000.000.00	2 222 222 24	(als. Danitala	DAKNON		Markadada			0.000.000.00	DINA O KEOFILIA
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	2.980.000,00	2.980.000,00	B	kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.980.000,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesel	natan Lingkungan																	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	2 Dokumen	7.480.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	B	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.600.000,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesel	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	3 Dokumen	11.460.000,00	11.020.000,00	11.020.000,00	B	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.020.000,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesel	natan Orang dengan Masalah Ko Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	esehatan Jiwa (ODM	MK)		-	2400 Orang	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	B	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.200.000,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyak	T																	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	5 Dokumen	183.420.000,00	155.500.000,00	155.500.000,00	В	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			155.500.000,00	DINAS KESEH
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Keseha	tan Masyarakat						1					,						
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	3 Dokumen	3.994.800.000,00	4.579.887.830,00	4.579.887.830,00	В	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Bemua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.579.887.830,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puske	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	7 Dokumen	223.080.000,00	232.532.000,00	232.532.000,00	В	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			232.532.000,00	DINAS KESEHA

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET REALISAS	SI PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AN MAJU RENCANA FAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
) KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD RENJA OP TAHUN 201	PD TANGET KENSA		ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		ORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				2024	SEBELUM		RKPD 2025		RKPD PERUBAHAN 2025			4-	NASIONAL	DAERAH	40	40		0.4
2	3	Jumlah orang dengan	5 6	7	8 64 Orang	9 64 Orang	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000.00	14 Kab. Pesisir	15 DANA ALOKASI	16	17 Meningkatkan	18	19	0,00	DINAS KESEHATA
		Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			64 Orang	64 Orang	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	-	Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS RESERATA
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesel	 natan orang dengan HIV (ODHIV	")				L					1						
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			20 Orang	20 Orang	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATA
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Reproduksi			I.							1						
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			1 Dokumen	1 Dokumen	8.115.000,00	9.660.000,00	9.660.000,00	1.545.000,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.660.000,00	DINAS KESEHATA
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatar	n Ibu dan Anak	1		T						Γ	1				T		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 Dokumen	1 Dokumen	122.075.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	-120.245.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.830.000,00	DINAS KESEHATA
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelar	jutusiaan Jumlah dokumen hasil				1 Dokumen	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	Kah Pesisir	DAK NON	_	Meningkatkan			3 400 000 00	DINAS KESEHATA
		pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				Dokumen	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	FISIK-DANA BOK-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.400.000,00	DINAS RESERVATA
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			100 %	100 %	550.898.000,00	308.635.000,00	308.635.000,00	-242.263.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		308.635.000,00	DINAS KESEHATA
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informas	i Kesehatan																
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			1 Dokumen	1 Dokumen	6.660.000,00	0,00	0,00	-6.660.000,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATA
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif			100 %	100 %	455.430.000,00	335.148.200,00	335.148.200,00	-120.281.800,00							335.148.200,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100 %	100 %	305.430.000,00	170.840.200,00	170.840.200,00	-134.589.800,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		170.840.200,00	DINAS KESEHATA
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Superv	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		sumber Daya Masyaraka	at (UKBM) 1 Dokumen	2 Dokumen	7.025.000,00	7.248.000,00	7.248.000,00	223.000,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.248.000,00	DINAS KESEHATA
	PUSKESMAS WAY KRUI						105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	1
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan			100 %	100 %	67.184.826.478,00	69.734.403.918,00	70.642.931.280,00	10.914.577.440,00							78.099.403.918,00)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100 %	100 %	42.306.923.839,00	49.404.749.118,00	50.313.276.480,00	8.006.352.641,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		49.452.679.518,00	DINAS KESEHATA
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0 Orang	41.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			96.000.000,00	DINAS KESEHATA
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Ibu Bersalin												Daya Manusia				
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			0 Orang	0 Orang	2.360.000,00	0,00	0,00	-2.360.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATA
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan pada Usia Pendidikan Das Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	sar		0 Orang	0 Orang	23.970.000,00	33.990.000,00	33.990.000,00	10.020.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			33.990.000,00	DINAS KESEHATA

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN KEI	RANGKA PENDANAAN					- KELOMPOK		N MAJU RENCANA AHUN 2026	PERANGKA DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	OPD TAHUN	TARG	SET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		IORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUI JAWAB
_	_			_	2024	SEBELUM		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9 450 Orang	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan				-	158 Orang	0,00	10.560.000,00	10.560.000,00	Ba	arat, Way Krui,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.560.000,00	DINAS KESEH
		Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar										omaa no, booa	PUSKESMAS		Meningkatkan Kualitas Sumber				
															Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Orang Terduga Tuberkulo	osis			0.00	0.00	0.040.000.00	7,000,000,00	7,000,000,00	5 400 000 00 V	- De state	DANA ALOKAGI		Manifestation			7,000,000,00	DINA O KEOFI
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendanatkan Pelayanan				0 Orang	0 Orang	2.640.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Ba	ab. Pesisir arat, Way Krui, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.800.000,00	DINAS KESEI
		Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar										omaa rrow bood			Meningkatkan Kualitas Sumber				
															Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Orang dengan Risiko Teri	nfeksi HIV													1			
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan				0 Orang	0 Orang	2.800.000,00	0,00	0,00	Ba	ab. Pesisir arat, Way Krui, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESE
		Sesuai Standar									36	emua Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber				
															Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kese	<u>.</u>				T	T T						1			T			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	6 Dokumen	199.895.000,00	174.500.000,00	174.500.000,00	Ba	arat, Way Krui,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			174.500.000,00	DINAS KESE
		Kesenatan Gizi Masyarakat									Se	emua Kel/Desa			Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber				
															Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Kerja dan Olahraga	1													1			
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan				-	1 Dokumen	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00 Ka	arat, Way Krui,	DAK NON FISIK-DANA	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			10.800.000,00	DINAS KES
		Kesehatan Kerja dan Olahraga									Se	emua Kel/Desa	BOK-BOK PUSKESMAS		Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber				
															Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kese	hatan Lingkungan		_	_														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan				0 Dokumen	2 Dokumen	18.580.000,00	18.240.000,00	18.240.000,00	-340.000,00 Ka	ab. Pesisir arat, Way Krui,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			18.240.000,00	DINAS KESE
		Kesehatan Lingkungan									Se	emua Kel/Desa			Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber				
															Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kese	hatan										I			1				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans				0 Dokumen	3 Dokumen	28.810.000,00	41.370.000,00	41.370.000,00	12.560.000,00 Ka	ab. Pesisir arat, Way Krui,	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			41.370.000,00	DINAS KESE
		Kesehatan									Se	emua Kel/Desa	OWOW (DAO)		Daya Manusia				
															Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kese	I hatan Orang dengan Masalah K	 esehatan Jiwa (_L (ODMK)								l							
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)				-	1180 Orang	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00 Ka	ab. Pesisir	DAK NON	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			3.300.000,00	DINAS KESE
		yang Mendapatkan									Ba Se	arat, Way Krui, emua Kel/Desa	FISIK-DANA BOK-BOK		Daya Manusia				
		Pelayanan Kesehatan											PUSKESMAS		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penya	it Menular dan Tidak Menular													Daya Mariusia				
1.02.02.2.02.0020	T Slayanan Nosonatan F Shya	Jumlah Dokumen Hasil				0 Dokumen	5 Dokumen	70.160.000,00	78.820.000,00	78.820.000,00	8.660.000,00 Ka	ab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan			78.820.000.00	DINAS KESE
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak									Ba	arat, Way Krui, emua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
		Menular													Meningkatkan Kualitas Sumber				
4 00 00 0 00 0000	Dan malalana Jami'a an Kasaba	ton Manuscript													Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Keseha	Jumlah Dokumen Hasil				2 Dokumon	2 Dokumen	843.860.800,00	677.246.600,00	677.246.600,00	-166.614.200,00 Ka	oh Bosisir	DANA ALOKASI		Moningkatkan			677.246.600,00	DINAS KESE
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	043.000.000,00	077.240.000,00	077.240.000,00	Ba	arat, Way Krui, emua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			077.240.000,00	DINAS RESE
		, isosonaian mas, aranar													Meningkatkan Kualitas Sumber				
															Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Pusk	T				0.5-1	7.5	7000	18 2222	10	<u> </u>	ah David	DANIA ALGUS		NA-mile of of	<u> </u>		1077/0077	DINAS
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	7 Dokumen	7.920.000,00	187.718.000,00	187.718.000,00	179.798.000,00 Ka Ba	ab. Pesisir arat, Way Krui, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			187.718.000,00	DINAS KESE
		i usnesilias									Se	omua Nel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber				
															Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesel	natan orang dengan Tuberkulosi: T	s					T		T	ı	г			1	1			
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang				0 Orang	0 Orang	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00 Ka	arat, Way Krui,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			0,00	DINAS KESI
		mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar									Se	emua Kel/Desa			Daya Manusia Meningkatkan				
															Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesel	natan orang dengan HIV (ODHIV	′)																
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan				0 Orang	0 Orang	560.000,00	0,00	0,00	-560.000,00 Ka	ab. Pesisir arat, Way Krui,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			0,00	DINAS KES
		(ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar										emua Kel/Desa	- (2)		Daya Manusia Meningkatkan				
															Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesel	natan Malaria	1	ı	1	1	1	I		<u> </u>	1		I		1	I	1		
		Jumlah orang yang				-	1280 Orang	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00 Ka	ab. Pesisir arat, Way Krui,	DAK NON EISIK-DANA	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			2.200.000,00	DINAS KES
		mendapatkan pelayanan kesehatan malaria									Ba Se	emua Kel/Desa	FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan				
													. JUNEONIAG		Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kese	 hatan Reproduksi					1									<u> </u>	<u> </u>		
	2.2, 3	Jumlah dokumen hasil				0 Dokumen	1 Dokumen	37.600.000,00	47.840.000,00	47.840.000,00	10.240.000,00 Ka	ab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan			47.840.000,00	DINAS KESE
		pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi									Ba	arat, Way Krui, emua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
															Meningkatkan Kualitas Sumber				
	1				1	1	- r			i		l l			Daya Manusia	1	1		1

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET REALISAS	SI PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN					//FI 011P0//		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT
NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENJA OP	TARGET RENJA	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI	TAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		REGIATAN		OPD TAHON 20.	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	bertamban/berkurang (10-12)	LUKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGO INDIKATIF (Kp)	JAWAB
	2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			0 Dokumen	1 Dokumen	89.280.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	-87.700.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.580.000,00	DINAS KESEHAT
1.0	2.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelan	jutusiaan			1						T					1		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan			-	1 Dokumen	0,00	24.200.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			24.200.000,00	DINAS KESEHAT
1.0	2.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			100 %	100 %	550.898.000,00	308.635.000,00	308.635.000,00	-242.263.000,00				Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		308.635.000,00	DINAS KESEHAT
1.0	2.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi	Kesehatan																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			0 Dokumen	0 Dokumen	6.660.000,00	0,00	0,00	-6.660.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHAT
2. 1.0	2.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif			100 %	100 %	455.430.000,00	335.148.200,00	335.148.200,00	-120.281.800,00							335.148.200,00	
1.0	2.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100 %	100 %	305.430.000,00	170.840.200,00	170.840.200,00	-134.589.800,00				Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		170.840.200,00	DINAS KESEHAT
1.0	2.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Superv	isi Pengembangan dan Pelaksar	naan Upaya Kesehatan Bersu	umber Daya Masyaraka	at (UKBM)		<u>'</u>				•					1		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			0 Dokumen	1 Dokumen	49.325.000,00	5.662.000,00	5.662.000,00	-43.663.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.662.000,00	DINAS KESEHAT
		PUSKESMAS KRUI SELATA	N					105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
1.0	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
1. 1.0	2.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan			100 %	100 %	67.184.826.478,00	69.734.403.918,00	70.642.931.280,00	10.914.577.440,00							78.099.403.918,00	
1.0	2.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100 %	100 %	42.306.923.839,00	49.404.749.118,00	50.313.276.480,00	8.006.352.641,00				Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		49.452.679.518,00	DINAS KESEHAT
1.0	2.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Keseh	l natan Ibu Hamil					I											
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			210 Orang	210 Orang	23.000.000,00	66.720.000,00	66.720.000,00	43.720.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			66.720.000,00	DINAS KESEHA
1.0	2.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesel	natan Ibu Bersalin	,				1											
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			116 Orang	116 Orang	11.440.000,00	0,00	0,00	-11.440.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHAT
1.0	2.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Keseh	natan pada Usia Pendidikan Das I	ar				ı		1								I	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			300 Orang	300 Orang	70.132.000,00	79.620.000,00	79.620.000,00	9.488.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			79.620.000,00	DINAS KESEHAT
1.0	2.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesel	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan	Jiwa Berat		-	280 Orang	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Barat, Krui Selatan, Semua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.600.000,00	DINAS KESEHA
			Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar									Kel/Desa	PUSKESMAS		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.0	2.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Keseh	 natan Orang Terduga Tuberkulos	l l		1											I	l	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			190 Orang	190 Orang	9.600.000,00	16.300.000,00	16.300.000,00	6.700.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			16.300.000,00	DINAS KESEHA
1.0	2.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Keseh	natan Orang dengan Risiko Terin	nfeksi HIV								1							
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			180 Orang	180 Orang	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHA

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR BERIODE REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA DAN I	ERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AN MAJU RENCANA ΓΑΗUN 2026	PERANGKAT DAERAH
IO KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENSTRA RENJA OPD	OPD TAHUN	TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRI	DRITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	_		OPD		EBELUM SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4 Jumlah Dokumen Hasil	5 6	7	8 9 Dokumen 6 Dokumen	10	11 165.422.000,00	12 165.422.000,00	-26.953.000,00	14 Kab. Pesisir	15 DANA ALOKASI	16	17 Moningkatkan	18	19	20 165.422.000,00	21 DINAS KESEHAT
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Dokumen 6 Dokumen	192.375.000,00	165.422.000,00	165.422.000,00	-26.953.000,00	Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			165.422.000,00	DINAS RESERATA
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesel	 hatan Kerja dan Olahraga															
		Jumlah Dokumen Hasil		-	1 Dokumen	0,00	5.060.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	Kab. Pesisir	DAK NON	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			5.060.000,00	DINAS KESEHAT
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesel	hatan Lingkungan	1		,	1											
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		1	Dokumen 2 Dokumen	19.130.000,00	10.560.000,00	10.560.000,00	-8.570.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.560.000,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Keseh	hatan											,				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1	Dokumen 3 Dokumen	17.588.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	2.412.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS KESEHAT
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesel	hatan Orang dengan Masalah Ko	esehatan Jiwa (ODMK)					1		1			1				
		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		-	1050 Orang	0,00	3.740.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.740.000,00	DINAS KESEHAT
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyak	kit Menular dan Tidak Menular	,										_		1		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		3	Dokumen 5 Dokumen	73.000.000,00	90.920.000,00	90.920.000,00	17.920.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			90.920.000,00	DINAS KESEHAT
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Keseha	tan Masyarakat	1														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		2	Dokumen 3 Dokumen	720.000.000,00	757.474.100,00	757.474.100,00	37.474.100,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			757.474.100,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puske	esmas	1														
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		2	Dokumen 7 Dokumen	175.210.000,00	178.858.000,00	178.858.000,00	3.648.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			178.858.000,00	DINAS KESEHAT
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tida	ak Diharapkan (Kejadian Ikutan I Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Pasca Imunisasi dan Pemberian	, 	Laporan 1 Laporan	13.200.000,00	0,00	0,00	-13.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHAT
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan keseh	natan orang dengan Tuberkulosis	s														
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		30	Orang 30 Orang	8.800.000,00	0,00	0,00	-8.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHAT
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan keseh	1	1	1				Τ		1	1		T		1		
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		-	1190 Orang	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.200.000,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesel	·	1					I		1							
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		1	Dokumen 1 Dokumen	23.200.000,00	25.400.000,00	25.400.000,00	2.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.400.000,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan	ı Ibu dan Anak	1			I		1		I .			I			<u> </u>	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		1	Dokumen 1 Dokumen	52.270.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-50.770.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.500.000,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelan	<u>l</u> njutusiaan	1	1				I		I	<u>l</u>						
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan		-	1 Dokumen	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			26.400.000,00	DINAS KESEHA
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		10	100 %	550.898.000,00	308.635.000,00	308.635.000,00	-242.263.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		308.635.000,00	DINAS KESEHAT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA		ı			CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		TAHUN 2026	PERANGK DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	OPD TAHUN 2024		ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)	T	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		IORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGI JAWAB
2	2	4	5	6	7	SEBELUM	SESUDAH 9	RKPD 2025	APBD 2025 11	RKPD PERUBAHAN 2025	13	14	15	NASIONAL 16	DAERAH 17	18	19	20	21
2	3	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3	0	·	1 Dokumen	1 Dokumen	6.660.000,00	0,00			1	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	10	19		DINAS KESE
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Yang Melaksanakan Kegiatan				100 %	100 %	455.430.000,00	335.148.200,00	335.148.200,00	-120.281.800,00				Daya Manusia			335.148.200,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Promotif dan Preventif Jumlah Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	305.430.000,00	170.840.200,00	170.840.200,00	-134.589.800,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		170.840.200,00	DINAS KESI
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Superv	isi Pengembangan dan Pelaksa Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	naan Upaya Ke	sehatan Bersumb	er Daya Masyaraka	1 Dokumen	2 Dokumen	34.365.000,00	7.862.000,00	7.862.000,00	-26.503.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.862.000,00	DINAS KES
	RSUD KH. MUHAMMAD THO) DHIR						105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00				·			111.178.638.818,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan				100 %	100 %	67.184.826.478,00	69.734.403.918,00	70.642.931.280,00	10.914.577.440,00							78.099.403.918,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	42.306.923.839,00	49.404.749.118,00	50.313.276.480,00	8.006.352.641,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		49.452.679.518,00	DINAS KE
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Keseha	tan Masyarakat																	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	2 Dokumen	2.362.025.999,00	2.464.896.818,00	2.464.896.818,00	102.870.819,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Way Suluh	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.464.896.818,00	DINAS KE
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Ruma	h Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	2 Dokumen	4.100.000.000,00	4.454.454.380,00	5.362.981.742,00	1.262.981.742,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Way Suluh	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.454.454.380,00	DINAS KE
	DINAS PEKERJAAN UMUM	DAN PENATAAN RUANG						60.096.675.417,00	150.291.125.102,00	104.343.024.482,00	44.246.349.065,00		1 AUAIC NOTION					66.065.900.900,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							60.096.675.417,00	150.291.125.102,00	104.343.024.482,00	44.246.349.065,00							66.065.900.900,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							60.096.675.417,00	150.291.125.102,00	104.343.024.482,00	44.246.349.065,00							66.065.900.900,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				92,50 Persen	92,50 Persen	6.630.750.900,00	6.217.184.400,00	5.962.346.900,00	501.650.000,00							7.132.400.900,00	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	46.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	-2.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Perangkat Daerah		49.800.000,00	DINAS PEI UMUM DA PENATAAI
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Peren	1									1	1							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			16.000.000,00	DINAS PEI UMUM DA PENATAAI
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan D	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0.00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Pembangunan			4.400.000,00	DINAS PE
		RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									3,50	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				UMUM DA PENATAA
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan [Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1		I	T	1		_			· 		
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			4.400.000,00	DINAS PEI UMUM DA PENATAAI
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan [1	,	<u> </u>		1 Dolover	1 Dolours	E 000 000 00	E 000 000 00	E 000 000 00	0.00	Kah Basisis	DANIA ALOKAGI		Domhongunga			E E00 000 00	DIMAGRE
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			5.500.000,00	DINAS PER UMUM DAN PENATAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA		FT 0605		DA011	CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN			_	DITAG	KELOMPOK		AN MAJU RENCANA ΓΑΗUN 2026	PERANGKA DAERAH
NODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	OPD TAHUN 2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PAGU INDIKATIF (Rp) APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIO NASIONAL	DAERAH	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGU JAWAB
2	3	4	5	6	7	SEBELUM 8	SESUDAH 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			5.500.000,00	
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikh Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	,	Kinerja SKPD		1 Laporan	1 Laporan	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			14.000.000,00	DINAS PEKE UMUM DAN PENATAAN
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	2.666.750.900,00	2.852.320.400,00	2.852.320.400,00	185.569.500,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Perangkat Daerah		2.768.100.900,00	DINAS PEK UMUM DAN PENATAAN
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjang	gan ASN																	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				448 Orang/ bulan	448 Orang/ bulan	2.653.250.900,00	2.838.820.400,00	2.838.820.400,00	185.569.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.753.250.900,00	DINAS PEKE UMUM DAN PENATAAN
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	•	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.600.000,00	DINAS PEKI UMUM DAN PENATAAN
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan	_ _aporan Keuangan Bulanan/ Triv	 wulanan/ Seme	esteran SKPD															
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	DINAS PEKE UMUM DAN PENATAAN
1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan A	Analisis Prognosis Realisasi Ango Jumlah Dokumen Pelaporan	garan			1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0.00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI		Reformasi Birokrasi			2 750 000 00	DINAS PEK
		dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				. Dokumen	, Donamon	2.000.000,000		2.000.000,00	3,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.7 00.000,00	UMUM DAN PENATAAN
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				100 %	100 %	60.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-50.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Perangkat Daerah		66.000.000,00	DINAS PEK UMUM DAN PENATAAN
1.03.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, da	_ n Pengendalian Barang Milik Da	_ ıerah pada SKF	PD															
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			66.000.000,00	DINAS PEK UMUM DAN PENATAAN
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kepegawaian dan sumber daya manusia				100 %	100 %	350.000.000,00	254.500.000,00	254.500.000,00	-95.500.000,00			-	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Perangkat Daerah		395.000.000,00	DINAS PEK UMUM DAN PENATAAN
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas be	1										T							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				71 Paket	2 Paket	150.000.000,00	54.500.000,00	54.500.000,00	-95.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	•	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			175.000.000,00	DINAS PEK UMUM DAN PENATAAN
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pe	gawai Berdasarkan Tugas dan F	ungsi			20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0.00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI -	-	Reformasi Birokrasi			220.000.000,00	DINAS PEK
		Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			220.000.000,00	UMUM DAN PENATAAN
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				100 %	100 %	1.628.000.000,00	1.636.914.000,00	1.382.076.500,00	-245.923.500,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Perangkat Daerah		1.790.500.000,00	DINAS PER UMUM DAN PENATAAN
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Insta		1			1		l I										•	
	Listrik/Penerangan Bangunar	Kantor Jumlah Paket Komponen			T	9 Paket	14 Paket	23.000.000,00	56.070.000,00	56.070.000,00	33.070.000,00	Kah Besista	DANA ALOKASI :	-	Reformasi Birokrasi			25.000.000,00	DINAS PER
		Jumian Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	14 Paket	23.000.000,00	56.070.000,00	56.070.000,00	33.070.000,00	Rab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	•	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	UMUM DA PENATAAI
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Pe	1																	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket	46 Paket	150.000.000,00	126.488.000,00	126.488.000,00	-23.512.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			165.000.000,00	DINAS PER UMUM DAI PENATAAN
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumal	T	· -																
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				40 Paket	10 Paket	50.000.000,00	72.500.000,00	72.500.000,00	22.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			55.000.000,00	DINAS PEK UMUM DAN PENATAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA		FT 200-		DAGU INTERIOR	CAPAIAN KINERJA DAN H	KERANGKA PENDANAAN				ODIT : C	KELOMPOK		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKA DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	OPD TAHUN 2024		ET 2025	DIADD COOL	PAGU INDIKATIF (Rp)	DVDD DEDUDALIAN 6005	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA -		ORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUN JAWAB
2	3	4	5	6	7	SEBELUM 8	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	13	14	15	NASIONAL 16	DAERAH 17	18	19	20	21
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik K	-			,			10		12	10	14	10	10	- ''		10	20	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			38.500.000,00	DINAS PEKER UMUM DAN PENATAAN RU
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	dan Penggandaan					1												
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	6 Paket	170.000.000,00	148.856.000,00	148.856.000,00	-21.144.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			187.000.000,00	DINAS PEKER UMUM DAN PENATAAN R
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan d	an Peraturan Perundang-undang	gan		1		1		1				1				1		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			660.000.000,00	DINAS PEKER UMUM DAN PENATAAN R
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			110.000.000,00	DINAS PEKER UMUM DAN PENATAAN R
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koo		1		1								1			_			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	500.000.000,00	510.000.000,00	255.162.500,00	-244.837.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			550.000.000,00	DINAS PEKER UMUM DAN PENATAAN RI
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				100 %	100 %	655.000.000,00	0,00	0,00	-655.000.000,00		-		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Perangkat Daerah		715.500.000,00	DINAS PEKER UMUM DAN PENATAAN R
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas	 													7.59 = 5,				
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			220.000.000,00	DINAS PEKER UMUM DAN PENATAAN RI
1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	T		1		1		T	T			T			T				
		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	•	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			220.000.000,00	DINAS PEKER UMUM DAN PENATAAN RU
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	0 Unit	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			99.000.000,00	DINAS PEKER UMUM DAN PENATAAN RI
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan M			1				T				T							
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	0 Unit	165.000.000,00	0,00	0,00	-165.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			176.500.000,00	DINAS PEKER UMUM DAN PENATAAN RI
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung kantor				100 %	100 %	465.000.000,00	740.500.000,00	740.500.000,00	275.500.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Perangkat Daerah		511.500.000,00	DINAS PEKEF UMUM DAN PENATAAN R
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikas	i, Sumber Daya Air dan Listrik																	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	4 Laporan	85.000.000,00	327.000.000,00	327.000.000,00	242.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			93.500.000,00	DINAS PEKER UMUM DAN PENATAAN RI
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan d					T			1			T							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	150.000.000,00	143.200.000,00	143.200.000,00	-6.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	•	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			165.000.000,00	DINAS PEKEI UMUM DAN PENATAAN R
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	1																	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	5 Laporan	230.000.000,00	270.300.000,00	270.300.000,00	40.300.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			253.000.000,00	DINAS PEKE UMUM DAN PENATAAN F
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik				100 %	100 %	760.000.000,00	678.950.000,00	678.950.000,00	-81.050.000,00		-		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Perangkat Daerah		836.000.000,00	DINAS PEKE UMUM DAN PENATAAN
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemelihara	an, Biaya Pemeliharaan, dan Pa	ajak Kendaraan	Perorangan Dina	s atau Kendaraan D														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	410.000.000,00	296.950.000,00	296.950.000,00	-113.050.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			451.000.000,00	DINAS PEKEF UMUM DAN PENATAAN R

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA					CAPAIAN KINEKJA DAN	KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKA DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	OPD TAHUN 2024	IARC	SET 2025	DVDD 2005	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		ORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGU JAWAB
2	3	4	5	6	7	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	13	14	15	NASIONAL 16	DAERAH 17	18	19	20	21
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemelihara	an, Biaya		0	,	0	9	10	11	12	10	14	13	10	17	10	19	20	21
	Pemeliharaan dan Perizinan	Alat Besar																	
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan				5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	162.000.000,00	162.000.000,00	-38.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			220.000.000,00	DINAS PEKER
		Perizinannya										Kecamatan, Semua Kel/Desa	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				PENATAAN R
															dan Pelayanan Publik Berkualitas				
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan	I Mesin Lainnya																	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			55.000.000,00	DINAS PEKEL
		Lainnya yang Dipelinara										Kecamatan, Semua Kel/Desa	` ′		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				PENATAAN F
															dan Pelayanan Publik Berkualitas				
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sa	Irana dan Prasarana Gedung Kal	⊥ ntor atau Bangu	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII							1								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			110.000.000,00	DINAS PEKE UMUM DAN
		atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi										Kecamatan, Semua Kel/Desa	, ,		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				PENATAAN F
		Dipolinara, Dironasilikasi										Comaa New Besa			dan Pelayanan Publik Berkualitas				
1.03.02	PROGRAM	Cakupan Sarana dan				45,00	45,00	9.200.000.000,00	5.462.261.436,00	9.181.719.436,00	920.000.000,00)						10.120.000.000,00	1
	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prasarana Sumber Daya Air Daerah				Persen	Persen												
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	persentase pengelolaan SDA dan bangunan pengaman				45 %	45 %	7.200.000.000,00	2.749.665.546,00	7.224.665.546,00	24.665.546,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat		7.920.000.000,00	DINAS PEKE UMUM DAN
	pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah	pantai pada wilayah sungai													yang Berkelanjutan Pembangunan				PENATAAN I
	Kabupatèn/Kota														Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				
1.03.02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi F	⊥ Peningkatan Kapasitas Kelembag	ı gaan Pengelolaa	an SDA Kewenan	ı gan Kabupaten/Ko	ta													
		Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA				1 Lembaga	0 Lembaga	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah			220.000.000,00	DINAS PEKEL
		Kewenangan Kabupaten/Kota yang										Kecamatan, Semua Kel/Desa	, ,		yang Berkelanjutan Pembangunan				PENATAAN R
		Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan													Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				
		Sinkronisasi																	
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sunga	T	T			0.5.404		4 000 000 000 00			100.074.000.00		T DA JAJ						DIVIA O DELCE
		Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				0,5 KM	0,1 KM	1.000.000.000,00	533.625.940,00	533.625.940,00	-466.374.060,00	Barat, Semua Kecamatan,	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			1.100.000.000,00	DINAS PEKE UMUM DAN PENATAAN F
												Semua Kel/Desa			Pembangunan Infrastruktur Daerah				PENATAAN K
															yang Berkelanjutan				
1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Pe		1							T	T								
		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang				1 KM	0,15 KM	5.000.000.000,00	2.216.039.606,00	6.691.039.606,00	1.691.039.606,00	Barat, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah			5.500.000.000,00	UMUM DAN
		Dibangun										Kecamatan, Semua Kel/Desa	(PAD) PAJAK KENDARAAN		yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah				PENATAAN R
													BERMOTOR (PKB)		yang Berkelanjutan				
1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan E	 sangunan Pengaman Pantai Lain	l nya										(1110)						
		Panjang Seawall dan				0,5 KM	0 KM	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00		DANA ALOKASI	-	Pembangunan			1.100.000.000,00	DINAS PEKE
		Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun										Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				UMUM DAN PENATAAN R
												Semua Kel/Desa			Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				
1.03.02.2.02	Pengembangan dan	Luas Jaringan daerah irigasi				45 %	45 %	2.000.000.000,00	2.712.595.890,00	1.957.053.890,00	-42.946.110,00	1		_	Pembangunan	Masyarakat		2.200.000.000,00	DINAS PEKER
	Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada	permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				UMUM DAN PENATAAN R
	Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1														Pembangunan Infrastruktur Daerah				
	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota														yang Berkelanjutan				
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi F	Permukaan																	
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1 KM	1 KM	1.000.000.000,00	2.712.595.890,00	1.957.053.890,00	957.053.890,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah			1.100.000.000,00	DINAS PEKE UMUM DAN
		Direhabilitasi										Kecamatan, Semua Kel/Desa			yang Berkelanjutan Pembangunan				PENATAAN R
													RIGASI-PENUG ASAN		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Ja	aringan Irigasi Permukaan																	
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang				1 KM	0 KM	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah			1.100.000.000,00	UMUM DAN
		Dioperasikan dan Dipelihara										Kecamatan, Semua Kel/Desa			yang Berkelanjutan Pembangunan				PENATAAN R
															Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap				43,50	43,50	2.000.000.000,00	5.814.390.600,00	5.814.390.600,00	200.000.000,00	1						2.200.000.000,00	,
	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					Persen	Persen												
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan	Proporsi rumah tangga				43,5 %	43,5 %	2.000.000.000,00	5.814.390.600,00	5.814.390.600,00	3.814.390.600,00	<u> </u> 		_	Pembangunan	Masyarakat		2.200.000.000,00	DINAS PEKER
1.00.00.2.01	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak,				10,0 70	10,0 70	2.000.000.000,00	0.011.000.000,00	0.0111000.000,00	0.01 1.000.000,00				Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Madyaranat		2.200.000.000,00	UMUM DAN PENATAAN R
	(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	perkotaan dan pedesaan													Pembangunan Infrastruktur Daerah				
1 02 02 2 04 0207	Ponyagunan Banasas 14.1."	Ikan Stratosi dan Televin Circu	Populadia a At	Minum (CDAM)											yang Berkelanjutan				
1.03.03.2.01.0025	renyusunan kencana, Kebija	kan, Strategi dan Teknis Sistem Jumlah Dokumen Rencana,	i-enyediaan Air	wiiiuiii (SPAM)		1 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kah Pesisir	DANA ALOKASI	-	Pembangunan			550.000.000,00	DINAS PEKE
		Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan				DOMUNICI	- 5 DONUMBH	300.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			330.000.000,00	UMUM DAN PENATAAN I
		Air Minum (SPAM) yang disusun										Semua Kel/Desa			Pembangunan Infrastruktur Daerah				
4.00			<u> </u>												yang Berkelanjutan				
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyedia	aan Air Minum (SPAM) Jaringan	Perpipaan			4.0	4.0	F00 000 000 000	F 044 000 000 000	E 044 000 000 1	F044000	Vot Desiri	DAK		Domboo			FF0 000 000 0	DIMAGES
1		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum				1,8 Liter/Detik	1,8 Liter/Detik	500.000.000,00	5.814.390.600,00	5.814.390.600,00	5.314.390.600,00	Hab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PEN	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah			550.000.000,00	DINAS PEKEI UMUM DAN PENATAAN R
		(SPAM) Iaringan Dorningan							1	Ť.	i .	i ivocamatan.			yang benkelanjulan	1	1		T LINATAAN K
		(SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan										Semua Kel/Desa	UGASAN PENDAPATAN		yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah				

		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN					- KELOMPOK		AN MAJU RENCANA FAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
NO	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PAGU INDIKATIF (Rp) APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRI NASIONAL	DAERAH	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				1,8 Liter/Detik	0 Liter/Detik	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4. 1.03.0	.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman				78,50 Persen	78,50 Persen	1.800.000.000,00	4.649.379.000,00	4.649.379.000,00	180.000.000,00							1.980.000.000,00	
1.03.0	.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air Limbah Domestik) Layak dan aman				78,5 %	78,5 %	1.800.000.000,00	4.649.379.000,00	4.649.379.000,00	2.849.379.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		1.980.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.0	.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengel	 olaan Air Limbah Domestik (SPA	LD) Terpusat Sk	kala Permukima	_ <u> </u> an										,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				432 M³/Hari	275 M³/Hari	1.000.000,000	4.649.379.000,00	4.649.379.000,00	3.649.379.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-PENUG ASAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.0	.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Peng	olahan Air Limbah Domestik (SP	ALD) Setempat					I			I								
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				25 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.0	.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebija	kan, Strategi dan Teknis Sistem I	Pengelolaan Air I	Limbah Domes	stik (SPALD)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5. 1.03.0	.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pelayanan sanitasi sub sektor drainase lingkungan				40,00 Persen	40,00 Persen	3.722.179.801,00	3.493.844.988,00	3.493.844.988,00	497.820.199,00							4.220.000.000,00	
1.03.0	.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat				40 %	40 %	3.722.179.801,00	3.493.844.988,00	3.493.844.988,00	-228.334.813,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		4.220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.0	.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainas	se Lingkungan	l l																
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				800 M	800 M	3.522.179.801,00	3.493.844.988,00	3.493.844.988,00	-28.334.813,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.0	.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sis	stem Drainase Lingkungan																	
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				200 Meter	0 Meter	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6. 1.03.0		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase ketersedia fasilitas pengurangan sampah di perkotaan				100 %	100 %	2.550.000.000,00	0,00	0,00	255.000.000,00							2.805.000.000,00	
1.03.0	.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang tersedia				100 %	0 %	2.550.000.000,00	0,00	0,00	-2.550.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		2.805.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.0	.07.2.01.0008	Optimalisasi TPA di Kawasan		Г		T					T	I		1				_		
			Jumlah TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi				1 UNIT	0 UNIT	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.0	.07.2.01.0009	Peningkatan TPA/TPST/SPA/	TPS-3R/TPS di Kawasan Strateg	gis Kabupaten/Ko	ota	T					ı			1						
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan				1 Ton/hari	0 Ton/hari	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.0	.07.2.01.0015	Pembangunan TPA/TPST/SP	A/TPS-3R/TPS di Kawasan Strat	tegis Kabupaten/l	/Kota						T	Γ						_		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun				1 Ton/hari	0 Ton/hari	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANC
7. 1.03.0	.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Prasarana Sarana dan Utilitas Dasar (PSU) Perkantoran Pemerintahan Daerah dalam skala mantap				80,00 Persen	80,00 Persen	5.300.000.000,00	62.950.166.696,00	24.164.946.076,00	530.000.000,00							5.830.000.000,00	
1.03.0	.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Ketersediaannya Gedung Pemerintah				80 %	80 %	5.300.000.000,00	62.950.166.696,00	24.164.946.076,00	18.864.946.076,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat dan Perangkat Daerah		5.830.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN					- KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
, KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	OPD TAHUN 2024		ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA —		ORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUN JAWAB
2	2	4	5	6	7	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	13	14	15	NASIONAL 16	DAERAH 17	18	19	20	21
2	3	Jumlah Bangunan Gedung	5	0	,	1	0	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00		DANA ALOKASI -	16	Pembangunan	10	19	220.000.000,00	
		untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang				Bangunan Gedung	Bangunan Gedung					Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			,	UMUM DAN PENATAAN RUA
		Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala										Semua Kel/Desa			Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				
1.03.08.2.01.0	0021 Pembangunan, Pemanfaata	an, Pelestariaan dan Pembongka	 ran Bangunan G	 sedung untuk Kep	 pentingan Strategis	 Daerah Kabup	 aten/Kota								yang berkelanjalan				
		Jumlah Dokumen				1 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000.000,00	62.800.166.696,00	24.014.946.076,00	19.014.946.076,00	Kab. Pesisir	PENDAPATAN -		Pembangunan			5.500.000.000,00	DINAS PEKERJA
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran										Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ASLI DAERAH (PAD) PAJAK		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan				UMUM DAN PENATAAN RUA
		Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis										Sellida Kel/Desa	KENDARAAN BERMOTOR		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				
		Daerah Kabupaten/Kota											(PKB)		yang berkelanjalan				
1.03.08.2.01.0	Penyelenggaraan Penerbita		(PBG), Sertifika	at Laik Fungsi (SI	LF), Surat Bukti Kep			(SBKBG), Rencana Teknis Pembo		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1		IBG	T				
		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat				1 Dokumen	30 Dokumen	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	PAJAK - KENDARAAN BERMOTOR		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS PEKERJA UMUM DAN PENATAAN RUA
		Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan										Semua Kel/Desa			Pembangunan Infrastruktur Daerah				
		Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran													yang Berkelanjutan				
		Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik,																	
		dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN	Rasio Kawasan yang				5,30	5,30	800.000.000,00	96.087.000,00	96.087.000,00	80.000.000,00							880.000.000,00	
	BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	memiliki ruang terbuka hijau (RTH)				Persen	Persen												
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataar Bangunan dan	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah				5,3 %	5,3 %	800.000.000,00	96.087.000,00	96.087.000,00	-703.913.000,00		-		Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat		880.000.000,00	DINAS PEKERJA UMUM DAN
	Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	kota/kawasan perkotaan													yang Berkelanjutan Pembangunan				PENATAAN RUA
	, i														Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				
1.03.09.2.01.0	0008 Penataan Bangunan dan Li	 ngkungan Kawasan Cagar Buday	a, Kawasan Par	iwisata, Kawasan	n Sistem Perkotaan	L Nasional dan I	L Kawasan Strate	egis Lainnya								1			
		Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar				1 Kawasan	1 Kawasan	300.000.000,00	96.087.000,00	96.087.000,00	-203.913.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)		Pembangunan Infrastruktur Daerah			330.000.000,00	DINAS PEKERJA UMUM DAN
		Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem										Kecamatan, Semua Kel/Desa	OWOW (DAO)		yang Berkelanjutan Pembangunan				PENATAAN RUA
		Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya													Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				
4 02 00 2 04 0	2040 Penusunan Penessa dan	yang Ditata Teknis Penataan Bangunan dan	inglungen di K	Sween Stretegie	Dooreh Kahumatan	/// ata													
1.03.09.2.01.0	Penyusunan Rencana dan	Jumlah Dokumen Rencana	Lingkungan di K	awasan Strategis	B Daeran Kabupaten	1 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kah Pesisir	DANA ALOKASI -		Pembangunan			550 000 000 00	DINAS PEKERJA
		dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan				Dokumen	o Bokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			330.000.000,00	UMUM DAN PENATAAN RUA
		yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah										Semua Kel/Desa			Pembangunan Infrastruktur Daerah				
4.00.40	DD00D4M	Kabupaten/Kota				40.50	40.50	05 000 000 000 00	50.470.000.740.00	40.000.047.740.00	0.500.000.000.00				yang Berkelanjutan				
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan				42,50 Persen	42,50 Persen	25.800.000.000,00	59.173.066.712,00	48.693.247.712,00	2.580.000.000,00							28.380.000.000,00	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan	Persentase kondisi mantap				42,5 %	42,5 %	25.800.000.000,00	59.173.066.712,00	48.693.247.712,00	22.893.247.712,00		-		Pembangunan	Masyarakat		28.380.000.000,00	DINAS PEKERJA
	Kabupaten/Kota	jalan kabupaten/kota				,		·	,	·					Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan				UMUM DAN PENATAAN RUAI
															Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				
1.03.10.2.01.0	0029 Penyusunan Rencana, Keb	 ijakan, Strategi dan Teknis Penge	mbangan Jaring	lan Jalan serta Po	erencanaan Teknis	Penvelenggar	aan Jalan dan .	Jembatan							yang berkelanjulan				
11001101210110	1 ony addition the reality, these	Jumlah Dokumen Rencana,					8 Dokumen	3.000.000.000,00	1.882.591.913,00	2.262.591.913,00	-737.408.087,00	Kab. Pesisir	PENDAPATAN -		Pembangunan			3.300.000.000,00	DINAS PEKERJA
		Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan										Barat, Semua Kecamatan,	ASLI DAERAH (PAD)		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				UMUM DAN PENATAAN RUA
		Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan										Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				
		Jembatan yang Disusun											(PKB)		yang berkelanjulan				
1.03.10.2.01.0	Penggantian Jembatan	1	1	1		Т	T	1				Τ			1	1	1		
		Jumlah Jembatan yang Diganti				1 Jembatan	0 Jembatan	2.500.000.000,00	0,00	0,00	-2.500.000.000,00	Barat, Semua	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)		Pembangunan Infrastruktur Daerah			2.750.000.000,00	DINAS PEKERJA UMUM DAN
												Kecamatan, Semua Kel/Desa			yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah				PENATAAN RUA
															yang Berkelanjutan				
1.03.10.2.01.0	Pembangunan Jalan											T	I						DINIAG DEIZED IA
1.03.10.2.01.0	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				1 KM	1 KM	2.000.000.000,00	3.489.582.295,00	3.489.582.295,00	1.489.582.295,00	Barat, Semua	OPSEN PKB -		Pembangunan Infrastruktur Daerah			2.200.000.000,00	UMUM DAN
1.03.10.2.01.0	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				1 KM	1 KM	2.000.000.000,00	3.489.582.295,00	3.489.582.295,00	1.489.582.295,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB -		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan			2.200.000.000,00	UMUM DAN
		Panjang Jalan yang Dibangun				1 KM	1 KM	2.000.000.000,00	3.489.582.295,00	3.489.582.295,00	1.489.582.295,00	Barat, Semua Kecamatan,	OPSEN PKB -		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			2.200.000.000,00	UMUM DAN
1.03.10.2.01.0		Dibangun										Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				UMUM DAN PENATAAN RUA
		Panjang Jalan yang Dibangun Panjang Jalan yang Direkonstruksi				1 KM	1 KM	5.000.000.000,00	3.489.582.295,00 38.544.251.962,00	3.489.582.295,00 16.684.432.962,00	1.489.582.295,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua	PENDAPATAN - ASLI DAERAH		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah				UMUM DAN PENATAAN RUA DINAS PEKERJA UMUM DAN
		Dibangun Panjang Jalan yang										Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir	PENDAPATAN - ASLI DAERAH (PAD) PAJAK		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan				UMUM DAN PENATAAN RUA DINAS PEKERJA UMUM DAN
		Dibangun Panjang Jalan yang										Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN - ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				UMUM DAN PENATAAN RUAI DINAS PEKERJA
		Dibangun Panjang Jalan yang										Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN - ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah Infrastruktur Daerah Infrastruktur Daerah				UMUM DAN PENATAAN RUA DINAS PEKERJA UMUM DAN
	0033 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi										Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN - ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DBH SAWIT		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah Infrastruktur Daerah Infrastruktur Daerah				UMUM DAN PENATAAN RUA DINAS PEKERJA UMUM DAN
1.03.10.2.01.0	0033 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi Panjang Jalan yang										Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DBH SAWIT OPSEN PKB OPSEN PAJAK KENDARAAN		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				DINAS PEKERJA UMUM DAN PENATAAN RUA
1.03.10.2.01.0	0033 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi				2 KM	3,5 KM	5.000.000,000	38.544.251.962,00	16.684.432.962,00	11.684.432.962,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DBH SAWIT OPSEN PKB OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan			5.500.000.000,00	DINAS PEKERJA UMUM DAN PENATAAN RUA DINAS PEKERJA UMUM DAN PENATAAN RUA DINAS PEKERJA UMUM DAN
1.03.10.2.01.0	0033 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi Panjang Jalan yang				2 KM	3,5 KM	5.000.000,000	38.544.251.962,00	16.684.432.962,00	11.684.432.962,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DBH SAWIT OPSEN PKB OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PENDAPATAN BAGI HASIL		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			5.500.000.000,00	DINAS PEKERJA UMUM DAN PENATAAN RUA DINAS PEKERJA UMUM DAN PENATAAN RUA DINAS PEKERJA UMUM DAN
1.03.10.2.01.0	0033 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi Panjang Jalan yang				2 KM	3,5 KM	5.000.000,000	38.544.251.962,00	16.684.432.962,00	11.684.432.962,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DBH SAWIT OPSEN PKB OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PENDAPATAN		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah Infrastruktur Daerah			5.500.000.000,00	DINAS PEKERJA DINAS PEKERJA UMUM DAN PENATAAN RUA DINAS PEKERJA UMUM DAN
1.03.10.2.01.0	Rekonstruksi Jalan 0034 Pemeliharaan Berkala Jala	Panjang Jalan yang Direkonstruksi Panjang Jalan yang Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				2 KM	3,5 KM	5.000.000,000	38.544.251.962,00	16.684.432.962,00	11.684.432.962,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DBH SAWIT OPSEN PKB OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah Infrastruktur Daerah			5.500.000.000,00	DINAS PEKERJA UMUM DAN PENATAAN RUA DINAS PEKERJA UMUM DAN PENATAAN RUA
1.03.10.2.01.0	Rekonstruksi Jalan 0034 Pemeliharaan Berkala Jala	Panjang Jalan yang Direkonstruksi Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala Jumlah Jembatan yang				2 KM	3,5 KM	5.000.000,000	38.544.251.962,00	16.684.432.962,00	11.684.432.962,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DBH SAWIT OPSEN PKB OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DANA ALOKASI -		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			5.500.000.000,00	DINAS PEKERJA UMUM DAN PENATAAN RUAI DINAS PEKERJA UMUM DAN PENATAAN RUAI DINAS PEKERJA UMUM DAN PENATAAN RUAI
1.03.10.2.01.0	Rekonstruksi Jalan 0034 Pemeliharaan Berkala Jala	Panjang Jalan yang Direkonstruksi Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				2 KM	3,5 KM	5.000.000,000	38.544.251.962,00 14.485.379.135,00	16.684.432.962,00 21.385.379.135,00	11.684.432.962,00 16.385.379.135,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DBH SAWIT OPSEN PKB OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah			5.500.000.000,00	DINAS PEKERJA UMUM DAN PENATAAN RUA DINAS PEKERJA UMUM DAN PENATAAN RUA DINAS PEKERJA UMUM DAN PENATAAN RUA
1.03.10.2.01.0	Rekonstruksi Jalan 0034 Pemeliharaan Berkala Jala	Panjang Jalan yang Direkonstruksi Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala Jumlah Jembatan yang				2 KM	3,5 KM	5.000.000,000	38.544.251.962,00 14.485.379.135,00	16.684.432.962,00 21.385.379.135,00	11.684.432.962,00 16.385.379.135,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DBH SAWIT OPSEN PKB OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DANA ALOKASI -		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			5.500.000.000,00	DINAS PEKERJA UMUM DAN PENATAAN RUA DINAS PEKERJA UMUM DAN PENATAAN RUA DINAS PEKERJA UMUM DAN PENATAAN RUA DINAS PEKERJA UMUM DAN

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET REALISAS	L CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN					KEI OMBOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKA
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA RENJA OP	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRI	ORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGU JAWAB
	REGIATAN		OPD TAHUN 20.	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertamban/Berkurang (10-12)	LUKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)	JAWAI
2	3	4 Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	5 6	7	8 6 Jembatan	9 6 Jembatan	4.000.000.000,00	43.929.513,00	12 43.929.513,00	-3.956.070.487,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	18	19	4.400.000.000,00	DINAS PEKE UMUM DAN PENATAAN I
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	T																
4 00 40 0 04 0040	Company Kondini Jalan (Jarahat	Jumlah Jembatan yang Dibangun			1 Jembatan	1 Jembatan	3.000.000.000,00	177.331.894,00	4.277.331.894,00	1.277.331.894,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			3.300.000.000,00	DINAS PEKE UMUM DAN PENATAAN
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembata	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya			100 KM	460,1 KM	100.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS PEK UMUM DAN PENATAAN
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																	
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin			10 KM	0 КМ	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			1.100.000.000,00	DINAS PEKE UMUM DAN PENATAAN
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA	Persentase Jasa Konstruksi yang handal			42,50 Persen	42,50 Persen	1.350.000.000,00	745.926.000,00	745.747.000,00	135.000.000,00							1.485.000.000,00	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	dan dapat diandalkan Terlatihnya tenaga terampil kontruksi			20 Orang	30 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	275.500.000,00	-24.500.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		330.000.000,00	DINAS PEKE UMUM DAN PENATAAN I
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Kons	truksi Kualifikasi Jabatan Operat Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	or, Teknisi atau Analis		30 Orang	30 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	275.500.000,00	-24.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			330.000.000,00	DINAS PEKE UMUM DAN PENATAAN
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi			100 %	100 %	350.000.000,00	279.926.000,00	369.247.000,00	19.247.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		385.000.000,00	DINAS PEK UMUM DAN PENATAAN
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informa	I si Jasa Konstruksi Cakupan Kal	bupaten/Kota				l							,				
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan			2 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00	279.926.000,00	369.247.000,00	119.247.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			275.000.000,00	DINAS PEKE UMUM DAN PENATAAN
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Infe	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan			1 Layanan Informasi	0 Layanan Informasi	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah			110.000.000,00	DINAS PEKE UMUM DAN PENATAAN
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase pengawasan dan evaluasi pekerjaan fisik			100 %	100 %	700.000.000,00	166.000.000,00	101.000.000,00	-599.000.000,00			-	yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		770.000.000,00	DINAS PEKE UMUM DAN PENATAAN
4 00 44 0 04 0005	B	The Reservoir and Reservoir and American												Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				
1.03.11.2.04.0005		urtib Pemanfaatan Produk Jasa k Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk			12 Bangunan Konstruksi	0 Bangunan Konstruksi	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			220.000.000,00	DINAS PEKE UMUM DAN PENATAAN
1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Ter	tib Penyelenggaraan, dan Tertib Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk		onstruksi	2 Lembaga	2 Lembaga	200.000.000,00	166.000.000,00	101.000.000,00	-99.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			220.000.000,00	DINAS PEKE UMUM DAN PENATAAN
1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Te	rtib Usaha Jasa Konstruksi Kab Jumlah Badan Usaha Jasa	upaten/Kota		4.5-2	0.0-1	000 000 000			-300.000.000,00	Ket 5	DANA ALOKASI		Dambarra			000 000	DINAS PEKE
		Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha			1 Badan Usaha	0 Badan Usaha	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			330.000.000,00	UMUM DAN PENATAAN
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog			35,00 Persen	35,00 Persen	943.744.716,00	1.688.818.270,00	1.541.315.770,00	89.755.284,00							1.033.500.000,00	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW			35 %	35 %	283.744.716,00	1.576.448.820,00	1.451.448.820,00	1.167.704.104,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		307.500.000,00	DINAS PEK UMUM DAN PENATAAN
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam r	angka Pelaksanaan Penataan R Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	121.594.200,00	74.094.200,00	49.094.200,00	Barat, Semua	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah			27.500.000,00	DINAS PEK UMUM DAN PENATAAN

		URUSAN / BIDANG		TARGET	REALISASI	PRAKIRAAN					CAPAIAN KINERJA DAN I	KERANGKA PENDANAAN							AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT
10	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKHIR PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD	CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIC	DRITAS	KELOMPOK SASARAN			DAERAH PENANGGUN
		KEGIATAN	REGIATAN	OPD	TAHUN 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	JAWAB
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS PEKERJ UMUM DAN PENATAAN RU
	12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupater	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1.438.966.370,00	1.361.466.370,00	1.261.466.370,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS PEKERJ UMUM DAN PENATAAN RU
1.03	12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Per	aturan Perundang-Undangan Bi	dang Penataan	Ruang		41	41	58.744.716,00	45 000 050 00	45,000,050,00	-42.856.466,00) Kab Basisis	PAJAK		Demberson			00,000,000,00	DINAS PEKER
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	1 Laporan	58.744.716,00	15.888.250,00	15.888.250,00	-42.856.466,00	Mab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KENDARAAN BERMOTOR	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			60.000.000,00	UMUM DAN PENATAAN RU
1.03	12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian materi teknis dari bantuan teknis RDTR				1 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			550.000.000,00	DINAS PEKER UMUM DAN PENATAAN RU
1.03.	12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupate	n/Kota																	
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			550.000.000,00	DINAS PEKER UMUM DAN PENATAAN RU
1.03	12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang				12 Bulan	12 Bulan	80.000.000,00	36.947.200,00	26.949.700,00	-53.050.300,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			88.000.000,00	DINAS PEKER. UMUM DAN PENATAAN RU
1.03	12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Ke	 sesuaian Kegiatan Pemanfaatan	Ruang						1						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				1 Layanan	1 Layanan	50.000.000,00	36.947.200,00	26.949.700,00	-23.050.300,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			55.000.000,00	DINAS PEKER UMUM DAN PENATAAN RU
1.03	12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Pro	1													1				
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			33.000.000,00	DINAS PEKER UMUM DAN PENATAAN RI
1.03	12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Ketaatan terhadap RTRW				35 %	35 %	80.000.000,00	75.422.250,00	62.917.250,00	-17.082.750,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			88.000.000,00	DINAS PEKER UMUM DAN PENATAAN R
1.03	12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Keses	 uaian Kegiatan Pemanfaatan Ri	 uang dan/atau p	ernyataan mandiri	i pelaku UMK				1						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			55.000.000,00	DINAS PEKER UMUM DAN PENATAAN R
1.03	12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan F	ungsi Forum Penataan Ruang	1			T	T.,					1			T ₋ .				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	75.422.250,00	62.917.250,00	32.917.250,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			33.000.000,00	DINAS PEKER UMUM DAN PENATAAN RI
			AT DAN KAWASAN PERMUKII	MAN					5.335.947.400,00	3.773.327.700,00	3.603.240.200,00	-1.732.707.200,00							6.398.465.030,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.134.797.000,00	3.653.327.700,00	3.502.240.200,00	-632.556.800,00							5.221.465.030,00	
1.04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							4.134.797.000,00	3.653.327.700,00	3.502.240.200,00	-632.556.800,00							5.221.465.030,00	
1.04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ketersediaan sarana dan prasarana pendukung administrasi perkantoran dan meningkatkan SDM Aparatur dalam mendukung pelayanan kinerja				92.50 persen	92.50 persen	2.379.797.000,00	2.477.667.700,00	2.369.386.700,00	431.942.030,00							2.811.739.030,00	
1.04	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan pelaporan kinerja Pwerangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Perumahan Rakyat dan Kawasan		13.640.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMA
1.04	01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Peren	L canaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.140.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAI
1.04	01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan I	I aporan Capaian Kinerja dan Ikh T	ntisar Realisasi k	Kinerja SKPD		1	, ,										1	1	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	,			4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN				WEI OFFE		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGK
NO KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Rertambah/Parkurana (40.42)	CHMDED DANA	PRI	ORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGILINDIVATIE (D.:)	PENANGGI JAWAB
	KEGIATAN		OPD	TAHUN 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	- Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	JAWA
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 14	15	16	17	18	19	20	21
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 persen	100 persen	1.742.407.400,00	1.923.827.700,00	1.923.827.700,00	181.420.300,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		2.116.210.470,00	DINAS PERUMAHA RAKYAT DA KAWASAN PERMUKIM
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjan	gan ASN												Publik Berkualitas				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan				14 Orang/b	14 Orang/b	1.736.907.400,00	1.918.327.700,00	1.918.327.700,00	181.420.300,00 Kab. Pesisir Barat, Pesisir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			2.110.160.470,00	DINAS PERUMAH
		Tunjangan ASN				uiari	ulan				Tengah, Pasar Krui	ONOW (DAO)		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				RAKYAT D. KAWASAN PERMUKIN
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Akhir Tahun S Jumlah Laporan Keuangan	SKPD			1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	T.	Reformasi Birokrasi			2.750.000,00	DINAS
		Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Laporan	Laporan	2.000.000,00	2.555.555,55	2.000.000,00	Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.700.000,00	PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN
1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Bulanan/ Triw	rulanan/ Semes	steran SKPD		1					T I		I					
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	DINAS PERUMAHA RAKYAT DA KAWASAN PERMUKIN
1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan	Analisis Prognosis Realisasi Angg Jumlah Dokumen Pelaporan	garan			1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			1.100.000,00	DINAS
		dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik				100 persen	0 persen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		20.000.000,00	DINAS PERUMAH. RAKYAT D. KAWASAN PERMUKIM
1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pe	gawai Berdasarkan Tugas dan Fu	ungsi										I					
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	0 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja				100 persen	100 persen	300.705.600,00	312.313.000,00	229.149.000,00	-71.556.600,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		327.176.160,00	DINAS PERUMAH, RAKYAT D, KAWASAN PERMUKIM
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Insta	lasi												1 ublik berkdantas				
	Listrik/Penerangan Banguna	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	0 Paket	4.809.600,00	0,00	0,00	-4.809.600,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.290.560,00	DINAS PERUMAHA RAKYAT DA KAWASAN PERMUKIMA
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik k	Cantor																
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	DINAS PERUMAHA RAKYAT DA KAWASAN PERMUKIM
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	1	I			1				1	T T		1				1	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	52.896.000,00	47.751.000,00	47.751.000,00	-5.145.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			58.185.600,00	DINAS PERUMAHA RAKYAT DA KAWASAN PERMUKIM
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan d	lan Peraturan Perundang-undang	an											T				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			13.200.000,00	DINAS PERUMAHA RAKYAT DA KAWASAN PERMUKIM
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	<u> </u>			1			<u> </u>	1			Ι		1	1	1	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	5 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	5.500.000,00	-5.500.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	DINAS PERUMAHA RAKYAT DA KAWASAN PERMUKIN
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koo	rdinasi dan Konsultasi SKPD											1				1	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	60 Laporan	195.000.000,00	216.562.000,00	163.898.000,00	-31.102.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			214.500.000,00	DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prsarana Pendukung Kinerja				100 persen	100 persen	158.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	-89.000.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		173.800.000,00	DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN
1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dina	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			88.000.000,00	DINAS PERUMAHA RAKYAT DA KAWASAN PERMUKIM

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA					CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK	PRAKIR	AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGK DAERAH
RODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	OPD TAHUN 2024	TARG SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PAGU INDIKATIF (Rp) APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRI: NASIONAL	ORITAS DAERAH	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGU JAWAB
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang				10 Unit	0 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua	DANA ALOKASI		Reformasi Birokrasi			16.500.000,00	DINAS
		Disediakan				10 Onit	O Onit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota/Kab, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi			16.500.000,00	PERUMAHA RAKYAT DA KAWASAN
												Semua Kel/Desa			dan Pelayanan Publik Berkualitas				PERMUKIMA
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan M					1											<u> </u>		
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	63.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	6.000.000,00	Kota/Kab,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			69.300.000,00	DINAS PERUMAHA RAKYAT DA
		Disediakan										Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				KAWASAN PERMUKIN
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang	g Persentase Pemenuhan				100 persen	100 persen	65.774.000,00	62.117.000,00	57.000.000,00	-8.774.000,00			-	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi	Aparatur Dinas		72.351.400,00	DINAS
	Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan Pendukung													dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			PERUMAHA RAKYAT DA KAWASAN
															dan Pelayanan Publik Berkualitas				PERMUKIN
1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan							T	I										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang				2 Laporan	2 Laporan	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			62.700.000,00	DINAS PERUMAHA RAKYAT DA
		Disediakan										Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				KAWASAN PERMUKIN
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Umum Kantor													Publik Berkualitas				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum				12 Laporan	0 Laporan	8.774.000,00	5.117.000,00	0,00	-8.774.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			9.651.400,00	DINAS PERUMAHA
		Kantor yang Disediakan										Kecamatan, Semua Kel/Desa			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				RAKYAT D KAWASAN
															dan Pelayanan Publik Berkualitas				PERMUKIN
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam Kondisi Baik				100 persen	100 persen	80.510.000,00	78.010.000,00	78.010.000,00	-2.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan		88.561.000,00	DINAS PERUMAH RAKYAT D
	T cincilitatian bacian	Dan													Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				KAWASAN PERMUKII
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemelihara	aan, Biaya Pemeliharaan, dan Pa	ajak Kendaraan F	Perorangan Dinas	atau Kendaraan D	inas Jabatan									Publik Berkualitas				
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau				2 Unit	2 Unit	64.000.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00	-1.500.000,00	Semua Kota/Kab,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			70.400.000,00	DINAS PERUMAH
		Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan										Semua Kecamatan,			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				RAKYAT D KAWASAN
		dibayarkan Pajaknya										Semua Kel/Desa			dan Pelayanan Publik Berkualitas				PERMUKIN
1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	T toucht Materian				411-9	0.11-7	4 000 000 00		1 000	1 000 000 00		DAMA ALOKAGI		Barta mana di Birat mana			1 100 000 00	DINAG
		Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	0 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota/Kab, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.100.000,00	PERUMAH RAKYAT D
												Kecamatan, Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				KAWASAN PERMUKIM
1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi S	 arana dan Prasarana Pendukung	 g Gedung Kantor	atau Bangunan L	ainnya.										T dom Domada				
													DANA ALOKASI						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung				12 Unit	12 Unit	15.510.000,00	15.510.000,00	15.510.000,00	0,00		UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			17.061.000,00	DINAS PERUMAH
		Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau				12 Unit	12 Unit	15.510.000,00	15.510.000,00	15.510.000,00	0,00	Kota/Kab, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi			17.061.000,00	PERUMAH. RAKYAT D. KAWASAN
		Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi										Kota/Kab, Semua	UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas				PERUMAHA RAKYAT DA KAWASAN
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau				88,67 persen	12 Unit 88,67 persen	15.510.000,00 675.000.000,00	15.510.000,00 193.910.000,00		0,00 82.801.000,00	Kota/Kab, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			757.801.000,00	PERUMAHA RAKYAT DA KAWASAN
1.04.02 1.04.02.2.01	PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pendataan Penyediaan dan	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Rasio Rumah Layak Huni Persentase Warga Negara				88,67	88,67 persen			168.938.000,00		Kota/Kab, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Masyarakat Kabupatan Basisis			PERUMAH/ RAKYAT D/ KAWASAN PERMUKIN
	PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Rasio Rumah Layak Huni Persentase Warga Negara Korban Bencana dan Atau yang Terkena Relokasi				88,67 persen	88,67 persen	675.000.000,00	193.910.000,00	168.938.000,00	82.801.000,00	Kota/Kab, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		757.801.000,00	PERUMAH, RAKYAT D, KAWASAN PERMUKIM DINAS PERUMAH, RAKYAT D, KAWASAN
	PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Rasio Rumah Layak Huni Persentase Warga Negara Korban Bencana dan Atau yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi				88,67 persen	88,67 persen	675.000.000,00	193.910.000,00	168.938.000,00	82.801.000,00	Kota/Kab, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah	Kabupaten Pesisir		757.801.000,00	PERUMAH. RAKYAT D. KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH. RAKYAT D.
1.04.02.2.01	PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Rasio Rumah Layak Huni Persentase Warga Negara Korban Bencana dan Atau yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Dorumahan .			88,67 persen	88,67 persen	675.000.000,00	193.910.000,00	168.938.000,00	82.801.000,00	Kota/Kab, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Kabupaten Pesisir		757.801.000,00	PERUMAH. RAKYAT D. KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH. RAKYAT D. KAWASAN
	PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Rasio Rumah Layak Huni Persentase Warga Negara Korban Bencana dan Atau yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni tensial sebagai Lokasi Relokasi Pe	Perumahan			88,67 persen	88,67 persen 0 persen	675.000.000,00	193.910.000,00	0,00	82.801.000,00	Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan	Kabupaten Pesisir		757.801.000,00	PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN
1.04.02.2.01	PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Rasio Rumah Layak Huni Persentase Warga Negara Korban Bencana dan Atau yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni tensial sebagai Lokasi Relokasi Penyediaan Pokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi	Perumahan			88,67 persen 100 persen	88,67 persen 0 persen	675.000.000,00 175.000.000,00	0,00	0,00	82.801.000,00 -175.000.000,00	Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Kabupaten Pesisir		757.801.000,00 192.500.000,00	DINAS PERMUKIN DINAS PERMUKIN DINAS PERMUKIN DINAS PERMUKIN DINAS PERMUKIN
1.04.02.2.01	PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Rasio Rumah Layak Huni Persentase Warga Negara Korban Bencana dan Atau yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni tensial sebagai Lokasi Relokasi Penyediah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang	Perumahan			88,67 persen 100 persen	88,67 persen 0 persen	675.000.000,00 175.000.000,00	0,00	0,00	82.801.000,00 -175.000.000,00	Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Kabupaten Pesisir		757.801.000,00 192.500.000,00	DINAS PERMUKIN DINAS PERMUKIN DINAS PERMUKIN DINAS PERMUKIN DINAS PERMUKIN DINAS PERMUKIN
1.04.02.2.01	PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Lahan-Lahan Pot	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Rasio Rumah Layak Huni Persentase Warga Negara Korban Bencana dan Atau yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni tensial sebagai Lokasi Relokasi Penyediasi Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Korban Bencana Kejadian Sebelu		ım Tertangani		88,67 persen 100 persen 1 Dokumen	88,67 persen 0 persen 0 Dokumen	675.000.000,00 175.000.000,00 25.000.000,00	0,00	0,00	82.801.000,00 -175.000.000,00 -25.000.000,00	Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Kabupaten Pesisir		757.801.000,00 192.500.000,00 27.500.000,00	DINAS PERMUKIN DINAS PERMUKIN DINAS PERMUKIN DINAS PERMUKIN DINAS PERMUKIN DINAS PERMUKIN DINAS PERMUKIN
1.04.02.2.01	PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Lahan-Lahan Pot	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Rasio Rumah Layak Huni Persentase Warga Negara Korban Bencana dan Atau yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni tensial sebagai Lokasi Relokasi Penyediaan Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Korban Bencana Kejadian Sebelu Jumlah Dokumen Data Relokasi Perumahan Korban Bencana Kejadian Sebelu		um Tertangani		88,67 persen 100 persen	88,67 persen 0 persen 0 Dokumen	675.000.000,00 175.000.000,00	0,00	0,00	82.801.000,00 -175.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Kabupaten Pesisir		757.801.000,00 192.500.000,00	DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN
1.04.02.2.01	PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Lahan-Lahan Pot	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Rasio Rumah Layak Huni Persentase Warga Negara Korban Bencana dan Atau yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni tensial sebagai Lokasi Relokasi Pelukuniah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Korban Bencana Kejadian Sebelu Jumlah Dokumen Data		um Tertangani		88,67 persen 100 persen 1 Dokumen	88,67 persen 0 persen 0 Dokumen	675.000.000,00 175.000.000,00 25.000.000,00	0,00	0,00	82.801.000,00 -175.000.000,00 -25.000.000,00	Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Kabupaten Pesisir		757.801.000,00 192.500.000,00 27.500.000,00	DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN
1.04.02.2.01	PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Lahan-Lahan Pot	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Rasio Rumah Layak Huni Persentase Warga Negara Korban Bencana dan Atau yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni tensial sebagai Lokasi Relokasi Penyediaan Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Korban Bencana Kejadian Sebelu Jumlah Dokumen Data Relokasi Perumahan Korban Bencana Kejadian Sebelu Jumlah Cokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		um Tertangani		88,67 persen 100 persen 1 Dokumen	88,67 persen 0 persen 0 Dokumen	675.000.000,00 175.000.000,00 25.000.000,00	0,00	0,00	82.801.000,00 -175.000.000,00 -25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Kabupaten Pesisir		757.801.000,00 192.500.000,00 27.500.000,00	DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN
1.04.02.2.01.0002	PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Lahan-Lahan Pot	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Rasio Rumah Layak Huni Persentase Warga Negara Korban Bencana dan Atau yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni tensial sebagai Lokasi Relokasi Penyediaan Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Korban Bencana Kejadian Sebelu Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani an Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data		ım Tertangani		88,67 persen 100 persen 1 Dokumen	88,67 persen 0 persen 0 Dokumen 0 Dokumen	675.000.000,00 175.000.000,00 25.000.000,00	0,00	0,000 0,000	82.801.000,00 -175.000.000,00 -25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Kabupaten Pesisir		757.801.000,00 192.500.000,00 27.500.000,00	DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKII DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKII DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKII DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKII
1.04.02.2.01.0002	PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Lahan-Lahan Pot	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Rasio Rumah Layak Huni Persentase Warga Negara Korban Bencana dan Atau yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni tensial sebagai Lokasi Relokasi Penyediaan Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Korban Bencana Kejadian Sebelu Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani an Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat		um Tertangani		88,67 persen 100 persen 1 Dokumen	88,67 persen 0 persen 0 Dokumen 0 Dokumen	675.000.000,00 175.000.000,00 25.000.000,00	0,00	0,000 0,000	82.801.000,00 -175.000.000,00 -25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Kabupaten Pesisir		757.801.000,00 192.500.000,00 27.500.000,00	DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKII DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKII DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKII DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKII DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKII
1.04.02.2.01.0002 1.04.02.2.01.0003 1.04.02.2.01.0004	PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Lahan-Lahan Pot Pengumpulan Data Rumah R	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Rasio Rumah Layak Huni Persentase Warga Negara Korban Bencana dan Atau yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni tensial sebagai Lokasi Relokasi Penyediaan Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Korban Bencana Kejadian Sebelu Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani an Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	umnya yang Belu			88,67 persen 100 persen 1 Dokumen	88,67 persen 0 persen 0 Dokumen 0 Dokumen	675.000.000,00 175.000.000,00 25.000.000,00	0,00	0,000 0,000	82.801.000,00 -175.000.000,00 -25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Kabupaten Pesisir		757.801.000,00 192.500.000,00 27.500.000,00	DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKII DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKII DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKII DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKII DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKII
1.04.02.2.01.0002	PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Lahan-Lahan Pot Pengumpulan Data Rumah R	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Rasio Rumah Layak Huni Persentase Warga Negara Korban Bencana dan Atau yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni tensial sebagai Lokasi Relokasi Penyediaan Rumah yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Korban Bencana Kejadian Sebelu Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani an Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah liik Masyarakat, Rumah Susun dar	umnya yang Belu			88,67 persen 100 persen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	88,67 persen 0 persen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen	675.000.000,00 175.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-25.000.000,00 -50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Kabupaten Pesisir		757.801.000,00 192.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00	DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN
1.04.02.2.01.0002	PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Lahan-Lahan Pot Pengumpulan Data Rumah R	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Rasio Rumah Layak Huni Persentase Warga Negara Korban Bencana dan Atau yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni tensial sebagai Lokasi Relokasi Penyediasi Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Korban Bencana Kejadian Sebelu Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani an Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah lik Masyarakat, Rumah Susun dar Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun,	umnya yang Belu			88,67 persen 100 persen 1 Dokumen	88,67 persen 0 persen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen	675.000.000,00 175.000.000,00 25.000.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-25.000.000,00 -50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- -	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Kabupaten Pesisir		757.801.000,00 192.500.000,00 27.500.000,00	DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN
1.04.02.2.01.0002 1.04.02.2.01.0003 1.04.02.2.01.0004	PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Lahan-Lahan Pot Pengumpulan Data Rumah R	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Rasio Rumah Layak Huni Persentase Warga Negara Korban Bencana dan Atau yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni tensial sebagai Lokasi Relokasi Penyediaan Rumah yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Korban Bencana Kejadian Sebelu Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani an Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah Jumlah Dokumen Data Rumah Dokumen Data Rumah Sewa Milik	umnya yang Belu			88,67 persen 100 persen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	88,67 persen 0 persen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen	675.000.000,00 175.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-25.000.000,00 -50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Kabupaten Pesisir		757.801.000,00 192.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00	DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN
1.04.02.2.01.0002 1.04.02.2.01.0003 1.04.02.2.01.0004	PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Lahan-Lahan Pot Pengumpulan Data Rumah R Pendataan Tingkat Kerusaka	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Rasio Rumah Layak Huni Persentase Warga Negara Korban Bencana dan Atau yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni tensial sebagai Lokasi Relokasi Penyediasi Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Korban Bencana Kejadian Sebelu Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani an Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah lik Masyarakat, Rumah Susun dar Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun,	n Rumah Khusu			88,67 persen 100 persen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	88,67 persen 0 persen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen	675.000.000,00 175.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	-25.000.000,00 -50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Kabupaten Pesisir		757.801.000,00 192.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00	DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN
1.04.02.2.01.0002 1.04.02.2.01.0003 1.04.02.2.01.0004	PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Lahan-Lahan Pot Pengumpulan Data Rumah R Pendataan Tingkat Kerusaka	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Rasio Rumah Layak Huni Persentase Warga Negara Korban Bencana dan Atau yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni tensial sebagai Lokasi Relokasi Pe Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Korban Bencana Kejadian Sebelu Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani an Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah lik Masyarakat, Rumah Susun dar Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	n Rumah Khusu			88,67 persen 100 persen 1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen	88,67 persen 0 persen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen	675.000.000,00 175.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	82.801.000,00 -175.000.000,00 -25.000.000,00 -50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Kabupaten Pesisir		757.801.000,00 192.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00	DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN
1.04.02.2.01.0002 1.04.02.2.01.0003 1.04.02.2.01.0004	PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Lahan-Lahan Pot Pengumpulan Data Rumah R Pendataan Tingkat Kerusaka	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Rasio Rumah Layak Huni Persentase Warga Negara Korban Bencana dan Atau yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni tensial sebagai Lokasi Relokasi Penyediaan Rumah yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Korban Bencana Kejadian Sebelu Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani an Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dar Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	n Rumah Khusu			88,67 persen 100 persen 1 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen	88,67 persen 0 persen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen	675.000.000,00 175.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	82.801.000,00 -175.000.000,00 -25.000.000,00 -50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Kabupaten Pesisir		757.801.000,00 192.500.000,00 27.500.000,00 55.000.000,00	DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERUMAH RAKYAT D KAWASAN PERMUKIN DINAS PERMUKIN DINAS PERMUKIN DINAS PERMUKIN DINAS PERMUKIN DINAS PERMUKIN DINAS PERMUKIN DINAS PERMUKIN DINAS PERMUKIN

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN I	ERANGKA PENDANAAN					- KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
O KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		RIORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUN JAWAB
			OPD		2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			,	_
2	3	4	5	6	7	8 4 Daluman	9 0 Daluman	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang				1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan			27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
		Terverifikasi										Sema Rei/Besa			Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				PERMUKIMAN
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Laporan	0 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00				Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		38.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Pe	enyediaan dan Rehabilitasi Ruma	ah kepada Mas	 yarakat/Sukarelav	 wan Tanggap Benca	ana									yang berkelanjulan				
		Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				30 Orang	0 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			38.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota				12 Bulan	12 Bulan	240.000.000,00	43.605.000,00	38.105.000,00	-201.895.000,00		-		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		267.965.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korb	pan Bencana													yang berkelanjulan				
		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				10 Unit Rumah	5 Unit Rumah	40.000.000,00	43.605.000,00	38.105.000,00	-1.895.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			47.965.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi K					40 Unit	O Linit	F0 000 000 00	0.00	0.00	-50.000.000,00	Kah Basisis	DANA ALOKASI -		Domhongunon			55.000.000,00	DINAS
		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				10 Unit Rumah	0 Unit Rumah	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Rab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			55.000.000,00	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah	bagi Korban Bencana Kabupate	en/Kota		1														
		Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah				10 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00		-		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima	 a Rumah bagi Korban Bencana k	 Kabupaten/Kota	<u> </u>											, 9				
		Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Cakupan Pengelolaan Rumah Susun				12 Bulan	12 Bulan	95.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	5.000.000,00		-		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		159.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Keleml	u bagaan dan Pemilik/Penghuni Ru	umah Susun										1						
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatar	Rumah Susun Umum dan/atau	Rumah Khusus	s	1							1	T T				T		
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Dokumen	0 Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			49.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	50.305.000,00	30.833.000,00	-59.167.000,00		-		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		55.335.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi F	l Pengendalian Pembangunan dan	n Pengembanga	an Perumahan	1							1				1			
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	,			12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	50.305.000,00	30.833.000,00	-59.167.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			55.335.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)				6 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00		-		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		16.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi F	L Penerbitan Sertifikat Kepemilikan	n Bangunan Geo	dung (SKBG)		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					1				1			
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi				6 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Barat, Semua	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)		Pembangunan Infrastruktur Daerah			16.500.000,00	PERUMAHAN
		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)										Kecamatan, Semua Kel/Desa			yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	ANDIN ,	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN					VEL OUTS		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGK
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RE	CAPAIAN ENJA OPD AHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRI	ORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGU JAWAB
	REGIATAN		OPD 17	AHUN 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	bertamban/berkurang (10-12)	LUKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGO INDIKATIF (RP)	JAWAB
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan	5	6	7	8 12 Laporan	9 0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	14	15	16	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	18 Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat	19	55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
	Permukiman	Permukiman													Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Balat			KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi F	enyelenggaraan Kawasan Perm Jumlah Laporan Hasil	nukiman			12 Longran	Olonoron	50,000,000,00	0.00	0.00	-50.000.000,00	Koh Danisir	DANA ALOKASI -		Dembergunen			FF 000 000 00	DINAS
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				12 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			55.000.000,00	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAI
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani				0,5 Ha	0 Ha	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00		-		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		115.500.000,00	DINAS PERUMAHAI RAKYAT DAI KAWASAN PERMUKIMA
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisa	 si Kebijakan Bidang PKP													yang zomolanjalan				
		Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi	г			1 Dokumen	0 Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			49.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMA
1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Ke	l ompok Swadaya Masyarakat di	Permukiman Kumuh	<u> </u>				L				1						1	
		Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				3 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			33.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAI
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi	Perumahan dan Permukiman K	íumuh																
		Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokası Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			33.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAI
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan				12 Bulan	12 Bulan	195.000.000,00	350.000.000,00	346.565.500,00	151.565.500,00		-		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		550.000.000,00	DINAS PERUMAHAI RAKYAT DAI KAWASAN PERMUKIMA
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi F	engendalian Penyelenggaraan	 Pemugaran/Peremaja	jaan Permukima	nan Kumuh			L										I.	
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				12 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah			55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMA
1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Pen	yelenggaraan Kawasan Permuk	kiman Kumuh												yang Berkelanjutan				
		Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	3 Dokumen	45.000.000,00	350.000.000,00	346.565.500,00	301.565.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			385.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMA
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Ka	l wasan Permukiman Kumuh																	
		Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				0,5 Ha	0 На	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			55.000.000,00	DINAS PERUMAHAI RAKYAT DAI KAWASAN PERMUKIMA
1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kav	vasan Permukiman Kumuh		<u> </u>															
		Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				0,5 Ha	0 Ha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			55.000.000,00	DINAS PERUMAHAI RAKYAT DAI KAWASAN PERMUKIMA
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN	Persentase Permukiman yang Tertata				55,00 persen	55,00 persen	365.000.000,00	381.090.000,00	381.090.000,00	109.199.000,00							474.199.000,00	
1.04.04.2.01	PERMUKIMAN KUMUH Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh				20 persen	20 persen	365.000.000,00	381.090.000,00	381.090.000,00	16.090.000,00				Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		474.199.000,00	PERUMAHA RAKYAT DA KAWASAN
															Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				PERMUKIMA
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Laya		adap Tumbuh dan Be	erkembangnya	a Permukiman Kun	1		nan Kumuh dengan Luas di Bawa					1					T	
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang				15 Unit Rumah	15 Unit Rumah	315.000.000,00	381.090.000,00	381.090.000,00	66.090.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			419.199.000,00	DINAS PERUMAHA RAKYAT DA KAWASAN PERMUKIMA
1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegah	Diperbaiki an Tumbuh dan Berkembangny	a Permukiman Kumu	uh								<u> </u>							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				30 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			55.000.000,00	DINAS PERUMAHA RAKYAT DA KAWASAN PERMUKIMA
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana sarana umum				50 persen	50 persen	365.000.000,00	250.660.000,00	236.260.000,00	92.226.000,00							457.226.000,00	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan Yang Sudah dilengkapi PSU	,			30 persen	30 persen	365.000.000,00	250.660.000,00	236.260.000,00	-128.740.000,00				Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah			457.226.000,00	DINAS PERUMAHA RAKYAT DA KAWASAN PERMUKIMA

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN KE	ERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		N MAJU RENCANA AHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PR	IORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				OPD		2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		1111021	(,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				2 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	Ba Ke	ab. Pesisir arat, Semua ecamatan, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan			55.000.000,00	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
1	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarar	na, dan Utilitas Umum di Peruma	han untuk Men	uniang Fungsi H	lunian										Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				PERMUKIMAN
- '	1.0 1.00.2.0 1.0002	r onyoulaur r rabarana, carar	Jumlah Lokasi Perumahan				1 Lokasi	1 Lokasi	100.000.000,00	130.000.000,00	115.600.000,00	15.600.000,00 Ka	ab. Pesisir	INSENTIF	-	Pembangunan			143.000.000,00) DINAS
			yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian									Ba Ke	arat, Semua ecamatan, emua Kel/Desa	FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi d	dalam rangka Penyediaan Prasar	ana, Sarana, da	an Utilitas Umum	n Perumahan	T							T T			T			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				12 Laporan	0 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	Ba Ke	ab. Pesisir arat, Semua ecamatan, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			66.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana	a, dan Utilitas Umum di Perumaha	an untuk Menur	njang Fungsi Hur	nian											ı			
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan				1 Lokasi	2 Lokasi	100.000.000,00	120.660.000,00	120.660.000,00	Ke	ab. Pesisir arat, Semua ecamatan, emua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			132.726.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaa	an Prasarana, Sarana, dan Utilita	s Umum di Per	rumahan		T							T T			T			
			Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				1 Lokasi	0 Lokasi	40.000.000,00	0,00	0,00	Ke	ab. Pesisir arat, Semua ecamatan, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			44.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	1.04.05.2.01.0009	Kerja Sama Penyediaan/Peng	gelolaan PSU Perumahan																	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan				1 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	Ke	ab. Pesisir arat, Semua ecamatan, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah			16.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN							1.201.150.400,00	120.000.000,00	101.000.000,00	-1.100.150.400,00				yang Berkelanjutan			1.177.000.000,00	
2	2.10	PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN							1.201.150.400,00	120.000.000,00	101.000.000,00	-1.100.150.400,00							1.177.000.000,00	,
		BIDANG PERTANAHAN					5000 1616		5 0 000 000	•										
. 2	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reformasi Agraria				5000 KK	5000 KK	50.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00							55.000.000,00	
2	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Sengketa Tanah				12 Bulan	0 Bulan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus	Pertanahan dalam 1 (satu) Daer	⊥ ah Kabupaten/⊦	 Kota				I		L	L		1		I				
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	0 Berita Acara	25.000.000,00	0,00	0,00	Ke	ab. Pesisir arat, Semua ecamatan, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanaha	an dalam 1 (satu) Daerah Kabup	aten/Kota					-			,								
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	Ke	ab. Pesisir arat, Semua ecamatan, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rasio Luas Tanah yang Disediakan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya				11,20 persen	11,20 persen	900.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00							990.000.000,00	
2	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Kerugian				12 Bulan	0 Bulan	900.000.000,00	0,00	0,00	-900.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		990.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi P	 Penyelesaian Masalah Ganti Keru	 ugian dan Santu	 unan Tanah untu	 uk Pembangunan olel	 h Pemerintah [Daerah Kabupaten	Kota							, s.i.g Domoidingutari	<u> </u>			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah					0 Dokumen	900.000.000,00	0,00	0,00	Ke	ab. Pesisir arat, Semua ecamatan, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			990.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
. 2	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH	Kabupaten/Kota Cakupan Pemanfaatan tanah kosong				2,95 persen	2,95 persen	251.150.400,00	120.000.000,00	101.000.000,00	-119.150.400,00							132.000.000,00	
2	2.10.08.2.02	KOSONG Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Luas Lahan Bersertifikat				100 persen	100 persen	251.150.400,00	120.000.000,00	101.000.000,00	-150.150.400,00			-		Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		132.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Ta	lnah Kosong		<u> </u>											Jany Demelanjulan				
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				48 Laporan	297 Laporan	251.150.400,00	120.000.000,00	101.000.000,00	Ke	ab. Pesisir arat, Semua ecamatan, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah			132.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
- 1							1							1		yang Berkelanjutan				

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN							AN MAJU RENCANA FAHUN 2026	PERANGKAT
IO KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENJA OPD	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PR	RIORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	RESIATAN		OPD TAHON 2023		EBELUM SESUDAI	H RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Dertainban/Derkurang (10-12)	LONAGI	SONIBLIK DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	TAGO INDIKATII (KP)	OAWAD
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN	4	5 6	7	8 9	4.912.720.800,00	5.679.543.400,00	12 5.623.052.100,00	710.331.300,00	14	15	16	17	18	19	5.404.652.880,00	21
1.05	DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN					4.912.720.800,00	5.679.543.400,00	5.623.052.100,00	710.331.300,00							5.404.652.880,00	
1.05.01	MASYARAKAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah		10	00 Persen 100 Perse	en 2.839.331.800,00	2.840.175.800,00	2.817.184.500,00	284.593.180,00							3.123.924.980,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu		10	00 Persen 100 Perse	n 4.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur		4.950.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perenc	anaan Perangkat Daerah											Publik Berkualitas				
1.00.01.2.01.0001	T citydddiai Doranici i T ciche	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		11	Dokumen 1 Dokume	n 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJ DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.01.0006	,	aporan Capaian Kinerja dan Ikht Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tisar Realisasi Kinerja SKPD	41	Laporan 4 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	K	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu		10	00 Persen 100 Perse	n 2.283.131.800,00	2.153.960.800,00	2.153.960.800,00	-129.171.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.512.104.980,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjanga	an ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			7 Orang/b 17 Orang/l an ulan	b 2.278.231.800,00	2.151.060.800,00	2.151.060.800,00	K	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.506.054.980,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJ, DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan L	aporan Keuangan Akhir Tahun S Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		11	Laporan 1 Laporan	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	SATUAN POLIS PAMONG PRAJ DAN PEMADAN KEBAKARAN
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan L	aporan Keuangan Bulanan/ Triw	ulanan/ Semesteran SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD		12	2 Laporan 12 Lapora	n 2.000.000,00	0,00	0,00	K	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	SATUAN POLIS PAMONG PRAJ DAN PEMADAN KEBAKARAN
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Al	nalisis Prognosis Realisasi Angg Jumlah Dokumen Pelaporan	garan	41	Dokumen 4 Dokume	n 1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0.00 k	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI		Reformasi Birokrasi			1 100 000 00	SATUAN POLIS
		dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		41	Dokumen 4 Dokume	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	E	Rab. Fesisii Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.100.000,00	PAMONG PRA DAN PEMADAN KEBAKARAN
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		10	00 Persen 100 Perse	n 63.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	237.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		63.800.000,00	SATUAN POLIS PAMONG PRAJ DAN PEMADAN KEBAKARAN
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas bes		I		1												
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		60) Paket 60 Paket	63.000.000,00	0,00	0,00	K	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			52.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJ, DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Peg	awai Berdasarkan Tugas dan Fu	ungsi		0.000	0.00	200 200 200 20	200 200 200 20	000 000 000 00	Zah. Basisis	BANA ALOKAGI		Deference i Birolence i			44,000,000,00	CATUAN DOLLO
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Orang 2 Orang	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	K	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	SATUAN POLIS PAMONG PRAJ DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja		10	00 Persen 100 Perse	n 128.000.000,00	76.515.000,00	53.523.700,00	-74.476.300,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur		140.800.000,00	SATUAN POLIS PAMONG PRA DAN PEMADAN KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instala Listrik/Penerangan Bangunan												Publik Berkualitas				
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Ka	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		11	Paket 1 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	K	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.00.01.2.00.0004	1 onyoulaan Danan Logistik Ka	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		11	Paket 1 Paket	24.000.000,00	0,00	0,00	K	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			26.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

		URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR REPLICATE CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
NO	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENSTRA RENJA OPD	OPD TAHUN	TARGE	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				OPD TAHUN 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL DAERAH			(
1	2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 17	18	19	20	21
1.	05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	26.500.000,00	26.515.000,00	26.515.000,00	1	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birol dan Pelayanan Publik Berkuali Reformasi Birol dan Pelayanan Publik Berkuali	as crasi		29.150.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.	05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	•		1	1		<u>'</u>							'			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			11 Laporan	11 Laporan	5.500.000,00	0,00	0,00	1	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birol dan Pelayanan Publik Berkualit Reformasi Birol dan Pelayanan Publik Berkualit	as trasi		6.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.	05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koor	dinasi dan Konsultasi SKPD															
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	50.000.000,00	27.008.700,00	1	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birol dan Pelayanan Publik Berkuali Reformasi Birol dan Pelayanan Publik Berkuali	as crasi		77.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.	05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja			100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			- Reformasi Birol dan Pelayanan Publik Berkualii Reformasi Birol dan Pelayanan Publik Berkualii	as crasi		60.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.	05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birol dan Pelayanan Publik Berkualit Reformasi Birol dan Pelayanan Publik Berkualit	as trasi		5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.	05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Me	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang			5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00		Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birol dan Pelayanan			55.000.000,00	PAMONG PRAJA
			Disediakan									Kecamatan, Semua Kel/Desa		Publik Berkuali Reformasi Birol dan Pelayanan Publik Berkuali	crasi			DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.	05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan prasarana pendukung kinerja			100 Persen	100 Persen	117.700.000,00	117.700.000,00	117.700.000,00	0,00			Reformasi Birol dan Pelayanan Publik Berkuali Reformasi Birol dan Pelayanan Publik Berkuali	as crasi		129.470.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.	05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi	, Sumber Daya Air dan Listrik								I .			<u> </u>				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birol dan Pelayanan Publik Berkuali Reformasi Birol dan Pelayanan Publik Berkuali	as trasi		9.570.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.	05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan d	an Perlengkapan Kantor			<u> </u>												
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	107.000.000,00	107.000.000,00	107.000.000,00	E P	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birol dan Pelayanan Publik Berkualii Reformasi Birol dan Pelayanan Publik Berkualii	as trasi		117.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.	05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan I	Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan			12 Laporan	12 Longran	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0.00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	- Reformasi Birol	·raai		2.200.000,00	SATUAN POLISI
			Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								E P	Rab. Pesisii Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	dan Pelayanan Publik Berkuali Reformasi Birol dan Pelayanan Publik Berkuali	as crasi as			PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dalam kondisi baik			100 Persen	100 Persen	193.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	-3.000.000,00			- Reformasi Birol dan Pelayanan Publik Berkuali Reformasi Birol dan Pelayanan Publik Berkuali	as crasi		212.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.	05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemelihara	T	ajak Kendaraan Perorangan Dina	as atau Kendaraan Di									1	. 1			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birol dan Pelayanan Publik Berkualii Reformasi Birol dan Pelayanan Publik Berkualii	as trasi		49.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.	05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemelihara	T	dan Perizinan Kendaraan Dinas	Operasional atau Lap	_								1	. 1			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			8 Unit	8 Unit	145.000.000,00	142.000.000,00	142.000.000,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birol dan Pelayanan Publik Berkuali Reformasi Birol dan Pelayanan Publik Berkuali	as trasi		159.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.	05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan I				F11.5	F11.9				I	K-t 5 ::	BANK A. 2000 -					OATHAN ESTATE
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5 Unit	5 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	E P	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birol dan Pelayanan Publik Berkuali Reformasi Birol dan Pelayanan Publik Berkuali	as trasi		3.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2. 1.	05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			100 Persen	100 Persen	1.452.729.000,00	1.279.707.600,00	1.257.707.600,00	145.272.900,00						1.598.001.900,00	
1.	05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gangguan trantibum yang tertangani			100 %	100 %	1.348.579.000,00	1.194.675.000,00	1.194.675.000,00	-153.904.000,00			- Reformasi Birol dan Pelayanan Publik Berkualii Reformasi Birol dan Pelayanan Publik Berkualii	as crasi		1.483.436.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	05.02.2.01	Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gangguan trantibum yang tertangani Masyarakat dalam rangka Keter	ntraman dan Ketertiban Umum		100 %	100 %	1.348.579.000,00	1.194.675.000,00	1.194.675.000,00	-153.904.000,00			dan Pelayanan Publik Berkuali Reformasi Birol dan Pelayanan	as crasi		1.483.436.900	0,00

1 2 1.05.02.2.01.0006 Ke	Pencegahan Gangguan Keter	A Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum An Kemitraan dalam Teknik Pend Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Iteraman dan Ketertiban Umum I Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Itetenteraman dan Ketertiban Um			uan Ketentraman d	SEBELUM SI 8 12 Dokumen Do dan Ketertiban Umi 2 Dokumen 2	9 2 Pokumen	RKPD 2025 10 218.079.000,00 7.840.000,00	PAGU INDIKATIF (Rp) APBD 2025 11 0,00 11.280.000,00	12 0,00	Bertambah/Berkurang (10-12) 13 14 -218.079.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semu Kecamatan, Semua Kel/l	15 DANA ALOKASI UMUM (DAU)	NASIONAL 16	DAERAH 17 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	KELOMPOK SASARAN 18	TARGET 19	20 239.886.900,00	21 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0015 Pe	3 Kerja Sama antar Lembaga da	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum an Kemitraan dalam Teknik Pend Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan steraman dan Ketertiban Umum I	5 cegahan dan Pel	nanganan Ganggu	7 uan Ketentraman d	8 12 Dokumen Do	9 2 Pokumen	10 218.079.000,00	0,00	12	-218.079.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semu Kecamatan,	15 DANA ALOKASI UMUM (DAU)		17 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	18		20	21 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0015 Pe	Kerja Sama antar Lembaga da Pencegahan Gangguan Keter	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum an Kemitraan dalam Teknik Pend Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan steraman dan Ketertiban Umum I			uan Ketentraman d	dan Ketertiban Umi 2 Dokumen 2	2 Pokumen	218.079.000,00	0,00		-218.079.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semu Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- 16	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	18	19		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0015 Pe	Pencegahan Gangguan Keter	Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum an Kemitraan dalam Teknik Pend Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan steraman dan Ketertiban Umum I Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			uan Ketentraman d	dan Ketertiban Umi 2 Dokumen 2	num			0,00	Barat, Semu Kecamatan,	a UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas			239.886.900,00	PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0015 Pe	Pencegahan Gangguan Keter	Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum an Kemitraan dalam Teknik Pend Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan steraman dan Ketertiban Umum I Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				2 Dokumen 2		7.840.000,00	11.280.000,00)esa		Publik Berkualitas				
1.05.02.2.01.0015 Pe	Pencegahan Gangguan Keter	Umum an Kemitraan dalam Teknik Pend Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Iteraman dan Ketertiban Umum I Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				2 Dokumen 2		7.840.000,00	11.280.000,00			l	•	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.02.2.01.0015 Pe	Pencegahan Gangguan Keter	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan teraman dan Ketertiban Umum I Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				2 Dokumen 2		7.840.000,00	11.280.000,00					Publik Berkualitas				
		Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan teraman dan Ketertiban Umum I Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Melalui Deteksi I	Dini dan Cegah Di	iini, Pembinaan dar		Dokumen	7.840.000,00	11.280.000,00				_					
		antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Iteraman dan Ketertiban Umum I Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Melalui Deteksi I	Dini dan Cegah Di	iini, Pembinaan dar	Page 1				11.280.000,00	3.440.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			8.624.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Kejahatan Iteraman dan Ketertiban Umum I Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Melalui Deteksi [Dini dan Cegah Di	iini, Pembinaan dar	Part I					Kecamatan, Semua Kel/l	` ′		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				DAN PEMADAM KEBAKARAN
		teraman dan Ketertiban Umum I Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Melalui Deteksi I	Dini dan Cegah Di	ini, Pembinaan dar	- Dame I	l l							dan Pelayanan Publik Berkualitas				
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Melalui Deteksi [Dini dan Cegah Di	ini, Pembinaan dar	- D												
1.05.02.2.01.0016 Pe	Penindakan Atas Gangguan k	Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan								T		T	T	T				
1.05.02.2.01.0016 Pt	Penindakan Atas Gangguan k	Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		1		12 laporan 12	2 laporan	1.111.000.000,00	1.172.425.000,00	1.172.425.000,00	61.425.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semu Kecamatan.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.222.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
1.05.02.2.01.0016 P	Penindakan Atas Gangguan k	Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan									Semua Kel/l)esa		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				KEBAKARAN
1.05.02.2.01.0016 P	Penindakan Atas Gangguan k		I											Publik Berkualitas				
	3000		lum berdasarkar	 n Perda dan Perka	ada Melalui Penerti	 iban dan Penangai	anan Unjuk Rasa da	an Kerusuhan Massa										
		Jumlah Laporan Gangguan					Laporan	3.060.000,00	5.970.000,00	5.970.000,00	2.910.000,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			3.366.000,00	SATUAN POLISI
		Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda					·				Barat, Semu Kecamatan,	, , ,		dan Pelayanan Publik Berkualitas				PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
		dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan									Semua Kel/I	Desa		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				KEBAKARAN
		Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan												Publik Berkualitas				
4.05.00.004.0047		Penindakan	Danet was Dan	rah dan Barturan	leanala da suah													
1.05.02.2.01.0017 Pe	enyediaan Layanan dasar da	alam rangka Dampak Penegakar Jumlah Laporan Penyediaan	r Feraturan Dae	ran dan Perturan I	kepala daerah	1 Laporan 1	Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	T_	Reformasi Birokrasi			E E00 000 00	SATUAN POLISI
		Layanan Dampak Penegakan Perda dan				Гароган	Laporari	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Barat, Semu Kecamatan,		-	dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
		Perkada yang Terlayaniumlah Laporan									Semua Kel/l	Desa		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				KEBAKARAN
		pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang												Publik Berkualitas				
		ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang																
		Terlayani																
1.05.02.2.01.0018 Pe	Pengadaan dan Pemeliharaar	n Sarana dan Prasarana Ketentra	aman dan Ketert T	iban Umum				T		T			T		Γ			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan				8 Unit 8	Unit	3.600.000,00	0,00	0,00	Barat, Semu		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			3.960.000,00	PAMONG PRAJA
		Ketertiban Umum yang Tersedia									Kecamatan, Semua Kel/l			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				DAN PEMADAM KEBAKARAN
														dan Pelayanan Publik Berkualitas				
	Penegakan Peraturan	Persentase Penegakan				100 Persen 10	00 Persen	95.000.000,00	75.882.600,00	60.882.600,00	-34.117.400,00		-	Reformasi Birokrasi	Mayarakat		104.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Pf	Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Perda dan Pergub yang Terlaksana												dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				DAN PEMADAM KEBAKARAN
														dan Pelayanan Publik Berkualitas				REBARARAN
1.05.02.2.02.0010 So	Sosialisasi Penegakan Peratu	 ran Daerah dan Peraturan Kepa	 a Daerah											T dom bornada				
		Jumlah Laporan Hasil				7 Laporan 7	Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			44.000.000,00	SATUAN POLISI
		Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan									Barat, Semu Kecamatan,			dan Pelayanan Publik Berkualitas				PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
		Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									Semua Kel/I)esa		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				KEBAKARAN
1.07.00.00.001			17 1 1											Publik Berkualitas				
1.05.02.2.02.0011 Pe	Penanganan Atas Pelanggara	an Peraturan Daerah dan Peratu Jumlah Laporan	ran Kepala dae	ran		40 Laporan 40	0 Lanoran	20.000.000,00	7.982.600,00	7.982.600,00	-12.017.400,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI		Reformasi Birokrasi			22 000 000 00	SATUAN POLISI
		Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan				40 Laporari 40	0 Laporan	20.000.000,00	7.982.000,00	7.982.600,00	Barat, Semu Kecamatan,		-	dan Pelayanan Publik Berkualitas			22.000.000,00	PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
		Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP									Semua Kel/l	Desa		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				KEBAKARAN
														Publik Berkualitas				
1.05.02.2.02.0012 Pe	Pengawasan Atas Kepatuhan	Terhadap Pelaksanaan Peratura	an Daerah dan F	Peraturan Kepala I	Daerah					1								
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan				40 Laporan 40	0 Laporan	35.000.000,00	67.900.000,00	52.900.000,00	17.900.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			38.500.000,00	PAMONG PRAJA
		yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap									Kecamatan, Semua Kel/l) Desa		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan												dan Pelayanan Publik Berkualitas				
1.05.02.2.03 Pe	Pembinaan Penvidik	Kepala Daerah				100 Persen 10	00 Persen	9.150.000,00	9.150.000,00	2.150.000,00	-7.000.000,00			Reformasi Birokrasi	Aparatur		10.005.000.00	SATUAN POLISI
Pe	Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	persentase pembinaan PPNS Kabupaten				100 Perseil 10	oo reiseii	9.150.000,00	9.130.000,00	2.130.000,00	-7.000.000,00		-	dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatui		10.065.000,00	PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
No.	rabupater//rota													Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				KEBAKARAN
														Publik Berkualitas				
1.05.02.2.03.0006 Pe	Pengembangan Kapasitas da	n Karier PPNS	ı			1												
		Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan				1 Laporan 1	Laporan	9.150.000,00	9.150.000,00	2.150.000,00	-7.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			10.065.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak									Kecamatan, Semua Kel/l	Desa		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Perda												dan Pelayanan Publik Berkualitas				
3. 1.05.04 PF	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,	Persentase Pelayanan				100 Persen 10	00 Persen	620.660.000,00	1.559.660.000,00	1.548.160.000,00	62.066.000,00						682.726.000,00	
PE	PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	Pemadaman dan Penyelamatan kebakaran																
PE	EBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN																	
	Pencegahan, Pengendalian,							620.660.000,00	1.559.660.000,00	1.548.160.000,00	927.500.000,00		_	Reformasi Birokrasi	Mayarakat	-	622 726 000 00	SATUAN POLISI
Pe	Pemadaman, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Ian Penanganan Bahan	persentase pelayanan pemadaman dan				100 % 10 100 Persen 10	00 % 00 Persen	320.000.000,00	1.009.000.000,00	1.540.100.000,00	327.300.000,00			dan Pelayanan Publik Berkualitas	mayaranat		552.720.000,00	PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
Be	Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	penyelamatan kebakaran persentase pelayanan					00 1 010011							Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				KEBAKARAN
	(abupaten/Kota	pemadam dan penyelamatan kebakaran												Publik Berkualitas				
1.05.04.2.01.0002 Pe	Pemadaman dan Pengendalia	<u>l</u> ın Kebakaran dalam Daerah Kab	upaten/Kota	<u> </u>		<u>ı </u>				1	1		L	ı	L	I	l	
+	-	Jumlah Laporan Hasil				12 Laporan 12	2 Laporan	570.660.000,00	1.559.660.000,00	1.548.160.000,00	977.500.000,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			627.726.000,00	
		Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket									Barat, Semu Kecamatan,	, , , ,		dan Pelayanan Publik Berkualitas				PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
		dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah									Semua Kel/I	Pesa		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				KEBAKARAN
1.05.04.2.01.0007 Pe	Pembinaan Aparatur Pemada	Kabupaten/Kota												Publik Berkualitas				

1/25-	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN	KEKANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKA' DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024		ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		IORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUI JAWAB
2				0	7	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	40	44	45	NASIONAL	DAERAH	40	40	20	24
2	3	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam	5	6	7	70 Orang	70 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- 16	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi	18	19	55.000.000,00	SATUAN POLI PAMONG PRA DAN PEMADA KEBAKARAN
		Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran													dan Pelayanan Publik Berkualitas				
1	BADAN PENANGGULANGA URUSAN PEMERINTAHAN	N BENCANA DAERAH						3.596.632.876,00 3.596.632.876,00	3.963.622.700,00 3.963.622.700,00	3.861.287.700,00	264.654.824,00							3.776.885.797,00 3.776.885.797,00	
,	WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.390.032.070,00	3.903.022.700,00	3.001.207.700,00	204.034.024,00							3.110.003.191,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN							3.596.632.876,00	3.963.622.700,00	3.861.287.700,00	264.654.824,00							3.776.885.797,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.881.793.376,00	2.913.251.700,00	2.870.586.700,00	144.070.699,00							3.025.864.075,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penyediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tepat Waktu				100 %	100 %	15.190.090,00	15.135.000,00	15.135.000,00	-55.090,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		15.960.000,00	BADAN PENAI LANGAN BEN DAERAH
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Peren	Lanaan Perangkat Daerah																	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.401.200,00	7.321.000,00	7.321.000,00	-80.200,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Kampung Jawa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.770.000,00	BADAN PENAI LANGAN BENO DAERAH
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan [1	T	T		I					I	T T			T		1	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	700.920,00	707.500,00	707.500,00	6.580,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			735.000,00	BADAN PENA LANGAN BEN DAERAH
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan [Dokumen Perubahan RKA-SKPI	1	<u> </u>		4.00	4.00	700,000,00	707 500 00	707.500.00	0.500.00	Kali. Bastata	DANA ALOKAGI		Defended Biotomic	<u> </u>		705.000.00	DADAN BENG
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	700.920,00	707.500,00	707.500,00	6.580,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			735.000,00	BADAN PENA LANGAN BEN DAERAH
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan [DPA-SKPD																	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinas Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	o i			1 Dokumen	1 Dokumen	698.550,00	699.500,00	699.500,00	950,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			735.000,00	BADAN PENA LANGAN BEN DAERAH
1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan F			1			I					1							
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	698.550,00	699.500,00	699.500,00	950,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			735.000,00	BADAN PENA LANGAN BEN DAERAH
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan L	aporan Capaian Kinerja dan Ikh T	ntisar Realisasi k	Kinerja SKPD								I	T T					1	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	,			2 Laporan	2 Laporan	4.989.950,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.050,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.250.000,00	BADAN PENA LANGAN BEN DAERAH
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Peraturan yang Ada				100 %	100 %	2.077.134.686,00	2.374.122.700,00	2.374.122.700,00	296.988.014,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.180.992.695,00	BADAN PENA LANGAN BEN DAERAH
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjang	an ASN																	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15/14 Oran g/bulan	15/14 Oran g/bulan	2.071.635.900,00	2.368.622.700,00	2.368.622.700,00	296.986.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.175.217.695,00	BADAN PENAI LANGAN BENI DAERAH
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan L	aporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD		1		T		-						-				
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPL)			1 Laporan	1 Laporan	2.499.700,00	2.500.000,00	2.500.000,00	300,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.625.000,00	BADAN PENA LANGAN BEN DAERAH
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan L	⊥ .aporan Keuangan Bulanan/ Triv ⊤	wulanan/ Semes	steran SKPD		1													
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	a			18 Laporan	18 Laporan	1.999.150,00	2.000.000,00	2.000.000,00	850,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.100.000,00	BADAN PENA LANGAN BEN DAERAH
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan A	I .nalisis Prognosis Realisasi Ang	garan			1													
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	999.936,00	1.000.000,00	1.000.000,00	64,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.050.000,00	BADAN PENA LANGAN BEN DAERAH
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		21.000.000,00	BADAN PENA LANGAN BEN DAERAH

		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR CAPAIAN	OAI AIAII					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK	PRAKIRA	AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKA DAERAH
0	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENJA OPE	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	GET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	PRIC	PRITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUN JAWAB
		RESIATAN		OPD TAHUN 202	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Dertainban/Derkarang (10-12)	OUMBER DAILA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	TAGO INDINATII (NP)	VAVAD
	2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	12	13 14	15	16	17	18	19	20	21
1.0	05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas be	1		<u> </u>	T	T T		1	T		T		T			Ι	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			20 Paket	0 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.500.000,00	BADAN PENAN LANGAN BENC DAERAH
1.0	05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementa	si Peraturan Perundang-Undang Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	gan		14 Orang	14 Orang	10.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.500.000,00	BADAN PENAI LANGAN BENG DAERAH
1.0	05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu			100 %	100 %	197.712.900,00	193.799.000,00	151.134.000,00	-46.578.900,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		207.567.895,00	BADAN PENAI LANGAN BEN DAERAH
1.0	05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instal	asi											1 ublik berkualitas				
		Listrik/Penerangan Bangunan	Kantor															
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	0 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.250.000,00	BADAN PENAI LANGAN BENG DAERAH
1.0	05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Pe	rlengkapan Kantor								,							
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	12.689.600,00	13.299.000,00	13.299.000,00	609.400,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			13.324.080,00	BADAN PENAI LANGAN BENG DAERAH
1.0	05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik K	antor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	0 Paket	25.200.000,00	0,00	0,00	-25.200.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			26.450.000,00	BADAN PENA LANGAN BEN DAERAH
														Publik Berkualitas				
1.0	05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	1			40 Policet	40 Palest	40.050.000.00	40 500 000 00	40 500 000 00	050 000 00 Kala Basisia	DANIA ALOKACI		Reformasi Birokrasi			44,000,000,00	BADAN PENA
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	13.353.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-853.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			14.000.000,00	LANGAN BEN DAERAH
1.0	05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan da	an Peraturan Perundang-undanga	an														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.600.000,00	BADAN PENA LANGAN BEN DAERAH
1.0	05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												1				
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			11 Laporan	11 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.550.000,00	BADAN PENA LANGAN BEN DAERAH
1.0	05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koor	dinasi dan Konsultasi SKPD							1								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	118.470.300,00	145.000.000,00	102.335.000,00	-16.135.300,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			124.393.815,00	BADAN PENA LANGAN BEN DAERAH
1.0	05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah			100 %	0 %	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		220.500.000,00	BADAN PENA LANGAN BEN DAERAH
1.0	05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas	1						Т	Г								
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			210.000.000,00	BADAN PENA LANGAN BEN DAERAH
1.0	05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasa	irana Gedung Kantor atau Bangu	unan Lainnya				T	1									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.500.000,00	BADAN PENA LANGAN BEN DAERAH
1.0	05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	100 %	169.472.700,00	160.515.000,00	160.515.000,00	-8.957.700,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		177.946.335,00	BADAN PENA LANGAN BEN DAERAH
1.0	05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi	Sumber Daya Air dan Listrik						1	1								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	16.920.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	1.680.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			17.766.000,00	BADAN PENA LANGAN BEN DAERAH

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN							AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT
O KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	OKASI	SUMBER DANA	PR	RIORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	REGIATAN		OPD	1AHUN 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertamban/Berkurang (10-12)	LONASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		IARGEI	PAGU INDIKATIF (RP)	JAWAB
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	132.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	Kecar		DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			138.600.000,00	BADAN PENANG LANGAN BENCAN DAERAH
1.05.01.2.08.000	4 Penyediaan Jasa Pelayanan		<u> </u>																
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.552.700,00	9.915.000,00	9.915.000,00	Kecar	Pesisir t, Semua matan, ua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			21.580.335,00	BADAN PENANG LANGAN BENCAN DAERAH
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara				100 %	100 %	192.283.000,00	144.680.000,00	144.680.000,00	-47.603.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		201.897.150,00	BADAN PENANGO LANGAN BENCAN DAERAH
1.05.01.2.09.000	1 Penyediaan Jasa Pemelihara	_	ı jak Kendaraan	Perorangan Dina	as atau Kendaraan D	I Dinas Jabatan		I				I							
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	37.658.000,00	35.850.000,00	35.850.000,00	Kecar	t, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			39.540.900,00	BADAN PENANGO LANGAN BENCAN DAERAH
1.05.01.2.09.000	2 Penyediaan Jasa Pemelihara	aan, Biaya Pemeliharaan, Pajak d	lan Perizinan K	Kendaraan Dinas	Operasional atau La	pangan		1				L							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	126.625.000,00	91.500.000,00	91.500.000,00	Kecar	t, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			132.956.250,00	BADAN PENANGO LANGAN BENCAN DAERAH
1.05.01.2.09.000	6 Pemeliharaan Peralatan dan	Mesin Lainnya				1										1			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	18.000.000,00	17.330.000,00	17.330.000,00	Kecar	Pesisir t, Semua matan, ua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			18.900.000,00	BADAN PENANG LANGAN BENCAN DAERAH
1.05.01.2.09.000	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi G	edung Kantor dan Bangunan Lain	nnya		1					ı						T		T	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	Kecar	Pesisir t, Semua matan, ua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.500.000,00	BADAN PENANG LANGAN BENCAN DAERAH
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-				-	-	714.839.500,00	1.050.371.000,00	990.701.000,00	36.182.222,00							751.021.722,00	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten				100 %	100 %	49.609.600,00	184.611.000,00	161.611.000,00	112.001.400,00				Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Masyarakat		52.500.000,00	BADAN PENANGO LANGAN BENCAN DAERAH
4 05 00 0 04 000	7 Ossislinasi Karawailasi Infa		Danasa Kabu	/Kata (Par I	Innia Annanan Bana										yang Berkelanjutan				
1.05.03.2.01.000	7 Sosialisasi, Komunikasi, Inio	rmasi dan Edukasi (KIE) Rawan E Jumlah warga negara	Bencana Kabuj	paten/Kota (Per J	Jenis Ancaman Benca	· ·	100 Orang	49.609.600,00	184.611.000,00	161.611.000,00	112.001.400,00 Kab. F	Pesisir	DANA ALOKASI -		Pembangunan			52.500.000,00	BADAN PENANGO
		termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun									Barat, Kecar	t, Semua	UMUM (DAU)		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				LANGAN BENCAN DAERAH
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					100 %	100 %	327.825.350,00	510.800.000,00	489.130.000,00	161.304.650,00				Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		344.200.000,00	BADAN PENANG LANGAN BENCAN DAERAH
1.05.03.2.02.001	5 Penyediaan Peralatan Perlind	dungan dan Kesiapsiagaan Terha	adap Bencana	kabupaten/kota				'											
		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				4 Unit	0 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	Kecar	t, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			21.000.000,00	BADAN PENANG LANGAN BENCAN DAERAH
1.05.03.2.02.002	0 Penguatan Kapasitas Kawas	an untuk Pencegahan dan Kesiap	osiagaan Benc	ana	_											1			
		Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				2 Kawasan	2 Kawasan	222.251.650,00	310.800.000,00	310.800.000,00	Kecar	Pesisir t, Semua matan, ua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			233.300.000,00	BADAN PENANG LANGAN BENCAN DAERAH
1.05.03.2.02.002	1 Pengembangan Kapasitas Ti	m Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Kabupaten/Ko	ta	1	1		I		<u> </u>	I	L	I		ı	l	1	ı	
		Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				25 Orang	0 Orang	13.476.600,00	0,00	0,00	Kecar	Pesisir t, Semua matan, ua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			14.200.000,00	BADAN PENANG LANGAN BENCAN DAERAH
1.05.03.2.02.002	7 Penyusunan Rencana Penar	nggulangan Bencana Kabupaten/k	Kota					1			1								
		Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	200.000.000,00	178.330.000,00	Kecar	Pesisir t, Semua matan, ua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			52.500.000,00	BADAN PENANGO LANGAN BENCAN DAERAH

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR REPRIODE CAPAIAN	CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN					- KELOMPOK		MAJU RENCANA UN 2026	PERANGKAT DAERAH
NO KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024		ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		RIORITAS	SASARAN	TARGET PA	AGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1 2	3	4	5 6	7	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025 11	RKPD PERUBAHAN 2025	13	14	15	NASIONAL 16	DAERAH 17	18	19	20	21
1 2	3	Jumlah warga negara	3 0	1	2 Kawasan	0 Kawasan	22.097.100,00	0.00	0.00		Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Pembangunan	10	19	23.200.000,00	
		termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana						-,	3,55	· [1	Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				LANGAN BENCANA DAERAH
		Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan									Semua Kel/Desa			Pembangunan Infrastruktur Daerah				
		pencegahan dan mitigasi bencana												yang Berkelanjutan				
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan	Presentase Pelayanan			100 %	100 %	169.479.100,00	260.000.000,00	260.000.000,00	90.520.900,00			-	Pembangunan	Masyarakat		178.000.000,00	
	dan Evakuasi Korban Bencana	Informasi Rawan Bencana Kabupaten												Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				LANGAN BENCANA DAERAH
														Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				
1.05.03.2.03.0003	Pancarian Partolongan dan I	 Evakuasi Korban Bencana Kabu	paten/Keta											yang berkelanjulan				
1.03.03.2.03.0003	rencanan, rencongan dan i	Jumlah Korban yang Berhasil	T		10 Orang	10 Orang	119.479.100,00	250.000.000,00	250.000.000,00	130.520.900,00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	_	Pembangunan			125.500.000,00	BADAN PENANGGU
		Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis			To Orang	To Orang	113.473.100,00	230.000.000,00	250.000.000,00	1	Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)	-	Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			123.300.000,00	LANGAN BENCANA DAERAH
		Kejadian Bencana									Semua Kel/Desa			Pembangunan Infrastruktur Daerah				BALIVATI
														yang Berkelanjutan				
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyela	matan dan Evakuasi Korban Ber	ncana Kabupaten/Kota		T							1						
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi			10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			52.500.000,00	LANGAN BENCAN
		Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									Kecamatan, Semua Kel/Desa			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				DAERAH
														dan Pelayanan Publik Berkualitas				
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar	Presentase Kegiatan			100 %	100 %	167.925.450,00	94.960.000,00	79.960.000,00	-87.965.450,00			-	Pembangunan	Masyarakat		176.321.722,00	BADAN PENANGGI
	Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana												Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				LANGAN BENCANA DAERAH
														Pembangunan Infrastruktur Daerah				
														yang Berkelanjutan				
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuha	in Pascabencana (JITUPASNA)	dan Rencana Rehabilitasi dan F	Rekontruksi Pascaber	1	1									T			
		Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian			3 Dokumen	3 Dokumen	167.925.450,00	94.960.000,00	79.960.000,00		Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah			176.321.722,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA
		Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi									Kecamatan, Semua Kel/Desa			yang Berkelanjutan Pembangunan				DAERAH
		dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)												Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				
		Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal																
		paling lama dalam 1 (satu) tahun																
	DINAS SOSIAL				'		4.484.769.200,00	3.712.917.600,00	3.647.667.400,00	-837.101.800,00							4.932.246.120,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN						4.484.769.200,00	3.712.917.600,00	3.647.667.400,00	-837.101.800,00							4.932.246.120,00	
	DENGAN PELAYANAN DASAR																	
4.00							4 404 700 000 00	2 742 047 000 00	2 2 4 7 2 2 7 4 2 2 2 2	007 404 000 00							4 000 040 400 00	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						4.484.769.200,00	3.712.917.600,00	3.647.667.400,00	-837.101.800,00							4.932.246.120,00	
1. 1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	cakupan pemenuhan			92,50 %	92,50 %	2.655.737.900,00	2.762.693.000,00	2.742.406.000,00	265.573.790,00							2.921.311.690,00	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	urusan pemerintah daerah																
1.00.04.0.04		(%)			400.0/	400.0/	40,400,000,00	40,400,000,00	40,400,000,00	0.00				Deference Directors	A = ====		40.040.000.00	DINIAC COCIAI
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	persentase dokumen perencanaan, penganggaran,			100 %	100 %	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur		13.640.000,00	DINAS SOSIAL
	Kinerja Perangkat Daerah	dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat												Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				
		waktu												dan Pelayanan Publik Berkualitas				
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perer	canaan Perangkat Daerah			•					,								
		Jumlah Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			8.140.000,00	DINAS SOSIAL
		Perencanaan Perangkat Daerah								1	Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas				
											Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
4 00 04 0 04 0000	Kandinasi dan Banusanan		tions Bookings i Kingsia OKBB											Publik Berkualitas				
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikh	itisar Realisasi Kinerja SKPD		01	01	5 000 000 00	5 000 000 00	5 000 000 00	0.00	Kab Danisis	DANA ALOKASI		Reformasi Birokrasi	T		5 500 000 00	DINIAG GOGIAI
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan			2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	[1	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	DINAS SOSIAL
		Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan									Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												Publik Berkualitas				
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan	persentase pelaporan			100 %	100 %	2.105.269.300,00	2.208.417.800,00	2.208.417.800,00	103.148.500,00			_	Reformasi Birokrasi	Aparatur		2.315.796.230,00	DINAS SOSIAI
1.06.01.2.02	Perangkat Daerah	keuangan tepat waktu			100 %	100 %	2.105.269.300,00	2.208.417.800,00	2.208.417.800,00	103.146.500,00			-	dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatui		2.313.796.230,00	DINAS SOSIAL
														Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
														Publik Berkualitas				
						,									_			
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjang	an ASN			400 "	18 Orang/b	2.099.769.300,00	2.202.917.800,00	2.202.917.800,00	103.148.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			2.309.746.230,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjang	Jumlah Orang yang									Kecamatan,			Publik Berkualitas				
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjanç	T			18 Orang/b ulan	ulan								Reformasi Birokrasi				
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan									Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
1.06.01.2.02.0001		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	SKPD											dan Pelayanan				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Laporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD				2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Semua Kel/Desa Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000.00	DINAS SOSIAL
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN -aporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	SKPD		ulan	ulan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	DINAS SOSIAL
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN aporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan			ulan	ulan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			2.750.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			ulan	ulan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi			2.750.000,00	DINAS SOSIAL
	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN aporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD aporan Keuangan Bulanan/ Triv			ulan	ulan				0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			ulan	ulan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan Bulanan/ Triw Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	vulanan/ Semesteran SKPD		1 Laporan	1 Laporan				0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN -aporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD -aporan Keuangan Bulanan/ Triw Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Keuangan Bulanan/Triwulanan	vulanan/ Semesteran SKPD		1 Laporan	1 Laporan				0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan Bulanan/ Triv Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	vulanan/ Semesteran SKPD		1 Laporan	1 Laporan				0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN -aporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD -aporan Keuangan Bulanan/ Triw Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Keuangan Bulanan/Triwulanan	vulanan/ Semesteran SKPD		1 Laporan	1 Laporan				0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi			2.200.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN -aporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD -aporan Keuangan Bulanan/ Triw Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Analisis Prognosis Realisasi Ang	vulanan/ Semesteran SKPD		1 Laporan	1 Laporan				0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN -aporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD -aporan Keuangan Bulanan/ Triw Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	vulanan/ Semesteran SKPD		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	DINAS SOSIAL

) KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKA ⁻ DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	SET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIC	ORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUN JAWAB
			OPD		2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			(-)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik				100 %	100 %	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		22.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatinan Pe	gawai Berdasarkan Tugas dan F	ungsı			5.0000	0.07777	20, 200, 200, 20	0.00	0.00	20,000,000,00	Vah Daninin	DANA ALOKACI		Defermed i Bindunai			22 222 222 22	DINAC COCIAI
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			22.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				100 %	100 %	248.798.600,00	276.705.200,00	286.418.200,00	37.619.600,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		273.678.460,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik K	Cantor	'			'	1										1		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			27.500.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	dan Penggandaan	T						1								T	ı	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65.798.600,00	68.705.200,00	68.705.200,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			72.378.460,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan d	an Peraturan Perundang-undang	gan T	Т Г					I	T								T	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	27.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			29.700.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.100.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koo	rdinasi dan Konsultasi SKPD		,						_									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	160.000.000,00	194.713.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			132.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				100 %	100 %	55.500.000,00	30.000.000,00	0,00	-55.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		61.050.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Me	esin Lainnya				_				_							_	,	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	0 Unit	55.500.000,00	30.000.000,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			61.050.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				100 %	100 %	95.720.000,00	110.120.000,00	110.120.000,00	14.400.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		105.292.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikas	i, Sumber Daya Air dan Listrik	·	<u>. </u>															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.300.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan d	lan Perlengkapan Kantor																	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	92.000.000,00	107.000.000,00	107.000.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			101.200.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	720.000,00	720.000,00	720.000,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			792.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah yang dalam kondisi baik				100 %	100 %	118.050.000,00	125.050.000,00	125.050.000,00	7.000.000,00			-		Aparatur		129.855.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemelihara	an, Biaya Pemeliharaan, dan Pa	jak Kendaraan I	Perorangan Dinas	atau Kendaraan [1		I										
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	59.800.000,00	58.800.000,00	58.800.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			65.780.000,00	DINAS SOSIAL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA					CAPAIAN KINERJA DAN H	ERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGK DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	ODD TALLIAL		SET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA -		PRITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGU JAWAB
2	3	4	5	6	7	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025 11	RKPD PERUBAHAN 2025	13	14	15	NASIONAL 16	DAERAH 17	18	19	20	21
-	J	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		, c	,	4 Unit	4 Unit	48.500.000,00	56.500.000,00	56.500.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				DINAS SOSIA
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sa	rana dan Prasarana Gedung Ka Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		unan Lainnya		14 Unit	8 Unit	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.725.000,00	DINAS SOSI
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Terdatanya potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)				100 %	100 %	64.960.250,00	40.340.000,00	40.340.000,00	6.496.025,00							71.456.275,00	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Orang	11 Orang	64.960.250,00	40.340.000,00	40.340.000,00	-24.620.250,00		-		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			71.456.275,00	DINAS SOS
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Po	tensi Tenaga Kesejahteraan Sos Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial	sial Kecamatan	Kewenangan Ka	abupaten/Kota	11 Orang	11 Orang	64.960.250,00	40.340.000,00	40.340.000,00	-24.620.250,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			71.456.275,00	DINAS SOS
		Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota										Kecamatan, Semua Kel/Desa			Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat				
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Pemenuhan SPM bidang sosial				100 %	100 %	1.569.414.200,00	694.659.800,00	677.159.800,00	156.941.420,00							1.726.355.620,00	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang menerima bantuan				100 %	100 %	223.374.350,00	115.000.000,00	100.000.000,00	-123.374.350,00		-		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			245.711.785,00	DINAS SOS
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				130 Orang	95 Orang	130.000.000,00	61.599.200,00	56.599.200,00	-73.400.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			143.000.000,00	DINAS SOS
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	,			20 Orang	10 Orang	63.374.350,00	28.000.800,00	25.500.800,00	-37.873.550,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			69.711.785,00	DINAS SOS
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	30.000.000,00	25.400.000,00	17.900.000,00	-12.100.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			33.000.000,00	DINAS SOS
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang tertangani				100 %	100 %	1.346.039.850,00	579.659.800,00	577.159.800,00	-768.880.050,00		-		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	PMKS		1.480.643.835,00	DINAS SOS
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dar	l Pengaduan																1	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	75.039.850,00	69.659.800,00	67.159.800,00	-7.880.050,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			82.543.835,00	DINAS SOS
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedarura	atan																	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Orang	g 0 Orang	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			12.100.000,00	DINAS SOS
1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga d	an Kemitraan dalam Pelaksanaa Jumlah Dokumen Hasil	an Rehabilitasi S	Sosial Kabupaten	n/Kota	3 Dokumen	1 Dokumen	1.260.000.000,00	510.000.000,00	510.000.000,00	-750.000.000,00	Kah Pesisir	DANA ALOKASI -		Peningkatan Kualitas			1.386.000.000,00	DINAS SOS
		Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				o Bollamon	Johannen		0.1010001000,000	01010001000,00	700.000,000	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			11.550.555.555,555	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	cakupan perlindungan dan jaminan perlindungan sosial daerah				100 %	100 %	132.656.850,00	158.865.400,00	137.772.200,00	13.265.685,00							145.922.535,00	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase daerah yang aktif melakukan peutakhiran dan data terpadu penanggulangan kemiskinan				100 %	100 %	132.656.850,00	158.865.400,00	137.772.200,00	5.115.350,00		-		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			145.922.535,00	DINAS SOS
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Caku	pan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupar Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	ז			114000 Orang	10457 Orang	87.000.000,00	105.224.800,00	55.631.600,00	-31.368.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			95.700.000,00	DINAS SO:
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kese	ejahteraan Keluarga	1					1											
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosia. Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1			10541 Keluarga	10541 Keluarga	45.656.850,00	53.640.600,00	82.140.600,00	36.483.750,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			50.222.535,00	DINAS SO
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	cakupan pemenuhan pasca	1			100 %	100 %	62.000.000,00	56.359.400,00	49.989.400,00	5.200.000,00							67.200.000,00	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	persentase warga				100 %	100 %	62.000.000,00	56.359.400,00	49.989.400,00	-12.010.600,00		-		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas	Tagana		67.200.000,00	DINAS SOS

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN I	KERANGKA PENDANAAN					VPI 0		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT
NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		DRITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	OPD 5	6	2024 	SEBELUM 8	SESUDAH 9	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	13	14	15	NASIONAL 16	DAERAH 17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				16 Orang	16 Orang	62.000.000,00	56.359.400,00	49.989.400,00	-12.010.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			67.200.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TRANSMIGRASI, TE	NAGA KERJA DAN PERINDUST	TRIAN					2.703.786.200,00	3.104.340.500,00	2.993.215.500,00	289.429.300,00							2.982.210.820,00	
2	!	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.405.976.200,00	2.643.515.500,00	2.568.515.500,00	162.539.300,00							2.649.119.820,00	
2	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							2.405.976.200,00	2.643.515.500,00	2.568.515.500,00	162.539.300,00)						2.649.119.820,00	
1. 2	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	2.106.936.200,00	2.435.815.500,00	2.385.815.500,00	212.843.620,00							2.319.779.820,00	
2	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		13.640.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perer	1				2 Daluman	2 Daluman	7 400 000 00	7 400 000 00	7 400 000 00	0.00	Kah Basisis	DANA ALOKACI	Managardusat	Reformasi Birokrasi			0.440.000.00	DINAC
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	dan Pelayanan			8.140.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikht Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tisar Realisasi K	Ginerja SKPD		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.684.286.200,00	1.976.715.500,00	1.976.715.500,00	292.429.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		1.852.714.820,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjanç	gan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	1.678.786.200,00	1.971.215.500,00	1.971.215.500,00	292.429.300,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.846.664.820,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Akhir Tahun S	SKPD 			2 Longran	2 Longran	2.500.000,00	2 500 000 00	2 500 000 00	0.00	Kah Basisir	DANA ALOKASI	Mamparkust	Poformoni Birokroni			2.750.000.00	DINAC
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Bulanan/ Triw Jumlah Laporan Keuangan	rulanan/ Semes	teran SKPD		12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0.00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	Memperkuat	Reformasi Birokrasi			2.200.000,00	DINAS
			Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Lapuran	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2	2.07.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan A	Analisis Prognosis Realisasi Angg	garan							T									
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.100.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas				3 Orang	3 Orang	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		11.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pe	gawai Berdasarkan Tugas dan Fu Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ungsi			3 Orang	3 Orang	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN I	KERANGKA PENDANAAN					WEL COLO		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKA
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENJA OPD	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		RIORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGU JAWAB
	REGIATAN		OPD TATION 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	bertamban/berkurang (10-12)	LONASI	JOWIBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGO INDIKATIF (Kp)	JAWAB
2 2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5 6	7	100 %	9 100 %	230.500.000,00	230.000.000,00	12 180.000.000,00	-50.500.000,00	14	15	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	18 Aparatur	19	20 233.750.000,00	DINAS TRANSMIGRA: TENAGA KERJ DAN PERINDUSTRI
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Insta	lasi											penyeludupan.					
	Listrik/Penerangan Bangunar	n Kantor																
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	0 Paket	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			550.000,00	DINAS TRANSMIGR TENAGA KE DAN PERINDUST
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik k				1						1	1				1		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	0 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Mab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			27.500.000,00	DINAS TRANSMIGE TENAGA KE DAN PERINDUST
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	dan Penggandaan					1											
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	32.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	5.000.000,00	Mab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			37.400.000,00	DINAS TRANSMIGR TENAGA KEI DAN PERINDUST
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan c	an Peraturan Perundang-undang Jumlah Dokumen Bahan	gan	<u> </u>	10	10	12 000 000 00	12 000 000 00	12.000.000,00	0.00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	Maranarkust	Reformasi Birokrasi		1	13.200.000,00	DINAC
		Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			10 Dokumen	Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	dan Pelayanan			13.200.000,00	TRANSMIGH TENAGA KE DAN PERINDUST
2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			11 Laporan	11 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.100.000,00	DINAS TRANSMIGF TENAGA KE DAN PERINDUST
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koo																	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	170.000.000,00	120.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			143.000.000,00	DINAS TRANSMIGI TENAGA KE DAN PERINDUST
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100 %	100 %	20.000.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00	37.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokra: serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		44.000.000,00	DINAS TRANSMIG TENAGA KE DAN PERINDUS
2.07.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainn	<u>-</u>																
		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00	37.500.000,00	Mab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			44.000.000,00	DINAS TRANSMIGF TENAGA KE DAN PERINDUST
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100 %	100 %	73.500.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	-1.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokra: serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		80.800.000,00	DINAS TRANSMIG TENAGA KE DAN PERINDUS
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikas	i, Sumber Daya Air dan Listrik		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1											1	<u>.</u>	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	0 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.600.000,00	DINAS TRANSMIGF TENAGA KE DAN PERINDUST
2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan d	1							<u>—</u>									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	reformasi politik,	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			73.700.000,00	DINAS TRANSMIGR TENAGA KE DAN PERINDUST

NO KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA				_	CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
NO KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN SUB	RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	OPD TAHUN 2024	TARC	GET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)	T	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		ORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
4		4	5	0		SEBELUM	SESUDAH 9	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	40	14	45	NASIONAL 16	DAERAH	40	19	20	24
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Limum Kantor	5	6	,	0	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.07.01.2.00.0004	1 chyculaun sasa i chayanan	Jumlah Laporan Penyediaan	1			12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0.00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	Memperkuat	Reformasi Birokrasi			5.500.000,00	DINAS
		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	,			12 Laporar	1 12 Laporari	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi,	dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.300.000,00	TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA
		,										Semua Kel/Desa	a	serta memperkuat pencegahan dan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				DAN PERINDUSTRIAN
														pemberantasan korupsi, narkoba,	Publik Berkualitas				
														judi, dan penyeludupan.					
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik	Cakupan Pemenuhan				100 %	100 %	76.250.000,00	67.200.000,00	67.200.000,00	-9.050.000,00			Memperkuat	Reformasi Birokrasi	Aparatur		83.875.000,00	DINAS
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan												reformasi politik, hukum dan birokrasi,	dan Pelayanan Publik Berkualitas				TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA
		Daerah Kabupaten/Kota												serta memperkuat pencegahan dan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				DAN PERINDUSTRIAN
														pemberantasan korupsi, narkoba,	Publik Berkualitas				
														judi, dan penyeludupan.					
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemelihara	- ∟ aan, Biaya Pemeliharaan, dan Pa	ajak Kendaraan	Perorangan Dinas	atau Kendaraan I	Dinas Jabatan													
		Jumlah Kendaraan				2 Unit	2 Unit	66.000.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00	-4.800.000,00		DANA ALOKASI	Memperkuat	Reformasi Birokrasi			72.600.000,00	DINAS
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi,	dan Pelayanan Publik Berkualitas				TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA
		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya										Semua Kel/Desa	a	serta memperkuat pencegahan dan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				DAN PERINDUSTRIAN
														pemberantasan korupsi, narkoba,	Publik Berkualitas				
														judi, dan penyeludupan.					
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan	Mesin Lainnya								I.	ı								
		Jumlah Peralatan dan Mesin)			12 Unit	12 Unit	5.250.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	750.000,00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	Memperkuat	Reformasi Birokrasi			5.775.000,00	DINAS
		Lainnya yang Dipelihara										Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi,	dan Pelayanan Publik Berkualitas				TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA
												Semua Kel/Desa	a	serta memperkuat pencegahan dan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				DAN PERINDUSTRIAN
														pemberantasan korupsi, narkoba,	Publik Berkualitas				
														judi, dan penyeludupan.					
2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sa	_ arana dan Prasarana Gedung Ka	 antor atau Bangı																
		Jumlah Sarana dan				1 Unit	0 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	Memperkuat	Reformasi Birokrasi			5.500.000,00	DINAS
		Prasarana Gedung Kantor	a					0.000,000,000	5,55	3,00		Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi,	dan Pelayanan Publik Berkualitas			0.000.000,00	TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA
		atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9									Semua Kel/Desa	a	serta memperkuat pencegahan dan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				DAN PERINDUSTRIAN
														pemberantasan korupsi, narkoba,	Publik Berkualitas				LININDOSTRIAN
														judi, dan penyeludupan.					
2. 2.07.03	PROGRAM PELATIHAN	Menurunnya Tingkat				2.41 %	2.41 %	145.000.000,00	144.125.000,00	135.125.000,00	9.000.000,00			penyeludupan.				154.000.000,00	
2.07.03	KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA	Pengangguran Terbuka				2.41 /6	2.41 /6	143.000.000,00	144.123.000,00	133.123.000,00	3.000.000,00							134.000.000,00	
	KERJA																		
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit	Jumlah Tenaga Kerja/Pencar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis	nri			25 orang	25 orang	120.000.000,00	144.125.000,00	135.125.000,00	15.125.000,00			Memperkuat pembangunan	Meningkatkan Kualitas Sumber	Masyarakat		132.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI,
	Kompetensi	Pelatihan Berbasis Kompetensi												sumber daya manusia (SDM),	Daya Manusia Meningkatkan				TENAGA KERJA DAN
		Kompetensi												sains, teknologi, pendidikan,	Kualitas Sumber Daya Manusia				PERINDUSTRIAN
														kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraar					
														gender, serta penguatan peran	`				
														perempuan, pemuda (generasi milenial	ı				
														dan generasi Z), dan penyandang	1				
														disabilitas.					
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidi	kan dan Pelatihan Keterampilan	bagi Pencari Ke	erja berdasarkan K	(laster Kompetens	si													
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis	is			25 Orang	25 Orang	120.000.000,00	144.125.000,00	135.125.000,00	15.125.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan	Meningkatkan Kualitas Sumber			132.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI,
		Kompetensi pada Tahun n										Kecamatan, Semua Kel/Desa	` ′	sumber daya manusia (SDM),	Daya Manusia Meningkatkan				TENAGA KERJA DAN
												Comaa Roi/Dosc		sains, teknologi, pendidikan,	Kualitas Sumber Daya Manusia				PERINDUSTRIAN
														kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraar					
														gender, serta penguatan peran					
														perempuan, pemuda (generasi milenial	1				
														dan generasi Z), dan penyandang	1				
														disabilitas.					
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas				1 Dokumer	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			Memperkuat pembangunan	Meningkatkan Kualitas Sumber	Masyarakat		22.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI,
	Kabupaten/Kota	dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah												sumber daya manusia (SDM),	Daya Manusia Meningkatkan				TENAGA KERJA DAN
		Renja di Tingkat Daeran												sains, teknologi, pendidikan,	Kualitas Sumber Daya Manusia				PERINDUSTRIAN
														kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraar					
														gender, serta	1				
														penguatan peran perempuan, pemuda	1				
														(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang	1				
														disabilitas.					
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan					1 Dalumar	0 Dokumon	25 000 000 00	0.00	0.00	25 000 000 00	Koh Doginir	DANA ALOKASI	Mamparkuat	Maningkatkan		<u> </u>	22 000 000 00	DINAS
		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga				1 Dokumer	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	pembangunan sumber daya	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			22.000.000,00	TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA
		dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah										Semua Kel/Desa	a	manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber				DAN PERINDUSTRIAN
														pendidikan, kesehatan, prestasi	Daya Manusia				LINIADOSTRIAN
														olahraga, kesetaraar	n				
														gender, serta penguatan peran					
1														perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan					
		i	1	1		1	1 1		i	i .	i		1	, uan generasi Z), dan	· 1	1	1	i .	1
														penyandang					
3. 2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja				74.71 %	74.71 %	94.040.000,00	63.575.000,00	47.575.000,00	15.300.000,00							109.340.000,00	

No.	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN I	KERANGKA PENDANAAN					- KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
NO KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGE	T 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)	l	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		DRITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
4 2	3	4		6	7	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	13	14	15	NASIONAL 16	DAERAH 17	18	19	20	21
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	5	0	,	100 Orang	9	44.040.000,00	0,00	0,00	-44.040.000,00	14	15	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	19		
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan J	Jumlah Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				100 Orang	0 Orang	44.040.000,00	0,00	0,00	B	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			54.340.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online				2000 Orang	2000 Orang	50.000.000,00	63.575.000,00	47.575.000,00	-2.425.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		55.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan II					T							1	1	T	T	T	T	
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				2000 Orang	2000 Orang	50.000.000,00	63.575.000,00	47.575.000,00	K	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			55.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
4. 2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial				75 %	75 %	60.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00							66.000.000,00	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Besaran Pemeriksaan Perusahaan				83 Perusah aan	0 Perusaha an	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		22.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan	dan Informasi Sarana Hubungan I	Industrial dan J	Jaminan Sosial Te	enaga Kerja serta F	1				I			1	1				T	
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			22.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun				2 Perkara	0 Perkara	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		44.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hu	bungan Industrial, Mogok Kerja, da	an Penutupan I	Perusahaan yang	Berakibat/Berdam	npak pada Kepe													
		Jumlah Perselisihan yang Dicegah				2 Perkara	0 Perkara	20.000.000,00	0,00	0,00	B	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			22.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN					- KELOMPOK		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
NO	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIC	DRITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				OPD		2024	SEBELUM SESUE	PAH RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Dortamour/Dortarding (10 12)			NASIONAL	DAERAH			17100 m2maxm (xp)	
1	2	3	4	5	6	7	8 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Le	mbaga Kerja Sama Tripartit Daer Jumlah LKS Tripartit yang	rah Kabupaten/Ko	ota 		2 Lembaga 0 Lemb	aga 20.000.	200 00	00.00	-20.000.000,00 k	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	Momporkupt	Moningkatkan			22.000.000,00	DINAS
			Dibina				2 Lembaga 0 Lemb	aga 20.000.	000,00	0,00	B	Rab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			22.000.000,00	TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA
												Semua Kel/Desa		manusia (SDM), sains, teknologi,	Meningkatkan Kualitas Sumber				DAN PERINDUSTRIAN
														pendidikan, kesehatan, prestasi	Daya Manusia				
														olahraga, kesetaraan gender, serta					
														penguatan peran perempuan, pemuda					
														(generasi milenial dan generasi Z), dan					
														penyandang disabilitas.					
7		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						297.810.	000,00 460.825.000,	424.700.000,00	126.890.000,00							333.091.000,00	
,	.31	URUSAN PEMERINTAHAN						182.810.	000,00 207.700.000,	207.700.000,00	24.890.000,00							201.091.000,00	
		BIDANG PERINDUSTRIAN																	
1. 3	.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin				42 % 42 %	126.394.	000,00 119.200.000,	119.200.000,00	12.639.400,00							139.033.400,00	
		PEMBANGUNAN INDUSTR					22.110.1												5,000
3	.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	Jumlah Kelompok Pengrajin yang Dibina				20 IKM 20 IKM	126.394.	000,00 119.200.000,	119.200.000,00	-7.194.000,00			dan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		139.033.400,00	TRANSMIGRASI,
		Industri Kabupaten/Kota												mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat				TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
														untuk meningkatkan nilai tambah di dalam					PERINDOSTRIAN
														negeri.	'				
	.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dar	Pelaksanaan Pembangunan Sur	mber Daya Indus	stri		,											.	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan				1 Dokumen 0 Dokui	men 42.745.	0,000,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			47.019.500,00	DINAS TRANSMIGRASI,
			pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri								K	Kecamatan, Semua Kel/Desa		mengembangkan industri berbasis	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat				TENAGA KERJA DAN
			,											sumber daya alam untuk meningkatkan					PERINDUSTRIAN
														nilai tambah di dalam negeri.	1				
:	.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dar	Pelaksanaan Pembangunan Sar	rana dan Prasara	ana Industri		1	I	I	I	1			1		1			
			Jumlah Dokumen Hasil				1 Dokumen 1 Doku	men 30.000.	000,00 119.200.000,	00 119.200.000,00		Kab. Pesisir	DANA ALOKASI		Peningkatan Kualitas			33.000.000,00	DINAS
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan								K	Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)	dan mengembangkan	Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas				TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA
			Sarana dan Prasarana Industri								S	Semua Kel/Desa		industri berbasis sumber daya alam	Ekonomi Masyarakat				DAN PERINDUSTRIAN
														untuk meningkatkan nilai tambah di dalam	1				
	3.31.02.2.01.0005	Kaardinasi Siakraniassi dan	Pelaksanaan Pemberdayaan Inc	duatri dan Daran	Carta Magyaraka									negeri.					
	.31.02.2.01.0005	Roofdinasi, Sirikforiisasi, dai	Jumlah Dokumen Hasil	dustri dan Peran .	Seria Masyaraka	1L	1 Dokumen 0 Doku	men 32.000.	200 00	00,00	-32.000.000,00 K	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	Malaniuskaa hiliriaasi	Peningkatan Kualitas			35.200.000,00	DINAS
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan				1 Dokumen 0 Doku	men 32.000.	0,000,00	0,00	B	Sarat, Semua Secamatan,	UMUM (DAU)	dan mengembangkan	Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas			35.200.000,00	TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA
			Industri dan Peran Serta Masyarakat									Semua Kel/Desa		industri berbasis sumber daya alam	Ekonomi Masyarakat				DAN PERINDUSTRIAN
			Masyarakat											untuk meningkatkan nilai tambah di dalam					FERINDOSTRIAN
														negeri.					
:	.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksan	aan Rencana Pembangunan Indu	ustri														T	
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana				1 Dokumen 0 Doku	men 21.649.	0,000,00	0,00	-21.649.000,00 K	Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			23.813.900,00	DINAS TRANSMIGRASI,
			Pembangunan Industri								K	Kecamatan, Semua Kel/Desa		mengembangkan industri berbasis	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat				TENAGA KERJA DAN
														sumber daya alam untuk meningkatkan					PERINDUSTRIAN
														nilai tambah di dalam negeri.	1				
2. 3	.31.04	PROGRAM	Cakupan Pengelolaan				4 % 4 %	56.416.	000,00 88.500.000,	00 88.500.000,00	5.641.600,00							62.057.600,00	
		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI	Kontibusi Industri Sektor Industri Pengolahan																
		NASIONAL	terhadap PDRB																
3	.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi	Jumlah Website yang Dikelola Dengan Baik				1 Website 1 Webs	ite 56.416.	000,00 88.500.000,	88.500.000,00	32.084.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan	Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		62.057.600,00	TRANSMIGRASI,
		Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan												mengembangkan industri berbasis	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat				TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
		Kabupaten/Kota												sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam					PERINDUSTRIAN
														negeri.					
:	.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Ir	formasi dan Analisa Industri Kab	upaten/Kota Mela	alui SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi				1 Dokumen 1 Dokui	men 56.416.	000,00 88.500.000,	88.500.000,00	32.084.000,00 K	Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			62.057.600,00	DINAS TRANSMIGRASI,
			Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota								K	Kecamatan, Semua Kel/Desa	Civioni (B/10)	mengembangkan industri berbasis	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat				TENAGA KERJA DAN
			Melalui SIINas									50111da 1101/1200a		sumber daya alam untuk meningkatkan					PERINDUSTRIAN
														nilai tambah di dalam negeri.	1				
	.32	URUSAN PEMERINTAHAN						115.000.	000,00 253.125.000,	00 217.000.000,00	102.000.000,00							132.000.000,00	
		BIDANG TRANSMIGRASI									· ·							·	
1. 3	.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN	Nilai Rata-Rata Indeks Perkembangan 100				44 % 44 %	60.000.	000,00 120.000.000,	102.500.000,00	6.000.000,00							66.000.000,00	
		KAWASAN TRANSMIGRASI	Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementrian yang																
			Direvitalisasi																
3	.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Eks Transmigran				4 Kelompok 4 Kelon	npok 60.000.	000,00 120.000.000,	102.500.000,00	42.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah		Masyarakat		66.000.000,00	TRANSMIGRASI,
		1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												untuk pertumbuhan ekonomi,	dan Budaya Masyarakat				TENAGA KERJA DAN
														pemerataan ekonomi dan pemberantasan	Kehidupan Sosial				PERINDUSTRIAN
												<u></u>		kemiskinan.	dan Budaya Masyarakat				
		1	•					·		·					·				
3	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi					40 Orang 40 Orar	ng 60.000.	000,00 120.000.000,	102.500.000,00	42.500.000,00 K	Kab. Pesisir Barat, Semua	DAU YANG	Membangun dari	Harmonisasi			66.000.000,00	DINAS
(.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran		ļ		40 Glang 40 Glan	50.000.			, I L	Service Services		deep don don Lawe	Kehidunan Cariel			00.000.000,00	TRANSMICRACI
;	.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				40 Orang 40 Oran	00.000.			K	Kecamatan,	ENGGUNAANN	desa dan dari bawah untuk pertumbuhan	Kehidupan Sosial dan Budaya			00.000.000,00	TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA
:	.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	dan/atau Transmigran yang				40 Oran	5 55.000.			K		ENGGUNAANN	untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi	dan Budaya Masyarakat Harmonisasi			00.000.000,00	
;	.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	dan/atau Transmigran yang				40 Orang	5 55.000.			K	Kecamatan,	ENGGUNAANN YA BIDANG	untuk pertumbuhan ekonomi,	dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya			00.000.000,00	TENAGA KERJA DAN
			dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan						100.00 422.425.000	00 444 500 000 00	K	Kecamatan,	ENGGUNAANN YA BIDANG	untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan	dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial				TENAGA KERJA DAN
2. 3		Pelatihan Transmigrasi PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN	dan/atau Transmigran yang				1 Lokasi 1 Lokas		000,00 133.125.000,	00 114.500.000,00	K	Kecamatan,	ENGGUNAANN YA BIDANG	untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan	dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya			66.000.000,00	TENAGA KERJA DAN

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET REAL CAP	ALAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGI DAERA
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENSTRA RENJA	OPD TARGET REN.	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIC	PRITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANG JAWA
	REGIATAN		OPD TATIO	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025 F	RKPD PERUBAHAN 2025	Dertainban/Derkarang (10-12)	LONAOI	OOMBEN BANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	TAGO INDINATII (IXP)	UAN
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	4 Cakupan Pengembangan Daerah Transmigran	5 6	5 7	1 Lokasi	9 1 Lokasi	55.000.000,00	11 133.125.000,00	12 114.500.000,00	59.500.000,00	14	15	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	18 Masyarakat	19	20 66.000.000,00	DINAS TRANSMIG TENAGA KI DAN PERINDUS
3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangk	 a Kemandirian Satuan Pemukim	nan											Wasyarakat				
		Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina			30 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			27.500.000,00	DINAS TRANSMIG TENAGA K DAN PERINDUS
3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosia	II, Ekonomi dan Kelembagaan da Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	alam rangka Kemandirian	Satuan Pemukiman	1 Satuan P ermukiman		35.000.000,00	133.125.000,00	114.500.000,00	79.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			38.500.000,00	DINAS TRANSMIG TENAGA K DAN PERINDUS
	DINAS PEMBERDAYAAN P	EREMPUAN, PERLINDUNGAN	ANAK DAN KELUARGA	BERENCANA			9.226.747.400,00	9.107.890.300,00	8.871.818.300,00	-354.929.100,00							8.701.062.400,00	
2	NON URUSAN						9.226.747.400,00	9.107.890.300,00	8.871.818.300,00	-354.929.100,00							8.701.062.400,00	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						5.363.096.400,00	1.009.268.000,00	919.277.000,00	-4.443.819.400,00							668.002.000,00	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana			92,50 %	92,50 %	4.192.096.400,00	4.175.943.300,00	4.114.862.300,00	0,00							4.192.096.400,00	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu			100 %	100 %	26.124.000,00	26.124.000,00	26.124.000,00	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	A		26.124.000,00	DINAS PEMBERD PEREMPU PERLINDU ANAK DAN KELUARGA BERENCA
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Peren	1			1		- 400 000 00 I			7.400.000		BANA ALOUADI		T			T	Bulac
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	7.400.000,00	0,00	0,00	-7.400.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			0,00	DINAS PEMBERD PEREMPU PERLINDU ANAK DAN
														Daya Manusia				KELUARGA BERENCAI
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan I	Dokumen RKA-SKPD												Daya Manusia				KELUARGA BERENCAI
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan I	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	3.431.000,00	0,00	0,00	-3.431.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERD PEREMPU PERLINDU ANAK DAN KELUARGA
2.08.01.2.01.0002	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan			1 Dokumen	1 Dokumen	3.431.000,00 9.226.747.400,00	9.107.890.300,00	0,00 8.871.818.300,00	-3.431.000,00 -354.929.100,00	Barat, Semua Kecamatan,		-	Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			0,00 8.701.062.400,00	DINAS PEMBERD PEREMPU PERLINDU ANAK DAN KELUARGA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan			1 Dokumen	1 Dokumen					Barat, Semua Kecamatan,		-	Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber				DINAS PEMBERD PEREMPU PERLINDU ANAK DAN KELUARGA
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan			1 Dokumen	1 Dokumen	9.226.747.400,00	9.107.890.300,00	8.871.818.300,00	-354.929.100,00	Barat, Semua Kecamatan,		-	Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			8.701.062.400,00	DINAS PEMBERD. PEREMPU PERLINDU ANAK DAN KELUARGA
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi dan Penyusunan I	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen		9.226.747.400,00 5.363.096.400,00	9.107.890.300,00 1.009.268.000,00	8.871.818.300,00 919.277.000,00 3.431.000,00	-354.929.100,00 -4.443.819.400,00 3.431.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			8.701.062.400,00 668.002.000,00 3.431.000,00	DINAS PEREMPU PERLINDU ANAK DAN KELUARGA BERENCAI DINAS PEMBERD PEREMPU PERLINDU ANAK DAN KELUARGA
2.08 2.08.01.2.01.0003	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi dan Penyusunan I	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan					9.226.747.400,00 5.363.096.400,00 0,00 9.226.747.400,00	9.107.890.300,00 1.009.268.000,00 3.431.000,00	8.871.818.300,00 919.277.000,00 3.431.000,00 8.871.818.300,00	-354.929.100,00 -4.443.819.400,00 3.431.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			8.701.062.400,00 668.002.000,00 3.431.000,00	PEMBERDA PEREMPUA PERLINDUI ANAK DAN KELUARGA BERENCAN
2 2.08 2.08.01.2.01.0003 2 2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi dan Penyusunan I	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					9.226.747.400,00 5.363.096.400,00	9.107.890.300,00 1.009.268.000,00	8.871.818.300,00 919.277.000,00 3.431.000,00	-354.929.100,00 -4.443.819.400,00 3.431.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			8.701.062.400,00 668.002.000,00 3.431.000,00	DINAS PEMBERD. PERLINDU ANAK DAN KELUARG/ BERENCAI DINAS PEMBERD. PEREMPU PERLINDU ANAK DAN KELUARG/ KELUARG/ KELUARG/ KELUARG/
2 2.08 2.08.01.2.01.0003 2 2.08.01.2.01.0003	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi dan Penyusunan I	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					9.226.747.400,00 5.363.096.400,00 0,00 9.226.747.400,00	9.107.890.300,00 1.009.268.000,00 3.431.000,00	8.871.818.300,00 919.277.000,00 3.431.000,00 8.871.818.300,00	-354.929.100,00 -4.443.819.400,00 3.431.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			8.701.062.400,00 668.002.000,00 3.431.000,00	DINAS PEMBERDA PERLINDUI ANAK DAN KELUARGA BERENCAN DINAS PEMBERDA PERLINDUI ANAK DAN KELUARGA KELUARGA KELUARGA KELUARGA KELUARGA KELUARGA
2 2.08 2.08.01.2.01.0003 2 2.08.01.2.01.0003	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi dan Penyusunan I	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	9.226.747.400,00 5.363.096.400,00 0,00 9.226.747.400,00 5.363.096.400,00	9.107.890.300,00 1.009.268.000,00 3.431.000,00 9.107.890.300,00 1.009.268.000,00	8.871.818.300,00 919.277.000,00 3.431.000,00 8.871.818.300,00 919.277.000,00	-354.929.100,00 -4.443.819.400,00 3.431.000,00 -354.929.100,00 -4.443.819.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.701.062.400,00 668.002.000,00 3.431.000,00 8.701.062.400,00 668.002.000,00	DINAS PEMBERD. PEREMPU PERLINDU ANAK DAN KELUARG, BERENCAI
2 2.08 2.08.01.2.01.0003 2 2.08.01.2.01.0003	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi dan Penyusunan II NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan II Koordinasi dan Penyusunan II	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	9.226.747.400,00 5.363.096.400,00 0,00 9.226.747.400,00	9.107.890.300,00 1.009.268.000,00 3.431.000,00	8.871.818.300,00 919.277.000,00 3.431.000,00 8.871.818.300,00	-354.929.100,00 -4.443.819.400,00 3.431.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			8.701.062.400,00 668.002.000,00 3.431.000,00 8.701.062.400,00 668.002.000,00	DINAS PEMBERD PEREMPU PERLINDU ANAK DAN KELUARG, BERENCA DINAS PEMBERD PEREMPU PERLINDU ANAK DAN KELUARG, BERENCA
2 2.08 2.08.01.2.01.0003 2 2.08.01.2.01.0003	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi dan Penyusunan I	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	9.226.747.400,00 5.363.096.400,00 0,00 9.226.747.400,00 5.363.096.400,00	9.107.890.300,00 1.009.268.000,00 3.431.000,00 9.107.890.300,00 1.009.268.000,00	8.871.818.300,00 919.277.000,00 3.431.000,00 8.871.818.300,00 919.277.000,00	-354.929.100,00 -4.443.819.400,00 3.431.000,00 -354.929.100,00 -4.443.819.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			8.701.062.400,00 668.002.000,00 3.431.000,00 8.701.062.400,00 668.002.000,00	DINAS PEMBERD PEREMPU PERLINDU ANAK DAN KELUARG, BERENCA DINAS PEMBERD PEREMPU PERLINDU ANAK DAN KELUARG, BERENCA
2.08.01.2.01.0003 2.08.01.2.01.0003 2.08.01.2.01.0004	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi dan Penyusunan II Koordinasi dan Penyusunan II Koordinasi dan Penyusunan II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan II Koordinasi dan Penyusunan II ENGAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	9.226.747.400,00 5.363.096.400,00 9.226.747.400,00 5.363.096.400,00 3.431.000,00	9.107.890.300,00 1.009.268.000,00 3.431.000,00 1.009.268.000,00 0,00	8.871.818.300,00 919.277.000,00 8.871.818.300,00 919.277.000,00	-354.929.100,00 -4.443.819.400,00 -354.929.100,00 -4.443.819.400,00 -3.431.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			8.701.062.400,00 668.002.000,00 3.431.000,00 668.002.000,00	DINAS PEMBERCA DINAS PEREMPL PERLINDL ANAK DAN KELUARG BERENCA DINAS PEMBERCA PERLINDL ANAK DAN KELUARG BERENCA DINAS PEMBERCA PEREMPL PERLINDL ANAK DAN KELUARG BERENCA
2 2.08 2.08.01.2.01.0003 2.08.01.2.01.0004 2 2.08.01.2.01.0004	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi dan Penyusunan II Koordinasi dan Penyusunan II Koordinasi dan Penyusunan II Koordinasi dan Penyusunan II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	9.226.747.400,00 5.363.096.400,00 9.226.747.400,00 5.363.096.400,00 3.431.000,00	9.107.890.300,00 1.009.268.000,00 9.107.890.300,00 1.009.268.000,00 0,00 9.107.890.300,00	8.871.818.300,00 919.277.000,00 3.431.000,00 919.277.000,00 0,00 8.871.818.300,00	-354.929.100,00 -354.929.100,00 -354.929.100,00 -3.431.000,00 -3.431.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			8.701.062.400,00 3.431.000,00 8.701.062.400,00 668.002.000,00 0,00	DINAS PEMBERCA NELUARG BERENCA DINAS PEMBERCA DINAS PEMBERCA DINAS PEMBERCA PEREMPL PERLINDL ANAK DAN KELUARG BERENCA
2.08.01.2.01.0003 2.08.01.2.01.0003 2.08.01.2.01.0003 2.08.01.2.01.0004 2.08.01.2.01.0004	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi dan Penyusunan II Koordinasi dan Penyusunan II Koordinasi dan Penyusunan II Koordinasi dan Penyusunan II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	9.226.747.400,00 5.363.096.400,00 9.226.747.400,00 5.363.096.400,00 3.431.000,00	9.107.890.300,00 1.009.268.000,00 9.107.890.300,00 1.009.268.000,00 0,00 9.107.890.300,00	8.871.818.300,00 919.277.000,00 3.431.000,00 919.277.000,00 0,00 8.871.818.300,00	-354.929.100,00 -354.929.100,00 -354.929.100,00 -3.431.000,00 -3.431.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			8.701.062.400,00 3.431.000,00 8.701.062.400,00 668.002.000,00 0,00	DINAS PEMBERD. PEREMPU PERLINDU ANAK DAN KELUARG/ BERENCAI DINAS PEMBERD. PEREMPU PERLINDU ANAK DAN KELUARG/ BERENCAI DINAS PEMBERD. PERLINDU ANAK DAN KELUARG/ BERENCAI
2 2.08 2.08.01.2.01.0003 2.08.01.2.01.0004 2 2.08.01.2.01.0004	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi dan Penyusunan II Koordinasi dan Penyusunan II Koordinasi dan Penyusunan II Koordinasi dan Penyusunan II URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Koordinasi dan Penyusunan II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan			1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	9.226.747.400,00 5.363.096.400,00 9.226.747.400,00 3.431.000,00 9.226.747.400,00 5.363.096.400,00	9.107.890.300,00 1.009.268.000,00 9.107.890.300,00 1.009.268.000,00 9.107.890.300,00 1.009.268.000,00	8.871.818.300,00 919.277.000,00 8.871.818.300,00 919.277.000,00 0,00 8.871.818.300,00	-354.929.100,00 -354.929.100,00 -354.929.100,00 -3.431.000,00 -354.929.100,00 -354.929.100,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.701.062.400,00 668.002.000,00 8.701.062.400,00 668.002.000,00 0,00 8.701.062.400,00	DINAS PEMBERDA BERENCAN DINAS PEMBERDA PERLINDUI ANAK DAN KELUARGA BERENCAN DINAS PEMBERDA PERLINDUI ANAK DAN KELUARGA BERENCAN DINAS PEMBERDA PERLINDUI ANAK DAN KELUARGA BERENCAN DINAS PEMBERDA PERLINDUI ANAK DAN KELUARGA BERENCAN DINAS PEMBERDA PERLINDUI ANAK DAN KELUARGA BERENCAN

Halaman 63

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA		ET cos		B4011111-1111-1111	GAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN				ODITA C	KELOMPOK		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERAN DAEI
NODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	OPD TAHUN 2024	TARG SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PAGU INDIKATIF (Rp) APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRI NASIONAL	DAERAH	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANO JAW
2	3	4	5	6	7	SEBELUM	SESUDAH 9	10 RKPD 2025	APBD 2025	12	13	14	15	NASIONAL 16	DAERAH 17	18	19	20	2
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhi		(inerja SKPD	·		3	10		12	15	17	10	10	17	10	10	20	
	,	Jumlah Laporan Capaian				2.00	2.00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00) Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan			0,00	DINAS
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan				Laporan	Laporan					Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		Kualitas Sumber Daya Manusia				PEMBERI PEREMPL
		Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja										Semua Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				PERLINDI ANAK DAI KELUARG
		SKPD													Daya Mariusia				BERENCA
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	3.573.996.400,00	3.603.198.300,00	3.603.198.300,00	29.201.900,00)		-	Meningkatkan Kualitas Sumber	-		3.573.996.400,00	PEMBERI
															Daya Manusia Meningkatkan				PEREMPU PERLINDI
															Kualitas Sumber Daya Manusia				ANAK DAI
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjan	TOTAL ACAN																	BERENCA
2.06.01.2.02.0001	renyediaan Gaji dan Tunjan	Jumlah Orang yang				14.00 Oran	14.00 Oran	3.568.496.400,00	0,00	0,00	-3.568.496.400,00) Kah Pesisir	DANA ALOKASI	_	Meningkatkan			0.00	DINAS
		Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				g/bulan	g/bulan	0.000.100.100,00	3,00	3,33	0.000.100.100,00	Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		Kualitas Sumber Daya Manusia			5,00	PEMBER!
												Semua Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber				PERLIND ANAK DA
															Daya Manusia				KELUARO BERENCA
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan	 Laporan Keuangan Akhir Tahun S	SKPD			1				1									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan				1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			0,00	DINAS PEMBERI
		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan				Сароган	Laporan					Kecamatan, Semua Kel/Desa			Daya Manusia Meningkatkan				PEREMP
		Keuangan Akhir Tahun SKPD	•									0011104110412004			Kualitas Sumber Daya Manusia				ANAK DA
																			BERENC
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Bulanan/ Triw	vulanan/ Semes	steran SKPD			1,5 -:			T	Ι				T.,				
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/				18.00 Laporan	18.00 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			0,00	DINAS PEMBER
		Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan										Kecamatan, Semua Kel/Desa			Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber				PEREMP PERLIND ANAK DA
		Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD													Daya Manusia				KELUAR BERENC
2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan	Analisis Prognosis Realisasi Angg	garan																BEILEITO
		Jumlah Dokumen Pelaporan				1.00	1.00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00) Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan			0,00	DINAS
		dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				Dokumen	Dokumen					Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		Kualitas Sumber Daya Manusia				PEMBER PEREMP
												Semua Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber				PERLIND ANAK DA
															Daya Manusia				KELUAR(BERENC
2.08.01.2.06	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan				100 %	100 %	277.295.000,00	290.640.000,00	238.689.000,00	-38.606.000,00)		-	Meningkatkan Kualitas Sumber	-		277.295.000,00	DINAS PEMBER
	Perangkat Daerah	sarana dan prasarana pendukung kinerja													Daya Manusia				PEREMP PERLIND
															Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				ANAK DA
																			BERENCA
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Insta																		
	Ziotiiti onorangan Zangana	Jumlah Paket Komponen				12.00	12.00	4.225.000,00	0,00	0,00	-4.225.000,00) Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan			0,00	DINAS
		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang				Paket	Paket	,	·	,	,	Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		Kualitas Sumber Daya Manusia			,	PEMBER PEREMP
		Disediakan										Semua Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber				PERLIND ANAK DA
															Daya Manusia				KELUARO BERENC
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik I	Kantor																	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			0,00	DINAS PEMBER
		Trainer yang Dissaranan										Kecamatan, Semua Kel/Desa	. ,		Daya Manusia Meningkatkan				PEREMP
															Kualitas Sumber Daya Manusia				ANAK DA
																			BERENC
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakar	Jumlah Paket Barang				12.00	12.00	25.070.000,00	0.00	0.00	-25.070.000,00) Kab. Pesisir	DANA ALOKASI		Meningkatkan			0.00	DINAS
		Cetakan dan Penggandaan				12.00 Paket	12.00 Paket	25.070.000,00	0,00	0,00	-25.070.000,00	Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)	-	Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	PEMBER PEREMP
												Semua Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber				PERLINE ANAK DA
		yang Disediakan										Jemua Rei/Desa			Daya Manusia	1	I	1	KELUAR
												Gerrida New Desa			Daya Manusia				BERENC
2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan G		gan									Gerrida Nel/Desa			Daya Manusia				BERENC
2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan d	yang Disediakan dan Peraturan Perundang-undang Jumlah Dokumen Bahan	gan			12.00	12.00 Dokumoo	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00) Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-				0,00	DINAS
2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan d	yang Disediakan dan Peraturan Perundang-undang Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	gan			12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBER PEREMP
2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan d	yang Disediakan dan Peraturan Perundang-undang Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	gan			12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			0,00	DINAS PEMBER PEREMF PERLINE ANAK DA
	·	yang Disediakan dan Peraturan Perundang-undang Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	gan			12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan			0,00	DINAS PEMBER PEREMP PERLINE ANAK DA
	·	yang Disediakan dan Peraturan Perundang-undang Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	gan				Dokumen					Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				DINAS PEMBER PEREMP PERLIND ANAK DA KELUAR BERENC
	·	yang Disediakan dan Peraturan Perundang-undang Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	gan			12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	12.000.000,00	0,00		-12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				DINAS PEMBER PEREMP PERLIND ANAK DA KELUARI BERENC DINAS PEMBER
	·	yang Disediakan dan Peraturan Perundang-undang Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi	gan			11.00	Dokumen					Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan				DINAS PEMBER PERLIND ANAK DA KELUARI BERENC DINAS PEMBER PEREMP PERLIND
	·	yang Disediakan dan Peraturan Perundang-undang Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi	gan			11.00	Dokumen					Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				DINAS PERBME PEREMIP ANAK DA KELUAR BERENC DINAS PEMBER PEREMIP ANAK DA KELUAR
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	gan			11.00	Dokumen					Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber				DINAS PERBER PERLINI ANAK DA KELUAR BERENC DINAS PEMBER PEREMB PERLINI ANAK DA KELUAR
2.08.01.2.06.0008	·	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	gan			11.00 Laporan	Dokumen 11.00 Laporan			0,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBER PEREMP PERLIND ANAK DA KELUAR BERENC DINAS PEMBER PERLIND ANAK DA KELUAR BERENC
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	yang Disediakan dan Peraturan Perundang-undang Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu ordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	gan			11.00	Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEREMP PERLIND ANAK DA KELUARO BERENC DINAS PEMBER PERLIND ANAK DA KELUARO BERENC DINAS PEMBER PERLIND ANAK DA KELUARO BERENC
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Pasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	gan			11.00 Laporan	11.00 Laporan	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBER PEREMP PERLIND ANAK DA KELUARI BERENC DINAS PEMBER PERLIND ANAK DA KELUARI BERENC DINAS PEMBER PERLIND ANAK DA KELUARI BERENC ANAK DA AKELUARI BERENC
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	yang Disediakan dan Peraturan Perundang-undang Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu ordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	gan			11.00 Laporan	11.00 Laporan	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			0,00	DINAS PEREMP PERLIND ANAK DA KELUARI BERENC DINAS PEREMP PERLIND ANAK DA KELUARI BERENC DINAS PEREMP PERLIND ANAK DA KELUARI BERENC
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase pemenuhan	gan			11.00 Laporan	11.00 Laporan	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERI PERLIND ANAK DA KELUARO BERENCA DINAS PEMBERI PERLIND ANAK DA KELUARO BERENCA DINAS PEMBERI PERLIND ANAK DA KELUARO BERENCA DINAS PEMBERI PERLIND ANAK DA KELUARO BERENCA
2.08.01.2.06.0008 2.08.01.2.06.0009 2.08.01.2.07	Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	gan			11.00 Laporan	11.00 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	PEMBERI PEREMPI PERLIND ANAK DA KELUARO BERENC DINAS PEMBERI PERLIND ANAK DA KELUARO BERENC DINAS PEMBERI PERLIND ANAK DA KELUARO BERENC DINAS PEMBERI PERLIND ANAK DA KELUARO BERENC DINAS PEMBERI PERLIND ANAK DA KELUARO BERENC DINAS PEMBERI PEREMPI PERLIND
2.08.01.2.06.0008	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu urdinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	gan			11.00 Laporan	11.00 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEREMPI PERLIND ANAK DA KELUARO BERENCO DINAS PEMBERI PERLIND ANAK DA KELUARO BERENCO DINAS PEMBERI PERLIND ANAK DA KELUARO BERENCO DINAS PEMBERI PERLIND ANAK DA KELUARO BERENCO DINAS PEMBERI PERLIND ANAK DA KELUARO BERENCO

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN				- KELOMPOK		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGK DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	RENJA OPD	TARGET RENJA	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Portombob/Poulsurong (40.42)	LOKASI	CUMPED DANA	PRIORITAS	SASARAN	TARCET	DACH INDIVATIE (Da)	PENANGGU JAWAB
	KEGIATAN		OPD	TAHUN 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025 F	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL DAERAH	1	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	JAWA
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 17	18	19	20	21
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDA PEREMPUAI PERLINDUN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung				100 %	100 %	94.581.000,00	87.381.000,00	87.381.000,00	-7.200.000,00			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		94.581.000,00	DINAS PEMBERDA PEREMPUA PERLINDUN ANAK DAN KELUARGA BERENCAN
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikas	, Sumber Daya Air dan Listrik			_							_				_		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	19.200.000,00	0,00	0,00	-19.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDA PEREMPUA PERLINDUN ANAK DAN KELUARGA BERENCAN
2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan d	an Perlengkapan Kantor												I	l			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3.00 Laporan	3.00 Laporan	72.000.000,00	0,00	0,00	-72.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDA PEREMPUA PERLINDUN ANAK DAN KELUARGA BERENCAN
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Umum Kantor					'		'					-	1			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	3.381.000,00	0,00	0,00	-3.381.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDA PEREMPUA PERLINDUN ANAK DAN KELUARGA BERENCAN
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik				100 %	100 %	205.100.000,00	144.100.000,00	134.970.000,00	-70.130.000,00			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		205.100.000,00	DINAS PEMBERDA PEREMPUA PERLINDUN ANAK DAN KELUARGA BERENCAN
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemelihara	u an, Biaya Pemeliharaan, dan Pa	⊥ ajak Kendaraan l	Perorangan Dina	⊥ as atau Kendaraan [Dinas Jabatan												
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				28.00 Unit	28.00 Unit	198.100.000,00	0,00	0,00	-198.100.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDA PEREMPUA PERLINDUI ANAK DAN KELUARGA BERENCAN
2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sa	rana dan Prasarana Pendukung	Gedung Kantoi	or atau Bangunan	Lainnya							L						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30.00 Unit	30.00 Unit	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDA PEREMPUA PERLINDUI ANAK DAN KELUARGA BERENCAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.226.747.400,00	9.107.890.300,00	8.871.818.300,00	-354.929.100,00						8.701.062.400,00	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							5.363.096.400,00	1.009.268.000,00	919.277.000,00	-4.443.819.400,00						668.002.000,00	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender				100 %	100 %	428.875.000,00	323.875.000,00	261.875.000,00	-340.000.000,00						88.875.000,00	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya Pengetahuan tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				100 %	100 %	88.875.000,00	88.875.000,00	81.875.000,00	-7.000.000,00			Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	-		88.875.000,00	DINAS PEMBERDA PEREMPUA PERLINDUN ANAK DAN KELUARGA BERENCAN
2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyele	nggaraan PUG kewenangan Kal	b/Kota															
		Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota				25 Orang	25 Orang	88.875.000,00	88.875.000,00	81.875.000,00	-7.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			88.875.000,00	DINAS PEMBERDA PEREMPUA PERLINDUI ANAK DAN KELUARGA BERENCAN
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	340.000.000,00	235.000.000,00	180.000.000,00	-160.000.000,00			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PEMBERD PEREMPU PERLINDU ANAK DAN KELUARG BERENCAI
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pend	dampingan Peningkatan Partisipa	asi Perempuan	dan Politik, Huku	um, Sosial dan Ekon	nomi												
		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Organisasi	0 Organisasi	340.000.000,00	235.000.000,00	180.000.000,00	-160.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDA PEREMPUA PERLINDUI ANAK DAN KELUARGA BERENCAN
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan				100 %	100 %	125.561.000,00	96.181.000,00	96.181.000,00	-98.400.000,00						27.161.000,00	

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN					WEI ONE		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT
IO KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PR	IORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUN JAWAB
			OPD	17411011 2020	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	,	LONAGI		NASIONAL	DAERAH			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan				100 %	100 %	27.161.000,00	27.161.000,00	27.161.000,00	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		27.161.000,00	DINAS PEMBERDAYA PEREMPUAN, PERLINDUNGA ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi P	elaksanaan Penyediaan Layana Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan	n Rujukan Lanju	utan bagi Perempua	an Korban Kekera	san Kewenan 5 Layanan	gan Kabupaten/K	27.161.000,00	27.161.000,00	27.161.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEREMPUAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			27.161.000,00	PEMBERDAYA PEREMPUAN, PERLINDUNGA ANAK DAN
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah	Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Data serta Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak korban Kekerasan dan TPPO				100 %	100 %	98.400.000,00	69.020.000,00	69.020.000,00	-29.380.000,00		DAN ANAK	-	Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber	-		0,00	KELUARGA BERENCANA DINAS PEMBERDAYA PEREMPUAN, PERLINDUNGA
2.08.03.2.03.0001	Kabupaten/Kota	ampingan Penyediaan Sarana F	Prasarana Layan	nan bagi Perempua	n Korban Kekeras	san Kewenang	gan Kabupaten/Ko	ota							Daya Manusia				KELUARGA BERENCANA
	,	Jumlah Dokumen Hasil				5 Dokumen	1	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00		PENDAPATAN	-	Meningkatkan			0,00	DINAS
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota										Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ASLI DAERAH (PAD)		Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				PEMBERDAYA PEREMPUAN, PERLINDUNG, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumbe	1	anan Penangana T	an bagi Perempuar	n Korban Kekeras	1	1				1	_							
		Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0 Orang	88.400.000,00	69.020.000,00	69.020.000,00	-19.380.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYA PEREMPUAN, PERLINDUNGA ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN	-				-	-	52.880.000,00	77.880.000,00	74.880.000,00	0,00							52.880.000,00	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	52.880.000,00	77.880.000,00	74.880.000,00	22.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		52.880.000,00	DINAS PEMBERDAYA PEREMPUAN, PERLINDUNG ANAK DAN KELUARGA
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Mas	syarakat untuk Peningkatan Kual	litas Keluarga Ke	ewenangan Kabupa	aten/Kota														BERENCANA
		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	52.880.000,00	77.880.000,00	74.880.000,00	22.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			52.880.000,00	DINAS PEMBERDAYA PEREMPUAN, PERLINDUNGA ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
4. 2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Lembaga Penyedia Layanan terhadap Anak				33,33 %	33,33 %	129.245.000,00	170.000.000,00	145.000.000,00	0,00							129.245.000,00	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pengetahuan tentang Pemenuhan Hak-hak Anak Menuju kabupaten Layak Anak				100 %	100 %	129.245.000,00	170.000.000,00	145.000.000,00	15.755.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		129.245.000,00	PEMBERDAYA PEREMPUAN, PERLINDUNGA ANAK DAN KELUARGA
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Lavanan Peningk	atan Kualitas Hidup Anak Kewer	nangan Kabupat	ten/Kota															BERENCANA
2.00.00.2.02.0001	renyediaan Layanan reningk	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tangan Kabupat	leti/Kota		11 Orang	11 Orang	129.245.000,00	170.000.000,00	145.000.000,00	15.755.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			129.245.000,00	DINAS PEMBERDAYA PEREMPUAN, PERLINDUNGA ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan pendampingan anak yang membutuhkan perlindungan khusus				100 %	100 %	434.439.000,00	334.470.000,00	334.479.000,00	-71.460.000,00							362.979.000,00	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersampaikannya Informasi tentang kekerasan Terhadap Anak pada 700 Anak di 5 Kecamatan				100 %	100 %	130.000.000,00	101.491.000,00	101.500.000,00	-28.500.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYA PEREMPUAN, PERLINDUNGA ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan	I Perangkat Daerah dalam pelaks	anaan kebijakan	n /program/ kegiatai	n pencegahan KT	·A		I			1	1	1				<u>i</u>	1	
		Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				1 Orang	761 Orang	130.000.000,00	101.491.000,00	101.500.000,00	-28.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYA PEREMPUAN, PERLINDUNGA ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kasus Anak yang terlayani				100 %	100 %	304.439.000,00	232.979.000,00	232.979.000,00	-71.460.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		232.979.000,00	
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengado	 uan Masyarakat bagi Anak yang	l Memerlukan Pe	I erlindungan Khusus	s Tingkat Daerah h	l Kabupaten/Ko	ta					I				1	1	1	
		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				40 Orang	40 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYA PEREMPUAN, PERLINDUNG ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Laya	I									1								
		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				1 Layanan	40 Layanan	274.439.000,00	202.979.000,00	202.979.000,00	-71.460.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			202.979.000,00	DINAS PEMBERDAYA PEREMPUAN, PERLINDUNGA ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN I	KERANGKA PENDANAAN							AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKA
KODE	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	GET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Portombok / Parlament / (2000)	LOKACI	SUMBER DANA	PRIO	PRITAS	- KELOMPOK SASARAN			DAERAH PENANGGUI JAWAB
	KEGIATAN		OPD	1AHUN 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	JAWAB
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							3.863.651.000,00	8.098.622.300,00	7.952.541.300,00	4.088.890.300,00							8.033.060.400,00	
8.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang				92,50 %	92,50 %	4.192.096.400,00	4.175.943.300,00	4.114.862.300,00	0,00							4.192.096.400,00	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana																	
08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	26.124.000,00	26.124.000,00	26.124.000,00	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	А		26.124.000,00	DINAS PEMBERDAY, PEREMPUAN PERLINDUNG ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Peren	anaan Perangkat Daerah																	BEREIVOAIVA
		Jumlah Dokumen				2.00	2.00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00		Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Meningkatkan			7.400.000,00	DINAS
		Perencanaan Perangkat Daerah				Dokumen	Dokumen					Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				PEMBERDAY PEREMPUAN PERLINDUNG ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan D	Ookumen RKA-SKPD																	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.431.000,00	3.431.000,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.431.000,00	DINAS PEMBERDAY PEREMPUAN PERLINDUNG ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan D	I PA-SKPD	<u> </u>			I	1			1					I	I	I	1	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.431.000,00	3.431.000,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.431.000,00	DINAS PEMBERDAY PEREMPUAN PERLINDUNG ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan L	l aporan Capaian Kinerja dan Ikht	l isar Realisasi K	l Kinerja SKPD						1	L.							1	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.00 Laporan	2.00 Laporan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAY PEREMPUAN PERLINDUNG ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	3.573.996.400,00	3.603.198.300,00	3.603.198.300,00	29.201.900,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan	-			DINAS PEMBERDAY PEREMPUAN PERLINDUNG
															Kualitas Sumber Daya Manusia				ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjang	1				T		1					T		T				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14.00 Oran g/bulan	14.00 Oran g/bulan	0,00	3.597.698.300,00	3.597.698.300,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.568.496.400,00	DINAS PEMBERDAY PEREMPUAN PERLINDUNG ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan L	aporan Keuangan Akhir Tahun S	SKPD																
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.500.000,00	DINAS PEMBERDAY PEREMPUAN PERLINDUNG ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan L	aporan Keuangan Bulanan/ Triw	ulanan/ Semes	teran SKPD		_													
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18.00 Laporan	18.00 Laporan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.000.000,00	DINAS PEMBERDAY PEREMPUAN PERLINDUNG ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan A	nalisis Prognosis Realisasi Angg T	aran							T	I					1		1	
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.000.000,00	DINAS PEMBERDAY PEREMPUAN PERLINDUNG ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				100 %	100 %	277.295.000,00	290.640.000,00	238.689.000,00	-38.606.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-			DINAS PEMBERDAY PEREMPUAN PERLINDUNG ANAK DAN KELUARGA
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instala																		BERENCANA
	Listrik/Penerangan Bangunan	I				12.00	12.00	0,00	4.225.000,00	4.225.000,00	4.225.000,00 k	Kah Pecicir	DANA ALOKASI		Meningkatkan			4.225.000,00	DINIAS
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	0,00	4.225.000,00	4.225.000,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				PEMBERDAY PEREMPUAN PERLINDUNG ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Ka	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAY PEREMPUAN PERLINDUNG ANAK DAN

) KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE REALISASI CAPAIAN PERIODE	TARGET DENIA					CAPAIAN KINERJA DAN I	ERANGKA PENDANAAN		ı		KELOI	мрок	RAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN KEGIATAN	RENSTRA TAHUN 202	OPD TAHUN		GET 2025	DVDD coor	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI SU	JMBER DANA	PRIORITAS	SASA		RGET PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
2	2	4	5. 2	7	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	12	14	15		DAERAH 17 1	0 4	19 20	24
2 09 04 2 06 0005	Denvedieen Bereng Ceteken	den Benggendeen	5 6	/	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 1	8	19 20	21
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	Jumlah Paket Barang			12.00	12.00	0,00	38.415.000,00	28.464.000,00	28.464.000,00 Ka	ab. Pesisir DA	ANA ALOKASI	Mania	ngkatkan		25.070.000,00	DINAS
		Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12.00 Paket	12.00 Paket	0,00	36.413.000,00	26.464.000,00	Ba	arat, Semua UN ecamatan,	MUM (DAU)	Kualita	as Sumber Manusia		25.070.000,00	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
		yang Biodalahan									emua Kel/Desa		Menin	ngkatkan as Sumber			PERLINDUNGAN ANAK DAN
														Manusia			KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan d	<u> </u> an Peraturan Perundang-undan	gan														
	,	Jumlah Dokumen Bahan			12.00	12.00	0,00	12.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00 Ka	ab. Pesisir DA	NA ALOKASI	- Menin	ngkatkan		12.000.000,00	DINAS
		Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang			Dokumen	Dokumen				Ke	ecamatan,	MUM (DAU)	Daya	as Sumber Manusia			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
		Disediakan								Se	emua Kel/Desa		Kualita	ngkatkan as Sumber			PERLINDUNGAN ANAK DAN
													Daya	Manusia			KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
		Jumlah Laporan Fasilitasi			11.00	11.00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00		ab. Pesisir DA	NA ALOKASI	- Menin	ngkatkan		11.000.000,00	
		Kunjungan Tamu			Laporan	Laporan				Ke	ecamatan,	ИUM (DAU)	Daya	as Sumber Manusia			PEMBERDAYAA PEREMPUAN,
										56	emua Kel/Desa		Kualita	ngkatkan as Sumber			PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
													Дауа	Manusia			BERENCANA
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koo	rdinasi dan Konsultasi SKPD														·	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat			12.00	12.00	0,00	200.000.000,00	152.000.000,00		ab. Pesisir DA	ANA ALOKASI MUM (DAU)	- Menin	ngkatkan as Sumber		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAA
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Laporan	Laporan				Ke	arat, Semua UN ecamatan, emua Kel/Desa	NOM (DAU)	Daya	Manusia ngkatkan			PEREMPUAN, PERLINDUNGA
		SKFD									emua Kel/Desa		Kualita	as Sumber Manusia			ANAK DAN KELUARGA
													Daya	ivialiusia			BERENCANA
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase pemenuhan			100 %	100 %	15.000.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	9.500.000,00			- Menin	ngkatkan - as Sumber		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAA
	Pemerintah Daerah	sarana dan prasarana pendukung kinerja											Daya	Manusia			PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
													Kualita	ngkatkan as Sumber Manusia			ANAK DAN KELUARGA
													Daya	ivialiusia			BERENCANA
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Me	esin Lainnya															
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang			1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00 Ka	ab. Pesisir DA arat, Semua UN	NA ALOKASI MUM (DAU)	- Menin Kualit	ngkatkan as Sumber		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAA
		Disediakan								Ke	ecamatan, emua Kel/Desa	(27.10)	Daya Menin	Manusia ngkatkan			PEREMPUAN, PERLINDUNGAI
													Kualita	as Sumber Manusia			ANAK DAN KELUARGA
													,.				BERENCANA
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung			100 %	100 %	94.581.000,00	87.381.000,00	87.381.000,00	-7.200.000,00			- Menin Kualita	ngkatkan - as Sumber		94.581.000,00	DINAS PEMBERDAYAA
	Daerah												Daya	Manusia			PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
													Kualita Daya	ngkatkan as Sumber Manusia			ANAK DAN KELUARGA
																	BERENCANA
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikas	i, Sumber Daya Air dan Listrik															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber			12.00 Laporan	12.00 Laporan	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Ba	arat, Semua UN	NA ALOKASI MUM (DAU)	Kualita	ngkatkan as Sumber		19.200.000,00	PEMBERDAYAA
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan									ecamatan, emua Kel/Desa		Menin	Manusia ngkatkan			PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
														as Sumber Manusia			ANAK DAN KELUARGA
2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan d	den Deulemakenen Kenter															BERENCANA
2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan C	Jumlah Laporan Penyediaan			3.00	3.00	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00 Ka	oh Bosinir D/	ANA ALOKASI	Monin	ngkatkan		72.000.000,00	DINAS
		Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang			Laporan	Laporan	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	Ba	arat, Semua UN ecamatan,	MUM (DAU)	Kualita	as Sumber Manusia		72.000.000,00	PEMBERDAYAA PEREMPUAN,
		Disediakan									emua Kel/Desa		Menin	ngkatkan as Sumber			PERLINDUNGAN ANAK DAN
														Manusia			KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Umum Kantor															DETAIL TO THE T
	, saidan dada i diayanan	Jumlah Laporan Penyediaan			12.00	12.00	0,00	3.381.000,00	3.381.000,00	3.381.000,00 Ka	ab. Pesisir	ANA ALOKASI	- Menin	ngkatkan		3.381.000,00	DINAS
		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Laporan	Laporan	0,00	3.331.000,00	3.551.550,00	Ba	arat, Semua UN ecamatan,	MUM (DAU)	Kualita	as Sumber Manusia		3.301.000,00	PEMBERDAYAA PEREMPUAN,
		, g =									emua Kel/Desa		Menin	ngkatkan as Sumber			PERLINDUNGAN ANAK DAN
														Manusia			KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik	Persentase Barang Milik			100 %	100 %	205.100.000,00	144.100.000,00	134.970.000,00	-70.130.000,00			- Menin	ngkatkan -		205.100.000,00	
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah yang dalam kondisi baik			. .								Kualita Daya	as Sumber Manusia			PEMBERDAYAA PEREMPUAN,
													Menin Kualita	ngkatkan as Sumber			PERLINDUNGAI ANAK DAN
														Manusia			KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemelihara	<u>l</u> aan, Biaya Pemeliharaan, dan Pa	_	nas atau Kendaraan Din	nas Jabatan					1				-		l	
		Jumlah Kendaraan			28.00 Unit		0,00	137.100.000,00	128.400.000,00	128.400.000,00 Ka	ab. Pesisir DA	NA ALOKASI	- Menin	ngkatkan		198.100.000,00	DINAS
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								Ba Ke	arat, Semua UN ecamatan,	MUM (DAU)	Kualita Daya	as Sumber Manusia			PEMBERDAYAA PEREMPUAN,
		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya									emua Kel/Desa		Menin Kualita	ngkatkan as Sumber			PERLINDUNGA ANAK DAN
													Daya	Manusia			KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sa	 arana dan Prasarana Pendukung	g Gedung Kantor atau Banguna	an Lainnya			I			I	<u> </u>		<u> </u>	l .	l	I	
		Jumlah Sarana dan			30.00 Unit	30.00 Unit	0,00	7.000.000,00	6.570.000,00	6.570.000,00 Ka	ab. Pesisir DA	NA ALOKASI	- Menin	ngkatkan as Sumber		7.000.000,00	DINAS
		Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau								Ke	ecamatan,	ИUM (DAU)	Daya	Manusia			PEMBERDAYAA PEREMPUAN,
	1	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								Se	emua Kel/Desa		Kualita	ngkatkan as Sumber			PERLINDUNGAN ANAK DAN
													Daya	Manusia			KELUARGA BERENCANA
					0,95 %	0,95 %	247.600.000,00	176.400.000,00	176.400.000,00	-12.000.000,00						235.600.000,00	
2.14.02	PROGRAM	Laju Pertumbuhan			0,95 %	'	1					I		1	ı	<u> -</u>	İ
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk			0,95 %						ļ						
2.14.02 2.14.02.2.01	PENGENDALIAN PENDUDUK Pemaduan dan Sinkronisasi	Penduduk Terbentuknya Sekolah Siaga			100 %	100 %	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			- Menin	ngkatkan -		13.000.000,00	
	PENGENDALIAN PENDUDUK Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan	Penduduk	,				25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			Kualita Daya	as Sumber Manusia		13.000.000,00	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
	PENGENDALIAN PENDUDUK Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah	Penduduk Terbentuknya Sekolah Siaga	,				25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			Kualit Daya Menin Kualit	as Sumber		13.000.000,00	PEMBERDAYAAN

		URUSAN / BIDANG		TARGET REALISASI	PRAKIRAAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN					IN MAJU RENCANA AHUN 2026	PERANGKAT
NO	KODE	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENJA OPD	TARGET RENJA	TARG	ET 2025	F	PAGU INDIKATIF (Rp)				PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN			DAERAH PENANGGUNG
		KEGIATAN		OPD TAHUN 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	JAWAB
1	2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	12	13 14	15	16 17	18	19	20	21
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi	;		5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber			13.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
			Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal								Kecamatan, Semua Kel/Desa		Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber				PERLINDUNGAN ANAK DAN
			di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan										Daya Manusia				KELUARGA BERENCANA
			SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal														
2.14.0	2.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pend	lidikan Kependudukan Jalur Per	ndidikan Formal													
			Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan			0 Kegiatan	0 Kegiatan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN
			Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan								Kecamatan, Semua Kel/Desa		Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber				PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
													Daya Manusia				KELUARGA BERENCANA
2.14.0	2.2.02	Pemetaan Perkiraan	Tersedianya Indikator			100 %	100 %	222.600.000,00	176.400.000,00	176.400.000,00	-46.200.000,00		- Meningkatkan	-		222.600.000,00	
		Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	Program Bangga Kencana dalam Kebijakan							·			Kualitas Sumber Daya Manusia				PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
		Kabupaten/Kota	Pembangunan										Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
													Daya Manusia				BERENCANA
2.14.0	2.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpular	1			т								T			
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data			11.0 Laporan	11.0 Laporan	87.600.000,00	86.400.000,00	86.400.000,00	-1.200.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Kualitas Sumber			87.600.000,00	PEMBERDAYAAN
			Keluarga								Kecamatan, Semua Kel/Desa		Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber				PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
													Daya Manusia				KELUARGA BERENCANA
2.14.0	2.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan D	│ ata Pengendalian Lapangan dar	_ n Pelayanan KB													
			Jumlah Dokumen			11.0	11.0	120.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-30.000.000,00 Kab. Pesisir	DAK NON	- Meningkatkan			120.000.000,00	
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			Dokumen	Dokumen				Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	FISIK-BOKB-KB	Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan				PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
			Lapangan dan Felayanan N.S								Gentua Rev Desa		Kualitas Sumber Daya Manusia				ANAK DAN KELUARGA
																	BERENCANA
2.14.0	2.2.02.0015	Pembentukan dan operasiona	lisasi Rumah Data Kependudul Jumlah Rumah Data	kan di Kampung KB Untuk Mer	mperkuat Integrasi Pro	1			0.00	0.00	45 000 000 00 Keb Besisir	DANA ALOKAGI	Manifestation			45,000,000,00	DINIAC
			Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk			11 Unit	11 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
			Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana								Semua Kel/Desa		Meningkatkan Kualitas Sumber				PERLINDUNGAN ANAK DAN
			(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan										Daya Manusia				KELUARGA BERENCANA
			Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk														
3. 2.14.0	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Total Fertility Rate			2,13 Angka	2,13 Angka	2.336.451.000,00	1.624.741.000,00	1.609.741.000,00	-3.825.000,00					2.332.626.000,00	
		(КВ)															
2.14.0	3.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Program	,		100 %	100 %	870.000.000,00	821.265.000,00	821.265.000,00	-48.735.000,00		- Meningkatkan Kualitas Sumber	-		870.000.000,00	PEMBERDAYAAN
		Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	KKBPK										Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber				PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
		Realiiali Budaya Lokai											Daya Manusia				KELUARGA BERENCANA
2.14.0	3.2.01.0008	Pengendalian Program KKBP	 K														
			Jumlah Laporan Hasil			11.0	11.0	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	- Meningkatkan			80.000.000,00	DINAS
			Pengendalian Program KKBPK			Laporan	Laporan				Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan				PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
											Somula New Bessa		Kualitas Sumber Daya Manusia				ANAK DAN KELUARGA
																	BERENCANA
2.14.0	3.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan	Sarana di Balai Penyuluhan Ba	angga Kencana		10.00	10.00	045 000 000 00	474 400 000 00	474 400 000 00	450 400 000 00 164 15 164	DAKNON	Markataka			045 000 000 00	DINIAG
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai			10.00 Laporan	10.00 Laporan	315.000.000,00	474.192.000,00	474.192.000,00	159.192.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-BOKB-KB	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			315.000.000,00	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
			Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,								Semua Kel/Desa		Meningkatkan Kualitas Sumber				PERLINDUNGAN ANAK DAN
			Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)										Daya Manusia				KELUARGA BERENCANA
2.14.0	3.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Ope	rasional Program Bangga Kenc	cana melalui Rapat Koordinasi K	Kecamatan (Rakorcan	n), Rapat Koo	rdinasi Desa (Rakoro	des), dan Mini Lokakarya (Minilok	k)	1							
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program			11.00 Laporan	11.00 Laporan	165.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	-55.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua	DAK NON FISIK-BOKB-KB	- Meningkatkan Kualitas Sumber			165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
			Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,			Laporan	Laporan				Kecamatan, Semua Kel/Desa	TION BOND ND	Daya Manusia				PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
			Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui	;									Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				ANAK DAN KELUARGA
			Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes),														BERENCANA
			dan Mini Lokakarya (Minilok)														
2.14.0	3.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Ba	1	assa Cetak dan Elektronik serta	a Media Luar Ruang			1	-		T		1				
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga			11.00 Dokumen	11.00 Dokumen	100.000.000,00	80.073.000,00	80.073.000,00	-19.927.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Kualitas Sumber			100.000.000,00	PEMBERDAYAAN
			Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)								Kecamatan, Semua Kel/Desa		Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber				PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
			Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media										Daya Manusia				KELUARGA BERENCANA
			Luar Ruang														
2.14.0	3.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Ed	1	encana sesuai Kearifan Budaya	Lokal		10:	22 22 22 2				DALLANCE	1				Division
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana			1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DAK NON FISIK-BOKB-KB	- Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
			(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan								Semua Kel/Desa		Meningkatkan Kualitas Sumber				PERLINDUNGAN ANAK DAN
			Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang										Daya Manusia				KELUARGA BERENCANA
	10.04.001	Advalaci Dana	dilaksanakan		ria.												
2.14.0	3.2.01.0014	Advokası Program Bangga ke	1	ada Stakeholders dan Mitra Kerj	rja	11.00	11.00	450,000,000,00	07 000 000 00	07.000.000.00	E2 000 000 00 Kala B 11	DANA ALOKASI	Maniestelle			450,000,000,00	DINAC
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi			11.00 Organisasi	11.00 Organisasi	150.000.000,00	97.000.000,00	97.000.000,00	-53.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua	UMUM (DAU)	Meningkatkan Kualitas Sumber			150.000.000,00	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
			Program Bangga Kencana				1	į.		Į.	Kacamatan	DAK NON '	T Dava Mannels	1			
			Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada								Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN I	KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK	PRAKIRA	AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
NO KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	IARC	GET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		ORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUN JAWAB
			OPD		2024	SEBELUM		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	40		45	NASIONAL	DAERAH	40	40	00	04
2.14.03.2.02	3 Pendayagunaan Tenaga	4 Terbinanya PPKBD	5	6	7	100 %	9 100 %	10 379.000.000,00	0,00	0.00	-379.000.000,00	14	15	16	17 Meningkatkan	18	19	379.000.000,00	DINAS
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kabupaten Pesisir Barat				100 %	100 %	379.000.000,00	0,00	0,00	-379.000.000,00			-	Kualitas Sumber Daya Manusia	-		379.000.000,00	PEMBERDAYAA PEREMPUAN.
	Lapangan ND (1 ND/1 LND)														Meningkatkan Kualitas Sumber				PERLINDUNGAI ANAK DAN
															Daya Manusia				KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi	Masyarakat Pedesaan (IMP)						L			L.								
		Jumlah Kader yang				118.00	118.00	379.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir	DAK NON	-	Meningkatkan			379.000.000,00	
		Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat				Orang	Orang				h	Barat, Semua Kecamatan,	FISIK-BOKB-KB		Kualitas Sumber Daya Manusia				PEMBERDAYAA PEREMPUAN,
		Pedesaan (IMP)									8	Semua Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber				PERLINDUNGAN ANAK DAN
															Daya Manusia				KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan	Terlaksananya Pendistribusian Alkon di				100 %	100 %	642.701.000,00	638.876.000,00	623.876.000,00	-18.825.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber	-		638.876.000,00	DINAS PEMBERDAYAA
	Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan	Fasilitas Kesehatan													Daya Manusia Meningkatkan				PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
	Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota														Kualitas Sumber Daya Manusia				ANAK DAN KELUARGA
																			BERENCANA
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusia	n Alat dan Obat Kontrasepsi dan	n Sarana Penunj	ang Pelayanan KB	ke Fasilitas Kese	ehatan Termas	uk Jaringan dan Je	jaringnya		T									
		Jumlah Laporan Pengendalian				12.00 Laporan	12.00 Laporan	7.000.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			11.700.000,00	PEMBERDAYAAI
		Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan										Kecamatan, Semua Kel/Desa	1		Daya Manusia Meningkatkan				PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
		Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas													Kualitas Sumber Daya Manusia				ANAK DAN KELUARGA
		Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																	BERENCANA
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Peng	ggunaan Metode Kontrasepsi Jar	ngka Panjang (M	/IKJP)			·				·				•				
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan				1000 Orang	g 1000 Orang	534.401.000,00	517.826.000,00	517.826.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			517.826.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN
		Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	,								H	Kecamatan, Semua Kel/Desa			Daya Manusia Meningkatkan				PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
		(MKJP)										Jemua Rei/Desa	`		Kualitas Sumber Daya Manusia				ANAK DAN KELUARGA
															Daya Manasia				BERENCANA
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Kelua	arga Berencana dan Kesehatan F	Reproduksi di Fa	asilitas Kesehatan	Termasuk Jaringa	an dan Jejaring	ınya			1									
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan				11.00 Laporan	11.00 Laporan	11.300.000,00	19.350.000,00	19.350.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			19.350.000,00	PEMBERDAYAAN
		Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di									h	Kecamatan, Semua Kel/Desa	.		Daya Manusia Meningkatkan				PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
		Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan													Kualitas Sumber Daya Manusia				ANAK DAN KELUARGA
		Jejaringnya																	BERENCANA
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelay					_	T T			T	T.				T				
		Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB				4.00 Laporan	4.00 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	75.000.000,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			90.000.000,00	PEMBERDAYAAN
		Bergerak										Kecamatan, Semua Kel/Desa	ı		Daya Manusia Meningkatkan				PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
															Kualitas Sumber Daya Manusia				ANAK DAN KELUARGA
0.44.00.0.4	Domboudouses des	Damantana Kadan dan				400.0/	400.00	444.750.000.00	464 600 000 00	404 000 000 00	000 450 000 00				Maningladian			444 750 000 00	BERENCANA
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Kader dan Kelompok kerja (pokja) yang terbentuk dan terbina di	,			100 %	100 %	444.750.000,00	164.600.000,00	164.600.000,00	-280.150.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		444.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam	kampung KB													Meningkatkan Kualitas Sumber				PERLINDUNGAN ANAK DAN
	Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan														Daya Manusia				KELUARGA BERENCANA
	Ber-KB																		DETTE TO THE T
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Linta									T									
		Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	3.750.000,00	164.600.000,00	164.600.000,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			3.750.000,00	PEMBERDAYAAN
		Lintas Sektor di Kampung KE	В									Kecamatan, Semua Kel/Desa	ı		Daya Manusia Meningkatkan				PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
															Kualitas Sumber Daya Manusia				ANAK DAN KELUARGA
2.14.03.2.04.0006	Deleksensen den Bengeleles	an Program Bangga Kencana di I	Kampung Kalua	rgo Borkupliton															BERENCANA
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaa	Jumlah Kampung Keluarga	Kampung Kelua	rga berkualitas		28.00	28.00	441.000.000,00	0,00	0,00	-441.000.000,00 k	Cab Posisir	DAK NON	_	Meningkatkan			441.000.000,00	DINAS
		Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan				Kampung	Kampung	441.000.000,00	0,00	0,00	E	Barat, Semua Kecamatan,	FISIK-BOKB-KB		Kualitas Sumber Daya Manusia			441.000.000,00	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
		Pengelolaan Program Bangga Kencana										Semua Kel/Desa	1		Meningkatkan Kualitas Sumber				PERLINDUNGAN ANAK DAN
		(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan													Daya Manusia				KELUARGA BERENCANA
		Keluarga Berencana)																	
4. 2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	Indeks Pembangunan Keluarga				62,50 Angka	62,50 Angka	1.279.600.000,00	2.128.400.000,00	2.058.400.000,00	0,00							1.279.600.000,00	
	PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA																		
	(KS)																		
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	Berencana, Kelompok				100 %	100 %	360.400.000,00	1.044.000.000,00	1.044.000.000,00	683.600.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber	-		360.400.000,00	PEMBERDAYAAN
	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	BKB-HI, Forum Asosiasi Kelompok UPPKS dan Kadei	er												Daya Manusia Meningkatkan				PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
		Poktan PKB dan PPKBD yang mendapatkan													Kualitas Sumber Daya Manusia				ANAK DAN KELUARGA
		pembinaan tentang ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta																	BERENCANA
		tim pendamping keluarga yang mendapatkan biaya																	
		operasional																	
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompo	k Kegiatan Ketahanan dan Kese	ejahteraan Kelua	arga (BKB, BKR, Bh	KL, PPKS, PIK-R		· ·												
		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan				11.00 Unit	11.00 Unit	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-200.000.000,00 F	Kab. Pesisir Barat, Semua	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			300.000.000,00	PEMBERDAYAAN
		Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									h	Kecamatan, Semua Kel/Desa			Daya Manusia Meningkatkan				PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
		(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha										304			Kualitas Sumber Daya Manusia				ANAK DAN KELUARGA
		Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																	BERENCANA
		yang tersedia																	
2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasion	nal bagi Kelompok Kegiatan Keta	ahanan dan Kes	ejahteraan Keluarg	ga (BKB, BKR, BK	L, PPKS, PIK-					I				T.,				
		Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan				-	0 Kelompok	0,00	944.000.000,00	944.000.000,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			0,00	DINAS PEMBERDAYAAI
		Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS,										Kecamatan, Semua Kel/Desa			Daya Manusia Meningkatkan				PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
		PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan													Kualitas Sumber Daya Manusia				ANAK DAN KELUARGA
l l	Ì	Keluarga Akseptor (UPPKA)					1						1						BERENCANA
		yang mendapat biaya operasional kegiatan									Į.								

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN							AN MAJU RENCANA ΓAHUN 2026	PERAN
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIC	DRITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANO JAW
	1.20711711		OPD	17411011 2020	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertamban/Berkarang (10 12)	LOTAGE	OSINDER DAINA	NASIONAL	DAERAH		TAROLI	TAGG INDINATII (II.p)	5 711
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	2
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Keta	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ga (Bina Kelua	ga Balita (BKB), E	Bina Keluarga Rem	1	1	T		T .	uarga Akseptor (UPPKA) dan Pemb	·			Manifestation	1		00 400 000 00	DINIAG
		Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				22 Kelompok	22 Kelompok	60.400.000,00	0,00	0,00	-60.400.000,00	Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.400.000,00	DINAS PEMBERI PEREMPI
		(Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja						!				Semua Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber				PERLIND ANAK DA
		(BKR), Pusat Informasi dan													Daya Manusia				KELUARO
		Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan																	BEREITO
		Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan																	
		Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk						!											
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan	Persentase Pekon,				100 %	100 %	919.200.000,00	1.084.400.000,00	1.014.400.000,00	95.200.000,00			-	Meningkatkan	-		919.200.000,00	DINAS
	Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan	Kecamatan yang mengikuti Lomba Kesra, serta Kader													Kualitas Sumber Daya Manusia				PEMBER PEREMP
	Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	Perempuan yang mendapat Pembinaan P3KSS dan GSI													Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				PERLING ANAK DA KELUAR
	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							!							Daya Wanasia				BERENC
2.14.04.2.02.0003		 pasitas Mitra dan Organisasi Ken	nasyarakatan d	alam Pengelolaan	Program Ketahana	 an dan Keseja	 ihteraan Keluai	rga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, P	 K-R dan Pemberdayaan Ekono	 omi Keluarga/UPPKS)									
		Jumlah Organisasi yang	-			11	11	40.000.000,00	165.000.000,00	95.000.000,00	55.000.000,00		DANA ALOKASI	-	Meningkatkan			40.000.000,00	DINAS
		Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan				Organisasi	Organisasi					Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		Kualitas Sumber Daya Manusia				PEMBER PEREMR
		Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program										Semua Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber				PERLINI ANAK D
		Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,						!							Daya Manusia				KELUAR BERENO
		PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						!											
14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Inform	nasi Keluarga Berisiko Stunting (T	ermasuk rema	ia Calon Penganti	n/Calon PUS. Ibu F	lamil. Pasca s	alin/kelahiran	Baduta/Balita)											
		Cakupan Pemantauan Data		2garial		0 laporan	0 Iaporan	402.000.000,00	402.000.000,00	402.000.000,00	0.00	Kab. Pesisir	DAK NON	-	Meningkatkan			402.000.000,00	DINAS
		dan İnformasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk				·			·	·	·	Barat, Semua Kecamatan,	FISIK-BOKB-KB		Kualitas Sumber Daya Manusia			·	PEMBE PEREM
		remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu										Semua Kel/Desa			Meningkatkan Kualitas Sumber				PERLIN ANAK D
		Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						!							Daya Manusia				KELUAI BEREN
14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Ber	siko Stunting (Termasuk remaja 0	Calon Penganti	n/Calon PUS, Ibu	Hamil, Pasca salin/	/kelahiran, Ba	duta/Balita)			•									
		Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja				0.00 laporan	0.00 laporan	477.200.000,00	517.400.000,00	517.400.000,00	40.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber			477.200.000,00	DINAS PEMBE
		Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca				Пароган	ароган					Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB		Daya Manusia Meningkatkan				PEREMI
		salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang										110,, 2000	THOM BOND NO		Kualitas Sumber Daya Manusia				ANAK D
		mendapat pendampingan													,				BEREN
	DINAS KETAHANAN PANG							7.624.498.250,00	7.653.858.700,00		266.010.450,00							9.299.905.355,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK							6.241.430.800,00	6.309.265.700,00	6.188.915.700,00	-52.515.100,00							7.152.169.310,00	
	BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							6.241.430.800,00	6.309.265.700,00	6.188.915.700,00	-52.515.100,00							7.152.169.310,00	
.09.01	PROGRAM PENUNJANG	Cakupan Pemenuhan				92.50 %	92.50 %	5.782.941.400,00	6.037.265.700,00	5.982.265.700,00	860.030.870,00							6.642.972.270,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
.09.01.2.01	Perencanaan,	Persentase Dokumen				100 %	100 %	12.400.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00	1.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur		14.740.000,00	DINAS F
	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja				, , , ,	100 /0				,				dan Pelayanan Publik Berkualitas	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			PANGAN
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Perangkat Daerah Tepat Waktu						!							Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
															Publik Berkualitas				
09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perer																		
				\Box		O Delawaran	0 D - I	7 400 000 00	0.400.000.00	0.400.000.00	4 000 000 00	Kah Basisis	L DANIA ALOKAGI L		Deference Directors of	<u> </u>		0.040.000.00	DINIAGO
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat				2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	1.000.000,00	Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			9.240.000,00	PANGA
		Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	1.000.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi			9.240.000,00	PANGA
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat				2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	1.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas			9.240.000,00	PANGA
09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah .aporan Capaian Kinerja dan Ikhti	isar Realisasi K	inerja SKPD		2 Dokumen	2 Dokumen					Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			9.240.000,00	PANGA PERTAI
09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhti Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	isar Realisasi K	inerja SKPD		2 Dokumen 1 Laporan	2 Dokumen 1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00			Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			9.240.000,00	PANGA PERTAI DINAS I PANGA
09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhti Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	isar Realisasi K	inerja SKPD								Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				PANGA PERTAI DINAS I PANGA
09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhti Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	isar Realisasi K	inerja SKPD								Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				PANGA PERTAN DINAS I PANGA
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhti Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	isar Realisasi K	inerja SKPD		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		5.500.000,00	DINAS PERTAI
	Koordinasi dan Penyusunan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhti Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	isar Realisasi K	inerja SKPD						5.000.000,00		Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur			DINAS I PANGA
	Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah aporan Capaian Kinerja dan Ikhti Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Pelaporan	isar Realisasi K	inerja SKPD		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi	Aparatur		5.500.000,00	DINAS I PANGA
09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhti Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Pelaporan Keuangan tepat waktu	isar Realisasi K	linerja SKPD		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		5.500.000,00	DINAS I PANGA
09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhti Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Pelaporan Keuangan tepat waktu	isar Realisasi K	inerja SKPD		1 Laporan 100 %	1 Laporan 100 %	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	306.322.700,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		5.500.000,00 5.739.542.270,00	DINAS I PANGA PERTAI
09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah aporan Capaian Kinerja dan Ikhti Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Pelaporan Keuangan tepat waktu an ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	isar Realisasi K	inerja SKPD		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		5.500.000,00	DINAS I PANGA PERTAI
09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah aporan Capaian Kinerja dan Ikhti Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Pelaporan Keuangan tepat waktu Jumlah Orang yang	isar Realisasi K	(inerja SKPD		1 Laporan 100 %	1 Laporan 100 % 47 Orang/b	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	306.322.700,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		5.500.000,00 5.739.542.270,00	DINAS I PANGA PERTAI
09.01.2.02 09.01.2.02.0001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhti Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Pelaporan Keuangan tepat waktu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		(inerja SKPD		1 Laporan 100 %	1 Laporan 100 % 47 Orang/b	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	306.322.700,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		5.500.000,00 5.739.542.270,00	DINAS I PANGA PERTAI
09.01.2.02 09.01.2.02.0001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhti Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Pelaporan Keuangan tepat waktu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Laporan Keuangan Akhir Tahun S		(inerja SKPD		1 Laporan 100 % 47 Orang/b	1 Laporan 100 % 47 Orang/b ulan	5.000.000,00 4.911.443.000,00 4.905.943.000,00	5.000.000,00 5.217.765.700,00 5.212.265.700,00	5.000.000,00 5.217.765.700,00 5.212.265.700,00	0,00 306.322.700,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		5.739.542.270,00 5.733.492.270,00	DINAS I PANGA PERTAI
.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah aporan Capaian Kinerja dan Ikhti Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Pelaporan Keuangan tepat waktu an ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan		Ginerja SKPD		1 Laporan 100 %	1 Laporan 100 % 47 Orang/b	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00 5.217.765.700,00 5.212.265.700,00	0,00 306.322.700,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		5.500.000,00 5.739.542.270,00	DINAS PERTAN DINAS PERTAN DINAS PERTAN DINAS PERTAN DINAS PERTAN
.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah aporan Capaian Kinerja dan Ikhti Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Pelaporan Keuangan tepat waktu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	SKPD	Ginerja SKPD		1 Laporan 100 % 47 Orang/b	1 Laporan 100 % 47 Orang/b ulan	5.000.000,00 4.911.443.000,00 4.905.943.000,00	5.000.000,00 5.217.765.700,00 5.212.265.700,00	5.000.000,00 5.217.765.700,00 5.212.265.700,00	0,00 306.322.700,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		5.739.542.270,00 5.733.492.270,00	DINAS I PANGA PERTAI
.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah aporan Capaian Kinerja dan Ikhti Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Pelaporan Keuangan tepat waktu an ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	SKPD	Ginerja SKPD		1 Laporan 100 % 47 Orang/b	1 Laporan 100 % 47 Orang/b ulan	5.000.000,00 4.911.443.000,00 4.905.943.000,00	5.000.000,00 5.217.765.700,00 5.212.265.700,00	5.000.000,00 5.217.765.700,00 5.212.265.700,00	0,00 306.322.700,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		5.739.542.270,00 5.733.492.270,00	DINAS I PANGA PERTAI
.09.01.2.02.0001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjang Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah aporan Capaian Kinerja dan Ikhti Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Pelaporan Keuangan tepat waktu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	SKPD			1 Laporan 100 % 47 Orang/b	1 Laporan 100 % 47 Orang/b ulan	5.000.000,00 4.911.443.000,00 4.905.943.000,00	5.000.000,00 5.217.765.700,00 5.212.265.700,00	5.000.000,00 5.217.765.700,00 5.212.265.700,00	0,00 306.322.700,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		5.739.542.270,00 5.733.492.270,00	DINAS PANGAL PERTAN
.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjang Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhti Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Pelaporan Keuangan tepat waktu Laporan Keuangan Akhir Tahun SMPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan Bulanan/ Triwan Jumlah Laporan Keuangan Keuangan Bulanan/ Triwan Jumlah Laporan Keuangan	SKPD			1 Laporan 100 % 47 Orang/b	1 Laporan 100 % 47 Orang/b ulan	5.000.000,00 4.911.443.000,00 4.905.943.000,00	5.000.000,00 5.217.765.700,00 5.212.265.700,00	5.217.765.700,00 5.212.265.700,00 2.500.000,00	0,00 306.322.700,00 0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		5.739.542.270,00 5.733.492.270,00	DINAS PANGAI PERTAN DINAS PANGAI PERTAN DINAS PANGAI PERTAN DINAS PERTAN DINAS PERTAN DINAS PERTAN
.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjang Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah aporan Capaian Kinerja dan Ikhti Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Pelaporan Keuangan tepat waktu an ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN aporan Keuangan Akhir Tahun S Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD aporan Keuangan Bulanan/ Triwi Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	SKPD			1 Laporan 100 % 47 Orang/b ulan	1 Laporan 100 % 47 Orang/b ulan	5.000.000,00 4.911.443.000,00 4.905.943.000,00	5.000.000,00 5.217.765.700,00 5.212.265.700,00	5.217.765.700,00 5.212.265.700,00 2.500.000,00	0,00 306.322.700,00 0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		5.739.542.270,00 5.733.492.270,00	DINAS PANGAL PERTAN
.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjang Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah aporan Capaian Kinerja dan Ikhti Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Pelaporan Keuangan tepat waktu an ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN aporan Keuangan Akhir Tahun S Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD aporan Keuangan Bulanan/ Triwi Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	SKPD			1 Laporan 100 % 47 Orang/b ulan	1 Laporan 100 % 47 Orang/b ulan	5.000.000,00 4.911.443.000,00 4.905.943.000,00	5.000.000,00 5.217.765.700,00 5.212.265.700,00	5.217.765.700,00 5.212.265.700,00 2.500.000,00	0,00 306.322.700,00 0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		5.739.542.270,00 5.733.492.270,00	DINAS I PANGA PERTAI

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	ANDIN OAD	CAP.	IRAAN PAIAN				CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
O KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENJ.	IA OPD TARGET	IAHUN	RGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	SASARAN	TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG
			OPD TARO	20	SEBELU	JM SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	- ,	COMBER DAMA	NASIONAL DAERAH			
2	3	4	5	6 7	7 8	9	10	11	12	13 14	15	16 17	18	19 20	21
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokun	nen 1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		1.100.000,0	0 DINAS KETAHAN, PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja			100 %	100 %	370.948.400,00	335.450.000,00	280.450.000,00	-90.498.400,00		- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	370.975.000,0	0 DINAS KETAHAN, PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instal Listrik/Penerangan Bangunan											Publik Berkualitas			
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	0 Paket	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		1.980.000,0	O DINAS KETAHAN, PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik K	l antor													
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan		27.500.000,0	O DINAS KETAHAN, PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	don Donascondoon										Publik Berkualitas			
2.09.01.2.06.0003	, ,	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	30.148.400,00	31.450.000,00	31.450.000,00	1.301.600,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		34.595.000,0	0 DINAS KETAHAN, PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan da	l an Peraturan Perundang-undang	lan												
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			10 Dokume	n Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		13.200.000,0	O DINAS KETAHAN, PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			11 Lapor	ran 11 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		24.200.000,0	O DINAS KETAHAN, PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koor	dinasi dan Konsultasi SKPD		L	L										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 Lapora	an 2 Laporan	280.000.000,00	245.000.000,00	190.000.000,00	-90.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		269.500.000,0	O DINAS KETAHAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana kantor			100 %	100 %	100.000.000,00	59.500.000,00	59.500.000,00	-40.500.000,00		- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	65.450.000,0	O DINAS KETAHAN, PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Me	L sin Lainnya													
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			16 Unit	8 Unit	100.000.000,00	59.500.000,00	59.500.000,00	-40.500.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		65.450.000,0	O DINAS KETAHAN, PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung			100 %	100 %	212.400.000,00	228.400.000,00	228.400.000,00	16.000.000,00		- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	251.240.000,0	0 DINAS KETAHAN, PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi	, Sumber Daya Air dan Listrik					I	L		L					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Lapora	an 1 Laporan	44.400.000,00	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		48.840.000,0	O DINAS KETAHANA PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan d	an Perlengkapan Kantor													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Lapora	an 1 Laporan	167.000.000,00	182.000.000,00	182.000.000,00	15.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		200.200.000,0	0 DINAS KETAHAN, PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jmum Kantor		<u> </u>	<u> </u>		1								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Lapora	an 1 Laporan	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		2.200.000,0	DINAS KETAHAN, PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik			100 %	100 %	175.750.000,00	182.750.000,00	182.750.000,00	7.000.000,00		- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur	201.025.000,0	O DINAS KETAHAN, PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemelihara	an, Biaya Pemeliharaan, dan Paj Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	jak Kendaraan Perorang	gan Dinas atau Ken	ndaraan Dinas Jabat 1 Unit	an 1 Unit	45.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	7.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan		57.750.000,0	0 DINAS KETAHAN PANGAN DAN PERTANIAN

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET REALISASI AKHIR CAPAIAN	CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN KERA	ANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
NO KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024		ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		ertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		RIORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1 2	2	4	5 6	7	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	12	1.4	15	NASIONAL	DAERAH 17	10	19	20	21
1 2	3	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	5 6	7	28 Unit	9 28 Unit	10 130.250.000,00	11 130.250.000,00	130.250.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- 16	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	18	19	20 143.275.000,00	DINAS KETAHANA PANGAN DAN PERTANIAN
0.0000	DD OOD AM DENINGKATAN	dibayarkan Pajak dan Perizinannya			28000 Ton	20000 T. II	007.050.000.00	400 000 000 00	445 000 000 00		Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			000 007 000 00	
2. 2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama			28000 101	28000 Ton	267.359.000,00	190.680.000,00	145.330.000,00	38.648.900,00							306.007.900,00	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)			85.20 %	85.20 %	129.783.000,00	158.080.000,00	117.330.000,00	-12.453.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		158.161.300,00	D DINAS KETAHANA PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis	Sumber Daya Lokal																
		Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia			1 Laporan	1 Laporan	44.783.000,00	50.000.000,00	44.250.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			49.261.300,00	DINAS KETAHANA PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harg	a Pangan Tingkat Produsen dan	Konsumen di Kabupaten/Kota												1			
		Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota			1 laporan	1 laporan	40.000.000,00	77.875.000,00	53.875.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			50.600.000,00	DINAS KETAHANA PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga I	Pangan Tingkat Produsen dan Ko	 onsumen Wilayah Kabupaten/K	Kota														
		Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota			24 Laporan	24 Laporan	15.000.000,00	30.205.000,00	19.205.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			25.300.000,00	DINAS KETAHANAI PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Nerac	a Pangan Wilayah Kabupaten/Ko	ota															-
		Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota			12 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			16.500.000,00	DINAS KETAHANA PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan M	lakanan (NBM)																
		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)			1 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			16.500.000,00	DINAS KETAHANA PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah			20 %	0 %	71.806.000,00	0,00	0,00	-71.806.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			78.986.600,00	DINAS KETAHANA PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Panga	I n Pemerintah Kabupaten/Kota					I							,				
		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			4 Ton	0 Ton	51.806.000,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			56.986.600,00	DINAS KETAHANA PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Panga	n Pemerintah Kab/Kota																
		Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota			8 Ton	0 Ton	20.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			22.000.000,00	DINAS KETAHANA PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi)			87.90 %	87.90 %	65.770.000,00	32.600.000,00	28.000.000,00	-37.770.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		68.860.000,00	DINAS KETAHANA PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat da	alam Penganekaragaman Konsu	ımsi Pangan Berbasis Sumber [Daya Lokal														
		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			1 Laporan	0 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			33.000.000,00	DINAS KETAHANA PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi P	Pemantauan dan Evaluasi Konsur	msi per Kapita per Tahun															
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun			1 Laporan	1 Laporan	35.770.000,00	32.600.000,00	28.000.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			35.860.000,00	DINAS KETAHANAI PANGAN DAN PERTANIAN
3. 2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan			5 %	5 %	100.000.000,00	36.920.000,00	22.920.000,00	16.600.000,00							116.600.000,00	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Cakupan Informasi Daearah Rawan Pangan			100 %	100 %	20.000.000,00	36.920.000,00	22.920.000,00	2.920.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			28.600.000,00	DINAS KETAHANAI PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran d	an Analisis Peta Ketahanan dan	Kerentanan Pangan															
		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan			1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	36.920.000,00	22.920.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			28.600.000,00	DINAS KETAHANA PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Daerah Rawan Pangan			1 Lokasi	0 Lokasi	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		88.000.000,00	DINAS KETAHANA PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi P	enanganan Kerawanan Pangan	dan Gizi Kabupaten/Kota		<u> </u>							<u> </u>			1		<u> </u>	+
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota			1 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			16.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewa	ı spadaan Pangan dan Gizi	1															
		Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi			1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kew	 vaspadaan Pangan dan Gizi Kab	pupaten/Kota	1			<u> </u>											
		Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			1 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			16.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET REALISA	IN CAPAIAIN					CAPAIAN KINERJA DAN KI	ERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKA DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENJA O	OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PF	RIORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGU JAWAB
	1		OPD TAHUN 2	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Zoriamiani g (10 12)			NASIONAL	DAERAH		1,110=1	(,	
2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan			60 %	60 %	91.130.400,00	44.400.000,00	38.400.000,00	-4.541.260,00							86.589.140,00	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan			100 %	100 %	91.130.400,00	44.400.000,00	38.400.000,00	-52.730.400,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		86.589.140,00	DINAS KETAH PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pan	L gan Segar Asal Tumbuhan Daer	ll ah Kabupaten/Kota				L			I.								
		Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	0 Dokumen	17.500.000,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			19.250.000,00	DINAS KETA PANGAN DA PERTANIAN
2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keam	anan pangan segar asal tumbuh Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan	an		1 Dokumen	0 Dokumen	16.817.400,00	0,00	0,00		Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			18.499.140,00	PANGAN DA
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujiar	segar asal tumbuhan n keamanan dan mutu pangan se	egar asal tumbuhan Daerah	Kabupaten/Kota							Kecamatan, Semua Kel/Desa			Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat				PERTANIAN
		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota			1 Dokumen	1 Dokumen	30.813.000,00	31.622.000,00	31.622.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			34.784.200,00	DINAS KETA PANGAN DA PERTANIAN
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pen	gawas keamanan dan mutu pang Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	gan segar asal tumbuhan		1 Dokumen	1 Dokumen	26.000.000,00	12.778.000,00	6.778.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			14.055.800,00	DINAS KETA PANGAN DA PERTANIAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.383.067.450,00	1.344.593.000,00	1.701.593.000,00	318.525.550,00							2.147.736.045,00	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN						1.383.067.450,00	1.344.593.000,00	1.701.593.000,00	318.525.550,00							2.147.736.045,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Nilai Tukar Petani (NTP)			101.04 Angka	101.04 Angka	374.060.950,00	328.137.000,00	259.137.000,00	56.235.345,00							430.296.295,00	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian			0.3 %	0.3 %	237.648.000,00	248.137.000,00	199.137.000,00	-38.511.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani Kios Pupuk dan Aparatur		327.317.100,00	DINAS KET PANGAN D PERTANIAN
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sa	rana Pendukung Pertanian Sesu	ai dengan Komoditas, Tekn	nologi dan Spesifik Lokas	si					1								
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	209.913.000,00	170.913.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			175.904.300,00	DINAS KET. PANGAN D. PERTANIAN
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan S	1				1						1			T	T T		
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			1 Laporan	1 Laporan	37.648.000,00	38.224.000,00	28.224.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			41.412.800,00	DINAS KET PANGAN D PERTANIA
3.27.02.2.01.0006	Pengawasan Penggunaan Sa	Jumlah pengawasan			1 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Peningkatan Kualitas			55.000.000,00	DINAS KET
		penggunaan sarana pascapanen Perkebunan							,,,,		Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat				PANGAN D PERTANIA
3.27.02.2.01.0012	Pengawasan Penggunaan Sa	rana Pengolahan Hasil Perkebur Jumlah pengawasan	nan		1 aparan	Olonoran	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Koh Doninir	DANA ALOKASI		Deningketen Kuelitee			55.000.000,00	DINAS KET
		penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan			1 Laporan	0 Laporan					Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat				PANGAN D PERTANIA
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Pertanian			0.5 %	0.5 %	97.795.500,00	80.000.000,00	60.000.000,00	-37.795.500,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani		60.500.000,00	PANGAN D PERTANIAI
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Ta	1			1	1						T 1			T	T		
		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			1 Dokumen	1 Dokumen	97.795.500,00	80.000.000,00	60.000.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			60.500.000,00	DINAS KET PANGAN D PERTANIA
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan Populasi Ternak			3 %	0 %	38.617.450,00	0,00	0,00	-38.617.450,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani		42.479.195,00	DINAS KET PANGAN D PERTANIAI
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang	Sumbernya dari Daerah Kabupa	iten/Kota Lain			,												
		Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain			2000 Ekor	0 Ekor	38.617.450,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			42.479.195,00	DINAS KET PANGAN D PERTANIA
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Sektor Pertanian			149944 Ton	149944 Ton	162.469.500,00	356.616.000,00	350.616.000,00	313.246.250,00							475.715.750,00	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan data, informasi dan kajian lingkup pertanian			100 %	100 %	80.779.500,00	356.616.000,00	350.616.000,00	269.836.500,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani		385.856.750,00	DINAS KET PANGAN D PERTANIAI
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi P	L rasarana Pendukung Pertanian L	ı_ainnya												<u> </u>			
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			2 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			363.000.000,00	DINAS KET PANGAN D PERTANIAI
3.27.03.2.01.0007	Pengendalian dan Pemanfaat	I an Prasarana Pascapanen Perke	ebunan				<u> </u>			I								
		Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan			1 Unit	0 Unit	4.000.000,00	0,00	0,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			4.400.000,00	DINAS KETA PANGAN DA PERTANIAN

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN						AN MAJU RENCANA FAHUN 2026	PERANGKAT
NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA	TARG	SET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Powtowhole / Powley young (40,42)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	DACH INDIKATIF (Da)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		KEGIATAN		OPD	1 AHUN 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 17	18	19	20	21
			Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan				1 Unit	0 Unit	4.000.000,00	0,00	0,00	K	ab. Pesisir darat, Semua decamatan, demua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka	t s		4.400.000,00	DINAS KETAHANA PANGAN DAN PERTANIAN
3.	3.27.03.2.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaata	│ an Prasarana Pengolahan Hasi⊟	 Perkebunan															
			Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan				1 Unit	0 Unit	3.222.500,00	0,00	0,00	K	arat, Semua Lecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka Peningkatan Kualita	t s		3.544.750,00	DINAS KETAHANA PANGAN DAN PERTANIAN
	2 22 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		dimanfaatkan	D					D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			S	semua Kel/Desa		Ekonomi Masyaraka	t			
3.	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian	Pangan Berkelanjutan/LP2B, Ka Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan	awasan Pertania	an Pangan Berki	elanjutan/KP2B dan I	1 Dokumen	1 1	9.557.000,00	26.616.000,00	20.616.000,00	K	ab. Pesisir karat, Semua kecamatan, kemua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka	t s		10.512.000,00	DINAS KETAHANA PANGAN DAN PERTANIAN
3.	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola Persentase Prasarana Pertanian yang terbangun				84 %	0 %	81.690.000,00	0,00	0,00	-81.690.000,00			- Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka	s Kelompok Tani		89.859.000,00	DINAS KETAHANA PANGAN DAN
			dan berkondisi baik												Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka	s			PERTANIAN
3.	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi da	an Pemeliharaan Embung Pertan	nian			1		,	,	,				1				
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	11.670.000,00	0,00	0,00	-11.670.000,00 K	ab. Pesisir arat,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka	t		12.837.000,00	DINAS KETAHANA PANGAN DAN
			dan Dipelihara									В	angkunat, emua Kel/Desa	, ,	Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka	s			PERTANIAN
3.	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi da	an Pemeliharaan Jalan Usaha Ta	ani															
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	0 Unit	11.670.000,00	0,00	0,00	K	ab. Pesisir arat, Semua ecamatan, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka	t		12.837.000,00	DINAS KETAHANA PANGAN DAN PERTANIAN
3.	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi da	ı an Pemeliharaan DAM Parit																
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	0 Unit	11.670.000,00	0,00	0,00	B	ab. Pesisir arat, Semua ecamatan, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka	t		12.837.000,00	DINAS KETAHANA PANGAN DAN PERTANIAN
3.	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi da	an Pemeliharaan Pintu Air						1	,	,				-				
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	0 Unit	11.670.000,00	0,00	0,00	K	ab. Pesisir earat, Semua ecamatan, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka	t s		12.837.000,00	DINAS KETAHAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi da	an Pemeliharaan Balai Penyuluh	di Kecamatan	serta Sarana Pe	endukungnya											_		
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	0 Unit	11.670.000,00	0,00	0,00	B	ab. Pesisir Jarat, Semua Jecamatan, Jemua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka	s t t s t		12.837.000,00	DINAS KETAHAN/ PANGAN DAN PERTANIAN
3.	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi da	In Pemeliharaan Prasarana Pert	L anian Lainnya					L										
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	0 Unit	11.670.000,00	0,00	0,00	K	ab. Pesisir sarat, Semua secamatan, semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka	t s		12.837.000,00	DINAS KETAHANA PANGAN DAN PERTANIAN
3.	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaar	n Jaringan Irigasi Usaha Tani						-		-								
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	11.670.000,00	0,00	0,00	K	ab. Pesisir earat, Semua ecamatan, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka	t s		12.837.000,00	DINAS KETAHANA PANGAN DAN PERTANIAN
3. 3 .	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis				88 %	88 %	209.550.000,00	80.000.000,00	59.000.000,00	-121.550.000,00						88.000.000,00	
3.	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terproteksinya ternak dan HPR dari penyakit hewan menular				88 %	88 %	148.750.000,00	48.775.000,00	32.775.000,00	-115.975.000,00			- Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka	t Peternak dan s Kesmavet		53.652.500,00	DINAS KETAHANA PANGAN DAN PERTANIAN
3.	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hew	.l /an Menular dan Zoonosis dalam	ı 1 (satu) Daera	ah Kabupaten/Ko	ota	1	1	I			I		1	1	1	ı		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	148.750.000,00	48.775.000,00	32.775.000,00	K	ab. Pesisir karat, Semua kecamatan, kemua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka	t s		53.652.500,00	DINAS KETAHANA PANGAN DAN PERTANIAN
3.	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Terjaminnya Keamanan Daging yang beredar di Masyarakat				100 %	100 %	60.800.000,00	31.225.000,00	26.225.000,00	-34.575.000,00			Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka	t Pedagang dan s Kesmavet		34.347.500,00	DINAS KETAHANA PANGAN DAN PERTANIAN
3.	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewa	1					,							·				
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	1 Laporan	60.800.000,00	31.225.000,00	26.225.000,00	K	ab. Pesisir arat, Semua ecamatan, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka	t s		34.347.500,00	DINAS KETAHANA PANGAN DAN PERTANIAN
. 3.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)				88 %	88 %	138.960.000,00	75.000.000,00	250.000.000,00	136.040.000,00						275.000.000,00	
3.	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penurunan persentase gangguan OPT/Kegagalan panen pada komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				10 %	10 %	138.960.000,00	75.000.000,00	250.000.000,00	111.040.000,00			Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka	t s		275.000.000,00	DINAS KETAHANA PANGAN DAN PERTANIAN
3.	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pen	ngganggu Tumbuhan (OPT) Tana	aman Pangan, I	Hortikultura, dan	Perkebunan													
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				50 Ha	800 Ha	138.960.000,00	75.000.000,00	250.000.000,00	K	ab. Pesisir sarat, Semua secamatan, semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka Peningkatan Kualita Ekonomi Masyaraka	t s		275.000.000,00	DINAS KETAHANA PANGAN DAN PERTANIAN
5. 3 .	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN	-				985	985	498.027.000,00	504.840.000,00	782.840.000,00	380.697.000,00						878.724.000,00	
		PERTANIAN	Tani				Kelompok Tani	Kelompok Tani	,	7,		,							

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN I	KERANGKA PENDANAAN					V=1 -25-5		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANG
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET	2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Darton bal /Darlowan (40.40)	LOVADI	OUMPED DAMA	PRI	ORITAS	KELOMPOK SASARAN	TAROFT	DAGU INDUKATIF (D.)	PENANGO
	KEGIATAN		OPD	TAHUN 2023	2024	SEBELUM S	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	JAWA
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kualitas SDM Penyuluh dan Kelembagaan Pertanian yang ditingkatkan				85 % 8	5 %	498.027.000,00	504.840.000,00	782.840.000,00	284.813.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian		878.724.000,00	DINAS KET PANGAN D PERTANIA
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelem	bagaan Penyuluhan Pertanian d	i Kecamatan da	ın Desa															
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				11 Unit 1	1 Unit	258.540.000,00	181.680.000,00	173.680.000,00	B _i Ki	ab. Pesisir arat, Semua ecamatan, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			199.848.000,00	DINAS KE PANGAN I PERTANIA
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kel	embagaan Petani di Kecamatan	dan Desa															_	
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				11 Unit 1	1 Unit	206.585.000,00	219.160.000,00	513.160.000,00	K	ab. Pesisir arat, Semua ecamatan, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			564.476.000,00	DINAS KE PANGAN PERTANI
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelengg	garaan Sekolah Lapang Kelompo I	ok Tani Tingkat	Kabupaten/Kota				ı								Γ	Т	T	
		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				11 Unit 1	1 Unit	32.902.000,00	104.000.000,00	96.000.000,00	K	ab. Pesisir arat, Semua ecamatan, emua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			114.400.000,00	DINAS KI PANGAN PERTANI
	DINAS LINGKUNGAN HIDUF							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
	HIDUP																		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup				92,50 9. Persen P	2,50 'ersen	3.202.315.450,00	3.076.962.000,00	2.994.079.550,00	-1.994.734.645,00							1.207.580.805,00	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	00 %	11.756.300,00	11.756.000,00	11.756.000,00	-300,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		12.670.134,00	DINAS LINGKUN HIDUP
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perend	anaan Perangkat Daerah																	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen 2	Dokumen	4.057.500,00	4.057.500,00	4.057.500,00	Te	ab. Pesisir arat, Pesisir engah, Semua el/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.138.650,00	DINAS LINGKUN HIDUP
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan D	 okumen RKA-SKPD																	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen 1	Dokumen	2.072.850,00	2.072.600,00	2.072.600,00	K	ab. Pesisir arat, Semua ecamatan, emua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			2.793.015,00	DINAS LINGKUN HIDUP
0.44.04.0.04.0005	Kandinasi dan Banuaran B	arribation DDA OKDD													Publik Berkualitas				
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan P	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen 1	Dokumen	626.000,00	626.000,00	626.000,00	Te	ab. Pesisir arat, Pesisir engah, Semua el/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			638.520,00	DINAS LINGKUN HIDUP
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan L	aporan Capaian Kinerja dan Ikhi	isar Realisasi K	linerja SKPD				,											
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan 2	Laporan	4.999.950,00	4.999.900,00	4.999.900,00	-50,00 K. B. T. K.	ab. Pesisir arat, Pesisir engah, Semua el/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.099.949,00	DINAS LINGKUN HIDUP
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	00 %	2.025.548.600,00	2.151.986.000,00	2.151.986.000,00	126.437.400,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		6.599.910,00	DINAS LINGKUN HIDUP
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjanga			<u> </u>		1		Т		1							I		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					3 Orang/b lan	0,00	2.145.516.000,00	2.145.516.000,00	Te	ab. Pesisir arat, Pesisir engah, Semua el/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS LINGKU HIDUP
2	NON URUSAN							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjanga	l an ASN																	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
	HIDUP																		
11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan L	aporan Keuangan Akhir Tahun S	SKPD			1100000	Lanorar	2.22	0.470.000.00	0.470.000.00	0.470.000.00	oh Dooi-ir	DAMA ALOKAGI	_	Poformas: Disclared			0.500.007.00	DINIAC
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan 1	Laporan	0,00	2.470.600,00	2.470.600,00	2.470.600,00 Ks Bs Tc Ks	ab. Pesisir arat, Pesisir engah, Semua el/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.520.267,00	DINAS LINGKU HIDUP
2	NON URUSAN							5.977.313.850,00 5.977.313.850,00	5.812.916.000,00 5.812.916.000,00		-301.530.300,00 -301.530.300,00							3.830.499.905,00 3.830.499.905,00	

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	ANDIK	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN					- KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
NO KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENSTRA .	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIC	DRITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			OPD		2024 SE	BELUM SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			()	
2 2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN	4	5	6	7	8 9	10 5.977.313.850,00	11 5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00	14	15	16	17	18	19	20 3.830.499.905,00	21
2.11	PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN						5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
2.11.01.2.02.0007	HIDUP	 Laporan Keuangan Bulanan/ Triw	wulanan/ Samastar	ran SKBD														
2.11.01.2.02.0007	Roordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan	vulanan/ Semester	ran SKPD	21	aporan 2 Laporan	0,00	2.999.600,00	2.999.600,00	2.999.600,00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	_	Reformasi Birokrasi			3.059.847,00	DINAS
		Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Euporum	0,00	2.555.666,66	2.333.330,00		Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0.000.047,00	LINGKUNGAN HIDUP
2	NON URUSAN						5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan	 Laporan Keuangan Bulanan/ Triw	ulanan/ Semester	ran SKPD														
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan	Analisis Prognosis Realisasi Angg	garan												1			
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 D	okumen 1 Dokumen	999.800,00	999.800,00	999.800,00		Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.019.796,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja			100	0 % 100 %	268.574.550,00	239.760.000,00	156.877.550,00	-111.697.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		273.946.041,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik I	Kantor																
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 P	aket 1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	dan Penggandaan	1	1														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 P	aket 1 Paket	0,00	60.995.100,00	60.995.100,00		Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			61.786.041,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	NON URUSAN						5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	dan Penggandaan																
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan d	lan Peraturan Perundang-undang	gan						1						1			
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 0	okumen 1 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00		Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.240.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	NON URUSAN						5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
2.11.01.2.06.0006		_ lan Peraturan Perundang-undang																
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1 L	aporan 1 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00		Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.220.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koo			Т		Lanarara 40.1	400 000 000 0		70.000 (27	Koh Dadii	DANIA ALCUMA		Defense - D			400 000 007	DIMAG
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12	Laporan 12 Laporan	160.000.000,00	155.764.900,00	72.882.450,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			163.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Prasarana dan prasarana pendukung kinerja			100	0 % 100 %	111.300.000,00	6.446.000,00	6.446.000,00	-104.854.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		113.526.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.07	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prasarana dan prasarana pendukung kinerja			100	100 %	111.300.000,00	6.446.000,00	6.446.000,00	-104.854.000,00			-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi	Aparatur		1*	13.526.000,00

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN					V=1 6115	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERAN
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRI	IORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANO JAW
	_		OPD		2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 20	2
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	111.300.000,00	6.446.000,00	6.446.000,00	-104.854.000,00	Barat, Semua	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		113.526.000,00	0 DINAS LINGKUN HIDUP
		Disecilakari										Kecamatan, Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			ПООР
															Publik Berkualitas			
.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung				100 %	100 %	75.556.000,00	65.554.000,00	65.554.000,00	-10.002.000,00		-		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur	77.067.120,00	0 DINAS LINGKUN
	Daerah														Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi			HIDUP
															dan Pelayanan Publik Berkualitas			
.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan da	ı an Perlengkapan Kantor																
		Jumlah Laporan Penyediaan				12 Laporan	12 Laporan	67.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	-10.000.000,00		DANA ALOKASI -		Reformasi Birokrasi		68.340.000,00	
		Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang										Barat, Pesisir Tengah, Semua	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas			LINGKUI HIDUP
		Disediakan										Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			
11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan I	Imum Kantar													Fublik berkualitas			
.11.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan (Jumlah Laporan Penyediaan				12 Langran	12 Laporan	0.00	8.554.000,00	8.554.000,00	8.554.000,00	Koh Booisir	DANA ALOKASI -		Reformasi Birokrasi		8.727.120,00	0 DINAS
		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporari	12 Laporan	0,00	8.334.000,00	8.554.000,00	8.554.000,00	Barat, Pesisir Tengah, Semua	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas		0.727.120,00	LINGKU
		Namor yang Disediakan										Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			111111111111111111111111111111111111111
															Publik Berkualitas			
	NON URUSAN							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00						3.830.499.905,00	0
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00						3.830.499.905,00	0
1.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan I	I Jmum Kantor																
	URUSAN PEMERINTAHAN							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00						3.830.499.905,00	0
	WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN																	
	PELAYANAN DASAR																	
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00						3.830.499.905,00	0
	HIDUP																	
11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi				100 %	100 %	709.580.000,00	601.460.000,00	601.460.000,00	-108.120.000,00		-		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur	723.771.600,00	LINGKU
	Pemerintahan Daerah	baik													Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi			HIDUP
															dan Pelayanan Publik Berkualitas			
11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemelihara	an, Biaya Pemeliharaan, dan Pa	jak Kendaraan F	Perorangan Dina	s atau Kendaraan D	Dinas Jabatan			,						•	-		
		Jumlah Kendaraan				2 Unit	2 Unit	53.150.000,00	55.450.000,00	55.450.000,00	2.300.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan		54.213.000,00	0 DINAS LINGKU
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										Kecamatan, Semua Kel/Desa	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi			HIDUP
		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya										Semua Rei/Desa			dan Pelayanan Publik Berkualitas			
.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemelihara:	 an, Biaya Pemeliharaan, Pajak d	lan Perizinan Ke	endaraan Dinas (Onerasional atau La	nangan									T dbiik berkdailtas			
	1 criyedidan dasa i ememiara	Jumlah Kendaraan Dinas	Jan T Chamar No	Charach Binas C		10 Unit	10 Unit	487.810.000,00	387.310.000,00	387.310.000,00	-100.500.000,00	Kah Pesisir	DANA ALOKASI -		Reformasi Birokrasi		497.566.200,00	0 DINAS
		Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan				10 0	10 0	16716161666,66	007.010.000,00	337.373.333,33	700.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas		1011000.200,00	LINGKU
		dibayarkan Pajak dan Perizinannya										Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			
															Publik Berkualitas			
11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaa	•																
	Pemeliharaan dan Perizinan A	ı				1	T T						1					
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan				1 Unit	1 Unit	162.700.000,00	158.700.000,00	158.700.000,00	-4.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan		165.954.000,00	LINGKU
		Perizinannya										Kecamatan, Semua Kel/Desa			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi			HIDUP
															dan Pelayanan Publik Berkualitas			
11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan I	л Mesin Lainnya																
		Jumlah Peralatan dan Mesin				4 Unit	4 Unit	5.920.000,00	0,00	0,00	-5.920.000,00	Kab. Pesisir			Reformasi Birokrasi		6.038.400,00	0 DINAS
		Lainnya yang Dipelihara										Barat, Semua Kecamatan,			dan Pelayanan Publik Berkualitas			LINGKU HIDUP
												Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			
.11.02	PROCRAM	Cakupan Dokumen				100 Porcon	100 Persen	370.705.000,00	445.000.000,00	410.750.000,00	7.414.100,00				Publik Berkualitas		378.119.100,00	0
. 1.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Perencanaan Lingkungan Hidup				100 reisen	TOO FEISEN	37 0.7 03.000,00	445.000.000,00	410.730.000,00	7.414.100,00						370.119.100,00	
	EMONONGAN HIDUP	-				100 %	100 %	370.705.000,00	445.000.000,00	410.750.000,00	40.045.000,00				Pembangunan	Masyarakat	378.119.100,00	0 DINIVE
11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian	Drocontaco katarcadiaan				100 %	100 %	370.703.000,00	445.000.000,00	410.730.000,00	40.043.000,00				Infrastruktur Daerah		378.119.100,00	LINGKU
11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Presentase ketersediaan dokumen KLHS dalam K/R/P													yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah			TIIDOI
11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota														yang Berkelanjutan			
11.02.2.02	Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	dokumen KLHS dalam K/R/P																
	Lingkungan Hidup Strategis	dokumen KLHS dalam K/R/P										1				_		
	Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	ana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	370.705.000,00	445.000.000,00	410.750.000,00	40.045.000,00	Kab. Pesisir Barat. Semua	PENDAPATAN - BAGI HASIL		Pembangunan Infrastruktur Daerah		378.119.100,00	LINGKU
	Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	dokumen KLHS dalam K/R/P ana Tata Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	370.705.000,00	445.000.000,00	410.750.000,00	40.045.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan		378.119.100,00	0 DINAS LINGKU HIDUP
	Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	ana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang				1 Dokumen	1 Dokumen	370.705.000,00	445.000.000,00	410.750.000,00	40.045.000,00	Barat, Semua Kecamatan,	BAGI HASIL		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		378.119.100,00	LINGKU
11.02.2.02.0005	Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Penyelenggaraan KLHS Reno PROGRAM	ana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun Indeks Kualitas				74,53	74,53	370.705.000,00 50.000.000,00	445.000.000,00 25.000.000,00	410.750.000,00 20.000.000,00	1.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGI HASIL		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah		378.119.100,00 51.000.000,00	LINGKU
11.02.2.02.0005	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	ana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun										Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGI HASIL		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah			LINGKU
.11.02.2.02.0005	Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Penyelenggaraan KLHS Reno PROGRAM PENGENDALIAN	ana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun Indeks Kualitas				74,53	74,53					Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGI HASIL		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah			LINGKU
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pencegahan Pencemaran	ana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Cakupan pencegahan				74,53	74,53					Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGI HASIL		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		LINGKU HIDUP 0 0 DINAS
.11.02.2.02.0005	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	ana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				74,53 Angka	74,53 Angka	50.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	1.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGI HASIL		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah		51.000.000,00	LINGKU HIDUP
.11.02.2.02.0005	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan	ana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Cakupan pencegahan pencemaran lingkungan				74,53 Angka	74,53 Angka	50.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	1.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGI HASIL		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah Infrastruktur Daerah Infrastruktur Daerah Infrastruktur Daerah		51.000.000,00	LINGKU HIDUP
11.02.2.02.0005 11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	ana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Cakupan pencegahan pencemaran lingkungan hidup				74,53 Angka	74,53 Angka	50.000.000,00 50.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	1.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGI HASIL		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah		51.000.000,00	LINGKU HIDUP
11.02.2.02.0005 11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	ana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Cakupan pencegahan pencemaran lingkungan hidup Pelaksanaan Pencegahan Pence	eemaran Lingkur	ngan Hidup Dilak	sanakan Terhadap	74,53 Angka 100 % Media Tanah,	74,53 Angka 100 %	50.000.000,00 50.000.000,00	25.000.000,00 25.000.000,00	20.000.000,00 20.000.000,00	1.000.000,00 -30.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGI HASIL PAJAK ROKOK		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan		51.000.000,0 0	O DINAS LINGKU HIDUP
11.02.2.02.0005	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	ana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Cakupan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	eemaran Lingkur	ngan Hidup Dilak	sanakan Terhadap	74,53 Angka 100 % Media Tanah,	74,53 Angka	50.000.000,00 50.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	1.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGI HASIL		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah Infrastruktur Daerah Infrastruktur Daerah Infrastruktur Daerah		51.000.000,00	O DINAS LINGKU HIDUP

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR REPLODE CAPAIAN	TARGET DENIA					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		N MAJU RENCANA AHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024		SET 2025	1	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		IORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	2	4	5. 6	7	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	42	1.1	45	NASIONAL	DAERAH	40	10	20	24
2 2 44 04	BROCKAM.	Pagia Buana Tarbuka Hiiau	5 6	/	8 F 20	5 20	10	11	12	5 000 000 00	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Persatuan Luas Wilayah			5,30 Persen	5,30 Persen	250.000.000,00	328.554.000,00	320.554.000,00	5.000.000,00							255.000.000,00	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan RTH			100 %	100 %	250.000.000,00	328.554.000,00	320.554.000,00	70.554.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		255.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01.0	004 Pengelolaan Ruang Terbuka	l ı Hijau (RTH)																
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			4.50 Ha	4.50 Ha	70.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah			71.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01.0	008 Pengelolaan Taman Keanek	aragaman Hayati Lainnya												yang Berkelanjutan				
		Unit Taman Kehati Lainnya			1 Unit	1 Unit	180.000.000,00	328.554.000,00	320.554.000,00	140.554.000,00	Kab. Pesisir	PAJAK AIR	-	Pembangunan			183.600.000,00	DINAS
		yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota									Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	TANAH PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN	Cakupan Pengendalian			100 Persen	100 Persen	70.000.000,00	35.000.000,00	28.000.000,00	1.400.000,00							71.400.000,00	
	DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan peraturan perundang-undangan hidup (PUULH)																
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasa Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ketaatan penangung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan			100 %	100 %	70.000.000,00	35.000.000,00	28.000.000,00	-42.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Aparatur dan Masyarakat		71.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06.2.01.0	001 Fasilitasi Pemenuhan Ketent	 :uan dan Kewajiban Izin Lingkung	gan dan/atau Izin PPLH									1		I	L			
		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			10 Dokumen	10 Dokumen	70.000.000,00	35.000.000,00	28.000.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			71.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan			57,43 Persen	57,43 Persen	2.034.293.400,00	1.902.400.000,00	1.902.400.000,00	-166.893.400,00				, , ,			1.867.400.000,00	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani			21,37 Persen	21,37 Persen	2.034.293.400,00	1.902.400.000,00	1.902.400.000,00	-131.893.400,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah	Aparatur dan Masyarakat		1.867.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
0.44.44.0.04.0	Donor or or or or or or or or or or or or o	i namena alubin aananab di T	DA/TROT habourates //sets etc.	TDA/TDOT Devices										yang Berkelanjutan				
2.11.11.2.01.0	Penanganan sampan melalu	i pemrosesan akhir sampah di Ti jumlah sampah yang	PA/TPST kabupaten/kota atau 1		3297 Ton	3297 Ton	2.034.293.400,00	1.902.400.000,00	1.902.400.000,00	-131.893.400,00	Kab. Pesisir	INSENTIF	-	Pembangunan			1.867.400.000,00	
		tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional									Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN		Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				LINGKUNGAN HIDUP
	DINAS KEPENDUDUKAN D	OAN PENCATATAN SIPIL					3.231.449.700,00	3.425.810.700,00	3.251.560.700,00	20.111.000,00							3.554.594.670,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.231.449.700,00	3.425.810.700,00	3.251.560.700,00	20.111.000,00							3.554.594.670,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						3.231.449.700,00	3.425.810.700,00	3.251.560.700,00	20.111.000,00							3.554.594.670,00	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah			92,50 %	92,50 %	2.796.911.000,00	2.946.272.000,00	2.858.772.000,00	279.691.100,00							3.076.602.100,00	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen i Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu			100 %	100 %	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		13.640.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA SIPIL
2.12.01.2.01.0	Penyusunan Dokumen Pere	ncanaan Perangkat Daerah													_			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.140.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA SIPIL
2.12.01.2.01.0	006 Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikh	ntisar Realisasi Kinerja SKPD						1			T			_			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA SIPIL
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu			100 %	100 %	2.131.949.800,00	2.231.310.700,00	2.231.310.700,00	99.360.900,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.345.144.780,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA SIPIL
2.12.01.2.02.0	001 Penyediaan Gaji dan Tunjan	gan ASN																
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			13 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	2.126.449.800,00	2.225.810.700,00	2.225.810.700,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			2.339.094.780,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA SIPIL

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK		AN MAJU RENCANA FAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
NO KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	RENJA OPD	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	11201111111		OPD		2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		20.0.0.		NASIONAL DAERAH			, , , ,	
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 17	18	19	20	21
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan L	aporan Keuangan Bulanan/ Triw Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana		steran SKPD		4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		n/Semesteran SKPD												T doin Derivalitas				
2.12.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan A	nalisis Prognosis Realisasi Angg	garan			0 Dal	2 Daluman	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0.00	Kab. Pesisir	PENDAPATAN	- Reformasi Birokrasi			1.100.000,00	DINAC
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ASLI DAERAH (PAD)	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.100.000,00	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				100 %	100 %	266.745.000,00	242.415.100,00	154.915.100,00	-111.829.900,00			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		293.419.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instala	l asi												I				
	Listrik/Penerangan Bangunan	T								1		T	I T					
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3.745.000,00	3.745.000,00	3.745.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.119.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Ka	1																
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	dan Penggandaan			1													
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	40.000.000,00	40.670.100,00	40.670.100,00	670.100,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			44.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan da	I an Peraturan Perundang-undang	J gan											I				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			13.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koor	T			<u> </u>	401	101	475 000 000 00	475 000 000 00	27.500.000.00	27 500 000 00	LKAL BARRIE	BENBARATAN	Defended State of		<u> </u>	400 500 000 00	DINAG
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00	175.000.000,00	87.500.000,00	-87.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			192.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung				100 %	100 %	228.916.200,00	299.396.200,00	299.396.200,00	70.480.000,00			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		251.807.820,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi	1	I			1	T 1			1		T	T					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	94.966.200,00	48.166.200,00	48.166.200,00	-46.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			104.462.820,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan da	T .										1						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	129.000.000,00	247.000.000,00	247.000.000,00	118.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			141.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan l	Jmum Kantor			1													
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.950.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	-720.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.445.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik				100 %	100 %	156.900.000,00	160.750.000,00	160.750.000,00	3.850.000,00			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		172.590.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaa	I an, Biaya Pemeliharaan, dan Paj T	jak Kendaraan	Perorangan Dina	as atau Kendaraan Di	inas Jabatan										1		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	55.800.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	2.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			61.380.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN KE	RANGKA PENDANAAN				V51 01100V		N MAJU RENCANA AHUN 2026	PERANGKAT
NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA	TARG	GET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12) LOKA	I SUMBER DAN		PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	OPD 5	6	2024 7	SEBELUM 8	SESUDAH 9	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	13 14	15 SOMBER DAI	NASIONAL 16	DAERAH 17	18	19	20	21
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaa	<u> </u> an, Biaya Pemeliharaan, Pajak d	dan Perizinan K	(endaraan Dinas	Operasional atau La	apangan											-	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	43.300.000,00	47.300.000,00	47.300.000,00	4.000.000,00 Kab. Pesisi Barat, Sem Kecamatan Semua Kel	ıa ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			47.630.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sa	rana dan Prasarana Pendukung Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung Kanto	or atau Bangunan	a Lainnya	12 Unit	12 Unit	57.800.000,00	55.450.000,00	55.450.000,00	-2.350.000,00 Kab. Pesisi Barat, Sem Kecamatan Semua Kel	ıa ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			63.580.000,00	D DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan				100 %	100 %	266.000.000,00	287.000.000,00	256.500.000,00	26.600.000,00						292.600.000,00	0
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk				100 %	100 %	35.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	-5.000.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			38.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Pe	rmanen dan Rentan Administras	si Kependuduka	an	_	_												
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				2000 Dokumen	1000 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	-5.000.000,00 Kab. Pesisi Barat, Sem Kecamatan Semua Kel	IA HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			38.500.000,00	D DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk				100 %	100 %	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Masyarakat		198.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kepend	dudukan selain Blangko KTP-El,	Formulir, dan E	Buku Terkait Pen	daftaran Penduduk	Sesuai dengar	n Kebutuhan											
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				5500 Dokumen	687 Dokumen	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00 Kab. Pesisi Barat, Sem Kecamatan Semua Kel	ıa HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			198.000.000,00	D DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terselenggaranya Pendaftaran Penduduk				100 %	100 %	51.000.000,00	72.000.000,00	46.500.000,00	-4.500.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Masyarakat		56.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Penda	aftaran Peristiwa Kependudukan	dan Pencatata	an Peristiwa Pent	ting Terkait Pendafta	aran Penduduk	k											
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	,			50000 Dokumen	20000 Dokumen	51.000.000,00	72.000.000,00	46.500.000,00	-4.500.000,00 Kab. Pesisi Barat, Sem Kecamatan Semua Kel	ıa HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			56.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil				100 %	100 %	56.538.700,00	64.538.700,00	43.038.700,00	5.653.870,00						62.192.570,00)
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terselenggaranya Pencatatan Sipil				100 %	100 %	56.538.700,00	64.538.700,00	43.038.700,00	-13.500.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			62.192.570,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Penda	aftaran Peristiwa Kependudukan	n dan Pencatata	an Peristiwa Pent	ting Terkait Pencata	-								1				
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	,			12 Laporan	n 12 Laporan	56.538.700,00	64.538.700,00	43.038.700,00	-13.500.000,00 Kab. Pesisi Barat, Sem Kecamatan Semua Kel	ıa HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			62.192.570,00	D DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan				100 %	100 %	56.000.000,00	64.000.000,00	43.250.000,00	5.600.000,00						61.600.000,00	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				100 %	100 %	56.000.000,00	64.000.000,00	43.250.000,00	-12.750.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Masyarakat		61.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaata	an Data Kependudukan			_	_												
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				12 Dokumen	12 Dokumen	56.000.000,00	64.000.000,00	43.250.000,00	-12.750.000,00 Kab. Pesisi Barat, Sem Kecamatan Semua Kel	ıa HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			61.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Data Kependudukan Skala Kabupaten dalam 1 Tahun				100 %	100 %	56.000.000,00	64.000.000,00	50.000.000,00	5.600.000,00						61.600.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Profil Kependudukan				100 %	100 %	56.000.000,00	64.000.000,00	50.000.000,00	-6.000.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			61.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudul	Jumlah Data Kependudukan				75	75 Dokumen	56.000.000,00	64.000.000,00	50.000.000,00	-6.000.000,00 Kab. Pesisi Barat, Sem	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			61.600.000,00	KEPENDUDUKAN
			Kabupaten/Kota				Dokumen	Dokumen				Kecamatan Semua Kel	, , ,		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				DAN PENCATATAN SIPIL

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	ANDIN	EALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN					VEL CASC		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGK
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RE	APAIAN ENJA OPD	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGI	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		D (1 1 / D) ((1 1 1)	1.01/1.01		PRIC	DRITAS	KELOMPOK SASARAN			PENANGO
	KEGIATAN	1.20	OPD	HUN 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	JAWA
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.606.068.924,00	6.736.078.080,00	6.816.215.268,00	-2.789.853.656,00							7.969.830.027,00	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							9.606.068.924,00	6.736.078.080,00	6.816.215.268,00	-2.789.853.656,00							7.969.830.027,00	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon				100 %	100 %	2.762.068.924,00	2.730.041.436,00	2.610.040.700,00	176.761.103,00							2.938.830.027,00	
.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi	Aparatur		12.400.000,00	DINAS PEMBERE MASYARA PEKON
.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Peren	 canaan Perangkat Daerah																	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			7.400.000,00	DINAS PEMBERD MASYARA PEKON
13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan I	_L _aporan Capaian Kinerja dan Ikh	l tisar Realisasi Kinerj	a SKPD					I									<u> </u>	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			5.000.000,00	DINAS PEMBERE MASYARA PEKON
.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	2.208.500.000,00	2.076.479.200,00	2.076.479.200,00	-132.020.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur		2.310.583.247,00	DINAS PEMBER MASYAR PEKON
.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjang	an ASN					l					l		<u> </u>			1		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17/14 Oran g/bulan	17/14 Oran g/bulan	2.200.000.000,00	2.067.979.200,00	2.067.979.200,00	-132.020.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			2.301.445.047,00	DINAS PEMBERE MASYARA PEKON
.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan I	Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.				5.000.000,00	DINAS PEMBERI MASYARA PEKON
.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan I	_l ∟aporan Keuangan Bulanan/ Triv	ulanan/ Semesteran	SKPD															
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.				2.928.200,00	DINAS PEMBERI MASYARA PEKON
.13.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan A	Analisis Prognosis Realisasi Ang Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	garan			2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			1.210.000,00	DINAS PEMBER MASYAR PEKON
13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				4 orang	4 orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			kemiskinan. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur		20.000.000,00	DINAS PEMBER MASYAR PEKON
	Dan Juliu	Provide Provid												kemiskinan.					
10.01.0.0	Pendidikan dan Pelatihan Peg	gawai Berdasarkan Tugas dan F Jumlah Pegawai	ungsi			4 Orang	4 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	DINAS PEMBERI MASYARA PEKON
.13.01.2.05.0009		Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan										Kecamatan, Semua Kel/Desa		ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Reformasi Birokrasi				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berdasarkan Tugas dan				100 %	100 %	330.868.924,00	327.884.436,00	207.883.700,00	-122.985.224,00	Semua Kel/Desa		pemerataan ekonomi	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur		371.309.085,00	DINAS PEMBERI MASYARA PEKON
.13.01.2.06		Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				100 %	100 %	330.868.924,00	327.884.436,00	207.883.700,00	-122.985.224,00	Semua Kel/Desa		pemerataan ekonomi dan pemberantasan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur		371.309.085,00	PEMBERI MASYARA
2.13.01.2.06 2.13.01.2.06	Perangkat Daerah	Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				100 %	100 %	330.868.924,00 4.333.736,00	327.884.436,00 4.333.736,00	4.333.000,00		Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur		371.309.085,00 4.767.110,00	PEMBERI MASYAR, PEKON

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK		MAJU RENCANA IUN 2026	PERANGKA DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	SET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	SASARAN	TARGET P	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGU
	REGIATAN		OPD	TAHUN 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertamban/Berkurang (10-12)	LUKASI	SUMBER DANA	NASIONAL DAERAH		IARGEI	AGU INDIKATIF (RP)	JAWAB
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 17	18	19	20	21
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.535.188,00	35.550.700,00	35.550.700,00	15.512,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			37.981.975,00	DINAS PEMBERDAY MASYARAKA PEKON
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan c	dan Peraturan Perundang-undan	gan											T ublik berkualitas				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAY MASYARAKA PEKON
2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									I								
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			13.310.000,00	DINAS PEMBERDAY MASYARAKA PEKON
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koo	ordinasi dan Konsultasi SKPD										1	1					
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	240.000.000,00	240.000.000,00	120.000.000,00	-120.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			270.000.000,00	DINAS PEMBERDAN MASYARAKA PEKON
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	7.500.000,00	76.980.000,00	76.980.000,00	69.480.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		0,00	DINAS PEMBERDAY MASYARAKA PEKON
2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan M	 esin Lainnya																
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	7.500.000,00	76.980.000,00	76.980.000,00	69.480.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Publik Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAY MASYARAKA PEKON
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung				100 %	100 %	104.200.000,00	135.050.600,00	135.050.600,00	30.850.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		120.200.000,00	DINAS PEMBERDAY MASYARAKA PEKON
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikas	si, Sumber Daya Air dan Listrik												kemiskinan.				
	,	Jumlah Laporan Penyediaan				12 Laporan	12 Laporan	4.200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-2.400.000,00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	Membangun dari Reformasi Birokrasi			4.200.000,00	DINAS
		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan										Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. dan Pelayanan Publik Berkualitas dan Pelayanan Publik Berkualitas				PEMBERDAY MASYARAKA PEKON
2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan d	T .										1						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90,000.000,00	122.000.000,00	122.000.000,00	32.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAY MASYARAKA PEKON
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	T																
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	11.250.600,00	11.250.600,00	1.250.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Publik Berkualitas			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAY MASYARAKA PEKON
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik				100 %	100 %	78.600.000,00	81.247.200,00	81.247.200,00	2.647.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		104.337.695,00	DINAS PEMBERDAY MASYARAKA PEKON
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemelihara	aan, Biaya Pemeliharaan, dan Pa	ajak Kendaraan	Perorangan Dina	as atau Kendaraan D	1	0.11.7	27.000.000.00	70.050.000.00	70.050.000.00	0.450.000.00	LK-L B1-1-	BANA ALOKAOL				00.000.005.00	DINA O
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	67.600.000,00	70.050.000,00	70.050.000,00	2.450.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			86.308.695,00	PEMBERDAY MASYARAKA PEKON
2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sa	Jumlah Sarana dan Prasarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		gunan Lainnya		11 Unit	11 Unit	11.000.000,00	11.197.200,00	11.197.200,00	197.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan dan pemberantasan dan pemberantasan dan pemberantasan dan pemberantasan dan pemberantasan dan pemberantasan dan pemberantasan dan pelayanan publik Berkualitas			18.029.000,00	DINAS PEMBERDAY MASYARAKA PEKON
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	jumlah desa berkembang				67 desa	67 desa	315.000.000,00	955.024.484,00	1.242.512.408,00	585.000.000,00			kemiskinan.			900.000.000,00)
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	jumlah sarana dan prasarana yang terfasilitasi	3			1 desa	1 desa	315.000.000,00	955.024.484,00	1.242.512.408,00	927.512.408,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Publik Berkualitas	masyarakat pekon yang terfasilitasi		900.000.000,00	DINAS PEMBERDAY MASYARAKA PEKON
2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasara			<u> </u>		1			1					1				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				1 Unit	1 Unit	315.000.000,00	955.024.484,00	1.242.512.408,00	927.512.408,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan dan Pelayanan Publik Berkualitas			900.000.000,00	DINAS PEMBERDAY MASYARAKA PEKON

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN					VELOMBOY.		AN MAJU RENCANA AHUN 2026	PERANGKAT
NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRI	IORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				OPD		2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	3 (11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-			NASIONAL	DAERAH				
1 3. 2.	13.04	PROGRAM ADMINISTRASI		5	6	7	8 116 pekon	9 116 pekon	4.433.000.000,00	1.499.373.660,00	12 1.430.623.660,00	-2.478.000.000,00	14	15	16	17	18	19	1.955.000.000,00	21
	13.04.2.01	PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan	Administrasi				116 pekon	116 pekon	4.433.000.000,00	1.499.373.660,00	1.430.623.660,00	-3.002.376.340,00			Membangun dari	Reformasi Birokrasi	pekon di kabupaten		1.955.000.000,00	DINAS
		Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	administrasi				TTO POROIT	TTO policin		11.100.07.01000,00		0.002.070.0 10,00			desa dan dari bawal untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonom dan pemberantasan kemiskinan.	h dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi ni dan Pelayanan	pesisir barat			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2.	13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan A	dministrasi Pemerintahan Desa			1	1						1					1		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000.000,00	1.127.972.060,00	1.127.972.060,00	-72.027.940,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	Membangun dari desa dan dari bawal untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonom dan pemberantasan kemiskinan.	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi ni dan Pelayanan			1.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2.	13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perenc					140	1440	440,000,000	20,400,000,00	20 450 200 20	27.050.000.00	T	T 5 4 14 6 14 6 14 6 14 6 14 6 14 6 14 6	T.,				405.000.000.00	BINAG
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				116 Dokumen	116 Dokumen	110.000.000,00	93.400.000,00	82.150.000,00	-27.850.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawal untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonom dan pemberantasan kemiskinan.	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi ni dan Pelayanan			135.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2.	13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuan	gan Desa																	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				116 Dokumen	116 Dokumen	193.000.000,00	160.001.600,00	135.001.600,00	-57.998.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawal untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonom dan pemberantasan kemiskinan.	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2.	13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdaya	an BUM Desa dan Lembaga Ke	erja Sama antar D	Desa		T	1						1						
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				116 Dokumen	116 Dokumen	75.000.000,00	70.000.000,00	55.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawal untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonom dan pemberantasan kemiskinan.	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi ni dan Pelayanan			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2.	13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan,	Pengangkatan dan Pemberhent	tian Kepala Desa	a															
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1			42 Laporan	42 Laporan	2.800.000.000,00	0,00	0,00	-2.800.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawal untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonom dan pemberantasan kemiskinan.	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2.	13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan F	Pemberhentian Perangkat Desa	1																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	48.000.000,00	30.500.000,00	-24.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	desa dan dari bawal untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonom dan pemberantasan	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi ni dan Pelayanan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
4. 2.	13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat				12 bulan	12 bulan	2.096.000.000,00	1.551.638.500,00	1.533.038.500,00	80.000.000,00			kemiskinan.				2.176.000.000,00	
2.	13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				100 %	100 %	2.096.000.000,00	1.551.638.500,00	1.533.038.500,00	-562.961.500,00			Membangun dari desa dan dari bawal untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonom dan pemberantasan kemiskinan.	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat di desa		2.176.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2.	13.05.2.01.0003	·	_ nbagaan Lembaga Kemasyaraka	_ atan Desa/Kelura	ahan (RT, RW, P	L PKK, Posyandu, LPN	∐ ∕I, dan Karang	L Taruna), Lemba	l aga Adat Desa/Kelurahan dan Mas	syarakat Hukum Adat										
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				900 Lembaga	900 Lembaga	1.326.000.000,00	1.196.638.500,00	1.184.138.500,00	-141.861.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawal untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonom dan pemberantasan kemiskinan.	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi ni dan Pelayanan			1.326.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2.	13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa da	alam Pemanfaatan Teknologi Te	epat Guna		· I			_				·	1	·					Bu5
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna					12 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawal untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonom dan pemberantasan kemiskinan.	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi ni dan Pelayanan			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2.	13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK	K dalam Penyelenggaraan Gerak Jumlah Dokumen Hasil	kan Pemberdaya	aan Masyarakat d	dan Kesejahteraan k	Keluarga	12	700.000.000,00	355.000.000,00	348.900.000,00	-351.100.000,00	Kah Pasisir	INSENTIF	Membangun dari	Reformasi Birokrasi			750.000.000,00	DINAS
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraar Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	n			Dokumen	Dokumen	7.30.000.000,00	333.000.000,00	0-10.200.000,00	-551.100.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	FISKAL UNTUK PENGHARGAA	desa dan dari bawal untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonom dan pemberantasan kemiskinan.	h dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi ni dan Pelayanan			7-50-000-000,00	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
		DINAS PERHUBUNGAN							5.070.371.795,00	4.835.110.700,00	4.739.435.950,00	-330.935.845,00							5.687.408.975,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.070.371.795,00	4.835.110.700,00	4.739.435.950,00	-330.935.845,00							5.687.408.975,00	
2.	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							5.070.371.795,00	4.835.110.700,00	4.739.435.950,00	-330.935.845,00							5.687.408.975,00	

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN					WEL 0		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKA
NO KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGE	T 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIC	PRITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUI JAWAB
	REGIATAN		OPD	1AHUN 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	bertampan/berkurang (10-12)	LUKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (RP)	JAWAB
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
. 2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Perhubungan				100 %	100 %	2.928.823.400,00	3.348.415.700,00	3.291.090.450,00	292.882.340,00							3.221.705.740,00	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	42.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	-30.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		46.640.000,00	DINAS PERHUBUNGA
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Peren	canaan Perangkat Daerah																	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.140.000,00	DINAS PERHUBUNG
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan I		I			T T				T	T		T	T					
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	reformasi politik,	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.600.000,00	DINAS PERHUBUNGA
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan I	Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.600.000,00	DINAS PERHUBUNGA
2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan I	DPA-SKPD					<u>'</u>												
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.600.000,00	DINAS PERHUBUNGA
2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan I	Perubahan DPA- SKPD															1		
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	reformasi politik,	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.600.000,00	DINAS PERHUBUNGA
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan I	aporan Capaian Kinerja dan Ikht	tisar Realisasi I	Kinerja SKPD															
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	DINAS PERHUBUNGA
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat D	aerah	l														ı		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.600.000,00	DINAS PERHUBUNGA
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.963.423.400,00	2.690.610.700,00	2.690.610.700,00	727.187.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.159.765.740,00	DINAS PERHUBUNGA
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjang	an ASN	<u> </u>			<u> </u>				1	<u>, </u>		1	<u>.</u>			1	<u> </u>	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	1.957.923.400,00	2.685.110.700,00	2.685.110.700,00	727.187.300,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik,	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	_		2.153.715.740,00	DINAS PERHUBUNGA
		Tunjangan AŠN										Kecamatan, Semua Kel/Desa	, ,	hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan I	Laporan Keuangan Akhir Tahun S	SKPD			A 1	41	0.500.507.50				Kot Desti	DANIA AL SUCCE	Managaria	Deferred B			0 === ====	DIMAG
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAI

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN							AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGK
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA RENJA OPD TAHUN 2023	TABOET BENILA	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Doutombak / Doulouson v. (40,42)	LOKACI	CUMPED DAMA	PR	IORITAS	- KELOMPOK SASARAN	TARGET	DACH INDIKATIF (D.)	DAERAH PENANGGU JAWAB
	KEGIATAN		OPD TAHUN 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	JAWAI
2	3	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	5 6	7	8 12 Laporan	9 12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan i, Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	18	19	2.200.000,00	DINAS PERHUBUNG
2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan	Analisis Prognosis Realisasi Ango	garan					-										
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan i, Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.100.000,00	DINAS PERHUBUNG
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas			2 Orang	2 Orang	175.000.000,00	129.440.000,00	129.440.000,00	-45.560.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		192.500.000,00	DINAS PERHUBUN
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas b	eserta Atribut Kelengkapannya											1					
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			3 Paket	0 Paket	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan i, Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			99.000.000,00	DINAS PERHUBUNG
2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan	Administrasi Kepegawaian																
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan i, Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	DINAS PERHUBUN
2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pe	egawai Berdasarkan Tugas dan F	ungsi		2 Orang	2 Orang	80.000.000,00	129.440.000,00	129.440.000,00	49.440.000,00	Samua	DANA ALOKASI	Memperkuat	Reformasi Birokrasi			88.000.000,00	DINAS
		Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			2 Orang	2 Orang	80.000.000,00	129.440.000,00	129.440.000,00	49.440.000,00	Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	dan Pelayanan i, Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			88.000.000,00	PERHUBUN
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			100 %	100 %	340.000.000,00	254.625.000,00	197.299.750,00	-142.700.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		374.000.000,00	DINAS PERHUBUN
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Insta	alasi	1				-											
	Listrik/Penerangan Banguna	1	<u> </u>		40 Palas	10 Palari	7,000,000,00	0.000.000.00	0.000.000.00	074,000,00	Kab Basisis		I Managara	D. Consoci Birolandi	1	T	7 700 000 00	DINAG
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	7.000.000,00	6.026.000,00	6.026.000,00	-974.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan i, Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.700.000,00	DINAS PERHUBUN
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan P	Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan			12 Paket	0 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kah Pasisir	DANA ALOKASI	Memperkuat	Reformasi Birokrasi			6.600.000,00	DINAS
		Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Faket	O Faket	0.000.000,00	0,00	0,00	-0.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	dan Pelayanan			0.000.000,00	PERHUBUN
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Ruma	h Tangga Jumlah Paket Peralatan			12 Paket	0 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kah Besisir	DANA ALOKASI	Memperkuat	Reformasi Birokrasi			6.600.000,00	DIMAG
		Rumah Tangga yang Disediakan			12 Faket	O Faket	0.000.000,00	0,00	0,00	-0.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	dan Pelayanan i, Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0.000.000,00	PERHUBUN
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik k	Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik			1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0.00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	Memperkuat	Reformasi Birokrasi			27.500.000,00	DINAS
		Kantor yang Disediakan			, i andi	, , and	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	dan Pelayanan i, Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			21.300.000,00	PERHUBUN
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	1									1		T					
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	48.599.000,00	48.599.000,00	3.599.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	reformasi politik,	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			49.500.000,00	DINAS PERHUBUN

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
NO KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	IARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)	1	Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA		DRITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUN
1 2	2	4	<u></u>	6	7	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	13 14	15	NASIONAL 16	DAERAH 17	40	19	20	24
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan d	an Peraturan Perundang-undanga	ın	0	,	0	9	10	11	12	13 14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				17 Dokumen	17 Dokumen	40.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	-6.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			44.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAI
2.15.01.2.06.0008	Facilitasi Kuniungan Tamu												penyeludupan.					
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.100.000,00	DINAS PERHUBUNGA
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Kool	rdinasi dan Konsultasi SKPD											penyeludupan.					
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	9 Laporan	200.000.000,00	130.000.000,00	72.674.750,00	-127.325.250,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	30.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-3.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		33.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Me	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				T						T	T.,	T-				
2.15.01.2.07.0010	Department of the Processing o	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	non Loinnya			3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	17.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasi	arana Gedung Kantor atau Bangur Jumlah Unit Sarana dan	nan Lainnya			1 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	Memperkuat	Reformasi Birokrasi			11.000.000,00	DINAS
		Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				T Gillik	O GIIII	10.000.000,00	0,00	5,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			77.550.650,60	PERHUBUNGA
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	131.000.000,00	146.340.000,00	146.340.000,00	15.340.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		144.100.000,00	DINAS PERHUBUNGA
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi	, Sumber Daya Air dan Listrik																
0.45.04.0.00.000	Provedings have Bookston d	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	49.000.000,00	29.600.000,00	29.600.000,00	-19.400.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			53.900.000,00	DINAS PERHUBUNGAI
2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan d	an Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan				12 Lanoran	12 Laporan	57.000.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00	35.000.000,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	Memperkuat	Reformasi Birokrasi			62.700.000,00	DINAS
		Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporair	37.500.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			02.100.000,00	PERHUBUNGAI
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan			1		40.	46.					B	Marrow	Defense in the second				Diviso
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	24.740.000,00	24.740.000,00	-260.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			27.500.000,00	DINAS PERHUBUNGA
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	247.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	-159.000.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		271.700.000,00	DINAS PERHUBUNGA

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
NO KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	GET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	PRIC	RITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			OPD		2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	LONGO	January Dana	NASIONAL	DAERAH		.,	(NP)	
1 2	3	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	6	7	8 3 Unit	9 3 Unit	10 80.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	8.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	18	19	20 88.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemelihara	ıl aan, Biaya Pemeliharaan, Pajak da	⊥ an Perizinan Ke	l endaraan Dinas O	perasional atau La	_l ıpangan]				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	0 Unit	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	reformasi politik,	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			121.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan	Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi G	l edung Kantor dan Bangunan Lain	ınya								l l							
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	37.000.000,00	0,00	0,00	-37.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			40.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sa	arana dan Prasarana Gedung Kan	ntor atau Bangu	nan Lainnya		_										_		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	O Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	reformasi politik,	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2. 2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				70 %	100 %	1.771.548.395,00	1.454.295.000,00	1.415.945.500,00	177.154.840,00						1.948.703.235,00	
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota				100 %	0 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Re	 encana Induk Jaringan LLAJ Kabu	upaten/Kota							L			1					
		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	pengembangan infrastruktur dan	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				70 %	100 %	920.000.000,00	950.000.000,00	934.150.500,00	14.150.500,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		1.012.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Ja	lan di Jalan Kabupaten/Kota																
		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN I	KERANGKA PENDANAAN						AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT
NO KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	PRIC	RITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			OPD		2024	SEBELUM		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1 2	3	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5	6	7	8 20 Unit	9 O Unit	10	0,00	0,00	-10.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	18	19	20 11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaa	n Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				20 Unit	20 Unit	900.000.000,00	950.000.000,00	934.150.500,00	34.150.500,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF	pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang	-			990.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Cakupan Pemenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				70 %	100 %	10.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	190.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat		11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaa	n Terminal Tipe C (Fasilitas Utam	na dan Penunjar	ng)														
		Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	190.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Cakupan Pemenuhan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				70 %	0 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	Masyarakat		11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi F	Pengawasan Pelaksanaan Izin Pe T	enyelenggaraan T	dan Pembanguna	an Fasilitas Parkir	1				T		1	I	T			Ι	
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				70 %	100 %	367.548.395,00	169.430.000,00	146.930.000,00	-220.618.395,00		Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		404.303.235,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendali	an Efektivitas Pelaksanaan Kebija	akan untuk Jala	ın Kabupaten/Kota	a													
2.15.02.2.06.0014	Spainting of D. L.	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota ajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			n//c++	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	20.925.000,00	20.925.000,00	10.925.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	pengembangan infrastruktur dan meningkatkan	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN				- KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKA DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARG SEBELUM	ET 2025 SESUDAH	RKPD 2025	PAGU INDIKATIF (Rp) APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL DAERAH	SASARAN	TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUN JAWAB
2	3	4 Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5	6	7	8 1 Dokumen	9	10 10.000.000,00	11 11.800.000,00	12 1.800.000,00	-8.200.000,00	14 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 DANA ALOKASI UMUM (DAU)	16 17 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi	18	19 20 11.000.000,00	21 DINAS PERHUBUNGAI
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkut	an Jalan untuk Jaringan Jalan K Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	(abupaten/Kota			12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif		11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGA
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan	Perlengkapan Jalan dalam rang Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan		dan Rekayasa L	Lalu Lintas	1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGA
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Re	kayasa Lalu Lintas untuk Jaringa Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	an Jalan Kabupa	aten/Kota		12 Laporan	12 Laporan	327.548.395,00	123.705.000,00	111.205.000,00	-216.343.395,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		360.303.235,00	DINAS PERHUBUNG
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Audit dan Inspeksi				100 %	0 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Masyarakat	11.000.000,00	DINAS PERHUBUNG
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit d	an Pemantauan Sistem Manajer Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	men Keselamata	an Perusahaan <i>i</i>	Angkutan Umum	12 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif		11.000.000,00	DINAS PERHUBUN
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kebutuhan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				70 %	100 %	330.000.000,00	134.865.000,00	134.865.000,00	-195.135.000,00			koperasi. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Masyarakat	363.000.000,00	DINAS PERHUBUN
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasa	an Ketersediaan Angkutan Umur Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	m untuk Jasa An	gkutan Orang d	an/atau Barang Anta		1 (Satu) Kabupa	320.000.000,00	134.865.000,00	134.865.000,00	-185.135.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif		352.000.000,00	DINAS PERHUBUNG

NO KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN FARGET RENJA					CAPAIAN KINERJA DAI	N KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
NO KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	OPD TAHUN 2024	SEBELUM SESI	5 UDAH	RKPD 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIC	DAERAH	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1 2	3	4	5	6	7	SEBELUM SES		10	APBD 2025 11	12	13	14	15	NASIONAL 16	DAERAH 17	18	19	20	21
		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2 Unit 0 Uni		10.000.000,00	0,00				DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan				70 % 100 %	/6	10.000.000,00	0,00	0,0	-10.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.10.0001	Perumusan Kebijakan Penetap	oan Kawasan Perkotaan untuk A	ngkutan Perkot	aan Kewenangan I	Kabupaten/Kota	1		ı		1	1	T	1	T		T	T	Γ	
		Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen 0 Dok	kumen	10.000.000,00	0,00	0,0	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	pengembangan infrastruktur dan meningkatkan	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				70 % 0 %		10.000.000,00	0,00	0,0	-10.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sos	ialisasi Rencana Umum Jaringar	n Trayek Perkot	aan dalam 1 (Satu)) Daerah Kabupa							T		<u> </u>					
		Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen 0 Dok	kumen	10.000.000,00	0,00	0,0	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				70 % 0 %		94.000.000,00	0,00	0,0	94.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		103.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.16.0003	Pengendalian dan Pengawasa	ın Tarif Kelas Ekonomi Angkutan	Orang dan Ang	gkutan Perkotaan d	dan Perdesaan da	1 1				1		T	1	T		T	1	Γ	
		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan 0 Lap		94.000.000,00	0,00			Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			103.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3. 2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Pemenuhan Pengelolaan Pelayaran				60 % 100 %	%	370.000.000,00	32.400.000,00	32.400.000,0	0 147.000.000,00							517.000.000,00	
2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota				50 % 100 %	%	360.000.000,00	32.400.000,00	32.400.000,0	-327.600.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		506.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET R	KEALISASI	RAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN KE	RANGKA PENDANAAN						IAJU RENCANA JN 2026	PERANGKAT
NO KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA R	RENJA OPD OP	RGET RENJA PD TAHUN	TARGET 2025		P	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA		ORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET PA	AGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	RESIATAN		OPD "	A110N 2020	2024 SEB	SELUM SESUD		25	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		COMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TANGET TA		
1 2	3	4	5	6	7	8 9	10	200 000 00	22 400 000 00	12	13 14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan			12 L	aporan 12 Lapo	oran 360.0	00,000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	-327.600.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			506.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian									Semua Kel/Desa		meningkatkan lapangan kerja yang	Pembangunan Infrastruktur Daerah				
		Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam											berkualitas, mendorong	yang Berkelanjutan				
		Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan											kewirausahaan, mengembangkan					
		Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur											industri kreatif serta mengembangkan					
		Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah											agromaritim industri di sentra produksi					
		Kabupaten/Kota											melalui peran aktif koperasi.					
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan	Cakupan Pemenuhan			40 %	0 %	10.0	00,000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00		Melanjutkan	Pembangunan	Masyarakat		11.000.000,00	
	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan	Kebutuhan Pembangunan Penerbitan Izin											pengembangan infrastruktur dan	Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				PERHUBUNGAN
	Pengumpan Lokal	Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan											meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				
		r engumpan											mendorong kewirausahaan,	yang berkelanjulan				
													mengembangkan industri kreatif serta					
													mengembangkan agromaritim industri					
													di sentra produksi melalui peran aktif					
2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pe	ngumnan Lokal											koperasi.					
2.13.03.2.12.0002	Tembangunan Felabunan Fe	Jumlah Pelabuhan			2 Un	it 0 Unit	10.0	000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI		Pembangunan			11.000.000,00	
		Pengumpan Lokal yang Dibangun									Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)	pengembangan infrastruktur dan	Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan				PERHUBUNGA
											Semua Kel/Desa		meningkatkan lapangan kerja yang	Pembangunan Infrastruktur Daerah				
													berkualitas, mendorong kewirausahaan,	yang Berkelanjutan				
													mengembangkan industri kreatif serta					
													mengembangkan agromaritim industri					
													di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
	DINAS KOMUNIKASI, INFO	 RMATIKA, STATISTIK DAN PEI	RSANDIAN				7.222.7	714.300,00	5.511.385.763,00	5.225.469.986,00	-1.997.244.314,00		roperasi.				0,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN						7.222.7	714.300,00	5.511.385.763,00	5.225.469.986,00	-1.997.244.314,00						0,00	
2.16	PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI						6.989.3	869.300,00	5.362.172.763,00	5.105.320.986,00	-1.884.048.314,00						0,00	
2.16.01	DAN INFORMATIKA PROGRAM PENUNJANG	Cakupan Pemenuhan			92,5	92,5	2.404.9	374.700,00	2.661.577.013,00	2.551.979.956,00	-3.401.874.700,00						0,00	
2.10.01	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pers			374.700,00	2.001.577.013,00	2.551.979.956,00	-3.401.074.700,00						0,00	
2.16.01.2.01	Perencanaan,	Cakupan Pemenuhan			92,5	92,5		100.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00		-	Reformasi Birokrasi	Aparatur		0,00	DINAS
	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan			Pers	en Persen								dan Pelayanan Publik Berkualitas				KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
		Daerah												Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Peren	canaan Perangkat Daerah												Publik Berkualitas				
		Jumlah Dokumen			2 Do	kumen 2 Dokur	ımen 7.4	00.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00 Kab. Pesisir	PENDAPATAN	-	Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS
		Perencanaan Perangkat Daerah									Barat, Semua Kecamatan,	ASLI DAERAH (PAD)		dan Pelayanan Publik Berkualitas				KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
											Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan I	 .aporan Capaian Kinerja dan Ikh	tisar Realisasi Kiner	ria SKPD										Fublik Berkualitas				
		Jumlah Laporan Capaian		.,	2 La	poran 2 Lapor	oran 5.0	00,000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir	PENDAPATAN	-	Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan									Barat, Semua Kecamatan,	ASLI DAERAH (PAD)		dan Pelayanan Publik Berkualitas			-,	KOMUNIKASI, INFORMATIKA
		Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan									Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				STATISTIK DAI PERSANDIAN
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												Publik Berkualitas				
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan	Cakupan Pemenuhan			92,5	92,5		953.100,00	1.513.012.500,00	1.513.012.500,00	25.059.400,00		-	Reformasi Birokrasi	Aparatur		0,00	DINAS KOMUNIKASI,
	Perangkat Daerah	Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pers	en Persen	1							dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				INFORMATIKA, STATISTIK DAN
		Daeran												dan Pelayanan Publik Berkualitas				PERSANDIAN
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjang	l an ASN												Somanias		1		
	,	Jumlah Orang yang			14 C	Prang/b 14 Orar	ing/b 1.482.4	\$53.100,00	1.507.512.500,00	1.507.512.500,00	25.059.400,00 Kab. Pesisir	PENDAPATAN	-	Reformasi Birokrasi			0,00	
		Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			ulan					·	Barat, Semua Kecamatan,	ASLI DAERAH (PAD)		dan Pelayanan Publik Berkualitas				KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
											Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				STATISTIK DAN PERSANDIAN
		anoran Kayangan Akhir Tahuni	SKBD											Publik Berkualitas				
2 16 04 2 02 0005	Koordingsi dan Danimana	aporan Keuangan Akhir Tahun : Jumlah Laporan Keuangan	OKI D		110	poran 1 Lapor	uran 2.5	500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 Kab. Pesisir	PENDAPATAN		Reformasi Birokrasi			0.00	DINAS
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan I	I Julipan Laurian News III			ı La	, s.a Lapor	2.0	. 35.050,00	2.000.000,00	2.300.000,00	Barat, Semua Kecamatan,	ASLI DAERAH (PAD)		dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan I	Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	l l	1							Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan I	Akhir Tahun SKPD dan												Publik Berkualitas				
		Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		in SKDD							I					<u> </u>		1
2.16.01.2.02.0005 2.16.01.2.02.0007		Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD aporan Keuangan Bulanan/ Triv		an SKPD	21a	poran 2 Lapor	oran 20	00,000,000	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir	PENDAPATAN	-	Reformasi Birokrasi			0.00	DINAS
		Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD aporan Keuangan Bulanan/ Triv Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan		an SKPD	2 La	poran 2 Lapor	oran 2.0	000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	KOMUNIKASI, INFORMATIKA
		Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD aporan Keuangan Bulanan/ Triv Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	/ulanan/ Semesteral	an SKPD	2 La	poran 2 Lapor	oran 2.0	000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Barat, Semua	ASLI DAERAH	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			0,00	KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
		Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD aporan Keuangan Bulanan/ Triv Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	/ulanan/ Semesteral	an SKPD	2 La	poran 2 Lapor	oran 2.0	00,000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan,	ASLI DAERAH	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi			0,00	KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
	Koordinasi dan Penyusunan I	Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD aporan Keuangan Bulanan/ Triv Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	vulanan/ Semesteral	an SKPD	2 La	poran 2 Lapor	oran 2.0	000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ASLI DAERAH (PAD)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAI PERSANDIAN
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan I	Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD aporan Keuangan Bulanan/ Triw Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD analisis Prognosis Realisasi Anga Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis	vulanan/ Semesteral	an SKPD		poran 2 Lapor		000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua	ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI,
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan I	Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD aporan Keuangan Bulanan/ Triw Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD analisis Prognosis Realisasi Anga Jumlah Dokumen Pelaporan	vulanan/ Semesteral	an SKPD							Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN I	KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
NO KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	PRIC	ORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			OPD		2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	3 (,		NASIONAL	DAERAH			(,,,	
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 14	15	16	17	18	19	20	21
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92,5 Persen	92,5 Persen	1.632.965.600,00	949.108.513,00	839.511.456,00	-793.454.144,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Pe	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik K	antor		1							1							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	dan Penggandaan																
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	205.588.600,00	237.164.600,00	237.164.600,00	31.576.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan da	an Peraturan Perundang-undang	an															
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.102.800.000,00	345.000.000,00	345.000.000,00	-757.800.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koor	dinasi dan Konsultasi SKPD				1									_			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	199.577.000,00	241.943.913,00	132.346.856,00	-67.230.144,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92,5 Persen	92,5 Persen	167.000.000,00	85.500.000,00	85.500.000,00	-81.500.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Me	L esin Lainnya															1	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	167.000.000,00	85.500.000,00	85.500.000,00	-81.500.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92,5 Persen	92,5 Persen	5.556.000,00	5.556.000,00	5.556.000,00	0,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Umum Kantor	1			1												
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.556.000,00	5.556.000,00	5.556.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92,5 Persen	92,5 Persen	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemelihara	an, Biaya Pemeliharaan, dan Paj	ak Kendaraan F	Perorangan Dinas	atau Kendaraan Di	inas Jabatan												
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemelihara	an, Biaya Pemeliharaan, Pajak d	an Perizinan Ke	endaraan Dinas O	perasional atau Lap	pangan												
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan																	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2. 2.16.02 2.16.02.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Pengelolaan Informasi dan	Persentase Peningkatan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik				85,00 Persen	85,00 Persen	2.185.707.500,00 2.185.707.500,00	1.446.963.650,00 1.446.963.650,00	1.360.873.930,00 1.360.873.930,00	-2.185.707.500,00 -824.833.570,00		_	Reformasi Birokrasi	Aparatur dan		0,00	DINAS
2.10.02.2.01	Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92,5 Persentase	92,5 Persentase	2.100.707.500,00	1.440.505.050,00	1.500.073.930,00	-024.033.37U,UU			dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat		0,00	KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	PERIODE CA	APAIAN TARG	AKIRAAN APAIAN GET RENJA	TAPO	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)	CAPAIAN KINERJA DAN I	AERANGKA PENDANAAN			PDIO	PRITAS	- KELOMPOK SASARAN		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANG DAERA PENANG
	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	DEMOTE A KEN	NJA OPD OPI	D TAHUN	SEBELUM		RKPD 2025	· · · ·	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	JAGARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
.16.02.2.01.0014	Relasi Media			1				1							-		1	•	
		Jumlah aktivitas relasi media				100	100	1.340.527.000,00	779.528.150,00	779.528.150,00	-560.998.850,00		PENDAPATAN	-	Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS
		kepada media yang memenuhi kriteria sebagai				Laporan	Laporan					Barat, Semua Kecamatan,	ASLI DAERAH (PAD)		dan Pelayanan Publik Berkualitas				KOMUNIKAS
		berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di										Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				STATISTIK I PERSANDIA
		Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media													Publik Berkualitas				
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi denga	n Komunitas Informasi Masyaral	kat		<u> </u>								I I						
		Jumlah Komunitas Informasi				11	11	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Pesisir	PENDAPATAN	-	Reformasi Birokrasi			0,00	
		yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di				Komunitas	Komunitas					Barat, Semua Kecamatan,	ASLI DAERAH (PAD)		dan Pelayanan Publik Berkualitas				KOMUNIKA INFORMATI
		Dinas Kominfo										Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				STATISTIK PERSANDI
															Publik Berkualitas				
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik						_										_		
		Jumlah permohonan Informasi Publik yang				12 Permoh onan	12 Permoh onan	8.677.500,00	5.677.500,00	5.677.500,00	-3.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			0,00	DINAS KOMUNIKA
		diselesaikan sesuai				Onan	Onan					Kecamatan,	(PAD)		Publik Berkualitas				INFORMAT
		peraturan perundangan										Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				PERSAND
															Publik Berkualitas				_
16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijaka		T T									T	Г						
		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu				1 Rekomen dasi	1 Rekomen dasi	361.000.000,00	287.400.000,00	284.033.000,00	-76.967.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			0,00	KOMUNIKA
		publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi										Kecamatan, Semua Kel/Desa	(PAD)		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				INFORMAT STATISTIK
		prioritas Pemerintah Daerah													dan Pelayanan Publik Berkualitas				PERSAND
6.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi																	1	
1.020		Persentase khalayak yang				80	80	0,00	0,00	0,00	0.00	Kab. Pesisir	PENDAPATAN		Reformasi Birokrasi			0.00	DINAS
		terpapar informasi publik					00	0,00	0,00	0,00	0,00	Barat, Semua	ASLI DAERAH		dan Pelayanan			0,00	KOMUNIK
												Kecamatan, Semua Kel/Desa	(PAD)		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				INFORMA STATISTI
															dan Pelayanan Publik Berkualitas				PERSANI
3.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunika	ısi Publik	1				I						<u> </u>		I	ı	I	ı	
	_	Jumlah media komunikasi				1 Media	1 Media	87.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	-81.000.000,00	Kab. Pesisir	PENDAPATAN		Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS
		publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun				· modia	· ····oaia	01.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	31.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan,	ASLI DAERAH (PAD)		dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	KOMUNIK
		pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis										Semua Kel/Desa	(1712)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				STATISTI
		sesuai kiileria/jukriis													Publik Berkualitas				PERSANI
.02.2.01.0023	Penyusunan Konten			•	·			•	<u>.</u>						•	•			
		Jumlah Konten Informasi				12 Konten	12 Konten	382.703.000,00	367.558.000,00	284.835.280,00	-97.867.720,00		PENDAPATAN	-	Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS
		Publik										Barat, Semua Kecamatan,	ASLI DAERAH (PAD)		dan Pelayanan Publik Berkualitas				KOMUNIK INFORMA
												Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				STATISTII PERSAND
															Publik Berkualitas				
6.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumbe	r Daya Manusia Komunikasi Pub	olik																
		Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	PENDAPATAN ASLI DAFRAH	•	Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS
		komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Barat, Semua Kecamatan,	ASLI DAERAH (PAD)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	KOMUNII INFORM
		komunikasi publik yang				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Barat, Semua	ASLI DAERAH		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			0,00	KOMUNIK INFORMA STATISTI
6.02	PROGRAM	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan						·				Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ASLI DAERAH	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				KOMUNIK INFORMA STATISTII PERSAND
6.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan				2 Orang 82,5 Persen	2 Orang 82,5 Persen	0,00 1.401.787.100,00	0,00 1.253.632.100,00	1.192.467.100,00	-1.401.787.100,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ASLI DAERAH	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			0,00	KOMUNIK INFORMA STATISTI PERSANI
6.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan				82,5	82,5	·				Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ASLI DAERAH	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				KOMUNII INFORMA STATISTI PERSANI
	PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)				82,5 Persen	82,5 Persen	1.401.787.100,00	1.253.632.100,00	1.192.467.100,00	-1.401.787.100,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ASLI DAERAH	•	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	KOMUNII INFORMA STATISTI PERSANI
	PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan				82,5	82,5	·				Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ASLI DAERAH		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur		0,00	KOMUNII INFORM/ STATIST PERSAN
	PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan Nama Domain	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan				82,5 Persen	82,5 Persen	1.401.787.100,00	1.253.632.100,00	1.192.467.100,00	-1.401.787.100,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ASLI DAERAH		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi	Aparatur		0,00	MOMUNII INFORM/ STATIST PERSAN DINAS KOMUNII INFORM/ STATIST
	PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis				82,5 Persen	82,5 Persen	1.401.787.100,00	1.253.632.100,00	1.192.467.100,00	-1.401.787.100,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ASLI DAERAH	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		0,00	MOMUNII INFORM/ STATIST PERSAN DINAS KOMUNII INFORM/ STATIST
3.03.2.01	PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	an Pemerintah Daerah	dan Pengelolaan		82,5 Persen 82,5 Persen	82,5 Persen 82,5 Persen	1.401.787.100,00	1.253.632.100,00	1.192.467.100,00	-1.401.787.100,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ASLI DAERAH		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur		0,00	MOMUNII INFORM/ STATIST PERSAN DINAS KOMUNII INFORM/ STATIST
.03.2.01	PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) an Sub Domain Penyelenggaraa	an Pemerintah Daerah	dan Pengelolaan	Nama Domain	82,5 Persen 82,5 Persen	82,5 Persen 82,5 Persen	1.401.787.100,00 19.170.000,00	1.253.632.100,00 27.195.000,00	1.192.467.100,00 19.695.000,00	-1.401.787.100,00 525.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	ASLI DAERAH (PAD)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		0,00	MOMUNII INFORM, STATIST PERSAN DINAS KOMUNII INFORM, STATIST PERSAN
5.03.2.01	PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) an Sub Domain Penyelenggaraa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain		dan Pengelolaan	Nama Domain	82,5 Persen 82,5 Persen	82,5 Persen 82,5 Persen	1.401.787.100,00	1.253.632.100,00	1.192.467.100,00	-1.401.787.100,00 525.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur		0,00	MOMUNII INFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNII INFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNII KOMUNII NECENSANI
3.03.2.01	PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) an Sub Domain Penyelenggaraa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain		dan Pengelolaan	Nama Domain	82,5 Persen 82,5 Persen	82,5 Persen 82,5 Persen	1.401.787.100,00 19.170.000,00	1.253.632.100,00 27.195.000,00	1.192.467.100,00 19.695.000,00	-1.401.787.100,00 525.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua	ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi	Aparatur		0,00	DINAS KOMUNII INFORM/ STATIST PERSAN DINAS KOMUNII INFORM/ STATIST PERSAN DINAS KOMUNII INFORM/ STATIST
3.03.2.01	PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) an Sub Domain Penyelenggaraa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah		dan Pengelolaan	Nama Domain	82,5 Persen 82,5 Persen	82,5 Persen 82,5 Persen	1.401.787.100,00 19.170.000,00	1.253.632.100,00 27.195.000,00	1.192.467.100,00 19.695.000,00	-1.401.787.100,00 525.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		0,00	DINAS KOMUNIH INFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNIH INFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNIH INFORMA STATISTI
5.03.2.01 5.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Nama Domain d	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) an Sub Domain Penyelenggaraa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa Persentase Peningkatan		dan Pengelolaan	Nama Domain	82,5 Persen 82,5 Persen n Pemerintah 2 Dokumen	82,5 Persen 82,5 Persen Desa 2 Dokumen 82,5	1.401.787.100,00 19.170.000,00	1.253.632.100,00 27.195.000,00	1.192.467.100,00 19.695.000,00	-1.401.787.100,00 525.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		0,00	MOMUNII INFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNII INFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNII INFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNII INFORMA STATISTI PERSANI
5.03.2.01 5.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Nama Domain d	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) an Sub Domain Penyelenggaraa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis		dan Pengelolaan	Nama Domain	82,5 Persen 82,5 Persen n Pemerintah 2 Dokumen	82,5 Persen 82,5 Persen Desa 2 Dokumen	1.401.787.100,00 19.170.000,00	1.253.632.100,00 27.195.000,00	1.192.467.100,00 19.695.000,00	-1.401.787.100,00 525.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	MOMUNII INFORM/STATISTI PERSANI DINAS KOMUNII INFORM/STATISTI PERSANI DINAS KOMUNII INFORM/STATISTI PERSANI DINAS KOMUNII INFORM/STATISTI PERSANI
5.03.2.01 5.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Nama Domain d Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) an Sub Domain Penyelenggaraa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan		dan Pengelolaan	Nama Domain	82,5 Persen 82,5 Persen n Pemerintah 2 Dokumen	82,5 Persen 82,5 Persen Desa 2 Dokumen 82,5	1.401.787.100,00 19.170.000,00	1.253.632.100,00 27.195.000,00	1.192.467.100,00 19.695.000,00	-1.401.787.100,00 525.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi			0,00	MOMUNII INFORM/STATIST PERSAN DINAS KOMUNII INFORM/STATIST PERSAN DINAS KOMUNII INFORM/STATIST PERSAN DINAS KOMUNII INFORM/STATIST PERSAN
.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Nama Domain d Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) an Sub Domain Penyelenggaraa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis		dan Pengelolaan	Nama Domain	82,5 Persen 82,5 Persen n Pemerintah 2 Dokumen	82,5 Persen 82,5 Persen Desa 2 Dokumen 82,5	1.401.787.100,00 19.170.000,00	1.253.632.100,00 27.195.000,00	1.192.467.100,00 19.695.000,00	-1.401.787.100,00 525.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	MOMUNII INFORM, STATIST PERSAN DINAS KOMUNII INFORM, STATIST PERSAN DINAS KOMUNII INFORM, STATIST PERSAN DINAS KOMUNII INFORM, STATIST PERSAN
5.03.2.01 5.03.2.01.0004 5.03.2.02	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Nama Domain d Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) an Sub Domain Penyelenggaraa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		dan Pengelolaan	Nama Domain	82,5 Persen 82,5 Persen n Pemerintah 2 Dokumen	82,5 Persen 82,5 Persen Desa 2 Dokumen 82,5	1.401.787.100,00 19.170.000,00	1.253.632.100,00 27.195.000,00	1.192.467.100,00 19.695.000,00	-1.401.787.100,00 525.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			0,00	MOMUNII INFORM/STATIST PERSANI DINAS KOMUNII INFORM/STATIST PERSANI DINAS KOMUNII INFORM/STATIST PERSANI DINAS KOMUNII INFORM/STATIST PERSANI
5.03.2.01 5.03.2.01.0004 5.03.2.02	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Nama Domain d Pengelolaan Rama Domain d Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) an Sub Domain Penyelenggaraa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) at Data Nasional Jumlah Aplikasi SPBE		dan Pengelolaan	Nama Domain	82,5 Persen 82,5 Persen 1 Pemerintah 2 Dokumen 82,5 Persen	82,5 Persen 82,5 Persen Desa 2 Dokumen 82,5 Persen	1.401.787.100,00 19.170.000,00	1.253.632.100,00 27.195.000,00	1.192.467.100,00 19.695.000,00	-1.401.787.100,00 525.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	MOMUNIH INFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNIH INFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNIH INFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNIH INFORMA STATISTI PERSANI
5.03.2.01 5.03.2.01.0004 5.03.2.02	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Nama Domain d Pengelolaan Rama Domain d Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) an Sub Domain Penyelenggaraa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) at Data Nasional Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat		dan Pengelolaan	Nama Domain	82,5 Persen 82,5 Persen 1 Pemerintah 2 Dokumen 82,5 Persen	82,5 Persen 82,5 Persen Desa 2 Dokumen 82,5 Persen	1.401.787.100,00 19.170.000,00 19.170.000,00	1.253.632.100,00 27.195.000,00 27.195.000,00	1.192.467.100,00 19.695.000,00 19.695.000,00	-1.401.787.100,00 525.000,00 525.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	MOMUNII INFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNII INFORMA STATISTI PERSANI
5.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Nama Domain d Pengelolaan Rama Domain d Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) an Sub Domain Penyelenggaraa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) at Data Nasional Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang		dan Pengelolaan	Nama Domain	82,5 Persen 82,5 Persen 1 Pemerintah 2 Dokumen 82,5 Persen	82,5 Persen 82,5 Persen Desa 2 Dokumen 82,5 Persen	1.401.787.100,00 19.170.000,00 19.170.000,00	1.253.632.100,00 27.195.000,00 27.195.000,00	1.192.467.100,00 19.695.000,00 19.695.000,00	-1.401.787.100,00 525.000,00 525.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	MOMUNIH INFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNIH INFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNIH INFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNIH INFORMA STATISTI PERSANI
5.03.2.01 5.03.2.01.0004 5.03.2.02	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Nama Domain d Pengelolaan Regovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pemanfaatan Pusa	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) an Sub Domain Penyelenggaraa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) at Data Nasional Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional		dan Pengelolaan	Nama Domain	82,5 Persen 82,5 Persen 1 Pemerintah 2 Dokumen 82,5 Persen	82,5 Persen 82,5 Persen Desa 2 Dokumen 82,5 Persen	1.401.787.100,00 19.170.000,00 19.170.000,00	1.253.632.100,00 27.195.000,00 27.195.000,00	1.192.467.100,00 19.695.000,00 19.695.000,00	-1.401.787.100,00 525.000,00 525.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	MOMUNIFINFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNIFINFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNIFINFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNIFINFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNIFINFORMA STATISTI PERSANI
5.03.2.01 5.03.2.01.0004 5.03.2.02	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Nama Domain d Pengelolaan Rama Domain d Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) an Sub Domain Penyelenggaraa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) at Data Nasional Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional		dan Pengelolaan	Nama Domain	82,5 Persen 82,5 Persen 1 Pemerintah 2 Dokumen 82,5 Persen 50 Aplikasi	82,5 Persen 82,5 Persen Desa 2 Dokumen 82,5 Persen	1.401.787.100,00 19.170.000,00 19.170.000,00 1.382.617.100,00	1.253.632.100,00 27.195.000,00 27.195.000,00 1.226.437.100,00	1.192.467.100,00 19.695.000,00 19.695.000,00 1.172.772.100,00	-1.401.787.100,00 525.000,00 525.000,00 -209.845.000,00 123.060.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	MOMUNIH INFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNIH INFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNIH INFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNIH INFORMA STATISTI PERSANI
5.03.2.01 5.03.2.01.0004 5.03.2.02	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Nama Domain d Pengelolaan Regovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pemanfaatan Pusa	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) an Sub Domain Penyelenggaraa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) at Data Nasional Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional		dan Pengelolaan	Nama Domain	82,5 Persen 82,5 Persen 1 Pemerintah 2 Dokumen 82,5 Persen	82,5 Persen 82,5 Persen Desa 2 Dokumen 82,5 Persen	1.401.787.100,00 19.170.000,00 19.170.000,00	1.253.632.100,00 27.195.000,00 27.195.000,00	1.192.467.100,00 19.695.000,00 19.695.000,00	-1.401.787.100,00 525.000,00 525.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	MOMUNIFINFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNIFINFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNIFINFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNIFINFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNIFINFORMA STATISTI PERSANI
5.03.2.01 5.03.2.01.0004 5.03.2.02	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Nama Domain d Pengelolaan Regovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pemanfaatan Pusa	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) an Sub Domain Penyelenggaraa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) at Data Nasional Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional		dan Pengelolaan	Nama Domain	82,5 Persen 82,5 Persen 1 Pemerintah 2 Dokumen 82,5 Persen 50 Aplikasi	82,5 Persen 82,5 Persen Desa 2 Dokumen 82,5 Persen	1.401.787.100,00 19.170.000,00 19.170.000,00 1.382.617.100,00	1.253.632.100,00 27.195.000,00 27.195.000,00 1.226.437.100,00	1.192.467.100,00 19.695.000,00 19.695.000,00 1.172.772.100,00	-1.401.787.100,00 525.000,00 525.000,00 -209.845.000,00 123.060.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	MOMUNIK INFORMA STATISTI PERSAND DINAS KOMUNIK INFORMA STATISTI PERSAND
5.03.2.01 5.03.2.01.0004 5.03.2.02	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Nama Domain d Pengelolaan Regovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pemanfaatan Pusa	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) an Sub Domain Penyelenggaraa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) at Data Nasional Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional		dan Pengelolaan	Nama Domain	82,5 Persen 82,5 Persen 1 Pemerintah 2 Dokumen 82,5 Persen 50 Aplikasi	82,5 Persen 82,5 Persen Desa 2 Dokumen 82,5 Persen	1.401.787.100,00 19.170.000,00 19.170.000,00 1.382.617.100,00	1.253.632.100,00 27.195.000,00 27.195.000,00 1.226.437.100,00	1.192.467.100,00 19.695.000,00 19.695.000,00 1.172.772.100,00	-1.401.787.100,00 525.000,00 525.000,00 -209.845.000,00 123.060.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	MOMUNIK INFORMA STATISTI PERSAND DINAS KOMUNIK INFORMA STATISTI PERSAND
5.03.2.01 5.03.2.01.0004 5.03.2.02 6.03.2.02.0013	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Nama Domain d Pengelolaan Regovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pemanfaatan Pusa	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) an Sub Domain Penyelenggaraa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) at Data Nasional Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional PBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda			Nama Domain	82,5 Persen 82,5 Persen 1 Pemerintah 2 Dokumen 82,5 Persen 50 Aplikasi	82,5 Persen 82,5 Persen Desa 2 Dokumen 82,5 Persen	1.401.787.100,00 19.170.000,00 19.170.000,00 1.382.617.100,00	1.253.632.100,00 27.195.000,00 27.195.000,00 1.226.437.100,00	1.192.467.100,00 19.695.000,00 19.695.000,00 1.172.772.100,00	-1.401.787.100,00 525.000,00 525.000,00 -209.845.000,00 123.060.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIH INFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNIH INFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNIH INFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNIH INFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNIH INFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNIH INFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNIH INFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNIH INFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNIH INFORMA STATISTI PERSANI
6.03.2.01 6.03.2.01.0004 6.03.2.02 6.03.2.02.0013	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Nama Domain d Pengelolaan Regovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pemanfaatan Pusa	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) an Sub Domain Penyelenggaraa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) at Data Nasional Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional PBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda			Nama Domain	82,5 Persen 82,5 Persen 82,5 Persen 50 Aplikasi 2 Laporan	82,5 Persen 82,5 Persen 2 Dokumen 50 Aplikasi 2 Laporan	1.401.787.100,00 19.170.000,00 19.170.000,00 1.382.617.100,00 16.206.500,00	1.253.632.100,00 27.195.000,00 1.226.437.100,00 144.006.500,00	1.192.467.100,00 19.695.000,00 1.172.772.100,00 139.266.500,00 23.968.000,00	-1.401.787.100,00 525.000,00 525.000,00 -209.845.000,00 123.060.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	MOMUNIFINFORMASTATISTI PERSANI DINAS KOMUNIFINFORMASTATISTI PERSANI DINAS KOMUNIFINFORMASTATISTI PERSANI DINAS KOMUNIFINFORMASTATISTI PERSANI DINAS KOMUNIFINFORMASTATISTI PERSANI
6.03.2.01 6.03.2.01.0004 6.03.2.02 6.03.2.02.0013	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Nama Domain d Pengelolaan Regovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pemanfaatan Pusa	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) an Sub Domain Penyelenggaraa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) at Data Nasional Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional PBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda tau reviu arsitektur dan peta ren			Nama Domain	82,5 Persen 82,5 Persen 82,5 Persen 50 Aplikasi 2 Laporan	82,5 Persen 82,5 Persen Desa 2 Dokumen 82,5 Persen	1.401.787.100,00 19.170.000,00 19.170.000,00 1.382.617.100,00	1.253.632.100,00 27.195.000,00 27.195.000,00 1.226.437.100,00	1.192.467.100,00 19.695.000,00 19.695.000,00 1.172.772.100,00	-1.401.787.100,00 525.000,00 525.000,00 -209.845.000,00 123.060.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	MOMUNIK INFORMA STATISTI PERSAND DINAS KOMUNIK INFORMA STATISTI PERSAND
5.03.2.01 5.03.2.01.0004 5.03.2.02 6.03.2.02.0013	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Nama Domain d Pengelolaan Regovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pemanfaatan Pusa	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) an Sub Domain Penyelenggaraa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) at Data Nasional Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional PBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda			Nama Domain	82,5 Persen 82,5 Persen 82,5 Persen 50 Aplikasi 2 Laporan	82,5 Persen 82,5 Persen 2 Dokumen 50 Aplikasi 2 Laporan	1.401.787.100,00 19.170.000,00 19.170.000,00 1.382.617.100,00 16.206.500,00	1.253.632.100,00 27.195.000,00 1.226.437.100,00 144.006.500,00	1.192.467.100,00 19.695.000,00 1.172.772.100,00 139.266.500,00 23.968.000,00	-1.401.787.100,00 525.000,00 525.000,00 -209.845.000,00 123.060.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	MOMUNIFINFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNIFINFORMA STATISTI PERSANI
0.03.2.01 0.03.2.01.0004 0.03.2.02 0.03.2.02.0013	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Nama Domain d Pengelolaan Regovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pemanfaatan Pusa	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) an Sub Domain Penyelenggaraa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) at Data Nasional Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional PBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda tau reviu arsitektur dan peta ren Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain			Nama Domain	82,5 Persen 82,5 Persen 82,5 Persen 50 Aplikasi 2 Laporan	82,5 Persen 82,5 Persen 2 Dokumen 50 Aplikasi 2 Laporan	1.401.787.100,00 19.170.000,00 19.170.000,00 1.382.617.100,00 16.206.500,00	1.253.632.100,00 27.195.000,00 1.226.437.100,00 144.006.500,00	1.192.467.100,00 19.695.000,00 1.172.772.100,00 139.266.500,00 23.968.000,00	-1.401.787.100,00 525.000,00 525.000,00 -209.845.000,00 123.060.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	MOMUNII INFORM, STATIST PERSAN DINAS KOMUNII INFORM, STATIST PERSAN
.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Nama Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pemanfaatan Pusatan Pusatan Pengelolaan Pemanfaatan Pusatan Pengelolaan Pemanfaatan Pusatan Pemanfaatan Pusatan Pemanfaatan Pusatan Pengelolaan Pemanfaatan Pusatan Pemanfaatan Pusatan Pemanfaatan	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) an Sub Domain Penyelenggaraa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) at Data Nasional Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional PBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda tau reviu arsitektur dan peta ren Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	ncana SPBE Pemerinta	ah Daerah	Nama Domain	82,5 Persen 82,5 Persen 1 Pemerintah 2 Dokumen 50 Aplikasi 2 Laporan 2 Dokumen	82,5 Persen 82,5 Persen Desa 2 Dokumen 50 Aplikasi 2 Laporan 2 Dokumen	1.401.787.100,00 19.170.000,00 19.170.000,00 1.382.617.100,00 16.206.500,00	1.253.632.100,00 27.195.000,00 1.226.437.100,00 144.006.500,00	1.192.467.100,00 19.695.000,00 1.172.772.100,00 139.266.500,00 23.968.000,00	-1.401.787.100,00 525.000,00 525.000,00 -209.845.000,00 123.060.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	MOMUNII INFORM/STATIST PERSANI DINAS KOMUNII INFORM/STATIST PERSANI
.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Nama Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pemanfaatan Pusatan Pusatan Pengelolaan Pemanfaatan Pusatan Pengelolaan Pemanfaatan Pusatan Pemanfaatan Pusatan Pemanfaatan Pusatan Pengelolaan Pemanfaatan Pusatan Pemanfaatan Pusatan Pemanfaatan	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Pelayanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) an Sub Domain Penyelenggaraa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) at Data Nasional Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional PBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda tau reviu arsitektur dan peta rencana yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	g sesuai dengan arsite	ah Daerah	Nama Domain	82,5 Persen 82,5 Persen 1 Pemerintah 2 Dokumen 50 Aplikasi 2 Laporan 2 Dokumen	82,5 Persen 82,5 Persen Desa 2 Dokumen 50 Aplikasi 2 Laporan 2 Dokumen	1.401.787.100,00 19.170.000,00 19.170.000,00 1.382.617.100,00 16.206.500,00 122.978.000,00	1.253.632.100,00 27.195.000,00 1.226.437.100,00 144.006.500,00 35.598.000,00	1.192.467.100,00 19.695.000,00 19.695.000,00 1.172.772.100,00 23.968.000,00 29.500.700,00	-1.401.787.100,00 525.000,00 525.000,00 -209.845.000,00 -99.010.000,00 -20.864.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	MOMUNIH INFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNIH INFORMA STATISTI PERSANI
5.03.2.01 5.03.2.01.0004 5.03.2.02 6.03.2.02.0013	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Nama Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pemanfaatan Pusatan Pusatan Pengelolaan Pemanfaatan Pusatan Pengelolaan Pemanfaatan Pusatan Pemanfaatan Pusatan Pemanfaatan Pusatan Pengelolaan Pemanfaatan Pusatan Pemanfaatan Pusatan Pemanfaatan	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) an Sub Domain Penyelenggaraa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) at Data Nasional Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional PBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan Jumlah aplikasi Khusus yang dibangan dan/atau	g sesuai dengan arsite	ah Daerah	Nama Domain	82,5 Persen 82,5 Persen 1 Pemerintah 2 Dokumen 50 Aplikasi 2 Laporan 2 Dokumen	82,5 Persen 82,5 Persen Desa 2 Dokumen 50 Aplikasi 2 Laporan 2 Dokumen	1.401.787.100,00 19.170.000,00 19.170.000,00 1.382.617.100,00 16.206.500,00	1.253.632.100,00 27.195.000,00 1.226.437.100,00 144.006.500,00	1.192.467.100,00 19.695.000,00 1.172.772.100,00 139.266.500,00 23.968.000,00	-1.401.787.100,00 525.000,00 525.000,00 -209.845.000,00 -99.010.000,00 -20.864.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	MOMUNIFINFORMA STATISTI PERSANI DINAS KOMUNIFINFORMA STATISTI PERSANI
5.03.2.01 5.03.2.01.0004 5.03.2.02 5.03.2.02.0013	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Nama Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pemanfaatan Pusatan Pusatan Pengelolaan Pemanfaatan Pusatan Pengelolaan Pemanfaatan Pusatan Pemanfaatan Pusatan Pemanfaatan Pusatan Pengelolaan Pemanfaatan Pusatan Pemanfaatan Pusatan Pemanfaatan	komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Pelayanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) an Sub Domain Penyelenggaraa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) at Data Nasional Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional PBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda tau reviu arsitektur dan peta rencana yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan pembangan Aplikasi Khusus yang diusulkan sembangan Aplikasi khusus yang diusulk	g sesuai dengan arsite	ah Daerah	Nama Domain	82,5 Persen 82,5 Persen 1 Pemerintah 2 Dokumen 50 Aplikasi 2 Laporan 2 Dokumen	82,5 Persen 82,5 Persen Desa 2 Dokumen 50 Aplikasi 2 Laporan 2 Dokumen	1.401.787.100,00 19.170.000,00 19.170.000,00 1.382.617.100,00 16.206.500,00 122.978.000,00	1.253.632.100,00 27.195.000,00 1.226.437.100,00 144.006.500,00 35.598.000,00	1.192.467.100,00 19.695.000,00 19.695.000,00 1.172.772.100,00 23.968.000,00 29.500.700,00	-1.401.787.100,00 525.000,00 525.000,00 -209.845.000,00 -99.010.000,00 -20.864.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	MOMUNII INFORM/STATIST PERSAN DINAS KOMUNII INFORM/STATIST PERSAN

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR REPLICATE CAPAIAN	CAPAIAIN					CAPAIAN KINERJA DAN KER	RANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		MAJU RENCANA HUN 2026	PERANGKAT DAERAH
O KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENSTRA RENJA OPE	3 OFD TARION	TARGE	T 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)	E	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRI	ORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1 2	3	4	OPD TAHON 202.	2024	SEBELUM 8	SESUDAH 9	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	13	14	15	NASIONAL 16	DAERAH 17	18	19	20	21
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Pen	ghubung Layanan Pemerintah D	Daerah	,	0	<u> </u>	10		12	10	17	10	10	17	10	13	20	21
	, 50	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			3 Aplikasi	3 Aplikasi	198.483.000,00	10.983.000,00	8.613.000,00	Bara Kec	o. Pesisir rat, Semua camatan, mua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Int	 tra Pemerintah Daerah Kab/Kota	a															
		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	44.547.900,00	41.147.900,00	39.062.900,00	Bara Kec	o. Pesisir rat, Semua camatan, mua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Porta	 al Pelayanan Pemerintah Daeral																
		Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional			2 Layanan	2 Layanan	16.235.000,00	13.735.000,00	6.235.000,00	Bara Kec	o. Pesisir rat, Semua camatan, mua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.0029	Koordinasi pemanfaatan Aplik	asi Umum SPBE						-	1							1		
		Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan			4 Aplikasi	4 Aplikasi	25.459.000,00	10.459.000,00	9.993.000,00	Bara Kec	o. Pesisir rat, Semua camatan, mua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet un	ntuk Perangkat Daerah dalam rai	ngka penyelenggaraan SPBE		Г								T					
		Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas			23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	840.000.000,00	784.000.000,00	784.000.000,00	Kec	at, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						51.045.000,00	41.045.000,00	36.981.000,00	-14.064.000,00							0,00	
. 2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik			2 Dokumen	2 Dokumen	51.045.000,00	41.045.000,00	36.981.000,00	-51.045.000,00							0,00	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik			2 Dokumen	2 Dokumen	51.045.000,00	41.045.000,00	36.981.000,00	-14.064.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DA PERSANDIAN
2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Keler	mbagaan Statistik Saktoral												Publik Berkualitas				
2.20.02.2.01.0007	rengingkatan kapasitas kelei	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik			39 Orang	39 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	Kec	at, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01.0010		ktoral yang sesuai dengan Prins Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	ip Satu Data Indonesia		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	Kec	at, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis St	tatistik Sektoral Sesuai Standar Jumlah Statistik Sektoral			1 Dokumen	1 Dokumen	41.045.000,00	41.045.000,00	36.981.000,00	-4.064.000,00 Kab	- Posicir	PENDAPATAN		Reformasi Birokrasi			0,00	DINAS
		yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik			1 Dokumen	1 Dokumen	41.045.000,00	41.045.000,00	36.981.000,00	Bara Kec	at, Semua	ASLI DAERAH (PAD)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAI PERSANDIAN
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						182.300.000,00	108.168.000,00	83.168.000,00	-99.132.000,00							0,00	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik			100 Persen	100 Persen	182.300.000,00	108.168.000,00	83.168.000,00	-182.300.000,00							0,00	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik			100 Persen	100 Persen	47.500.000,00	38.460.000,00	33.460.000,00	-14.040.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAI PERSANDIAN
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keaman	nan Informasi Pemerintah Daera	h Kabupaten/Kota		00						. Beet	DEVISION	T	Date: 151				Pulsa
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi			36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	47.500.000,00	38.460.000,00	33.460.000,00	Kec	at, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DA PERSANDIAN
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik			100 Persen	100 Persen	134.800.000,00	69.708.000,00	49.708.000,00	-85.092.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komu	ınikasi Sandi Pemerintah Daerah	n Kabupaten/Kota				1		1	1								
		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	134.800.000,00	69.708.000,00	49.708.000,00	Kec	at, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAI PERSANDIAN
	DINAS KOPERASI, USAHA I	KECIL DAN MENENGAH DAN	PERDAGANGAN				3.861.707.800,00	3.071.626.400,00	2.966.273.400,00	-895.434.400,00							3.958.737.800,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.062.915.800,00	2.900.998.400,00	2.828.645.400,00	-234.270.400,00							3.109.945.800,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	EKANGKA PENJANAAN					KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANC DAER
	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRI	IORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANG
	NEGIATAN		OPD	TAHON 2020	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	bertamban/berkarang (10-12)	LONAGI	COMBER DAILA	NASIONAL	DAERAH		TAROLI	TAGO INDINATII (RD)	JAW.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							3.062.915.800,00	2.900.998.400,00	2.828.645.400,00	-234.270.400,00							3.109.945.800,00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang				92,50 Persen	92,50 Persen	2.546.945.800,00	2.420.031.400,00	2.315.781.400,00	25.000.000,00							2.571.945.800,00	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan																	
.17.01.2.01	Perencanaan,	Persentase Dokumen				100 Persen	100 Persen	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00				Reformasi Birokrasi	Aparatur		12.400.000,00	DINAS KO
	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)													dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				USAHA K MENENG PERDAG
17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Peren	L canaan Perangkat Daerah																	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.400.000,00	DINAS KO USAHA K MENENG PERDAG
17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan I	_aporan Capaian Kinerja dan Ikh	tisar Realisasi	Kinerja SKPD		T											1		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	,			2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	DINAS K USAHA K MENENG PERDAG
17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				100 Persen	100 Persen	1.823.707.800,00	1.933.626.400,00	1.933.626.400,00	109.918.600,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur		1.823.707.800,00	DINAS K USAHA I MENENG PERDAG
17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjang	an ASN													Publik Berkualitas				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	1.816.707.800,00	1.926.626.400,00	1.926.626.400,00	109.918.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.816.707.800,00	DINAS K USAHA MENENO PERDAO
7.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan I	_aporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD																
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	,			1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	DINAS K USAHA MENENO PERDAG
17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan I	_l ∟aporan Keuangan Bulanan/ Triv	L vulanan/ Seme	 steran SKPD															
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	,			18 Laporan	18 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	DINAS K USAHA I MENENC PERDAG
17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan A	⊥ Analisis Prognosis Realisasi Ang	 garan																
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	DINAS K USAHA MENENO PERDAG
17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yg berkinerja baik				100 Persen	100 Persen	25.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		50.000.000,00	DINAS I USAHA MENEN PERDA
17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pe	⊥ gawai Berdasarkan Tugas dan F	ungsi							l								<u>I</u>	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	25.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.000.000,00	DINAS K USAHA MENENO PERDAO
						100 Persen	100 Persen	377.338.000,00	215.005.000,00	137.005.000,00	-240.333.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi	-		377.338.000,00	DINAS I USAHA MENEN PERDA
17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				100 Fersen									dan Pelayanan Publik Berkualitas				
	Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instal	sarana dan prasarana pendukung kinerja asi				100 Ferseil									dan Pelayanan				
	Perangkat Daerah	asi Kantor Jumlah Paket Komponen				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI		dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	DINAS I
	Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instal	sarana dan prasarana pendukung kinerja asi Kantor					1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	DINAS PUSAHA MENEN PERDAG
7.01.2.06.0001	Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instal	asi Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket						Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				USAHA MENEN PERDA
17.01.2.06 17.01.2.06.0001	Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instal Listrik/Penerangan Bangunar	asi Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket 0 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-25.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			2.000.000,00	USAHA MENEN

			TARGET		PRAKIRAAN					CAPAIAN KINERJA DAN I	KERANGKA PENDANAAN						AN MAJU RENCANA	
NO KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	CAPAIAN TARGET RENJA	TARGET	2025		PAGU INDIKATIF (Rp)	OAI AIAN NINENGA DAN I	LINANONA I ENDANAN		DDI	DRITAS	KELOMPOK SASARAN		TAHUN 2026	PERANGKAT - DAERAH - PENANGGUNG
	KEGIATAN	KEGIATAN	RENSTRA OPD	TAHUN 2023	OPD TAHUN 2024		SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	JAJAKAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	JAWAB
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 2 Dokumen D	20 Ookumen	24.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	10.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan 1	1 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan 2	4 Laporan	250.000.000,00	105.000.000,00	52.000.000,00	-198.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				100 Persen 1	00 Persen	45.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-29.000.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		45.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan M	 esin Lainnya					<u> </u>				<u> </u>						1	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit 6	Unit	45.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-29.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			45.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung				100 Persen 1	00 Persen	86.500.000,00	71.500.000,00	60.750.000,00	-25.750.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		86.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikas	si, Sumber Daya Air dan Listrik														1	1	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan 1	2 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	1.250.000,00	-10.750.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan d	dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan				12 Laporan 1	2 Laporan	72.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	-15.000.000,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI		Reformasi Birokrasi			72 000 000 00	DINAS KOPERASI,
		Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporaii	2 Laporan	72.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			72.000.000,00	USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	T				12 Langran 1	2 Lanaran	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI		Reformasi Birokrasi			2.500.000.00	DINAS KOPERASI,
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan 1	2 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik				100 Persen 1	00 Persen	177.000.000,00	161.500.000,00	146.000.000,00	-31.000.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		177.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemelihara	aan, Biaya Pemeliharaan, dan Pa	ajak Kendaraan	Perorangan Dinas	atau Kendaraan D	Dinas Jabatan												
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit 1	0 Unit	168.000.000,00	157.000.000,00	141.500.000,00	-26.500.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			168.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sa	arana dan Prasarana Pendukung Jumlah Sarana dan	g Gedung Kanto	r atau Bangunan La	ainnya	2 Unit 2	! Unit	9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-4.500.000,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	_	Reformasi Birokrasi			0.000.000.00	DINAS KOPERASI,
		Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 01111 2	CONIC	9.000.000,00	4.500.000,00		-4.500.000,00 Rab. Pesisi Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			9.000.000,00	USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2. 2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif					2,5 Persen	80.000.000,00	91.500.000,00	81.382.000,00	13.000.000,00						93.000.000,00	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	t						80.000.000,00	91.500.000,00	81.382.000,00	1.382.000,00		-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		93.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelen	ா nbagaan Koperasi				1				1	<u> </u>			I	<u> </u>			
		Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				30 Unit 3 Usaha U	0 Unit Jsaha	80.000.000,00	91.500.000,00	81.382.000,00	1.382.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			93.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3. 2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus Koperasi Berkompeten				50 Persen 5	0 Persen	120.000.000,00	70.557.000,00	112.572.000,00	5.000.000,00						125.000.000,00	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	yang Berkompeten				100 Persen 1	00 Persen	120.000.000,00	70.557.000,00	112.572.000,00	-7.428.000,00		-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman da	n Pengetahuan Perkoperasian s	serta Kapasitas o	dan Kompetensi SE	OM Koperasi	T								T		T		Dung year
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				50 Orang 5	0 Orang	120.000.000,00	70.557.000,00	112.572.000,00	-7.428.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN KE	:KANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANG DAERA
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024		ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA -		ORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGG JAWA
					2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kontribusi UMKM terhadap PDRB				2,18 Persen	2,18 Persen	315.970.000,00	318.910.000,00	318.910.000,00	4.030.000,00							320.000.000,00	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Mendapatkan Kemitraan, Kemudahan dan Penguatan Kelembagaan				100 Persen	100 Persen	315.970.000,00	318.910.000,00	318.910.000,00	2.940.000,00		-		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		320.000.000,00	DINAS KOF USAHA KE MENENGAI PERDAGAI
17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan	Potensi dan Pengembangan Usaha Jumlah Unit Usaha yang	saha Mikro			1 Unit	1 Unit	200.000.000.00	120.000.000,00	120.000.000,00	-80.000.000.00	Kab. Pesisir	INSENTIF -		Peningkatan Kualitas			200.000.000,00	DINAS KO
		Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	0			Usaha	Usaha					Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN		Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat				USAHA KI MENENGA PERDAGA
17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi d	engan Para Pemangku Kepentii T	ngan dalam Per	mberdayaan Usal	ha Mikro							1					T		
		Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				50 Orang	50 Orang	115.970.000,00	198.910.000,00	198.910.000,00	82.940.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			120.000.000,00	DINAS KO USAHA KI MENENGA PERDAGA
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							798.792.000,00	170.628.000,00	137.628.000,00	-661.164.000,00							848.792.000,00	
30	URUSAN PEMERINTAHAN							798.792.000,00	170.628.000,00	137.628.000,00	-661.164.000,00							848.792.000,00	
30.03	PROGRAM PENINGKATAN	Kontribusi sektor				11,58	11,58	130.918.000,00	94.518.000,00	61.518.000,00	50.000.000,00							180.918.000,00	
30.03.2.01	SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembangunan dan Pengelolaan Sarana	Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB Persentase Sarana Distribusi	1			Persen 100 Persen	Persen	130.918.000,00	94.518.000,00	61.518.000,00	-69.400.000,00		-		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		180.918.000,00	DINAS KI USAHA K
	Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Perdagangan yang Terfasilitasi													Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat				MENENC PERDAG
30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi	Perdagangan																	
		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	0 Unit	50.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			100.000.000,00	DINAS K USAHA MENEN PERDAC
0.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana		<u> </u>			0.11-2	0.11.2	20.040.000.00	04.540.000.00	04.540.000.00	40,400,000,00	Kali Basisis	DANA ALOKAGI		Baring Later Karling		1	00.040.000.00	BINAGU
		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	2 Unit	80.918.000,00	64.518.000,00	61.518.000,00	-19.400.000,00	Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas			80.918.000,00	DINAS K USAHA MENEN
0.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan harga Barang Kebutuhan				60 Persen	60 Persen	329.000.000,00	76.110.000,00	76.110.000,00	0,00	Semua Kel/Desa			Ekonomi Masyarakat			329.000.000,00	PERDAC
30.04.2.01	BARANG PENTING Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/	Pokok Persentase Monitoring Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok				100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	46.110.000,00	46.110.000,00	-3.890.000,00		-		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS K USAHA I MENENG PERDAG
30.04.2.01.0001	Kota Koordinasi dan Sinkronisasi K	etersediaan Barang Kebutuhan	Pokok dan Bara	ang Penting di Ti	 ingkat Agen dan Pa	sar Rakyat													
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat				48 Laporan	48 Laporan	50.000.000,00	46.110.000,00	46.110.000,00	-3.890.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			50.000.000,00	DINAS P USAHA MENEN PERDA
30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	Agen dan Pasar Rakyat Persentase Pengendalian Harga dan Stok Barang				100 Persen	100 Persen	254.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-224.000.000,00		-		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas	-		254.000.000,00	DINAS K USAHA MENENG
	Tingkat Pasar Kabupaten/Kota														Ekonomi Masyarakat				PERDAG
30.04.2.02.0001		Barang Kebutuhan Pokok dan E Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	n			52 Laporan	1	40.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			40.000.000,00	DINAS K USAHA I MENENG PERDAG
0.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar F	Reguler dan Pasar Khusus yang Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus	Berdampak dal	lam 1 (Satu) Kab	upaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	214.000.000,00	0,00	0,00	-214.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			214.000.000,00	USAHA MENEN
0.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di	yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Persentase Pupuk dan Pestisida Terawasi				100 Persen	100 Persen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Semua Kel/Desa	-		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			25.000.000,00	DINAS PUSAHA
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat				MENEN PERDA
0.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan	Penggunaan Pupuk dan Pestisi Jumlah Laporan	ıda Bersubsidi			12 Lanoran	12 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI -		Peningkatan Kualitas			25.000.000,00	DINAS
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				12 Laporan	. Σ Εαρυιαίι	25.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			25.000.000,00	USAHA MENEN PERDA
	PROGRAM	Net Ekspor Barang dan Jasa				43,184 Juta	43,184 Juta	338.874.000,00	0,00	0,00	0,00							338.874.000,00	
0.05	PENGEMBANGAN EKSPOR		1			100 Persen	100 Persen	338.874.000,00	0,00	0,00	-338.874.000,00		-		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		338.874.000,00	DINAS P USAHA MENEN PERDAG
		Persentase Pameran Dagang Terealisasi																	
30.05 30.05.2.01 30.05.2.01.0002	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah					20 Pelaku	20.5	338.874.000,00	0,00	0,00	-338.874.000,00	Ket 5	DANA ALOKASI -		Peningkatan Kualitas			338.874.000,00	Burre

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	ANDIN	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN					VEL CHECK		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGI
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	5551655	CAPAIAN RENJA OPD FAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRI	IORITAS	KELOMPOK SASARAN			PENANGG
	KEGIATAN		OPD	I AHUN 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA —	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	JAWA
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.277.352.286,00	3.084.560.400,00	2.868.060.400,00	-2.409.291.886,00							4.458.877.850,00	
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							5.277.352.286,00	3.084.560.400,00	2.868.060.400,00	-2.409.291.886,00							4.458.877.850,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				92,50 persen	92,50 persen	2.150.967.200,00	2.584.560.400,00	2.449.560.400,00	1.081.624.500,00							3.232.591.700,00	
8.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00		-		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Sipil Negara		12.400.000,00	DINAS PENANAN MODAL D PELAYAN TERPADL PINTU
18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Peren	L canaan Perangkat Daerah																1	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.400.000,00	DINAS PENANAM MODAL DA PELAYANA TERPADU PINTU
18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan L	 .aporan Capaian Kinerja dan Ikh	ltisar Realisasi Kine	erja SKPD															1
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	DINAS PENANAM MODAL DA PELAYANA TERPADU PINTU
18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	1.721.467.200,00	2.090.060.400,00	2.090.060.400,00	368.593.200,00		-		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Sipil Negara		2.463.491.700,00	DINAS PENANAN MODAL D PELAYAN TERPADL PINTU
18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjang	an ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	1.715.967.200,00	2.084.560.400,00	2.084.560.400,00	368.593.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.457.991.700,00	DINAS PENANAI MODAL E PELAYAN TERPADI PINTU
18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan L		SKPD															1	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	DINAS PENANAN MODAL D PELAYAN TERPADL PINTU
8.01.2.02.0007		aporan Keuangan Bulanan/ Triw Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD		an SKPD		18 Laporan	18 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	DINAS PENANAI MODAL D PELAYAN TERPADU PINTU
8.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan A	analisis Prognosis Realisasi Angg Jumlah Dokumen Pelaporan	garan			1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0.00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI -		Reformasi Birokrasi			1.000.000,00	DINAS
		dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	PENANA MODAL PELAYA TERPAD PINTU
8.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terciptanya peningkatan SDM yang berdaya saing				6 Orang	6 Orang	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00		-		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Sipil Negara		35.000.000,00	DINAS PENANA MODAL PELAYA TERPAD PINTU
3.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Peç	⊥ gawai Berdasarkan Tugas dan Fi	ungsi									1					<u> </u>		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			35.000.000,00	DINAS PENANA MODAL I PELAYA TERPAD PINTU
8.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertibnya administrasi SKPD				12 bulan	12 bulan	253.600.000,00	319.400.000,00	184.400.000,00	-69.200.000,00		-		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat		513.600.000,00	DINAS PENANA MODAL PELAYA TERPAD PINTU
8.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik K					1	T										T		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	DINAS PENANA MODAL I PELAYA TERPAD PINTU
3.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	dan Penggandaan				1									1	1		1	
0.04.0.00	Dance the confidence of	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.600.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	-4.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			30.600.000,00	DINAS PENANA MODAL I PELAYAI TERPAD PINTU
18.01.2.06.0006	renyediaan Bahan Bacaan da	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	gan			10 Dokumen	10 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	DINAS PENANA MODAL

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN						AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT
NO	KODE	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENJA OPD	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGE	Г 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN			DAERAH PENANGGUNG
		KEGIATAN	RESIATAN	OPD TAHUN 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	JAWAB
1	2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 17	18	19	20	21
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dinasi dan Konsultasi SKPD		1	1 Laporan	11 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	2 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00	270.000.000,00	135.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tesedianya barang milik daerah		1	3 unit	3 unit	19.800.000,00	0,00	0,00	-19.800.000,00			- Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Me	sin Lainnya				•					•						
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3	3 Unit	0 Unit	19.800.000,00	0,00	0,00	-19.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan		1	2 bulan	12 bulan	58.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	14.000.000,00			Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas			73.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan da	an Perlengkapan Kantor				I							·				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2	! Laporan	2 Laporan	57.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas			·	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan l	Jmum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	2 Laporan	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah dengan kondisi baik		1	2 Bulan	12 Bulan	75.700.000,00	75.700.000,00	75.700.000,00	0,00			Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaa	an, Biaya Pemeliharaan, dan Paj	ijak Kendaraan Perorangan Dina	as atau Kendaraan Dina	s Jabatan												
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		4	Unit	4 Unit	73.100.000,00	73.100.000,00	73.100.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaa	an, Biaya Pemeliharaan, Pajak d	dan Perizinan Kendaraan Dinas (Operasional atau Lapan	ngan												
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		4	Unit	4 Unit	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas				DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA)		h	50 Perusa laan/Peror lingan	750 Perusa haan/Peror angan	344.409.399,00	0,00	0,00	-344.409.399,00						0,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya penetapan kebijakan daerah mengenai pembarian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal			2 Bulan	12 Bulan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			Peningkatan Kualit Ekonomi Masyarak Peningkatan Kualit Ekonomi Masyarak	at as		·	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah	1	Insentif dan Kemudahan Penana	1							1				<u> </u>		
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		1	Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Peningkatan Kualit Ekonomi Masyarak Peningkatan Kualit Ekonomi Masyarak	at			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		1	Dokumen	1 Dokumen	194.409.399,00	0,00	0,00	-194.409.399,00			Peningkatan Kualita Ekonomi Masyarak Peningkatan Kualita Ekonomi Masyarak	at as		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum	Penanaman Modal Daerah Kab	oupaten/Kota														
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		1	Dokumen	0 Dokumen	194.409.399,00	0,00	0,00	-194.409.399,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan Kualita Ekonomi Masyarak Peningkatan Kualita Ekonomi Masyarak	at			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA				6,55 persen	1.155.332.601,00	125.485.000,00	120.485.000,00	-1.025.431.451,00						129.901.150,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peminat investasi		1	30 Pengu	130 Pengu njung	1.155.332.601,00	125.485.000,00	120.485.000,00	-1.034.847.601,00			- Peningkatan Kualita Ekonomi Masyarak Peningkatan Kualita Ekonomi Masyarak	at		129.901.150,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promo	 si Penanaman Modal Daerah Ka	abupaten/Kota													I	

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN I	KERANGKA PENDANAAN				- KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
O KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGI	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	PRIC	ORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
2			OPD		2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		NASIONAL	DAERAH	40		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
2	3	Jumlah Dokumen Hasil	5	6	/	2 Dokumen		1.155.332.601,00	11 125.485.000,00	12 120.485.000,00	13 14 -1.034.847.601.00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	16	17 Peningkatan Kualitas	18	19	20 129.901.150,00	21 DINAS
		Kegiatan Promosi Penanaman Modal				2 Dokumen	Dokumen	1.155.532.601,00	125.465.000,00	120.465.000,00	Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)	-	Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas			129.901.150,00	PENANAMAN MODAL DAN
		Kabupaten/Kota									Semua Kel/Desa			Ekonomi Masyarakat				PELAYANAN TERPADU SATU
						ļ												PINTU
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN				17,49 persen	17,49 persen	1.030.258.086,00	175.000.000,00	158.500.000,00	-530.258.086,00						500.000.000,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara	Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan				12 bulan	12 bulan	1.030.258.086,00	175.000.000,00	158.500.000,00	-871.758.086,00		-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN
	Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang	Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha												Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat				MODAL DAN PELAYANAN
	Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	terintegerasi secara elektronik												,				TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizir	l nan Berusaha melalui Sistem Pe	l erizinan Berusah	L ha Berbasis Risiko	Terintegrasi seca	ra Elektronik									1			
		Jumlah Pelaku Usaha yang				600 Pelaku	600 Pelaku	985.258.086,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-855.258.086,00 Kab. Pesisir	INSENTIF	-	Peningkatan Kualitas			455.000.000,00	
		Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha				Usaha	Usaha				Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA		Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat				PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
		Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik									Sellida Reli Desa	TAHUN BERJALAN		EKOHOITII Wasyarakat				TERPADU SATU
2.18.04.2.01.0007	Penvediaan dan pengelolaan	Layanan konsultasi perizinan ber	rusaha berbasis	s risiko								BENOMEMY						11110
	- conyonian and porigoranian	Jumlah Pelaku usaha yang				10 Pelaku	10 Pelaku	45.000.000,00	45.000.000,00	28.500.000,00	-16.500.000,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Peningkatan Kualitas			45.000.000,00	DINAS
		Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan				Usaha	Usaha				Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas				PENANAMAN MODAL DAN
		Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis									Semua Kel/Desa			Ekonomi Masyarakat				PELAYANAN TERPADU SATU
		Risiko Terintegrasi secara Elektronik																PINTU
2.18.05	PROGRAM	Rasio Tingkat Kepatuhan				80 persen	80 persen	471.385.000,00	74.515.000,00	47.015.000,00	0,00						471.385.000,00	
	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pelaku Usaha terhadap Ketentuan Perizinan																
2.49.05.2.04		Taylon dalinya nalakaanaan				42 hulon	40 hulan	471.385.000,00	74.545.000.00	47.045.000.00	-424.370.000,00			Deningkaton Kualitaa	Magyarakat		471.385.000,00	DINIAC
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal				12 bulan	12 bulan	4/1.385.000,00	74.515.000,00	47.015.000,00	-424.370.000,00		-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas	маѕуагакат		471.385.000,00	PENANAMAN MODAL DAN
	Daerah Kabupaten/Kota													Ekonomi Masyarakat				PELAYANAN TERPADU SATU
																		PINTU
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan d	dan Hambatan yang dihadapi Pe	elaku Usaha dala	lam merealisasikan	n Kegiatan Usahar	nya										_		
		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan				1200 Kegiatan	0 Kegiatan Usaha.	82.089.000,00	0,00	0,00	-82.089.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			82.089.000,00	DINAS PENANAMAN
		Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam				Usaha.					Kecamatan, Semua Kel/Desa			Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat				MODAL DAN PELAYANAN
		merealisasikan Kegiatan Usahanya																TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pel	ı aku Usaha													1		<u> </u>	
		Jumlah Pelaku Usaha yang				189 Pelaku		244.436.000,00	0,00	0,00	-244.436.000,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Peningkatan Kualitas			244.436.000,00	DINAS
		Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi				Usaha	Usaha				Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas				PENANAMAN MODAL DAN
		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan									Semua Kel/Desa			Ekonomi Masyarakat				PELAYANAN TERPADU SATU
		Perizinan Berusaha Berbasis Risiko																PINTU
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Mo	dal				_												
		Jumlah Kegiatan Usaha dari				12 Kegiatan	12 Kegiatan	144.860.000,00	74.515.000,00	47.015.000,00	-97.845.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			144.860.000,00	DINAS PENANAMAN
		Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data. Profil dan Informasi				Usaha	Usaha				Kecamatan, Semua Kel/Desa	OMOM (DAO)		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat				MODAL DAN PELAYANAN
		Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan									Gornad New Bessel			Zikonomi Masyarakat				TERPADU SATU
		; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan																
		Pelaksanaan Perizinan Berusaha																
2.18.06	PROGRAM	Jumlah Data Laporan				5 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	92.500.000,00	0,00						125.000.000,00	
	PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	Perizinan dan Non Perizinan																
	PENANAMAN MODAL																	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non				5 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	92.500.000,00	-32.500.000,00		-	Ekonomi Masyarakat	Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat		125.000.000,00	PENANAMAN
	Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	perizinan												Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat				MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
	Kabupaten/Kota																	PINTU
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan P	emanfaatan Data dan Informasi I	Perizinan Berba	asis Sistem Pelaya	anan Perizinan Ber	rusaha Terinteg	grasi secara Elektro	onik										
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	92.500.000,00	-32.500.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			125.000.000,00	DINAS PENANAMAN
		Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara									Kecamatan, Semua Kel/Desa	OMOW (BAO)		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat				MODAL DAN PELAYANAN
		Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan									0000000							TERPADU SATU
	DINAS PEMUDA DAN OLAH	RAGA						4.282.346.500,00	4.496.560.800,00	4.129.419.950,00	-152.926.550,00						4.282.346.500,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN							4.282.346.500,00	4.496.560.800,00	4.129.419.950,00	-152.926.550,00						4.282.346.500,00	
	WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN																	
	PELAYANAN DASAR																	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN							4.282.346.500,00	4.496.560.800,00	4.129.419.950,00	-152.926.550,00						4.282.346.500,00	
2.19.01	DAN OLAHRAGA PROGRAM PENUNJANG	Cakupan pemenuhan				100 %	100 %	2.512.348.500,00	2.426.562.300,00	2.267.562.300,00	0,00						2.512.348.500,00	
2.19.01	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah				100 70	100 /0	2.312.340.300,00	Z.420.30Z.3UU,UU	2.201.302.300,00	0,00						2.312.340.300,00	
	KABUPATEN/KOTA	kabupaten/kota																
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Persentase dokumen perencanaan,penggangaran				100 %	100 %	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur		6.400.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Kinerja Perangkat Daerah	dan evaluasi kinerja tepat waktu												Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				DANG CEANITORICAL
														dan Pelayanan Publik Berkualitas				
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Peren	l canaan Perangkat Daerah								1							L	
1	- Januari Dokumon i Oldin	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			1.400.000.00	DINAS PEMUDA
		Perencanaan Perangkat	1	1							Barat, Semua	UMUM (DAU)		dan Pelayanan				DAN OLAHRAGA
		Daerah		ļ							Kecamatan,			Publik Berkualitas				
											Kecamatan, Semua Kel/Desa			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024		ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			1.01/1.01		PRIC	ORITAS	KELOMPOK SASARAN			DAERA PENANGG
3		0.2								Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA			-	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	JAWAE
3	4	5	6	7	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025 11	RKPD PERUBAHAN 2025	13	14	15	NASIONAL 16	DAERAH 17	18	19	20	21
	Jumlah Laporan Capaian	5	6	/	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		Kab. Pesisir	DANA ALOKASI -	10	Reformasi Birokrasi	18	19	5.000.000,00	
	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan				Laporari	Laporan	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00	Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas			0.000.000,00	DAN OLAHF
	Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kineria dan										Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													Publik Berkualitas				
Administrasi Keuangan	Persentase pelaporan				100 %	100 %	1.930.270.500,00	1.815.176.800,00	1.675.176.800,00	-255.093.700,00		-		Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.930.270.500,00	DINAS PEMI
Perangkat Daeran	keuangan tepat waktu													Publik Berkualitas				DAN OLAH
														dan Pelayanan				
Penyediaan Gaji dan Tunjang	an ASN																	
	Jumlah Orang yang				22 Orang/b	22 Orang/b	1.907.346.500,00	1.791.562.800,00	1.651.562.800,00	-255.783.700,00		DANA ALOKASI -		Reformasi Birokrasi			1.907.346.500,00	
	Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				ulan	ulan					Kecamatan,	UMUM (DAU)		Publik Berkualitas				DAN OLAHI
											Semua Kel/Desa			dan Pelayanan				
Barrardia a Adadatatata a Bala	Lancas Towns AON													Publik Berkualitas				
Penyediaan Administrasi Pela					1 Dokumon	1 Dokumon	17 424 000 00	18 114 000 00	18 114 000 00	600 000 00	Kah Pasisir	DANA ALOKASI		Potormosi Birokrosi			17 424 000 00	DINAS DEM
	Penyediaan Administrasi				Dokumen	Dokumen	17.424.000,00	18.114.000,00	18.114.000,00	690.000,00	Barat, Semua	UMUM (DAU)	•	dan Pelayanan			17.424.000,00	DAN OLAH
	r elaksariaari Tugas ASN										Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi				
														Publik Berkualitas				
Koordinasi dan Penyusunan I		SKPD		T		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Т		Γ								
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Barat, Semua	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			2.500.000,00	DINAS PEN
	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan										Kecamatan,			Reformasi Birokrasi				
	Keuangan Akhir Tahun SKPD													dan Pelayanan Publik Berkualitas				
Koordinasi dan Penyusunan I	aporan Keuangan Bulanan/ Triw	ulanan/ Semes	steran SKPD			l l	<u> </u>							-				
	Jumlah Laporan Keuangan				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI -		Reformasi Birokrasi			2.000.000,00	DINAS PEI DAN OLAF
	Semesteran SKPD dan										Kecamatan,	OMOM (DAO)		Publik Berkualitas				DAN OLAF
	Penyusunan Laporan										Selliua Kel/Desa			dan Pelayanan				
	n/Semesteran SKPD													Fublik Derkualitas				
Penyusunan Pelaporan dan A	nalisis Prognosis Realisasi Angg	aran		1														
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			1.000.000,00	DINAS PE
	Realisasi Anggaran										Kecamatan,			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				
														dan Pelayanan Publik Berkualitas				
Administrasi Kepegawaian	Persentase aparatur yang				100 %	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		-		Reformasi Birokrasi	Aparatur		20.000.000,00	DINAS PE
Perangkat Daerah	berkinerja baik													Publik Berkualitas				DAN OLAH
														dan Pelayanan				
Pandidikan dan Palatihan Pa	rowei Berdeserken Tuges den Eu	un aci												Publik Berkualitas				
Pendidikan dan Pelatinan Pe		ingsi			2 Orang	2 Orang	20,000,000,00	20 000 000 00	20,000,000,00	0.00	Kah Pasisir	DANA ALOKASI		Potormaci Birokraci			20,000,000,00	DINAS PEN
	Berdasarkan Tugas dan				2 Olarig	2 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		UMUM (DAU)		dan Pelayanan			20.000.000,00	DAN OLAF
	Pendidikan dan Pelatihan										Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi				
														Publik Berkualitas				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana				100 %	100 %	350.830.000,00	397.637.500,00	362.637.500,00	11.807.500,00		-		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur		350.830.000,00	DINAS PEI DAN OLAF
- coungitat Daoran	pendukung kinerja													Publik Berkualitas				
														dan Pelayanan Publik Berkualitas				
Penyediaan Komponen Instal	asi																	
	Jumlah Paket Komponen				1 Paket	1 Paket	5.004.000,00	3.211.500,00	3.211.500,00	-1.792.500,00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI -		Reformasi Birokrasi			5.004.000,00	DINAS PEN
	Bangunan Kantor yang										Kecamatan,	OMOM (DAU)		Publik Berkualitas				DAN OLAF
	Disculandii										Jemua Nel/Desa			dan Pelayanan				
Penvediaan Peralatan dan Pe	rlengkapan Kantor													. John Dernualitas				
,	Jumlah Paket Peralatan dan				1 Paket	1 Paket	61.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	24.000.000.00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI -		Reformasi Birokrasi			61.000.000,00	DINAS PE
	Perlengkapan Kantor yang Disediakan							22.030.030,00	22.333.330,00		Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas			550.000,00	DAN OLAH
											Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
														Publik Berkualitas				
Penyediaan Bahan Logistik K					4 D-1 - :	4 Delet	05.000.000.00			25 222 222 2	Vol. Bestel	DANIA ALCUCAC		Deferred Division			05 000 000	DIMAGE
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				i Paket	ı Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Barat, Semua	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)		dan Pelavanan			25.000.000,00	DINAS PE DAN OLA
											Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi				
														Publik Berkualitas				
Penyediaan Barang Cetakan				T						Γ								
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Paket	1 Paket	22.131.400,00	21.731.400,00	36.731.400,00	14.600.000,00	Barat, Semua	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			22.131.400,00	DINAS PE
	yang Disediakan										Kecamatan, Semua Kel/Desa			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				
														dan Pelayanan Publik Berkualitas				
Penyediaan Bahan Bacaan d	ı an Peraturan Perundang-undanga	ı an		<u>I</u>	L					I	L				1		1	
	Jumlah Dokumen Bahan				10	10	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI -		Reformasi Birokrasi			12.000.000,00	DINAS PE
	Perundang-Undangan yang				Dokumen	Dokumen					Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		Publik Berkualitas				DAN OLAF
	Disediakan										Semua Kel/Desa			dan Pelayanan				
	Penyediaan Gaji dan Tunjang Penyediaan Administrasi Pela Koordinasi dan Penyusunan L Koordinasi dan Penyusunan L Penyusunan Pelaporan dan A Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Peg Penyediaan Komponen Instal Listrik/Penerangan Bangunan Penyediaan Peralatan dan Pe	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Administrasi Penyesunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwalnan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwalnan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwalnan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwalnan n/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengkut Dendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengkut Dendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Dendidikan dan Pelatihan Dendidikan dan Pelatihan Dendidikan dan Pendidikan dan Pen	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Reuangan tepat waktu Reuangan tepat waktu Reuangan tepat waktu Reuangan tepat waktu Reuangan tepat waktu Reuangan Asi Reuangan Asi Reuangan Asi Reuangan Asi Reuangan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asi Reuangan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asi Reuangan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asi Reuangan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asi Reuangan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asi Reuangan Administrasi Penyediaan Administrasi Reuangan Akhir Tahun SKPD dan Akhir Tahun SKPD dan Reuangan Akhir Tahun SKPD dan Reuangan Asi Reuangan Asi Tahun SKPD dan Reuangan Asi Tahun SKPD dan Reuangan Asi Tahun SKPD dan Reuangan Asi Tahun SKPD dan Reuangan Asi Tahun SKPD dan Reuangan Asi Tahun SKPD dan Reuangan Asi Tahun SKPD dan Reuangan Asi Tahun SKPD dan Reuangan Asi Tahun SKPD dan Reuangan Asi Tahun SKPD dan Reuangan Asi Tahun SKPD dan Reuangan Asi Tahun SKPD dan Reuangan Asi Tahun SKPD dan Reuangan Asi Tahun SKPD dan Reuangan Asi Tahun SKPD dan Reuangan Asi Tahun SKPD dan Reuangan Asi Tahun SKPD dan Reuangan Asi Tahun SkPD dan Reuangan Asi Tahun SkPD dan Reuangan Asi Tahun SkPD dan Reuangan Asi Tahun SkPD dan Reuangan Asi Tahun SkPD dan Reuangan Asi Tahun SkPD dan Reuangan Asi Tahun SkPD dan Reuangan Asi Tahun SkPD dan Reuangan Asi Tahun SkPD dan Reuangan Asi Tahun SkPD dan Reuangan Asi Tahun SkPD dan Reuangan Bahan Logistik Kantor Leuangan Reuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Relaungan tepat waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumah Orang yang	Administrace Keungan Pernyediaan Gaji dan Turjangan ASN Pernyediaan Administrasi Polaksamaan Tugas ASN	Administratic Resumption Persyediaan Caji dan Turjargan ASN Peryediaan Caji dan Turjargan ASN Peryediaan Caji dan Turjargan ASN Peryediaan Administratic Pelasasanan Tugan ASN Amenda Charang yang yang hapan Administratic Selection of Pelasasanan Tugan ASN Amenda Charang yang yang hapan Ashari Turjar ASN Peryediaan Administratic Pelasasanan Tugan ASN Amenda Charang ASN Amenda Charang yang yang hapan Ashari Turjar ASN Roordinaal dan Peryediaan Administratic Tugan ASN Ashari Tahun SPCP On Pelasasanan Tugan ASN Ashari Tugan ASN Ashari Tahun SPCP On Pelasasanan Tugan ASN Ashari Tugan ASN Ashari Tahun SPCP On Pelasasanan Tugan ASN Ashari Tahun SPCP On Pelasasanan Tugan ASN Ashari Tahun SPCP On Pelasasanan Tugan ASN Ashari Tahun SPCP On Pelasasanan Tugan ASN Ashari Tahun SPCP On Pelasasanan Tugan ASN Ashari Tahun SPCP On Pelasasanan Tugan ASN Ashari Tahun SPCP On Pelasasanan Tugan ASN Ashari Tahun SPCP On Pelasasanan Tugan ASN Ashari Tahun SPCP On Pelasasa	Administrate Kourappur Records per deprese son services and services a	Progradian Contents Progradian Designation	Production Pro	March Marc	Process	Project Control Project Co	### PRINT NOT TREET TO STATE OF THE PRINT NOT TREET TO STATE O	Part Part	No. 10.00 No.	March Marc	## Comment of the Com	Company Comp

	(05.7	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN KE	RANGKA PENDANAAN				KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKA DAERAH
о к	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024		SET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA		ORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUN JAWAB
	-			ОРБ		2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		<u> </u>	NASIONAL	DAERAH				
	2	3	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	6	7	1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- 16	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi	18	19	24.000.000,00	DINAS PEMUD DAN OLAHRAC
															dan Pelayanan Publik Berkualitas				
2.19.01.2	2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koord	Jumlah Laporan				1 Laporan	1 Laporan	201.694.600,00	251.694.600,00	201.694.600,00	0,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			201.694.600,00	DINAS PEMUI
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				DAN OLAHRA
2.19.01.2	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan pendukung				100 %	100 %	96.748.000,00	81.748.000,00	81.748.000,00	-15.000.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		96.748.000,00	DINAS PEMU DAN OLAHRA
2.19.01.2	2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Sumber Daya Air dan Listrik										1						
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-12.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.000.000,00	DINAS PEMU DAN OLAHRA
2.19.01.2	2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan da	n Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	67.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00	-3.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			67.000.000,00	DINAS PEMUI DAN OLAHRA
2.19.01.2	2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan U	Jmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan				1 Laporan	1 Laporan	5.748.000,00	5.748.000,00	5.748.000,00	0,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	_	Reformasi Birokrasi			5.748.000,00	DINAS PEMU
			Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				Laporan	i Laporan	3.748.000,00	3.748.000,00	3.746.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.740.000,00	DAN OLAHRA
2.19.01.2	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dalam kondisi baik				100 %	100 %	108.100.000,00	105.600.000,00	121.600.000,00	13.500.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		108.100.000,00	DINAS PEMU DAN OLAHRA
2.19.01.2	2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaa	ın, Biaya Pemeliharaan, dan Pa	njak Kendaraan	Perorangan Dina	as atau Kendaraan D	inas Jabatan												
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 unit Unit	3 unit Unit	61.600.000,00	61.100.000,00	61.100.000,00	-500.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			61.600.000,00	DINAS PEMUI DAN OLAHRA
2.19.01.2	2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaa	ın, Biaya Pemeliharaan, Pajak c	dan Perizinan K	Kendaraan Dinas	Operasional atau Lap										·			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	3.500.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	19.500.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.500.000,00	DINAS PEMU DAN OLAHRA
2.19.01.2	2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan M	·	<u> </u>			1						T		T-				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	27.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	-12.500.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			27.000.000,00	DINAS PEMUI DAN OLAHRA
2.19.01.2	2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Ge	dung Kantor dan Bangunan Lair Jumlah Gedung Kantor dan	nnya			1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI		Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	DINAS PEMU
			Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Offic	TOTIL	10.000.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	DAN OLAHRA
2.19.01.2	2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sar	ana dan Prasarana Gedung Ka	intor atau Bang	unan Lainnya											I			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	,			1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.000.000,00	DINAS PEMUE DAN OLAHRA
2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan pemenuhan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan				100 %	100 %	444.998.000,00	695.498.400,00	899.607.550,00	0,00						444.998.000,00	
2.19.02.2	2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	bidang pemerintah dan				100 %	100 %	129.998.000,00	295.498.400,00	559.607.550,00	429.609.550,00		-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		129.998.000,00	DINAS PEMUI DAN OLAHRA
2.19.02.2	2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan l	ı Penyelenggaraan Pengembang.	an Kewirausah	aan Pemuda Bag	gi Wirausaha pemula	Tingkat Kabu	ipaten/kota											
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	,			10 Orang	8 Orang	39.999.700,00	84.999.700,00	124.108.850,00	84.109.150,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			39.999.700,00	DINAS PEMUL DAN OLAHRA
2.19.02.2	2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan F	T	an kepemimpina	an pemuda tingka	at kabupaten/kota	01/2	0.42		A. 222	402.555	JED 200 222 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2	DANA 41 5		March 1 2			10.00- 10-	DINIAC ETC.
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				3 Kegiatan	3 Kegiatan	49.999.450,00	94.999.450,00	199.999.450,00	150.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			49.999.450,00	DINAS PEMUD DAN OLAHRAG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA		FT 0005		DAGU DIDIYA TO TO	CAPAIAN KINERJA DAN I	NEKANGKA PENDANAAN				NODITAG	KELOMPOK		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGI DAERA
NODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB	RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	OPD TAHUN 2024	TARG SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PAGU INDIKATIF (Rp) APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PR NASIONAL	DAERAH	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGG JAWAE
2	3	4	5	6	7	SEBELUM	SESUDAH 9	10	11	12	13	14	15	NASIONAL 16	DAERAH 17	18	19	20	21
	3	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota	3	0	,	10 Orang	10 Orang	39.998.850,00	115.499.250,00	235.499.250,00	195.500.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	10	10	39.998.850,00	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan	yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda Rata-rata capaian kineria				100 %	100 %	315.000.000,00	400.000.000,00	340.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kel/Desa		-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		315.000.000,00	DINAS PEN
	Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	bidang pemerintah dan pembangunan manusia													Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				DAN OLAH
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan	penyelenggaran pengembangan	organisasi kep	pemudaan tingkat	kabupaten/kota														
		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				44 Organisasi	42 Organisasi	315.000.000,00	400.000.000,00	340.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			315.000.000,00	DINAS PEI DAN OLAH
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pemenuhan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan				100 %	100 %	1.325.000.000,00	1.374.500.100,00	962.250.100,00	0,00							1.325.000.000,00	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan sarana dan prasarana olahraga				100 %	100 %	90.000.000,00	100.000.100,00	100.000.100,00	10.000.100,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		90.000.000,00	DINAS PEN DAN OLAH
.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi pe	Lenyediaan prasarana olahraga m	l nelalui perenca	l ınaan, pengadaar	.l n, pemanfaatan, pem	_l neliharaan, dar	_l n pengawasan F	Prasarana Olahraga di tingkat kabu	ipaten/kota										
		Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				100 Unit	100 Unit	90.000.000,00	100.000.100,00	100.000.100,00	10.000.100,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			90.000.000,00	DINAS PEI DAN OLAH
.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lomba / kejuaraan olahraga yang dilaksanakan				100 %	100 %	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00		,		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		70.000.000,00	DINAS PE DAN OLAH
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan (Dlahraga Multi Event dan Single	Event Tingkat	t Kabupaten/Kota		•													
		Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				2 Kegiatan	2 Kegiatan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			70.000.000,00	DINAS PE DAN OLAI
.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan kegiatan kejuaraan /perlombaan di luar daerah				100 %	100 %	270.000.000,00	270.000.000,00	324.000.000,00	54.000.000,00				Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		270.000.000,00	DINAS PE DAN OLAI
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembang	an Olahragawan Berprestasi kat	hunaten/kota												Daya Manusia				
		Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				15 Orang	15 Orang	270.000.000,00	270.000.000,00	324.000.000,00	54.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			270.000.000,00	DINAS PE DAN OLA
.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bantuan operasional organisasi keolahragaan				100 %	100 %	845.000.000,00	745.000.000,00	410.000.000,00	-435.000.000,00				Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		845.000.000,00	DINAS PE DAN OLAI
.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasiona	<u>l</u> I pengelolaan Organisasi Keolah	<u>l</u> hragaan di kabı	l upaten/kota											,				
		Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				20 Dokumen	18 Dokumen	845.000.000,00	745.000.000,00	410.000.000,00	-435.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			845.000.000,00	DINAS PE DAN OLA
.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase penyelenggaraan pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi di fasilitasi pemda				100 %	100 %	50.000.000,00	189.500.000,00	58.250.000,00	8.250.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		50.000.000,00	DINAS PE DAN OLAI
.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan	I Olahraga Rekreasi			<u> </u>	<u> </u>											1		
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	189.500.000,00	58.250.000,00	8.250.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PEI DAN OLAH
	DINAS PERIKANAN	l						3.019.819.700,00	3.257.659.600,00	3.066.128.400,00	46.308.700,00							3.032.406.900,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							3.019.819.700,00	3.257.659.600,00	3.066.128.400,00	46.308.700,00							3.032.406.900,00	
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							3.019.819.700,00	3.257.659.600,00	3.066.128.400,00	46.308.700,00							3.032.406.900,00	
.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-	-	2.591.619.013,00	2.901.659.600,00	2.837.934.350,00	787.887,00							2.592.406.900,00	
.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.710.940,00	12.400.000,00	12.400.000,00	5.689.060,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.250.000,00	DINAS PE
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Peren	1						1				T.,							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.710.940,00	7.400.000,00	7.400.000,00	5.689.060,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.750.000,00	DINAS PE

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA					CAPAIAN KINERJA DAN P	AERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKA DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	OPD TAHUN 2024	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		ORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGU JAWAB
					7	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	40	44	45	NASIONAL	DAERAH	40	40	00	04
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan	4 Laporan Capaian Kinerja dan Ikh	tisar Realisasi	Kineria SKPD	/	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0.20.01.2.01.0000	Toolainasi aan i enyasanan	Jumlah Laporan Capaian	Todi Nodiodoi	Tanena ora b		4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			5.500.000,00	DINAS PERIKA
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Telaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100% Persen	100% Persen	2.003.097.200,00	2.265.937.100,00	2.265.937.100,00	262.839.900,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.003.300.000,00	DINAS PERIKA
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjan	gan ASN													T doint bontacinas				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/b ulan	15 Orang/b ulan	1.994.819.700,00	2.257.659.600,00	2.257.659.600,00	262.839.900,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.995.000.000,00	DINAS PERIKA
3.25.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan	Akuntansi SKPD																	
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.777.500,00	2.777.500,00	2.777.500,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.800.000,00	DINAS PERIKA
3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Akhir Tahun :	SKPD			1							1					T	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	DINAS PERIK
3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Bulanan/ Triv	vulanan/ Seme	esteran SKPD															
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	DINAS PERIKA
3.25.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan A	 Analisis Prognosis Realisasi Ang	garan					L								1			
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	DINAS PERIK
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100% Persen	100% Persen	10.953.973,00	50.000.000,00	20.000.000,00	9.046.027,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		11.000.000,00	DINAS PERIK
3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pe	 gawai Berdasarkan Tugas dan F	ungsi					L								1			
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	1 Orang	10.953.973,00	50.000.000,00	20.000.000,00	9.046.027,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	DINAS PERIK
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				93% Persen	93% Persen	254.101.900,00	306.687.500,00	277.962.250,00	23.860.350,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		254.101.900,00	DINAS PERIK
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Insta	lasi	•			•													
	Listrik/Penerangan Bangunar	1				1									1				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.421.780,00	4.407.000,00	4.407.000,00	-14.780,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.421.780,00	DINAS PERIKA
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik k					4 Dalest	O Dalvet	24 000 000 00	24 000 000 00	0.00	24 000 000 00	Kah Dagisir	DANA ALOKASI		Deferment Birelanet			24 000 000 00	DINAS DEDIK
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			21.000.000,00	DINAS PERIKA
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	dan Penggandaan Jumlah Paket Barang				12 Paket	12 Paket	15.166.404,00	20.559.600,00	20.559.600,00	E 000 100 00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	_	Reformasi Birokrasi			45 400 404 60	DINAS PERIKA
		Jumian Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.166.404,00	20.559.600,00	20.559.600,00	5.393.196,00	Rab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			15.166.404,00	DINAS PERIKA
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan d	an Peraturan Perundang-undang	gan					-					1						
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	DINAS PERIKA
3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	T	T			T	T 1					T.,						1	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	DINAS PERIKAI

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET REALIS	SASI PRAKII	CIRAAN PAJAN				CAPAIAN KINERJA DAN KI	ERANGKA PENDANAAN						N MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT
NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENJA	OPD TARGET	T RENJA TAHUN TARO	GET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	PRIO	RITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		REGIATAN		OPD TAHUN	2023 202		SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Dertampan/Derkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		IARGEI	FAGU INDIKATIF (KP)	JAWAB
1	2	3	4	5 6	7	7 8	9	10	11	12	13 14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	1 Laporan	190.513.716,00	237.720.900,00	229.995.650,00	39.481.934,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			190.513.716,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			93% Persen	93% Persen	81.755.000,00	98.555.000,00	98.555.000,00	16.800.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		81.755.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	19.200.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	2.400.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			19.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan da	an Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			57.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan l	Jmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	5.555.000,00	19.955.000,00	19.955.000,00	14.400.000,00 Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.555.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			93% Persen	93% Persen	235.000.000,00	168.080.000,00	163.080.000,00	-71.920.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		235.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaa	an, Biaya Pemeliharaan, dan Pa	ajak Kendaraan Peroranga T	n Dinas atau Kend					Т		T -		T _	ı	<u> </u>		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00	1.400.000,00 Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaa	an, Biaya Pemeliharaan, Pajak d	dan Perizinan Kendaraan [Dinas Operasional									1	1			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			10 Unit	9 Unit	180.000.000,00	97.350.000,00	67.350.000,00	-112.650.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			180.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Ge	dung Kantor dan Bangunan Lair T	nnya						Ţ				T	T	T T		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sa	rana dan Prasarana Gedung Kar	antor atau Bangunan Lainn	ya 	24 Unit	24 Hait	20,000,000,00	20 220 000 00	F4 220 000 00	24 220 000 00 Kah Basisis	DANA ALOKASI		Defermed Direktori			20,000,000,00	DINIAC DEDIKANIANI
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	,		21 Unit	31 Unit	20.000.000,00	29.330.000,00	54.330.000,00	34.330.000,00 Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN	Produksi Perikanan Tangkap			14.708 Tor	14.708 Ton	118.900.000,00	75.000.000,00	68.776.250,00	100.000,00						119.000.000,00	
	3.25.03.2.01	PERIKANAN TANGKAP Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	meningkatnya produksi perikanan tangkap di danau sungai waduk, rawa, genangan air lainnya			14708 Ton	14708 Ton	80.000.000,00	75.000.000,00	68.776.250,00	-11.223.750,00		-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Nelayan		80.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informa	si Sumber Daya Ikan															
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia			1 Dokumer	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha	1		1													
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Pe	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia erikanan Tangkap			5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		, January Saraha Osaha Fe	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia			6 Unit	6 Unit	30.000.000,00	75.000.000,00	68.776.250,00	38.776.250,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat				DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02 3.25.03.2.02.0002	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Fasilitasi Pembe	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota entukan dan Pengembangan Kel	lembagaan Nelayan Kecil		310 Orang	310 Orang	38.900.000,00	0,00	0,00	-38.900.000,00		-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Nelayan		39.000.000,00	DINAS PERIKANAN
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya			50 Kelompok	50 Kelompok	38.900.000,00	0,00	0,00	-38.900.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			39.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-			-	-	113.487.009,00	131.000.000,00	106.485.000,00	512.991,00						114.000.000,00	

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN I	KERANGKA PENDANAAN					IVEL OMBOV		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT
10	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PF	RIORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUN JAWAB
				OPD		2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	3(11)			NASIONAL	DAERAH				
	2 25.04.2.02	3 Pemberdayaan Pembudi	4 Terlaksananya	5	6	7	8 5 Kelompok	9 5 Kelompok	65.487.009.00	81.000.000,00	57.111.000,00	-8.376.009,00	14	15	16	17	18	19	66.000.000,00	DINAS PERIKAN
3.	23.04.2.02	Daya Ikan Kecil	pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				5 кеюпрок	3 Kelompok	65.467.009,00	81.000.000,00	57.111.000,00	-6.376.009,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyaraka Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyaraka	Pembudidaya Ikan		66.000.000,00	DINAS PERIRAN
3.	25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Per	mbudi Daya Ikan Kecil										1	ı	ı					
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				10 Kelompok	10 Kelompok	25.000.000,00	81.000.000,00	57.111.000,00	32.111.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyaraka Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyaraka	t S		25.000.000,00	DINAS PERIKAI
3.	25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembe	 ntukan dan Pengembangan Kel	 embagaan Pemb	 oudi Daya Ikan I	 Kecil								T ENDIDING W						
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan				10 Kelompok	10 Kelompok	40.487.009,00	0,00	0,00	-40.487.009,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyaraka Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyaraka	t s		41.000.000,00	DINAS PERIKA
3.	25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kelembagaan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya				15 Unit	15 Unit	48.000.000,00	50.000.000,00	49.374.000,00	1.374.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyaraka Peningkatan Kualitas	Pembudidaya Ikan		48.000.000,00	DINAS PERIKA
			,													Ekonomi Masyaraka	i			
3.	25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembu	ıdidayaan Ikan dalam 1 (Satu) D	aerah Kabupate	n/Kota		OE I Init	OF Unit	28 200 200 20	50.000.000,00	40.274.000.00	24 274 000 00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI		Deningkoten Kualitaa		Τ	28 000 000 00	DINAS PERIKA
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				25 Unit	25 Unit	28.000.000,00	50.000.000,00	49.374.000,00	21.374.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyaraka Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyaraka	t S		28.000.000,00	DINAS PERIKA
3.	25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sara	ana Pembudidayaan Ikan dalam Jumlah Sarana	(Satu) Daeran	rabupaten/ko	1	25 Unit	25 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	_	Peningkatan Kualitas	<u>.</u>		20,000,000,00	DINAS PERIKA
			Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				20 01111	25 51111	25.555.555,55	0,00	0,00	20.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	t s		20:000:000,00	DIW OF LINE
3.	25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-				-	-	65.000.000,00	75.000.000,00	25.750.000,00	0,00							65.000.000,00	
3.	25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai,	Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan di Wilayah				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	75.000.000,00	25.750.000,00	-39.250.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyaraka	s Pelaku Usaha		65.000.000,00	DINAS PERIKA
		Danau, Waduk, Rawa, dan	Sungai, Waduk, Danau dan Genangan Air Lainnya													Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyaraka	S t			
3.	25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudid	ayaan ikan sesuai kewenangan	kabupaten/kota																
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota				12 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	35.000.000,00	13.850.000,00	350.000,00	-34.650.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyaraka Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyaraka	t		35.000.000,00	DINAS PERII
3.	25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangka	 pan ikan dan/atau usaha penga	l ngkutan ikan ses	l suai kewenanga	l n kabupaten/kota														
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				12 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	30.000.000,00	61.150.000,00	25.400.000,00	-4.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyaraka Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyaraka	s		30.000.000,00	DINAS PERIM
. 3.	25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-				-	-	130.813.678,00	75.000.000,00	27.182.800,00	11.186.322,00							142.000.000,00	
3.	25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	terselenggaranya kegiatan gelar produk dan pemasaran hasil perikanan				1 Kali	1 Kali	30.500.000,00	0,00	0,00	-30.500.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyaraka Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyaraka	Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan		30.500.000,00	DINAS PERIK
3.	25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerap	l an Persyaratan Perizinan Berus	l aha Pada Usaha	l Pengolahan da	l an Pemasaran Hasil F	Perikanan ses	 suai Skala Usaha d	lan Risiko											
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	30.500.000,00	0,00	0,00	-30.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyaraka Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyaraka	t s		30.500.000,00	DINAS PERIK
3.	25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/	Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Tersedianya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan				5000 Ton	5000 Ton	100.313.678,00	75.000.000,00	27.182.800,00	-73.130.878,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyaraka Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyaraka	Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan		111.500.000,00	DINAS PERIK
3.	25.06.2.03.0001	Kota Peningkatan Ketersediaan Ika	n untuk Konsumsi dan Usaha P	l engolahan dalam	n 1 (Satu) Daera	h Kabupaten/Kota												<u> </u>		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				6000 Ton	6000 Ton	30.015.302,00	0,00	0,00	-30.015.302,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyaraka Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyaraka	t S		35.500.000,00	DINAS PERIK
3.	25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelal	l ku Usaha Perikanan Skala Mikro	dan Kecil dalam	n 1 (Satu) Daera	ıl ah Kabupaten/Kota		<u> </u>	<u>_</u>			1	I	1	I	1	1	ı	1	
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				10 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	70.298.376,00	75.000.000,00	27.182.800,00	-43.115.576,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyaraka Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyaraka	3		76.000.000,00	DINAS PERIK
		DINAS PARIWISATA	i Gridəliildəl						10.715.431.600,00	4.297.105.600,00	4.170.005.600,00	-6.545.426.000,00							11.786.974.760,00	
3		URUSAN PEMERINTAHAN							10.715.431.600,00	4.297.105.600,00	4.170.005.600,00	-6.545.426.000,00							11.786.974.760,00	
3.	26	PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN							10.715.431.600,00	4.297.105.600,00	4.170.005.600,00	-6.545.426.000,00							11.786.974.760,00	
3.	26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan				100 %	100 %	4.255.431.600,00	3.391.105.600,00	3.280.005.600,00	425.543.160,00							4.680.974.760,00	
3.	26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	18.468.000,00	18.468.000,00	18.468.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur		20.314.800,00	DINAS PARIW

VODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGI DAERA
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIC	DRITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGG JAWAE
			OPD		2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	,			NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.140.000,00	DINAS PAR
3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan I	 Perubahan DPA- SKPD													T asiin Zemaanias				
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.068.000,00	6.068.000,00	6.068.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.674.800,00	DINAS PAR
3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan I	_aporan Capaian Kinerja dan Ikh	ntisar Realisasi	Kinerja SKPD				1			L					·		I	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	,			1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	DINAS PAF
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	2.161.274.600,00	2.413.013.600,00	2.408.013.600,00	246.739.000,00		-		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.377.402.060,00	DINAS PAI
.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjang	gan ASN																	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	2.130.431.600,00	2.397.105.600,00	2.397.105.600,00	266.674.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.343.474.760,00	DINAS PAR
3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pela	_L aksanaan Tugas ASN						I											
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	25.343.000,00	10.408.000,00	5.408.000,00	-19.935.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			27.877.300,00	DINAS PA
.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan I	_aporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD					l			I				l	1			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	DINAS PA
3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan I	Laporan Keuangan Bulanan/ Triv Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana		steran SKPD		12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	DINAS PAI
		n/Semesteran SKPD													Fublik Belkualitas				
.26.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan A	Analisis Prognosis Realisasi Ang	garan				T					T	T		T			Γ	
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.100.000,00	DINAS PA
26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	75.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-25.000.000,00		-		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		82.500.000,00	DINAS PA
26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pe	gawai Berdasarkan Tugas dan F Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan	ungsi			12 Orang	6 Orang	75.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			82.500.000,00	DINAS PA
		Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan										Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	704.999.000,00	384.254.000,00	278.154.000,00	-426.845.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		775.498.900,00	DINAS PA
26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instal																		
	Listrik/Penerangan Bangunar	Jumlah Paket Komponen				12 Paket	12 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0.00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI -		Reformasi Birokrasi			2.750.000,00	DIMAGRA
		Jumian Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Rab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	DINAS PA
26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik K	1																	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI - UMUM (DAU) -		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			27.500.000,00	DINAS PA
26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	T				12 Paket	12 Dokos	152 000 000 00	140.254.000.00	140.054.000.00	A 74E 000 00	Kah Posisir	DANA ALOKASI -		Reformasi Birokrasi			160 200 000 00	DIMAGRA
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				i∠ Paket	12 Paket	153.999.000,00	149.254.000,00	149.254.000,00	-4.745.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			169.398.900,00	PAF

1 2	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE	CAPAIAN .	TARALL						,				KELOMPOK		TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
1 2		1	RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGE			PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA		ORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1 2	2	4	5. 5	6	7	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025 11	RKPD PERUBAHAN 2025	13 14	15	NASIONAL 16	DAERAH 17	18	19	20	21
	3	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	6	,	10 Dokumen	10 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	10	19		DINAS PARIWISA
3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	261.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-256.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			287.650.000,00	DINAS PARIWISA
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Kool	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	215.000.000,00	108.900.000,00	-141.100.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			275.000.000,00	DINAS PARIWISA
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	32.360.000,00	5.680.000,00	5.680.000,00	-26.680.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		35.596.000,00	DINAS PARIWISAT
3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	16.180.000,00	0,00	0,00	-16.180.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			17.798.000,00	DINAS PARIWISAT
3.26.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainn	<u></u>																
		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	1 Unit	16.180.000,00	5.680.000,00	5.680.000,00	-10.500.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			17.798.000,00	DINAS PARIWISAT
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.028.000.000,00	284.250.000,00	284.250.000,00	-743.750.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		1.130.800.000,00	DINAS PARIWISAT
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi	i, Sumber Daya Air dan Listrik	•		•	•	<u>'</u>									•		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	111.000.000,00	141.000.000,00	141.000.000,00	30.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			122.100.000,00	DINAS PARIWISAT
3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan d	an Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			73.700.000,00	DINAS PARIWISAT
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Umum Kantor																
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	850.000.000,00	76.250.000,00	76.250.000,00	-773.750.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			935.000.000,00	DINAS PARIWISAT
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	235.330.000,00	235.440.000,00	235.440.000,00	110.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		258.863.000,00	DINAS PARIWISAT
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemelihara	an, Biaya Pemeliharaan, Pajak d	lan Perizinan Ke	endaraan Dinas Op	perasional atau Lapa	angan												
2 26 04 2 00 0006	Demoliherana Deroleten den	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	134.870.000,00	135.220.000,00	135.220.000,00	350.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			148.357.000,00	DINAS PARIWISAT
3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan	Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	50.220.000,00	50.220.000,00	40.220.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	DINAS PARIWISAT
3.26.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sa	arana dan Prasarana Pendukung	Gedung Kantor	atau Bangunan La	ainnya						· '							
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	1 Unit	90.460.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-40.460.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			99.506.000,00	DINAS PARIWISAT
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI	PAD Sektor Wisata				3.18 %	3.18 %	2.660.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	266.000.000,00						2.926.000.000,00	
3.26.02.2.03	PARIWISATA Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				7 Destinasi	5 Destinasi	2.660.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	-2.060.000.000,00		-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Destinasi Wisata		2.926.000.000,00	DINAS PARIWISAT
3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariw	risata Kabupaten/Kota									·							
		Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				7 Dokumen	0 Dokumen	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			1.320.000.000,00	DINAS PARIWISAT

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN				- KELOMPOK		AN MAJU RENCANA ΓAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	IARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA -	PRIORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUI JAWAB
2	3	4	5	6	7	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	13	14	15	NASIONAL DAERAH	18	19	20	21
-		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2 Lokasi	0 Lokasi	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00		DAU YANG - DITENTUKAN P ENGGUNAANN	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat		10	660.000.000,00	
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Re	I habilitasi Sarana dan Prasarana	a dalam Pengelo	L Iaan Destinasi Pa	 'ariwisata Kabupaten	n/Kota	1		I	l		1			1			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				5 Unit	5 Unit	860.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	-260.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			946.000.000,00	DINAS PARIW
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kunjungan Wisatawan				614,788 Orang	614,788 Orang	2.900.000.000,00	146.000.000,00	146.000.000,00	290.000.000,00						3.190.000.000,00	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan				25.00 %	25.00 %	2.900.000.000,00	146.000.000,00	146.000.000,00	-2.754.000.000,00		-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		3.190.000.000,00	DINAS PARIW
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan	Kemitraan Pariwisata Dalam da	an Luar Negeri	1						1								
		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			220.000.000,00	DINAS PARIW
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasarar	n Pariwisata Baik Dalam dan Lu Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		sata Kabupaten/l	/Kota	1 Kegiatan	0 Kegiatan	2.500.000.000,00	0,00	0,00	-2.500.000.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			2.750.000.000,00	DINAS PARIW
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui M	 ledia Cetak, Elektronik, dan Med	_ dia Lainnya Baik	 Dalam dan Luar	l r Negeri													
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Promosi	3 Promosi	200.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	-154.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			220.000.000,00	DINAS PARIW
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata				40 %	40 %	900.000.000,00	160.000.000,00	144.000.000,00	90.000.000,00						990.000.000,00	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				40 %	40 %	900.000.000,00	160.000.000,00	144.000.000,00	-756.000.000,00		-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			990.000.000,00	DINAS PARIV
3.26.05.2.01.0005		 uksi, Distribusi Konsumsi dan Ko	onservasi Ekono	omi Kreatif														
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				2 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	75.000.000,00	69.000.000,00	-231.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			330.000.000,00	DINAS PARIW
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaa	an Masyarakat untuk Pengemba	angan Pariwisata	a														
		Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				6 Orang	4 Orang	600.000.000,00	85.000.000,00	75.000.000,00	-525.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			660.000.000,00	DINAS PARIV
	BAGIAN KESEJAHTERAAN	RAKYAT						108.762.863.377,00	112.981.073.550,00	114.496.500.634,00	5.733.637.257,00						0,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00						0,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH							108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00						0,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				90,00 Persen	90,00 Persen	7.685.448.449,00	6.850.944.000,00	7.171.389.300,00	-7.685.448.449,00						0,00	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat				90 persen	90 persen	5.854.410.863,00	4.938.468.000,00	5.063.895.500,00	-790.515.363,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIA DAERAH
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina M	·				151	4.5.1	4 004 405 070 00	070 000 000 00	4 504 405 500 00	440,000,770,00	Kat. Basisis	D.N.A. A. O.(4.0)	P. Const. Birdon	1		0.00	OFKRETARIA
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	1.621.465.273,00	979.068.000,00	1.504.495.500,00	-116.969.773,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIA DAERAH
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evalu	uasi, dan Capaian Kinerja Terka	it Kesejahteraar	n Sosial				1		1								
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan,				1 Dokumen	1 Dokumen	4.161.884.190,00	3.959.400.000,00	3.559.400.000,00	-602.484.190,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIA DAERAH
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB																
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evalu	uasi, dan Capaian Kinerja Terka	l nit Kesejahteraar	Masyarakat		1	<u> </u>					1]			
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan,				1 Dokumen	0 Dokumen	71.061.400,00	0,00	0,00	-71.061.400,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIA DAERAH
		Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3															
	SEKRETARIAT DAERAH							108.762.863.377,00	112.981.073.550,00	114.496.500.634,00	5.733.637.257,00						0,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							179.029.802,00	178.856.000,00	108.971.000,00	-70.058.802,00						0,00	

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	ANDIK CAL	C.	AKIRAAN APAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN KE	KANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGI DAERA
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE REN.	IJA OPD OP	GET RENJA PD TAHUN	TARGE	T 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRI	ORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGG JAWA
	REGIATAN		OPD	1014 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	bertamban/berkurang (10-12)	LONAGI	SOMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	TAGO INDIKATII (Kp)	J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							145.000.000,00	145.000.000,00	90.115.000,00	-54.885.000,00							0,00	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah perpusatakaan Daerah yang dikelola				1 Lokasi	1 Lokasi	145.000.000,00	145.000.000,00	90.115.000,00	-145.000.000,00							0,00	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan	indeks pembangunan				95 persen	95 persen	40.000.000,00	40.000.000,00	22.115.000,00	-17.885.000,00		-		Meningkatkan	Perpustakaan		0,00	SEKRETAR
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	manusia													Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				DAERAH
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pad	da Satuan Pendidikan Dasar di S Jumlah Perpustakaan pada	Seluruh Wilayah Kabupa	aten/Kota Sesua		dar Nasional I ————————————————————————————————————	Perpustakaan 10 Perpust	18.000.000,00	18.000.000,00	10.115.000,00	-7.885.000,00	Kah Pesisir	DAU YANG -		Meningkatkan			0.00	SEKRETA
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengemban	Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				akaan	akaan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.110.000,00	-7.505.600,00	Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DAERAH
	T ongolodan dan t ongoliban	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1 Eksemplar	1 Eksemplar	22.000.000,00	22.000.000,00	12.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	SEKRETAF DAERAH
.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	indeks pembangunan manusia				90 persen	90 persen	105.000.000,00	105.000.000,00	68.000.000,00	-37.000.000,00		-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perpustakaan		0,00	SEKRETAI DAERAH
.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berba	asis Inklusi Sosial																	
		Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				10 Perpust akaan	10 Perpust akaan	105.000.000,00	105.000.000,00	68.000.000,00	-37.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	SEKRETAI DAERAH
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							34.029.802,00	33.856.000,00	18.856.000,00	-15.173.802,00							0,00	
.24.02	PROGRAM	Persentase Perangkat				35,00	35,00	34.029.802,00	33.856.000,00	18.856.000,00	-34.029.802,00							0,00	
	PENGELOLAAN ARSIP	Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku				Persen	Persen												
24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	indeks pembangunan manusia				90 persen	90 persen	21.514.198,00	18.774.000,00	10.774.000,00	-10.740.198,00		-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Arsip		0,00	SEKRETA DAERAH
24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusuta												1		1				
		Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				1 Berkas	1 Berkas	10.263.398,00	8.387.000,00	4.887.000,00	-5.376.398,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	SEKRETA DAERAH
24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis K					41	41	44.050.000.00	40 007 000 00	5 007 000 00	5 000 000 00	Kah Basisis	DANA ALOKAGI		Maninalization		T	0.00	OFKRETA
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	11.250.800,00	10.387.000,00	5.887.000,00	-5.363.800,00	Rab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	SEKRETA DAERAH
24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	indeks pembangunan manusia				90 persen	90 persen	0,00	0,00	0,00	0,00		-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Arsip		0,00	SEKRET/ DAERAH
24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preserv	rasi, dan Akses Arsip Statis																	
		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				1 Arsip	0 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	SEKRET <i>E</i> DAERAH
24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan penyediaan informasi akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN dan Layanan Kearsipan Tingkat		sta Malalui IIKN		100 persen	100 persen	12.515.604,00	15.082.000,00	8.082.000,00	-4.433.604,00		-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Arsip		0,00	SEKRETA DAERAH
24.02.2.03.0001	Penyediaan mormasi, Akses	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	· · · · · ·	na Melalui Jikin		5 Pengguna	5 Pengguna	12.515.604,00	15.082.000,00	8.082.000,00	-4.433.604,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	SEKRET <i>I</i> DAERAH
	BAGIAN PEMERINTAHAN							108.762.863.377,00	112.981.073.550,00	114.496.500.634,00	5.733.637.257,00							0,00	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00	
01	SEKRETARIAT DAERAH							108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00	
01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				90,00 Persen	90,00 Persen	7.685.448.449,00	6.850.944.000,00	7.171.389.300,00	-7.685.448.449,00							0,00	
01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pelaporan administrasi tata pemerintahan Tepat Waktu				95 persen	95 persen	916.235.350,00	1.230.278.000,00	1.162.778.000,00	246.542.650,00		-		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETA DAERAH
01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemer	intahan Jumlah Dokumen Hasil				1 Dokumen	1 Dokumen	635.755.750,00	915.000.000,00	882.500.000,00	246 744 250 00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI -		Reformasi Birokrasi			0.00	SEKRETA
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				DOKUITIEN	Dokumen	033.733.730,00	913.000.000,00	002.300.000,00	240.744.250,00	Rab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DAERAH

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR REPLODE CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN KER	RANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		N MAJU RENCANA AHUN 2026	PERANGKA DAERAH
O KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENJA OPD	TARGET RENJA OPD TAHUN		ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12) L	LOKASI S	SUMBER DANA		ORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUI
			OPD TAHON 2023	2024	SEBELUM		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
4.01.02.2.01.0002	3 Pengelolaan Administrasi Kev	4 4	5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.01.02.2.01.0002	rengelolaan Auministrasi Nev	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			1 Dokumen	1 Dokumen	140.205.250,00	219.259.000,00	201.759.000,00	Barat,	t, Pesisir U gah, Semua	DANA ALOKASI IMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00) SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonoi		<u> </u>		T	1								T	<u> </u>			
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	140.274.350,00	96.019.000,00	78.519.000,00	Barat,	t, Pesisir U gah, Semua	DANA ALOKASI IMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	D SEKRETARIA DAERAH
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	cakupan pelaksanaan fasilitasi kerjasama daerah			95 persen	95 persen	87.182.000,00	83.497.000,00	65.997.000,00	-21.185.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00) SEKRETARIA DAERAH
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam t	Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			1 Dokumen	1 Dokumen	87.182.000,00	83.497.000,00	65.997.000,00	Barat,	t, Pesisir U gah, Semua	DANA ALOKASI IMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00) SEKRETARIA DAERAH
	BAGIAN HUKUM						108.762.863.377,00	112.981.073.550,00	114.496.500.634,00	5.733.637.257,00		l					0,00)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00)
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			90,00 Persen	90,00 Persen	7.685.448.449,00	6.850.944.000,00	7.171.389.300,00	-7.685.448.449,00							0,00	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan fasilitasi dan koordinasi hukum			95 persen	95 persen	827.620.236,00	598.701.000,00	878.718.800,00	51.098.564,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00) SEKRETARIA DAERAH
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk	Hukum Daerah																
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun			1 Dokumen	4 Dokumen	405.014.000,00	335.701.000,00	361.847.550,00	-43.166.450,00 Kab. R Barat, Tenga Kel/De	t, Pesisir U gah, Semua	DANA ALOKASI IMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIA DAERAH
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum			10 Kasus	1 Kasus	381.795.236,00	243.000.000,00	504.465.750,00	122.670.514,00 Kab. F Barat, Tenga Kel/Da	gah, Semua	DANA ALOKASI IMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00) SEKRETARIA DAERAH
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk H																	
	Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi			1 Dokumen	50 Dokumen	40.811.000,00	20.000.000,00	12.405.500,00	Barat,	t, Pesisir U gah, Semua	DANA ALOKASI IMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00) SEKRETARIA DAERAH
	BAGIAN PEREKONOMIAN I	DAN SUMBER DAYA ALAM					108.762.863.377,00	112.981.073.550,00	114.496.500.634,00	5.733.637.257,00		,					0,00)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00)
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan			90,00 Persen	90,00 Persen	1.596.748.327,00	489.075.500,00	634.144.000,00	-1.596.748.327,00							0,00)
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			90 persen	90 persen	308.780.482,00	58.050.000,00	38.050.000,00	-270.730.482,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00) SEKRETARIA DAERAH
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Mon	itoring dan Evaluasi Kebijakan F Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Pengelolaan BUMD dan BLUD		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00 Kab. F Barat, Tenga Kel/De	gah, Semua	DANA ALOKASI IMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00) SEKRETARIA DAERAH
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi F	Perekonomian					1		<u> </u>									
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			1 Laporan	1 Laporan	227.101.822,00	47.750.000,00	32.750.000,00	-194.351.822,00 Kab. F Barat, Tenga Kel/De	t, Pesisir U gah, Semua	DANA ALOKASI IMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00) SEKRETARIA DAERAH
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasa	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			1 Dokumen	1 Dokumen	81.678.660,00	10.300.000,00	5.300.000,00	-76.378.660,00 Kab. F Barat, Tenga Kel/De	t, Pesisir U gah, Semua	DANA ALOKASI IMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00) SEKRETARIA DAERAH
4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan I	Evaluasi Kebijakan Pembentuka Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD			1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00 Kab. F Barat, Tenga Kel/Da	t, Pesisir U gah, Semua	DANA ALOKASI IMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00) SEKRETARIA DAERAH

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	CARALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AN MAJU RENCANA FAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
NO KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	DENIA ODD	ARGET RENJA OPD TAHUN	TARGE	T 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRI	IORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	REGIATAN		OPD	TATION 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Dertamban/Derkurang (10-12)	LONASI	SOWIBLIN DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	TAGO INDIKATII (KP)	UNIVAD
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Evaluasi Kebijakan Pertanian, Ke	obutanan Kalau	ton den Parikanen		90 persen	90 persen	140.183.168,00	26.414.000,00	14.414.000,00	-125.769.168,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.04.0001	Roordinasi, oli Rioriisasi dari	Jumlah Dokumen Hasil	endianan, Kelad	itan, dan r enkanan		1 Dokumen	1 Dokumen	47.672.988,00	5.390.000,00	3.390.000,00	-44.282.988,00 K	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			0.00	SEKRETARIAT
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				Dokumen	Dokumen	47.072.000,00	0.030.000,00	0.000.000,00	E T	Barat, Pesisir Fengah, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DAERAH
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan	Evaluasi Kebijakan Pertambanga	an dan Lingkung	gan Hidup															
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	1 Dokumen	36.633.988,00	10.300.000,00	5.300.000,00	т	(ab. Pesisir Barat, Pesisir Fengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan	Evaluasi Kebijakan Energi dan A	Air																
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	55.876.192,00	10.724.000,00	5.724.000,00	E T	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Fengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	BAGIAN ADMINISTRASI PE	MBANGUNAN						108.762.863.377,00	112.981.073.550,00	114.496.500.634,00	5.733.637.257,00							0,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH							108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00	
1. 4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah				92,50 Persen	92,50 Persen	99.301.636.799,00	105.462.198.050,00	106.581.996.334,00	-99.301.636.799,00							0,00	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				90 persen	90 persen	15.400.000,00	6.224.500,00	6.224.500,00	-9.175.500,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Peren	_	T							1							1		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.400.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00	K	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Gemua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan I	1			Ţ	Ţ		ı		T	ı						T		
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	т	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Fengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan I	Dokumen Perubahan RKA-SKPD								T									
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.067.000,00	1.067.000,00	т	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Fengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan I	1					.5.			T			5444 44 644464		157 151 1		1		05//05740/47
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	i			1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00	-986.000,00 K	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Fengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan I	Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan			Ī	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.047.000,00	1.047.000,00	-953.000,00 K	(ah Posisir	DANA ALOKASI	_	Reformasi Birokrasi			0.00	SEKRETARIAT
		DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				Dokumen	i Dokumen	2.000.000,00	1.047.000,00	1.047.000,00	E T	Raid, Pesisir Barat, Pesisir Fengah, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DAERAH
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat D	1	<u> </u>	<u> </u>	,					T									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	1.029.500,00	1.029.500,00	Т	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Fengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
2. 4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan				Persen	90,00 Persen	1.596.748.327,00	489.075.500,00	634.144.000,00	-1.596.748.327,00							0,00	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan laporan fasilitasi pelaksanaan administrasi pembangunan yang tersedia				90 persen	90 persen	611.887.027,00	236.792.500,00	186.361.000,00	-425.526.027,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Progra	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	123.293.610,00	22.358.500,00	12.650.250,00	E T	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Fengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi P	rogram Pembangunan		<u> </u>						1			I		l	1	I		

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN KE	ERANGKA PENDANAAN							AN MAJU RENCANA FAHUN 2026	PERANGKAT
NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	ODD TALLIN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PF	RIORITAS	KELOMPOK SASARAN			DAERAH PENANGGUNG
		KEGIATAN	REGIATAN	OPD	TAHUN 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	1	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				3 Laporan	3 Laporan	168.491.000,00	151.981.500,00	56.981.500,00		Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pel	aporan Pelaksanaan Pembangui Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	nan			4 Laporan	4 Laporan	320.102.417,00	62.452.500,00	116.729.250,00		Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PENGADAAN BARA	ANG DAN JASA.		_	_			108.762.863.377,00	112.981.073.550,00	114.496.500.634,00	5.733.637.257,00				·			0,00	
4	1	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00	
4	1. 01	SEKRETARIAT DAERAH							108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00	
	1.01.03	PROGRAM	Cakunan Penyelenggaraan				90,00	90,00	1.596.748.327,00	489.075.500,00	634.144.000,00	-1.596.748.327,00							0,00	
'·	.01.00	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan				Persen	Persen	1.330.740.327,00	403.07 3.300,00	034.144.000,00	-1.030.740.027,00							0,00	
4	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Presentase pelaksanaan pelelangan pengadaan barang/jasa secara elektronik				90 persen	90 persen	535.897.650,00	167.819.000,00	395.319.000,00	-140.578.650,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	1.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Bara	1	T													_			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	104.009.600,00	54.469.000,00	104.469.000,00		Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	1.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengad	aan Secara Elektronik																	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	368.587.400,00	66.400.000,00	198.900.000,00		Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	1.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pen	gadaan Barang dan Jasa																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				25 Orang	25 Orang	63.300.650,00	46.950.000,00	91.950.000,00		Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN UMUM							108.762.863.377,00	112.981.073.550,00	114.496.500.634,00	5.733.637.257,00							0,00	
4	1	UNSUR PENDUKUNG							108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH							108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00	
	i.01 i.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah				92,50 Persen	92,50 Persen	99.301.636.799,00	105.462.198.050,00	106.581.996.334,00	-99.301.636.799,00							0,00	
4	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				90 persen	90 persen	66.800.861.800,00	88.429.691.250,00	87.903.291.250,00	21.102.429.450,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjanga	I	I																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	66.796.542.100,00	88.429.691.250,00	87.903.291.250,00	21.106.749.150,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan L	aporan Keuangan Akhir Tahun S	ארט 			410000	010000	4 400 000 00	2.22	2.22	4 400 000 00	Koh Dariri	DANIA AL OZGACI		Date				SEKDETADIAT
	101.01.5.5.7	Maca Para de la T	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0 Laporan	1.439.900,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan L	aporan Keuangan Bulanan/ Triw	/ulanan/ Seme	steran SKPD	<u> </u>	141			ı	Т	. ,	IZ-L 5	BANK 41 27		D				OFICE
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	0 Laporan	1.439.900,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan A	nalisis Prognosis Realisasi Angg	garan																
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0 Dokumen	1.439.900,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				95 persen	95 persen	500.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-400.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Da	erah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-400.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN							AN MAJU RENCANA ΓΑΗUN 2026	PERANGK
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENJA OPE	TARGET RENJA	TARG	SET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIO	RITAS	KELOMPOK SASARAN			PENANGGU
	KEGIATAN		OPD TAHUN 202	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	JAWAB
2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yg berkinerja baik			98 persen	98 persen	195.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	-87.000.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIA DAERAH
4.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Pras	1			1,		40,000,000,00	0.00		40.000.000.00							0.00	OFICETARIA
		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			1 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	E	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIA DAERAH
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas be	T			T							1						
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	0 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	1	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIA DAERAH
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Peg	awai Berdasarkan Tugas dan F	ungsi	1	Т							T T		Г				
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			50 Orang	50 Orang	150.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	1	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARI DAERAH
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja			90 persen	90 persen	2.230.948.058,00	920.165.000,00	970.165.000,00	-1.260.783.058,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARI DAERAH
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instala	asi			•										•			
	Listrik/Penerangan Bangunan	Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	109.935.000,00	26.150.000,00	26.150.000,00	7	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			0,00	SEKRETARI, DAERAH
														dan Pelayanan Publik Berkualitas				
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Pe	T .			1.5	1.5.	200 704 200 20		20, 400 200 20	400 074 000 00 14								OF LOPE TABLE
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	323.704.800,00	71.430.000,00	221.430.000,00	7	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARI DAERAH
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Ka	Antor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	0 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	7	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARI DAERAH
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	dan Penggandaan																
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	85.059.600,00	32.000.000,00	32.000.000,00	7	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARI DAERAH
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Τ										 						
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1 Laporan	1 Laporan	1.140.800.000,00	490.585.000,00	490.585.000,00	7	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARI DAERAH
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	1 Laporan	546.448.658,00	300.000.000,00	200.000.000,00	ר	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARI DAERAH
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja			90 persen	90 persen	897.949.750,00	7.000.000,00	207.000.000,00	-690.949.750,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETAR DAERAH
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perora	angan Dinas atau Kendaraan Di Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	inas Jabatan		1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	E	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETAR DAERAH
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas	I Operasional atau Lapangan			1	1												
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	0 Unit	835.980.000,00	0,00	0,00	7	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARI DAERAH
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	7	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETAR DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA				DAGU NIZAWA	CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK		IAJU RENCANA JN 2026	PERANGKAT DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	ODD TALLIAL	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PAGU INDIKATIF (Rp) APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL DAERAH	SASARAN	TARGET PA	AGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUN JAWAB
2	3	4	5	6	7	SEBELUM 8	9	10	11	12	13	14	15	16 17	18	19	20	21
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	23.625.000,00	0,00	0,00	-23.625.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Pras	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00) SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Pras	sarana Pendukung Gedung Kanto	or atau Bangun	an Lainnya	T				T			1						
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	38.344.750,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-31.344.750,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	D SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung				90 persen	90 persen	22.063.360.000,00	12.184.395.500,00	12.632.395.500,00	-9.430.964.500,00			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.950.000.000,00	1.410.000.000,00	1.410.000.000,00	-540.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00) SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan d		T	T	T							T						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	956.000.000,00	780.000.000,00	808.000.000,00	-148.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan				1	T.,	1					1	T	I				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	19.157.360.000,00	9.994.395.500,00	10.414.395.500,00	-8.742.964.500,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	D SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi bai				90 persen	90 persen	2.415.080.000,00	1.273.400.000,00	1.285.400.000,00	-1.129.680.000,00			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemelihara	l aan, Biaya Pemeliharaan, dan Paj	iak Kendaraan	Perorangan Dina	 as atau Kendaraan [Dinas Jabatan								I				
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	826.515.000,00	666.800.000,00	678.800.000,00	-147.715.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemelihara	aan, Biaya Pemeliharaan, Pajak d	dan Perizinan K	Kendaraan Dinas	Operasional atau La	1	T					1	T					
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	836.845.000,00	404.600.000,00	404.600.000,00	-432.245.000,00	Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	D SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	T				1,,,,,,,				1								051/0554014
		Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	D SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan						T I					1	T					
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	327.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	-225.000.000,00	Rab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00) SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap La	innya Jumlah Aset Tetap Lainnya				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0.00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI -	- Reformasi Birokrasi			0.00) SEKRETARIAT
		yang Dipelihara				TOTILL	O Offic	0,00	0,00	0,00	0,00	Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DAERAH
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi G	edung Kantor dan Bangunan Lain	nnya						,				DAM					25.05
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	424.720.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-324.720.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sa	arana dan Prasarana Gedung Kar Jumlah Sarana dan	ntor atau Bang	unan Lainnya		1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00		Kab. Pesisir	DANA ALOKASI -	- Reformasi Birokrasi			2.5-) SEKRETARIAT
		Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				TONIL	O Onit	0,00	0,00	0,00	0,00	Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DAERAH
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sa	arana dan Prasarana Pendukung	Gedung Kanto	or atau Bangunan	Lainnya							1						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	D SEKRETARIAT DAERAH

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET REAL CAP	LISASI PRAKIRAA CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN KER	RANGKA PENDANAAN					- KELOMPOK		N MAJU RENCANA NHUN 2026	PERANGKA DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENJ.	A OPD OPD TAHU	N TAR	GET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	OKASI SI	UMBER DANA		RIORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGU JAWAB
			OPD	2024	SEBELUN	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6 7	8	9	10	11	12		14	15	16	17	18	19	20	21
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan penyediaan administrasi dan keuangan dan operasional KDH/WKDH			90 persen	90 persen	711.346.000,00	897.226.800,00	897.226.800,00	185.880.800,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	DAERAH
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjang	ı an Kepala Daerah dan Wakil Ker	pala Daerah	I			I				I	I						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			12 Orang/E ulan	3 12 Orang/B ulan	347.346.000,00	347.226.800,00	347.226.800,00	-119.200,00 Kab. F Barat, Tenga Kel/De	t, Pesisir Ul ah, Semua	ANA ALOKASI MUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIA DAERAH
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas da	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	aerah dan Wakil Kepala	a Daerah	1 Paket	1 Paket	39.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	161.000.000,00 Kab. F Barat, Tenga Kel/De	t, Pesisir Ul ah, Semua	ANA ALOKASI MUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIA DAERAH
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check	Jp Kepala Daerah dan Wakil Kep	ala Daerah															
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang	2 Orang	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00 Kab. F Barat, Tenga Kel/De	t, Pesisir DI ah, Semua EN Desa YA	AU YANG ITENTUKAN P NGGUNAANN A BIDANG ESEHATAN	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIA DAERAH
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang	Operasional Kepala Daerah dan	Wakil Kepala Daerah		1.00 //	1												
		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			12 Orang/E ulan	3 12 Orang/B ulan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00 Kab. F Barat, Tenga Kel/De	ah, Semua	ANA ALOKASI MUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DAERAH
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Bulan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang disediakan			90 persen	90 persen	1.412.417.690,00	1.064.064.000,00	1.064.064.000,00	-348.353.690,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIA DAERAH
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Ruma	h Tangga Kepala Daerah																
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	767.334.400,00	586.280.000,00	586.280.000,00	-181.054.400,00 Kab. F Barat, Tenga Kel/De	t, Pesisir Ul ah, Semua	ANA ALOKASI MUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARI DAERAH
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Ruma	h Tangga Wakil Kepala Daerah																
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	580.334.400,00	432.280.000,00	432.280.000,00	-148.054.400,00 Kab. F Barat, Tenga Kel/De	t, Pesisir Ul ah, Semua	ANA ALOKASI MUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DAERAH
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Ruma	h Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	64.748.890,00	45.504.000,00	45.504.000,00	-19.244.890,00 Kab. F Barat, Tenga Kel/De	t, Pesisir Ul ah, Semua	ANA ALOKASI MUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIA DAERAH
	BAGIAN ORGANISASI						108.762.863.377,00	112.981.073.550,00	114.496.500.634,00	5.733.637.257,00							0,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00)
4.01	SEKRETARIAT DAERAH						108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00)
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah			92,50 Persen	92,50 Persen	99.301.636.799,00	105.462.198.050,00	106.581.996.334,00	-99.301.636.799,00							0,00	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Cakupan Pengelolaan Organisasi Perangkat Daerah yang tertata dengan baik			85 persen	85 persen	252.532.100,00	124.788.000,00	94.788.000,00	-157.744.100,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARI DAERAH
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan da	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			1 Dokumer	1 Dokumen	65.765.000,00	54.930.000,00	44.930.000,00	-20.835.000,00 Kab. F Barat, Tenga Kel/De	t, Pesisir Ul ah, Semua	ANA ALOKASI MUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARI DAERAH
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik da	1																
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1 Laporan	1 Laporan	75.793.100,00	24.929.000,00	14.929.000,00	-60.864.100,00 Kab. F Barat, Tenga Kel/De	t, Pesisir Ul ah, Semua	ANA ALOKASI MUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DAERAH
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Refo	1	1	-			1		1	1	- 1		_				_	
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			1 Dokumer	1 Dokumen	87.702.000,00	24.929.000,00	14.929.000,00	-72.773.000,00 Kab. F Barat, Tenga Kel/De	t, Pesisir Ul ah, Semua	ANA ALOKASI MUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETAR DAERAH
4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pen	gendalian Kualitas Pelayanan Pu Jumlah Dokumen Monitoring,	blik dan Tata Laksana		1 Dokumer	n 1 Dokumen	16.403.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-6.403.000,00 Kab. F	Pasisir D	ANA ALOKASI	_	Reformasi Birokrasi			0.00	QEKDETAD
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1 Dokumer	i i Dokumen	16.403.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Barat,	t, Pesisir Ul ah, Semua	ANA ALOKASI MUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARI DAERAH

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN H	(ERANGKA PENDANAAN				VEI ONEO!		AN MAJU RENCANA ΓΑΗUN 2026	PERANGKAT
NO KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGI	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Restambab/Reskurang (10-12) I OKASI	SUMBER DANA	PRIO	RITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUN JAWAB
	REGIATAN		OPD	1 AUUN 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SOWIBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	FAGU INDIKATIF (RP)	JAWAB
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6.869.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	3.131.000,00 Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	BAGIAN PROTOKOL DAN K	OMUNIKASI PIMPINAN						108.762.863.377,00	112.981.073.550,00	114.496.500.634,00	5.733.637.257,00			Fublik Belkualitas			0,00	
4	UNSUR PENDUKUNG							108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00						0,00	
4.01	URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH							108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00						0,00	
. 4.01.01	PROGRAM PENUNJANG	Cakupan Pemenuhan				92,50	92,50	99.301.636.799,00	105.462.198.050,00	106.581.996.334,00	-99.301.636.799,00						0,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah				Persen	Persen		,	,,							-,,	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan Fasilitasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				95 persen	95 persen	1.806.741.401,00	347.243.000,00	1.313.441.284,00	-493.300.117,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan											<u> </u>						
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	1 Laporan	665.477.000,00	171.189.000,00	845.613.218,00	180.136.218,00 Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpina	n																
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	1.006.200.000,00	165.354.000,00	457.128.066,00	-549.071.934,00 Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pin	· I				I .	I				T	T		T				
		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	135.064.401,00	10.700.000,00	10.700.000,00	-124.364.401,00 Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	SEKRETARIAT DPRD							35.179.712.899,00	26.102.833.756,00	24.705.276.524,00	-10.474.436.375,00				<u>'</u>		37.635.405.499,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							35.179.712.899,00	26.102.833.756,00	24.705.276.524,00	-10.474.436.375,00						37.635.405.499,00	
4.02	SEKRETARIAT DPRD							35.179.712.899,00	26.102.833.756,00	24.705.276.524,00	-10.474.436.375,00						37.635.405.499,00	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG	Cakupan Pemenuhan				92,50	92,50	21.331.155.757,00	18.270.663.691,00	17.988.984.091,00	1.177.655.940,00						22.508.811.697,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat DPRD				Persen	Persen											
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dsan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		11.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perend	canaan Perangkat Daerah				Γ						_		_				
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan L	aporan Capaian Kinerja dan Ikht	tisar Realisasi K	linerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	1.834.535.900,00	2.115.028.500,00	2.115.028.500,00	280.492.600,00		penyeludupan. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.277.428.500,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjang	an ASN											penyeludupan.					
	, caracin Gaji dan Tunjang	Jumlah Orang yang				16 Orang/b	16 Orang/b	1.829.035.900,00	2.109.528.500,00	2.109.528.500,00	280.492.600,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	Memperkuat	Reformasi Birokrasi			2.271.928.500,00	
		Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				ulan	ulan	5.55.650,60	53.525.550,00		Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				DPRD
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan L	aporan Keuangan Akhir Tahun S	SKPD															
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	reformasi politik,	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN					VELOUDO:		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGK
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENJA OPD	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PR	IORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGU JAWAB
	REGIATAN		OPD TATION 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertainban/Berkurang (10-12)	LORASI	SOMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGO INDIKATIF (KP)	JAWAL
2	3	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	5 6	7	8 2 Laporan	9 2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan i, Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	18	19	20 2.000.000,00	SEKRETARIA DPRD
4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan A	Analisis Prognosis Realisasi Ango	garan															
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	SEKRETARIA DPRD
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang berkinerja baik			100 %	100 %	520.000.000,00	321.000.000,00	321.000.000,00	-199.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		520.000.000,00	SEKRETARIA DPRD
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas b	eserta Atribut Kelengkapannya																
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			20 Paket	20 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan i, Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	D SEKRETARIA DPRD
4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pe	gawai Berdasarkan Tugas dan F	ungsi								Ι	1	1			<u> </u>		
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			16 Orang	16 Orang	500.000.000,00	301.000.000,00	301.000.000,00	-199.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan i, Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			500.000.000,00) SEKRETARI. DPRD
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja			100 %	100 %	1.954.364.350,00	2.208.078.400,00	2.028.898.800,00	74.534.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan i, Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.020.980.500,00	SEKRETAR DPRD
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Insta	 lasi											penyeraaapann					
	Listrik/Penerangan Banguna		T			T					I -	T	T	T		<u> </u>		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	35.812.500,00	32.589.000,00	32.589.000,00	-3.223.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			35.812.500,00	D SEKRETAR DPRD
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Ruma	h Tangga Jumlah Paket Peralatan			12 Paket	12 Paket	21.772.800,00	35.072.000,00	35.072.000,00	13.299.200,00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	Memperkuat	Reformasi Birokrasi			32,960,000,00) SEKRETARI
		Rumah Tangga yang Disediakan						20.0.2			Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	dan Pelayanan				DPRD
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik h	Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik			11 Paket	11 Paket	45.626.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00	-126 000 00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	Memperkuat	Reformasi Birokrasi			45.680.000,00) SEKRETARI
		Kantor yang Disediakan			TTTANEL	III Faket	45.020.000,00	43.300.000,00	43.300.000,00	-120.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	dan Pelayanan i, Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			43.000.000,00	DPRD
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	dan Penggandaan Jumlah Paket Barang			12 Paket	12 Paket	272.963.050,00	285.967.400,00	285.967.400,00	13.004.350,00	Kah Posisir	DANA ALOKASI	Memperkuat	Reformasi Birokrasi	1		328.338.000,00) SEKDETAD
4.00.04.0.00.00	Dogued's as D. L. D.	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			. Z I GREL	.Z.i andi	212.303.030,00	200.901.400,00	200.507.400,00	13.004.330,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	dan Pelayanan i, Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			320.336.000 ₁ 00	DPRD
4.02.01.2.06.0006	Ferryediaan Banan Bacaan d	lan Peraturan Perundang-undang Jumlah Dokumen Bahan	ga(1		12	12	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI		Reformasi Birokrasi			850.000.000,00	
		Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			Dokumen	Dokumen					Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	dan Pelayanan i, Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				DPRD
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lanoran Facilitasi			11 Lanarar	11 Lanoren	347 500 000 00	508 950 000 00	509 050 000 00	161.450.000,00	Kah Pacicir	DANA ALOKASI	Memnerkust	Reformaci Birokrosi			247 500 000 00) SEKDETAR
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			11 Laporan	11 Laporan	347.500.000,00	508.950.000,00	508.950.000,00	161.450.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	reformasi politik,	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan i, Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			347.500.000,00	DPRD

		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN					- KELOMPOK	PRAKIRA	AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
NO 0 <i>I</i>	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		ORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUN JAWAB
4				OPD 5		2024	SEBELUM	SESUDAH 9	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH	40		1	24
4.0	2.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	6	,	15 Laporan		380.690.000,00	450.000.000,00	270.820.400,00	-109.869.600,00	14 (Xab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi	18	19	380.690.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.0	2.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana				100 %	100 %	249.600.000,00	351.680.000,00	351.680.000,00	102.080.000,00	0		pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkuat reformasi politik,	dan Pelayanan	Aparatur		624.505.028,00	SEKRETARIAT DPRD
		Pemerintah Daerah	Pendukung Kinerja												hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	, Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
4.0	2.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan M	esin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan				32 Unit	32 Unit	99.600.000,00	170.510.000,00	170.510.000,00	70 910 000 00) Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	Memperkuat	Reformasi Birokrasi			229.780.000,00	SEKRETARIAT
			Mesin Lainnya yang Disediakan				32 OIII	32 OHII	99.000.000,00	170.310.000,00	770.310.000,00	70.910.000,00	Barat, Pesisii Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desi	UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			223.780.000,00	DPRD
4.0	2.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainr	T				T					1			T		T		1	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	181.170.000,00	181.170.000,00	31.170.000,00	Mab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desi	UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			394.725.028,00	SEKRETARIAT DPRD
4.0	2.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung				100 %	100 %	1.328.306.800,00	1.276.290.000,00	1.276.290.000,00	-52.016.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		1.286.306.800,00	SEKRETARIA DPRD
4.0	2.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikas	L si, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1			12 Laporan	12 Laporan	288.000.000,00	451.800.000,00	451.800.000,00	163.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			288.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.0	2.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan d	 dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	99.000.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan , Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			57.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.0	2.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7			12 Laporan	12 Laporan	941.306.800,00	725.490.000,00	725.490.000,00	-215.816.800,00	Mab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	reformasi politik,	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			941.306.800,00	SEKRETARIAT DPRD
4.0	2.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah yang dalam kondisi baik				100 %	100 %	731.879.838,00	1.018.843.053,00	1.018.843.053,00	286.963.215,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan , Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		1.198.121.800,00	SEKRETARIA DPRD
4.0	2.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemelihara	aan, Biaya Pemeliharaan, dan Pa	ajak Kendaraan F	Perorangan Dinas	atau Kendaraan D	1				1	T			T		T			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	215.700.000,00	216.400.000,00	216.400.000,00	700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			297.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.0	2.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi G	edung Kantor dan Bangunan Lai	innya																
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	354.038.038,00	584.043.053,00	584.043.053,00	230.005.015,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.0	2.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sa	_ arana dan Prasarana Gedung Ka	antor atau Bangu	nan Lainnya		İ	1			1	1	I	<u> </u>	<u>.</u>	ı	I	1	1	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	g			1 Unit	1 Unit	162.141.800,00	218.400.000,00	218.400.000,00	56.258.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desi	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan , Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			200.871.800,00	SEKRETARIAT DPRD

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN					V=1 -15-5-5		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGK
O KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGE	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIC	DRITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAI PENANGGI JAWAB
	REGIATAN		OPD	TATION 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertamban/Berkurang (10-12)	LONASI	SOMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	rago indikatir (kp)	JAWA
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	5	6	7	100 %	9 100 %	10 14.401.176.799,00	11 10.668.452.038,00	12 10.565.952.038,00	-3.835.224.761,00	14	15	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	18 Aparatur	19	20 14.271.176.999,00	SEKRETARIA DPRD
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administras	si Keuangan DPRD																	
		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/B ulan	25 Orang/B ulan	13.700.676.999,00	10.060.266.688,00	10.060.266.688,00	S	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			13.700.676.999,00	SEKRETARIA DPRD
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas da	an Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas				125 Paket	125 Paket	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00 K	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	Memperkuat	Reformasi Birokrasi			300.000.000,00	SEKRETARIA
		dan Atribut DPRD yang Disediakan				123 Faket	123 Fanet	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	B	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			300.000.000,00	DPRD
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check I	- ·	ı			1							I						
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	25 Orang	400.499.800,00	308.185.350,00	205.685.350,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			270.500.000,00	SEKRETARIA DPRD
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang Terpenuhi				100 %	100 %	298.892.070,00	298.891.700,00	298.891.700,00	-370,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		298.892.070,00	SEKRETARI DPRD
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD					1													
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				34 Laporan	34 Laporan	66.421.080,00	66.420.800,00	66.420.800,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			66.421.080,00	SEKRETARIA DPRD
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi da	n Konsultasi DPRD																	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				60 Laporan	60 Laporan	232.470.990,00	232.470.900,00	232.470.900,00	K	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Bemua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			232.470.990,00	SEKRETARI. DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersusun dan Terintegrasinya Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana				100 Persen	100 Persen	13.848.557.142,00	7.832.170.065,00	6.716.292.433,00	1.278.036.660,00							15.126.593.802,00	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang Sesuai Regulasi				100 %	100 %	576.435.720,00	576.435.450,00	495.515.700,00	-80.920.020,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		576.435.720,00	SEKRETARIA DPRD
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasa Pembentukan Peraturan Dae	-																	
	rembenturan relaturan bae	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	16.335.720,00	16.335.450,00	16.335.450,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Bemua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			16.335.720,00	SEKRETARIA DPRD
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Per	l aturan Daerah		<u> </u>						1	l L		I		<u>I</u>	<u> </u>		I	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				4 Dokumen	2 Dokumen	560.100.000,00	560.100.000,00	479.180.250,00	B K	cab. Pesisir sarat, Semua cecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			560.100.000,00	SEKRETARI/ DPRD
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Rapat Pembahasan Anggaran				100 %	100 %	431.528.000,00	431.973.000,00	431.973.000,00	445.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		405.030.000,00	SEKRETARI DPRD

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN				VELOUS CO		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKA
O KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET 2	025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	PRIC	DRITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGU JAWAB
	RESIATAN		OPD	TATION 2023	2024	SEBELUM SE	SUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Dertainban/Derkurang (10-12)	SOMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	TAGO INDINATII (RP)	OAWAL
2	3	4 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	5	6	7	8 6 Dokumen 6 E	9 Dokumen	10 62.818.000,00	62.898.000,00	62.898.000,00	80.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	18	19	20 62.818.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KU	A dan Perubahan PPAS						l									I	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				6 Dokumen 6 E	Ookumen	62.818.000,00	62.898.000,00	62.898.000,00	80.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			62.818.000,00	SEKRETARIA DPRD
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	,														1		
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				6 Dokumen 6 E	Ookumen	91.206.000,00	91.286.000,00	91.286.000,00	80.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			91.206.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubah					0.00	National and	04 000 000 00	04 000 000 00	04.000.000.00	go ogo og Mak Basisis	DANIA ALGUZAGI	Managara	Defense di Bindonei			04 000 000 00	OFKDETABLA
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungja	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				6 Dokumen 6 E	okumen	91.206.000,00	91.286.000,00	91.286.000,00	80.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			91.206.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0006	Pembanasan Pertanggungja	Jumlah Dokumen Hasil				6 Dokumen 6 E	Ookumen	123.480.000,00	123.605.000,00	123.605.000,00	125.000,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	Memperkuat	Reformasi Birokrasi			96,982,000,00	SEKRETARIAT
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD					onument.	126.400.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			00.002.000,00	DPRD
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-				-		103.726.000,00	103.630.000,00	103.630.000,00	-96.000,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		103.726.000,00	SEKRETARIA' DPRD
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemeri	ntahan Bidang Pemerintahan dan	Hukum													1		
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				10 Laporan 10	Laporan	20.726.000,00	20.726.000,00	20.726.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.726.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemeri	1				10 Langran 10	Lanoran	20.750.000,00	20.726.000.00	20.726.000.00	-24.000,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	Momporkust	Reformasi Birokrasi			20.750.000.00	SEKRETARIAT
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				10 Laporan 10	Laporan	20.750.000,00	20.726.000,00	20.726.000,00	-24.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	dan Pelayanan			20.750.000,00	DPRD
4.02.02.2.03.0003		ntahan Bidang Kesejahteraan Rak Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	yat			10 Laporan 10	Laporan	20.750.000,00	20.726.000,00	20.726.000,00	-24.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemeri	ntahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil				10 Laporan 10	Laporan	20.750.000,00	20.726.000,00	20.726.000,00	-24.000,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	Memperkuat	Reformasi Birokrasi			20 750 000 00	SEKRETARIAT
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				To Euporum To	Zaporan	26.766.666,66	20.720.000,00	26.126.666,66	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.700.000,00	DPRD
4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemeri	ntahan Bidang Sumber Daya Alam	1				I											
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				10 Laporan 10	Laporan	20.750.000,00	20.726.000,00	20.726.000,00	-24.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD				100 % 10	0 %	2.472.802.010,00	1.520.270.000,00	1.221.711.000,00	-1.251.091.010,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.752.711.560,00	SEKRETARIAT DPRD

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	ANDIK	REALISASI CAPAIAN .	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN I	KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KENSIKA	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET	2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	PRI	ORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG
			OPD		2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	4 Dokumen	2.002.532.010,00	1.050.000.000,00	751.441.000,00	-1.251.091.010,00 Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik,	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			2.282.441.560,00	SEKRETARIAT DPRD
											Kecamatan, Semua Kel/Des	a	hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan	, Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
													pemberantasan korupsi, narkoba,	Publik Berkualitas				
													judi, dan penyeludupan.					
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar	 dan Tim Ahli											pyadaps					
		Jumlah Orang dalam				4 Orang	4 Orang	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	Memperkuat	Reformasi Birokrasi			195.000.000,00	SEKRETARIAT
		Kelompok Pakar dan Tim Ahli				. S.ag		,	,	,	Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi	dan Pelayanan , Publik Berkualitas			,	DPRD
											Semua Kel/Des	a	serta memperkuat pencegahan dan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
													pemberantasan korupsi, narkoba,	Publik Berkualitas				
													judi, dan penyeludupan.					
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Frak	si	I	l l		l	I											
		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	6 Orang	275.270.000,00	275.270.000,00	275.270.000,00	0,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI		Reformasi Birokrasi			275.270.000,00	SEKRETARIAT
											Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi	dan Pelayanan Publik Berkualitas				DPRD
											Semua Kel/Des	a	serta memperkuat pencegahan dan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
													pemberantasan korupsi, narkoba,	Publik Berkualitas				
													judi, dan penyeludupan.					
	Penyerapan dan	Cakupan Pokir yang				100 %	100 %	939.637.750,00	917.152.750,00	778.673.875,00	-160.963.875,00		Memperkuat	Reformasi Birokrasi	Aparatur, Masyarakat		1.545.875.350,00	
	Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	terealisasi											reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	dan Pelayanan , Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				DPRD
													pencegahan dan pemberantasan	dan Pelayanan Publik Berkualitas				
													korupsi, narkoba,	Publik Berkualitas				
													judi, dan penyeludupan.					
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daera	h																
		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				36 Laporan	20 Laporan	230.000.000,00	230.000.000,00	118.150.000,00	-111.850.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik,	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			230.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		Runjungan Kerja Di Ko									Kecamatan, Semua Kel/Des	, , ,	hukum dan birokrasi, serta memperkuat	, Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				DIND
											Sellida Nel/Des	na	pencegahan dan pemberantasan	dan Pelayanan Publik Berkualitas				
													korupsi, narkoba, judi, dan	Fublik Berkualitas				
													penyeludupan.					
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pik	iran DPRD															,	
		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	27.152.750,00	27.152.750,00	26.593.875,00	-558.875,00 Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik,	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			27.152.750,00	SEKRETARIAT DPRD
		yang Disusun									Kecamatan, Semua Kel/Des	, ,	hukum dan birokrasi serta memperkuat	, Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				
													pencegahan dan pemberantasan	dan Pelayanan Publik Berkualitas				
													korupsi, narkoba, judi, dan					
													penyeludupan.					
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	T											Т				T	
		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	2 Dokumen	682.485.000,00	660.000.000,00	633.930.000,00	-48.555.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	reformasi politik,	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			1.288.722.600,00	SEKRETARIAT DPRD
											Kecamatan, Semua Kel/Des	a	hukum dan birokrasi serta memperkuat	, Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				
													pencegahan dan pemberantasan	dan Pelayanan Publik Berkualitas				
													korupsi, narkoba, judi, dan					
	- W					100.07	100.07						penyeludupan.	5.4 .5.4 .			0 - 10 0 1 - 1 - 0 0	OFWEETABLIA
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terintegrasi Program-program DPRD				100 %	100 %	9.324.427.662,00	4.282.708.865,00	3.684.788.858,00	-5.639.638.804,00		Memperkuat reformasi politik,	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur		9.742.815.172,00	DPRD
		untuk Melaksankan fungsi Pengawasan, Pembentukan											hukum dan birokrasi serta memperkuat	Reformasi Birokrasi				
		Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen											pencegahan dan pemberantasan	dan Pelayanan Publik Berkualitas				
		Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD											korupsi, narkoba, judi, dan					
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pel	aksanaan Tugas DPPD											penyeludupan.					
7.02.02.2.00.0001	Noordinasi dari Nonsultasi Pel	Jumlah Dokumen Hasil				28	25	9.264.427.662,00	4.222.708.865,00	3.624.788.858,00	-5.639.638.804,00 Semua	DANA ALOKASI	Memperkuat	Reformasi Birokrasi			9.682.815.172,00	SEKDETABLAT
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					25 Dokumen	9.204.427.662,00	4.222.708.865,00	3.024.788.858,00	-5.639.638.804,00 Semua Kota/Kab, Semua Semua Semua Kota/Kab, Semua Se	UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi	dan Pelayanan Publik Berkualitas			9.062.815.172,00	DPRD
		Pelaksariaari Tugas DPRD									Kecamatan, Semua Kel/Des		serta memperkuat pencegahan dan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
											Selfida Rei/Des	nd	pemberantasan	Publik Berkualitas				
													korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.					
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas	Badan Musvawarah											p 3 y sidddigain					
		Jumlah Dokumen Hasil				12	12	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	Memperkuat	Reformasi Birokrasi			60 000 000 00	SEKRETARIAT
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah					Dokumen	23.003.000,00	33.300.300,00	00.000.000,00	Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)	reformasi politik, hukum dan birokrasi	dan Pelayanan Publik Berkualitas			30.000.000,00	DPRD
											Semua Kel/Des	a	serta memperkuat pencegahan dan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
													pemberantasan korupsi, narkoba,	Publik Berkualitas				
													judi, dan penyeludupan.					
	BADAN PERENCANAAN PE	 MBANGUNAN, PENELITIAN DA	N PENGEMBA	NGAN DAERAH	l			8.336.493.500,00	6.743.139.800,00	6.151.894.800,00	-2.184.598.700,00		<u>'</u>				7.836.493.500,00	
5	UNSUR PENUNJANG							8.336.493.500,00	6.743.139.800,00		-2.184.598.700,00						7.836.493.500,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN										·							
	PERENCANAAN							6.639.985.500,00	6.068.139.800,00	· ·	-1.040.590.700,00						6.139.985.500,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja				90 %	90 %	4.195.922.500,00	4.136.420.800,00	4.001.420.800,00	0,00						4.195.922.500,00	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perangkat Daerah																
	Perencanaan,	Persentase Dokumen				100 %	100 %	24.900.000,00	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00		-	Reformasi Birokrasi	Aparatur		24.900.000,00	BADAN
3.01.01.2.01	Penganggaran, dan Evaluasi	Perencanaan Penganggaran,												dan Pelayanan Publik Berkualitas				PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
	Kinerja Perangkat Daerah	& Evaluasi Kinerja Perangkat		l l		1	1			•		i i	i	1		i	I	
	Kinerja Perangkat Daerah	& Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu												Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

) KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE REALISASI CAPAIAN PERIODE	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA				CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN		T	KELOMPOK	PRAKIRAAN MA		PERANGKAT DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN KEGIATAN	RENSTRA OPD TAHUN 2023	OPD TAHUN	ARGET 2025 LUM SESUDAH	RKPD 2025	PAGU INDIKATIF (Rp) APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL DAERAH	SASARAN	TARGET PAG	GU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
2	3	4	5 6	7 8	9	10	11	12	13 14	15	16 17	18	19	20	21
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Doku	men 2 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokra dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokra dan Pelayanan	si		7.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAI
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan	Dokumen RKA-SKPD									Publik Berkualitas				DAERAH
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Doku	men 1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokra dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokra dan Pelayanan Publik Berkualitas	si		2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAI DAERAH
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan	Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan		1 Doku	men 1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	- Reformasi Birokra	si		2.500.000,00	BADAN
		RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	UMUM (DAU)	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokra dan Pelayanan Publik Berkualitas	si			PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DA PENGEMBANGA DAERAH
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan	DPA-SKPD													
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Doku	men 1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokra dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokra dan Pelayanan Publik Berkualitas	si		2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAI PENELITIAN DA PENGEMBANG, DAERAH
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan	Perubahan DPA- SKPD													
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Doku	men 1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokra dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokra dan Pelayanan Publik Berkualitas	si		2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DA PENGEMBANG/ DAERAH
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan I		tisar Realisasi Kinerja SKPD			1									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Lapor	ran 1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU) a	- Reformasi Birokra dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokra dan Pelayanan Publik Berkualitas	si		5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAI PENELITIAN DA PENGEMBANGA DAERAH
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat D														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Lapor	ran 1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokra dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokra dan Pelayanan Publik Berkualitas	si		2.500.000,00	BADAN PERENCANAAI PEMBANGUNA PENELITIAN DA PENGEMBANG DAERAH
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu		100 %	100 %	2.888.626.500,00	3.048.639.800,00	3.013.639.800,00	125.013.300,00		- Reformasi Birokra dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokra dan Pelayanan Publik Berkualitas	si Aparatur		2.888.626.500,00	BADAN PERENCANAAI PEMBANGUNA PENELITIAN DA PENGEMBANG DAERAH
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjang	gan ASN				I					T ublik berkualitas				DALIVAIT
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		19 Oral ulan	ng/b 19 Orang/b ulan	2.883.126.500,00	3.043.139.800,00	3.008.139.800,00	125.013.300,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokra dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokra dan Pelayanan Publik Berkualitas	si		2.883.126.500,00	BADAN PERENCANAAI PEMBANGUNA PENELITIAN DA PENGEMBANG DAERAH
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan I	 Laporan Keuangan Akhir Tahun S	SKPD			I									
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Lapor	ran 1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokra dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokra dan Pelayanan Publik Berkualitas	si		2.500.000,00	BADAN PERENCANAAI PEMBANGUNA PENELITIAN DA PENGEMBANG DAERAH
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan I	Laporan Keuangan Bulanan/ Triw	rulanan/ Semesteran SKPD												
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD		2 Lapoi	ran 2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokra dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokra dan Pelayanan Publik Berkualitas	si		2.000.000,00	BADAN PERENCANAAI PEMBANGUNA PENELITIAN DA PENGEMBANG DAERAH
5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan A	Analisis Prognosis Realisasi Angg	garan			,									
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Doku	men 1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokra dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokra dan Pelayanan Publik Berkualitas	si		1.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAI PENELITIAN DA PENGEMBANGI DAERAH
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik		100 %	100 %	100.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	0,00		- Reformasi Birokra dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokra dan Pelayanan Publik Berkualitas	si		100.000.000,00	BADAN PERENCANAA PEMBANGUNA PENELITIAN D. PENGEMBANG DAERAH
5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pe	_I gawai Berdasarkan Tugas dan Fເ -	ungsi									1			
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		19 Ora	ng 19 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokra dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokra dan Pelayanan Publik Berkualitas	si		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAI PEMBANGUNA PENELITIAN DI PENGEMBANG DAERAH
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja		100 %	100 %	976.436.000,00	792.671.000,00	642.671.000,00	-333.765.000,00		- Reformasi Birokra dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokra dan Pelayanan Publik Berkualitas	si		976.436.000,00	BADAN PERENCANAAI PEMBANGUNA PENELITIAN D/ PENGEMBANG DAERAH
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Pe	1													
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Pak	et 12 Paket	216.000.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokra dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokra dan Pelayanan Publik Berkualitas	si		216.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DA PENGEMBANGA DAERAH

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR CAPAIA	ASI PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN KER	ANGKA PENDANAAN			KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD CAPAIA RENJA O TAHUN 2	PD TANGET KENS	IARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		ertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	SASARAN	TARGET PAGU INDIKAT	PENANGGUN
2	2	4	OPD C	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	12	45	NASIONAL DAERA		10 20	24
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik K	antor 4	5 6	/	8	9	10	11	12	13 14	15	16 17	18	19 20	21
3.01.01.2.00.0004	T effyediaan Bahan Eogistik K	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Bir dan Pelayana Publik Berkua Reformasi Bir dan Pelayana Publik Berkua	n litas okrasi n	25.000	000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAI PENGEMBANGA DAERAH
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	122.436.000,00	108.671.000,00	108.671.000,00	-13.765.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Bir dan Pelayana Publik Berkua Reformasi Bir dan Pelayana Publik Berkua	n litas okrasi n	122.436	.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAI PENGEMBANGA DAERAH
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan da	l an Peraturan Perundang-undanga	l l an												
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	12 Dokumen	132.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Bir dan Pelayana Publik Berkua Reformasi Bir dan Pelayana Publik Berkua	n litas okrasi n	132.000	000,00 BADAN PERENCANAAI PEMBANGUNA PENELITIAN DA PENGEMBANG DAERAH
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1									1 1				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			11 Laporan	11 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Bir dan Pelayana Publik Berkua Reformasi Bir dan Pelayana Publik Berkua	n litas okrasi n	11.000	000,00 BADAN PERENCANAAI PEMBANGUNA PENELITIAN DA PENGEMBANG DAERAH
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koor	dinasi dan Konsultasi SKPD													
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	470.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	-320.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Bir dan Pelayana Publik Berkua Reformasi Bir dan Pelayana Publik Berkua	n litas okrasi n	470.000	.000,00 BADAN PERENCANAAI PEMBANGUNA PENELITIAN D/ PENGEMBANG DAERAH
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja			100 %	100 %	60.750.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	14.250.000,00		- Reformasi Bir dan Pelayana Publik Berkua Reformasi Bir dan Pelayana Publik Berkua	n litas okrasi n	60.750	000,00 BADAN PERENCANAAI PEMBANGUNA PENELITIAN DA PENGEMBANG DAERAH
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Me	esin Lainnya			_										
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			6 Unit	6 Unit	60.750.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	14.250.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Bir dan Pelayana Publik Berkua Reformasi Bir dan Pelayana Publik Berkua	n litas okrasi n	60.750	000,00 BADAN PERENCANAA PEMBANGUNA PENELITIAN D. PENGEMBANG DAERAH
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam Kondisi Baik			100 %	100 %	145.210.000,00	145.210.000,00	145.210.000,00	0,00		- Reformasi Bir dan Pelayana Publik Berkua Reformasi Bir dan Pelayana Publik Berkua	n litas okrasi n	145.210	000,00 BADAN PERENCANAAI PEMBANGUNA PENELITIAN D/ PENGEMBANG DAERAH
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemelihara	an, Biaya Pemeliharaan, dan Paja Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	ak Kendaraan Perorangan I	Dinas atau Kendaraan	5 Unit	5 Unit	133.850.000,00	133.850.000,00	133.850.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Bir dan Pelayana Publik Berkua Reformasi Bir dan Pelayana Publik Berkua	n litas okrasi n	133.850	000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA PENELITIAN DA PENGEMBANG. DAERAH
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			_						1				
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			16 Unit	16 Unit	11.360.000,00	11.360.000,00	11.360.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Bir dan Pelayana Publik Berkua Reformasi Bir dan Pelayana Publik Berkua	n litas okrasi n	11.360	.000,00 BADAN PERENCANAAI PEMBANGUNA PENELITIAN D/ PENGEMBANG DAERAH
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Konsistensi Dokumen Perencanaan Terhadap Dokumen Penganggaran			100 %	100 %	1.583.720.000,00	1.239.361.000,00	1.013.361.000,00	-500.000.000,00				1.083.720	.000,00
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penjanbaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD			100 %	100 %	1.325.428.000,00	982.659.000,00	836.659.000,00	-488.769.000,00		Reformasi Bir dan Pelayana Publik Berkua Reformasi Bir dan Pelayana Publik Berkua	n litas okrasi n	825.428	000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAI PENELITIAN DA PENGEMBANG, DAERAH
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Pern	nasalahan, dan Isu Strategis Pem Jumlah Dokumen	nbangunan Daerah		2 Dokumen	1 Dokumen	165.714.000,00	41.664.000,00	41.664.000,00	-124.050.000,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	- Reformasi Bir	okraci	405.71	.000,00 BADAN
E 04 02 2 04 000E	Deleksanson Museenhang Ko	Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)			2 Dokumen	1 Dokumen	165.714.000,00	41.664.000,00	41.664.000,00	-124.050.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	dan Pelayana Publik Berkua Reformasi Bir dan Pelayana Publik Berkua	n litas okrasi n	165.714	PERENCANAAN PEMBANGUNAI PENELITIAN DA PENGEMBANG DAERAH
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Ka	bupaten/Kota Jumlah Berita Acara			2 Berita	2 Berita	267.217.000,00	287.997.000,00	236.997.000,00	-30.220.000,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	- Reformasi Bir	okrasi	267 247	.000,00 BADAN
		Musrenbang Kabupaten/Kota			Acara	Acara	201.217.000,00	207.007.000,00	250.557.550,50	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	dan Pelayana Publik Berkua Reformasi Bir dan Pelayana Publik Berkua	n litas okrasi n	201.211	PERENCANAAN PEMBANGUNAI PENELITIAN DA PENGEMBANG DAERAH
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi	1			T.,.	1		Т	1			Г	1		
		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan			1 Usulan	1 Usulan	64.823.000,00	66.647.000,00	50.647.000,00	-14.176.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Bir dan Pelayana Publik Berkua Reformasi Bir dan Pelayana Publik Berkua	n litas okrasi	64.823	000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DA PENGEMBANG/ DAERAH
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan F	Penetapan Dokumen Perencanaa Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	n Pembangunan Daerah Ka	abupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen	827.674.000,00	586.351.000,00	507.351.000,00	-320.323.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Bir dan Pelayana Publik Berkua Reformasi Bir dan Pelayana Publik Berkua	n litas okrasi n	327.674	.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAI PENGEMBANGA DAERAH

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR CAPAIAN	CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK		AN MAJU RENCANA 「AHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
NO KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENSTRA RENJA OPD	S OPD TARON	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			OPD TAHON 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL DAERAH			(4,	
1 2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 17	18	19	20	21
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Data dan Informasi Pembangunan Daerah			100 %	100 %	68.148.000,00	89.158.000,00	64.158.000,00	-3.990.000,00			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		68.148.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan	Data dan Informasi Perencanaa	an Pembangunan Perangkat Da	aerah							Γ	1					
		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi			39 Orang	39 Orang	68.148.000,00	89.158.000,00	64.158.000,00	-3.990.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			68.148.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD			100 %	100 %	190.144.000,00	167.544.000,00	112.544.000,00	-77.600.000,00			- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		190.144.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Pere	 encanaan dan Pelaksanaan Pem	 mbangunan Daerah di Kabupate	en/Kota									, asim somando				
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan			1 Laporan	1 Laporan	73.547.000,00	56.697.000,00	31.697.000,00	-41.850.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			73.547.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Peny	/usunan Laporan Berkala Pelaks	sanaan Pembangunan Daerah										,				
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah			2 Laporan	2 Laporan	116.597.000,00	110.847.000,00	80.847.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			116.597.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3. 5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Konsistensi Keselarasan Program Prioritas Daerah Terhadap Program Prioritas Pusat			80 %	80 %	860.343.000,00	692.358.000,00	584.613.000,00	0,00						860.343.000,00	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			70 %	70 %	454.395.000,00	351.060.000,00	266.060.000,00	-188.335.000,00			- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		454.395.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Doku	l men Perencanaan Pembanguna	_l an Daerah Bidang Pemerintahar	l n (RPJPD, RPJMD da	L an RKPD)												
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			1 Dokumen	1 Dokumen	84.642.000,00	84.642.000,00	64.642.000,00	-20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			84.642.000,00	PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokum	en Perencanaan Pembangunan		nerintahan									Publik Berkualitas				DAERAH
0.0.100.2.0.10002	7 Joseph Tonyacanan Donam	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan	- Totalighat Daolah Didang Fon		1 Laporan	0 Laporan	81.681.000,00	0,00	0,00	-81.681.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			81.681.000,00	BADAN PERENCANAAN
		Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									Kecamatan, Semua Kel/Desa		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan I	Evaluasi Penyusunan Dokumen l	Perencanaan Pembangunan Pe	erangkat Daerah Bida	ang Pemerinta	han					Γ	1					
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			1 Laporan	1 Laporan	90.885.000,00	90.885.000,00	70.885.000,00	-20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			90.885.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sine	rgitas dan Harmonisasi Perencar	ınaan Pembangunan Daerah Bio	dang Pemerintahan													
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan			1 Laporan	0 Laporan	57.335.000,00	0,00	0,00	-57.335.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			57.335.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan I	Evaluasi Penyusunan Dokumen l	Perencanaan Pembangunan Pe	erangkat Daerah Bida	ang Pembangi	unan Manusia			T		T	1					
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			1 Laporan	1 Laporan	64.355.000,00	78.355.000,00	63.355.000,00	-1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			64.355.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sine	rgitas dan Harmonisasi Perencar	ınaan Pembangunan Daerah Bio	dang Pembangunan N	Manusia	,	,										
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia			1 Laporan	1 Laporan	75.497.000,00	97.178.000,00	67.178.000,00	-8.319.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			75.497.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata-rata Capaian Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			70 %	70 %	101.500.000,00	69.175.000,00	44.553.800,00	-56.946.200,00			- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		101.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sine	 rgitas dan Harmonisasi Perencar	_l naan Pembangunan Daerah Bio	 dang Perekonomian		<u>ı</u>			1		<u>I</u>	<u> </u>					
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian			1 Laporan	1 Laporan	101.500.000,00	69.175.000,00	44.553.800,00	-56.946.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			101.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata-rata Capaian Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			70 %	70 %	304.448.000,00	272.123.000,00	273.999.200,00	-30.448.800,00			- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		304.448.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN				WEI OUT OU		AN MAJU RENCANA AHUN 2026	PERANGKAT
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA RENJA OPD	TARGET RENJA	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12) LOKAS	I SUMBER DA		PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUN JAWAB
	REGIATAN		OPD TATION 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025 F	RKPD PERUBAHAN 2025	Dertamban/Derkurang (10-12)	JOWIDEN DA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	TAGO INDIKATII (Kp)	VAWAD
2	3	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 6	7	8 1 Laporan	9 1 Laporan	10 101.624.000,00	11 101.624.000,00	61.602.400,00	-40.021.600,00 Kab. Pesisir Barat, Semu Kecamatan, Semua Kel/			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	18	19	101.624.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAI PENELITIAN DA
5.04.00.00.0004	14 17 18 11 21												Publik Berkualitas				DAERAH
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sine	rgitas dan Harmonisasi Perenca Jumlah Laporan Hasil	anaan Pembangunan Daerah Bid	dang Infrastruktur	1 Laporan	2 Laporan	101.421.000,00	101.421.000,00	166.900.400,00	65.479.400,00 Kab. Pesisir	DANA ALOK	ısı -	Reformasi Birokrasi			101.421.000,00	BADAN
5.04.02.2.02.0009	Kaardinasi Palaksanaan Cina	Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		dona Kawilayahaa						Barat, Semu Kecamatan, Semua Kel/	a UMUM (DAU		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				PERENCANAAN PEMBANGUNAI PENELITIAN DA PENGEMBANG, DAERAH
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sine	rgitas dan Harmonisasi Perenca Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	anaan Pembangunan Daerah Bid	dang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	101.403.000,00	69.078.000,00	45.496.400,00	-55.906.600,00 Kab. Pesisir Barat, Semu Kecamatan, Semua Kel/		SI -	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			101.403.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAI PENELITIAN DA PENGEMBANG/ DAERAH
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.696.508.000,00	675.000.000,00	552.500.000,00	-1.144.008.000,00						1.696.508.000,00	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Indeks Inovasi Daerah			90 %	90 %	1.696.508.000,00	675.000.000,00	552.500.000,00	0,00						1.696.508.000,00	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			80 %	80 %	518.259.000,00	346.000.000,00	223.500.000,00	-294.759.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		518.259.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAI PENGEMBANGA DAERAH
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan E	⊥ valuasi Penelitian dan Pengemb	oangan Bidang Pemerintahan Un	mum		1											
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum			1 Laporan	1 Laporan	115.195.250,00	90.613.000,00	58.113.000,00	-57.082.250,00 Kab. Pesisir Barat, Semu Kecamatan, Semua Kel/	a UMUM (DAU	·SI -	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			115.195.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAI PENGEMBANGA DAERAH
5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan E	1	bangan Bidang Aparatur dan Ref	formasi Birokrasi													
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi			1 Laporan	1 Laporan	223.422.750,00	84.814.000,00	54.814.000,00	-168.608.750,00 Kab. Pesisir Barat, Semu Kecamatan, Semua Kel/	a UMUM (DAU	·SI -	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			223.422.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAI PENGEMBANGA DAERAH
5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan E		pangan Bidang Keuangan dan As	set Daerah, Reform	asi Birokrasi												
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi			1 Laporan	1 Laporan	84.716.000,00	84.682.000,00	54.682.000,00	-30.034.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semu Kecamatan, Semua Kel/		SI -	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			84.716.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DA PENGEMBANGA DAERAH
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbanga				1	1	0.1.007.000.00	27 224 222 22		20.001.000.00		0.	D () D) ()				5.5
		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik			1 Laporan	1 Laporan	94.925.000,00	85.891.000,00	55.891.000,00	-39.034.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semu Kecamatan, Semua Kel/		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			94.925.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAI PENELITIAN DA PENGEMBANG
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan			80 %	80 %	528.249.000,00	329.000.000,00	329.000.000,00	-199.249.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		528.249.000,00	BADAN PERENCANAAI PEMBANGUNA PENELITIAN DA PENGEMBANG DAERAH
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembanga	ın Bidang Aspek- Aspek Sosial															
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial			2 Dokumen	2 Dokumen	528.249.000,00	329.000.000,00	329.000.000,00	-199.249.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semu Kecamatan, Semua Kel/	,	SI -	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			528.249.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA PENELITIAN DA PENGEMBANG DAERAH
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			80 %	80 %	650.000.000,00	0,00	0,00	-650.000.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		650.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA PENELITIAN DA PENGEMBANG DAERAH
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembanga	n Pertanian, Perkebunan dan Pa	angan		1 Dokumen	0 Dokumen	325.000.000,00	0,00	0,00	-325.000.000,00 Kab. Pesisir	DANA ALOK	.ei	Reformasi Birokrasi			325.000.000,00	BADAN
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			i bokumen	o boxumen	323.000.000,00	0,00	0,00	Barat, Semu Kecamatan, Semua Kel/	a UMUM (DAU	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			323.000.000,00	PERENCANAAN PEMBANGUNAI PENELITIAN DA PENGEMBANG DAERAH
5.05.02.2.03.0012	Penelitian dan Pengembanga	n Penataan Ruang dan Pertana Jumlah Dokumen Hasil	ınan		1 Dokumen	0 Dokumen	325.000.000,00	0,00	0,00	-325.000.000,00 Kab. Pesisir	DANA ALOK	SI -	Reformasi Birokrasi			325.000.000,00	BADAN
		Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan			T BORGING!	o Boxamen				Barat, Semu Kecamatan, Semua Kel/	a UMUM (DAU		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DA PENGEMBANGA DAERAH
5	BADAN PENGELOLAAN KE UNSUR PENUNJANG	EUANGAN DAN ASET DAERAH	1				190.309.514.291,00	176.787.713.563,00 176.787.713.563,00	176.787.713.463,00 176.787.713.463,00	-13.521.800.828,00 -13.521.800.828,00						201.814.639.291,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN						·		·							·	
5.02 5.02.01	KEUANGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan Pemenuhan			92.50 %	92.50 %	190.309.514.291,00	176.787.713.563,00 18.014.956.337,00	176.787.713.463,00 17.884.996.737,00	-13.521.800.828,00 11.000.000.000,00						201.814.639.291,00 32.471.095.966,00	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kebutuhan Penunjang Urusan pemerintah Daerah Pada BPKAD															
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen			100 %	100 %	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		15.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAI ASET DAERAH

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	ANDIN	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN			VELOUES:		MAJU RENCANA IUN 2026	PERANGKAT
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD	TARGET RENJA	TARGET 20	25		PAGU INDIKATIF (Rp)		Postorskok/Postorsky (40.40)	SUMBER DANA	PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	A CILINDIKATIF (D.,)	PENANGGUN
	REGIATAN		OPD	TAHUN 2023	2024	SEBELUM SE	SUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL DAERAH		TARGET P	AGU INDIKATIF (Rp)	JAWAB
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 14	15	16 17	18	19	20	21
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1	Dokumen 1 D	okumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/De Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/De		- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DA ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan [Dokumen RKA-SKPD															
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1	Dokumen 1 D	okumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/De	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAI ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan [Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1	Dokumen 1 D	okumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/De	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DA ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan [Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1	Dokumen 1 D	okumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/De	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DA ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan F	Perubahan DPA- SKPD					<u> </u>					I					
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1	Dokumen 1 D	okumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/De	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DA ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan L	_aporan Capaian Kinerja dan Ikht	tisar Realisasi Kine	erja SKPD		<u> </u>	•	,	'	,	<u>'</u>						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4	Laporan 4 L	aporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/De	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DA ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Da	aerah									<u> </u>						
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1	Laporan 1 L	aporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/De	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DA ASET DAERAH
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Pembayaran Gaji, Tunjangan PNS, Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian ASN dan Iuran Tapera ASN Kabupaten Pesisir Barat			1	00 % 100) %	19.774.529.866,00	16.559.588.337,00	16.559.588.337,00	-3.214.941.529,00		- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		30.774.529.866,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DA ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjang																
0.02.011.2.02.0001	Tonyoulaan Gaji dan Tanjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				4 Orang/b 14 ulan ula	Orang/b n	19.769.529.866,00	16.554.588.337,00	16.554.588.337,00	-3.214.941.529,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/De	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			30.769.529.866,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DA ASET DAERAH
5 00 04 0 00 0005	Kanada a Banasa a I	Allia Talaa 6											Publik Berkualitas				
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan L	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1	Laporan 1 L	aporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/De	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DA ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan L	_aporan Keuangan Bulanan/ Triw	ulanan/ Semestera	an SKPD			'	,				'			<u>'</u>		
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD			1	2 Laporan 12	Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/De	DANA ALOKASI UMUM (DAU) sa	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DA ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan A	Analisis Prognosis Realisasi Angg	garan		Ι												
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				Dokumen 1 D	okumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/De	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAI KEUANGAN DA ASET DAERAH
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas			1	00 % 100) %	335.000.000,00	100.000.000,00	139.900.000,00	-195.100.000,00		- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		335.000.000,00	BADAN PENGELOLAAI KEUANGAN DA ASET DAERAH
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas be	eserta Atribut Kelengkapannya															
E 00 04 0 05 005	Don didition de Daniel	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1	Paket 3 P	aket	35.000.000,00	0,00	39.900.000,00	4.900.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/De	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			35.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DA ASET DAERAH
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pe	gawai Berdasarkan Tugas dan Fu	ungsi			of Orang	Orang	300,000,000,00	100 000 000 00	100 000 000 00	200 000 000 0	DANA ALOKASI	Defenses: Discluses			200 000 000 00	BADAN
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang 25	Orang	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-200.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/De	UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DA ASET DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA	TARC	ET 2025		DAGII INDIKATIF (D.)	CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN			201	ORITAS	KELOMPOK SASARAN		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKA DAERAH PENANGGUI
	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	RENSTRA OPD	TAHUN 2023	ODD TALLIA	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PAGU INDIKATIF (Rp) APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA -	NASIONAL	DAERAH	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	JAWAB
2	3	4	5	6	7	SEBELUM	SESUDAH	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah Double Penyediaan Bahan Logistik k	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah Kantor		, C	·	100 %	100 %	884.271.050,00	808.330.000,00	638.470.400,00	-245.800.650,00	1	-		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		1.0	884.271.050,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	(1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN ASET DAERA
5.02.01.2.06.0	Penyediaan Barang Cetakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	327.771.050,00	326.796.000,00	190.992.400,00	-136.778.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			327.771.050,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN ASET DAERA
5.02.01.2.06.0	Penyediaan Bahan Bacaan o	dan Peraturan Perundang-undang Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	gan			15 Dokumen	15 Dokumen	43.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			43.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN ASET DAER
5.02.01.2.06.0	908 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	188.500.000,00	188.534.000,00	154.478.000,00	-34.022.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			188.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN ASET DAER
5.02.01.2.06.0	009 Penyelenggaraan Rapat Koo	rdinasi dan Konsultasi SKPD													T donk berkdantas				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			300.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN ASET DAER
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia				100 %	100 %	86.100.000,00	121.200.000,00	121.200.000,00	35.100.000,00		-		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		86.100.000,00	BADAN PENGELOL KEUANGAN ASET DAER
5.02.01.2.07.0	Pengadaan Peralatan dan M	esin Lainnya																	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	86.100.000,00	121.200.000,00	121.200.000,00	35.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			86.100.000,00	BADAN PENGELOL/ KEUANGAN ASET DAER
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung				100 %	100 %	221.201.550,00	236.230.000,00	236.230.000,00	15.028.450,00		-		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		221.201.550,00	BADAN PENGELOL KEUANGAN ASET DAER
5.02.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Peralatan 0	dan Perlengkapan Kantor																	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	213.000.000,00	228.000.000,00	228.000.000,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			213.000.000,00	BADAN PENGELOL KEUANGAN ASET DAER
5.02.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Pelayanan	1				1				ı		T			1		1	T	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.201.550,00	8.230.000,00	8.230.000,00	28.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.201.550,00	BADAN PENGELOL KEUANGAN ASET DAEF
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dalam Kondisi Baik				100 %	100 %	154.493.500,00	174.108.000,00	174.108.000,00	19.614.500,00		-		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		154.493.500,00	BADAN PENGELOL KEUANGAN ASET DAEF
5.02.01.2.09.0	Penyediaan Jasa Pemelihara	Jumlah Kendaraan, dan Pa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	ajak Kendaraan	Perorangan Dina	as atau Kendaraan D	Dinas Jabatan 7 Unit	7 Unit	140.350.000,00	156.258.000,00	156.258.000,00	15.908.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			140.350.000,00	BADAN PENGELOL KEUANGAN ASET DAEF
5.02.01.2.09.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sa	I arana dan Prasarana Pendukung	g Gedung Kanto	or atau Bangunan	Lainnya														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	14.143.500,00	17.850.000,00	17.850.000,00	3.706.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			14.143.500,00	BADAN PENGELOL KEUANGAN ASET DAEN
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN	Cakupan Tata kelola barang milik daerah sesuai				100 %	100 %	166.475.669.625,00	157.435.781.226,00	157.565.740.726,00	505.125.000,00							166.980.794.625,00	
5.02.02.2.01	KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					100 %	100 %	2.849.358.800,00	2.028.305.000,00	1.995.255.800,00	-854.103.000,00		-		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.849.358.800,00	BADAN PENGELOL KEUANGAN ASET DAER
5.02.02.2.01.0	001 Koordinasi dan Penyusunan	KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	289.896.150,00	214.640.000,00	213.240.000,00	-76.656.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			289.896.150,00	BADAN PENGELOI KEUANGA ASET DAE

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR REPLODE CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN KE	RANGKA PENDANAAN					- KELOMPOK		N MAJU RENCANA AHUN 2026	PERANGKAT — DAERAH
NO KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2023	ODD TALLING	TARGE			PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PR	IORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG
1			5 6	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	40	44	45	NASIONAL	DAERAH	40	40	20	04
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan F	Perubahan KUA dan Perubahan		/	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0.02.02.2.01.0002	Treetamaer dan Ferryadanan F	Jumlah Dokumen Perubahan	T		2 Dokumen	2 Dokumen	289.896.150,00	214.640.000,00	213.240.000,00	-76.656.150,00 Se	emua	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			289.896.150,00	
		KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun								Ko Se	ota/Kab, emua	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas				PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
											ecamatan, emua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan	 Verifikasi RKA-SKPD																
		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi			1 Dokumen	1 Dokumen	50.305.500,00	43.110.000,00	39.270.000,00	-11.035.500,00 Se	emua ota/Kab,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			50.305.500,00	D BADAN PENGELOLAAN
		Divernikasi								Se	emua ecamatan,	OWOW (DAO)		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				KEUANGAN DAN ASET DAERAH
											emua Kel/Desa			dan Pelayanan Publik Berkualitas				
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan	u Verifikasi Perubahan RKA-SKPI)		l l		<u> </u>	1	'	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi			1 Dokumen	1 Dokumen	50.305.500,00	43.110.000,00	39.270.000,00	-11.035.500,00 Se	emua ota/Kab,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			50.305.500,00	PENGELOLAAN
										Ke	emua ecamatan,	, ,		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				KEUANGAN DAN ASET DAERAH
										Se	emua Kel/Desa			dan Pelayanan Publik Berkualitas				
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan	Verifikasi DPA-SKPD																
		Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi			1 Dokumen	1 Dokumen	50.429.400,00	43.195.000,00	39.355.000,00	Ko	ota/Kab,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			50.429.400,00	PENGELOLAAN
										Ke	emua ecamatan, emua Kel/Desa			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				KEUANGAN DAN ASET DAERAH
										56	emua Kel/Desa			Publik Berkualitas				
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan)					Г	1									
		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi			1 Dokumen	1 Dokumen	50.429.400,00	43.195.000,00	39.355.000,00	Ko	ota/Kab,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.429.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
										Ke	emua ecamatan, emua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				ASET DAERAH
											Sinda Nov Bood			Publik Berkualitas				
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan F	Peraturan Daerah tentang APBD	dan Peraturan Kepala Daerah	tentang Penjabaran A	1						1			T-,				
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang			2 Dokumen	2 Dokumen	790.346.650,00	591.430.000,00	618.750.000,00	-171.596.650,00 Se	emua ota/Kab, emua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			790.346.650,00	D BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
		Penjabaran APBD								Ke	ecamatan, emua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				ASET DAERAH
														Publik Berkualitas				
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan F	Peraturan Daerah tentang Perub Jumlah Peraturan Daerah	ahan APBD dan Peraturan Kep	pala Daerah tentang Pe	enjabaran Peru 2 Dokumen		799.046.650,00	591.480.000,00	618.800.000,00	-180.246.650,00 Se	amua	DANA ALOKASI		Reformasi Birokrasi			799.046.650,00	BADAN
		tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala			2 Dokumen	2 Dokumen	799.046.650,00	591.460.000,00	616.800.000,00	Ko	ota/Kab, emua	UMUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas			799.046.650,00	PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
		Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD								Ke	ecamatan, emua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Banyusunan F	 Regulasi serta Kebijakan Bidang	Anggaran											Publik Berkualitas				
5.02.02.2.01.0009	Roordinasi dan Penyusunan P	Jumlah Dokumen Regulasi	Anggaran		2 Dokumen	2 Dokumen	478.703.400,00	243.505.000,00	173.975.800,00	-304.727.600,00 Ka	ab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			478.703.400,00	BADAN
		serta Kebijakan Bidang Anggaran						,		Ba Ke	arat, Semua ecamatan,	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas				PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
										Se	emua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				ASET DAERAH
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan	Persentase Dokumen			100 %	100 %	1.531.700.950,00	1.389.771.750,00	1.389.702.950,00	-141.998.000,00			_	Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.531.700.950,00	BADAN
0.02.02.2.02	Perbendaharaan Daerah	penatausahaan keuangan daerah tepat waktu			100 //									dan Pelayanan Publik Berkualitas				PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
														Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan k	(as Daerah												Publik Berkualitas				
	, too and our originals.	Jumlah Dokumen Hasil			36	36	289.298.050,00	467.023.000,00	507.733.000,00	218.434.950,00 Se	emua	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			289.298.050,00) BADAN
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			Dokumen	Dokumen				Se	emua	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas				PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
											ecamatan, emua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pen	 gendalian dan Penerbitan Angg:	aran Kas dan SPD											T abilit 20 maailla				
		Jumlah Dokumen Hasil			2 Dokumen	2 Dokumen	147.182.500,00	72.527.500,00	77.627.500,00	-69.555.000,00 Se	emua	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			147.182.500,00) BADAN
		Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD								Se	ota/Kab, emua ecamatan,	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
											emua Kel/Desa			dan Pelayanan Publik Berkualitas				7.027 57.270
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistens	l si, Sinkronisasi, Supervisi, Monit	ı toring dan Evaluasi Pengelolaar	 n Dana Perimbangan d	dan Dana Tran	ı Lainnya	I	I	I	I				I	I			
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi,			12 Dokumen	12 Dokumen	298.959.650,00	367.685.000,00	306.135.000,00	7.175.350,00 Se	emua ota/Kab,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			298.959.650,00	0 BADAN PENGELOLAAN
		Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitorina, dan			Dokumen	Dokumen				Se	emua ecamatan,	OMOM (DAO)		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana								Se	emua Kel/Desa			dan Pelayanan Publik Berkualitas				
5.02.02.2.02.0009	Pekonsiliasi Data Penerimaan	Transfer Lainnya n dan Pengeluaran Kas serta Pe	mungutan dan Pemotongan ata	as SP2D dangan Instal	nei Terkait													
5.52.02.2.02.0009	Rononsillasi Data Felleliffidar	Jumlah Dokumen Hasil		GO OF ZD Gengan mstal	12	12	375.523.500,00	393.325.000,00	417.185.000,00	41.661.500,00 Se	emua	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			375.523.500,00	0 BADAN
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan			Dokumen	Dokumen				Ko Se	ota/Kab, emua	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas			2 2.2 2,40	PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
		Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D								Ke	ecamatan, emua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				ASET DAERAH
		dengan Instansi Terkait												i-uplik derkualitas				
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan K	ceuangan Pemerintah Kabupater	n/Kota			<u> </u>			1	1					T			
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan			45 Orang	45 Orang	420.737.250,00	89.211.250,00	81.022.450,00		ota/Kab,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			420.737.250,00	PENGELOLAAN
		Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota								Ke	emua ecamatan, emua Kel/Desa			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				KEUANGAN DAN ASET DAERAH
										Se	da Nol/Desa			Publik Berkualitas				
			 			H	·			•	į.			i				1
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu			100 %	100 %	709.655.800,00	348.024.000,00	348.024.000,00	-361.631.800,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur		709.655.800,00	PENGELOLAAN
5.02.02.2.03					100 %	100 %	709.655.800,00	348.024.000,00	348.024.000,00	-361.631.800,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur		709.655.800,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA	7.75	ET 2025		DACH INDIVATION	CAPAIAN KINERJA DAN P	ERANGKA PENDANAAN			BRIGHT	KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERAN DAER
RODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	RENSTRA	RENJA OPD TAHUN 2023	ODD TAUUN		ET 2025	DVDD 0005	PAGU INDIKATIF (Rp)	DVDD DEDUDANIAN COOF	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA -	PRIORITAS	SASARAN	TARGET PAGU INDIKATIF	(Rp) PENANG
		,			7	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	40	44	45	NASIONAL DAERAH	40	40 00	
2	3	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5	6	7	2 Laporan	2 Laporan	10 154.474.100,00	11 125.635.000,00	12 144.130.200,00	-10.343.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birok dan Pelayanan Publik Berkualita Reformasi Birok dan Pelayanan Publik Berkualita	as rasi	19 20 154.474.1	D0,00 BADAN PENGELC KEUANGA ASET DAE
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuanga	an SKPD, BLUD dan Laporan Ke Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	euangan Peme	rintah Daerah		1 Laporan	1 Laporan	332.690.500,00	119.933.000,00	119.933.000,00	-212.757.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birok dan Pelayanan Publik Berkualita Reformasi Birok dan Pelayanan Publik Berkualita	as rasi	332.690.5	D0,00 BADAN PENGELC KEUANGA ASET DAE
02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan	Rancangan Peraturan Daerah te	ntang Pertang	gungjawaban Pela	aksanaan APBD Kal	oupaten/Kota d	an Rancangan	Peraturan Kepala Daerah tentang	Penjabaran Pertanggungjawa	ban Pelaksanaan APBD Kabupa	aten/Kota	·					
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	187.491.200,00	102.456.000,00	83.960.800,00	-103.530.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birok dan Pelayanan Publik Berkualita Reformasi Birok dan Pelayanan Publik Berkualita	as rasi	187.491.2	DO,00 BADAN PENGELO KEUANG. ASET DA
02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Penyelesaian Tuntutan Perbend	daharaan dan T	untutan Kerugian	n Daerah		1										
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birok dan Pelayanan Publik Berkualita Reformasi Birok dan Pelayanan Publik Berkualita	as rasi	35.000.0	00,00 BADAN PENGELO KEUANG ASET DA
02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pemenuhan penunjang pengelolaan keuangan daerah				100 %	100 %	161.199.650.925,00	153.533.705.476,00	153.533.705.476,00	-7.665.945.449,00		-	Reformasi Birok dan Pelayanan Publik Berkualita Reformasi Birok dan Pelayanan Publik Berkualita	as rasi	161.199.650.9	25,00 BADAN PENGEL KEUANG ASET DA
02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pe	laksanaan Pembayaran Cicilan I	Pokok dan Bur	nga Pinjaman Pem	nerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semus	DANA ALOKASI -	Reformasi Birok	rasi	1.000.000.0	00,00 BADAN
		Jumian Laporan Hasii Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	n			1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	dan Pelayanan Publik Berkualita Reformasi Birok dan Pelayanan Publik Berkualita	as rasi	1.000.000.0	PENGEL KEUANG ASET D
02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat da					1	T 1					T ₂	T	T	. 1		
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	12 Laporan	6.945.750.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	2.054.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birok dan Pelayanan Publik Berkualita Reformasi Birok dan Pelayanan Publik Berkualita	as rasi	6.945.750.0	00,00 BADAN PENGEI KEUAN ASET D
02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil	· ·				1 .						Τ_	T	T	. 1		
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	153.253.900.925,00	144.533.705.476,00	144.533.705.476,00	-8.720.195.449,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birok dan Pelayanan Publik Berkualita Reformasi Birok dan Pelayanan Publik Berkualita	as rasi	153.253.900.9	25,00 BADAN PENGEL KEUANG ASET D
02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Cakupan penggunaan SIPD dalam keuangan daerah				100 %	100 %	185.303.150,00	135.975.000,00	299.052.500,00	113.749.350,00			Reformasi Birok dan Pelayanan Publik Berkualita Reformasi Birok dan Pelayanan Publik Berkualita	as rasi	690.428.1	50,00 BADAN PENGEL KEUANG ASET DA
02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Da	a Bidang Keuangan Daerah			<u> </u>		1										
		Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				-	1 Dokumen	0,00	0,00	299.052.500,00	299.052.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birok dan Pelayanan Publik Berkualita Reformasi Birok dan Pelayanan Publik Berkualita	as rasi	505.125.0	D0,00 BADAN PENGEL KEUANO ASET D
02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi	Pemerintah Daerah Bidang Keu Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah		Pemerintah Kabu	paten/Kota	10 Orang	0 Orang	185.303.150,00	135.975.000,00	0,00	-185.303.150,00	Kota/Kab, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birok dan Pelayanan Publik Berkualita	as I	185.303.1	PENGE KEUAN
		Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota										Kecamatan, Semua Kel/Desa		Reformasi Birok dan Pelayanan Publik Berkualita			ASET D
02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG	Cakupan Tata kelola barang milik daerah sesuai				100 %	100 %	2.362.748.700,00	1.336.976.000,00	1.336.976.000,00	0,00					2.362.748.7	00,00
02.03.2.01	MILIK DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah	aturan Cakupan pencatatan aset daerah				100 %	100 %	2.362.748.700,00	1.336.976.000,00	1.336.976.000,00	-1.025.772.700,00		-	Reformasi Birok dan Pelayanan Publik Berkualita Reformasi Birok dan Pelayanan Publik Berkualita	as rasi	2.362.748.7	00,00 BADAN PENGE KEUAN ASET D
.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	1			1		1						1				
		Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	333.774.200,00	193.581.000,00	193.581.000,00	-140.193.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birok dan Pelayanan Publik Berkualita Reformasi Birok dan Pelayanan Publik Berkualita	as rasi	333.774.2	DO,00 BADAN PENGEL KEUANG ASET D
02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik		<u> </u>			1	T						B	T			20.65
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Da	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	631.393.800,00	351.033.800,00	351.033.800,00	-280.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birok dan Pelayanan Publik Berkualita Reformasi Birok dan Pelayanan Publik Berkualita	as rasi	631.393.8	00,00 BADAN PENGEL KEUANO ASET DA
	Zaray wiin 2d	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	255.077.700,00	166.258.000,00	166.258.000,00	-88.819.700,00	Semua Kota/Kab, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birok dan Pelayanan Publik Berkualita		255.077.7	00,00 BADAN PENGEL KEUANO ASET DA

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN							AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKA
IO KODE	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		D	1.01(1.0)	0,111,055,041,14	PRIC	ORITAS	KELOMPOK SASARAN			DAERAH PENANGGU
	KEGIATAN		OPD	TAHUN 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	JAWAB
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	564.977.000,00	475.977.200,00	475.977.200,00		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			564.977.000,00	BADAN PENGELOLAA KEUANGAN DA ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0010	Ontimalisasi Panggunaan P	 emanfaatan, Pemindahtanganan	Pemusnahan (dan Penghanusar	n Barang Milik Dae	urah									Publik Berkualitas				
3.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Feriggunaan, F	Jumlah Dokumen Hasil	i, Femusiianan, G	uan Fenghapusai	- Barang Willik Dae	1 Dokumen	1 Dokumen	577.526.000,00	150.126.000,00	150.126.000,00	-427.400.000,00	Semua	DANA ALOKASI	_	Reformasi Birokrasi			577.526.000,00	BADAN
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		0.7.1020.000,00				Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.7.1823.833,65	PENGELOLA/ KEUANGAN E ASET DAERA
	BADAN PENDAPATAN DA	ERAH						5.326.291.650,00	4.397.007.100,00	4.218.648.100,00	-1.107.643.550,00							5.858.612.815,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							5.326.291.650,00	4.397.007.100,00	4.218.648.100,00	-1.107.643.550,00							5.858.612.815,00)
5.02	KEUANGAN							5.326.291.650,00	4.397.007.100,00	4.218.648.100,00	-1.107.643.550,00							5.858.612.815,00)
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG	Cakupan Pemenuhan				90 %	90 %	3.406.507.498,00	3.050.289.300,00	·	340.342.750,00							3.746.850.248,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kebutuhan Penunjang Urusan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah						0.103.0011103,00	3.333.233.333,	2.000.000,00	5.00.12.1.03,00							0.1 40.000.2 10,00	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7			2 Dokumen	2 Dokumen	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		13.640.000,00	BADAN PENDAPATAI DAERAH
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perer	 ncanaan Perangkat Daerah																	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.140.000,00	BADAN PENDAPATA DAERAH
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikh	htisar Realisasi h	Kinerja SKPD															
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7			2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	BADAN PENDAPATA DAERAH
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	14 Bulan	2.202.767.700,00	2.222.507.100,00	2.272.907.100,00	70.139.400,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		2.423.044.470,00	BADAN PENDAPATA DAERAH
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjan																		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	2.197.267.700,00	2.217.007.100,00	2.267.407.100,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.416.994.470,00	D BADAN PENDAPATA DAERAH
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD																
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	D			1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	BADAN PENDAPATA DAERAH
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Bulanan/ Triv	wulanan/ Semes	teran SKPD															
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	a			2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Gemua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	BADAN PENDAPATA DAERAH
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan	Analisis Prognosis Realisasi Ang							T	T	T		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 					I	
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.100.000,00	BADAN PENDAPATA DAERAH
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-200.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		330.000.000,00	BADAN PENDAPATA DAERAH
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pe	_ gawai Berdasarkan Tugas dan F	l Fungsi				<u> </u>		I		1					<u> </u>			
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			330.000.000,00	BADAN PENDAPATA DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja				90 %	90 %	462.589.798,00	393.192.200,00	243.192.200,00	-219.397.598,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		508.540.778,00	BADAN PENDAPATA DAERAH
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik k	 Kantor					1								i ublik derkudiitas				1
3.2		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	(1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	E	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			27.500.000,00	BADAN PENDAPATAI DAERAH

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR REPLIONE CAPAIAN	CAPAIAIN					CAPAIAN KINERJA DAN KI	ERANGKA PENDANAAN			- KELOMPOK		MAJU RENCANA IUN 2026	PERANGKAT DAERAH
IO KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 2023	3 OPD TARION	TARGE			PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	SASARAN	TARGET P	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	_		OF D	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL DAERAH				
1 2	3	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 6	7	12 Paket	9 12 Paket	82.107.500,00	85.088.200,00	85.088.200,00	2.980.700,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 PAJAK DAERAH	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	18	19	90.010.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.000	Penyediaan Bahan Bacaan d	dan Peraturan Perundang-undang Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	gan		12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			13.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.00	98 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	12 Laporan	21.104.298,00	21.104.000,00	21.104.000,00	-298,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			23.214.728,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.00	9 Penyelenggaraan Rapat Koo	rdinasi dan Konsultasi SKPD						<u> </u>		1		l				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	322.378.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	-222.378.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			354.615.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			12 unit	12 unit	111.000.000,00	0,00	0,00	-111.000.000,00		- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		122.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07.00			1							Т	<u> </u>	I I	T			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			12 Unit	12 Unit	111.000.000,00	0,00	0,00	-111.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			122.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Ur Da	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 laporan	12 laporan	190.000.000,00	182.540.000,00	182.540.000,00	-7.460.000,00		- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		209.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.00	Penyediaan Jasa Peralatan d	dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			198.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.00	Penyediaan Jasa Pelayanan	Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	-7.460.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			8 unit	8 unit	127.750.000,00	139.650.000,00	139.650.000,00	11.900.000,00		- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		140.525.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.00	· ·	aan, Biaya Pemeliharaan, dan Pa	ajak Kendaraan Perorangan Din			Г					T		T			
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			8 Unit	8 Unit	112.750.000,00	124.650.000,00	124.650.000,00	11.900.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			124.025.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.00	1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sa	arana dan Prasarana Pendukung	Gedung Kantor atau Bangunar								T					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			10 Unit	10 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			16.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2. 5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah			4,26 %	4,26 %	1.919.784.152,00	1.346.717.800,00	1.267.958.800,00	191.978.415,00					2.111.762.567,00	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah			4,26 %	4,26 %	1.919.784.152,00	1.346.717.800,00	1.267.958.800,00	-651.825.352,00		- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		2.111.762.567,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.00	Analisa dan Pengembangan	Pajak Daerah, serta Penyusunan	n Kebijakan Pajak Daerah				1			-						
		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	265.693.000,00	0,00	0,00	-265.693.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			292.262.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.00		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			1 Laporan	1 Laporan	106.045.602,00	97.454.000,00	89.954.000,00	-16.091.602,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			116.650.162,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.000	Pendataan dan Pendaftaran	Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			12 Laporan	12 Laporan	524.887.600,00	108.430.000,00	107.430.000,00	-417.457.600,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			577.376.360,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR REALISAS CAPAIAN	TABOUT DENIA					CAPAIAN KINERJA DAN KI	ERANGKA PENDANAAN					- KELOMPOK		AN MAJU RENCANA FAHUN 2026	PERANGKA DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD TAHUN 202	23 OPD TAHON	TARGE			PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		RIORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGU JAWAB
			OPB	2024	SEBELUM		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	,			NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, d	an Pelaporan Basis Data Pajak	Daerah		401	401	485.410.000,00	188.000.000,00	180.000.000,00	205 440 200 20	Kala Baatata	PAJAK DAERAH		Reformasi Birokrasi			533.951.000,00	BADAN
		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data			12 Laporan	12 Laporan	485.410.000,00	188.000.000,00	180.000.000,00		Barat, Semua Kecamatan,	PAJAK DAEKAN	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas			533.951.000,00	PENDAPATA DAERAH
		Pajak Daerah									Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				DALIVAIT
														Publik Berkualitas				
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	T										1			1	1		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan			12 Dokumen	12 Dokumen	207.479.800,00	158.455.900,00	108.196.900,00		Kab. Pesisir Barat, Semua	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			228.227.780,00	PENDAPATA
		Pajak Daerah									Kecamatan, Semua Kel/Desa			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				DAERAH
														dan Pelayanan Publik Berkualitas				
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan	Pengelolaan Pajak Daerah dan	Retribusi Daerah		•	•	<u>'</u>		-									
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasar			1 Laporan	1 Laporan	250.642.950,00	142.462.500,00	137.462.500,00	-113.180.450,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			275.707.245,00	BADAN PENDAPATA
		Pengelolaan Retribusi Daerah	'								Kecamatan, Semua Kel/Desa			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				DAERAH
		Buorum									Comaa Roy Dooa			dan Pelayanan Publik Berkualitas				
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pem	l erintah Daerah																
		Jumlah Laporan			1 Laporan	1 Laporan	79.625.200,00	651.915.400,00	644.915.400,00	565.290.200,00	Kab. Pesisir	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi			87.587.720,00	BADAN
		Perkembangan Elektronifikasi Transaksi				·					Barat, Semua Kecamatan,			dan Pelayanan Publik Berkualitas				PENDAPATA DAERAH
		Pemerintah Daerah									Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
	DADAW VETTOR VETTOR	N DENOSTIS	In DAYA STATE											Publik Berkualitas				
5		N PENGEMBANGAN SUMBE	K DAYA MANUSIA				3.852.637.800,00	3.834.904.000,00	4.169.811.900,00	317.174.100,00							4.198.919.703,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						3.852.637.800,00	3.834.904.000,00	4.169.811.900,00	317.174.100,00							4.198.919.703,00	
5.03	KEPEGAWAIAN						3.644.107.000,00	3.625.922.000,00	4.003.329.900,00	359.222.900,00							4.034.814.153,00	1
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang			92.50 Persen	92.50 Persen	2.362.664.600,00	2.448.897.000,00	2.448.897.000,00	46.919.231,00							2.409.583.831,00	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah			. 515611	. Graen												
5.03.01.2.01	Perencanaan,	Tercapainya Perencanaan,			10	10	14.399.950,00	14.400.000,00	14.400.000,00	50,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur		15.084.948,00	BADAN
0.00.01.2.01	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	;		Dokumen	Dokumen	1 1.000.000,00		185.1885,88	55,05				dan Pelayanan Publik Berkualitas	, iparata		10.00 110 10,00	KEPEGAWA DAN
		, and, an evaluation												Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				PENGEMBAI SUMBER DA
														Publik Berkualitas				MANUSIA
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Peren														I			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat			2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			7.770.000,00	KEPEGAWA
		Daerah									Kecamatan, Semua Kel/Desa			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				DAN PENGEMBAI
														dan Pelayanan Publik Berkualitas				SUMBER DAY MANUSIA
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan [Dokumen RKA-SKPD								l								
		Jumlah Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			1.540.000,00	BADAN
		RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunar Dokumen RKA-SKPD	ח								Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				KEPEGAWAI DAN PENGEMBAN
		Dokumen RNA-SNPD									Semua Kel/Desa			dan Pelayanan Publik Berkualitas				SUMBER DA
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan [PA-SKPD												1 ublik Berkdalitas				WANGGIA
0.00.01.2.01.0001	Trees and a darry enjaganant	Jumlah Dokumen DPA-SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	499.950,00	500.000,00	500.000,00	50.00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			524.948,00	BADAN
		dan Laporan Hasil Koordinas Penyusunan Dokumen							,		Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas				KEPEGAWAI DAN
		DPÁ-SKPD									Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				PENGEMBAN SUMBER DA
														Publik Berkualitas				MANUSIA
5.03.01.2.01.0006		aporan Capaian Kinerja dan Ikh	ntisar Realisasi Kinerja SKPD									T		1	T			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	i		4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			5.250.000,00	KEPEGAWAI
		Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunar Laporan Capaian Kinerja dan									Kecamatan, Semua Kel/Desa			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				DAN PENGEMBAI SUMBER DA
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<u> </u>											dan Pelayanan Publik Berkualitas				MANUSIA
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan	Tercapainya Administrasi			28 Laporan	28 Lanoran	1.883.137.800,00	2.096.608.000,00	2.096.608.000,00	213.470.200,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur		1.977.294.690,00	BADAN
3.00.01.2.02	Perangkat Daerah	Keuangan Perangkat Daerah			Lupuidii	_o Euporan	1.000.107.000,00	2.550.000.000,00	2.000.000.000,00	213.770.200,00				dan Pelayanan Publik Berkualitas	, paratul		1.577.294.090,00	KEPEGAWAI DAN
														Reformasi Birokrasi dan Pelavanan				PENGEMBAN SUMBER DA
														Publik Berkualitas				MANUSIA
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjang				T				1	Т		T_		1.				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan			14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	1.877.637.800,00	2.091.108.000,00	2.091.108.000,00		Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			1.971.519.690,00	KEPEGAWA
		Tunjangan ASN									Kecamatan, Semua Kel/Desa			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				DAN PENGEMBA
														dan Pelayanan Publik Berkualitas				SUMBER DA MANUSIA
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan I	aporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD				I					•	•	•				
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan			1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			2.625.000,00	BADAN KEPEGAWA
		Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan									Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				DAN PENGEMBA
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPL									Johna Nel/Desa			dan Pelayanan Publik Berkualitas				SUMBER DA
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan I	 .aporan Keuangan Bulanan/ Triv	wulanan/ Semesteran SKPD											. John Dorndanias				
5.55.51.2.02.0007	. 1997 ann aon aon i Griyusurian L	Jumlah Laporan Keuangan	- January Comodician SICFD		12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0.00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			2.100.000,00	BADAN
		Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan			Laporan	Lapoidii	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.100.000,00	KEPEGAWA DAN
		Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan									Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				PENGEMBAI SUMBER DA
		Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	a											Publik Berkualitas				MANUSIA
5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan A	nalisis Prognosis Realisasi Ang	ggaran													<u> </u>	<u> </u>	
	,	Jumlah Dokumen Pelaporan			1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0.00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			1.050.000,00	BADAN
		dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas			33333,30	KEPEGAWAI DAN
		·	i I	ı 1							Semua Kel/Desa	1		Reformasi Birokrasi	1			PENGEMBAI
											Ocinida New Desa			dan Pelayanan Publik Berkualitas				SUMBER DA MANUSIA

O KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE REALISASI CAPAIAN PERIODE REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK		MAJU RENCANA HUN 2026	PERANGKAT DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENSTRA OPD TAHUN 2023	OPD TAHUN	TARGI SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PAGU INDIKATIF (Rp) APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL DAE	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1 2	3	4	5 6	7	8 SEBELUM	SESUDAH 9	10 RKPD 2025	11	12	13	14	15		7 18	19	20	21
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1	I Orang	1 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00		10	- Reformasi dan Pelay: Publik Ber Reformasi dan Pelay: Publik Ber	Birokrasi Aparatur anan kualitas Birokrasi		0,00	
5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pe	gawai Berdasarkan Tugas dan Fu Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ungsi	1	l Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	Ba Ke	ab. Pesisir arat, Semua ecamatan, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi dan Pelaya Publik Ber Reformasi dan Pelaya Publik Ber	anan kualitas Birokrasi anan		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah			56 Dokumen	56 Dokumen	239.056.850,00	160.469.000,00	160.469.000,00	-78.587.850,00			- Reformasi dan Pelaya Publik Ber Reformasi dan Pelaya Publik Ber	anan kualitas Birokrasi anan		251.009.693,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik K	antor											<u> </u>				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1	l Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Ke	ab. Pesisir arat, Semua ecamatan, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi dan Pelaya Publik Ber Reformasi dan Pelaya Publik Ber	anan kualitas Birokrasi anan		26.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	I2 Paket	12 Paket	43.582.500,00	40.469.000,00	40.469.000,00	Ke	ab. Pesisir arat, Semua ecamatan, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi dan Pelayi Publik Ber Reformasi dan Pelayi Publik Ber	anan kualitas Birokrasi anan		45.761.625,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan d	an Peraturan Perundang-undang Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	an	1	IO Dokumen	10 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Ke	ab. Pesisir arat, Semua ecamatan, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi dan Pelay: Publik Ber Reformasi dan Pelay:	anan kualitas Birokrasi		12.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA SUMBER DAYA
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												Publik Ber	kualitas			MANUSIA
3.03.01.2.00.0000	r asınası Kunjungan Famu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1	I1 Laporan	11 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Ke	ab. Pesisir arat, Semua ecamatan, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi dan Pelay: Publik Ber Reformasi dan Pelay: Publik Ber	anan kualitas Birokrasi anan		11.550.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koo	rdinasi dan Konsultasi SKPD										1					
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	12 Laporan	12 Laporan	147.474.350,00	72.000.000,00	72.000.000,00	Ke	ab. Pesisir arat, Semua ecamatan, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi dan Pelayi Publik Ber Reformasi dan Pelayi Publik Ber	anan kualitas Birokrasi anan		154.848.068,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah		4	4 Unit	4 Unit	60.980.000,00	0,00	0,00	-60.980.000,00			- Reformasi dan Pelaya Publik Ber Reformasi dan Pelaya Publik Ber	anan kualitas Birokrasi anan		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Me	esin Lainnya															
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4	4 Unit	0 Unit	60.980.000,00	0,00	0,00	Ke	ab. Pesisir arat, Semua ecamatan, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi dan Pelay: Publik Ber Reformasi dan Pelay: Publik Ber	anan kualitas Birokrasi anan		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANG, SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang		1	12 Laporan	12 Laporan	67.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	65.000.000,00			- Reformasi dan Pelaya Publik Ber Reformasi dan Pelaya Publik Ber	kualitas Birokrasi		73.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANG, SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan d	an Perlengkapan Kantor															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	12 Laporan	12 Laporan	67.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	Ke	ab. Pesisir arat, Semua ecamatan, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi dan Pelaya Publik Ber Reformasi dan Pelaya Publik Ber	anan kualitas Birokrasi anan		73.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANG/ SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		1	14 Unit	14 Unit	88.090.000,00	45.420.000,00	45.420.000,00	-42.670.000,00			- Reformasi dan Pelayi Publik Ber Reformasi dan Pelayi Publik Ber	anan kualitas Birokrasi anan		92.494.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANG/ SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemelihara	an, Biaya Pemeliharaan, dan Paj	ak Kendaraan Perorangan Dina	T T													
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		2	2 Unit	1 Unit	79.570.000,00	36.900.000,00	36.900.000,00	Ke	ab. Pesisir arat, Semua ecamatan, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi dan Pelay: Publik Ber Reformasi dan Pelay: Publik Ber	anan kualitas Birokrasi anan		83.548.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan	Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1	12 Unit	12 Unit	8.520.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00	Ke	ab. Pesisir arat, Semua ecamatan, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi dan Pelaya Publik Ber Reformasi	anan kualitas Birokrasi		8.946.000,00	KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA
2. 5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian			75.38 Persen	75.38 Persen	1.281.442.400,00	1.177.025.000,00	1.554.432.900,00	343.787.922,00			dan Pelaya Publik Ber	anan kualitas		1.625.230.322,00	SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tercapainya Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN		g	O Dokumen	9 Dokumen	650.564.550,00	583.818.600,00	405.280.500,00	-245.284.050,00			- Reformasi dan Pelayi Publik Ber Reformasi dan Pelayi Publik Ber	Birokrasi anan		683.092.778,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA SUMBER DAYA MANUSIA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN				CAPAIAN KINERJA DAN	KEKANGKA PENDANAAN				KELOMPOK		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANG DAERA
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA		ORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGO
			OPD		2024	SEBELUM SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8 9	10	11	12	13 14	15	16	17	18	19	20	2
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi				2 Dokumen 2 Dokumen	548.952.900,00	431.835.700,00	278.797.600,00	-270.155.300,00 Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			576.400.545,00	KEPEGAW
		Pengadaan PNS dan PPPK								Kecamatan, Semua Kel/De	sa		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				DAN PENGEME
													dan Pelayanan Publik Berkualitas				SUMBER D MANUSIA
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Adm	inistrasi	<u> </u>														
	Pemberhentian																
		Jumlah Dokumen Hasil				2 Dokumen 2 Dokumen	23.824.200,00	23.823.900,00	16.823.900,00	-7.000.300,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			25.015.410,00	BADAN
		kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi								Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas				KEPEGAW DAN
		Pemberhentian								Semua Kel/De	sa		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				PENGEMB. SUMBER D
													Publik Berkualitas				MANUSIA
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi AS											I			1		
		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga 1 Lembaga	42.819.000,00	42.211.000,00	34.711.000,00	-8.108.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			44.959.950,00	BADAN KEPEGAW
										Kecamatan, Semua Kel/De	sa		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				DAN PENGEME
													dan Pelayanan Publik Berkualitas				SUMBER I
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informas	I i Kepegawaian															
	0	Jumlah Dokumen Hasil				2 Dokumen 2 Dokumen	20.779.150,00	71.759.000,00	70.759.000,00	49.979.850,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			21.818.108,00	BADAN
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian					20.170.100,00		7 511 551.555,55	Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas			21.0101100,00	KEPEGAW DAN
		miornidor repogawaian								Semua Kel/De	sa		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				PENGEMB SUMBER D
													Publik Berkualitas				MANUSIA
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawa	an															
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data				2 Dokumen 2 Dokumen	14.189.300,00	14.189.000,00	4.189.000,00	-10.000.300,00 Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi			14.898.765,00	BADAN KEPEGAW
		Kepegawaian								Kecamatan, Semua Kel/De	, ,		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				DAN PENGEMBA
										Semua Kel/De	sa		dan Pelayanan				SUMBER D
													Publik Berkualitas				MANUSIA
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Tercapainya Mutasi dan Promosi ASN				3 Dokumen 3 Dokumen	422.613.200,00	424.814.000,00	1.021.760.000,00	599.146.800,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur		723.459.660,00	KEPEGAWA
													Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				DAN PENGEMBA
													dan Pelayanan Publik Berkualitas				SUMBER D. MANUSIA
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	1	1						L		L	<u> </u>		1			
		Jumlah Dokumen Hasil				2 Dokumen 3 Dokumen	72.613.200,00	424.814.000,00	405.364.000,00	332.750.800,00 Semua	DANA ALOKASI	_	Reformasi Birokrasi			76.243.860,00	BADAN
		Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan					·	·	,	Kota/Kab, Semua	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas			,	KEPEGAW/ DAN
		Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN								Kecamatan, Semua Kel/De	sa		Reformasi Birokrasi				PENGEMBA SUMBER D
		antar Daerah								Semua New De	sa		dan Pelayanan Publik Berkualitas				MANUSIA
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen 1 Dokumen	350.000.000,00	0,00	616.396.000,00	266.396.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi			647.215.800,00	BADAN KEPEGAWA
		Pengelolaan Promosi ASN								Kecamatan,			dan Pelayanan Publik Berkualitas				DAN
										Semua Kel/De	sa		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				PENGEMBA SUMBER DA
																	MANUSIA
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tercapainya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1005 Orang 1005 Orang	208.264.650,00	168.392.400,00	127.392.400,00	-80.872.250,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur		218.677.884,00	KEPEGAWA
													Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				DAN PENGEMBA
													dan Pelayanan Publik Berkualitas				SUMBER DA MANUSIA
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan	L Evaluasi Kinerja Aparatur	1								L	I		l			
		Jumlah Dokumen Hasil				2 Laporan 2 Laporan	79.586.850,00	40.785.000,00	40.785.000,00	-38.801.850,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			83.566.193,00	BADAN
		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					,	·	,	Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas			,	KEPEGAWA DAN
										Semua Kel/De	sa		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				PENGEMBA SUMBER D
													Publik Berkualitas				MANUSIA
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Peng	hargaan bagi Pegawai													_		
		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				1000 Orang 1000 Orang	95.825.750,00	95.825.400,00	70.825.400,00	-25.000.350,00 Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			100.617.038,00	BADAN KEPEGAW
		r original gaari								Kecamatan, Semua Kel/De	, ,		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				DAN PENGEMBA
										Semua Kel/De	Sa		dan Pelayanan Publik Berkualitas				SUMBER D MANUSIA
5 00 00 0 04 0007	Deschipens Disiplin ACM												Publik Berkualitas				MANUSIA
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	handal 1000				50		<u></u>		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	BANK 11 TO 11		Data termina				BASSIE
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan				5 Orang 5 Orang	32.852.050,00	31.782.000,00	15.782.000,00	Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			34.494.653,00	KEPEGAWA
		Kedisiplinan								Kecamatan, Semua Kel/De	sa		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				DAN PENGEMBA
													dan Pelayanan Publik Berkualitas				SUMBER D MANUSIA
5.04	PENDIDIKAN DAN						208.530.800,00	208.982.000,00	166.482.000,00	-42.048.800,00						164.105.550,00	
	PELATIHAN																
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase Pejabat ASN telah yang mengikuti				22.64 Persen Persen	208.530.800,00	208.982.000,00	166.482.000,00	-44.425.250,00						164.105.550,00	
	SUMBER DAYA MANUSIA	Pelatihan Kepemimpinan				. 5.5611											
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi	Terlaksananya				40 Orang 40 Orang	52.239.800,00	0,00	0,00	-52.239.800,00		-	Reformasi Birokrasi	Aparatur		0,00	BADAN
	Teknis	Pengembangan Kompetensi Teknis											dan Pelayanan Publik Berkualitas				KEPEGAW, DAN
													Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				PENGEMBA SUMBER D
									<u> </u>				Publik Berkualitas				MANUSIA
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengemba	-	Inti, dan Piliha	n bagi Jabatan Adr	ministrasi Penyeler	nggara Urusan Pemerintahan Ko				,							
		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				40 Orang 0 Orang	52.239.800,00	0,00	0,00	Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			0,00	BADAN KEPEGAW
										Kecamatan, Semua Kel/De	, ,		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				DAN PENGEMB
										Scilida Nei/De			dan Pelayanan Publik Berkualitas				SUMBER D
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan,	Tercapainya Sertifikasi,				1 I anoran 1 I anoran	156.291.000,00	208.982.000,00	166.482.000,00	10.191.000,00			Reformasi Birokrasi	Aparatur		164.105.550,00	
J.04.02.2.02	Pengembangan Kompetensi	Kelembagaan,				1 Laporan 1 Laporan	130.291.000,00	200.982.000,00	100.482.000,00	10.191.000,00		_	dan Pelayanan	Aparatui		104.105.550,00	KEPEGAW
	Manajerial dan Fungsional	Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional											Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				DAN PENGEMBA
													dan Pelayanan Publik Berkualitas				SUMBER D MANUSIA
1												<u> </u>					_

		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGK. DAERAH
KOI	DE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGU JAWAB
				OPD		2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL DAERAH				
2	2	3	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5	6	7	1 Laporan	9 2 Laporan	10 156.291.000,00	208.982.000,00	12 166.482.000,00	13 10.191.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	18	19	20 164.105.550,00	BADAN KEPEGAWAI DAN PENGEMBAN SUMBER DA MANUSIA
		INSPEKTORAT							6.420.695.300,00	7.773.167.300,00	7.567.631.950,00	1.146.936.650,00						7.058.143.230,00	
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							6.420.695.300,00	7.773.167.300,00	7.567.631.950,00	1.146.936.650,00						7.058.143.230,00	
6.01		INSPEKTORAT DAERAH							6.420.695.300,00	7.773.167.300,00	7.567.631.950,00	1.146.936.650,00						7.058.143.230,00	
6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	4.540.485.900,00	5.980.999.800,00	6.352.549.800,00	449.426.990,00						4.989.912.890,00	
6.01.01.2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselesaikannya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	6.716.000,00	6.716.000,00	6.716.000,00	0,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		6.716.000,00	INSPEKTOR
6.01.01.2.0	01.0001	Penyusunan Dokumen Peren	T -						4.740.000.00	47400000	4 740 000 00		Tu. 5		12, .2.		<u> </u>	17100000	NIODELITO I
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.716.000,00	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.716.000,00	INSPEKTOR
6.01.01.2.0	01.0006	Koordinasi dan Penyusunan L	⊥ Laporan Capaian Kinerja dan Ikh	itisar Realisasi k	Kinerja SKPD				<u> </u>		1				<u> </u>				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	INSPEKTOR
6.01.01.2.0	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselesaikannya Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	3.252.870.900,00	4.778.667.300,00	5.292.467.300,00	2.039.596.400,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		3.577.607.990,00	INSPEKTOR
6.01.01.2.0	02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjang	T			1		T T										1	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/b ulan	35 Orang/b ulan	3.247.370.900,00	4.773.167.300,00	5.286.967.300,00	2.039.596.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.572.107.990,00	INSPEKTOR
6.01.01.2.0	02.0005	Koordinasi dan Penyusunan L	aporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD T			1	1					T	T	1			T	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD)			1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	INSPEKTOR
6.01.01.2.0	02.0007	Koordinasi dan Penyusunan L	∟aporan Keuangan Bulanan/ Triv T	vulanan/ Semes	steran SKPD	1	1	T T								1		1	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	INSPEKTOR
6.01.01.2.0	02.0008	Penyusunan Pelaporan dan A	nalisis Prognosis Realisasi Ango	garan T									T -		1			1	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	INSPEKTOR
6.01.01.2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya aparatur yg berkinerja baik				100 %	100 %	245.520.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-145.520.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		270.072.000,00	INSPEKTO
6.01.01.2.0	05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Peg	gawai Berdasarkan Tugas dan F Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ungsi			18 Orang	18 Orang	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			220.000.000,00	INSPEKTOR
6.01.01.2.0	05.0011	Bimbingan Teknis Implementa		gan							I							1	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	35 Orang	45.520.000,00	0,00	0,00	-45.520.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.072.000,00	INSPEKTOR
6.01.01.2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				100 %	100 %	429.599.000,00	476.446.500,00	334.196.500,00	-95.402.500,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		469.158.900,00	INSPEKTO
6.01.01.2.0	06.0001	Penyediaan Komponen Instal	l asi				1	1							1				
		Listrik/Penerangan Bangunan	T	1		I	T	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	r	-			T	1	ı				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.599.000,00	5.599.000,00	5.599.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.158.900,00	INSPEKTOR

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN		,			CAPAIAN KINERJA DAN I	KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
NO KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	PRI	ORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUN JAWAB
					2024	SEBELUM		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	<u> </u>		NASIONAL	DAERAH				
1 2	3	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	6	7	12 Paket	9 12 Paket	120.000.000,00	1122.347.500,00	12 122.347.500,00	2.347.500,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- 16	17 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	18	19	132.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan d	an Peraturan Perundang-undang	gan								Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
		Jumlah Dokumen Bahan				12	12	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			12.000.000,00	INSPEKTORAT
		Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				Dokumen	Dokumen				Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					1	T T			I		T T		1		T	1	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			22.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koor	rdinasi dan Konsultasi SKPD						<u>'</u>										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	8 Laporan	270.000.000,00	314.500.000,00	172.250.000,00	-97.750.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			297.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya pemenuhan Prasarana dan prasarana pendukung kinerja				100 %	100 %	130.980.000,00	190.830.000,00	190.830.000,00	59.850.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		144.078.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.980.000,00	5.430.000,00	5.430.000,00	-5.550.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.078.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Me	esin Lainnya																
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	22 Unit	120.000.000,00	185.400.000,00	185.400.000,00	65.400.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			132.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Persentase pemenuhan Layanan Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	320.000.000,00	285.040.000,00	285.040.000,00	-34.960.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		352.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan d	an Perlengkapan Kantor																
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan				12 Laporan	12 Laporan	280.000.000,00	255.000.000,00	255.000.000,00	-25.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			308.000.000,00	INSPEKTORAT
0.04.04.0.00.0004		Perlengkapan Kantor yang Disediakan									Kecamatan, Semua Kel/Desa			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan					12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	30.040.000,00	30.040.000,00	-9.960.000,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			44.000.000.00	INSPEKTORAT
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Euporain	12 Eaporair	40.000.000,00	30.040.000,00	00.040.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			44.000.000,00	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dalam kondisi baik				100 %	100 %	154.800.000,00	143.300.000,00	143.300.000,00	-11.500.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		170.280.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemelihara	an, Biaya Pemeliharaan, dan Pa	jak Kendaraan F	Perorangan Dinas	atau Kendaraan D	Dinas Jabatan												
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.800.000,00	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			43.780.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemelihara	an, Biaya Pemeliharaan, Pajak d	lan Perizinan Ke	ndaraan Dinas Op	perasional atau La	apangan					1							
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	88.500.000,00	96.400.000,00	96.400.000,00	7.900.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			97.350.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan	Mesin Lainnya																
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	28 Unit	26.500.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	-19.400.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			29.150.000,00	INSPEKTORAT
2. 6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	cakupan konsistensi perencanan,pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran terhadap kepatuhan peraturan peundang- undangan				100 %	100 %	1.350.000.000,00	1.274.112.000,00	855.476.650,00	135.000.000,00						1.485.000.000,00	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tercapainya konsistensi perencanan,pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran terhadap kepatuhan peraturan peundang- undangan				100 %	100 %	990.000.000,00	870.162.000,00	607.946.050,00	-382.053.950,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		1.089.000.000,00	INSPEKTORAT

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN I	KERANGKA PENDANAAN				VELOUDOL:		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGK
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bartania Bartana (40.40)	OUMPED DAMA	PRIC	DRITAS	KELOMPOK SASARAN	TAROFT	DAGU INDUKATIF (D.:)	DAERAH PENANGGU
	KEGIATAN		OPD	TAHUN 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	JAWA
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah Laporan Hasil				25 Laporan	16 Laporan	180.000.000,00	170.000.000,00	147.034.050,00	-32.965.950,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			198.000.000,00	INSPEKTOR
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah									Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas				
											Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
														Publik Berkualitas				
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Peme									T		1	T	T		1	T	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan				110 Laporan	60 Laporan	210.000.000,00	145.960.000,00	80.460.000,00	-129.540.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			231.000.000,00	INSPEKTOR
		Pemerintah Daerah									Kecamatan, Semua Kel/Desa			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				
														dan Pelayanan Publik Berkualitas				
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja										l l							
0.0.11021210110000	Trona Zaporam ranonja	Jumlah Laporan Hasil Reviu				3 Laporan	2 Laporan	80.000.000,00	53.960.000,00	38.010.000,00	-41.990.000,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	1_	Reformasi Birokrasi			88.000.000,00	INSPEKTOR
		Laporan Kinerja				Caporan	2 Euporum	30.000.000,00	30.000.000,00	00.010.000,00	Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas			35.555.555,55	IIIO EIIIOI
											Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
														Publik Berkualitas				
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan					•												
		Jumlah Laporan Hasil Reviu				8 Laporan	6 Laporan	80.000.000,00	84.100.000,00	51.600.000,00	-28.400.000,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			88.000.000,00	INSPEKTOR
		Laporan Keuangan									Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas				
											Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
														Publik Berkualitas				
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa		_							_		_				_		
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				40 Laporan	21 Laporan	160.000.000,00	139.932.000,00	79.932.000,00	-80.068.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			176.000.000,00	INSPEKTOR
		7 ongawasan 200a									Kecamatan, Semua Kel/Desa			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				
											Selliud Rev Desa			dan Pelayanan Publik Berkualitas				
														Publik Berkualitas				
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Inte									T		I	T	T		T	I	
		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang				2 Kesepaka tan	2 Kesepaka tan	60.000.000,00	69.710.000,00	59.710.000,00	-290.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			66.000.000,00	INSPEKTOR
		Terbentuk									Kecamatan, Semua Kel/Desa			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				
														dan Pelayanan Publik Berkualitas				
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tinda	k I aniut Hasil Pemeriksaan RP	│ K RI dan Tindal	k I aniut Hasil Pem	neriksaan APIP						<u> </u>							
0.01.02.2.01.0007	Worldowing dan Evaluasi Tinde	Jumlah Dokumen Hasil	Terri dan Tindai	K Lanjat Hasii T Ciri	ioniksaan Ai n	12	6 Dokumen	220.000.000,00	206.500.000,00	151.200.000,00	-68.800.000,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	1_	Reformasi Birokrasi			242.000.000,00	INSPEKTOR
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil				Dokumen	o bokumen	220.000.000,00	200.300.000,00	131.200.000,00	Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas			242.000.000,00	INSPERTOR
		Pemeriksaan BPK RI dan									Semua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi				
		Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP												dan Pelayanan Publik Berkualitas				
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan	Tercapainya konsistensi				100 %	100 %	360.000.000,00	403.950.000,00	247.530.600,00	-112.469.400,00		Memperkuat		Aparatur		396.000.000,00	INSPEKTOR
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	perencanan,pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan											reformasi politik, hukum dan birokrasi,	dan Pelayanan Publik Berkualitas				
		anggaran terhadap kepatuhan peraturan											serta memperkuat pencegahan dan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
		peundang- undangan											pemberantasan korupsi, narkoba,	Publik Berkualitas				
													judi, dan penyeludupan.					
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Ke	rugion											periyeldddpari.					
	Negara/Daerah	rugian																
	Negara/Daeran	humalah Lamanan				41	0100000	150.000.000,00	148.800.000,00	00.450.000.00	-50.550.000,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	Maranadiust	Reformasi Birokrasi			165.000.000,00	INCREKTOR
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian				4 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	148.800.000,00	99.450.000,00	Barat, Semua	UMUM (DAU)	reformasi politik,	dan Pelayanan			165.000.000,00	INSPERTORA
		Negara/Daerah yang Ditangani									Kecamatan, Semua Kel/Desa		hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				
													pencegahan dan pemberantasan	dan Pelayanan Publik Berkualitas				
													korupsi, narkoba, judi, dan					
													penyeludupan.					
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan									T		T	1	1				
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan				20 Laporan	10 Laporan	210.000.000,00	255.150.000,00	148.080.600,00	-61.919.400,00 Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik,	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			231.000.000,00	INSPEKTOR/
		Tertentu									Kecamatan, Semua Kel/Desa		hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				
											Gerrida Rembesa		pencegahan dan pemberantasan	dan Pelayanan Publik Berkualitas				
													korupsi, narkoba,	Publik Berkualilas				
													judi, dan penyeludupan.					
	PROGRAM PERUMUSAN	cakupan konsistensi				100 %	100 %	530.209.400,00	518.055.500,00	359.605.500,00	53.020.940,00						583.230.340,00	
	KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN	perumasan kebijakan, pendampingan dan																
	ASISTENSI	asistensi terhadap kepatuhan peraturan																
		peundang-undangan																
\rightarrow		Tercapainya konsistensi perumusan kebijakan teknis				100 %	100 %	120.000.000,00	123.737.000,00	72.437.000,00	-47.563.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur		132.000.000,00	INSPEKTORA
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis	i Derumusan kebhakan lekins												Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				
	di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	terhadap kepatuhan												dan Pelayanan				
	di Bidang Pengawasan dan	terhadap kepatuhan peraturan peundang-undangan												Publik Berkualitas				
	di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	terhadap kepatuhan peraturan peundang-undangan								1		D				1		
	di Bidang Pengawasan dan	terhadap kepatuhan peraturan peundang-undangan di Bidang Pengawasan					T ·	_			-15.420.000,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	I -	Reformasi Birokrasi			_	
	di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	terhadap kepatuhan peraturan peundang-undangan di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang				3 Rekomen dasi	2 Rekomen dasi	60.000.000,00	74.580.000,00	44.580.000,00	Barat, Semua	UMUM (DAU)		dan Pelayanan			66.000.000,00	INSPEKTOR
	di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	terhadap kepatuhan peraturan peundang-undangan di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi						60.000.000,00	74.580.000,00	44.580.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi			66.000.000,00	INSPEKTORA
	di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	terhadap kepatuhan peraturan peundang-undangan di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang						60.000.000,00	74.580.000,00	44.580.000,00	Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		Publik Berkualitas			66.000.000,00	INSPEKTOR
6.01.03.2.01.0001	di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis	terhadap kepatuhan peraturan peundang-undangan di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	n					60.000.000,00	74.580.000,00	44.580.000,00	Barat, Semua Kecamatan,	UMUM (DAU)		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			66.000.000,00	INSPEKTOR
6.01.03.2.01.0001	di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	terhadap kepatuhan peraturan peundang-undangan di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun di Bidang Fasilitasi Pengawasa	n			dasi	dasi				Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
6.01.03.2.01.0001	di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis	terhadap kepatuhan peraturan peundang-undangan di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun di Bidang Fasilitasi Pengawasa Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang	n					60.000.000,00	74.580.000,00 49.157.000,00	27.857.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa -32.143.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			66.000.000,00	
6.01.03.2.01.0001	di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis	terhadap kepatuhan peraturan peundang-undangan di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun di Bidang Fasilitasi Pengawasa Jumlah Rekomendasi	n			dasi 3 Rekomen	dasi 2 Rekomen				Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	-	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				
6.01.03.2.01.0001	di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis	terhadap kepatuhan peraturan peundang-undangan di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun di Bidang Fasilitasi Pengawasa Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang	n			dasi 3 Rekomen	dasi 2 Rekomen				Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa -32.143.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI	-	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
6.01.03.2.01.0001 6.01.03.2.01.0002	di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis	terhadap kepatuhan peraturan peundang-undangan di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun di Bidang Fasilitasi Pengawasa Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun Tercapainya konsistensi	n			dasi 3 Rekomen	dasi 2 Rekomen				Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa -32.143.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI	- Memperkuat	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi	Aparatur			INSPEKTOR.
6.01.03.2.01.0001 6.01.03.2.01.0002	di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis Perumusan Kebijakan Teknis	terhadap kepatuhan peraturan peundang-undangan di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun di Bidang Fasilitasi Pengawasa Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun Tercapainya konsistensi perumusan kebijakan teknis	n			dasi 3 Rekomen dasi	2 Rekomen dasi	60.000.000,00	49.157.000,00	27.857.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa -32.143.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	reformasi politik, hukum dan birokrasi.	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		66.000.000,00	INSPEKTORA
6.01.03.2.01.0001 6.01.03.2.01.0002	di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis Perumusan Kebijakan Teknis	terhadap kepatuhan peraturan peundang-undangan di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun di Bidang Fasilitasi Pengawasa Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun Tercapainya konsistensi perumusan kebijakan teknis terhadap kepatuhan peraturan	n			dasi 3 Rekomen dasi	2 Rekomen dasi	60.000.000,00	49.157.000,00	27.857.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa -32.143.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi	Aparatur		66.000.000,00	INSPEKTORA
6.01.03.2.01.0001 6.01.03.2.01.0002	di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis Perumusan Kebijakan Teknis	terhadap kepatuhan peraturan peundang-undangan di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun di Bidang Fasilitasi Pengawasa Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun Tercapainya konsistensi perumusan kebijakan teknis terhadap kepatuhan	n			dasi 3 Rekomen dasi	2 Rekomen dasi	60.000.000,00	49.157.000,00	27.857.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa -32.143.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	reformasi politik, hukum dan birokrasi.	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		66.000.000,00	INSPEKTOR

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	AVUIL CAL	RALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKA DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENJ	JA OPD UN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024		GET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)	T	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		RIORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUN JAWAB
2	3	4	F	6	7	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	42	14	45	NASIONAL	DAERAH	40	10	20	24
5.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi I	4	5	Ь	/	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0.01.03.2.02.0001	rendampingan dan Asistensi (Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	j			39 perangkat daerah	28 perangkat daerah	170.209.400,00	190.480.000,00	136.830.000,00	-33.379.400,00	0 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			187.230.340,00	INSPEKTORA
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Ver	l ifikasi, dan Penilaian Reformasi	i Birokrasi																
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				3 perangkat daerah	t 2 perangkat daerah	60.000.000,00	41.257.000,00	24.757.000,00	-35.243.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			66.000.000,00	INSPEKTORA
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Eva	aluasi serta Verifikasi Pencegal	han dan Pemberantasan	n Korupsi															
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				12 Kegiatan	8 Kegiatan	120.000.000,00	121.024.000,00	91.024.000,00	-28.976.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.				132.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan	Verifikasi Penegakan Integritas	5							_			_					_	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				39 perangkat daerah	39 perangkat daerah	60.000.000,00	41.557.500,00	34.557.500,00	-25.442.500,00	0 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokras serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			66.000.000,00	INSPEKTORAT
	KECAMATAN BANGKUNAT							835.700.000,00	874.600.000,00	874.600.000,00	38.900.000,00	0						835.700.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN							835.700.000,00	874.600.000,00	874.600.000,00	38.900.000,00	0						835.700.000,00	
7.01	KECAMATAN							835.700.000,00	874.600.000,00	874.600.000,00	38.900.000,00	0						835.700.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah				90 %	90 %	789.545.900,00	828.445.900,00	828.445.900,00	0,00	0						789.545.900,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	ť			100 %	100 %	4.999.750,00	4.999.750,00	4.999.750,00	0,00	0		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		4.999.750,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan L	aporan Capaian Kinerja dan Ikh	ntisar Realisasi Kinerja S	SKPD						•									
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7			1 Laporan	1 Laporan	4.999.750,00	4.999.750,00	4.999.750,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.999.750,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	511.199.500,00	550.099.500,00	550.099.500,00	38.900.000,00	0		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		511.199.500,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjanga	an ASN																	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	505.700.000,00	544.600.000,00	544.600.000,00	38.900.000,00	0 Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			505.700.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan L		SKPD	T			T			T	T		T	T	T				
70404000000		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.499.950,00	2.499.950,00	2.499.950,00	0,00	0 Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.499.950,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan L	aporan Keuangan Bulanan/ Triv Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD		ארט		2 Laporan	2 Laporan	1.999.850,00	1.999.850,00	1.999.850,00	0,00	0 Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.999.850,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan A	nalisis Prognosis Realisasi Ang								1	1								+
	,	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	999.700,00	999.700,00	999.700,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			999.700,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja				100 %	100 %	183.031.150,00	183.031.150,00	183.031.150,00	0,00	0		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		183.031.150,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instala	si																	
	Listrik/Penerangan Bangunan		1	Γ			1			1	T	<u> </u>		T				_	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.918.500,00	9.918.500,00	9.918.500,00	0,00	0 Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			9.918.500,00	KECAMATAN BANGKUNAT

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR CAPAIAN	CAFAIAIN					CAPAIAN KINERJA DAN KER	RANGKA PENDANAAN			KELOMPOK	PRAKIRAAN MA TAHUN	AJU RENCANA N 2026	PERANGKAT DAERAH
NO KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 202	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	IANG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	SASARAN	TARGET PAG	GU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1 2	2	4	5 6	7	SEBELUM	SESUDAH	10 RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	13 14	15	NASIONAL DAERAH 16 17	18	19	20	21
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Pe	-	5 6	/	8	9	10	11	12	13 14	15	16 17	18	19	20	21
71011011210013332	r onyourant i orania arriva	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	26.261.650,00	26.261.650,00	26.261.650,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			26.261.650,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik K	antor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	24.300.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.300.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	dan Penggandaan										T ubilit bolitualitud				
	, ,	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	32.551.000,00	32.551.000,00	32.551.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			32.551.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan da	an Peraturan Perundang-undang	gan								1					
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			11 Laporan	11 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			18.000.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koor	dinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			60.000.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung			100 %	100 %	28.815.500,00	28.815.500,00	28.815.500,00	0,00		- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		28.815.500,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Meny	urat						1								
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	4.507.500,00	4.507.500,00	4.507.500,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.507.500,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi	, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.000.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan d	T .			1	T., T					T		T			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan			1 Laporan	1 Laporan	8.308.000,00	8.308.000,00	8.308.000,00	0,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	- Reformasi Birokrasi			8.308.000,00	KECAMATAN
		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Г Сароган	Г Сароган	8.306.000,00	8.506.000,00	8.508.000,00	Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.306.000,00	BANGKUNAT
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam Kondisi Baik			100 %	100 %	61.500.000,00	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00		- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		61.500.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemelihara	an, Biaya Pemeliharaan, dan Paj	jak Kendaraan Perorangan Din	as atau Kendaraan D	Dinas Jabatan											
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			4 Unit	4 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			35.000.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Ge	dung Kantor dan Bangunan Lair Jumlah Gedung Kantor dan	nnya		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	- Reformasi Birokrasi			20.000.000,00	KECAMATAN
		Jumian Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	BANGKUNAT
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sa	rana dan Prasarana Gedung Kar	ntor atau Bangunan Lainnya			T				T	I	T	<u> </u>			
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.500.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
2. 7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100 %	100 %	46.154.100,00	46.154.100,00	46.154.100,00	0,00					46.154.100,00	

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN KE	RANGKA PENDANAAN					- KELOMPOK	PRAKIRAA T	AN MAJU RENCANA AHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
O KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	RENJA OPD TAHUN 2023	OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12) L	LOKASI SI	UMBER DANA	PR	IORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	1		OPD		2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	46.154.100,00	46.154.100,00	46.154.100,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		46.154.100,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan													Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
	Recamatan														Publik Berkualitas				
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegia	an Pemerintahan di Tingkat Kec	camatan			1				1	1				1	T	T		
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas				1 Dokumen	1 Dokumen	46.154.100,00	46.154.100,00	46.154.100,00	0,00 Kab. Barat	t, UI	ANA ALOKASI MUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			46.154.100,00	KECAMATAN BANGKUNAT
		Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									Bang Semu	gkunat, ua Kel/Desa			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				
															dan Pelayanan Publik Berkualitas				
	KECAMATAN NGARAS							801.900.000,00	1.163.400.000,00	1.163.400.000,00	361.500.000,00	,						801.900.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN							801.900.000,00	1.163.400.000,00	1.163.400.000,00	361.500.000,00							801.900.000,00)
7.01	KECAMATAN							801.900.000,00	1.163.400.000,00	1.163.400.000,00	361.500.000,00							801.900.000,00)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-				-	-	757.954.000,00	1.119.454.000,00	1.119.454.000,00	0,00							757.954.000,00	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
7.01.01.2.01	Perencanaan,	-				-	-	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi	-		4.990.000,00) KECAMATAN
	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														dan Pelayanan Publik Berkualitas				NGARAS
															Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
7.04.04.0.04.0000	Kanadia adalah Banasa I	O i Ki i I II I	· Cara Baallaaa'	Kinada OKDD											Publik Berkualitas				
7.01.01.2.01.0006	Noordinasi dan Penyusunan L	aporan Capaian Kinerja dan Ikh		Amerja SKPD		1100000	1 Laporan	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00 Kab.	Pacicir	ANA ALOKASI		Reformasi Birokrasi		Ī	4 000 000 00) KECAMATAN
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	;			Laporan	i Laporan	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	Barat	t, Ngaras, UI ua Kel/Desa	MUM (DAU)	· -	dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.990.000,00	NGARAS
		Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	7								Semi	ua Rei/Desa			Reformasi Birokrasi				
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													dan Pelayanan Publik Berkualitas				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan	-				-	-	477.369.850,00	538.869.850,00	538.869.850,00	61.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi	-		477.369.850,00) KECAMATAN
	Perangkat Daerah														dan Pelayanan Publik Berkualitas				NGARAS
															Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
															Publik Berkualitas				
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjang	1	_			_				T						T			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	471.900.000,00	533.400.000,00	533.400.000,00	61.500.000,00 Kab. Barat	t, Ngaras, Ul	ANA ALOKASI MUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			471.900.000,00	NGARAS
		Tunjangan ASN									Semu	ua Kel/Desa			Reformasi Birokrasi				
															dan Pelayanan Publik Berkualitas				
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan L	aporan Keuangan Akhir Tahun S	SKPD																
		Jumlah Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	2.493.850,00	2.493.850,00	2.493.850,00	0,00 Kab.	Pesisir D/	ANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			2.493.850,00	KECAMATAN
		Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi									Semu	t, Ngaras, UI ua Kel/Desa	MUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas				NGARAS
		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan I	 .aporan Keuangan Bulanan/ Triw	wulanan/ Seme	esteran SKPD											Fublik Berkualitas				
7.01.01.2.02.0007	Roordinasi dari i cityusunan E	Jumlah Laporan Keuangan	walanan, ceme	Social ON B		2 Laporan	2 Laporan	1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00	0,00 Kab.	Pesisir D	ANA ALOKASI	_	Reformasi Birokrasi			1.981.000,00) KECAMATAN
		Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan				2 Laporari	2 Euporum	1.501.500,00	1.001.000,00	1.301.300,00	Barat	t, Ngaras, ua Kel/Desa	MUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.001.000,00	NGARAS
		Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan										ua 110#200a			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
		Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	a												Publik Berkualitas				
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan A	L nalisis Prognosis Realisasi Angg	 ıgaran					I											
		Jumlah Dokumen Pelaporan				1 Dokumen	1 Dokumen	995.000,00	995.000,00	995.000,00	0,00 Kab.	Pesisir D	ANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			995.000,00	KECAMATAN
		dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									Barat Semu	t, Ngaras, UI ua Kel/Desa	MUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas				NGARAS
															Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum							185.581.900,00	181.081.900,00	181.081.900,00	-4.500.000,00				Reformasi Birokrasi			195 591 000 00) KECAMATAN
7.01.01.2.00	Perangkat Daerah	-					-	165.561.900,00	181.081.900,00	181.081.900,00	-4.500.000,00			-	dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		165.561.900,00	NGARAS
															Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
															Publik Berkualitas				
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instal																		
	Listrik/Penerangan Bangunan	1								<u></u>	Т		ı		T_				1
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				1 Paket	1 Paket	7.509.400,00	7.509.400,00	7.509.400,00	0,00 Kab. Barat	t. Ngaras. UI	ANA ALOKASI MUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			7.509.400,00	NGARAS
		Bangunan Kantor yang Disediakan									Semu	ua Kel/Desa			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				
															dan Pelayanan Publik Berkualitas				
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Pe	rlengkapan Kantor	•		•	•		1			1				•				
		Jumlah Paket Peralatan dan				12 Paket	12 Paket	22.897.500,00	22.897.500,00	22.897.500,00	0,00 Kab.		ANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			22.897.500,00) KECAMATAN NGARAS
		Perlengkapan Kantor yang Disediakan									Semu	t, Ngaras, UI ua Kel/Desa	MUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				INGAKAS
															dan Pelayanan Publik Berkualitas				
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik K	 antor													. doin Dorndanias				
	. 5, od. dan Danan Logistik K	Jumlah Paket Bahan Logistik				1 Paket	1 Paket	24.300.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00 Kab.	Pesisir D.	ANA ALOKASI	_	Reformasi Birokrasi			24.300.000,00) KECAMATAN
		Kantor yang Disediakan						555555,00	550.550,00		Barat	t, Ngaras, UI ua Kel/Desa	MUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas			550.550,00	NGARAS
											Come	12.12.000			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
						<u> </u>									Publik Berkualitas				
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	dan Penggandaan				1	1			,					1	I	<u>, </u>		1
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan				12 Paket	12 Paket	40.875.000,00	40.875.000,00	40.875.000,00	0,00 Kab. Barat	t, Ngaras, Ul	ANA ALOKASI MUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			40.875.000,00	KECAMATAN NGARAS
		yang Disediakan									Semu	ua Kel/Desa	,/		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				
1															dan Pelayanan Publik Berkualitas				
				1	1			I I		1	•					1	1		

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN KE	RANGKA PENDANAAN					N MAJU RENCANA AHUN 2026	PERANGKAT
0	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENJA OPD	TARGET RENJA	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Partembah/Parkurana (40.42)	SUMBER DANA	PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	DACH INDIKATIE (D.)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		REGIATAN		OPD TAHUN 2023		SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL DAERAH		IARGEI	PAGU INDIKATIF (Rp)	JAWAB
	2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	12	13 14	15	16 17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	KECAMATAN NGARAS
7.	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			11 Laporan	11 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			18.000.000,00	KECAMATAN NGARAS
7.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koor	dinasi dan Konsultasi SKPD						1	1	,						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	55.500.000,00	55.500.000,00	-4.500.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			60.000.000,00	KECAMATAN NGARAS
7.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	-	28.412.250,00	28.412.250,00	28.412.250,00	0,00		- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		28.412.250,00	KECAMATAN NGARAS
7.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyo	urat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.750.000,00	KECAMATAN NGARAS
7.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.000.000,00	KECAMATAN NGARAS
7.	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan da	an Perlengkapan Kantor		L				l				l l				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	KECAMATAN NGARAS
7.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan l	Jmum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	8.662.250,00	8.662.250,00	8.662.250,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.662.250,00	KECAMATAN NGARAS
7.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	-	61.600.000,00	366.100.000,00	366.100.000,00	304.500.000,00		- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		61.600.000,00	KECAMATAN NGARAS
7.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaa	an, Biaya Pemeliharaan, dan Paja Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	ak Kendaraan Perorangan Dina		nas Jabatan 4 Unit	4 Unit	37.000.000,00	61.500.000,00	61.500.000,00	24.500.000,00 Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			37.000.000,00	KECAMATAN NGARAS
7.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Ge	dung Kantor dan Bangunan Lain Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	nya		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	280.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			20.000.000,00	KECAMATAN NGARAS
													dan Pelayanan Publik Berkualitas				
7.	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sal	rana dan Prasarana Gedung Kan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	tor atau Bangunan Lainnya		1 Unit	1 Unit	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.600.000,00	KECAMATAN NGARAS
7.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			-	-	43.946.000,00	43.946.000,00	43.946.000,00	0,00					43.946.000,00	
7.	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			-	-	43.946.000,00	43.946.000,00	43.946.000,00	0,00		- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		43.946.000,00	KECAMATAN NGARAS
7.	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiat	an Pemerintahan di Tingkat Keca Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	amatan		1 Dokumen	1 Dokumen	43.946.000,00	43.946.000,00	43.946.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			43.946.000,00	KECAMATAN NGARAS
		KECAMATAN NGAMBUR						795.400.000,00	831.200.000,00	831.200.000,00	35.800.000,00					1.058.420.000,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN						795.400.000,00	831.200.000,00	831.200.000,00	35.800.000,00					1.058.420.000,00	
	7.01	KECAMATAN						795.400.000,00	831.200.000,00	831.200.000,00	35.800.000,00					1.058.420.000,00	
7.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah			90 %	90 %	752.725.500,00	788.525.500,00	788.525.500,00	263.020.000,00					1.015.745.500,00	

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN I	KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT - DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORIT	TAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUN JAWAB
			OPD		2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100% %	100% %	9.999.750,00	9.980.000,00	9.980.000,00	-19.750,00		-	d P R d	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		9.999.750,00	KECAMATAN NGAMBUR
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan L	 .aporan Capaian Kinerja dan Ikht	l tisar Realisasi I	 Kinerja SKPD															
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.999.750,00	9.980.000,00	9.980.000,00	-19.750,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	d P R d	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			9.999.750,00	KECAMATAN NGAMBUR
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	475.901.350,00	511.721.400,00	511.721.400,00	35.820.050,00		-	d P R d	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		738.921.350,00	KECAMATAN NGAMBUR
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjang	l an ASN																	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	465.400.000,00	501.200.000,00	501.200.000,00	35.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	d P R d	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			728.420.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan L	aporan Keuangan Akhir Tahun S	SKPD																
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.523.100,00	3.523.100,00	23.100,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	d P R d	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.500.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan L	⊥ .aporan Keuangan Bulanan/ Triw	vulanan/ Semes	steran SKPD	1	1										L			
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.999.950,00	4.997.000,00	4.997.000,00	-2.950,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	d P R d	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.999.950,00	KECAMATAN NGAMBUR
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan A	nalisis Prognosis Realisasi Angg	 garan																
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2.001.400,00	2.001.300,00	2.001.300,00	-100,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	d P R d	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.001.400,00	KECAMATAN NGAMBUR
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja				100 %	100 %	154.799.900,00	154.799.600,00	154.799.600,00	-300,00		-	- R d P R d	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		154.799.900,00	KECAMATAN NGAMBUR
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instala	asi																	
	Listrik/Penerangan Bangunan	Kantor Jumlah Paket Komponen				1 Paket	1 Paket	9.140.250,00	9.140.000,00	9.140.000,00	959.99	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI -		Reformasi Birokrasi		1	9.140.250,00	KECAMATAN
		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				i Faket	i Paket	9.140.250,00	9.140.000,00	9.140.000,00	-250,00	Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	d P R d	Acioniasi Biloktasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			9.140.250,00	NGAMBUR
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Pe					T							1					T	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21.629.500,00	21.629.500,00	21.629.500,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)	d P R d	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			21.629.500,00	KECAMATAN NGAMBUR
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik K					T						T					1	T	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.150.000,00	25.150.000,00	25.150.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	d P R d	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.150.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	1				T						T	1					T	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.880.150,00	25.880.100,00	25.880.100,00	-50,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	d P R d	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.880.150,00	KECAMATAN NGAMBUR
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan da	an Peraturan Perundang-undang T	gan																
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	d P R d	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	d P R d	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			18.000.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koor	1	T				12:	1					DAM	I				A	L/EQ
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	d P R d	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			43.000.000,00	KECAMATAN NGAMBUR

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN I	KERANGKA PENDANAAN				- KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
NO KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGI	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	PR	RIORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	N.ZOWINI		OPD	17411011 2020	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Details and Details and Telephone	GOMBER BANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	TAGO INDINATII (ND)	0711712
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung				100 %	100 %	35.534.500,00	35.534.500,00	35.534.500,00	0,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur		35.534.500,00	KECAMATAN NGAMBUR
7 04 04 0 00 0004	Danielian Isaa Cust Man													Publik Berkualitas				
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Meny	Jumlah Laporan Penyediaan				1 Laporan	1 Laporan	3.533.000,00	3.533.000,00	3.533.000,00	0,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI		Reformasi Birokrasi			3.533.000,00	KECAMATAN
		Jasa Surat Menyurat				Laporan	Laporan	3.333.000,00	3.333.300,00	3.333.000,00	Barat, Ngambi Semua Kel/De	ır, UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.333.000,00	NGAMBUR
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikas	i, Sumber Daya Air dan Listrik						-										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Ngambu Semua Kel/De	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.600.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan d	dan Perlengkapan Kantor		1			1	1										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Ngambi Semua Kel/De	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			15.000.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Umum Kantor									<u> </u>							
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.401.500,00	10.401.500,00	10.401.500,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Ngambi Semua Kel/De	ır, UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.401.500,00	KECAMATAN NGAMBUR
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik	Persentase Barang Milik				100 %	100 %	76.490.000,00	76.490.000,00	76.490.000,00	0,00		-	Reformasi Birokrasi	Aparatur		76.490.000,00	KECAMATAN
7.0.10.12.00	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah yang dalam Kondisi Baik					100 %	7.57.100.1000,000	. 6.7.66.666,66	7.6.1661666,	5,60			dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	, parata		7 61 1651656,35	NGAMBUR
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemelihara	an, Biaya Pemeliharaan, dan Paja	ak Kendaraan F	Perorangan Dinas	atau Kendaraan D					T			1		T		T	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	50.550.000,00	50.550.000,00	50.550.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Ngambi Semua Kel/De	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.550.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Ge	edung Kantor dan Bangunan Laini	nya	1		•	'									1	1	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Ngambi Semua Kel/De	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sa	arana dan Prasarana Gedung Kan	tor atau Bangu	nan Lainnya														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.940.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Ngambu Semua Kel/De	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.940.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
2. 7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100 %	100 %	42.674.500,00	42.674.500,00	42.674.500,00	0,00						42.674.500,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	42.674.500,00	42.674.500,00	42.674.500,00	0,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		42.674.500,00	KECAMATAN NGAMBUR
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegia		amatan			1					<u> </u>						l .	
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	42.674.500,00	42.674.500,00	42.674.500,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Ngambo Semua Kel/De	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			42.674.500,00	KECAMATAN NGAMBUR
	KECAMATAN PESISIR SEL	ATAN						829.200.000,00	856.400.000,00	856.400.000,00	27.200.000,00				<u> </u>		829.200.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN							829.200.000,00	856.400.000,00	856.400.000,00	27.200.000,00						829.200.000,00	
7.01	KECAMATAN							829.200.000,00	856.400.000,00	856.400.000,00	27.200.000,00						829.200.000,00	
1. 7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah				90 %	90 %	800.158.000,00	812.358.000,00	812.358.000,00	0,00						800.158.000,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	4.519.000,00	4.519.000,00	4.519.000,00	0,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		4.519.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhti	isar Realisasi K	inerja SKPD			,											
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.519.000,00	4.519.000,00	4.519.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semu Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.519.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	504.541.000,00	531.741.000,00	531.741.000,00	27.200.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		504.541.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjanç	gan ASN	1	<u>. </u>		1				1	ı	I	-1		1	1	1	

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKA DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGU JAWAB
	REGIATAN		OPD	TAHON 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	bertamban/berkurang (10-12)	LONASI	SUMBER DANA	NASIONAL DAERAH		TARGET	PAGO INDIKATIF (KP)	JAWAD
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 17	18	19	20	21
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	499.200.000,00	526.400.000,00	526.400.000,00	27.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			499.200.000,00	KECAMATAN PESISIR SELA
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan L	aporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.413.000,00	2.413.000,00	2.413.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.413.000,00	KECAMATAN PESISIR SEL
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan L	aporan Keuangan Bulanan/ Triv	wulanan/ Seme	steran SKPD	I													
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.930.000,00	KECAMATAN PESISIR SEL
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan A	analisis Prognosis Realisasi Ango Jumlah Dokumen Pelaporan	1			1 Dokumen	1 Dokumen	998.000,00	998.000,00	008 000 00	0.00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI -	Reformasi Birokrasi			998.000,00	KECAMATAN
		dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	i Dokumen	998.000,00	998.000,00	998.000,00	0,00	Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			996.000,00	PESISIR SEL
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja				100 %	100 %	194.149.000,00	179.149.000,00	179.149.000,00	-15.000.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		194.149.000,00	KECAMATAN PESISIR SEL
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instal							,						-			1	
	Listrik/Penerangan Bangunan											<u> </u>					1	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.048.000,00	6.048.000,00	6.048.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.048.000,00	KECAMATAI PESISIR SEI
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Pe			1								T	T	T			1	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.946.000,00	29.946.000,00	29.946.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			29.946.000,00	KECAMATA PESISIR SE
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik K		1			Т	T T					T	1				1	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	KECAMATAI PESISIR SEI
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	dan Penggandaan Jumlah Paket Barang				12 Paket	12 Paket	22.155.000,00	22.155.000,00	22.155.000,00	0.00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI -	Reformasi Birokrasi			22.155.000,00	KECAMATA
		Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						·			·	Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				PESISIR SE
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan da	an Peraturan Perundang-undang	gan			12	12	12 000 000 00	12,000,000,00	12 000 000 00	0.00	Kah Basisir	DANA ALOKASI	Potermoni Dirakrani			12 000 000 00	KECAMATA
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	KECAMATAI PESISIR SEI
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		1	1		441		04 000 000 00	04 000 000 00	04.000.000.00	0.00	Kal. Davida		D. Commit Dividence			04.000.000.00	LECANATA
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.000.000,00	KECAMATAN PESISIR SEL
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koor	dinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan				101	12 Laporan	75.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-15.000.000,00	Koh Besisis	DANA ALOKASI -	Reformasi Birokrasi			75.000.000.00	KECAMATAN
		Jumian Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-15.000.000,00	Rab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			75.000.000,00	PESISIR SE
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung				100 %	100 %	35.813.000,00	35.813.000,00	35.813.000,00	0,00			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		35.813.000,00	KECAMATA PESISIR SE
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Meny	urat										1						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.605.000,00	3.605.000,00	3.605.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.605.000,00	KECAMATA PESISIR SE
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi	-		<u> </u>		40:	140:						DAMA AL SULLE					L/EQ:::-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.000.000,00	KECAMATAN PESISIR SEL

V27-	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/	INDIKATOR PROGRAM /	AKITIK C	CAPAIAN ,	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN KE	ERANGKA PENDANAAN			KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU F TAHUN 202		PERANGKA DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PENIODE RE	ENJA OPD AHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024		ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	SASARAN	TARGET PAGU IN	NDIKATIF (Rp)	PENANGGU JAWAB
			OFD		2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	40	45	NASIONAL DAERAH	10	10		
2	3	Jumlah Laporan Penyediaan	5	6	/	8 1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	11 10.000.000,00	12	13 14 0,00 Kab. Pesisir	15 DANA ALOKASI	16 17 - Reformasi Birokrasi	18		10.000.000,00	21 KECAMATAN
		Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang				Г Сароган	Г Сароган	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Barat, Pesisir Selatan, Semua	UMUM (DAU)	dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	PESISIR SEL
		Disediakan									Kel/Desa		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Limum Kontor											Publik Berkualitas				
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan				12 Laporan	12 Laporan	16.208.000,00	16.208.000,00	16.208.000,00	0,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	- Reformasi Birokrasi			16.208.000,00	KECAMATAN
		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporari	12 Laporan	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	Barat, Pesisir Selatan, Semua	UMUM (DAU)	dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.200.000,00	PESISIR SEL
											Kel/Desa		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik	Persentase Barang Milik				100 %	100 %	61.136.000,00	61.136.000,00	61.136.000,00	0,00		Publik Berkualitas - Reformasi Birokrasi	Aparatur		61.136.000,00	KECAMATAN
7.01.01.2.09	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah yang dalam Kondisi Baik				100 %	100 %	61.136.000,00	61.136.000,00	61.136.000,00	0,00		dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		61.136.000,00	PESISIR SEL
													Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
													Publik Berkualitas				
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemelihara	an, Biaya Pemeliharaan, dan Pa	jak Kendaraan Perora	angan Dinas a		as Jabatan ———— 3 Unit	3 Unit	40.750.000,00	40.750.000,00	40.750.000,00	0,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	- Reformasi Birokrasi			40.750.000,00	KECAMATAN
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				3 Offic	3 Offit	40.750.000,00	40.750.000,00	40.750.000,00	Barat, Pesisir Selatan, Semua	UMUM (DAU)	dan Pelayanan Publik Berkualitas			40.750.000,00	PESISIR SE
		yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya									Kel/Desa		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
													Publik Berkualitas				
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi G	edung Kantor dan Bangunan Lair	nnya			4 1 1=:4	4.1154	44,000,000,00	44,000,000,00	44,000,000,00	0.00 Kab Basisis	DANA ALOKACI	Deference: Birolene:			44,000,000,00	KECAMATAI
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			14.000.000,00	PESISIR SEI
		2. pomara, 2. rondomao									Kel/Desa		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
													Publik Berkualitas				
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sa	arana dan Prasarana Gedung Ka	ntor atau Bangunan L	Lainnya	Т	4.115.9	4.11-2	0.000.000.00	0.000.000	2 222 222 22	200 144 5 44	DANIA AL COMO	5.			0.000.000	KECAMATA
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				1 Unit	1 Unit	6.386.000,00	6.386.000,00	6.386.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.386.000,00	PESISIR SE
		atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi									Kel/Desa		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
													Publik Berkualitas				
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan				100 %	100 %	29.042.000,00	44.042.000,00	44.042.000,00	0,00					29.042.000,00	
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelayanan Publik															
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan di Tingkat				100 %	100 %	29.042.000,00	44.042.000,00	44.042.000,00	15.000.000,00		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur		29.042.000,00	KECAMATA PESISIR SE
	Pemerintahan di Tingkat	Kecamatan											Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				. 20.0 02.
	Kecamatan												dan Pelayanan Publik Berkualitas				
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegia	ा ıtan Pemerintahan di Tingkat Ked	camatan														
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas				1 Dokumen	1 Dokumen	29.042.000,00	44.042.000,00	44.042.000,00	15.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Pesisir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			29.042.000,00	KECAMATAN PESISIR SEL
		Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									Selatan, Semua Kel/Desa	OWOW (DAO)	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				PESISIR SEL
													dan Pelayanan Publik Berkualitas				
	KECAMATAN KRUI SELAT	AN						801.900.000,00	838.200.000,00	838.200.000,00	36.300.000,00	· · · · · ·	-			801.900.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN							801.900.000,00	838.200.000,00	838.200.000,00	36.300.000,00					801.900.000,00	
7.01	KECAMATAN							801.900.000,00	838.200.000,00	838.200.000,00	36.300.000,00					801.900.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang				92,5 Persen	92,5 Persen	781.900.000,00	838.200.000,00	838.200.000,00	0,00					781.900.000,00	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintahan Daerah															
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluas	Persentase Dokumen				100 Persen	100 Persen	20.124.000,00	20.124.000,00	20.124.000,00	0,00		- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	ASN		20.124.000,00	KECAMATAI SELATAN
	Kinerja Perangkat Daerah	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				SELATAN
		Tepat Waktu											dan Pelayanan Publik Berkualitas				
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perer	 ncanaan Perangkat Daerah															
		Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	- Reformasi Birokrasi			1.400.000,00	
		Perencanaan Perangkat Daerah									Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				SELATAN
											Thom Design		dan Pelayanan Publik Berkualitas				
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan						<u>ı</u>					<u> </u>					
		Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	3.431.000,00	3.431.000,00	3.431.000,00	0,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	- Reformasi Birokrasi			3.431.000,00	KECAMATA
		RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				SELATAN
		DOMINION NIVA-SAPD									New Desa		dan Pelayanan Publik Berkualitas				
	Koordinasi dan Penyusunan	 Dokumen Perubahan RKA-SKPI)				1					<u> </u>					
7.01.01.2.01.0003		Jumlah Dokumen Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.431.000,00	3.431.000,00	3.431.000,00	0,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	- Reformasi Birokrasi			3.431.000,00	
7.01.01.2.01.0003		RKA-SKPD dan Laporan									Barat, Krui Selatan, Semua	UMUM (DAU)	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				SELATAN
7.01.01.2.01.0003		Hasil Koordinasi Penyusunan	1								Kel/Desa		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
7.01.01.2.01.0003		Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1									i uniin Deinudiilas				
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penvusunan	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			•						0,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	- Reformasi Birokrasi			3.431.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.431.000,00	3.431.000,00	3.431.000,00		UMUM (DAU)	dan Pelayanan	1	- I	,	SELATAN
	Koordinasi dan Penyusunan	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	3.431.000,00	3.431.000,00	3.431.000,00	Barat, Krui Selatan, Semua		Publik Berkualitas				
	Koordinasi dan Penyusunan	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinas				1 Dokumen	1 Dokumen	3.431.000,00	3.431.000,00	3.431.000,00	Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	CINICINI (B/IC)	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
7.01.01.2.01.0004	·	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.431.000,00	3.431.000,00	3.431.000,00	Selatan, Semua	Cinom (D/16)	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				
	Koordinasi dan Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Perubahan DPA- SKPD									Selatan, Semua Kel/Desa		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3 434 000 00	
7.01.01.2.01.0004	·	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Hasil Koordinasi Penyusunan				1 Dokumen 1 Dokumen		3.431.000,00	3.431.000,00		0,00 Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.431.000,00	
7.01.01.2.01.0004	·	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan									Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			3.431.000,00	KECAMATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA					CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKA DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN SUB KEGIATAN	RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	ODD TALLIAL	IARG	ET 2025	DVDD 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	DVDD DEDUDAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA -		DAFRAU	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGU JAWAB
2	3	4	5	6	7	SEBELUM 8	SESUDAH 9	RKPD 2025 10	APBD 2025 11	RKPD PERUBAHAN 2025	13	14	15	NASIONAL 16	DAERAH 17	18	19	20	21
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	478.400.000,00	514.700.000,00	514.700.000,00	36.300.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Pegawai		478.400.000,00	KECAMATAN SELATAN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/b ulan	10 Orang/b ulan	471.900.000,00	508.200.000,00	508.200.000,00	36.300.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			471.900.000,00	KECAMATA SELATAN
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan	_L _aporan Keuangan Akhir Tahun S	L SKPD					I											
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	KECAMATAN SELATAN
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD		esteran SKPD		18 Laporan	18 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	KECAMATAN SELATAN
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan A	Analisis Prognosis Realisasi Angg Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	garan			1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.500.000,00	KECAMATA SELATAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja				90 Persen	90 Persen	139.351.500,00	180.818.000,00	180.818.000,00	41.466.500,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	ASN		139.351.500,00	KECAMATA SELATAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Insta	asi													Publik Berkualitas				
7.07.2.00.000	Listrik/Penerangan Banguna																		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.141.000,00	7.141.000,00	7.141.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.141.000,00	KECAMATAI SELATAN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan P	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	31.079.700,00	31.037.000,00	31.037.000,00	-42.700,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			31.079.700,00	KECAMATA SELATAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik k	antor	1				<u> </u>												
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	KECAMATA SELATAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.580.000,00	32.270.000,00	32.270.000,00	6.690.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.580.000,00	KECAMATA SELATAN
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan d	_L an Peraturan Perundang-undang	l gan																
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	KECAMATA SELATAN
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	18.000.000,00	48.370.000,00	48.370.000,00	30.370.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			18.000.000,00	KECAMAT/ SELATAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.550.800,00	25.000.000,00	25.000.000,00	4.449.200,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.550.800,00	KECAMAT/ SELATAN
	Pengadaan Barang Milik	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana				100 Persen	100 Persen	25.000.000,00	24.365.000,00	24.365.000,00	-635.000,00)			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	ASN		25.000.000,00	KECAMATA SELATAN

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN				VEL 01:20:		AN MAJU RENCANA ΓΑΗUN 2026	PERANG
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Portombob/Poulsurone (40.42)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARCET	DACILINDIKATIF (D.)	DAERA PENANGG JAWA
	REGIATAN		OPD	1 AHUN 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	JAWA
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 17	18	19	20	21
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	25.000.000,00	24.365.000,00	24.365.000,00	-635.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	KECAMATA SELATAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung				100 Persen	100 Persen	37.534.500,00	39.207.000,00	39.207.000,00	1.672.500,00		-	Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas			37.534.500,00	KECAMATA SELATAN
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Meny	 urat												1 doint bortagnido				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.533.000,00	7.142.000,00	7.142.000,00	1.609.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.533.000,00	KECAMATA SELATAN
.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi	, Sumber Daya Air dan Listrik																
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.600.000,00	KECAMAT SELATAN
01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan d									ı		T	T T			1 1		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas			15.000.000,00	KECAMAT SELATAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jmum Kantor																
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.401.500,00	10.465.000,00	10.465.000,00	63.500,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.401.500,00	KECAMA ⁻ SELATAN
.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dalam Kondisi Baik				100 Persen	100 Persen	81.490.000,00	58.986.000,00	58.986.000,00	-22.504.000,00		-	Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas			81.490.000,00	KECAMA' SELATAN
.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemelihara	l an, Biaya Pemeliharaan, dan Pa	_l ajak Kendaraan F	_l Perorangan Dina	 as atau Kendaraan D	l Pinas Jabatan												
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	50.550.000,00	33.326.000,00	33.326.000,00	-17.224.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.550.000,00	KECAMAT SELATAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Ge	dung Kantor dan Bangunan Laii	nnya															
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	16.420.000,00	16.420.000,00	-8.580.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	KECAMA' SELATAN
01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sa	T rana dan Prasarana Pendukung	Gedung Kantor	atau Bangunan	Lainnya													
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	5.940.000,00	9.240.000,00	9.240.000,00	3.300.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.940.000,00	KECAMA SELATAN
01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pemenuhan Pengembangan Kapasitas Kepemudaan				92,5 Persen	92,5 Persen	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00						20.000.000,00	
.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pengembangan Pemuda				100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	KECAMA ⁻ SELATAN
01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegia	tan Pemerintahan di Tingkat Ked	camatan															
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	KECAMA' SELATAN
	KECAMATAN PESISIR TEN	GAH						3.381.570.000,00	3.722.870.000,00	3.722.870.000,00	341.300.000,00						3.596.310.700,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN							3.381.570.000,00	3.722.870.000,00	3.722.870.000,00	341.300.000,00						3.596.310.700,00	
01 01.01	PROGRAM PENUNJANG	Cakupan Pemenuhan				on o/	90 %	3.381.570.000,00	3.722.870.000,00	3.722.870.000,00	341.300.000,00						3.596.310.700,00	
01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan,	Persentase Dokumen				90 %	100 %	1.386.900.000,00	1.468.200.000,00	1.468.200.000,00	15.273.700,00			- Reformasi Birokras	si Aparatur		1.402.173.700,00	
	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	!	Special CLCC		.00 /0	.55 /6	1.550.000,00	1.350.000,00	1.330.000,00	0,00			dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.930.000,00	PESISIR 1
.01.01.2.01.0006	Roordinasi dan Penyusunan L	aporan Capaian Kinerja dan Ikh Jumlah Laporan Capaian		MITEIJA SKYD		1 Laporan	1 Laporan	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI -	- Reformasi Birokras	si		1.950.000,00	KECAMA [*]
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									-,00	Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokras dan Pelayanan Publik Berkualitas				PESISIR 1

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET	REALISASI	PRAKIRAAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN							AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT
O KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKHIR PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD	TARGET RENJA	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					PR	RIORITAS	KELOMPOK SASARAN			DAERAH PENANGGUNG
	KEGIATAN	REGIATAN	OPD	TAHUN 2023	2024	SEBELUM		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12) LOK	(ASI S	SUMBER DANA -	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	JAWAB
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 14	4	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjang	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	1.061.427.000,00	1.142.727.000,00	1.142.727.000,00	81.300.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	А		1.061.427.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
7.01.01.2.02.0001	renyediaan Gaji dan Tunjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	1.056.900.000,00	1.138.200.000,00	1.138.200.000,00	81.300.000,00 Kab. Pes Barat, Pe Tengah, S Kel/Desa	esisir U Semua	PANA ALOKASI IMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.056.900.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan L	_aporan Keuangan Akhir Tahun S	SKPD													_	_		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD)			1 Laporan	1 Laporan	1.377.800,00	1.377.800,00	1.377.800,00	0,00 Kab. Pes Barat, Pe Tengah, S Kel/Desa	esisir U Semua	ANA ALOKASI IMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.377.800,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan L	∟aporan Keuangan Bulanan/ Triw ⊤	vulanan/ Seme	esteran SKPD	1	T												T	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.635.600,00	2.635.600,00	2.635.600,00	0,00 Kab. Pes Barat, Pe Tengah, S Kel/Desa	esisir U Semua	ANA ALOKASI IMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.635.600,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan A	Analisis Prognosis Realisasi Ango	garan			T	T T				1	-			T			Τ	
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	513.600,00	513.600,00	513.600,00	0,00 Kab. Pes Barat, Pe Tengah, S Kel/Desa	esisir U Semua	ANA ALOKASI IMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			513.600,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja				100 %	100 %	120.256.000,00	123.456.000,00	123.456.000,00	3.200.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		122.146.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instal	asi	1			<u> </u>				I			I						
	Listrik/Penerangan Bangunan	Kantor																	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.037.000,00	10.037.000,00	10.037.000,00	0,00 Kab. Pes Barat, Pe Tengah, S Kel/Desa	esisir U Semua	ANA ALOKASI IMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.037.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Pe	erlengkapan Kantor		_	_												_		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	52.224.000,00	52.224.000,00	52.224.000,00	0,00 Kab. Pes Barat, Pe Tengah, S Kel/Desa	esisir U Semua	MUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			52.224.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik K	antor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.900.000,00	22.900.000,00	22.900.000,00	4.000.000,00 Kab. Pes Barat, Se Kecamata Semua K	emua U tan,	ANA ALOKASI IMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.790.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	dan Penggandaan				_													
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.495.000,00	7.495.000,00	7.495.000,00	1.000.000,00 Kab. Pes Barat, Pe Tengah, Kel/Desa	esisir U	MANA ALOKASI MUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.495.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan da	an Peraturan Perundang-undang	gan			12	140	0.000.000.00	0.000.000.00	0.000.000.00	o oo Kala Baari				B. (i Bird i		<u> </u>	0.000.000.00	KECAMATAN
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00 Kab. Pes Barat, Pe Tengah, S Kel/Desa	esisir U Semua	ANA ALOKASI IMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.600.000,00	PESISIR TENGAH
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi				1110	11 Longra	19.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	2.000.000,00 Kab. Pes	vieir	ANA ALOKASI	_	Reformasi Birokrasi			19.000.000,00	KECAMATAN
		Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	19.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	2.000.000,00 Kab. Pes Barat, Pe Tengah, S Kel/Desa	esisir U Semua	MUM (DAU)	-	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			19.000.000,00	PESISIR TENGAL
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koor	T				401.5	121	40,000,000,00	0.000.000.00	0.000.000.00	2 222 222 22	viois .	ANIA ALCICACI		Potenza i Piari			40.000.000.00	VEC ANATAN:
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	-3.800.000,00 Kab. Pes Barat, Pe Tengah, S Kel/Desa	esisir U Semua	ANA ALOKASI IMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja				100 %	100 %	133.837.000,00	121.037.000,00	121.037.000,00	-12.800.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		147.220.700,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasa	arana Pendukung Gedung Kanto	or atau Bangun	nan Lainnya		511nit	5 Unit	122 227 222 22	0.00	200	122 927 000 00 14 1 5	eieir	ΔΝΑ	_	Deformed: Disclosed			2.22	KECANAATAN
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	133.837.000,00	0,00	0,00	-133.837.000,00 Kab. Pes Barat, Pe Tengah, S Kel/Desa	esisir T Semua U	RANSFER IMUM-DANA LOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	KECAMATAN PESISIR TENGAR

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGK.
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA		ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGI JAWAB
_					2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9 F. I. In:it	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 KECAMATAI
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	121.037.000,00	121.037.000,00	121.037.000,00	Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			147.220.700,00	PESISIR TE
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung				100 %	100 %	43.600.000,00	47.800.000,00	47.800.000,00	4.200.000,00)			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		43.600.000,00	KECAMATA PESISIR TE
7.04.04.0.00.0000		Country David Air day Live													Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikas	, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan				12 Laporan	12 Laporan	33.600.000,00	32.800.000,00	32.800.000,00	-800 000 00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI -		Reformasi Birokrasi			33.600.000,00	KECAMATA
		Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Euporum	12 Eaporair	30.000.000,00	32.333.333,00	02.000.000,00	555.555,55	Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			00.000.000,00	PESISIR TE
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan d	T .				1		1											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	•	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	KECAMATA PESISIR TE
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam Kondisi Baik				100 %	100 %	25.830.000,00	31.230.000,00	31.230.000,00	5.400.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		25.830.000,00	KECAMATA PESISIR TE
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemelihara	an, Biaya Pemeliharaan, dan Pa	ajak Kendaraan	Perorangan Dina	as atau Kendaraan D	Dinas Jabatan									Publik Berkualitas				
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	25.830.000,00	31.230.000,00	31.230.000,00	5.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			25.830.000,00	KECAMATA PESISIR TE
		dibayarkari i ajaknya													Publik Berkualitas				
7	WELURAHAN PASAR KRUI UNSUR KEWILAYAHAN							3.381.570.000,00 3.381.570.000,00	3.722.870.000,00 3.722.870.000,00	3.722.870.000,00 3.722.870.000,00	341.300.000,00							3.596.310.700,00 3.596.310.700,00	
7.01	KECAMATAN							3.381.570.000,00	3.722.870.000,00	3.722.870.000,00	341.300.000,00							3.596.310.700,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				100 %	100 %	1.994.670.000,00	2.254.670.000,00	2.254.670.000,00	199.467.000,00)						2.194.137.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan				100 %	100 %	1.994.670.000,00	2.254.670.000,00	2.254.670.000,00	260.000.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat		2.194.137.000,00	KECAMATA PESISIR TE
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan P	rasarana Kelurahan																	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	590.935.000,00	0,00	0,00	-590.935.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			0,00	KECAMATA PESISIR TE
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan P	rasarana Kelurahan													Publik Berkualitas				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	590.935.000,00	590.935.000,00	590.935.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi			650.028.500,00	KECAMATA PESISIR TE
															dan Pelayanan Publik Berkualitas				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat o	i Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas				1 Pokmas /	1 Pokmas /	406.400.000,00	0,00	0,00	-406.400.000,00	Kah Basisir	DANA -		Reformasi Birokrasi			0.00	KECAMATA
		yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Ormas	Ormas	400.400.000,00	0,00	0,00	-400.400.000,00	Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	PESISIR TE
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat d	i Kelurahan																	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	1 Pokmas / Ormas	0,00	588.000.000,00	588.000.000,00	588.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			447.040.000,00	KECAMATA PESISIR TE
	KELURAHAN PASAR KOTA	KRUI						3.381.570.000,00	3.722.870.000,00	3.722.870.000,00	341.300.000,00							3.596.310.700,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.381.570.000,00	3.722.870.000,00	3.722.870.000,00	341.300.000,00							3.596.310.700,00	
7.01 7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				100 %	100 %	3.381.570.000,00 1.994.670.000,00	3.722.870.000,00 2.254.670.000,00	3.722.870.000,00 2.254.670.000,00	341.300.000,00 199.467.000,00							3.596.310.700,00 2.194.137.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan				100 %	100 %	1.994.670.000,00	2.254.670.000,00	2.254.670.000,00	260.000.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat		2.194.137.000,00	KECAMATA PESISIR TE
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan P	Т												_					
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	590.935.000,00	0,00	0,00	-590.935.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	KECAMATA PESISIR TE
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan P	rasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	590.935.000,00	590.935.000,00	590.935.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			650.028.500,00	KECAMATA PESISIR TE

O KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN	KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
O KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARG	SET 2025	DVDD 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	DKDD DEDIIDAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		ORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG
1 2	3	4	5	6	7	SEBELUM 8	SESUDAH 9	RKPD 2025 10	APBD 2025 11	RKPD PERUBAHAN 2025	13	14	15	NASIONAL 16	DAERAH 17	18	19	20	21
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat (di Kelurahan																	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	406.400.000,00	0,00	0,00	-406.400.000,00 Ka	ab. Pesisir arat, Pesisir	DANA TRANSFER	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			0,00	0 KECAMATAN PESISIR TENGAH
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan										engah, Semua el/Desa	UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
															Publik Berkualitas				
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat o	T					1	1					1		T			T	
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat				-	1 Pokmas / Ormas	0,00	484.800.000,00	484.800.000,00	Ba	ab. Pesisir arat, Pesisir engah, Pasar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			447.040.000,00	0 KECAMATAN PESISIR TENGAH
		di Kelurahan										ota Krui			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
	KECAMATAN WAY KRUI							778.500.000,00	042 000 000 00	042 000 000 00	34.500.000,00				Publik Berkualitas			778.500.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN							778.500.000,00	813.000.000,00 813.000.000,00		34.500.000,00							778.500.000,00	
7.01	KECAMATAN							778.500.000,00	813.000.000,00		·							778.500.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan Pemenuhan				90 %	90 %	778.500.000,00	813.000.000,00	813.000.000,00	0,00							778.500.000,00	0
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penunjang Kinerja Perangkat Daerah																	
7.01.01.2.01	Perencanaan,	Persentase Dokumen				100 %	100 %	4.692.000,00	5.130.000,00	5.130.000,00	438.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur		4.692.000,00	
	Penganggaran, dan Evaluas Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu													dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				KRUI
		Daerari Fepat Waktu													dan Pelayanan Publik Berkualitas				
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan	 Laporan Capaian Kinerja dan Ikht	l itisar Realisasi Ki	l inerja SKPD							1								
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi				1 Laporan	1 Laporan	4.692.000,00	5.130.000,00	5.130.000,00	438.000,00 Ka	ab. Pesisir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi			4.692.000,00	0 KECAMATAN WAY
		Kinerja dari ikntisar Kealisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan									Se	arat, Way Krui, emua Kel/Desa	OMOW (DAO)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				KKUI
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja													dan Pelayanan Publik Berkualitas				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan	SKPD Persentase Pelaporan				100 %	100 %	461.338.500,00	497.508.500,00	497.508.500,00	36.170.000,00				Reformasi Birokrasi	Anarotur		464 229 500 06	0 KECAMATAN WAY
7.01.01.2.02	Perangkat Daerah	Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	461.338.500,00	497.508.500,00	497.508.500,00	36.170.000,00			-	dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		461.338.500,00	KRUI
															Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjan	MASA ASN													Publik Berkualitas				
7.01.01.2.02.0001	T enyediaan Gaji dan Tunjan	Jumlah Orang yang				14 Orang/b	14 Orang/b	448.500.000,00	483.000.000,00	483.000.000,00	34.500.000,00 Ka	ab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			448.500.000,00	0 KECAMATAN WAY
		Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				ulan	ulan	·	,	,	Ba	arat, Way Krui, emua Kel/Desa	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas			Í	KRUI
															Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Akhir Tahun S	SKPD												1 ublik Berkualitas				
	,	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan				1 Laporan	1 Laporan	4.255.000,00	4.255.000,00	4.255.000,00	0,00 Ka	ab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			4.255.000,00	0 KECAMATAN WAY
		Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan									Ba Se	arat, Way Krui, emua Kel/Desa	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				KRUI
		Keuangan Akhir Tahun SKPD													dan Pelayanan Publik Berkualitas				
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan	 Laporan Keuangan Bulanan/ Triw	ulanan/ Semeste	eran SKPD															
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/				2 Laporan	2 Laporan	4.261.500,00	5.296.500,00	5.296.500,00	1.035.000,00 Ka	ab. Pesisir arat, Way Krui,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			4.261.500,00	0 KECAMATAN WAY
		Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi									Se	emua Kel/Desa	OWOW (BAO)		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				INVOI
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD													dan Pelayanan Publik Berkualitas				
7.01.01.2.02.0008	Panyusunan Palanoran dan	n/Semesteran SKPD Analisis Prognosis Realisasi Angg																	
7.01.01.2.02.0008	renyusunan relaporan dan	Jumlah Dokumen Pelaporan	garan			1 Dokumen	1 Dokumen	4.322.000,00	4.957.000,00	4.957.000,00	635.000,00 Ka	ab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			4.322.000,00	0 KECAMATAN WAY
		dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									Ba Se	arat, Way Krui, emua Kel/Desa	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas				KRUI
															Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan				100 %	100 %	184.623.500,00	199.395.500,00	199.395.500,00	14.772.000,00			-	Reformasi Birokrasi	Aparatur		184.623.500,00	0 KECAMATAN WAY
	Perangkat Daerah	Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja													dan Pelayanan Publik Berkualitas				KRUI
															Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Insta	 Ilasi																	
	Listrik/Penerangan Banguna	n Kantor																	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				1 Paket	1 Paket	12.113.000,00	13.660.000,00	13.660.000,00	Ba	arat, Way Krui,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			12.113.000,00	0 KECAMATAN WAY
		Bangunan Kantor yang Disediakan									Se	emua Kel/Desa			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				
															dan Pelayanan Publik Berkualitas				
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan P																		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.100.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	Ba	ab. Pesisir arat, Way Krui,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			7.100.000,00	0 KECAMATAN WAY KRUI
		Disediakan									Se	emua Kel/Desa			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
															Publik Berkualitas				
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik I			<u> </u>		4.5-1	4 D-1	00 455 555 55	20	20.75		oh Destate	DANIA ALCUMA		Defermed Division	<u> </u>	1	20.472.57	O VECANATA
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.150.000,00	28.150.000,00	28.150.000,00	Ba	ab. Pesisir arat, Way Krui, emua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			28.150.000,00	0 KECAMATAN WAY KRUI
												cilida Nei/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				
70/0/5	Barrier -	day Braza i													Publik Berkualitas				
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	dan Penggandaan Jumlah Paket Barang				12 Paket	12 Paket	59.260.500,00	63.625.500,00	63.625.500,00	4.365.000,00 Ka	ab. Pesisir	DANA ALOKASI		Reformasi Birokrasi			59.260.500,00	0 KECAMATAN WAY
		Cetakan dan Penggandaan	1			12 raket	12 FaNUL	აუ.∠ბ∪.5∪∪,∪∪	ნა.ნ∠ნ.500,00	, 03.025.500,00	Ba	arat, Way Krui,	UMUM (DAU)		dan Pelavanan			აყ.∠ი∪.ე∪∪,∪∪	KRUI
		yang Disediakan						l			l Se	emua Kel/Desa			Publik Berkualitas				
		yang Disediakan									Se	emua Kel/Desa			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN			VELOVEDO:		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKA
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENJA OPD	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGE	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUN JAWAB
	NEGIATAN		OPD TATION 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Detramban/Detraining (10-12)	OUNDER DANA	NASIONAL DAERAH		TARGET	TAGO INDINATII (ND)	VANAS
2	3	4 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 6	7	8 12 Dokumen	9 12 Dokumen	10 12.000.000,00	11 12.000.000,00	12.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas		19	12.000.000,00	ECAMATAN KRUI
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu										1					
7.04.04.0.00.000		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			11 Laporan	11 Laporan	18.000.000,00	26.860.000,00	26.860.000,00	8.860.000,00 Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			18.000.000,00	KECAMATAN KRUI
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	48.000.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	-15.500.000,00 Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			48.000.000,00	KECAMATAN KRUI
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung			100 %	100 %	40.146.000,00	42.766.000,00	42.766.000,00	2.620.000,00		- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			40.146.000,00	KECAMATAN KRUI
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Meny	T													1	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	5.597.000,00	5.847.000,00	5.847.000,00	250.000,00 Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.597.000,00	KECAMATAN KRUI
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi	Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.200.000,00	KECAMATAN KRUI
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan d	an Perlengkapan Kantor										1				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			15.000.000,00	KECAMATAN KRUI
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan I	Jmum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	12.349.000,00	14.719.000,00	14.719.000,00	2.370.000,00 Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.349.000,00	KECAMATAN KRUI
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam Kondisi Baik			100 %	100 %	87.700.000,00	68.200.000,00	68.200.000,00	-19.500.000,00		- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			87.700.000,00	KECAMATAN KRUI
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaa	an, Biaya Pemeliharaan, dan Paj	ak Kendaraan Perorangan Dina	as atau Kendaraan D		41154	62 700 000 00	42 200 000 00	42 200 000 00	40 500 000 00 Keb Besisis	DANIA ALOKASI	- Reformasi Birokrasi	:		62 700 000 00	KECAMATAN
7.01.01.2.09.0009	Demolikaran/Balahilitasi Co	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dung Kantor dan Bangunan Lain			4 Unit	4 Unit	62.700.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	-19.500.000,00 Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			62.700.000,00	KRUI
7.01.01.2.09.0009	remeinaraan/Renabilitasi Ge	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Пуа		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	KECAMATAN KRUI
	KECAMATAN KARYA PENG	GAWA					801.900.000,00	838.200.000,00	838.200.000,00	36.300.000,00					801.900.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN						801.900.000,00	838.200.000,00	838.200.000,00	36.300.000,00					801.900.000,00	
7.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	801.900.000,00	838.200.000,00 838.200.000,00	838.200.000,00 838.200.000,00	36.300.000,00 0,00					801.900.000,00 801.900.000,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-	-	3.187.000,00	3.187.000,00	3.187.000,00	0,00		- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.187.000,00	KECAMATAN PENGGAWA
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan L	aporan Capaian Kinerja dan Ikht	isar Realisasi Kinerja SKPD		41	110000	0.407.000.00	0.407.000	0.407.000	222 4. 5	DANIA ALCUME		:		0.407.075.55	VECANAT
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	1 Laporan	3.187.000,00	3.187.000,00	3.187.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.187.000,00	KECAMATAN PENGGAWA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-	-	480.161.400,00	516.461.400,00	516.461.400,00	36.300.000,00		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			480.161.400,00	KECAMATAN PENGGAWA
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjang	an ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	471.900.000,00	508.200.000,00	508.200.000,00	36.300.000,00 Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			471.900.000,00	KECAMATAN PENGGAWA

Halaman 153

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA	\	FT 0005		DAGU W	CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGK DAERAH
1.022	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	ODD TALLIAL	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PAGU INDIKATIF (Rp) APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA -	PRIORITAS NASIONAL DAERAH	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGU JAWAB
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 17	18	19	20	21
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPL	D			1 Laporan	1 Laporan	2.524.000,00	2.524.000,00	2.524.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.524.000,00	
7.01.01.2.02.00	007 Koordinasi dan Penyusunan	Laporan Keuangan Bulanan/ Tri	iwulanan/ Seme	esteran SKPD				1		1								
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	а			2 Laporan	2 Laporan	2.305.000,00	2.305.000,00	2.305.000,00		Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.305.000,00	KECAMATAI PENGGAWA
7.01.01.2.02.00	008 Penyusunan Pelaporan dan	Analisis Prognosis Realisasi Ang	ggaran			_						ı						
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3.432.400,00	3.432.400,00	3.432.400,00		Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.432.400,00	PENGGAWA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	229.875.600,00	229.875.600,00	229.875.600,00	0,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		229.875.600,00	KECAMATA PENGGAWA
7.01.01.2.06.00				l	·					L		L					I	
	Listrik/Penerangan Banguna				T	40 Delvet	40 Palest	7 004 000 00	7 004 000 00	7 004 000 00	0.00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	Defensesi Pirelmesi			7,004,000,00	L/COANATA
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.981.000,00	7.981.000,00	7.981.000,00	·	Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.981.000,00	PENGGAW
7.01.01.2.06.00	002 Penyediaan Peralatan dan F				T		T						T T				1	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13.350.000,00	13.350.000,00	13.350.000,00		Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			13.350.000,00	PENGGAW
7.01.01.2.06.00	Penyediaan Bahan Logistik																	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	K			1 Paket	1 Paket	25.600.000,00	25.600.000,00	25.600.000,00		Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.600.000,00	PENGGAW
7.01.01.2.06.00	005 Penyediaan Barang Cetakar																	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	75.594.600,00	75.594.600,00	75.594.600,00		Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			75.594.600,00	NECAMATA PENGGAW
7.01.01.2.06.00	006 Penyediaan Bahan Bacaan	dan Peraturan Perundang-undan	ngan															
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00		Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	KECAMATA PENGGAW
7.01.01.2.06.00	008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		T		T		T						1					
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	44.350.000,00	44.350.000,00	44.350.000,00		Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			44.350.000,00	PENGGAW
7.01.01.2.06.00	009 Penyelenggaraan Rapat Ko	ordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan			<u> </u>	42100000	12 Laporan	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0.00	Kah Dagisir	DANA ALOKASI -	Reformasi Birokrasi			51.000.000,00	KECAMAT
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Lapuran	12 Lapuran	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00		Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			31.000.000,00	PENGGAW
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	, -				-	-	19.876.000,00	19.876.000,00	19.876.000,00	0,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		19.876.000,00	PENGGAW
7.01.01.2.08.00	Penyediaan Jasa Surat Men	yurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1			1 Laporan	1 Laporan	5.632.000,00	5.632.000,00	5.632.000,00		Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			5.632.000,00) KECAMATA PENGGAW
7.01.01.2.08.00	002 Penvediaan Jasa Komunika	si, Sumber Daya Air dan Listrik												Publik Berkualitas		<u> </u>		1
	- Onyouraan Jasa Nomunika	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.000.000,00	KECAMATA PENGGAW
7.01.01.2.08.00	004 Penyediaan Jasa Pelayanar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.244.000,00	8.244.000,00	8.244.000,00		Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			8.244.000,00	KECAMAT. PENGGAW
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	68.800.000,00	68.800.000,00	68.800.000,00	0,00		-	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		68.800.000,00) KECAMAT. PENGGAW

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA					CAFAIAN NINEKJA DAN	KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERAN DAEF
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	OPD TAHUN 2024	TARG SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRI NASIONAL	DAERAH	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANG JAW
2	3	4	5	6	7	SEBELUM 8	SESUDAH 9	10	APBD 2025	12	13	14	15	16	17	18	19	20	2
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemelihara	l n, Biaya Pemeliharaan, dan Paj	 jak Kendaraan P	Perorangan Dinas	atau Kendaraan D	l Dinas Jabatan													
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau				4 Unit	4 Unit	48.800.000,00	48.800.000,00	48.800.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Karya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			48.800.000,00) KECAMAT PENGGAV
		Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan										Penggawa, Semua Kel/Desa	, , ,		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				LINGOA
		dibayarkan Pajaknya													dan Pelayanan Publik Berkualitas				
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Ge	dung Kantor dan Bangunan Lain	nnya																
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Karya	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			20.000.000,00	KECAMA PENGGA
		Dipelihara/Direhabilitasi										Penggawa, Semua Kel/Desa	ı		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				
															dan Pelayanan Publik Berkualitas				
	KECAMATAN PESISIR UTA	RA	1					846.100.000,00	885.697.100,00	·	39.597.100,00							846.100.000,00	
	UNSUR KEWILAYAHAN							846.100.000,00	885.697.100,00	·	39.597.100,00							846.100.000,00	
01	PROGRAM PENUNJANG	Cakupan Pemenuhan				90 %	90 %	846.100.000,00 803.425.000,00	885.697.100,00 843.022.100,00		39.597.100,00							846.100.000,00 803.425.000,00	
01.01	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penunjang Kinerja Perangkat Daerah				90 %	90 %	803.425.000,00	843.022.100,00	843.022.100,00	0,00							803.423.000,00	
01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran,				100 %	100 %	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00)		-	dan Pelayanan	Aparatur		5.000.000,00	KECAM. PESISIF
	Kinerja Perangkat Daerah	& Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu													Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				
															dan Pelayanan Publik Berkualitas				
01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan I	aporan Capaian Kinerja dan Ikht	tisar Realisasi K	Kinerja SKPD															
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			5.000.000,00	KECAM PESISIF
		Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan										Utara, Semua Kel/Desa			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													dan Pelayanan Publik Berkualitas				
01.01.2.02	Administrasi Keuangan	Persentase Pelaporan				100 %	100 %	521.600.000,00	561.300.000,00	561.300.000,00	39.700.000,00)		-		Aparatur		521.600.000,00	KECAM
	Perangkat Daerah	Keuangan Tepat Waktu													dan Pelayanan Publik Berkualitas				PESISI
															Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjang	n ASN													r doint borndained				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan				14 Orang/b	14 Orang/b	516.100.000,00	555.800.000,00	555.800.000,00	39.700.000,00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			516.100.000,00	KECAM
		Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				ulan	ulan					Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				PESISIF
												Rei/Desa			dan Pelayanan Publik Berkualitas				
.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan I	l aporan Keuangan Akhir Tahun S	L SKPD																
		Jumlah Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi			2.500.000,00	KECAM/
		Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan										Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				PESISIR
		Keuangan Akhir Tahun SKPD										1			dan Pelayanan Publik Berkualitas				
.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan I	ı aporan Keuangan Bulanan/ Triw	ulanan/ Semest	teran SKPD															
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			2.000.000,00	KECAM PESISIF
		Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi										Utara, Semua Kel/Desa			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				1 20.0
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana													dan Pelayanan Publik Berkualitas				
01.01.2.02.0008	Panyusunan Palanoran dan A	n/Semesteran SKPD nalisis Prognosis Realisasi Angg	raran																
01.01.2.02.0000	T enyusunan r elaporan uan r	Jumlah Dokumen Pelaporan	garan			1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	-	Reformasi Birokrasi			1.000.000,00	KECAM
		dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										Barat, Pesisir Utara, Semua	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas				PESISIF
												Kel/Desa			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
01.01.2.06	Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan				100 %	100 %	148.902.750,00	173.800.100,00	173.800.100,00	24.897.350,00)		-		Aparatur		148.902.750,00	KECAM
	Perangkat Daerah	Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja													dan Pelayanan Publik Berkualitas	,			PESISIR
															Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				
01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instal	l Isi	1					<u> </u>	<u> </u>		<u>l</u>	1			. Some Dorndantas				
	Listrik/Penerangan Bangunan																		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				1 Paket	1 Paket	6.141.000,00	6.141.000,00	6.141.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			6.141.000,00	KECAM.
		Bangunan Kantor yang Disediakan										Utara, Semua Kel/Desa	OWOW (DAO)		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				T LOIGII
															dan Pelayanan Publik Berkualitas				
01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Pe	lengkapan Kantor																	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21.629.000,00	46.629.000,00	46.629.000,00	25.000.000,00	Barat, Pesisir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			21.629.000,00	KECAM PESISIF
		Disediakan										Utara, Semua Kel/Desa			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				
															dan Pelayanan Publik Berkualitas				
01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik K																		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			25.000.000,00	KECAM PESISIF
												Kecamatan, Semua Kel/Desa			Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi				
															dan Pelayanan Publik Berkualitas				
_	Penyediaan Barang Cetakan																		
.01.01.2.06.0005		Jumlah Paket Barang	1			12 Paket	12 Paket	21.030.000,00	21.030.000,00	21.030.000,00	0,00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			21.030.000,00	KECAM/ PESISIR
.01.01.2.06.0005		Cetakan dan Penggandaan										Barat, Pesisir			Dublic Dealer				I LOIGII
01.01.2.06.0005		Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan										Utara, Semua Kel/Desa	OWOW (DAO)		Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan				T LOIGH

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET REALISAS	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN KE	ERANGKA PENDANAAN					MAJU RENCANA HUN 2026	PERANGKAT
ког	DDE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENJA OPI	TARGET RENJA	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Partambah/Parkurana (40.42)	SUMBER DANA	PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	DACILINDIKATIF (D)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		REGIATAN		OPD TAHUN 202	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	JAWAB
2	2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	12	13 14	15	16 17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.100,00	12.000.100,00	100,00 Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
7.01.01.2.0	06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			11 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			18.000.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
7.01.01.2.0	06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koor	ı dinasi dan Konsultasi SKPD					I		L	-						
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	45.102.750,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-102.750,00 Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			45.102.750,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
7.01.01.2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung			100 %	100 %	28.534.000,00	28.534.000,00	28.534.000,00	0,00		- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		28.534.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
7.01.01.2.0	08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menye	urat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	12 Laporan	3.533.000,00	3.533.000,00	3.533.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.533.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
7.01.01.2.0	08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi	1			Т			T			Т					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.600.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
7.01.01.2.0	08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan da	1			41	41	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0.00 Keb Besisis	DANA ALOKASI	- Reformasi Birokrasi			10.000.000,00	KECAMATAN
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	PESISIR UTARA
7.01.01.2.0	08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan l	Jmum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	8.401.000,00	8.401.000,00	8.401.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.401.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam Kondisi Baik			100 %	100 %	99.388.250,00	74.388.000,00	74.388.000,00	-25.000.250,00		- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		99.388.250,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
7.01.01.2.0	09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaa	an, Biaya Pemeliharaan, dan Paja	ak Kendaraan Perorangan Dir	nas atau Kendaraan D	inas Jabatan											
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			3 Unit	1 Unit	50.549.750,00	50.410.000,00	50.410.000,00	-139.750,00 Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.549.750,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
7.01.01.2.09	09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Ge	dung Kantor dan Bangunan Lain	nya							T						
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	12 Unit	42.900.000,00	17.900.000,00	17.900.000,00	-25.000.000,00 Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			42.900.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
7.01.01.2.09	09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sa	rana dan Prasarana Gedung Kan Jumlah Sarana dan	itor atau Bangunan Lainnya		1 Unit	12 Unit	5.938.500,00	6.078.000,00	6.078.000,00	139.500,00 Kab. Pesisir	DANA ALOKASI	- Reformasi Birokrasi			5.938.500,00	KECAMATAN
			Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			TOTIL	12 Utili	5.938.500,00	6.076.000,00	6.078.000,00	Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.936.500,00	PESISIR UTARA
7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			100 %	-	42.675.000,00	42.675.000,00	42.675.000,00	0,00					42.675.000,00	
7.01.02.2.0		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			100 %	-	42.675.000,00	42.675.000,00	42.675.000,00	0,00		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		42.675.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
7.01.02.2.0	01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiat	an Pemerintahan di Tingkat Keca Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	amatan		1 Dokumen	1 Dokumen	42.675.000,00	42.675.000,00	42.675.000,00	0,00 Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	- Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			42.675.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA
		KECAMATAN LEMONG						825.299.800,00	863.400.000,00	863.400.000,00	38.100.200,00					1.033.199.800,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN						825.299.800,00	863.400.000,00	863.400.000,00	38.100.200,00					1.033.199.800,00	
7.01		RECAMATAN PENUNUANG						825.299.800,00	863.400.000,00	863.400.000,00	38.100.200,00					1.033.199.800,00	
7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	782.104.800,00	820.205.000,00	820.205.000,00	207.900.000,00					990.004.800,00	

	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN I	KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKA DAERAH
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024		ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA —		ORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUN JAWAB
					2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	,			NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.319.750,00	5.311.950,00	5.311.950,00	-7.800,00		-		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	•		5.319.750,00	KECAMATAN LEMONG
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan L	 aporan Capaian Kinerja dan Ikh	tisar Realisasi k	_ Kinerja SKPD															
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.319.750,00	5.311.950,00	5.311.950,00	-7.800,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.319.750,00	KECAMATAN LEMONG
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	501.914.450,00	540.014.450,00	540.014.450,00	38.100.000,00		-		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		709.814.450,00	KECAMATAN LEMONG
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjang	L an ASN																	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	495.300.000,00	533.400.000,00	533.400.000,00	38.100.000,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			703.200.000,00	KECAMATAN LEMONG
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan L	ı aporan Keuangan Akhir Tahun S	SKPD		1														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD)			1 Laporan	1 Laporan	2.568.750,00	2.568.750,00	2.568.750,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.568.750,00	KECAMATAN LEMONG
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan L	<u> </u> aporan Keuangan Bulanan/ Triw	 vulanan/ Semes	teran SKPD															
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.769.900,00	2.769.900,00	2.769.900,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.769.900,00	KECAMATAN LEMONG
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan A	nalisis Prognosis Realisasi Angg	garan																
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.275.800,00	1.275.800,00	1.275.800,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.275.800,00	KECAMATAN LEMONG
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	161.077.600,00	161.085.600,00	161.085.600,00	8.000,00		-		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		161.077.600,00	KECAMATAN LEMONG
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instal	asi	1		1	'		<u>'</u>										1	
	Listrik/Penerangan Bangunan	1		_	ı		T						T T				T		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.342.000,00	26.495.200,00	26.495.200,00	18.153.200,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.342.000,00	KECAMATAN LEMONG
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Pe	1			1		1											T	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.495.200,00	8.350.000,00	8.350.000,00	-18.145.200,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			26.495.200,00	KECAMATAN LEMONG
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik K					1 Balan	I a Balan	05 450 000 00	05 450 000 00	05.450.000.00	0.00	Kal. Basisis	DANA ALOKAGI		B. (annual Binton)		<u> </u>	05.450.000.00	1/500000
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.150.000,00	25.150.000,00	25.150.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.150.000,00	KECAMATAN LEMONG
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	1																	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.990.400,00	15.990.400,00	15.990.400,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			15.990.400,00	KECAMATAN LEMONG
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan da	an Peraturan Perundang-undang	gan		1	1		1				T			<u> </u>				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI - UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	KECAMATAN LEMONG
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	35.100.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			35.100.000,00	KECAMATAN LEMONG
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koor	1			1														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			38.000.000,00	KECAMATAN LEMONG

V007	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK	FRANKA	AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGK DAERAI
KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024		ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA —	PRIOR		SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGI JAWAB
					2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	40		45	NASIONAL	DAERAH	10	10		0.1
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	5	6	7	-	-	31.453.000,00	31.453.000,00	12 31.453.000,00	0,00	14	15		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	- 18	19	31.453.000,00	KECAMATAN LEMONG
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Meny	urat						1											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.394.000,00	4.394.000,00	4.394.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.394.000,00	KECAMATAI LEMONG
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi	Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.000.000,00	KECAMATA LEMONG
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan d	an Perlengkapan Kantor																	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	KECAMATA LEMONG
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jmum Kantor																	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	11.059.000,00	11.059.000,00	11.059.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.059.000,00	KECAMATA LEMONG
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	82.340.000,00	82.340.000,00	82.340.000,00	0,00		-		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		82.340.000,00	KECAMATA LEMONG
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemelihara	an, Biaya Pemeliharaan, dan Paj	ak Kendaraan	Perorangan Dinas	s atau Kendaraan D														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	51.500.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			51.500.000,00	KECAMAT/ LEMONG
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Ge	dung Kantor dan Bangunan Lain	inya																
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.840.000,00	30.840.000,00	30.840.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			30.840.000,00	KECAMAT, LEMONG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	43.195.000,00	43.195.000,00	43.195.000,00	0,00							43.195.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	43.195.000,00	43.195.000,00	43.195.000,00	0,00		-		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		43.195.000,00	KECAMAT, LEMONG
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegia	an Pemerintahan di Tingkat Kec Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	amatan			1 Dokumen	1 Dokumen	43.195.000,00	43.195.000,00	43.195.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			43.195.000,00	KECAMAT. LEMONG
	KECAMATAN PULAU PISAN	I IG						801.900.000,00	838.200.000,00	838.200.000,00	36.300.000,00							802.119.500,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN							801.900.000,00	838.200.000,00	838.200.000,00	36.300.000,00							802.119.500,00	
7.01 7.01.01	PROGRAM PENUNJANG	Cakupan Pemenuhan				90 %	90 %	801.900.000,00 757.300.350,00	838.200.000,00 792.275.000,00	838.200.000,00 792.275.000,00	36.300.000,00							802.119.500,00 757.519.850,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penunjang Kinerja Perangkat Daerah																	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		5.000.000,00	KECAMAT. PULAU PIS
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan I	aporan Capaian Kinerja dan Ikht T	tisar Realisasi	Kinerja SKPD															
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	KECAMAT PULAU PIS
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	477.400.750,00	513.700.000,00	513.700.000,00	36.299.250,00		-		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		477.400.750,00	KECAMAT PULAU PI
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjang	an ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	471.900.750,00	508.200.000,00	508.200.000,00	36.299.250,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			471.900.750,00	KECAMA PULAU P

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN KE	RANGKA PENDANAAN					VELONDOY		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGK
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PR	IORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGI JAWAB
	RESIATAN		OPD	17411011 2020	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	Dertamban/Derkarang (10-12)	LONAGI	OUNDER DATA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	TAGGINDINATII (KP)	VAVAL
2	3	4 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	6	7	8 1 Laporan	9 1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	. 16	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	18	19	20 2.500.000,00	KECAMATAN PULAU PISAI
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan I	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana		steran SKPD		2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	KECAMATAN PULAU PISA
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan A	_l \nalisis Prognosis Realisasi Ang	 garan																
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	KECAMATA PULAU PISA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja				100 %	100 %	188.848.100,00	184.676.000,00	184.676.000,00	-4.172.100,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		188.848.100,00	KECAMATA PULAU PIS
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instal				1													•	
	Listrik/Penerangan Bangunar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.195.700,00	6.085.000,00	6.085.000,00	-110.700,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.195.700,00	KECAMATA PULAU PIS
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Pe	erlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan			1	2 Paket	2 Paket	28.672.000,00	25.025.000,00	25.025.000,00	-3.647.000,00	Koh Pogisir	DANA ALOKASI		Reformasi Birokrasi			28.672.000,00	KECAMAT
		Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	28.672.000,00	25.025.000,00	25.025.000,00	-3.647.000,00	Rab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			28.672.000,00	PULAU PI:
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik K	antor Jumlah Paket Bahan Logistik	<u> </u>			4 Balast	4 Police	24 200 000 00	04 000 000 00	04 000 000 00	200 000 00	Kah Dasisis	DANA ALOKACI		Defermed Birches			24 222 222 22	KECAMAT
		Jumian Paket Banan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.300.000,00	24.620.000,00	24.620.000,00	320.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.300.000,00	PULAU P
01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	T				T	T					1	T		1-, ,-, ,				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	23.480.400,00	25.021.000,00	25.021.000,00	1.540.600,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			23.480.400,00	KECAMAT PULAU PI
.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan d	an Peraturan Perundang-undang Jumlah Dokumen Bahan	gan	1	1	12	12	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0.00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI		Reformasi Birokrasi			7.200.000,00	KECAMAT
		Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				Dokumen	Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.250.000,00	0,00	Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	UMUM (DAU)		dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.250.000,00	PULAU PI
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	24.000.000,00	27.725.000,00	27.725.000,00	3.725.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.000.000,00	KECAMAT PULAU PI
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koo	rdinasi dan Konsultasi SKPD													T ublik berkualitas				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			75.000.000,00	KECAMAT PULAU PIS
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung				100 %	100 %	43.631.000,00	46.899.000,00	46.899.000,00	3.268.000,00				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		43.631.000,00	KECAMAT PULAU PIS
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Meny	urat			1														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.133.000,00	5.133.000,00	5.133.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.133.000,00	KECAMAT PULAU PI
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikas	, Sumber Daya Air dan Listrik	1	1			1 1					1						1	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.800.000,00	KECAMAT PULAU PI
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan d	an Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			25.000.000,00	KECAMAT PULAU PI

7.01.01.2.09 7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARG	ET 2025 SESUDAH	DVDD 0005	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA —	PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGU JAWAB
	3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jasa Pelayanan Umum		6	2024	SEBELUM	SESUDAH	DI/DD coop									(,	
	Daerah Penunjang Urusan	Jasa Pelayanan Umum	5	6	_			RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL DAERAH				
	Daerah Penunjang Urusan	Jasa Pelayanan Umum			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 17	18	19	20	21
	Daerah Penunjang Urusan					1 Laporan	1 Laporan	8.698.000,00	11.966.000,00	11.966.000,00	3.268.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			8.698.000,00	KECAMATAI PULAU PISA
7.01.01.2.09.0001		Persentase Barang Milik Daerah yang dalam Kondisi Baik				100 %	100 %	42.420.500,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-420.500,00		-	Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi	Aparatur		42.640.000,00	KECAMATAI PULAU PISA
	Penyediaan Jasa Pemelihara	an, Biaya Pemeliharaan, dan Pa	ijak Kendaraan F	Perorangan Dina	as atau Kendaraan D	Dinas Jabatan								dan Pelayanan Publik Berkualitas				
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	37.250.000,00	37.250.000,00	37.250.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			37.250.000,00	KECAMATA PULAU PIS
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Ge	edung Kantor dan Bangunan Lair	nnya	•														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	780.500,00	250.000,00	250.000,00	-530.500,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	KECAMATA PULAU PIS
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sa	arana dan Prasarana Gedung Ka	ntor atau Bangu	unan Lainnya						,								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	4.390.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	110.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.390.000,00	KECAMATA PULAU PIS
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100 %	100 %	44.599.650,00	45.925.000,00	45.925.000,00	0,00						44.599.650,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	44.599.650,00	45.925.000,00	45.925.000,00	1.325.350,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur		44.599.650,00	KECAMAT PULAU PIS
														Publik Berkualitas				
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegia	tan Pemerintahan di Tingkat Ked	camatan			T	1.5. 1					T.,	T					
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	44.599.650,00	45.925.000,00	45.925.000,00	1.325.350,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			44.599.650,00	PULAU PI
	BADAN KESATUAN BANGS	SA DAN POLITIK						4.378.615.630,00	5.504.306.760,00	4.954.306.760,00	575.691.130,00		1	1			4.816.477.193,00	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							4.378.615.630,00	5.504.306.760,00	4.954.306.760,00	575.691.130,00						4.816.477.193,00	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							4.378.615.630,00	5.504.306.760,00	4.954.306.760,00	575.691.130,00						4.816.477.193,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				92,50 Persen	92,50 Persen	2.196.978.500,00	2.622.120.100,00	2.542.120.100,00	219.697.850,00						2.416.676.350,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				92,50 Persen	92,50 Persen	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		13.640.000,00	BADAN KE BANGSA D POLITIK
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Peren	 ncanaan Perangkat Daerah																
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.140.000,00	BADAN KE BANGSA D POLITIK
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan [Dokumen RKA-SKPD										l						
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	BADAN KE BANGSA I POLITIK
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				92,50 Persen	92,50 Persen	1.399.338.500,00	1.727.120.100,00	1.727.120.100,00	327.781.600,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		1.539.272.350,00	BADAN KE BANGSA I POLITIK
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjang	an ASN												Publik Delkualitas				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/b ulan	15 Orang/b ulan	1.394.338.500,00	1.722.120.100,00	1.722.120.100,00	327.781.600,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			1.533.772.350,00	BADAN KE BANGSA I POLITIK
3.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Ponyusunas I	Laporan Keuangan Akhir Tahun	SKPD									<u> </u>		Publik Berkualitas				
		Jumlah Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0.00	Kab. Pesisir	DANA ALOKASI -	Reformasi Birokrasi			2.200.000,00	BADAN KE
2.04.04.2.02.0007	Moordingsi dan Danwawan I	Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		otoron CVDD								Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	UMUM (DAU)	dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				BANGSA POLITIK
8.01.01.2.02.0007	koordinasi dan Penyusunan L	Laporan Keuangan Bulanan/ Triv Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	vuianan/ Semes	Steran SKPD		4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan			2.200.000,00	BADAN K BANGSA POLITIK

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET REALISASI	CAFAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN K	ERANGKA PENDANAAN					WEI ONE		AN MAJU RENCANA ΓΑΗUN 2026	PERANGKAT
NO KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENJA OPD	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	SET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI S	SUMBER DANA	PRI	ORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	REGIATAN		OPD TAHON 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	bertamban/berkurang (10-12)	LORASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	FAGO INDIKATIF (KP)	JAWAD
1 2	3	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 6	7	8 1 Dokumen	9 1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Barat, Tenga	it, Pesisir Ugah, Pasar	DANA ALOKASI JMUM (DAU)	-	17 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	18	19	1.100.000,00	BADAN KESATUA BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06	Administrasi Umum	Persentase pemenuhan			92,50 Boroon	92,50 Persen	300.628.000,00	344.920.000,00	264.920.000,00	-35.708.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan	Aparatur		330.690.800,00	BADAN KESATUA BANGSA DAN
	Perangkat Daerah	sarana dan prasarana pendukung kinerja			Persen	Persen								Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas				POLITIK
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instala																	
	Listrik/Penerangan bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	3.781.000,00	5.295.000,00	5.295.000,00	Barat, Kecar	Pesisir Dut, Semua Uamatan, ua Kel/Desa	DANA ALOKASI JMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.159.100,00	BADAN KESATUA BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Ka	antor												1 doint bertaantas				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	27.100.000,00	72.700.000,00	72.700.000,00	Kecar	Pesisir Dut, Semua unatan, ua Kel/Desa	DANA ALOKASI JMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			29.810.000,00	BADAN KESATUA BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan d				1											T		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	58.747.000,00	40.925.000,00	40.925.000,00	Kecar	Pesisir Dut, Semua Uamatan, ua Kel/Desa	Dana Alokasi Jmum (Dau)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			64.621.700,00	BADAN KESATUA BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan da	an Peraturan Perundang-undang Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	gan		12 Dokumen	12 Dokumen	24.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	Kecar	Pesisir Dut, Semua unatan, ua Kel/Desa	DANA ALOKASI JMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			26.400.000,00	BADAN KESATUA BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	T			T	T]	_			T				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	12 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kecar	Pesisir Dut, Semua Uamatan, ua Kel/Desa	Dana Alokasi Jmum (Dau)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.200.000,00	BADAN KESATUA BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koor	1			401	101	405 000 000 00	400,000,000,00	00 000 000 00	05 000 000 00 1/41	Description D	2444 41 01/401		B. Comment Blackman			404 500 000 00	BABANIKEGATUA
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	165.000.000,00	160.000.000,00	80.000.000,00	Kecar	Pesisir It, Semua amatan, ua Kel/Desa	DANA ALOKASI JMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			181.500.000,00	BADAN KESATUA BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung			92,50 Persen	92,50 Persen	385.612.000,00	440.180.000,00	440.180.000,00	54.568.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		424.173.200,00	BADAN KESATUA BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi,	<u> </u>																
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	208.800.000,00	208.800.000,00	208.800.000,00	Kecar	Pesisir D it, Semua U amatan, ua Kel/Desa	Dana Alokasi Jmum (Dau)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			229.680.000,00	BADAN KESATUA BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan da	an Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	173.988.000,00	224.000.000,00	224.000.000,00	Kecar	Pesisir Dut, Semua Uamatan, ua Kel/Desa	DANA ALOKASI JMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			191.386.800,00	BADAN KESATUA BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan l	1																
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	2.824.000,00	7.380.000,00	7.380.000,00	Kecar	Pesisir It, Semua amatan, ua Kel/Desa	DANA ALOKASI JMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.106.400,00	BADAN KESATUA BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik			92,50 Persen	92,50 Persen	99.000.000,00	97.500.000,00	97.500.000,00	-1.500.000,00			•	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		108.900.000,00	BADAN KESATUA BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaa	l an, Biaya Pemeliharaan, dan Paj 	ı l jak Kendaraan Perorangan Dina	as atau Kendaraan D	I inas Jabatan													
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	78.500.000,00	78.500.000,00	Kecar	Pesisir Dut, Semua Uamatan, ua Kel/Desa	DANA ALOKASI JMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			88.000.000,00	BADAN KESATUA BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sal	rana dan Prasarana Gedung Kar	ntor atau Bangunan Lainnya		211-2	21154	40,000,000,00	40,000,000,00	40.000.000.00	202	Posisi-	DANIA ALOKAC:		Poformani Pina			00 000 000 5	PADANUECATU
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit	3 Unit	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	Kecar	Pesisir Dut, Semua Umanatan, ua Kel/Desa	DANA ALOKASI JMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.900.000,00	BADAN KESATUA BANGSA DAN POLITIK
2. 8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan			51,00 Persen	51,00 Persen	983.000.000,00	800.000.000,00	763.000.000,00	98.300.000,00							1.081.300.000,00	

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CAPAIAN KINERJA DAN I	KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCA TAHUN 2026	PER	RANGKAT
O KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PR	RIORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET PAGU INDIKA	PENA	DAERAH IANGGUNG JAWAB
	NEGIATAN		OPD	1711011 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025		LONASI	SOMBLIX DAIVA	NASIONAL	DAERAH			,	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	5	6	7	51,00 Persen	9 51,00 Persen	983.000.000,00	11 800.000.000,00	763.000.000,00	-220.000.000,00	14	-	16	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	18 Masyarakat	19 20 1.081.30		
8.01.02.2.01.0003		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	100 Orang	125.000.000,00	100.000.000,00	65.000.000,00	-60.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat		137.50	0.000,00 BADAN BANGS POLITIH	SA DAN
8.01.02.2.01.0004		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				35 Orang	35 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat		6.60	0.000,00 BADAN BANGS POLITIF	SA DAN
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evalu	Jumlah Laporan di Bidang Ideo Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	ologi Wawasar	Kebangsaan, B	ela Negara, Karakte	er Bangsa, Pen 2 Laporan	nbauran Keban 2 Laporan	gsaan, Bineka Tunggal Ika dan Se	ejarah Kebangsaan 0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat		2.20	0.000,00 BADAN BANGS POLITIF	SA DAN
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka				40 Orang	40 Orang	700.000.000,00	700.000.000,00	698.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		770.00	0.000,00 BADAN BANGS POLITIE	SA DAN
8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada l	Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		165.00	0.000,00 BADAN BANGS POLITIK	SA DAN
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Masyarakat Dalam Pemilu				84,92 Persen	84,92 Persen	466.637.130,00	482.186.660,00	449.686.660,00	46.663.713,00						513.30	0.843,00	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta				84,92 Persen	84,92 Persen	466.637.130,00	482.186.660,00	449.686.660,00	-16.950.470,00		-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	513.30	0.843,00 BADAN BANGS POLITIF	SA DAN
8.01.03.2.01.0003		 ang Pendidikan Politik, Etika Bud	laya Politik, Pe	 ningkatan Demo	krasi, Fasilitasi Kele	mbagaan Pem	 nerintahan, Per	 wakilan dan Partai Politik, Pemiliha	an Umum/Pemilihan Umum Ko	 epala Daerah, serta Pemantauan	Situasi Politik di Daerah								
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				150 Orang	150 Orang	458.637.130,00	382.186.660,00	382.186.660,00	-76.450.470,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		504.50	0.843,00 BADAN BANGS POLITIF	SA DAN
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bio	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	daya Politik, Pe	eningkatan Demo	okrasi, Fasilitasi Kele	embagaan Pen		rwakilan dan Partai Politik, Pemilih	an Umum/Pemilihan Umum k	T	n Situasi Politik di Daerah 61.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		6.60	0.000,00 BADAN BANGS POLITIF	SA DAN
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Eval	uasi dan Pelaporan di Bidang Pel Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	ndidikan Politik	s, Etika Budaya F	Politik, Peningkatan I	Demokrasi, Fa	silitasi Kelemb	agaan Pemerintahan, Perwakilan o	dan Partai Politik, Pemilihan U		aerah, serta Pemantauan Situasi P -2.000.000,00	1	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		2.20	0.000,00 BADAN BANGS POLITI	SA DAN
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif				75,00 Persen	75,00 Persen	133.000.000,00	1.250.000.000,00	987.500.000,00	13.300.000,00						146.30	0.000,00	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				75,00 Persen	75,00 Persen	133.000.000,00	1.250.000.000,00	987.500.000,00	854.500.000,00		-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	146.30	0.000,00 BADAN BANGS POLITIK	SA DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB	TARGET AKHIR PERIODE	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA					CAPAIAN KINERJA DAN K	AEKANGKA PENDANAAN					KELOMPOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
NO	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN	RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	OPD TAHUN 2024	IARG	ET 2025	DVDD 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	DVDD DEDUDALIAN 2025	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA -		ORITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	SEBELUM 8	SESUDAH 9	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	13	14	15	NASIONAL 16	DAERAH 17	18	19	20	21
<u>'</u>			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	100 Orang	125.000.000,00	1.150.000.000,00	920.000.000,00	795.000.000,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			137.500.000,00	BADAN KESATUA BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bio	dang Pendaftaran Ormas, Pemb	perdayaan Orma	as, Evaluasi dan I	Mediasi Sengketa O)rmas, Pengaw	asan Ormas da	an Ormas Asing di Daerah				1							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				35 Orang	35 Orang	6.000.000,00	100.000.000,00	67.500.000,00	61.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.600.000,00	BADAN KESATU BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Eval	<u> </u>	endaftaran Orm	nas, Pemberdaya	an Ormas, Evaluasi		T	s, Pengawasan Ormas dan Ormas				1	T T			T	T	Γ	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.200.000,00	BADAN KESATU, BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				67,50 Persen	67,50 Persen	133.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	13.300.000,00							146.300.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama				67,50 Persen	67,50 Persen	133.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	-103.000.000,00		-		Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Masyarakat		146.300.000,00	BADAN KESATU/ BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bid	ang Ketahanan Ekonomi, Sosia	ıl, Budaya dan F	asilitasi Pencega	ahan Penyalagunaar	n Narkotika, Fa	silitasi Kerukur	nan Umat Beragama dan Penghay	at Kepercayaan di Daerah			1							
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	100 Orang	125.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	-95.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			137.500.000,00	BADAN KESATU/ BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bio		 al, Budaya dan f	 Fasilitasi Penceg	 ahan Penyalagunaa	 an Narkotika, Fa	asilitasi Keruku	 unan Umat Beragama dan Pengha	yat Kepercayaan di Daerah										
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				35 Orang	35 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			6.600.000,00	BADAN KESATU/ BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Eval	uasi dan Pelaporan di Bidang K Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		omi, Sosial, Buda	aya dan Fasilitasi Pe	2 Laporan	yalagunaan Na 2 Laporan	arkotika, Fasilitasi Kerukunan Uma	t Beragama dan Penghayat Ke	percayaan di Daerah 0,00	-2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			2.200.000,00	BADAN KESATU BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Koordinasi dan Peran Lembaga dan Elemen Masyarakat dalam Pencegahan terjadinya Konflik Sosial				75,00 Persen	75,00 Persen	466.000.000,00	250.000.000,00	182.000.000,00	46.600.000,00							512.600.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Koordinasi, Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				75,00 Persen	75,00 Persen	466.000.000,00	250.000.000,00	182.000.000,00	-284.000.000,00		-		Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Masyarakat		512.600.000,00	BADAN KESATU/ BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bid	1	Sama Intelijen, P	emantauan Oran	ng Asing, Tenaga Ke T	1	1	g, Kewaspadaan Perbatasan antai				T	I		1		<u> </u>		
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				200 Orang	200 Orang	250.000.000,00	100.000.000,00	71.500.000,00	-178.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			2/5.000.000,00	BADAN KESATU/ BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bio	1	Sama Intelijen, F	Pemantauan Ora	ng Asing, Tenaga K	1	1	ng, Kewaspadaan Perbatasan anta											
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di				70 Orang	70 Orang	12.000.000,00	150.000.000,00	110.500.000,00	98.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			13.200.000,00	BADAN KESATU/ BANGSA DAN POLITIK

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN					CA	APAIAN KINERJA DAN	N KERANGKA PENDANAAN					KEI OMBOK		AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT
NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA	TARG	ET 2025		PAGU INDIKATIF (R	lp)		Bertambah/Berkurang (10-1) IOKASI	SUMBER DANA	PI	RIORITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		REGIATAN		OPD	TAHUN 2023	2024	SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKP	PD PERUBAHAN 2025	Bertamban/Berkurang (10-1.	2) LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGO INDIKATIF (RP)	JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00		0,00	0,00	-4.000.000,	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			4.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordina	si Pimpinan Daerah Kabupaten/	Kota		•			·									•			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	200.000.000,00		0,00	0,00	-200.000.000,	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			220.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		•	JUML	A H	•	<u> </u>	•	'	896.573.116.916,00	904.304.806.00	01,00	862.454.977.465,0	-34.118.139.451,	00	, '		•			2.719.964.251.899,00	

BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan, sub kegiatan perangkat Daerah dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan. Perubahan yang terjadi ini disebabkan oleh dinamika yang berkembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan RKPD Tahun 2025 ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara proses serta dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2025.

Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan pada pelaksanaan sisa tahun anggaran 2025 yang memusatkan pada pencapaian Tujuan, Sasaran, Prioritas dan Tema Pembangunan Tahun 2025 selain masih mengacu pada Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat untuk tahun kedua RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 namun menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rangakian Pilkada 2024.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program, kegiatan, sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah tersebut serta demi terwujudnya sinergitas dan sinkronisasi kinerja pembangunan dari semua pemangku kepentingan, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1) Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025;
- 2) Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 sebagai landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 3) Masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan diharapkan dapat berperan serta secara aktif dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai mitra ataupun sebagai salah satu unsur pemberi masukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program, kegiatan, sub kegiatan;
- 4) Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan melalui penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan melalui upaya pengendalian internal dan melaporkannya secara triwulan kepada Bupati Pesisir Barat melalui Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pesisir Barat;

- 5) Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pesisir Barat melakukan evaluasi, verifikasi serta pengendalian terhadap laporan triwulanan hasil pemantauan dan pengendalian dari Kepala Perangkat Daerah dan apabila dari hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati Pesisir Barat melalui Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah dimaksud;
- 6) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnan kepada Bupati Pesisir Barat melalui Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pesisir Barat;
- 7) Pada akhir pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan/atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja terhadap target capaian kinerja tahunan dan lima tahunan serta target capaian keuangan pelaksanaan pembangunan melalui pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Tahun 2025 dan disampaikan dalam bentuk Laporan Ikhtisar Keuangan Tahunan serta dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP).

Demikianlah Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam rangka penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

BUPATI PESISIR BARAT,

DEDI IRAWAN